



WALI KOTA CIMAHI  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR 12 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA CIMAHI TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung sistem perencanaan pembangunan nasional serta untuk mewujudkan *good governance* Pemerintah Daerah Kota Cimahi harus mempunyai rencana pembangunan;
- b. bahwa pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, Pemerintah Daerah Kota Cimahi tidak memiliki Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga Pemerintah Daerah Kota Cimahi tidak dapat menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. bahwa Pemerintah Daerah Kota Cimahi pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 memerlukan pedoman perencanaan pembangunan, sehingga dapat menggantikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- d. bahwa Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, diperlukan sebagai dasar hukum yang mengikat untuk perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2026;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2023-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah yang masa jabatan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota berakhir Tahun 2022 yang akan digunakan oleh

Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

4. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi yang selanjutnya disingkat RTRW Kota adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang Kota Cimahi.
5. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah didasarkan atas KUA dan PPAS sebagai dasar penyusunan APBD.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
14. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal, barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang dan jasa.
16. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
18. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

20. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.

21. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.

#### Pasal 2

RPD memuat :

- a. tujuan pembangunan daerah;
- b. sasaran pembangunan daerah;
- c. strategi pembangunan daerah;
- d. arah kebijakan pembangunan daerah; dan
- e. keuangan daerah.

serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah, disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif, yang disusun dengan berpedoman pada dokumen perencanaan nasional dan provinsi.

#### Pasal 3

Sistematika RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- a. BAB I memuat pendahuluan;
- b. BAB II memuat gambaran umum kondisi daerah;
- c. BAB III memuat gambaran keungan daerah;
- d. BAB IV memuat permasalahan dan isu strategis daerah;
- e. BAB V memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran;
- f. BAB VI memuat strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah;
- g. BAB VII memuat kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah;
- h. BAB VIII memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- i. BAB IX memuat penutup.

#### Pasal 4

RPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 memiliki Isi beserta uraian yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

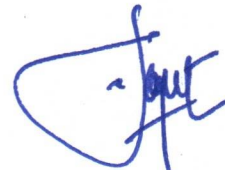
Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 01 Juli 2022

Plt. WALI KOTA CIMAHI,



NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi  
pada tanggal 01 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2022 NOMOR 659

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR 12 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA CIMAHI TAHUN 2023-2026

I. UMUM

Pemerintah Daerah Kota Cimahi tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, tidak memiliki Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga Pemerintah Daerah Kota Cimahi tidak dapat menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Untuk mendukung Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2024 serta untuk mendukung sistem perencanaan pembangunan nasional, Pemerintah Daerah Kota Cimahi harus mempunyai rencana pembangunan.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, Pemerintah Daerah Kota Cimahi menetapkan Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026.

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 disusun dengan maksud memberikan arah pembangunan tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 dengan memperhatikan perkembangan kondisi dan kebijakan provinsi dan nasional.

Tujuan dari penyusunan RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026, adalah sebagai berikut :

- a. Menjabarkan prioritas pembangunan kedalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program;
- b. Menetapkan indikator kinerja pembangunan daerah pada pembangunan jangka menengah sebagai tolok ukur kinerja pemerintah daerah;
- c. Mewujudkan perencanaan pembangunan Kota Cimahi yang sinergi dan terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat;

- d. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan pembangunan daerah jangka panjang dengan tujuan perencanaan pembangunan daerah jangka menengah di masa transisi;
- e. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) serta penganggaran tahunan Kota Cimahi; dan
- f. Menyediakan instrumen dalam pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 139



LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR : 12 TAHUN 2022  
TANGGAL : 01 JULI 2022  
TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA CIMAHI TAHUN 2023-2026

---

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Cimahi mulai dikenal pada tahun 1811 pada saat Gubernur Jenderal Willem Deandels membuat Jalan Anyer Penarukan, yaitu dengan dibuatnya pos penjagaan (logi) yang ditempatkan di Alun-Alun Cimahi sekarang. Pada tahun 1935, berdasarkan Lampiran *Staatsbald* Tahun 1935 Nomor 123, status Cimahi ditetapkan menjadi kecamatan.

Pasca Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Cimahi berfungsi sebagai pusat satelit militer untuk Bandung, yaitu menjadi Pusat Pendidikan Sesko seluruh angkatan bersenjata. Pada tahun 1962, dibentuk Kewedanaan Cimahi yang meliputi 5 (lima) kecamatan yaitu: Cimahi, Padalarang, Batujajar, Cipatat dan Cisarua. Selanjutnya Cimahi sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Bandung, setelah menunjukkan perkembangan yang mempunyai karakteristik perkotaan sehingga yang semula berstatus Kewedanaan Cimahi, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1975, Cimahi ditingkatkan statusnya menjadi Kota Administratif (Kotif) serta diresmikan pada tanggal 29 Januari 1976.

Cimahi merupakan kota administratif pertama di Jawa Barat dan ketiga di Indonesia setelah Kota Administratif Bitung di Sulawesi Utara dan Banjar Baru di Kalimantan Selatan. Kotif Cimahi terdiri dari 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Cimahi Selatan, Kecamatan Cimahi Tengah dan Kecamatan Cimahi Utara. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2001 tentang Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2001 Sampai Tahun 2010, Kotif Cimahi ditetapkan sebagai Kawasan Permukiman, Kawasan Militer dan Zona Industri.

Selama kurun waktu 24 tahun terbentuknya Kota Administratif Cimahi, keberadaannya telah menunjukkan perkembangan dan kemajuan yang cukup pesat sehingga menuntut pengelolaan serta pengendalian urusan bidang pemerintahan, pembangunan dan masyarakat yang lebih cepat dan terarah untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Perkembangan kota administratif tersebut ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat, besarnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta suasana kondusif dari masyarakat Kotif Cimahi.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 1990 tentang Pemekaran 24 Kotamadya/Kabupaten Menjadi 42 Kotamadya/Kabupaten, maka pada tahun 1998 Universitas Padjadjaran (Unpad) mengadakan studi kelayakan dimekarkannya Kabupaten Bandung menjadi 2 (dua) kabupaten yaitu: Kabupaten Soreang dan Kabupaten Padalarang, dengan Kotif Cimahi menjadi bagian dari Kabupaten Padalarang.

Undang-Undang Nomor 222 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi tonggak sejarah timbulnya tuntutan, desakan dan aspirasi dari berbagai komponen masyarakat, baik secara perorangan maupun kelompok, antara lain partai politik, forum, LSM, paguyuban, yayasan pendidikan, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk memperjuangkan status Kotif Cimahi menjadi daerah otonom yang memiliki kewenangan penuh dan sejajar dengan daerah otonom lainnya, mengingat Kotif Cimahi adalah kotif pertama dan tertua di Jawa Barat, yang tertinggal dengan kotif-kotif lainnya yang sudah menjadi kotamadya.

Sebagai persyaratan kelayakan suatu kota, masyarakat Kotif Cimahi mendesak dilakukannya studi kelayakan Kotif Cimahi menjadi kota oleh 5 (lima) perguruan tinggi yaitu : STPDN, Unpad, ITB, UPI dan Unjani. Hasil studi kelayakan tersebut merekomendasikan Kotif Cimahi layak menjadi suatu daerah otonom. Berdasarkan hasil perjuangan berbagai komponen masyarakat dan hasil studi kelayakan tersebut, maka diusulkan kepada Gubernur Jawa Barat untuk mendapatkan persetujuan DPRD Tingkat I

Jawa Barat. Dengan adanya persetujuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat selanjutnya diusulkan ke tingkat pusat yaitu Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah serta DPR RI.

Kotif Cimahi resmi menjadi Kota Cimahi melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi, yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 21 Juni 2001. Secara formal Kota Cimahi diresmikan pada tanggal 17 Oktober 2001 oleh Menteri Dalam Negeri, yang terdiri dari 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Cimahi Selatan, Kecamatan Cimahi Tengah, dan Kecamatan Cimahi Utara, serta 15 (lima belas) kelurahan yaitu Kelurahan Cibeber, Kelurahan Leuwigajah, Kelurahan Utama, Kelurahan Cibeureum, Kelurahan Melong, Kelurahan Baros, Kelurahan Karang Mekar, Kelurahan Setiamanah, Kelurahan Padasuka, Kelurahan Cigugur Tengah, Kelurahan Cimahi, Kelurahan Pasir Kaliki, Kelurahan Cibabat, Kelurahan Citeureup, dan Kelurahan Cipageran.

Sebagai daerah otonom, Kota Cimahi terus berkembang dan melaksanakan berbagai urusan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Pembangunan daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Perencanaan pembangunan daerah disusun melalui proses tertentu untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu.

Pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan perencanaan pembangunan yang disusun dengan mempertimbangkan kondisi, potensi, kemampuan sumber daya yang dimiliki daerah, serta peluang pengembangan ke depan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi memberikan arah pembangunan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025. Pencapaian visi dan misi pembangunan daerah jangka Panjang Kota Cimahi dilakukan secara bertahap melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai bentuk dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa masa jabatan Kepala Daerah Kota Cimahi berakhir pada tahun 2022, sedangkan Pemilihan Kepala Daerah Serentak akan diselenggarakan pada tahun 2024, maka diperlukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kota Cimahi pada masa transisi jabatan Kepala Daerah untuk tahun 2023-2026. Berdasarkan RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005-2025, periode tahun 2021-2025 adalah “Tahap Pencapaian”. Tahap Pencapaian dimaksudkan untuk pencapaian masyarakat yang maju, mandiri dan berkeadilan yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang baik, kualitas dan manajemen SDM yang unggul, semakin berkurangnya ketergantungan pada pihak di luar Kota Cimahi serta pelaksanaan pembangunan yang semakin adil. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan Kota Cimahi pada masa transisi tentunya harus tetap mengacu pada Tahap Pencapaian yang dimaksud dalam RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005-2025.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) pada masa transisi, disusun sebagaimana halnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah, disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif, yang disusun dengan berpedoman pada dokumen perencanaan nasional dan provinsi.

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) pada masa transisi, sekurang-kurangnya harus berdasarkan pada :

1. Pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional sampai dengan tahun 2024;
2. Pencapaian sasaran pokok dan kesesuaian arah kebijakan RPJPD sampai dengan akhir masa RPJPD pada tahun 2025; dan
3. Evaluasi RPJMD Perubahan tahun 2017-2022.

Selain itu, penyusunan dokumen ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut :

1. Pendekatan teknokratik, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
2. Pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan; dan
3. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, hingga nasional.

Dalam perencanaan pembangunan tahun 2023-2026, sistem inovasi daerah merupakan salah satu pendekatan pembangunan yang dilakukan di Kota Cimahi. Sebagai suatu pendekatan pembangunan, sistem inovasi dimaksud adalah suatu kesatuan dari himpunan pelaku pembangunan, kelembagaan, kebijakan, hubungan interaksi dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusi inovasi, termasuk teknologi, dan praktik baik/terbaik, serta proses pembelajarannya.

## **1.2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Dokumen RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026 disusun dengan maksud memberikan arah pembangunan tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 dengan memperhatikan perkembangan kondisi dan kebijakan provinsi dan nasional.

Tujuan dari penyusunan RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026, adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan prioritas pembangunan kedalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program;
2. Menetapkan indikator kinerja pembangunan daerah pada pembangunan jangka menengah sebagai tolok ukur kinerja pemerintah daerah;
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan Kota Cimahi yang sinergi dan terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat;
4. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan pembangunan daerah jangka panjang dengan tujuan perencanaan pembangunan daerah jangka menengah di masa transisi;
5. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) serta penganggaran tahunan Kota Cimahi; dan
6. Menyediakan instrumen dalam pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

Penyusunan RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026 sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Adapun tahapan penyusunan Penyusunan RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026, meliputi :

1. Persiapan;
2. Penyusunan Rancangan Awal;
3. Penyusunan Rancangan;
4. Pelaksanaan Konsultasi Publik;
5. Penyusunan Rancangan Akhir; dan
6. Penetapan dengan Peraturan Wali Kota.

### **1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

Penyusunan dokumen RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026 berdasarkan pada sejumlah peraturan perundang-undangan, meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  15. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Bandung dengan Kota Cimahi, Kota Cimahi dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung dengan Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 452);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

- dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
  25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
  27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Nomor 236);
  28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8);
  29. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
  30. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 160);

31. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 287).

#### **1.4. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN**

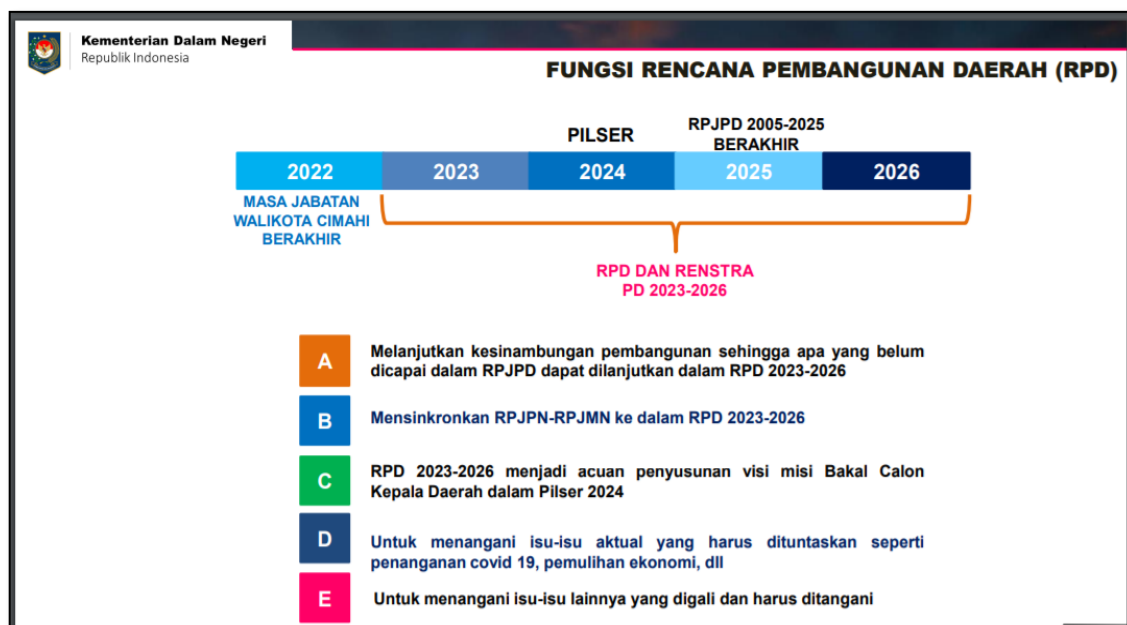
##### **1.4.1. Hubungan RPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026 ini merupakan satu bagian yang harus tetap disusun dalam sistem perencanaan pembangunan daerah dan merupakan bagian dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi pada masa transisi, khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005-2025.

RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026, telah berpedoman pada RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Barat, sehingga pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan strategi serta program pembangunan dalam RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026 telah selaras dengan kebijakan pembangunan Nasional dan Provinsi.

Selanjutnya, RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026 akan dijadikan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk penyusunan Renstra PD Tahun 2023-2026. Secara bersamaan, baik RPD Kota Cimahi maupun Renstra Perangkat Daerah akan digunakan sebagai dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang terinci ke dalam Renja PD.

**Gambar 1.1.**  
**Fungsi Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi**  
**Tahun 2023-2026**

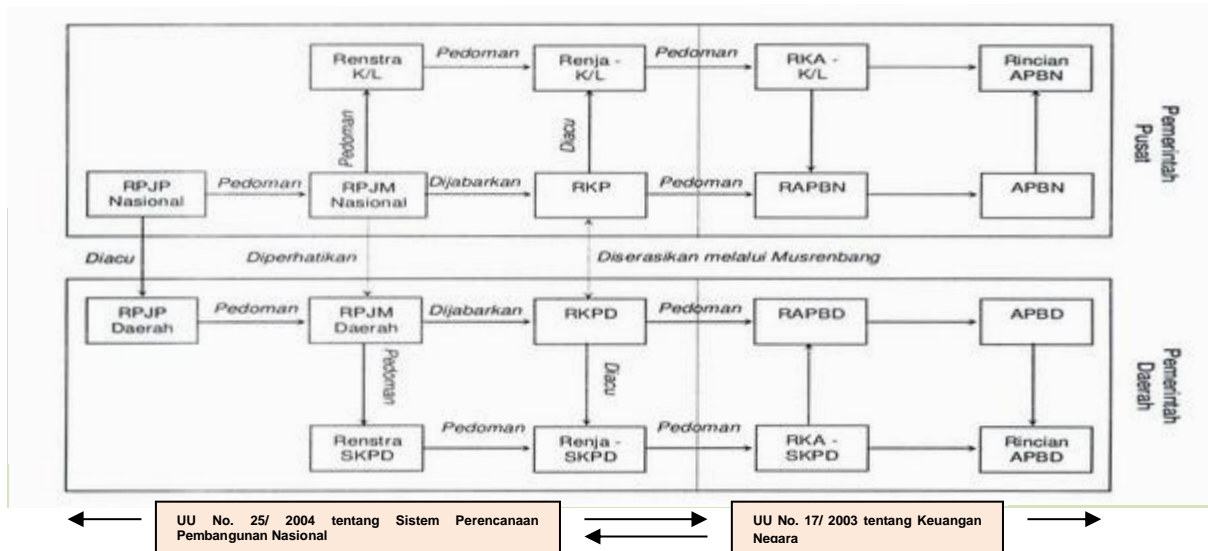


Sumber : Kemendagri

Gambar 1.1. menjelaskan bahwa pada masa transisi kekosongan jabatan Kepala Daerah, RPD disusun dengan fungsi yang setara dengan RPJMD sehingga kedudukannya sebagaimana halnya kedudukan RPJMD dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Secara ringkas, keterkaitan antara RPJMD dengan rangkaian dokumen lainnya, mulai dari RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, Renja Perangkat Daerah dan APBD dapat digambarkan secara sistematis dalam bentuk diagram alir pada Gambar 1.2.

**Gambar 1.2.**  
**Bagan Hubungan Dokumen Perencanaan Nasional dan Perencanaan Daerah**



Sumber : Bappenas

Berdasarkan bagan di atas, sebagaimana halnya RPJMD, dokumen RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan, yang tidak dapat dipisahkan dari dokumen perencanaan nasional, provinsi, serta menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan pada perangkat daerah. Dalam penyusunan RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026 perlu memperhatikan sasaran makro serta isu-isu strategis pada RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Barat.

Dalam hal keterkaitan antara RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026 dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah, tujuan kota, sasaran kota, serta program pembangunan pada RPD menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Strategis.

RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026 kemudian dijabarkan dalam dokumen perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), untuk selanjutnya menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Sebagaimana halnya RKPD yang menjadi pedoman dalam penyusunan APBD, maka Renja menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran sebagai dasar penetapan rincian dari APBD.

Selanjutnya, dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka penjabaran PPD Kota Cimahi ke dalam RKPD Kota Cimahi untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Cimahi.

Dalam penyusunan RPD ini telah menerapkan kerangka Sistem Inovasi Daerah (SID) sesuai amanat Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, sehingga perencanaan yang tertuang dalam RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026 merupakan perencanaan yang dapat berfungsi untuk meningkatkan daya saing kota.

#### **1.4.2. Hubungan RPD dengan RTRW**

Sesuai ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 4 huruf c, bahwa penyusunan dokumen perencanaan pembangunan harus mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Tata ruang merupakan instrumen untuk mengarahkan aspek kewilayahan dalam bentuk alokasi kegiatan-kegiatan sosial-ekonomi, pusat pelayanan, infrastruktur, serta permukiman yang akan saling memperkuat satu dengan lainnya dalam konteks pengembangan kota yang berkelanjutan.

RTRW Kota Cimahi, yang sudah disesuaikan dengan RTRW Provinsi Jawa Barat, diarahkan untuk mewujudkan ruang wilayah Kota Cimahi sebagai kota inti dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) cekungan Bandung yang aman, nyaman, efisien dan berkelanjutan dengan meningkatkan fungsi kota sebagai pusat jasa dan perdagangan serta pusat industri kreatif. Oleh karenanya, RTRW berfungsi sebagai acuan lokasi dan investasi pembangunan serta menjadi pedoman dalam merumuskan program-program kewilayahan dan lintas kewilayahan dalam dokumen RPD maupun Renstra Perangkat Daerah.

Perencanaan pembangunan yang tertuang dalam RPD telah diupayakan untuk dapat mengisi, mengembangkan dan memelihara ruang beserta sumber daya yang ada di dalamnya, sehingga pencapaian target RTRW dapat didukung secara nyata oleh RPD.

### **1.5. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dokumen RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026 ini disusun sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, yang terdiri atas 9 (sembilan) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, hubungan antar dokumen perencanaan lainnya, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Menguraikan data-data statistik yang relevan dan gambaran umum kondisi daerah, yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan maksud mengetahui keadaan daerah pada berbagai bidang yang akan diintervensi melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan.

#### **BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

Menguraikan gambaran dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan keuangan daerah masa lalu, serta kerangka pendanaan keuangan daerah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan selama 4 (empat) tahun.

#### **BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH**

Permasalahan dan isu strategis daerah merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPD karena menjadi justifikasi dalam menentukan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,

dan indikator capaian pembangunan daerah untuk 4 (empat) tahun mendatang.

#### **BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN**

Memuat rumusan visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Cimahi tahun 2023-2026, yang dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan serta indikator kinerja dan target yang akan dicapai.

#### **BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Diuraikan pula penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Selain itu, dimuat juga program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendukung pencapaian setiap sasaran pembangunan. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

#### **BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Memuat program perangkat daerah yang disajikan berdasarkan urusan pemerintahan daerah disertai indikator kinerja, target kinerja dan pagu indikatif setiap tahun selama periode RPD, dan perangkat daerah penanggung jawab.

#### **BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) selama periode 4 (empat) tahun masa transisi.



## **BAB IX PENUTUP**

Merupakan penutup dari keseluruhan dokumen RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026 yang memuat kaidah pelaksanaan RPD dan pedoman transisi.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Bab ini memuat tentang analisis gambaran umum kondisi Daerah yang memberikan gambaran awal tentang kondisi daerah dan capaian pembangunan di Kota Cimahi. Gambaran umum menjadi pijakan awal penyusunan rencana pembangunan 4 (empat) tahun ke depan melalui pemetaan secara objektif kondisi daerah dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

#### **2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**

##### **2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah**

###### **1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Bandung Dengan Kota Cimahi, Kota Cimahi Dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung Dengan Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat, luas Kota Cimahi secara keseluruhan mencapai 4.248,10 Ha dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut :

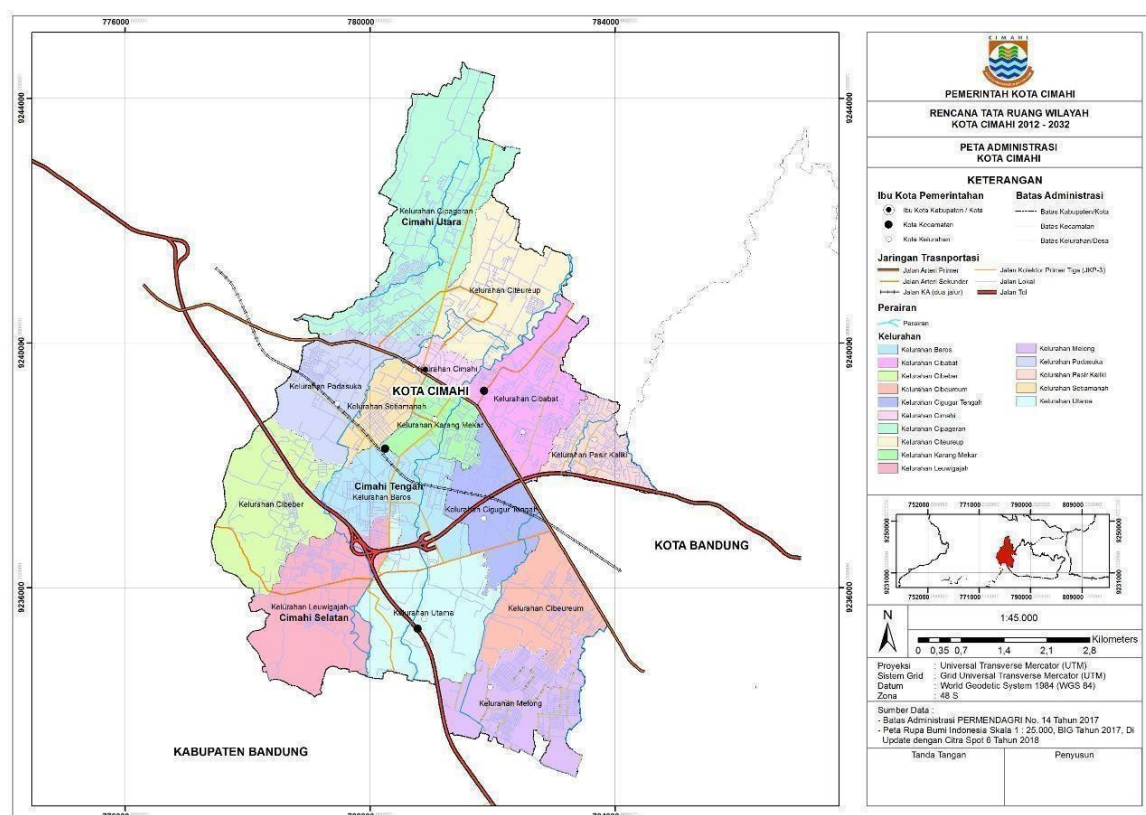
- a. Sebelah Utara : Kecamatan Parongpong, Kecamatan Cisarua dan Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Sukasari, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Cicendo, Kecamatan Andir Kota Bandung;
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Margaasih, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung dan Kulon Kota Bandung; dan
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Padalarang, Kecamatan Batujajar dan Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.

Wilayah Kota Cimahi meliputi 3 (tiga) kecamatan, dengan rincian pembagian wilayah beserta luasnya sebagai berikut :

- a. Kecamatan Cimahi Utara yang terdiri atas 4 (empat) kelurahan, 83 (delapan puluh tiga) RW dan 418 (empat ratus delapan belas) RT;
- b. Kecamatan Cimahi Tengah yang terdiri dari 6 (enam) kelurahan, 107 (seratus tujuh) RW dan 413 (empat ratus tiga belas) RT; dan
- c. Kecamatan Cimahi Selatan yang terdiri dari 5 (lima) kelurahan, 115 (seratus lima belas) RW dan 688 (enam ratus delapan puluh delapan) RT.

Berdasarkan penegasan batas wilayah administrasi tersebut di atas, maka luas wilayah Kota Cimahi adalah 4248,10 Ha. Secara tabulasi luas wilayah Kota Cimahi berdasarkan kelurahan disajikan pada Tabel 2.1 dan secara grafis wilayah administrasi Kota Cimahi disajikan pada Gambar 2.1.

**Gambar 2.1.**  
**Peta Administrasi Kota Cimahi**



Sumber : Dokumen Teknis Revisi RTRW Kota Cimahi 2012-2032

## 2. Letak Geografis dan Astronomis

Letak astronomis wilayah Kota Cimahi berdasarkan penegasan batas-batas wilayah yakni berada di 107°30'37"-107°34'34" Bujur Timur dan 6°49'38" - 6°55'58" Lintang Selatan.

Kota Cimahi juga dilintasi oleh jalan nasional yang berfungsi menghubungkan Kota Bandung dan Kota Jakarta, jalan tol Cileunyi – Padalarang – Purwakarta, serta jalur kereta api Bandung – Jakarta. Berdasarkan letak geografis Kota Cimahi sangat strategis karena terletak di jalur kegiatan ekonomi regional dan sebagai kota inti Bandung Raya yang berdampak dengan ibukota Jawa Barat yang sangat dinamis.

## 3. Kondisi Topografi

Secara topografi Kota Cimahi terletak pada elevasi +600 meter hingga +1.000 meter di atas permukaan laut (dpl), kondisi tersebut berdampak pada sebagian wilayah Kota Cimahi menjadi bagian Kawasan Bandung Utara (KBU) yaitu +750 meter dpl. Kegiatan pembangunan di KBU ini diatur sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku yang menunjang fungsi lindung kawasan tersebut. Dilihat dari kemiringan lerengnya, Kota Cimahi memiliki kemiringan lereng yang cukup bervariasi yaitu daerah yang memiliki kemiringan lereng 0–2% dengan dominan terletak di Kecamatan Cimahi Tengah dan Cimahi Selatan. Daerah yang memiliki kemiringan lereng 2-15% dominan terletak di wilayah Kecamatan Cimahi Utara. Daerah yang memiliki kemiringan lereng 15-25%, 25 – 40% dan lebih besar dari 40% tersebar merata di seluruh Kota Cimahi yang total luasnya tidak lebih dari 4 ha.

Secara rinci, luasan wilayah Kota Cimahi per kecamatan berdasarkan kemiringan lereng dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.1.**  
**Luas Wilayah Berdasarkan Kemiringan Lereng di Kota Cimahi**

No	Kecamatan	Kemiringan Lereng					Total (Km <sup>2</sup> )
		0 – 2%	2 – 15%	15 –25%	25– 40%	>40%	
1.	Cimahi Selatan	9,75	3,03	0,82	0,97	0,29	14,86
2.	Cimahi Tengah	10,33	2,89	0,14	0,11	0,02	13,48

No	Kecamatan	Kemiringan Lereng					Total (Km <sup>2</sup> )
		0 - 2%	2 - 15%	15 -25%	25- 40%	>40%	
3.	Cimahi Utara	2,61	9,85	1,06	0,51	0,12	14,14
	<b>Total (Km<sup>2</sup>)</b>	<b>22,69</b>	<b>15,77</b>	<b>2,01</b>	<b>1,59</b>	<b>0,43</b>	<b>42,48</b>

Sumber : Peta Dasar Validasi Badan Informasi Geospasial (BIG), 2019

#### 4. Kondisi Geologi

Jenis batuan yang terdapat di Kota Cimahi terdiri dari jenis batuan Andesit, Basal, Lava, Tufa Berbatu apung, Tufa Pasir dan Breksi Tufaan Lava, Batupasir, Konglomerat. Klasifikasi jenis batuan yang ada di Kota Cimahi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.2.**  
**Luas Jenis Batuan Menurut Kecamatan**

Kecamatan	Jenis Batuan (Ha)						Total
	A	B	Pb	Qyt	Qyd	Qyl	
Cimahi Selatan	16,73	12,77	67,68	1.557,1	-	-	1.654,30
Cimahi Tengah	-	4,64	-	826,86	158,11	-	989,62
Cimahi Utara	-	-	-	298,62	1.082,71	27,63	1.408,96

Sumber : Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, 1973

Keterangan : A=Andesit, B=Basal, Pb=Breksi Tufaan Lava, Batu Pasir, Konglomerat, Qyt=Tufa Batu Apung, Qyd=Tufa Pasir, dan Qyl=Lava

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jenis batuan yang mendominasi di Kota Cimahi yaitu jenis batuan tufa batu apung dengan luas sebesar 2.682,58 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan, jenis batuan tufa batu apung dibanding dengan jenis batuan lainnya yang ada di Kota Cimahi merupakan jenis batuan yang kekerasan lunak di banding dengan jenis batuan andesit, basal dan breksi tufaan lava, batu pasir, konglomerat yang memiliki tingkat kekerasan tinggi. Bahan penyusun jenis batuan tufa batu apung terdiri dari pasir tufaan, lapilli, bom-bom, lava berongga dan kepingan-kepingan andesit-basal padat bersudut yang berasal dari gunung tangkuban perahu (Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, 1973).

## 5. Kondisi Hidrologi

Hidrologi Kota Cimahi yang ditandai dengan air permukaan berupa sungai, merupakan sungai-sungai orde ketiga dari Sungai Citarum. Sungai Cimahi, Sungai Cisangkan, Sungai Cibabat, Sungai Cibeureum dan Sungai Cibaligo adalah 5 (lima) sungai utama yang mengalir melalui Kota Cimahi. Adapun kondisi sungai-sungai tersebut, disajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.3.**  
**Kondisi Sungai Kota Cimahi**

No	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m <sup>3</sup> /dtk)	Debit Min (m <sup>3</sup> /dtk)
<b>1.</b>	<b>Cisangkan Hulu-Hilir</b>	16.91					
	Cisangkan Hulu	-	2	2	0,20	0,99	0,02
	Cisangkan Tengah	-	3	3	0,30	1,19	0,05
	Cisangkan Hilir	-	6	6	0,70	2,44	0,3
<b>2.</b>	<b>Cibaligo Hulu-Hilir</b>	35.04					
	Cibaligo Hulu	-	3	3	1,20	1,64	0,05
	Cibaligo Tengah	-	2,5	2,5	0,5	1,54	0,18
	Cibaligo Hilir	-	3	3	0,65	1,14	0,06
<b>3.</b>	<b>Cibabat Hulu-Hilir</b>	35.04					
	Cibabat Hulu	-	1,5	1,5	0,20	1,77	0,08
	Cibabat Tengah	-	4	4	0,60	3,68	0,01
	Cibabat Hilir	-	2	2	0,30	1,11	0,06
<b>4.</b>	<b>Cibeureum Hulu-Hilir</b>	24.66					
	Cibeureum Hulu	-	4	4	0,75	3,02	0,62
	Cibeureum Tengah	-	6	6	0,50	3,10	0,09
	Cibeureum Hilir	-	8	8	0,50	6,76	0,46
<b>5.</b>	<b>Cimahi Hulu-Hilir</b>	18.61					
	Cimahi Hulu	-	6	6	0,3	1,93	0,14
	Cimahi Tengah	-	4	4	0,5	1,85	0,13
	Cimahi Hilir	-	7	7	1	1,93	0,33

Sumber : Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Cimahi Tahun 2021

Sungai Cimahi berhulu di puncak lereng barat Gunung Tangkuban Perahu tepatnya Situ Lembang, melintasi Kelurahan Citeureup, Cibabat, Baros, Utama dan Karang Mekar. Sungai Cisangkan melintasi Kelurahan Citeureup, Padasuka, Baros, Leuwigajah/Utama. Sungai melintasi Kelurahan Cibabat, Cibeureum, dan Melong. Sungai Cibeureum berasal dari bagian barat Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung melintasi

perbatasan Kota Cimahi dan Kota Bandung. Sungai ini melintasi Kelurahan Cibeureum dan Kelurahan Melong.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, ditentukan bahwa diperlukan penetapan zona konservasi air tanah dalam penyusunan rencana pengelolaan air tanah. Zona konservasi air tanah terdiri atas : (1) zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah imbuhan air tanah; (2) zona pemanfaatan air tanah yang meliputi zona aman, zona rawan, zona kritis, dan zona rusak. Di Kota Cimahi, zona pemanfaatan air tanah terdiri atas 5 (lima) zona, yaitu : zona aman, zona aman pada akuifer 50- 150 m, zona rawan, zona kritis, dan zona rusak yang ditampilkan pada tabel berikut :

**Tabel 2.4.**  
**Luas Zona Pemanfaatan Air Tanah di Kota Cimahi**

No	Kecamatan	Zona Pemanfaatan Air Tanah (Ha)					Total
		Aman	Aman pada Akuifer 50-150 m	Rawan	Kritis	Rusak	
1	Cimahi Selatan	-	334,04	869,52	293,93	156,81	1.654,30
2	Cimahi Tengah	-	453,00	92,74	204,35	239,53	989,62
3	Cimahi Utara	485,89	729,32	118,18	49,70	25,87	1.408,96
	<b>Jumlah</b>	<b>485,89</b>	<b>1.516,37</b>	<b>1.080,44</b>	<b>547,98</b>	<b>422,21</b>	<b>4.052,88</b>

*Sumber : Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, 2010*

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa zona pemanfaatan air tanah aman pada akuifer 50-150 m memiliki cakupan yang besar dengan luas 1.516,37 Ha. Namun, di sisi lain pemanfaatan air tanah terbatas pada zona rawan, kritis, dan rusak juga memiliki cakupan yang luas, yaitu sebesar 2.050,63 ha atau mencakup 50,60% dari total luas zona pemanfaatan air tanah di Kota Cimahi sehingga hal ini perlu mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan.

## **6. Kondisi Klimatologi**

Kota Cimahi dan sekitarnya memiliki iklim tropis, dicirikan dengan adanya musim kemarau selama bulan Juni - September serta musim penghujan berlangsung pada periode Oktober - Mei. Rata-rata curah hujan tahunan pada setiap wilayah di sekitar Kota Cimahi bervariasi tergantung dari elevasi permukaan tanah. Pada elevasi  $\pm 700-850$  mdpl, curah hujan bervariasi antara 1.700-3.000 mm/tahun, sedangkan pada elevasi  $> 850$  mdpl hingga puncak pegunungan (+3.000 m) curah hujan mencapai 3.000-4.000 mm/tahun. Kelembaban udara relatif konstan dengan variasi kecil. Pada dataran Bandung dan Cimahi kelembaban udara minimum sebesar 73% pada bulan September, dan maksimum 83% pada bulan April. Rata-rata temperatur udara berkisar  $22,7^{\circ}\text{C} - 23,2^{\circ}\text{C}$ . Temperatur udara cenderung turun sejalan dengan kenaikan elevasi, besarnya penurunan temperatur sekitar  $0,6^{\circ}\text{C}$  setiap kenaikan elevasi 100m. Evapotranspirasi bulanan berkisar 114 hingga 166 mm/bulan atau rata-rata 1.572 mm per tahun. Berdasarkan klasifikasi iklim menurut *Oldeman* (Lakitan 2002), iklim di Kota Cimahi termasuk dalam iklim tipe B2. Jenis tanaman pertanian yang cocok untuk tipe iklim tersebut adalah tanaman padi yang dapat ditanam sebanyak dua kali dalam setahun dan palawija yang dapat ditanam baik pada saat musim hujan maupun musim kemarau. Dengan curah hujan berkisar antara 1.700 - 4.000 mm per tahun dan luas wilayah 4.248,10 ha, Kota Cimahi memiliki potensi volume air hujan sebesar 68,90 - 162,12 juta m<sup>3</sup> per tahun. Selain sebagai sumber air untuk pertanian, dengan sentuhan teknologi air hujan dapat dimanfaatkan sebagai sumber air bersih.

## **7. Penggunaan Lahan**

Penggunaan lahan eksisting Kota Cimahi berdasarkan peta tutupan lahan yang menjadi lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Bandung dengan Kota Cimahi, Kota Cimahi dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung dengan Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat disajikan pada dibawah. Porsi penggunaan lahan terbesar adalah permukiman dan tempat kegiatan,



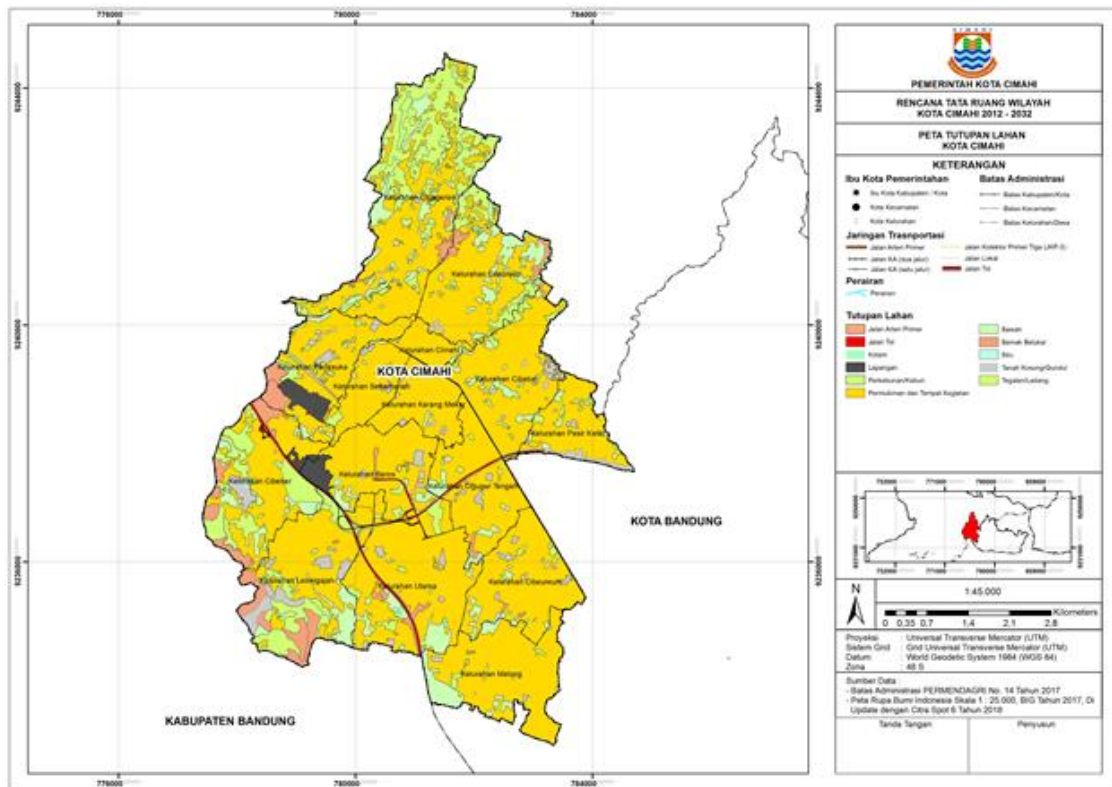
disusul oleh tegalan, sawah dan semak belukar. Informasi ini juga ditampilkan dalam bentuk peta, seperti dibawah ini :

**Tabel 2.5.**  
**Luas Wilayah Berdasarkan Tutupan Lahan di Kota Cimahi**

<b>Tutupan Lahan Eksisting</b>	<b>Luas (Ha)</b>
Jalan Arteri Primer	5.57
Jalan Tol	29.35
Kolam	5.72
Lapangan	56.27
Perkebunan/Kebun	135.83
Permukiman dan Tempat Kegiatan	2957.20
Sawah	323.63
Semak Belukar	158.50
Situ	0.63
Tanah Kosong/Gundul	129.78
Tegalan/Ladang	445.64
<b>Total</b>	<b>4248.10</b>

*Sumber : Dokumen Teknis Revisi RTRW Kota Cimahi 2012-2032*

**Gambar 2.2.**  
**Peta Tutupan Lahan Kota Cimahi**



*Sumber : Dokumen Teknis Revisi RTRW Kota Cimahi 2012-2032*

### **2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Kota Cimahi menjadi bagian dari kawasan perkotaan inti dalam Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung yang merupakan kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan ekonomi. Kegiatan utama kota meliputi : pusat pemerintahan kota dan/atau kecamatan, pusat perdagangan dan jasa skala regional, pusat industri (ekonomi kreatif dan industri non polutif), pusat pelayanan pendidikan tinggi, pusat pelayanan sistem angkutan umum dan penumpang regional serta pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara.

Rencana pola ruang wilayah Kota Cimahi meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan dengan peruntukan lindung terdiri atas badan air (sungai dan embung), kawasan perlindungan setempat (sempadan sungai) dan kawasan ruang terbuka hijau (RTH). Kawasan RTH

ini terdiri atas rimba kota, taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, taman RW, pemakaman dan jalur hijau. Kawasan budidaya terdiri atas berbagai kawasan yang akan dijabarkan berikut ini.

Potensi pengembangan wilayah Kota Cimahi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya kota adalah wilayah kota yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Hal ini tertuang dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032 meliputi :

1. Kawasan Perumahan

- a. Pengembangan perumahan diarahkan pada intensitas pemanfaatan lahan berdasarkan kepadatannya, meliputi perumahan kepadatan tinggi diarahkan di Kelurahan Cibeureum, Kelurahan Padasuka, Kelurahan Cigugur Tengah, Kelurahan Melong dan Kelurahan Karangmekar; perumahan kepadatan sedang diarahkan di Kelurahan Cibeber, Kelurahan Leuwigajah, Kelurahan Utama, Kelurahan Baros dan sebagian Kelurahan Setiamanah; dan perumahan kepadatan rendah diarahkan di sebagian Kelurahan Cipageran, Kelurahan Citeureup, Kelurahan Cibabat, sebagian Kelurahan Pasirkaliki, Kelurahan Cimahi dan sebagian Kelurahan Setiamanah;
- b. Pengembangan hunian vertikal di Kecamatan Cimahi Selatan, Kecamatan Cimahi Tengah dan sebagian Kecamatan Cimahi Utara; dan
- c. Penataan dan peremajaan kawasan perumahan padat tidak teratur di bantaran sungai di Kecamatan Cimahi Tengah dan Selatan.

2. Kawasan Perdagangan dan Jasa

Rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa meliputi pasar tradisional, pusat perbelanjaan modern, toko dan ritel modern, dan perdagangan dan jasa lainnya, yang saat ini sebagian besar terpusat di wilayah Cimahi Tengah. Selain itu, wilayah Cimahi Selatan juga memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan perdagangan dan jasa dengan adanya akses ke Tol Baros.

Adanya rencana pembentukan Sentra Perdagangan dan Jasa merupakan salah satu upaya dalam pengembangan Kawasan perdagangan dan jasa. Beberapa kota di Indonesia telah berhasil menata pusat kotanya sehingga menjadi destinasi wisata. Untuk itu perlu adanya inovasi penataan kawasan alun-alun dan Kawasan Gandawijaya Kota Cimahi menjadi salah satu destinasi belanja dan menjadikan salah satu muka kota yang kreatif.

Untuk bisa mendukung perkembangan area *central business district* (CBD) lama di daerah alun-alun dan Jalan Gandawijaya perlu dilakukan inovasi penataan kawasan melalui penyediaan trotoar yang lebih luas bagi pejalan kaki dan ramah terhadap kaum disabilitas, tersedianya pemberhentian kendaraan umum yang kreatif, petunjuk area (*sign map*) yang kreatif, taman, jalur pesepeda dan penataan lampu kota. Diharapkan pusat kota dapat menjadi ruang publik yang terbuka bagi interaksi warganya untuk melakukan kegiatan-kegiatan kreatif seperti pertunjukan di jalan (*street performance*) maupun *culinary night*. Sinkronisasi dan koordinasi kegiatan yang tersebar di banyak Perangkat Daerah menjadi unsur penting bagi berhasilnya penataan kawasan alun-alun dan Gandawijaya selain juga penegakan disiplin agar tetap rapi dan tidak menjadi kumuh. Kota yang kreatif akan bisa meningkatkan tingkat kebahagiaan warganya.

### 3. Kawasan Peruntukkan Industri

- a. Kota Cimahi tidak lagi mengembangkan Kawasan Peruntukkan Industri menengah dan besar, tetapi hanya menjaga kestabilan keberadaan industri menengah dan besar yang banyak tersebar di wilayah Cimahi Selatan, diantaranya di Kelurahan Leuwigajah, dan Kelurahan Melong serta di Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah. Keberadaan Kawasan peruntukkan industri tersebut diarahkan menjadi kawasan industri yang berwawasan lingkungan dengan pengembangan prasarana pengelolaan limbah industri terpadu;
- b. Pengembangan industri kreatif di Kota Cimahi dipusatkan di wilayah Baros dengan dibangunnya Kawasan Cimahi

*Technopark*. Industri kreatif yang dikembangkan adalah industri kreatif berbasis teknologi informasi diantaranya animasi dan film, serta sentra-sentra produk unggulan lainnya untuk produk kuliner, kerajinan dan fashion; dan

- c. Rencana pengembangan industri kecil dan rumah tangga berbasis klaster industri terutama di beberapa lokasi yang bisa dikembangkan menjadi sentra produk unggulan dengan prinsip ramah lingkungan.

#### 4. Kawasan Peruntukkan Pariwisata

- a. Pengembangan Wisata Budaya dan Agro Eduwisata di Kelurahan Cipageran dan Kampung Cireundeu di Kelurahan Leuwigajah. Cireundeu tidak lagi hanya sebagai Desa Wisata Ketahanan Pangan saja tetapi berkembang menjadi Desa Wisata Seni Pertunjukan dan Budaya berbasis budaya ketahanan pangan singkong;

- b. Pengembangan Wisata Heritage dan Festival Tematik di Kecamatan Cimahi Tengah.

Di Kota Cimahi terdapat 23 objek bangunan bersejarah yang memiliki potensi untuk ditetapkan sebagai bangunan heritage sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang hingga saat ini belum memanfaatkan secara optimal. Diperlukan penggalian nilai-nilai sejarah dan perencanaan pemanfaatannya termasuk upaya pengembangan kewirausahaan dalam bidang pariwisata khususnya pada 23 objek bangunan bersejarah Kota Cimahi;

- c. Pengembangan kawasan wisata Cipageran yang meliputi daerah Lebak Saat (Chitos 1), Legok Awi (Pasar Legok Awi) yang terintegrasi dengan hutan kota dan sentra pertanian (peternakan). Perlu dilakukan branding tempat yang terintegrasi dalam satu kawasan wisata serta dilakukannya pengintegrasian pembinaan usaha kesenian/budaya, pariwisata, *homestay*, hilirisasi produk dan pembinaan UKM baik kuliner maupun kerajinan berbasis potensi lokal (bambu) oleh warga setempat; dan

- d. Pengembangan Kampung Gambar di Kelurahan Cibabat sehingga mendatangkan manfaat ekonomi dan sosial. Saat ini di Kampung Gambar Cibabat belum muncul aktivitas bisnis dan baru lebih berfokus kepada aktivitas ekspresi kreatif. Perlu dikembangkan model bisnis yang tepat (*model business canvas*) dan pemberdayaan komunitas lokal.
5. Kawasan Perkantoran dan Fasilitas Sosial
    - a. Kawasan perkantoran pemerintahan meliputi peningkatan kawasan perkantoran pemerintah Kota Cimahi, peningkatan kawasan perkantoran skala kecamatan dan kelurahan di seluruh Kota Cimahi, peningkatan kawasan perkantoran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi dengan penyediaan ruang terbuka publik yang dapat digunakan untuk interaksi sosial, peningkatan kawasan pusat pengembangan teknologi informasi, *Baros Information Technology Center* (BITC) di Jalan HMS. Mintaredja Kelurahan Baros; Pembangunan Kawasan Mall Pelayanan Publik dan peningkatan dan pembangunan lokasi lain sesuai dengan kebutuhan; dan
    - b. Kawasan perkantoran swasta mengarahkan dan mengembangkan kegiatan perkantoran swasta berlokasi di kawasan perdagangan dan jasa.
  6. Kawasan pertahanan dan keamanan

Kawasan pertahanan dan keamanan di Kota Cimahi meliputi: Markas Brigif – 15 Kujang II yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Pussenarmed yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Pussenarhanud yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Puskarmed yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Puskarpal yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Puskidhub yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Puskidpom yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Puskidjas yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Puskidbekang yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Puskidpengmilum yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Kodim 0609/Kabupaten Bandung yang terletak di Kecamatan Cimahi

Tengah, Yonarmed – 4/105 GS yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Kiban Yonzipur-3/Yudha Wirograha yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Rumkit TK. II 03.05.01 yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Denbekang III-44-02.A yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Benglap-A-03-43-02 yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Domatzi yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Koramil 0609-22 yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, dan Koramil 0609-25 yang terletak di Kecamatan Cimahi Utara. Di Kawasan ini bila dimungkinkan dapat dilakukan kerjasama dalam rangka pengembangan pembangunan di Kota Cimahi;

7. Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)

Pengembangan RTNH di kawasan komersial dan perkantoran di Kelurahan Setiamanah dan Kelurahan Baros dan perumahan tersebar di Kecamatan Cimahi Utara, Kecamatan Cimahi Tengah dan Kecamatan Cimahi Selatan, yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat berinteraksi masyarakat dan layak anak.

Disamping itu terdapat juga lahan-lahan aset milik pemerintah Kota Cimahi berupa lahan kritis yang belum dimanfaatkan secara optimal. Pemanfaatan tanah milik Pemerintah Kota Cimahi bisa diarahkan dengan menerapkan konsep *agroforestry* sehingga kegiatan konservasi alam dan pertanian serta pariwisata bisa dikembangkan seperti di Bukit Padakasih Kelurahan Cibeber, di Cimenteng dan Legok Jawa Kelurahan Cipageran maupun ex-TPA Leuwigajah di Kelurahan Leuwigajah. Direncanakan juga pemanfaatan beberapa wilayah sekitar embung sebagai sarana ruang publik untuk olahraga dan pariwisata lokal;

8. Kawasan Peruntukan Ruang Untuk Sektor Informal

Merupakan sektor yang direncanakan untuk kegiatan sektor informal di lokasi yang direncanakan dengan membatasi pemanfaatan ruang terbuka publik untuk kegiatan sektor informal dengan pembatasan area dan pengaturan waktu berdagang, mengoptimalkan fungsi pasar, dan mengintegrasikan kegiatan sektor informal dengan sektor formal, menjaga fasilitas publik agar tidak digunakan untuk kegiatan sektor

informal dan mewajibkan setiap pengembang mengalokasikan ruang untuk kegiatan sektor informal.

9. Kawasan Peruntukkan Ruang Evakuasi Bencana

Kawasan Rawan Bencana di Kota Cimahi terdiri dari kawasan rawan bencana tanah longsor, rawan banjir, rawan aliran lahar gunung berapi, dan rawan gempa bumi sehingga pengembangan kawasan ruang evakuasi diarahkan menyebar di seluruh wilayah kecamatan dengan memanfaatkan RTH, RTNH, gedung dan bangunan lainnya. Penyediaan jalur evakuasi bencana yang terjangkau oleh kendaraan roda empat pada wilayah-wilayah rawan bencana untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengungsi. Penyediaan sarana prasarana pada akses jalur evakuasi menuju ruang titik kumpul tersebar di seluruh wilayah kecamatan dengan memanfaatkan ruang publik dan RTNH.

10. Pengembangan kawasan peruntukkan perikanan

Pengembangan kawasan peruntukan perikanan budidaya air tawar melalui optimalisasi produksi ikan air tawar dan pemasaran hasil perikanan melalui optimalisasi pasar ikan di Kelurahan Cibabat.

11. Pelindungan kawasan peruntukan pertanian

Perlindungan kawasan pertanian diarahkan pada rencana penetapan regulasi dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Aspek lain pengembangan wilayah Kota Cimahi adalah berkaitan dengan wilayah administrasi di Kota Cimahi. Saat ini Kota Cimahi memiliki tiga kecamatan dan lima belas kelurahan. Sedangkan jika berpedoman kepada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, jumlah minimal kecamatan untuk Kota adalah 4 (empat) kecamatan. Pemerintah Kota Cimahi telah melakukan Kajian Pemekaran Wilayah untuk memenuhi jumlah Kecamatan sesuai dengan peraturan dan perundangan.

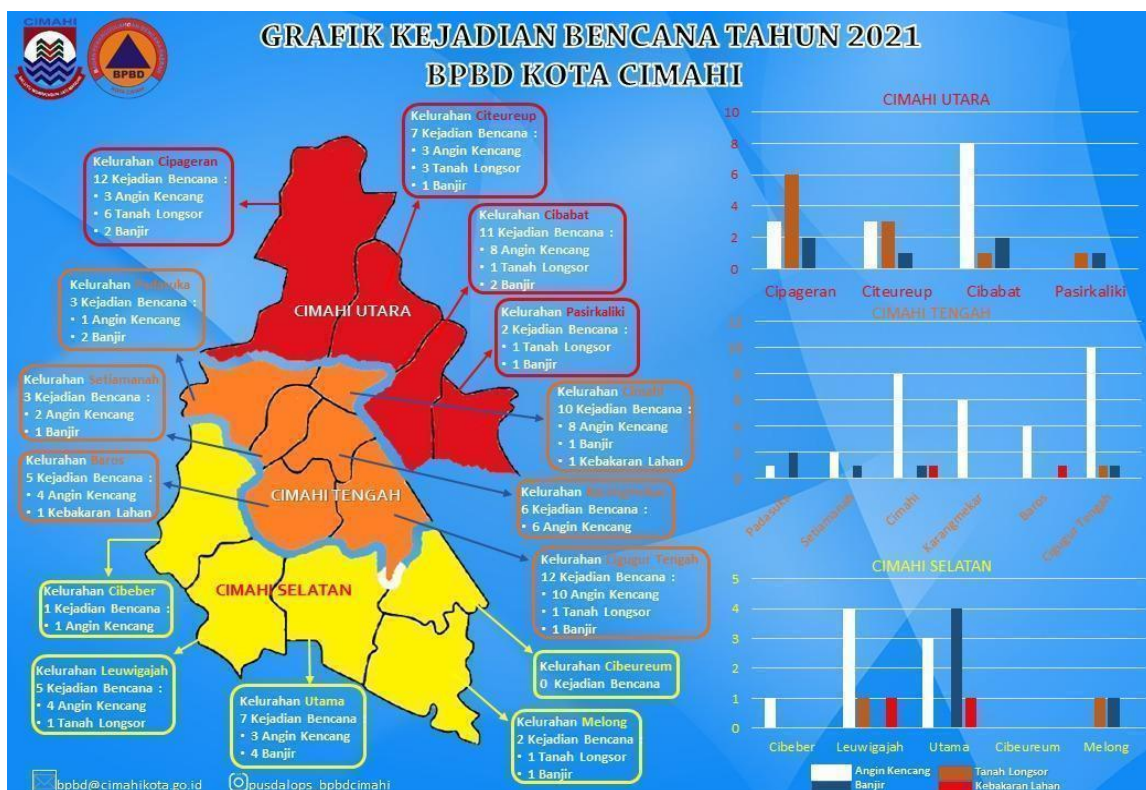
### **2.1.3. Wilayah Rawan Bencana**

Kawasan rawan bencana di Kota Cimahi, meliputi rawan tanah longsor, rawan banjir, dan rawan aliran lahar gunung berapi. Kawasan



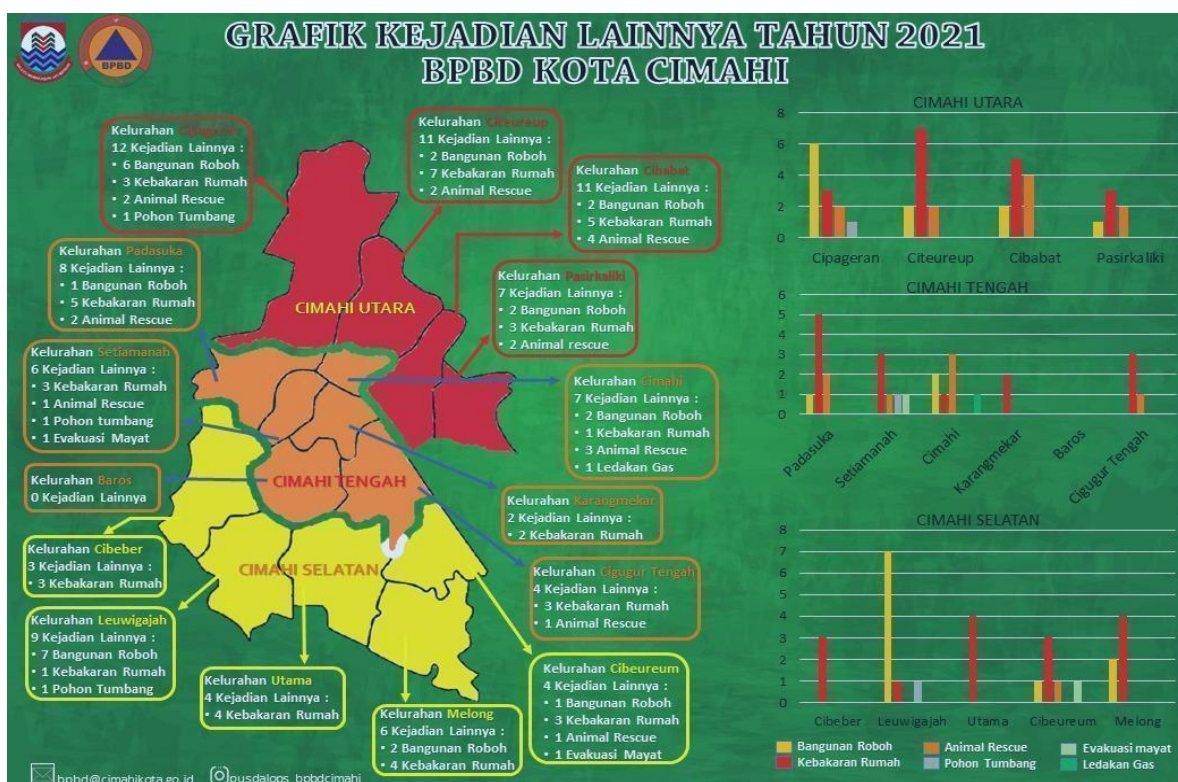
rawan tanah longsor mencakup kawasan di sebagian wilayah Kecamatan Cimahi Utara dan Kecamatan Cimahi Selatan, terutama wilayah dengan kelerengan diatas 15% (lima belas persen) seluas 147 (seratus empat puluh tujuh) ha. Upaya mitigasi dan adaptasi bencana pada kawasan rawan bencana untuk kawasan rawan longsor dilakukan dengan menetapkan tingkat bahaya longsor di masing-masing kawasan, melakukan penanaman tanaman keras di kawasan rawan longsor dan menetapkan kawasan rawan gerakan tanah dan longsor sebagai RTH pengaman lingkungan. Berdasarkan data pada tahun 2021, kejadian bencana di Kota Cimahi dikategorikan melalui data grafik-grafik sebagai berikut :

**Gambar 2.3.**  
**Grafik Kejadian Bencana Kota Cimahi**



Sumber : BPBD Kota Cimahi, 2021

**Gambar 2.4.**  
**Grafik Kejadian Lainnya Kota Cimahi**



Sumber : BPBD Kota Cimahi, 2021

Kawasan rawan banjir adalah wilayah yang berpotensi banjir. Banjir yang terjadi di Kota Cimahi terjadi di setiap Kecamatan dengan total area terendam adalah 41,959 Ha, seperti pada tabel berikut :

**Tabel 2.6.**  
**Kawasan Rawan Banjir Kota Cimahi**

No	Lokasi Banjir	Wilayah Administrasi		Luas Genangan (Ha)	Daerah Aliran Sungai (DAS)
		Kelurahan	Kecamatan		
B1	RW 03	Pasirkaliki	Cimahi Utara	0.3	DAS Cilember
B2	RW 12	Pasirkaliki	Cimahi Utara	0.2	DAS Cilember
B3	RW 05 (Batas Cipageran)	Padasuka	Cimahi Tengah	0.133	DAS Cimahi
B4	RW 05	Utama	Cimahi Selatan	1.44	DAS Cilember
B5	RW 07	Setiamanah	Cimahi Tengah	1.54	DAS Cimahi
B6	RW 12-08 Padasuka (batas)	Setiamanah	Cimahi Tengah	7.19	DAS Cimahi
B7	RW 14	Setiamanah	Cimahi Tengah	1.5	DAS Cimahi

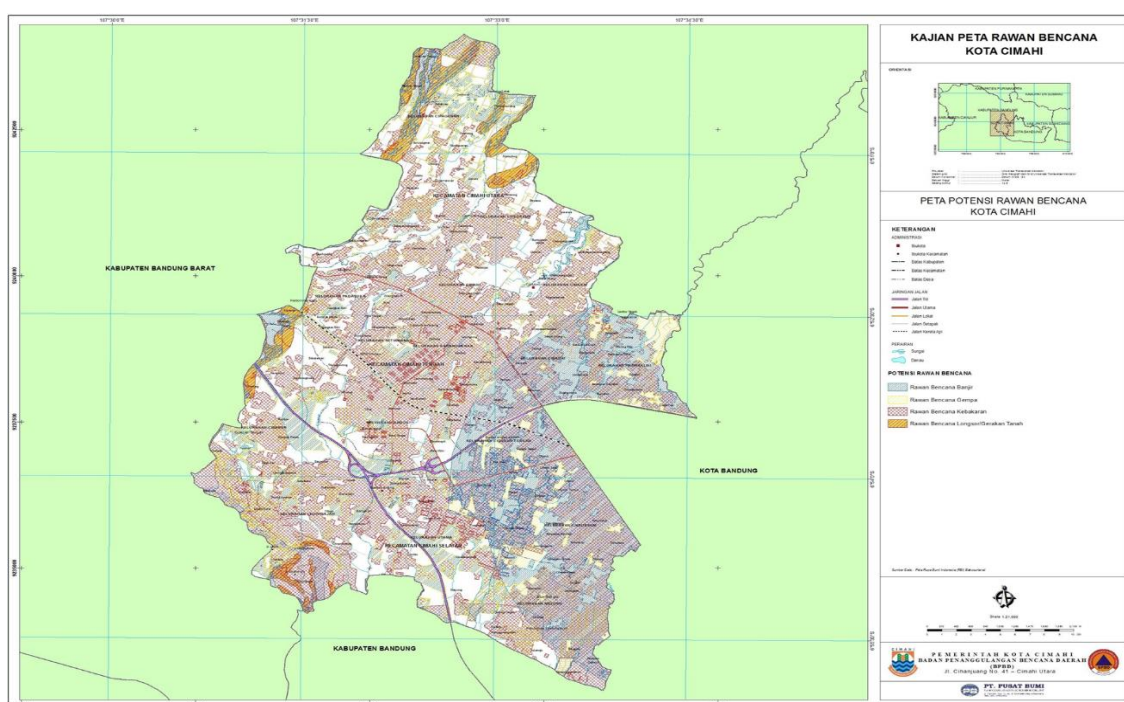
No	Lokasi Banjir	Wilayah Administrasi		Luas Genangan (Ha)	Daerah Aliran Sungai (DAS)
		Kelurahan	Kecamatan		
B8	RW 06	Cigugur Tengah	Cimahi Tengah	0.7	DAS Cilember
B9	Jl. Amir Mahmud - <i>Flyover</i> Cimindi	Cigugur Tengah	Cimahi Tengah	0.1	DAS Cilember
B10	RW 08	Cigugur Tengah	Cimahi Tengah	5	DAS Cilember
B11	RW 18-10-13 (batas Cibeber)	Leuwigajah	Cimahi Selatan	1.4	DAS Cimahi
B12	RW 13 (Darussurur-& H. Waryat)	Utama	Cimahi Selatan	0.3	DAS Cimahi
B13	RW 09-08 (jl. Industri-Cibodas)	Utama	Cimahi Selatan	0.19	DAS Cimahi
B20	RW 12-11	Utama	Cimahi Selatan	8.33	DAS Cimahi
B14	RW 02	Melong	Cimahi Selatan	10.7	DAS Cilember
B15	RW 14 (Mancong)	Utama	Cimahi Selatan	1	DAS Cimahi
B16	RW 03	Melong	Cimahi Selatan	0.42	DAS Cilember
B17	RW 32	Melong	Cimahi Selatan	0.42	DAS Cibeureum
B18	RW 34	Melong	Cimahi Selatan	0.6	DAS Cibeureum
B19	RW 29	Melong	Cimahi Selatan	0.496	DAS Cilember
<b>TOTAL</b>				<b>41.959</b>	

Sumber : DPKP, 2021, diolah

Wilayah yang berpotensi/rawan banjir tidak hanya di Cimahi Selatan, tetapi wilayah yang dilintasi 4 sungai (anak Sungai Cihaur, Sungai Cimahi, Sungai Cilember, Sungai Cibeureum). Wilayah yang paling rawan adalah wilayah Cimahi Selatan yang menjadi wilayah hilir sebelum sungai-sungai tersebut masuk ke wilayah Kabupaten Bandung dan Bandung Barat sebelum bermuara ke Sungai Citarum. Hal ini merupakan permasalahan yang tidak dapat secara langsung tertangani oleh Kota Cimahi sendiri, karena kewenangan kota/kabupaten hanya sebagai pendukung dari pelaksanaan penuntasan banjir wilayah DAS Citarum yang dilaksanakan oleh BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Citarum.

Sedangkan Kawasan rawan aliran lahar gunung berapi mencakup daerah aliran sungai-sungai yang hulunya berasal dari Gunung Tangkuban Perahu seluas 98 Ha. Upaya mitigasi dan adaptasi bencana pada kawasan rawan bencana untuk kawasan rawan aliran gunung berapi dengan menetapkan tingkat bahaya aliran lahar gunung berapi di masing-masing kawasan, memindahkan bangunan dan atau rumah yang ada di kawasan rawan aliran lahar gunung berapi tingkat tinggi serta mengembangkan kawasan dan evakuasi bencana di Kecamatan Cimahi Utara.

**Gambar 2.5.**  
**Peta Potensi Rawan Bencana Kota Cimahi**



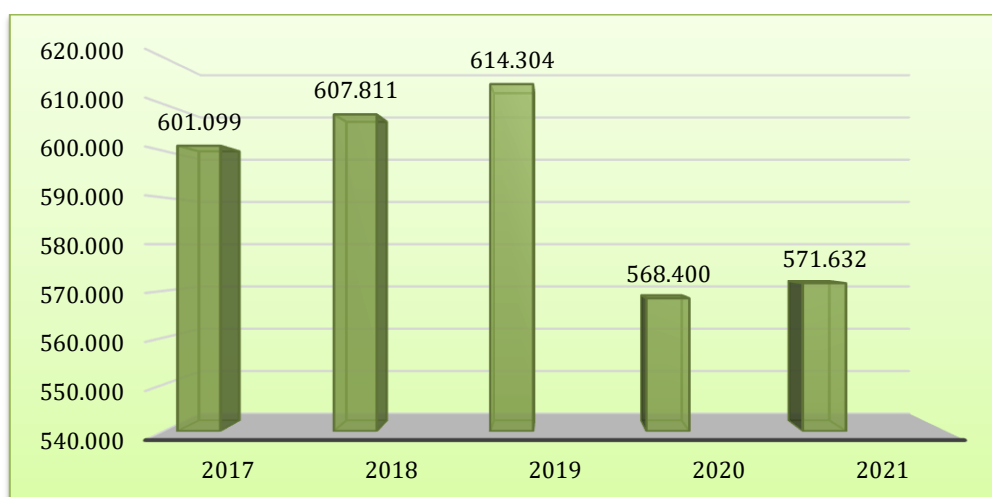
Sumber : BPBD Kota Cimahi, 2021

#### 2.1.4. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kota Cimahi yang banyak, akan mempunyai dampak terhadap kehidupan masyarakat Kota Cimahi kedepannya. Dampak tersebut harus dicarikan solusi yang tepat untuk menanggulangnya. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, jumlah penduduk Kota Cimahi selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 jumlah penduduk Kota Cimahi Tahun 2020 berdasarkan Sensus Penduduk 2020 adalah sebesar 568.400 jiwa. Jumlah ini terlihat

menurun cukup jauh dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya perubahan metode pengambilan data dimana pada tahun 2020 digunakan data riil hasil Sensus Penduduk Tahun 2020, sedangkan sebelumnya lebih kepada data proyeksi. Jumlah ini meningkat di tahun 2021 menjadi 571.632 jiwa.

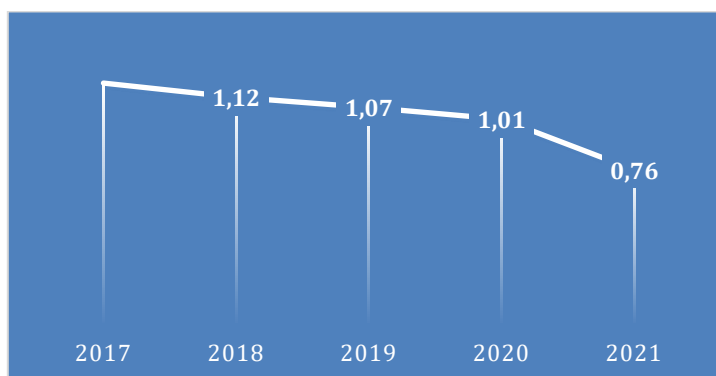
**Gambar 2.6.**  
**Jumlah Penduduk di Kota Cimahi Tahun 2017-2021**



Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka Tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 BPS, diolah

Dilihat dari grafik laju pertumbuhan penduduk tahun 2017 hingga tahun 2021, laju pertumbuhan penduduknya terus mengalami penurunan. Pada tahun 2021 laju pertumbuhan penduduk Kota Cimahi sebesar 0,76% atau mengalami penurunan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 laju pertumbuhan penduduk Kota Cimahi sebesar 1,19%. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengendalian pertumbuhan penduduk Kota Cimahi dari tahun ke tahunnya.

**Gambar 2.7.**  
**Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Cimahi Tahun 2017-2021**



*Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka Tahun 2022*

Jumlah penduduk Cimahi sebanyak 571.632 jiwa pada Tahun 2021 tersebar di 3 (tiga) kecamatan dengan penduduk terbanyak di Kecamatan Cimahi Selatan sebanyak 234.848 jiwa. Walau Kecamatan Cimahi Selatan memiliki penduduk terbanyak, namun kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Cimahi Tengah yaitu 16.009 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan ini bahkan berada diatas rata-rata kepadatan penduduk Kota Cimahi yaitu 14.160 jiwa/km<sup>2</sup>.

**Tabel 2.7.**  
**Sebaran Penduduk di Kota Cimahi Tahun 2019 - 2021**

No	Kecamatan	2019		2020		2021	
		Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk per Km <sup>2</sup>	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk per Km <sup>2</sup>	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk per Km <sup>2</sup>
1.	Cimahi Selatan	269.072	15.921	240.990	14.226	234.848	14.295
2.	Cimahi Tengah	175.945	17.594	161.758	16.000	160.793	16.009
3.	Cimahi Utara	169.287	12.728	165.652	12.436	165.105	12.584
	<b>Kota Cimahi</b>	<b>614.304</b>	<b>15.281</b>	<b>568.400</b>	<b>14.080</b>	<b>560.746</b>	<b>14.160</b>

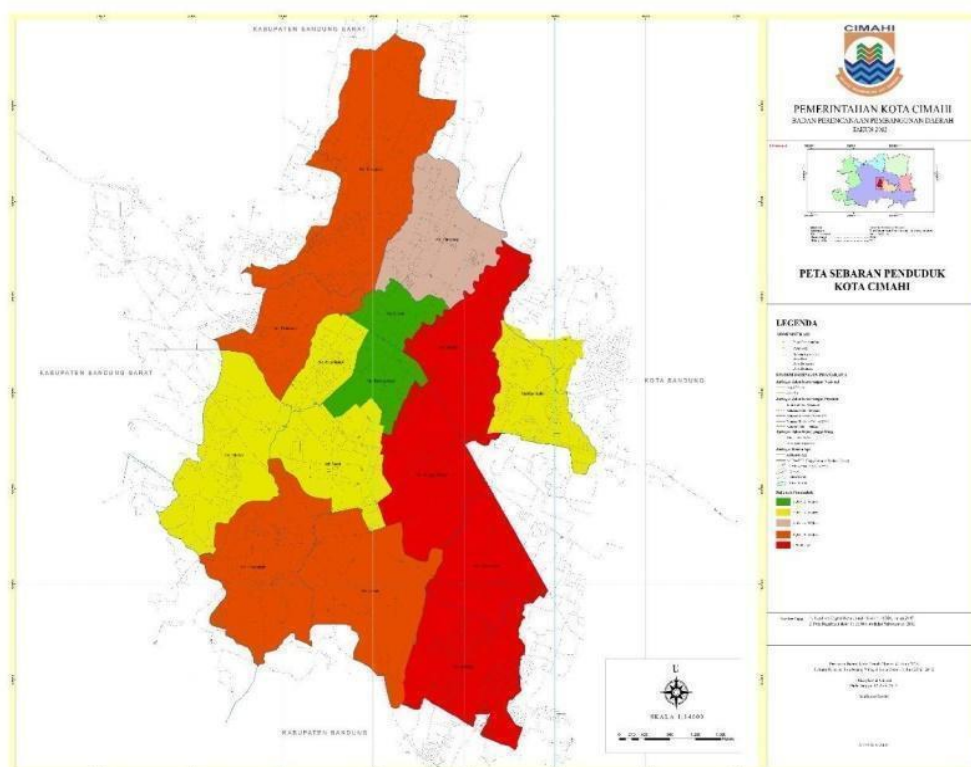
*Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka Tahun 2022, BPS, diolah*

Persoalan lain yang terkait dengan jumlah penduduk adalah sebaran penduduk, kepadatan penduduk dan distribusi penduduk yang tidak merata. Sebaran penduduk yang tidak merata akan menimbulkan

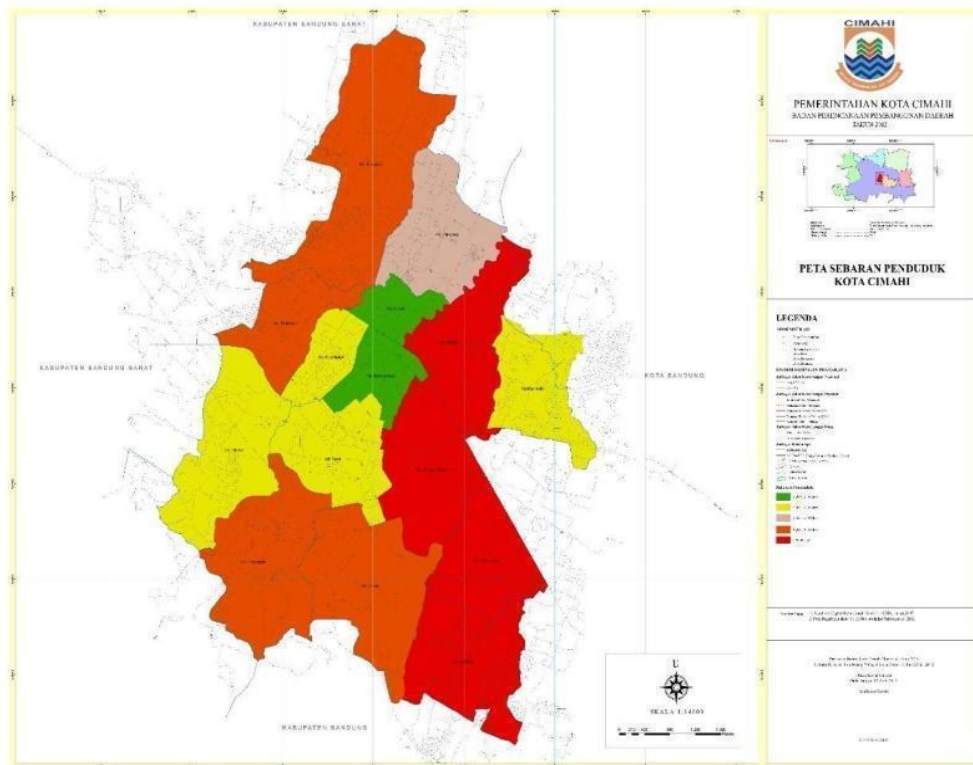
banyaknya permasalahan kependudukan, seperti kemacetan, pengangguran, kebutuhan pemukiman dan masalah-masalah lain.

Laju pertumbuhan Penduduk di Kota Cimahi yang sebesar 0,76% mempunyai konsekuensi dalam pemenuhan fasilitas umum dan pelayanan dasar bukan hanya dari kuantitas tapi juga kualitas, terlebih lagi dengan persebaran penduduk yang tidak merata berdampak pada kemacetan di waktu waktu tertentu karena mobilitas penduduk yang tinggi dengan kondisi wilayah yang terbatas.

**Gambar 2.8.**  
**Peta Sebaran Penduduk Kota Cimahi**



Sumber : Bappeda Kota Cimahi, 2021



Sumber : Bappeda Kota Cimahi, 2021

## 2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Kesejahteraan Masyarakat selama pandemi *Covid-19* pada 2 (dua) tahun terakhir tidak hanya membuat perekonomian mengalami tekanan berat, melainkan juga membuat kesejahteraan masyarakat Indonesia melemah, termasuk Kota Cimahi. Kondisi pandemi itu memaksa seluruh masyarakat beradaptasi dengan tantangan yang ada, karena memberikan dampak sistemik terhadap kondisi ekonomi, kesehatan, dan sosial masyarakat. Namun demikian pemerintah berupaya dalam rangka penanganan pandemi dan perlindungan kesejahteraan masyarakat dengan dibantu kerja sama dan dukungan semua pihak, sehingga meskipun beberapa sektor mengalami pertumbuhan nilai negatif, namun diharapkan mampu melakukan *recovery* baik secara cepat atau bertahap di tahun-tahun mendatang.

### 2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

#### 1. Pertumbuhan PDRB



Kinerja perekonomian Kota Cimahi secara makro ditunjukkan oleh pencapaian nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau total Nilai Tambah Bruto Nilai PDRB. Selama lima tahun terakhir (2017-2021) struktur perekonomian Kota Cimahi didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Konstruksi; Informasi dan Komunikasi; serta Transportasi dan Pergudangan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Cimahi.

Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Kota Cimahi periode 2017-2019 menunjukkan peningkatan namun mengalami penurunan di tahun 2020, kemudian mengalami peningkatan kembali di tahun 2021. PDRB ADHB Cimahi Tahun 2021 mencapai 34.257,40 miliar rupiah, yang artinya mengalami kenaikan sebesar 6,35% dibanding tahun sebelumnya. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami peningkatan Rp.2.046,71 miliar dibandingkan dengan tahun 2020, yakni mencapai 32.639,54 miliar rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di beberapa lapangan usaha sebagai dampak adanya pemulihan ekonomi akibat adanya pandemi *Covid-19*. Lebih rinci mengenai nilai PDRB ADHB Kota Cimahi selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada tabel di bawah :

**Tabel 2.8.**  
**PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha**  
**Kota Cimahi Tahun 2017-2021**

Lapangan Usaha		2017 (Miliar Rupiah)	2018 (Miliar Rupiah)	2019* (Miliar Rupiah)	2020** (Miliar Rupiah)	2021 (Miliar Rupiah)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	58.530	60.600	64.890	67.380	66.970
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-

Lapangan Usaha		2017 (Miliar Rupiah)	2018 (Miliar Rupiah)	2019* (Miliar Rupiah)	2020** (Miliar Rupiah)	2021 (Miliar Rupiah)
C	Industri Pengolahan	12.199.200	13.639.670	15.878.190	15.325.620	15.864.710
D	Pengadaan Listrik dan Gas	84.630	96.170	100.030	98.360	114.880
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16.090	18.290	17.980	19.510	21.500
F	Konstruksi	3.366.030	3.777.640	4.045.570	3.948.860	8.804.402
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.571.450	4.838.010	5.208.370	4.868.210	5.285.840
H	Transportasi dan Pergudangan	1.059.740	1.143.210	1.254.190	1.263.370	1.306.890
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	357.230	394.860	438.550	427.500	437.570
J	Informasi dan Komunikasi	1.312.680	1.429.520	1.469.880	1.963.410	2.227.640
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	842.440	922.500	958.300	964.600	1.067.670
L	Real Estate	238.560	262.200	281.890	294.760	353.810
M.N	Jasa Perusahaan	47.010	52.190	59.820	51.350	55.820
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	681.900	725.980	749.950	728.650	726.630
P	Jasa Pendidikan	1.053.930	1.122.810	1.274.080	1.377.370	1.470.590

Lapangan Usaha		2017 (Miliar Rupiah)	2018 (Miliar Rupiah)	2019* (Miliar Rupiah)	2020** (Miliar Rupiah)	2021 (Miliar Rupiah)
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	266.220	293.170	319.580	310.400	345.270
R,S,T,U	Jasa Lainnya	424.440	463.220	518.260	501.320	508.720
Produk Domestik Regional Bruto ADHB		26.580.080	29.240.030	32.639.540	32.210.690	34.257.400

Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka Tahun 2022, BPS

Keterangan:

\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Pergeseran struktur lapangan usaha sebagian penduduk Kota Cimahi, dapat terlihat dari kontribusi masing-masing lapangan usaha. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 maka lapangan usaha yang mengalami peningkatan kontribusi terhadap PDRB Kota Cimahi pada tahun 2021 adalah Pengadaan listrik dan gas, konstruksi, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, Informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, Real estate, Jasa Pendidikan, dan Jasa Kesehatan dan kegiatan social. Sedangkan sektor lainnya memberikan nilai kontribusi yang konstan dan menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Cimahi pada tahun 2021 tetap dihasilkan oleh sektor Industri Pengolahan, yaitu mencapai 46,31%. Selanjutnya disusul oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 15,43%, sektor usaha Konstruksi sebesar 12,85%, dan sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 6,50%. Sementara peranan sektor lainnya masing-masing masih berada di bawah 5 (lima) persen.

**Tabel 2.9.**  
**Distribusi Persentase PDRB Kota Cimahi Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (persen)**

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,22	0,21	0,2	0,21	0,2
B	Pertambangan dan Penggalan	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	45,9	46,65	48,65	47,58	46,31
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,32	0,33	0,31	0,31	0,34
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
F	Konstruksi	12,66	12,92	12,39	12,26	12,85
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,2	16,55	15,96	15,11	15,43
H	Transportasi dan Pergudangan	3,99	3,91	3,87	3,9	3,9
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,34	1,35	1,33	1,33	1,33
J	Informasi dan Komunikasi	4,94	4,89	4,5	6,1	6,5
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,17	3,15	2,94	2,99	3,12
L	Real Estate	0,9	0,9	0,86	0,92	1,03
M.N	Jasa Perusahaan	0,18	0,18	0,18	0,16	0,16
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	2,57	2,48	2,3	2,26	2,12

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020*	2021**
	Jaminan Sosial Wajib					
P	Jasa Pendidikan	3,97	3,84	3,9	4,28	4,29
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,00	1,00	0,98	0,96	1,01
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,60	1,58	1,59	1,56	1,49
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

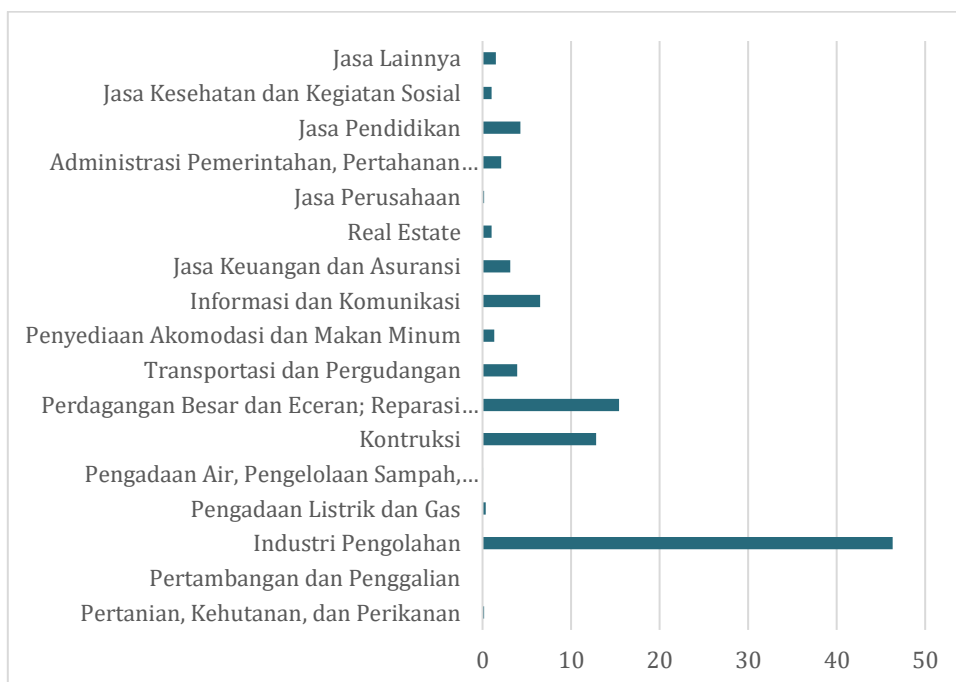
*Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka Tahun 2022, BPS*

Keterangan:

\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

**Gambar 2.9.**  
**Kontribusi 17 Sektor Terhadap Perekonomian Kota Cimahi**  
**Tahun 2021**



Sumber : BPS Kota Cimahi, 2022, diolah

Berdasarkan data tahun 2017-2021, pertumbuhan ekonomi (LPE) di Kota Cimahi mengalami fluktuatif, pada tahun 2017 hingga tahun 2019 LPE di Kota Cimahi mengalami kenaikan, kemudian pada tahun 2020 LPE Kota Cimahi mengalami kontraksi hingga mencapai -2,26%, yakni menurun sebesar 10,11 point dari tahun sebelumnya (2019) yaitu 7,85%. Kemudian kembali mengalami peningkatan sebesar 6,45 point di tahun 2021 yakni 4,19. Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang sempat terjadi di tahun 2020 kemudian mengalami perbaikan di tahun 2021 seiring dengan mulai membaiknya kondisi perekonomian Kota Cimahi yang didukung pula oleh bergulirnya program-program pemulihan ekonomi di Pusat, Provinsi dan di Kota Cimahi.

**Tabel 2.10.**  
**Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto ADHK Menurut**  
**Lapangan Usaha di Kota Cimahi (%) Tahun 2017-2021**

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.82	0.54	2.38	3,18	1,34
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	4.13	7.7	13,96	-7,04	0,43
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.82	5.72	2.59	-1.01	16,29
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.52	5.16	-7.93	7,95	9,7
F	Konstruksi	7.02	7.1	1,42	-2,79	8,24
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.32	2.91	2,85	-6,55	6,51
H	Transportasi dan Pergudangan	5.2	5.3	4,57	-0,13	2,99
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.42	6.57	3,52	-2,62	-3,05
J	Informasi dan Komunikasi	11.80	9.14	3,31	33,56	14,42
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6.81	7.13	1,53	6,07	4,61
L	Real Estate	7.28	8.44	6,29	4,5	19,67
M.N	Jasa Perusahaan	8.13	8.01	6.91	-14,21	5,52
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.01	1.35	2.88	-2,86	-0,87

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020*	2021**
P	Jasa Pendidikan	8.37	4.17	2,06	8,03	2,24
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.57	7.24	6.56	-4,81	10,15
R,S,T,U	Jasa Lainnya	7.46	5.68	4,16	-3,33	2,86
Produk Domestik Regional Bruto		5.43	6.46	7.85	-2.26	4,19

Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka Tahun 2022, BPS

Keterangan:

\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Hampir seluruh lapangan usaha di kota Cimahi mengalami peningkatan di tahun 2021 yang menunjukkan adanya perbaikan aktivitas produksi di sektor tersebut, namun beberapa diantaranya tetap mengalami perlambatan pasca pemulihan ekonomi. Sektor-sektor tersebut yakni Pertanian, kehutanan dan perikanan; Penyediaan akomodasi dan makan minum; Informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; dan jasa Pendidikan. Angka pertumbuhan ekonomi (LPE) di tahun 2021 sebesar 4,19 telah melampaui target LPE Kota Cimahi dalam dokumen Perubahan Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi (RPJMDP), dan masih berada diatas angka LPE Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

**Tabel 2.11.**  
**PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha**  
**Kota Cimahi Tahun 2017-2021**

Lapangan Usaha		2017	2018*	2019	2020*	2021**
		(Miliar Rupiah)	(Miliar Rupiah)	(Miliar Rupiah)	(Miliar Rupiah)	(Miliar Rupiah)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	32.632,80	32.808,20	33.590,00	34.660,00	35.120,00
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	8.983.519,10	9.675.440,10	11.026,48	10.250,61	10.294,91



Lapangan Usaha		2017	2018*	2019	2020*	2021**
		(Miliar Rupiah)	(Miliar Rupiah)	(Miliar Rupiah)	(Miliar Rupiah)	(Miliar Rupiah)
D	Pengadaan Listrik dan Gas	52.217,90	55.204,60	56.630,00	56.060,00	65.200,00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11.230,10	11.809,90	10.870,00	11.740,00	12.880,00
F	Konstruksi	2.601.749,60	2.786.348,30	2.825.910,00	2.747.120,00	2.973.480,00
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.490.134,20	3.591.571,50	3.694.060,00	3.452.240,00	3.677.020,00
H	Transportasi dan Pergudangan	696.741,30	733.662,80	767.190,00	766.160,00	798.080,00
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	248.355,10	264.666,4	273.990,00	266.810,00	258.680,00
J	Informasi dan Komunikasi	1.358.466,50	1.482.689,20	1.531.780,00	2.045.800,00	2.340.870,00
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	616.995,00	661.015,90	671.130,00	711.880,00	744.680,00
L	Real Estate	179.072,40	194.181,20	206.390,00	215.670,00	258.090,00
M,N	Jasa Perusahaan	34.678,40	37.455,70	40.040,00	34.350,00	36.250,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	421.466,20	427.170,50	439.464,00	426.880,00	423.170,00
P	Jasa Pendidikan	724.215,40	754.436,90	769.940,00	8.311.770,00	850.370,00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	166.574,80	178.632,30	190.344,10	181.190,00	199.590,00
R,S,T,U	Jasa Lainnya	289.081,60	305.510,70	318.220,00	307.620,00	316.410,00
Produk Domestik Regional Bruto		19.907.130,30	21.192.603,80	22.856.040,00	22.340.560,00	23.275.780,00

Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka Tahun 2022, BPS

Keterangan:

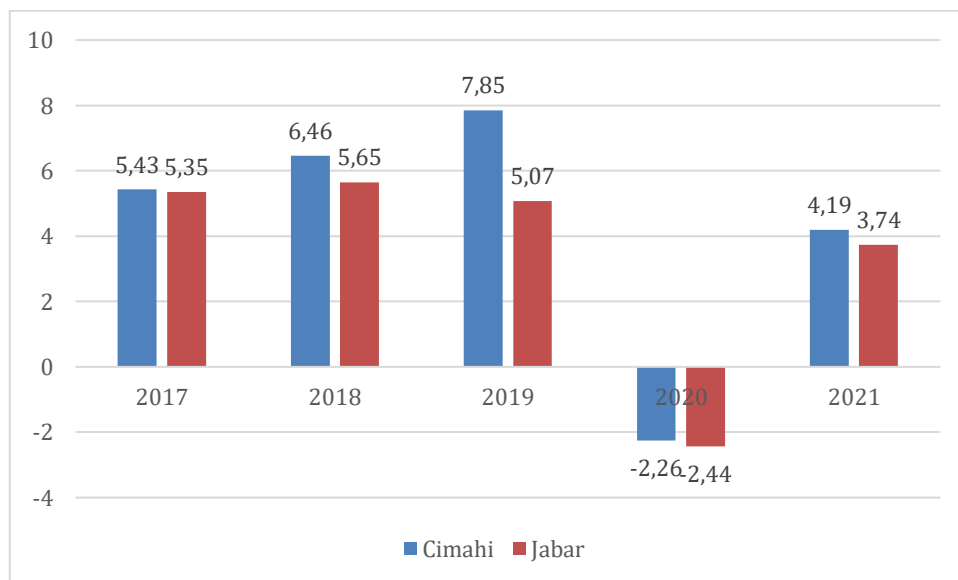
\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Cimahi pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020. Peningkatan nilai PDRB ADHK tersebut dipengaruhi oleh adanya peningkatan produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kota Cimahi tahun 2021 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 23.275,780 miliar rupiah. Angka tersebut meningkat sebesar 935,220 miliar dari tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2021 terjadi Laju pertumbuhan ekonomi yang positif sebesar 4,19%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai -2,2%.

Nilai PDRB ADHK menurut lapangan Usaha pada tahun 2021 dibandingkan Tahun 2020 didorong oleh peningkatan produksi hampir disemua lapangan usaha terkecuali di sektor Penyediaan akomodasi dan makan minum; dan sektor Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.

**Gambar 2.10**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat**  
**Tahun 2017-2021**



Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka dan Jawa Barat Dalam Angka (BPS, 2022)

Laju Perekonomian Kota Cimahi sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 selalu berada diatas Provinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa laju perekonomian Kota Cimahi relative lebih baik dibandingkan rata-rata laju perekonomian Kota dan Kabupaten se Jawa Barat. Pada tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi adalah sebesar 4,19%, Kota Cimahi unggul 0,45 point dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yaitu 4,19%.

## **2. Inflasi**

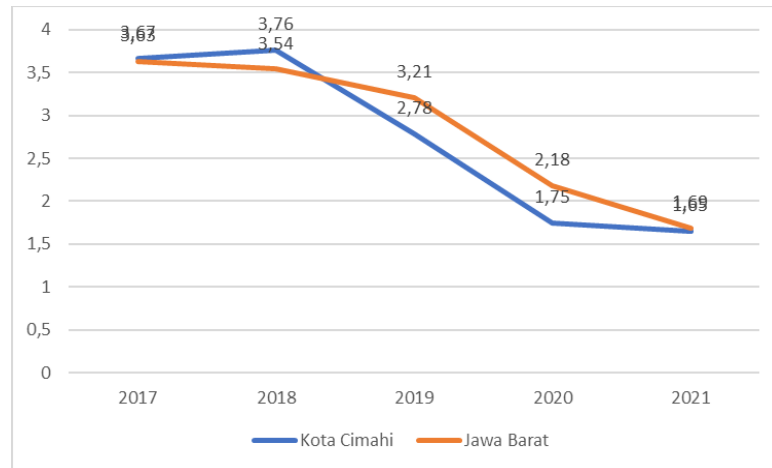
Inflasi menggambarkan kondisi makro perekonomian suatu daerah. Terjadinya inflasi diakibatkan karena adanya ketidak seimbangan arus masuk dan keluar uang maupun barang sehingga inflasi akan mempengaruhi daya beli masyarakat dan pola investasi. Inflasi yang tinggi akan mengakibatkan turunnya nilai uang dari waktu ke waktu, sehingga daya beli masyarakat dan investasi menurun sehingga berdampak pada menurunnya kesejahteraan masyarakat.

Kota Cimahi tidak melakukan penghitungan inflasi tersendiri tetapi mengikuti angka inflasi Kota Bandung, dengan berasumsi bahwa kondisi Kota Cimahi tidak terlalu berbeda dengan Kota Bandung.

Berdasarkan data BPS dalam Provinsi Jawa Barat dalam Angka tahun 2022, pada tahun 2021 angka inflasi Kota Bandung yang menjadi acuan nilai inflasi Kota Cimahi adalah sebesar 1,65%. Diantara 7 Kota/Kabupaten yang menjadi pantauan IHK di Jawa Barat, Kota Bandung merupakan kota dengan inflasi terendah ketiga setelah Kota Tasikmalaya (1,17%) dan Kota Bekasi (1,61% ). Inflasi gabungan Jawa Barat selama tahun 2021 adalah sebesar 1,69% Angka tersebut jauh dari target tahunan Jabar sekitar 3%.

Dari tujuh kota pantauan IHK di Jawa Barat sepanjang tahun 2021 seluruhnya mengalami inflasi yaitu Kota Bogor sebesar 0,32%; Kota Sukabumi sebesar 0,35%; Kota Bandung sebesar 0,26%; Kota Cirebon sebesar 0,33%; Kota Bekasi sebesar 0,28%; Kota Depok sebesar 0,32%; dan Kota Tasikmalaya sebesar 0,27%.

**Gambar 2.11.**  
**Perkembangan Inflasi Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat**  
**Tahun 2017-2021**



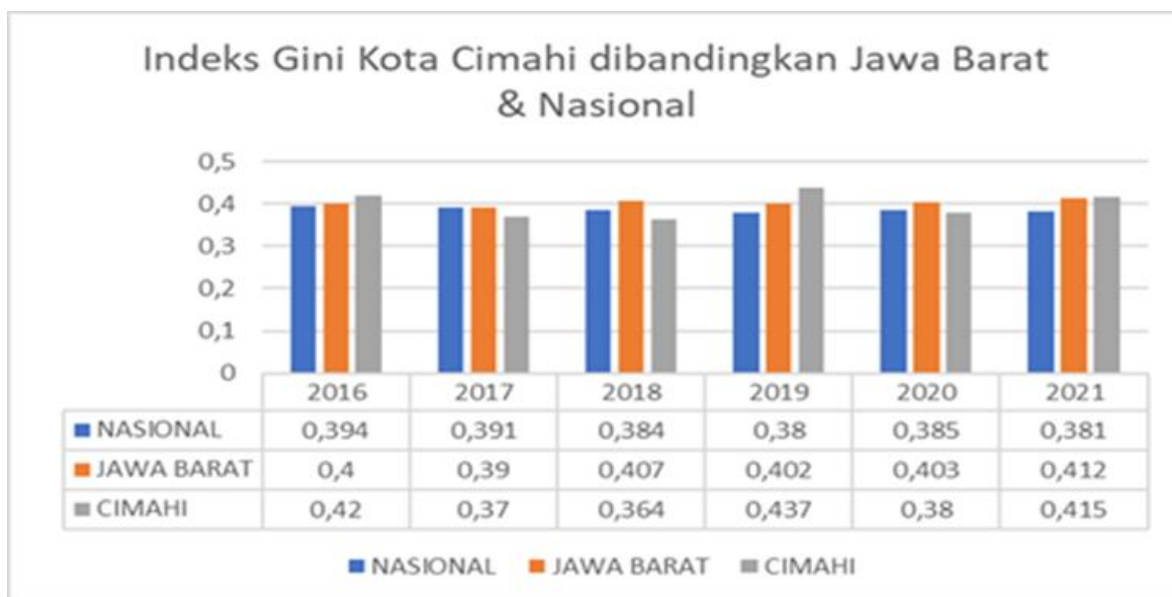
*Sumber : Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2022*

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir nilai inflasi Kota Cimahi di November 2020 merupakan nilai terendah yang dicapai. Tekanan permintaan yang berkurang karena kondisi perekonomian yang berkontraksi akibat pandemi *Covid-19* di tahun 2020, dan terjaganya pasokan pangan pangan strategis akan mendorong laju inflasi yang cenderung rendah di Kota Cimahi.

### **3. Indeks Gini**

Distribusi pendapatan/ketimpangan pendapatan antar golongan pendapatan sebagai salah satu aspek keadilan dalam pembangunan dapat dijelaskan salah satunya dengan menggunakan Indeks Gini. Indeks Gini Kota Cimahi masih tergolong ke dalam daerah dengan ketimpangan pendapatan menengah, dimana sampai dengan tahun 2018 angka indeks gini Kota Cimahi cenderung menurun mencapai angka 0,363 point, yang dapat diartikan bahwa distribusi pendapatan penduduk Kota Cimahi semakin merata namun kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 0,437 point.

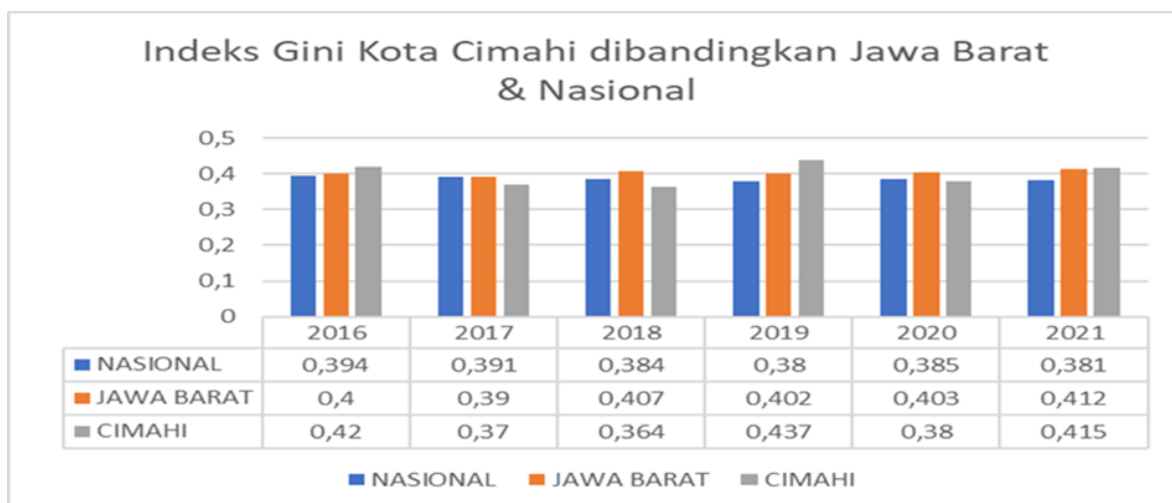
**Gambar 2.12.**  
**Perbandingan Indeks Gini Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2016-2021**



Sumber : BPS, KCDA Kota Cimahi (2022) diolah

Terjadinya penurunan aktifitas perekonomian akibat pandemi Covid-19 pada tahun 2020 diperkirakan memukul masyarakat kelas bawah lebih besar daripada kelas menengah dan atas sehingga ketimpangan akan meningkat, Hal ini terlihat dari meningkatnya capaian indeks gini pada tahun 2020 menjadi 0,38 dan pada tahun 2021 menjadi 0,415.

**Gambar 2.13.**  
**Perbandingan Indeks Gini Kota Cimahi dengan Kota/Kabupaten Sekitar Tahun 2016-2021**



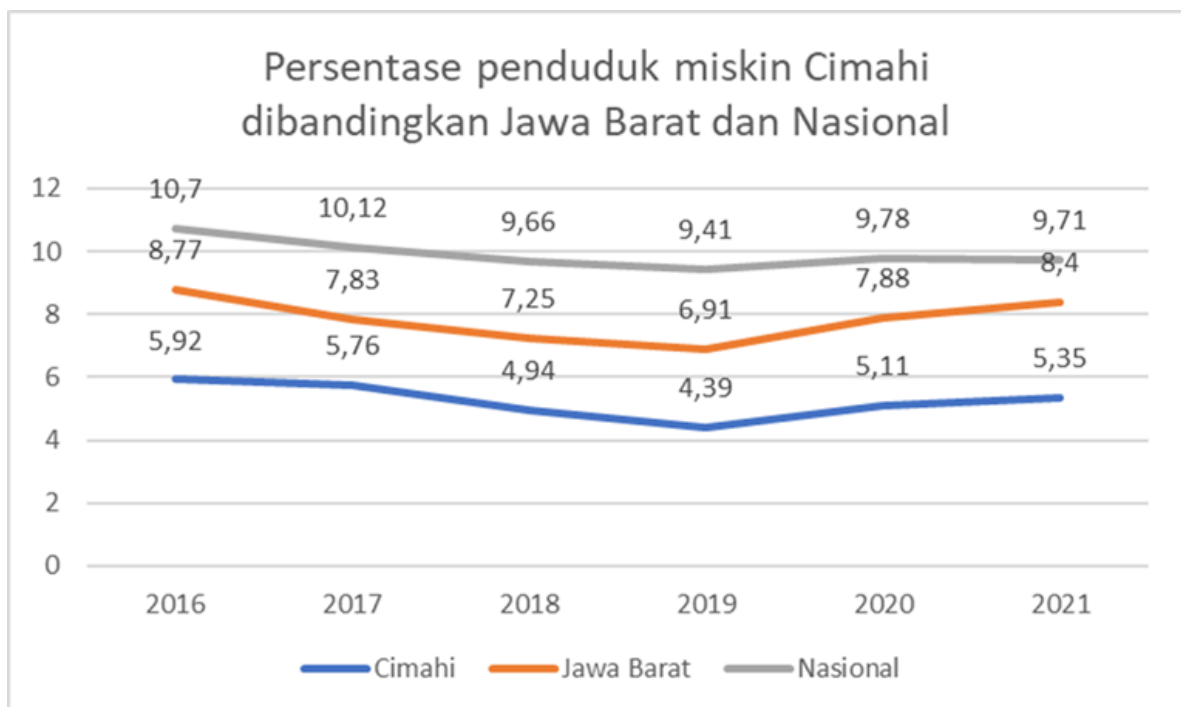
Sumber : Jawa Barat Dalam Angka 2021 BPS

Bila dibandingkan dengan indeks gini Provinsi Jawa Barat dan Nasional, maka Indeks Gini Kota Cimahi pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 berada dibawah Indeks Gini Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Ini menunjukkan bahwa Cimahi memiliki kesenjangan pendapatan yang lebih kecil dibanding Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesenjangan pengeluaran pendapatan di Kota Cimahi relatif lebih kecil dibandingkan Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung dan menunjukkan bahwa pemerataan pendapatan di Kota Cimahi relatif sama dengan Kota/Kabupaten tersebut.

#### 4. Kemiskinan

Penduduk miskin di Kota Cimahi secara total menunjukkan tren menurun selama periode 2016-2019, namun kembali menunjukkan tren yang meningkat pada tahun 2020 dan tahun 2021 sebagaimana tertera dalam gambar berikut :

**Gambar 2.14.**  
**Persentase Penduduk Miskin Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2016-2021**

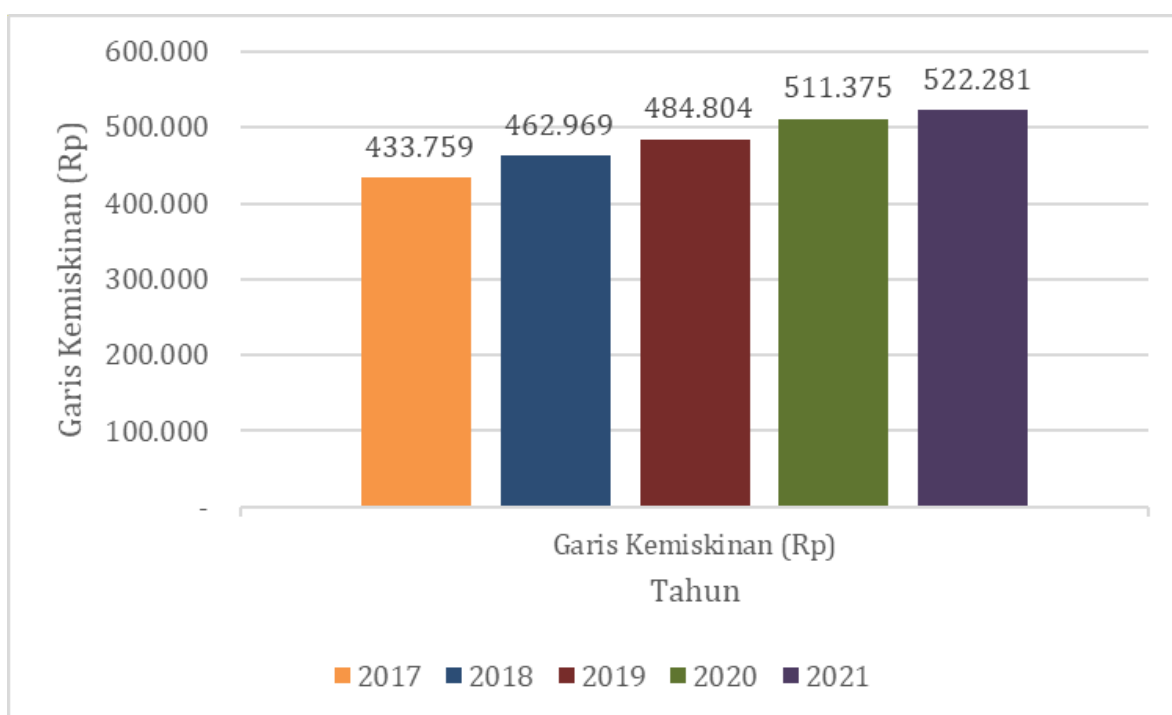


Sumber : BPS Kota Cimahi, 2022, diolah

Dari gambar diatas, diketahui bahwa persentase penduduk miskin di Kota Cimahi pada periode 2016 sampai dengan 2021 selalu berada dibawah persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Barat dan nasional. Setelah mengalami tren menurun sampai dengan tahun 2019 yang mencapai 4,39% angka kemiskinan Kota Cimahi kembali menunjukkan tren meningkat pada tahun 2020 yang mencapai 5,11% dan tahun 2021 sebesar 5,35%, meskipun masih dibawah presentase penduduk miskin Provinsi Jawa Barat dan nasional. Kenaikan presentase penduduk miskin tersebut disinyalir karena dampak pandemi *Covid-19*.

Garis Kemiskinan digunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kota Cimahi mengalami peningkatan setiap tahun selama periode 2017-2021, tahun 2017 sebesar Rp.433.759,- dan di tahun 2021 sebesar Rp.522.281,-

**Gambar 2.15.**  
**Garis Kemiskinan Kota Cimahi Tahun 2017-2021**  
**(Rupiah/Kapita/Bulan)**



Sumber : BPS, KCDA Kota Cimahi, 2022

Secara umum kondisi kemiskinan di Kota Cimahi terus mengalami perbaikan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dimana baik jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan pada periode tersebut, namun kondisi ini melemah pada tahun 2020 dimana jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan Kembali mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Untuk lebih jelasnya kondisi kemiskinan secara umum di Kota Cimahi dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.12.**  
**Kondisi Kemiskinan Kota Cimahi Tahun 2017-2021**

URAIAN	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
Garis Kemiskinan	Rp/Kapita/Bulan	433.759	462.969	484.804	511.375	522.281
Jumlah Penduduk Miskin	Orang	34.530	29.940	26.910	31.640	32.48
Tingkat Kemiskinan	Persen	5,76	4,94	4,39	5,11	5.35

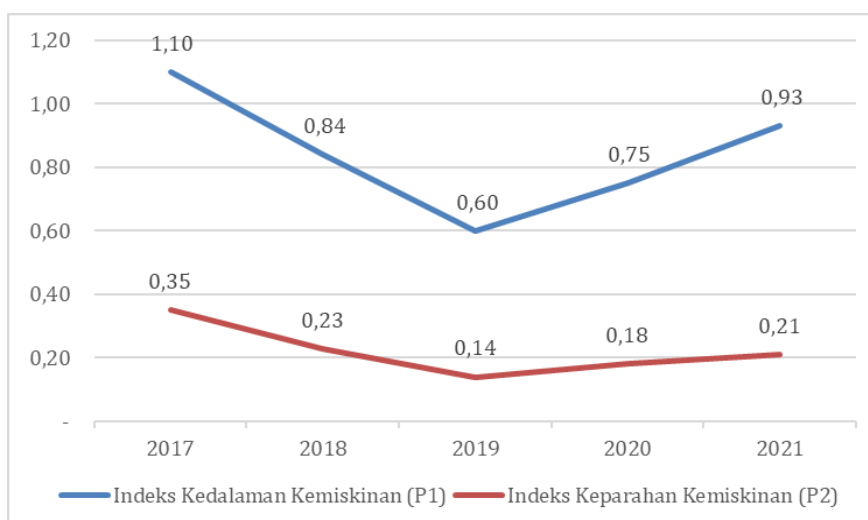
Sumber : BPS, KCDA Kota Cimahi, 2022

Selain garis kemiskinan dan jumlah serta persentase penduduk miskin, indikator lain yang dipergunakan untuk mengukur kondisi kemiskinan adalah Indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index/P1*) dan Indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index/P2*). Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Selama periode 2017–2021 P1 mengalami fluktuasi, dimana nilai tahun 2017 sebesar 1,10 terus menurun sampai dengan tahun 2019 menjadi sebesar 0.60 dan kembali mengalami kenaikan di tahun 2020 menjadi 0.75. dan pada tahun 2021 menjadi 0,93. Kenaikan tersebut diperkirakan akibat pandemic *Covid-19*. Nilai P1 yang semakin rendah menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin dekat. Diharapkan dengan nilai P1 yang semakin



kecil, penduduk miskin yang mendekati garis kemiskinan dapat terangkat dari kondisi miskin.

**Gambar 2.16.**  
**Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Cimahi 2017-2021**



*Sumber : BPS , KCDA Kota Cimahi, 2022.*

Indeks keparahan kemiskinan (P2) menggambarkan sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Sama halnya dengan P1, P2 juga mengalami fluktuasi, dimana pada periode tahun 2017 sebesar 0,35, dan mengalami penurunan menjadi 0,23 di tahun 2018 dan 0,14 di tahun 2019, namun sejalan dengan P1, kembali menunjukkan tren yang meningkat pada tahun 2020 menjadi 0,18 dan 2021 menjadi 0,21. Penurunan dan kenaikan nilai indeks menunjukkan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin kecil. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

## **5. Aspek Kesempatan Kerja**

### **a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting yang digunakan untuk menganalisa dan mengukur capaian hasil

pembangunan. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja, indikator ini merupakan rasio antara jumlah Angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas). Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

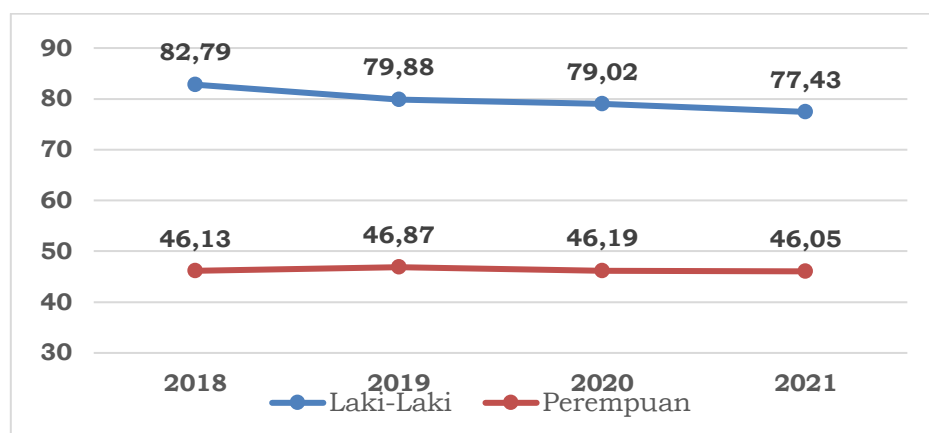
Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Penduduk usia kerja (lebih dari 15 tahun) di Kota Cimahi pada Tahun 2021 sebanyak 472.956 orang bertambah sebanyak 4.209 orang dibandingkan tahun 2020 yang berjumlah 468.747 orang. Adapun jumlah angkatan kerja (penduduk usia kerja yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran) pada 2021 sebanyak 292.252 orang mengalami pengurangan dari tahun 2020 yang semula 293.754 orang. Angkatan kerja sebanyak 292.252 orang terbagi menjadi bekerja sebanyak 254.059 orang dan pengangguran sejumlah 38.193 orang. Adapun pengertian bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Cimahi pada tahun 2018 sebesar 64,49%, mengalami penurunan pada tahun 2019

menjadi 63,39%, dan turun lagi tahun 2020 menjadi 62,67% dan terakhir tahun 2021 menjadi 61,79%.

**Gambar 2.17.**  
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2021**

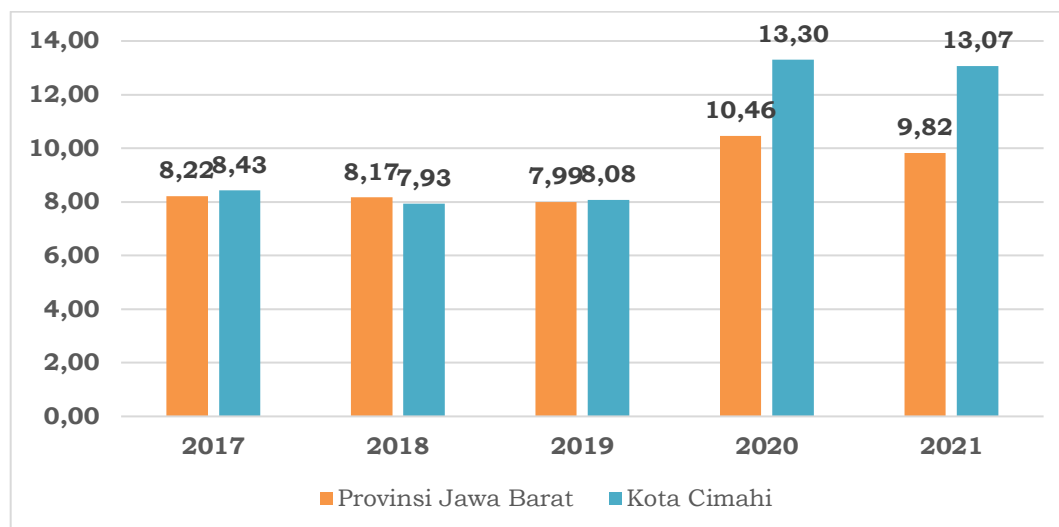


Sumber : BPS Jawa Barat Tahun 2022, diolah

Berdasarkan data diatas, bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, diketahui bahwa TPAK selama periode Tahun 2018-2021, TPAK laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi laki laki dalam kegiatan ekonomi masih lebih tinggi dibandingkan perempuan. Keadaan tahun 2021 TPAK laki-laki di Kota Cimahi mencapai 77,43% sedangkan TPAK perempuan 46,05%.

Sementara itu, TPT di Kota Cimahi pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 memiliki kecenderungan penurunan, namun pada Tahun 2019 mengalami peningkatan. Bahkan Pada Tahun 2020 TPT Cimahi terjadi peningkatan yang signifikan angkanya menjadi 13,30%, yang akhirnya dapat diturunkan kembali di tahun 2021 menjadi 13,07%. Begitu juga terjadi penurunan di tingkat provinsi Jawa Barat pada Tahun 2021 menjadi 9,82%. Adapun TPT di Kota Cimahi dan Jawa Barat Tahun 2017-2021 disajikan pada gambar sebagai berikut :

**Gambar 2.18.**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Cimahi dan**  
**Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2021**



*Sumber : BPS Jawa Barat Tahun 2022, diolah*

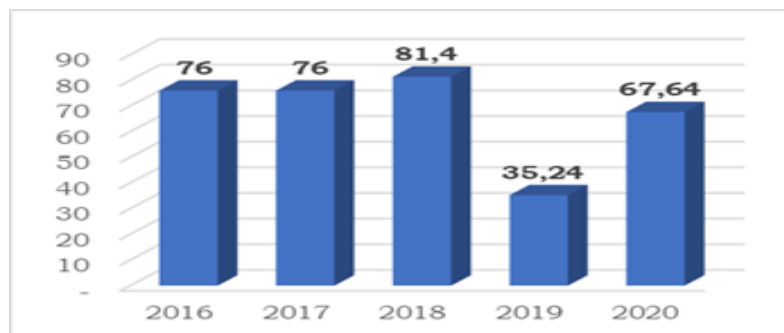
## **2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial**

### **1. Aspek Kesempatan Kerja**

#### **a. Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini**

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia enam tahun dengan prioritas anak usia 4-6 tahun. Capaian APK PAUD selama kurun waktu 2016-2018 cenderung meningkat dari 76% di tahun 2016 menjadi 81,4% di tahun 2018, namun pada tahun 2019 APK PAUD di Kota Cimahi mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi 35,24%, namun kembali meningkat di tahun 2020 menjadi 67,64%. Secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

**Gambar 2.19.**  
**Angka Partisipasi Kasar (APK) Anak Usia 4-6 Tahun Kota Cimahi**  
**Tahun 2016–2020**



*Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2020*

**b. Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah**

Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi jenjang pendidikan dasar dan menengah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota meliputi Jenjang Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (MTs), lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.13.**  
**Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SD dan SMP**  
**Kota Cimahi Tahun 2016–2020**

No	APK/ APM	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI	106,91	101,69	95,22	102.54	95.57
2.	Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs	89,28	88,73	79,74	96.29	91.27
3.	Angka partisipasi Murni (APM) SD/MI	77,98	95.73	89,67	96.45	93.25
4.	Angka partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	73	75.29	77,41	78.81	83.03

*Sumber : Dinas Pendidikan Kota Cimahi Tahun 2021*

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang SD dari tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun dari 106,91 di tahun 2016 menjadi 95,57 di tahun 2020. Sedangkan untuk jenjang SMP

mengalami kenaikan, dari yang semula 89,28 % di tahun 2016 menjadi 91.27 % di tahun 2020.

Selanjutnya, untuk Angka Partisipasi Murni SD mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2016 sebesar 77,98 % menjadi 93,25 % di tahun 2020. Untuk Angka Partisipasi Murni SMP mengalami kenaikan dari 73 % di tahun 2016 menjadi 83,03 % di tahun 2020.

**c. Angka Pendidikan yang Ditamatkan**

Pengelompokan penduduk usia 15 tahun ke atas menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan menghasilkan Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) terlihat dalam tabel berikut :

**Tabel 2.14.**  
**Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) Kota Cimahi Tahun 2020**

No	Uraian	Tahun 2020
		Persentase
1.	Tidak /Tamat SD	14.11
2.	SMP	16.39
3.	SMA	25.39
4.	SMK	21.94
5.	DI, DII, DIII	5.88
6.	Perguruan Tinggi	16.29

*Sumber : BPS Kota Cimahi, 2020, diolah*

Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) merupakan persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan. Indikator pendidikan ini bermanfaat untuk menunjukkan capaian hasil pembangunan pendidikan di suatu daerah, selain itu berguna pula untuk menyusun perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk mengetahui kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah.

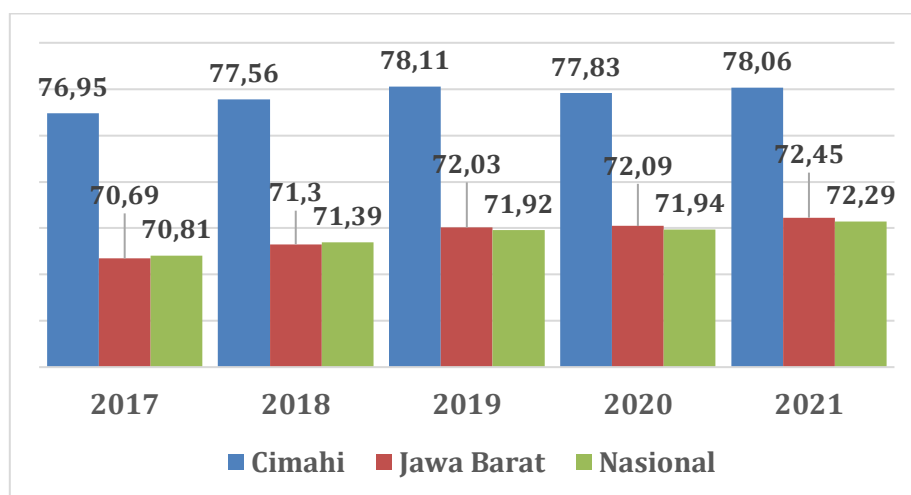
Sesuai dengan data dari BPS pada tahun 2020, jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak atau menamatkan SD sebesar 14,11, tamat SLTP sebesar 16,39%, tamat SLTA sebesar 47,33%, dan tamat Diploma dan Perguruan Tinggi (PT) sebesar 22,17%. Bila dicermati hampir setengahnya dari penduduk Kota Cimahi yang berusia 15 tahun ke atas, memiliki ijazah SLTA (SMA dan SMK).

## 2. Indeks Pembangunan Manusia

Kualitas hidup manusia di Kota Cimahi terus mengalami kemajuan, hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cimahi. Pada tahun 2021, IPM Kota Cimahi telah mencapai 78,06 yang sudah mencapai kategori tinggi.

Apabila dibandingkan dengan nilai IPM Provinsi Jawa Barat dan Nasional, maka IPM Kota Cimahi pada kurun waktu tahun 2017-2021 selalu berada diatas angka IPM Jawa Barat dan Nasional. Peningkatan IPM tahun 2021 merupakan hasil agregasi dari peningkatan komponen pembentuk IPM. Tahun 2021 menunjukkan IPM Cimahi mencapai 78,06 sementara IPM Provinsi Jawa Barat dan Nasional masing-masing sebesar 72,45 dan 72,29. Perbandingan IPM Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat dan nasional disajikan pada gambar berikut ini :

**Gambar 2.20.**  
**Capaian IPM Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional**  
**Tahun 2017-2021**



Sumber : BPS RI, 2021, diolah

Angka IPM menjelaskan kesempatan masyarakat untuk mengakses pelayanan, khususnya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan. Secara umum, capaian pembangunan manusia di Kota Cimahi lebih baik sejak pemekaran. Seluruh dimensi pembangunan mengalami kemajuan yang cukup pesat. Hal ini dapat terlihat dari peningkatan komponen IPM selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu selama periode 2017-2021, walaupun ada sedikit penurunan pada tahun 2020.

**Tabel 2.15.**  
**Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Metode Baru**  
**Kota Cimahi Tahun 2017-2021**

NO	URAIAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Angka Harapan Hidup/AHH (Tahun)	73,61	73,75	73,89	74,03	74,21
2.	Harapan Lama Sekolah/HLS (Tahun)	13,76	13,77	13,79	13,8	13,81
3.	Rata-Rata Lama Sekolah/RLS (Tahun)	10,93	10,94	10,95	10,96	11,08
4.	Pengeluaran per Kapita disesuaikan (PPP) Kota Cimahi (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)	11.353	11.921	12.448	12.025	12.019

*Sumber : BPS Kota Cimahi, 2021, diolah*

Indeks pembangunan manusia Kota Cimahi selama periode 2017-2019 mengalami peningkatan, namun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2020 dan meningkat kembali di tahun 2021, hal ini terjadi sebagai hasil perhitungan dari indikator pembentuknya. Data lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan indikator komponen IPM terkait indeks kesehatan dan indeks Pengetahuan. Indeks kesehatan Tahun 2021 sebesar 83,40 sementara indeks pengetahuan sebesar 75,29.



**Tabel 2.16.**  
**Indeks Kesehatan dan Pengetahuan Kota Cimahi Tahun 2017-2021**

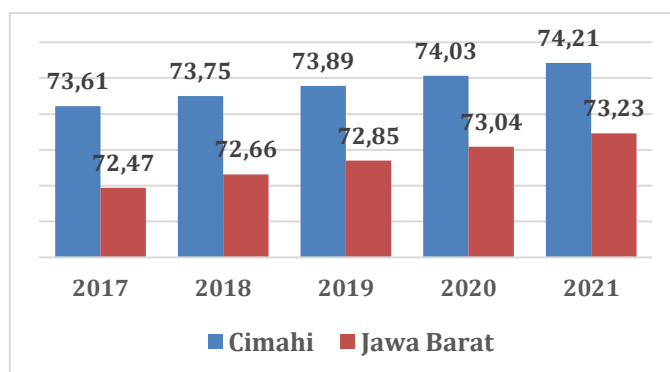
URAIAN	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Kesehatan	82,48	82,69	82,91	83,12	83,40
Indeks Pengetahuan	74,66	74,72	74,81	74,87	75,29

Sumber : Bappeda Kota Cimahi, 2021, diolah

**a. Angka Harapan Hidup (AHH)**

Peningkatan kualitas kesehatan diukur melalui Angka Harapan Hidup (AHH). Pada tahun 2021 AHH Kota Cimahi mencapai 74,21 tahun meningkat 0,18 poin dibandingkan tahun 2020 yang berada di angka 74,03 tahun. Ini berarti pada tahun 2021, setiap bayi yang baru lahir memiliki peluang untuk hidup hingga 74,21 tahun, lebih lama 0,18 tahun dari tahun sebelumnya. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Cimahi dapat dilihat pada gambar grafik berikut :

**Gambar 2.21.**  
**Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Cimahi Tahun 2017 – 2021**



Sumber : BPS Kota Cimahi 2021, diolah

Data di atas menunjukkan bahwa kenaikan AHH Kota Cimahi cenderung meningkat walaupun mengalami perlambatan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

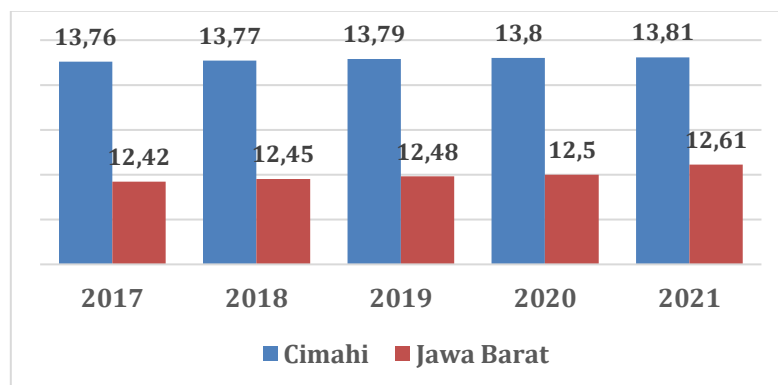
Selanjutnya apabila dibandingkan dengan Angka Harapan Hidup Provinsi Jawa Barat, maka selama kurun waktu tahun 2017 sampai

dengan tahun 2021 Angka Harapan Hidup Kota Cimahi selalu berada diatas Provinsi Jawa Barat. Dimana pada tahun 2021 Angka Harapan Hidup Kota Cimahi sebesar 74,21, sedangkan Provinsi Jawa Barat berada pada 73,23 tahun.

**b. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)**

Selama periode 2017 hingga 2021, Harapan Lama Sekolah terus meningkat tiap tahunnya. Di tahun 2021, Harapan Lama Sekolah di Kota Cimahi telah mencapai 13,81 yang berarti naik 0,01 poin dibanding tahun sebelumnya. Capaian Harapan Lama Sekolah 2021 memberikan gambaran bahwa anak-anak usia 7 tahun di Cimahi memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus D1 atau D2. Berikut disajikan data Harapan Lama Sekolah di Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017-2021.

**Gambar 2.22.**  
**Harapan Lama Sekolah Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat**  
**Tahun 2017-2021**

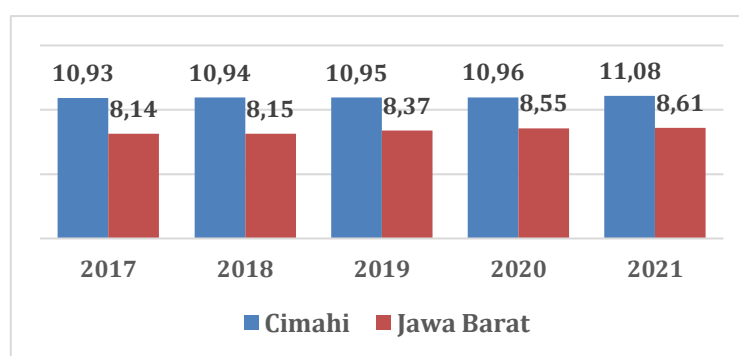


Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat 2021, diolah.

Dari gambar di atas diketahui bahwa angka Harapan Lama Sekolah di Kota Cimahi pada tahun 2017 sampai dengan 2021 selalu berada di atas angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2021 harapan lama sekolah Kota Cimahi sebesar 13,81 tahun, sedangkan Provinsi Jawa Barat pada tahun yang sama angkanya adalah sebesar 12,61 tahun.

Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk di suatu wilayah. Indikator ini merupakan jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal. Rata-rata Lama Sekolah di Kota Cimahi terus bertambah selama periode 2017 hingga 2021. Hingga tahun 2021, secara rata-rata penduduk Kota Cimahi usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas 2 SMA. Berikut disajikan angka rata-rata lama sekolah di Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2017-2021.

**Gambar 2.23.**  
**Rata-Rata Lama Sekolah Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat**  
**Tahun 2017-2021**



*Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2021, diolah*

Sama halnya dengan angka harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah di Kota Cimahi pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 juga selalu berada diatas rata-rata lama sekolah di Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut dapat terlihat pada gambar diatas, dimana pada tahun 2021 rata-rata lama sekolah di Kota Cimahi sebesar 11,08, sedangkan di Provinsi Jawa Barat pada tahun yang sama sebesar 8,61.

### **c. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan**

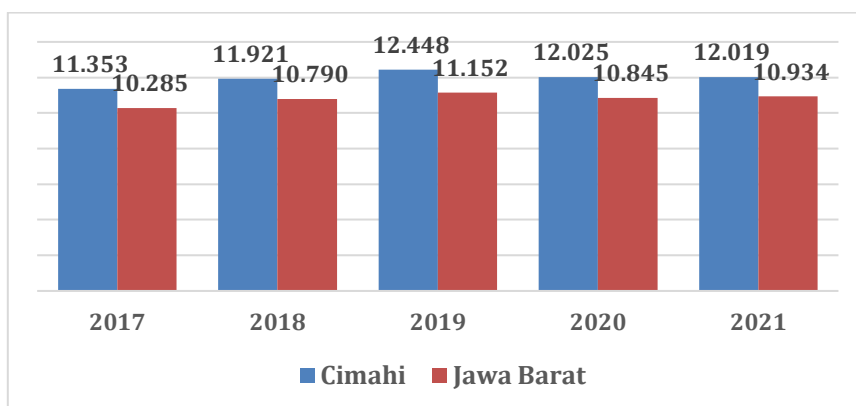
Pengeluaran per kapita yang disesuaikan merupakan salah satu komponen dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengukur standar hidup layak (*decent standard of living*). Pengeluaran per kapita yang disesuaikan adalah nilai pengeluaran per

kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity/ppp*). Rata-rata pengeluaran perkapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012, sedangkan penghitungan PPP menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan 30 komoditas merupakan komoditas non makanan.

Perkembangan pengeluaran per kapita disesuaikan Kota Cimahi selama periode 2017-2021 cenderung meningkat dari tahun 2017 sampai dengan 2019, namun mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021. Pada Tahun 2021 mencapai 12.019 Ribu Rupiah/Orang, yang berarti turun sebesar 0,05% dibanding tahun sebelumnya yang berada pada angka 12.025 ribu rupiah/orang.

Apabila dibandingkan dengan perkembangan pengeluaran per kapita disesuaikan Kota Cimahi selalu berada di atas apa yang dicapai oleh Provinsi Jawa Barat. Pada Tahun 2021 pengeluaran per kapita Kota Cimahi yang mencapai 12.019 Ribu Rupiah/Orang lebih tinggi daripada angka Provinsi Jawa Barat yang berada pada angka 10.934 Ribu Rupiah/Orang. Perkembangan pengeluaran per kapita Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 2.24.**  
**Perkembangan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017–2021**



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2021, diolah

### 2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pencapaian pembangunan dalam bidang seni budaya dan olahraga di Kota Cimahi perlu terus ditingkatkan dari waktu ke waktu sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang berkepribadian tinggi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk reaktualisasi nilai budaya serta pranata sosial kemasyarakatan. Upaya tersebut telah menghasilkan adanya komunitas adat di Cipageran dan Kampung Hukum Adat Cireundeu sehingga Kota Cimahi memiliki keberagaman budaya dan kearifan lokal. Kehidupan Kampung Hukum Adat Cireundeu memegang teguh budaya leluhur seperti pola konsumsi pangan non beras (singkong) dan mengedepankan pelestarian lingkungan.

Kampung Hukum Adat Cireundeu secara rutin menyelenggarakan acara adat Seren Taun (Tutup Tahun sebagai penanda pergantian tahun Saka Sunda. Acara itu digelar sebagai bentuk syukur atas segala karunia yang didapat selama setahun. Seren Taun Cireundeu telah diakui sebagai salah satu warisan budaya non benda.

Pengembangan kebudayaan di Kota Cimahi menemui masalah yang cukup pelik diantaranya menyangkut sarana atau gedung dan ruang publik sebagai wadah bagi seniman-seniman di Kota Cimahi untuk mengapresiasi karya seninya.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kota Cimahi juga fokus dalam melestarikan kebudayaan, hal ini dapat dilihat dengan semakin meningkatnya Persentase kebudayaan yang dilestarikan, dengan persentase pada tahun 2017 baru mencapai 24% dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 52%.

**Tabel 2.17.**  
**Persentase kebudayaan yang dilestarikan di Kota Cimahi Tahun 2020**

Indikator	2017	2018	2019	2020
Persentase kebudayaan yang dilestarikan	24	29,63	45	52

Sumber : Disbudparpora Kota Cimahi, 2020, diolah

Selanjutnya untuk cakupan pembinaan olahraga, persentase pembinaan olahraga sumber daya manusia yang terbina (atlet) pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2017 sebesar 18,18% dan pada tahun 2020 naik menjadi 50,91%. Sama halnya dengan persentase sumber daya manusia yang terbina (atlet), persentase sumber daya manusia yang terbina (pelatih) dan sumber daya manusia yang terbina (pembina) juga terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2017 mencapai untuk pelatih 49,14%, pembina 3,03% dan pada tahun 2020 naik menjadi 76,62% untuk pelatih dan 36,4% untuk pembina. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.18.**  
**Persentase Sumber Daya Manusia Yang Terbina di Kota Cimahi**  
**Tahun 2017-2020**

No	Indikator	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase sumber daya manusia yang terbina (atlit)	18,18	32,73	37,27	50,91
2.	Persentase sumber daya manusia yang terbina (pelatih)	49,14	58,97	68,80	76,62
3.	Persentase sumber daya manusia yang terbina (pembina)	3,03	n/a	21,20	36,4

*Sumber : Disbudparpora Kota Cimahi, 2020, diolah*

Untuk Sarana dan Prasarana Olahraga yang ada di Kota Cimahi sebagai berikut :

**Tabel 2.19.**  
**Data Sarana dan Prasarana Olahraga Di Kota Cimahi Tahun 2020**

No	Uraian	Jumlah (Buah)	Kondisi
1.	Lapangan Bola Kaki dilengkapi lintasan Atletik	6	Baik
2.	Lapangan Basket	14	Baik
3.	Lapangan Bola Volly	52	Baik
4.	Lapangan Tennis	39	Baik
5.	Kolam renang	10	Baik

No	Uraian	Jumlah (Buah)	Kondisi
6.	Lapangan/Gor Bulutangkis	49	Baik
7.	Lapangan Futsal	17	Baik
8.	Meja tenis Meja	41	Baik
9.	Lapangan bola/sepak bola	26	Baik
10.	Lapangan Driving Golf	1	Baik
11.	Fitness	3	Baik
12.	Wall climbing	2	Baik
13.	Lapangan/ gor serbaguna	11	Baik

Sumber : Disbudparpora Kota Cimahi 2020

Keterangan : Fasilitas sarana dan prasarana dikelola oleh berbagai stakeholder yaitu pemerintah, TNI/POLRI, Swasta, Masyarakat, dan sekolah.

**Tabel 2.20.**

**Data Sarana Olahraga Milik Pemerintahan Kota Cimahi Tahun 2020**

No	Uraian	Kondisi	Keterangan
1.	Stadion Sangkuriang	Rusak Berat	PEMKOT (Bagian Aset)
2.	Gor Sangkuriang	Rusak Ringan	PEMKOT (Bagian Aset)
3.	Lapangan Portal	Baik	PEMKOT (Bagian Aset)
4.	Lapangan Cibaligo	Rusak	PEMKOT (Bagian Aset)

Sumber : Disbudparpora Kota Cimahi 2020

Dilihat dari tabel sarana dan prasarana di atas Kota Cimahi memiliki sarana olahraga yang cukup banyak, tetapi yang dimiliki oleh pemkot Cimahi hanya 4 sarana dan itupun kondisi 3 sarana dinyatakan rusak. Sebagian besar sarana olahraga adalah milik TNI, jadi akibat kurangnya sarana olahraga yang dimiliki Pemkot Cimahi kurang setiap ada *event* olahraga tingkat Kota maupun provinsi Dinas Pemuda dan olahraga harus menyewa sarana olahraga kepada pihak TNI sehingga biaya untuk sewa tempat membengkak.

Oleh karena itu untuk peningkatan sarana prasarana olahraga yang ada di Kota Cimahi perlu adanya pembangunan ataupun revitalisasi. Salah satu aset yang dimiliki oleh pemkot cimahi yaitu stadion sangkuriang

kondisinya sekarang rusak berat, perlu diketahui stadion sangkuriang dulunya menjadi kebanggaan warga Cimahi dimana stadion sangkuriang merupakan homebase perserikatan Kota Cimahi, Persatuan Sepakbola Kota Cimahi (PERSEKOCI) yang masuk divisi III sampai 2006, serta menjadi lokasi kompetisi sepakbola antar sekolah. Untuk mengembalikan citra stadion sangkuriang sebagai Stadion legenda yang pernah menjadi kebanggaan masyarakat Cimahi perlu di usahakan yang sungguh-sungguh untuk memperbaiki atau revitalisasi Stadion Sangkuriang Cimahi.

## **2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM**

### **2.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**

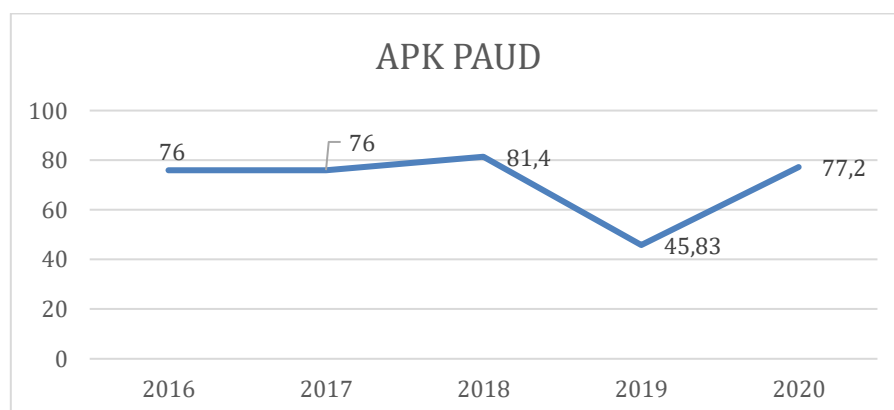
#### **1. Pendidikan**

##### **a. Pendidikan Anak Usia Dini**

Capaian APK PAUD selama kurun waktu 2016-2020 mengalami fluktuatif pada tahun 2016-2018 terus meningkat, hal ini dikarenakan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan PAUD. Namun pada tahun 2019 APK PAUD di Cimahi mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi 45,83%, yang dikarenakan perubahan perhitungan dari Pusat mengenai usia PAUD yang semula 3-6 Tahun menjadi 4-6 tahun, selain itu juga banyak anak yang usia 6 tahun sudah berada di jenjang pendidikan dasar. Selanjutnya pada tahun 2020 APK PAUD meningkat kembali menjadi 77,20%. Secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



**Gambar 2.25.**  
**Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Kota Cimahi Tahun 2016-2020**



Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2020

#### **b. Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah**

Analisa data untuk jenjang pendidikan menengah tidak dibahas dalam dokumen RPD ini dikarenakan merupakan kewenangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 12, tercantum bahwa pendidikan termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Lebih detail berdasarkan UU tersebut, urusan pendidikan anak usia dini dan nonformal (PAUDNI) serta pendidikan dasar (SD dan SMP) menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Kemudian urusan pendidikan menengah (SMA dan SMK) dan pendidikan khusus menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Pelayanan pendidikan di Kota Cimahi secara lokasi pola sebarannya berkelompok (*cluster*). Hal ini terjadi karena fasilitas pendidikan berkumpul ditengah Kota atau di kelurahan-kelurahan di Wilayah Kecamatan Cimahi Tengah, sementara wilayah kelurahan di Cimahi Utara merupakan kawasan KBU (Kawasan Bandung Utara) yang membatasi pembangunan dan di wilayah selatan merupakan daerah industri. Aksesibilitas pendidikan dari sisi kewilayahan bukan merupakan masalah utama, namun terdapat anak usia sekolah yang tidak bersekolah sebanyak 1.200 orang disebabkan oleh faktor ekonomi, budaya dan lingkungan serta peran orang tua.

**Tabel 2.21**  
**Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SD dan SMP**  
**Kota Cimahi Tahun 2016–2020**

No	APK/ APM	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI	106,91	101,69	95,22	102,54	102,50
2	Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs	89,28	88,73	79,74	96,29	96,30
3	Angka partisipasi Murni (APM) SD/MI	77,98	95,73	89,67	96,45	96,50
4	Angka partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	73,00	75,29	77,41	78,81	78,80

Sumber : 1. Dinas Pendidikan Kota Cimahi Tahun 2019  
2. BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Cimahi 2019.  
3. Neraca Pendidikan Daerah Kemendikbudristek, 2020

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang SD dari tahun 2016-2020 mencapai lebih dari 100%, untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SMP mengalami kenaikan sebesar 7,02 poin yang semula 89,28% di tahun 2016, mengalami kenaikan di tahun 2020 menjadi 96.30%. Kenaikan APK SD dan SMP ini menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya meningkat.

Selanjutnya, untuk Angka Partisipasi Murni SD dan SMP mengalami kenaikan, dimana pada jenjang SD tahun 2016 sebesar 77,98% mengalami kenaikan di tahun 2020 menjadi 96,50%, begitu juga untuk jenjang SMP yang dari semula 73,00 (2016) menjadi 78m80 (2020).

Jika dibandingkan antara APK dan APM jenjang pendidikan SD maupun SMP terjadi gap yang jauh, hal ini disebabkan karena siswa dari jenjang pendidikan SD ada yang masih berusia tujuh tahun kurang sudah bersekolah di SD dan ada anak yang berusia lebih dari 12 tahun masih duduk di jenjang SD serta kondisi ini disebabkan pula oleh letak geografis Kota Cimahi yang berdekatan dengan Kota/Kabupaten sekitar, sehingga banyak dari kota dan kabupaten sekitar yang

bersekolah di Cimahi maupun sebaliknya, sehingga kondisi ini berpengaruh pada pencapaian APK dan APM dari Kota Cimahi.

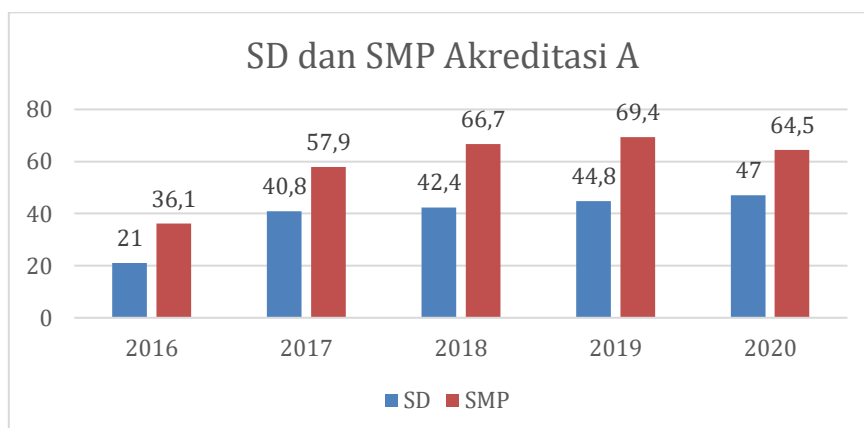
Selanjutnya berdasarkan data yang tersedia, angka putus sekolah baik jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) pada tahun 2019 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Hal ini dikarenakan pemerintah Kota Cimahi dalam beberapa tahun terakhir fokus terhadap pendidikan di Kota Cimahi. Namun pada tahun 2020 angka putus sekolah baik untuk jenjang SD maupun SMP mengalami peningkatan hal ini disebabkan oleh Pandemi *Covid-19* dimana siswa SD dan SMP belajar daring di rumah yang cukup lama, sehingga pada waktu belajar tatap muka banyak siswa sekolah SD maupun SMP yang tidak mau bersekolah lagi. Berikut disajikan data Angka Putus Sekolah di Kota Cimahi pada tahun 2016-2020.

**Tabel 2.22.**  
**Angka Putus Sekolah di Kota Cimahi pada tahun 2017-2020**

No	Putus Sekolah Jenjang	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	SD	39	44	8	42
2	SMP	59	67	4	16

Selain partisipasi, yang perlu diperhatikan dalam bidang pendidikan adalah bagaimana mutu dan daya saing baik murid, guru maupun lembaga sekolah. Berikut ini mutu sekolah yang tercermin dari nilai akreditasi sekolah di Kota Cimahi.

**Gambar 2.26.**  
**Persentase Nilai Akreditasi Sekolah Jenjang SD dan SMP di Kota Cimahi Tahun 2016-2020**



*Sumber : Neraca Pendidikan Daerah (NPD) Kemendikbud*

Mutu sekolah yang tercermin dari nilai akreditasi sekolah masih belum optimal, pada jenjang SD akreditasi yang bernilai A dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang semula di tahun 2016 21% menjadi 47% di tahun 2020, begitupun di jenjang SMP dari 36,1% di tahun 2016 menjadi 64,5% di tahun 2020.

Peningkatan mutu pendidikan akan berbanding lurus dengan kualitas pendidik atau guru, berikut disajikan kualifikasi guru sebagai berikut :

**Tabel 2.23.**  
**Kualifikasi Guru Berdasarkan Jenjang di Kota Cimahi Tahun 2015-2020**

Tahun	Guru SD		Guru SMP	
	S1	<S1	S1	<S1
2016	89,5	10,5	92,3	7,7
2017	89	11	93,7	6,3
2018	92,2	7,8	94,9	5,1
2019	93,7	6,3	95,86	4,15
2020	93.85	5.15	96.1	3.9

*Sumber : Neraca Pendidikan Daerah (NPD) Kemendikbud*

Kualifikasi guru menjadi bagian penting yang mempengaruhi kualitas pendidikan. Persentase kualifikasi guru SD di Kota Cimahi yang lulusan sarjana strata 1 pada tahun 2016 sampai dengan

tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 4,35% sedangkan pada jenjang SMP mengalami peningkatan sebesar 3,8%. Kondisi tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dimana guru harus memiliki ijazah sekurang kurangnya S-1. Bersamaan dengan meningkatnya kualifikasi guru di Kota Cimahi diharapkan kinerja guru meningkat sehingga mutu pendidikan dapat berjalan dengan optimal.

Data Rasio Guru terhadap Murid pada Tahun 2016-2020 disajikan pada tabel di bawah ini. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa Rasio guru : murid untuk jenjang SD pada mengalami peningkatan yang semula pada tahun 2016 1:26 menjadi 1:27 pada tahun 2020, sedangkan pada jenjang SMP pun mengalami peningkatan dari tahun 2016 yaitu 1:23 menjadi 1:29 pada tahun 2020.

**Tabel 2.24.**  
**Rasio Guru Siswa di Kota Cimahi Tahun 2016-2020**

TAHUN	SD	SMP
2016	1:26	1:23
2017	1:24	1:21
2018	1:28	1:22
2019	1:25	1:21
2020	1:27	1:29

*Sumber : Neraca Pendidikan Daerah (NPD) Kemendikbud.*

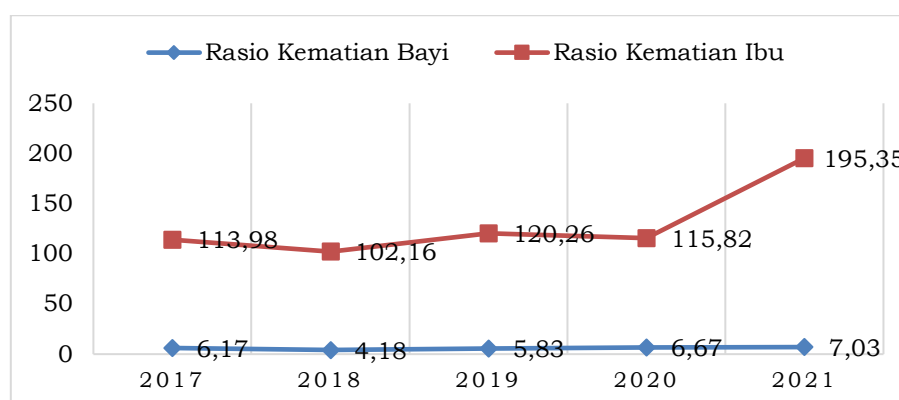
Rasio guru : siswa berdasarkan data di atas berdasarkan peraturan menteri pendidikan Republik Indonesia masih memenuhi standar karena maksimal perbandingan guru:siswa jenjang SD adalah 1:32 dan perbandingan guru:siswa jenjang SMP 1:36.

## **2. Kesehatan**

Kondisi pembangunan kesehatan di Kota Cimahi juga dapat dilihat dari perkembangan Rasio Kematian Ibu dan Rasio Kematian Bayi yang merupakan perhitungan rasio jumlah kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup (KH) dan rasio jumlah kematian bayi per 1000 KH berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Cimahi.

Rasio Kematian Ibu di Kota Cimahi mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2017 berada pada angka 113,98 yang kemudian mengalami peningkatan secara fluktuatif hingga pada 2021 berada pada angka 195,35 Sementara untuk Rasio Kematian Bayi Kota Cimahi pada tahun 2017 berada pada angka 6,17 yang kemudian berfluktuatif pada tahun-tahun berikutnya hingga naik kembali di tahun 2021 menjadi 7,03.

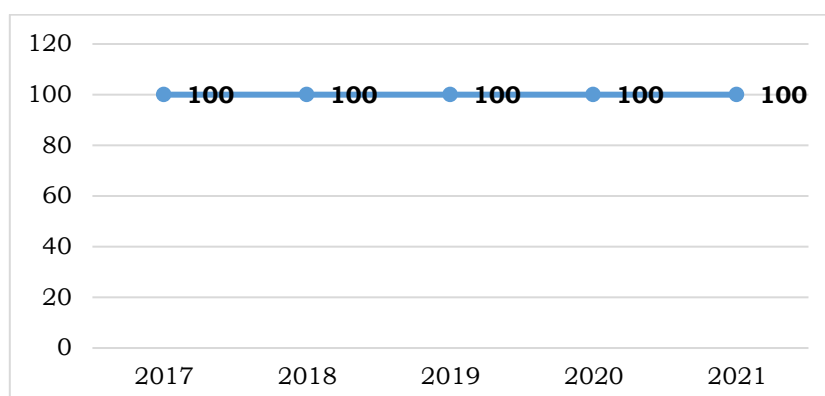
**Gambar 2.27.**  
**Angka Kematian Bayi dan Ibu Kota Cimahi Tahun 2017-2021**



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2022, diolah

Indikator lain yang menggambarkan kondisi kesehatan di sebuah daerah yaitu Cakupan Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI). Cakupan Kelurahan UCI merupakan indikator yang berfungsi untuk menilai keberhasilan pelaksanaan *Universal Child Immunization*. UCI merupakan gambaran suatu kelurahan dimana  $\geq 80\%$  dari jumlah bayi (0-11 bulan) yang ada di kelurahan tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap. Semakin tingginya angka cakupan kelurahan UCI, maka akan berdampak pada peningkatan kesehatan anak-anak di suatu daerah.

**Gambar 2.28.**  
**Cakupan Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)**  
**Kota Cimahi Tahun 2017-2021**



*Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2020*

Pencapaian UCI di Kota Cimahi pada tahun 2017 sudah mencapai 100% yang kemudian terus dipertahankan sampai dengan tahun 2021. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa imunisasi di Kota Cimahi sudah berjalan dengan baik.

Kondisi kesehatan masyarakat Kota Cimahi juga dapat dilihat dari kondisi prevalensi stunting pada balita. Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Sehingga, anak lebih pendek atau perawakan pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Umumnya disebabkan asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Adapun hasil rekapitulasi kegiatan Bulan Penimbangan Balita (BPB) Berdasarkan TB/U (perbandingan tinggi badan dan usia) Tahun 2021 yang dapat menunjukkan angka balita *stunting* di Kota Cimahi pada tahun 2021 disajikan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.25.**  
**Data Balita Stunting Per Kelurahan di Kota Cimahi Tahun 2021**

No	Kelurahan	Jumlah Balita	Sangat Pendek	Pendek	Stunting	%
1	Cibabat	3.089	80	272	352	11,40%

2	Cipageran	2.987	37	188	225	7,53%
3	Pasirkaliki	934	21	83	104	11,13%
4	Citeureup	2.315	40	177	217	9,37%
<b>Kecamatan Cimahi Utara</b>		<b>9.325</b>	<b>178</b>	<b>720</b>	<b>898</b>	<b>9,63%</b>
5	Cimahi	662	36	103	139	21,00%
6	Karang Mekar	725	48	96	144	19,86%
7	Cigugur Tengah	2.879	43	323	366	12,71%
8	Baros	1.104	20	103	123	11,14%
9	Padasuka	2.221	8	141	149	6,71%
10	Setiamanah	1.246	10	63	73	5,86%
<b>Kecamatan Cimahi Tengah</b>		<b>8.837</b>	<b>165</b>	<b>829</b>	<b>994</b>	<b>11,25%</b>
11	Utama	2.215	35	122	157	7,09%
12	Cibeureum	3.578	7	249	256	7,15%
13	Cibeber	1.538	12	260	272	17,69%
14	Leuwigajah	2.806	51	201	252	8,98%
15	Melong	3.749	108	324	432	11,52%
		<b>13.882</b>	<b>213</b>	<b>1.156</b>	<b>1.369</b>	<b>9,86%</b>
		<b>32.044</b>	<b>556</b>	<b>2.705</b>	<b>3.261</b>	<b>10,18%</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2022

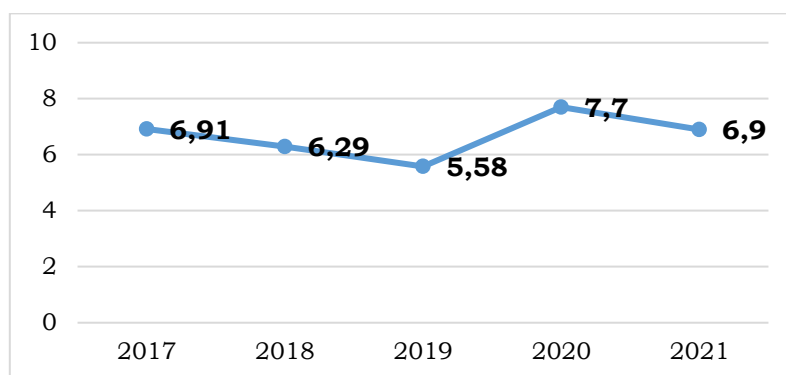
Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Stunting di Kota Cimahi pada Tahun 2021 mencapai 10,18%. Adapun kecamatan yang paling rendah adalah Kecamatan Cimahi Utara yaitu sebesar 9,63%, dan Kecamatan yang paling banyak adalah Kecamatan Cimahi Tengah yaitu sebesar 11,25%.

Selanjutnya untuk angka prevalensi kurang gizi (*underweight*) di Kota Cimahi pada Tahun 2017 sebesar 6,91% dan mengalami penurunan



di Tahun 2018 menjadi 6,29%. Kemudian, pada Tahun 2019 mengalami penurunan kembali hingga menjadi 5,58%. Namun kondisi ini meningkat kembali di tahun 2020 menjadi 7,70% yang kemudian turun kembali di tahun 2021 menjadi 6,9%.

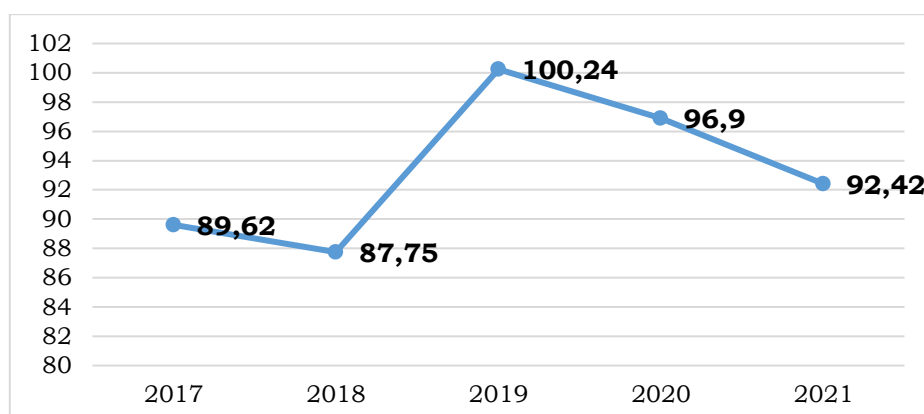
**Gambar 2.29.**  
**Prevalensi Kurang Gizi (*Underweight*) di Kota Cimahi**  
**Tahun 2017-2021**



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2022

Selain itu, kualitas kesehatan juga dapat dilihat dari kondisi kesakitan pada penyakit-penyakit tertentu, diantaranya adalah terkait dengan penyakit TB Basil Tahan Asam (BTA) Positif, kasus HIV/AIDS, dan Demam Berdarah Dengue (DBD). Semakin banyak penduduk yang mengalami penyakit-penyakit tertentu tersebut berarti semakin rendah derajat kesehatan dari masyarakat bersangkutan.

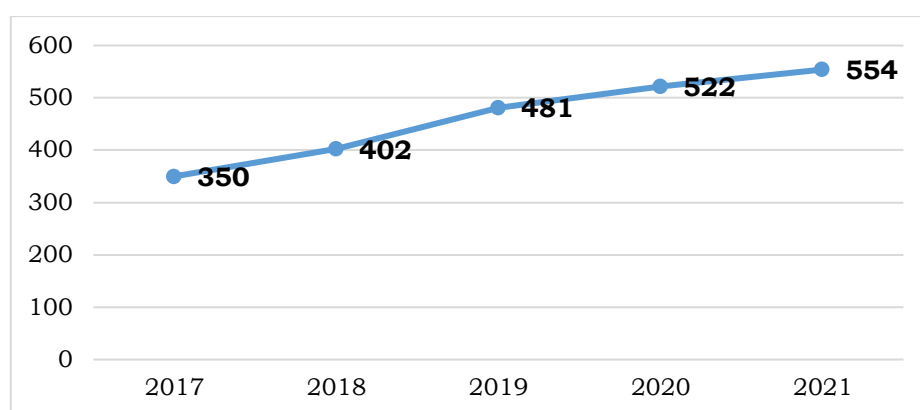
**Gambar 2.30.**  
**Grafik Penemuan Pasien TB BTA Positif Kota Cimahi**  
**Tahun 2017-2021**



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2022, diolah

Penemuan kasus TB BTA Positif di Kota Cimahi dalam kurun waktu 2017-2021 berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2017 penemuan pasien TB BTA Positif sebesar 80,62 sempat turun menjadi 87,75 di tahun 2018, namun meningkat kembali di tahun 2019 menjadi 100,24 yang kemudian menurun menjadi 96,9% di tahun 2020 dan 92,42% pada tahun 2021.

**Gambar 2.31.**  
**Total Kumulatif Kasus HIV/AIDS Kota Cimahi Tahun 2017-2021**

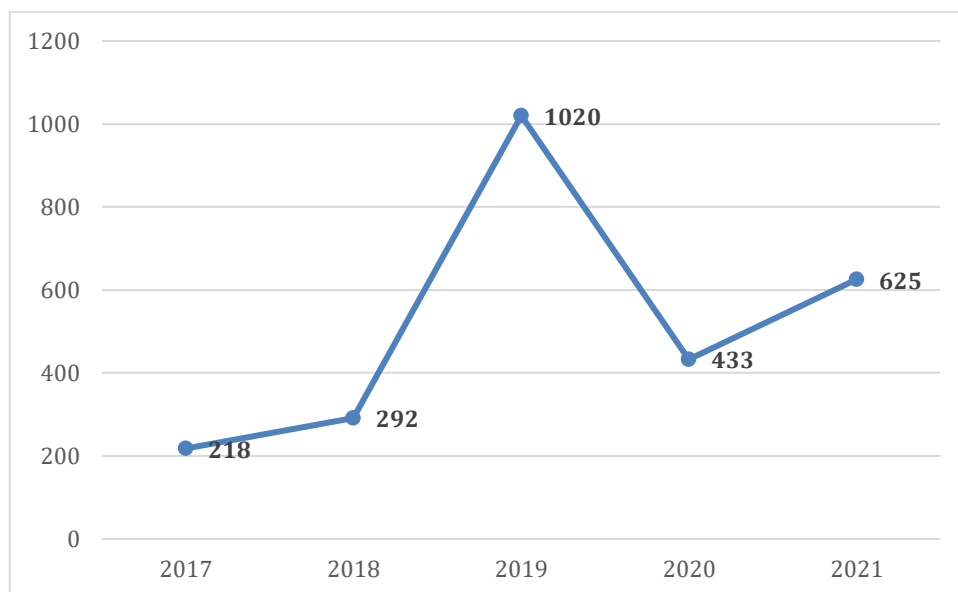


Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2022, diolah

Kasus HIV/AIDS di Kota Cimahi secara kumulatif mengalami tren peningkatan, dimana pada tahun 2017 sebesar 350 kasus dan terus mengalami kenaikan hingga pada tahun 2021 menjadi 554 kasus. Kondisi tersebut menggambarkan tingginya kasus HIV/AIDS di Kota Cimahi.

Di samping HIV/AIDS, Demam Berdarah Dengue (DBD) juga merupakan penyakit yang masih sering ditemukan di Kota Cimahi. Penyakit ini berkaitan dengan kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat. Cakupan penemuan penderita DBD merupakan indikator yang berfungsi untuk mengetahui persebaran penyakit DBD di suatu daerah.

**Gambar 2.32.**  
**Cakupan Penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) yang Ditangani**  
**Kota Cimahi Tahun 2017-2021**



*Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cimahi 2022, diolah*

Gambar di atas menunjukkan bahwa penemuan kasus DBD di Kota Cimahi pada tahun 2017 sebanyak 218 kasus, kemudian meningkat menjadi 292 kasus pada tahun 2018, melonjak drastis menjadi 1.020 kasus pada tahun 2019, sempat menurun tajam menjadi 433 kasus pada tahun 2020 sebelum meningkat kembali menjadi 625 kasus pada tahun 2021.

Pada tahun 2021, sarana dan prasarana kesehatan di Kota Cimahi terdiri dari 1 (satu) Rumah Sakit Pemerintah, 1 (satu) Rumah Sakit TNI-AD, dan 5 (lima) Rumah Sakit Swasta. Puskesmas di Kota Cimahi berjumlah 13 Puskesmas, sedangkan Puskesmas pembantu berjumlah 2 unit. Selain itu terdapat pula pelayanan klinik kesehatan dan sarana kesehatan lainnya.

**Tabel 2.26.**  
**Fasilitas Kesehatan di Kota Cimahi Tahun 2021**

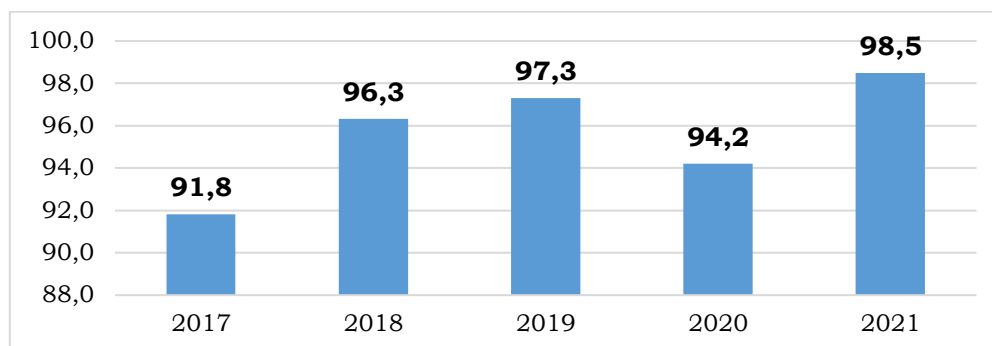
NO	FASILITAS KESEHATAN	JUMLAH
<b>RUMAH SAKIT</b>		
1	RUMAH SAKIT UMUM	7
2	RUMAH SAKIT KHUSUS	1
<b>PUSKESMAS DAN JARINGANNYA</b>		

<b>NO</b>	<b>FASILITAS KESEHATAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	PUSKESMAS RAWAT INAP	1
2	PUSKESMAS NON RAWAT INAP	12
3	PUSKESMAS PEMBANTU	2
<b>SARANA PELAYANAN LAIN</b>		
1	KLINIK PRATAMA	40
2	KLINIK UTAMA	9
3	PRAKTEK DOKTER BERSAMA	4
4	PRAKTEK DOKTER UMUM PERORANGAN	146
5	PRAKTEK DOKTER GIGI PERORANGAN	69
6	PRAKTEK DOKTER SPESIALIS PERORANGAN	11
7	PRAKTEK PENGOBATAN TRADISIONAL	385
8	LABORATORIUM KESEHATAN	5
<b>SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN</b>		
1	USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL	2
2	PEDAGANG BESAR FARMASI	8
3	APOTEK	80
4	TOKO OBAT	10
5	TOKO ALKES	2

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2022

Ketersediaan fasilitas pendukung Kesehatan di Kota Cimahi berdampak pada cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, cakupan kunjungan neonatal pertama ibu hamil, dan cakupan kunjungan bayi. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Kota Cimahi merupakan salah satu bagian deskripsi perkembangan layanan kesehatan dari pemerintah Kota Cimahi bagi ibu hamil.

**Gambar 2.33.**  
**Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan**  
**Tahun 2017-2021**



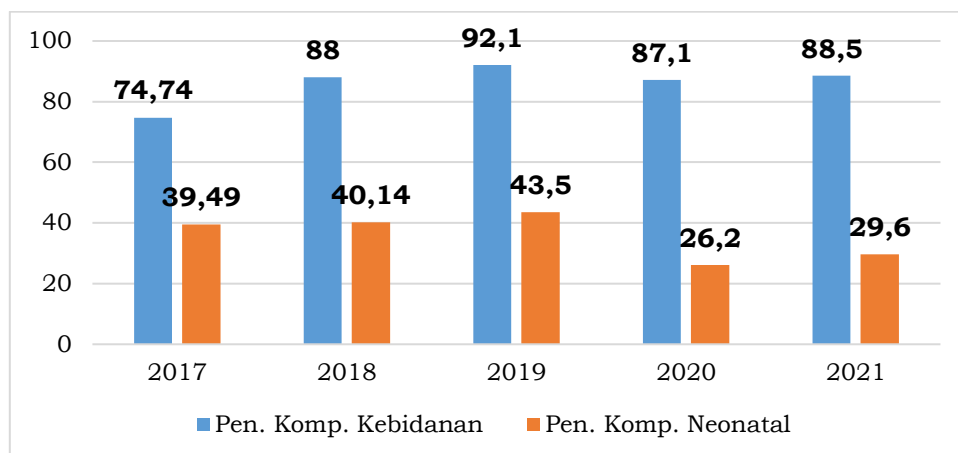
*Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cimahi 2021*

Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Kota Cimahi mengalami tren yang meningkat, dimana pada tahun 2017 angkanya sebesar 91,8% dan terus meningkat tiap tahunnya hingga mencapai 98,5% pada tahun 2021.

Komplikasi pada proses kehamilan, persalinan dan nifas juga merupakan salah satu penyebab kematian ibu dan kematian bayi. Komplikasi kebidanan adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan atau janin dalam kandungan, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk penyakit menular dan tidak menular yang dapat mengancam jiwa ibu dan atau janin. Sebagai upaya menurunkan angka kematian ibu dan kematian bayi maka dilakukan pelayanan/penanganan komplikasi kebidanan. Pelayanan/penanganan komplikasi kebidanan adalah pelayanan kepada ibu hamil, bersalin, atau nifas untuk memberikan perlindungan dan penanganan definitif sesuai standar oleh tenaga kesehatan kompeten pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan.

Keberhasilan program ini dapat diukur melalui indikator cakupan penanganan komplikasi kebidanan. Indikator ini mengukur kemampuan negara dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional kepada ibu (hamil, bersalin, nifas) dengan komplikasi. Capaian indikator penanganan komplikasi kebidanan dan neonatal dari tahun 2017 hingga 2021 disajikan pada gambar berikut :

**Gambar 2.34.**  
**Cakupan Pelayanan Komplikasi Kebidanan dan Neonatal**  
**Kota Cimahi Tahun 2017-2021**

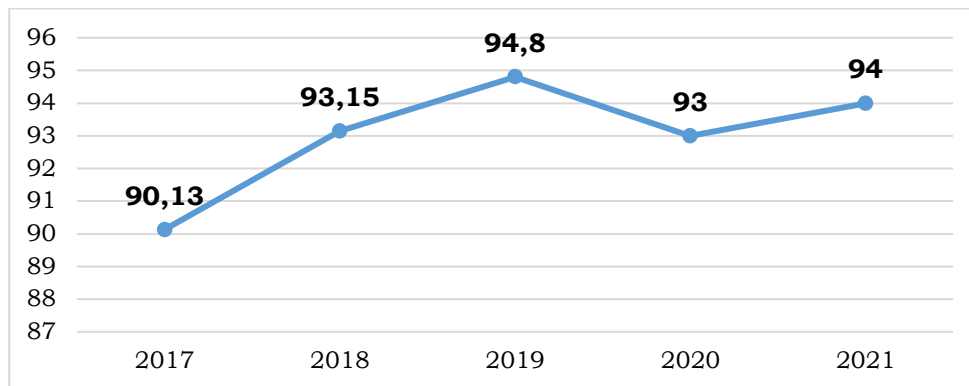


*Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2022, diolah*

Gambar di atas menunjukkan bahwa secara umum cakupan penanganan komplikasi kebidanan di Kota Cimahi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 cenderung berfluktuasi dengan capaian pada tahun 2017 sebesar 74,74%, meningkat menjadi 88% di tahun 2018 dan 92,1% pada tahun 2019, kemudian turun menjadi 87,1% di tahun 2020 dan meningkat kembali menjadi 88,5% pada tahun 2021. Sedangkan pada penanganan komplikasi neonatal juga mengalami fluktuasi dari angka 39,49% di tahun 2017 lalu terus meningkat hingga menjadi 43,5% pada tahun 2019, turun kembali menjadi 26,2% di tahun 2020 dan meningkat kembali menjadi 29,6% pada tahun 2021.

Kondisi pelayanan kesehatan di Kota Cimahi juga berdampak pada cakupan pelayanan kesehatan bayi. Capaian cakupan kunjungan bayi dapat menggambarkan seberapa besar jumlah bayi di Kota Cimahi yang mendapat pelayanan kesehatan. Apabila jumlah kunjungan bayi semakin meningkat, maka kualitas kesehatan bayi di Kota Cimahi dapat ditingkatkan. Kunjungan bayi di Kota Cimahi cenderung berfluktuasi bila ditinjau 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2017 cakupan kunjungan bayi sebesar 90,13, meningkat di tahun 2018 menjadi 92,15% dan 94,8% pada tahun 2019, namun menurun kembali di tahun 2020 menjadi 93,0%, kemudian meningkat kembali di tahun 2021 menjadi 94,0%.

**Gambar 2.35.**  
**Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2017-2021**

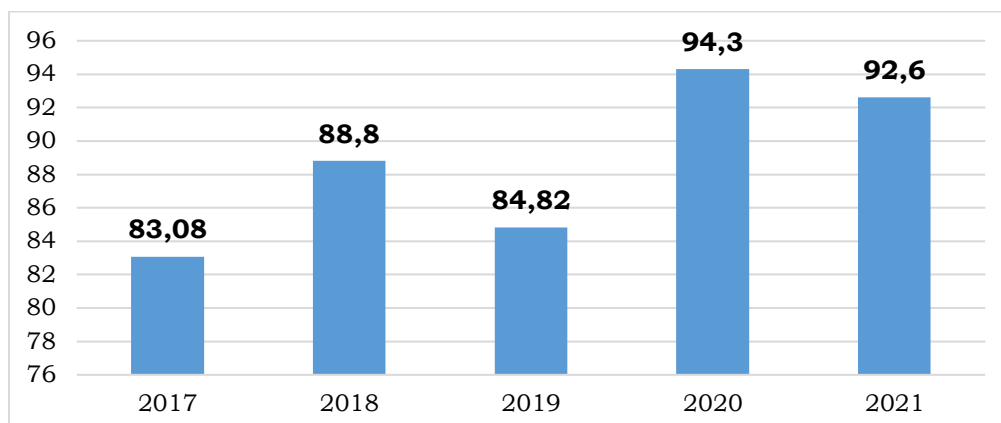


*Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2022, diolah*

Untuk menangani kunjungan bayi yang cenderung mengalami peningkatan dimaksud, maka pemerintah Kota Cimahi melakukan penambahan Posyandu yaitu Posyandu Aktif. Posyandu aktif adalah penambahan dari posyandu purnama dan mandiri, dimana posyandu madya yang cakupan kelima kegiatan pokoknya lebih dari 50%, mampu melaksanakan program tambahan dan sudah memperoleh sumber pembiayaan dari dana Sehat yang dikelola masyarakat yang jumlah peserta masih terbatas yakni kurang dari 50% kepala keluarga (KK) di wilayah kerja posyandu. Sedangkan Posyandu Mandiri merupakan posyandu purnama yang sumber pembiayaannya diperoleh dari dana sehat yang dikelola oleh masyarakat dengan jumlah peserta lebih dari 50% KK di wilayah kerja posyandu.

Berdasarkan gambar di bawah, diketahui bahwa jumlah posyandu aktif di Kota Cimahi pada tahun 2017 sebesar 83,08%. Pada tahun berikutnya persentase posyandu aktif kembali meningkat menjadi 88,8%, namun kembali turun ke 84,82% pada tahun 2019, kembali naik menjadi 94,3% pada tahun 2020 dan menurun kembali di tahun 2021 menjadi 92,6%.

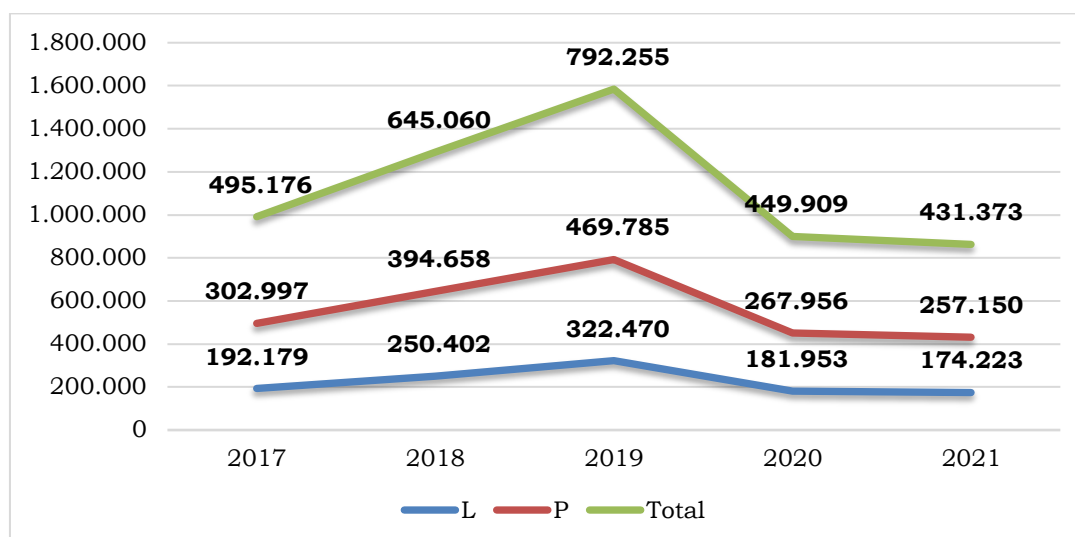
**Gambar 2.36.**  
**Posyandu Aktif Kota Cimahi Tahun 2017-2021**



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2022, diolah

Dalam memberikan pelayanan kuratif kepada Masyarakat Kota Cimahi dan sekitarnya, kunjungan rawat jalan di Puskesmas Kota Cimahi pada tahun 2021 mencapai 431.373 kunjungan. Jumlah ini merupakan penurunan daripada tahun sebelumnya.

**Gambar 2.37.**  
**Kunjungan Puskesmas Tahun 2017-2021**



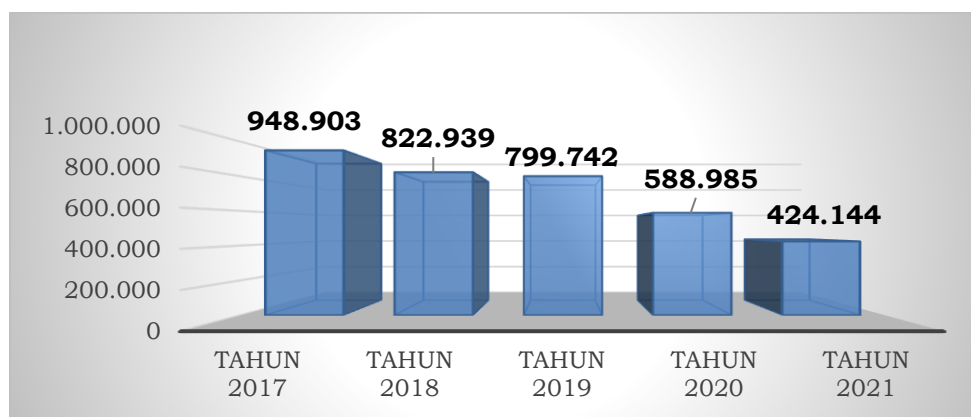
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2022, diolah

Berdasarkan gambar diatas, diketahui bahwa kunjungan Puskesmas pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 cenderung berfluktuatif, dimana pada tahun 2017 jumlah kunjungan Puskesmas sebesar 495.176



kunjungan, dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 645.060 kunjungan, kemudian meningkat kembali di tahun 2019 menjadi 732.255 kunjungan, namun pada tahun 2020 jumlah kunjungan turun cukup signifikan menjadi 449.909 kunjungan dan turun kembali menjadi 431.373 kunjungan pada tahun 2021.

**Gambar 2.38.**  
**Kunjungan Rawat Jalan Rumah Sakit di Kota Cimahi**  
**Tahun 2017-2021**



*Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2022, diolah*

Kunjungan rawat jalan Rumah Sakit pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami fluktuasi. Data pada tahun 2017 menunjukkan jumlah kunjungan sebesar 948.903 kunjungan, turun pada tahun 2018 menjadi 822.939 kunjungan, turun menjadi 799.742 kunjungan pada tahun 2019, kemudian kembali turun cukup jauh menjadi 588.985 kunjungan pada tahun 2020 dan menurun kembali menjadi 424.144 kunjungan pada tahun 2021.

### **3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

#### **a. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik**

Panjang jalan di Kota Cimahi pada akhir tahun 2021 adalah 118,873 km. Angka ini sama dengan tahun sebelumnya, dimana jika dirinci menurut pengelolanya maka sebesar 3,74% dari total panjang jalan merupakan jalan nasional, 7,87 % merupakan jalan provinsi, dan sisanya sebesar 88,39% merupakan jalan kota. Jalan kota sepanjang

105,193 km menurut kondisi jalan terdiri dari 79,37 km atau 75,46% dalam kondisi baik, 19,53 km atau 18,56% kondisi sedang, dan 6,29 km atau 5,9 % kondisi rusak ringan. Pada tahun 2021 persentase jalan kota dengan kondisi rusak sudah tidak ada. Artinya tahun 2021 terdapat jalan kota di Kota Cimahi yang mengalami rusak ringan dan rusak sedang.

**Tabel 2.27.**  
**Statistik Transportasi Kota Cimahi Tahun 2016–2021**

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Jalan Raya</b>						
Panjang Jalan (km)	118.873	119.000	118.873	118.873	118.873	118.873
<b>Panjang Jalan (%)</b>						
Nasional	3,63*	3,74*	3,63*	3,63*	3,63*	3,63*
Provinsi	7,87*	7,87*	7,87*	7,87*	7,87*	7,87*
Kota	88,49*	88,39*	88,49*	88,49*	88,49*	88,49*
<b>Kondisi Jalan Kota (%)</b>						
Baik	74,06*	53,32*	50,28*	53,29*	75,46*	75,46*
Sedang	22,88*	45,18*	42,60*	40,67*	18,56*	18,56*
Rusak	3,06*	1,50*	7,12*	5,76*	5,98*	5,98*
Rusak Berat	0	0	0	0,29*	0*	0*

Sumber : Kota Cimahi dalam Angka 2021, diolah  
\*) Provinsi Jawa Barat dalam Angka 2021, diolah

## **b. Penataan Ruang**

Kinerja penataan ruang di Kota Cimahi belum optimal, dimana masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam aspek pola ruang. Hal ini terkait dengan perkembangan dan pertumbuhan aktivitas sosial

ekonomi masyarakat Kota Cimahi yang cepat dan sangat dinamis. Kondisi ketidaksesuaian tata ruang umumnya terjadi pada kawasan lindung seperti kawasan resapan air dan sempadan sungai.

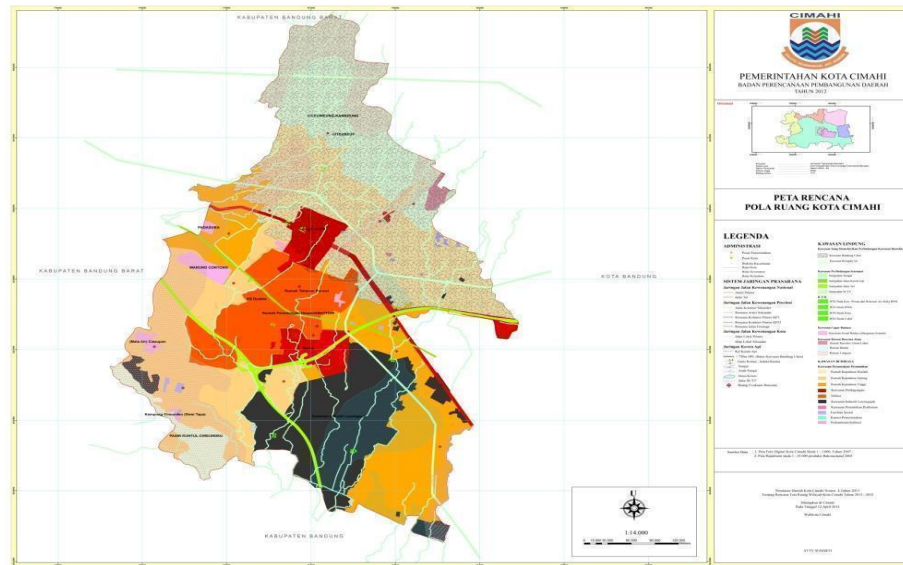
Ruang terbuka hijau di Kota Cimahi diarahkan pada pencapaian target pemenuhan luasan ruang terbuka hijau 30% yang terdiri dari RTH publik sebesar 20% dan RTR Privat sebesar 10% dari luas wilayah kota. Sampai saat ini, RTH yang dimiliki seluas 46,729 ha atau 1,10% dari luas kota.

Hal ini disebabkan berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan RTRW bahwa sempadan sungai dan sempadan jalan yang semula dihitung sebagai RTH menjadi tidak masuk dalam hitungan RTH (*Sumber : DLH dan DPKP Kota Cimahi, 2019*).

Terbitnya kebijakan baru menyebabkan perlu dilakukan penyesuaian atau revisi terhadap penataan ruang wilayah seperti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional yakni pelaksanaan Pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung yang melewati wilayah Kota Cimahi, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun yakni penetapan luas lahan pertanian berkelanjutan di Kota Cimahi, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2017 tentang batas Daerah Kota Bandung dengan Kota Cimahi, Kabupaten Bandung dengan Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat dengan Kota Cimahi serta ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Cimahi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Kelurahan Kota Cimahi.

Adapun Peta Rencana Pola Ruang Kota Cimahi berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Cimahi disajikan pada gambar di bawah :

**Gambar 2.39.**  
**Peta Rencana Pola Ruang Kota Cimahi**



*Sumber : Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Cimahi, Bappeda Kota Cimahi*

#### **4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Pada aspek perumahan, kondisi perumahan yang ada di Kota Cimahi terdiri dari perumahan teratur dan perumahan tidak teratur. Secara umum perumahan yang tidak teratur identik dengan kepadatan dan kekumuhan, sehingga sering dijumpai rumah atau lingkungan/ kawasan permukiman yang tidak layak huni. Kekumuhan suatu wilayah dapat dilihat dari 7 aspek dan 16 kriteria berdasarkan Permen PUPR Nomor 14/ PRT/M/ 2018, yaitu keteraturan bangunan, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah dan proteksi kebakaran.

Dengan keterbatasan lahan yang dimiliki, perumahan di Kota Cimahi diarahkan melalui hunian vertikal dengan konsep rumah susun. Hingga saat ini, Pemerintah Daerah Kota Cimahi telah memiliki 3 (tiga) rusunawa yang berlokasi di Kelurahan Cigugur Tengah, Kelurahan Melong, dan Kelurahan Leuwigajah. Disamping itu, Kota Cimahi terdapat pula rumah susun yang disediakan oleh swasta dan militer, yang diharapkan dapat memenuhi salah satu dari 7 aspek dalam penilaian kekumuhan dan ditetapkan sebagai kawasan tidak kumuh.

Kawasan perumahan yang belum tertata dengan baik di Kota Cimahi pada umumnya adalah perumahan yang dibangun oleh individu di lahan yang belum dipersiapkan dan belum dilengkapi dengan sarana prasarana pendukungnya, penataan bangunan yang tidak teratur dan pada lokasi tertentu cenderung menjadi perumahan yang kumuh.

Berdasarkan data yang tersedia, diketahui bahwa Rasio Luas Kawasan Kumuh di Kota Cimahi pada tahun 2017 sebesar 3,64% terus mengalami penurunan sampai pada tahun 2021 sehingga menyisakan luas 0,006%. Total luas kawasan kumuh yang tertangani dari tahun 2017 s.d 2021 sebesar 176,52 Ha dari luas kawasan kumuh berdasarkan SK Kumuh seluas 176,77 ha, sehingga luas kawasan kumuh kota menjadi berkurang.

**Tabel 2.28.**  
**Rasio Luas Kawasan Kumuh di Kota Cimahi Tahun 2017-2021**

INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021
Rasio Luas Kawasan Kumuh	3,644	1,881	0,652	0,354	0,006

*Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Cimahi, 2022, diolah*

**a. Persentase Cakupan Layanan Air Limbah Domestik**

Persentase cakupan layanan air limbah domestik di Kota Cimahi sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan karena adanya kesulitan dalam penyediaan lahan untuk pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik. Pada tahun 2017 Persentase cakupan layanan air limbah domestik di Kota Cimahi sebesar 76,75%, dan terus mengalami penurunan sehingga pada tahun 2021 menjadi 80,55%. Untuk meningkatkan layanan pengelolaan air limbah kepada masyarakat, selain penyediaan IPAL komunal juga didukung dengan layanan dari UPTD Air Limbah penyedotan lumpur tinja.

**Tabel 2.29.**  
**Persentase Cakupan Layanan Air Limbah Domestik**  
**Tahun 2016-2021**

INDIKATOR	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-----------	------	------	------	------	------	------

Persentase Cakupan Layanan Air Limbah Domestik	n/a	76,50	94,73	91,09	84,2	80,55
--	-----	-------	-------	-------	------	-------

Sumber : DPKP Kota Cimahi, 2022

#### **b. Persentase Cakupan Pelayanan Air Bersih**

Pelayanan dasar lain yang juga berhubungan dengan sektor perumahan dan kawasan permukiman adalah pelayanan air bersih/minum. akses air bersih/minum penduduk di Kota Cimahi dipenuhi melalui sistem perpipaan dan non perpipaan. Sistem perpipaan berasal dari PDAM Tirta Raharja yang dimiliki Kabupaten Bandung, pelayanan UPT Air Minum, dan sumur-sumur artesis yang dikelola oleh KP2A (Kelompok Pengguna dan Pemanfaat Air). sedangkan sistem non perpipaan berupa sumur penduduk yang terlindungi, mata air yang dikelola oleh masyarakat, depot air minum dan sumur artesis dari industri.

Persentase cakupan pelayanan air bersih di Kota Cimahi pada tahun 2017 sebesar 70,52% dan terus mengalami fluktuasi. Hingga cakupan layanan air bersih pada 2021 baru mencapai 69,03%. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.30.**  
**Persentase Cakupan Pelayanan Air Bersih Kota Cimahi**  
**Tahun 2016-2021**

INDIKATOR	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase cakupan pelayanan air bersih	68,83	69,17	69,34	70,35	69,82	69,03

Sumber : DPKP Kota Cimahi, 2022, diolah

Karena adanya keterbatasan sumber air baku di Kota Cimahi, sumber daya air yang di manfaatkan sebagai air baku selain sungai adalah kolam retensi. Di Kota Cimahi terdapat 7 (tujuh) buah kolam retensi yang terletak di Kelurahan Cibeureum, Kelurahan Leuwigajah, Kelurahan Cibabat, Kelurahan Citeureup, dan di Kelurahan Setiamanah. Kolam retensi terbesar dengan luas 1.080 m<sup>2</sup> dan kedalaman 6 m terletak di Kelurahan Leuwigajah.

Kedepannya diupayakan dilakukan inovasi berupa peningkatan nilai tambah kolam retensi sehingga bisa dimanfaatkan sebagai sarana publik untuk rekreasi, kegiatan olahraga masyarakat bahkan budidaya ikan khususnya ikan hias/konsumsi.

**Tabel 2.31.**  
**Kolam Retensi, Embung dan Bangunan Penampung Lainnya di Kota Cimahi Tahun 2021**

No	Lokasi					Dimensi					Fungsi
	Kecamatan	Kelurahan	RT	RW	Alamat	Panjang (m)	Lebar (m)	Dalam (m)	Luas (m)	Volume (m3)	
1	Cimahi Utara	Citeureup	3	9	Pemkot, Masjid As Salam	19	10,5	4	199,5	798	Embung
	Cimahi Utara	Citeureup	3	9	Pemkot, Masjid As Salam	17	10,5	3	178,5	535,5	Embung
2	Cimahi Utara	Cibabat	1	3	RSUD Cibabat	32	19	5	608	3.040,00	Kolam Retensi
3	Cimahi Tengah	Padasuka-Setiamanah	9	8	Samping Nusa Cisangkan Permai	36,5	11	3	401,5	1.204,50	Kolam Retensi
4	Cimahi Selatan	Leuwigajah	8	2	Samping Makam Keramat	54	20	6	1080	6.480,00	Kolam Retensi
5	Cimahi Selatan	Leuwigajah	4	4	Samping Sungai Cisangkan	33,5	24	5	804	4.020,00	Kolam Retensi
6	Cimahi Selatan	Cibeureum-Melong	8	27	Belakang Rusunawa Melong,	48	22	6	1056	6.336,00	Embung
7	Cimahi Utara	Cibabat		19	Pemkot, Green House	4	2	2	8	16	Bangunan Penampung Air Lainnya
Total/rerata						34,3	16,7	4,6	4.328	22.430	

Sumber : DPKP Kota Cimahi, diolah 2020

### c. Persentase Luasan Genangan Terhadap Luas Kota

Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya genangan di Kota Cimahi salah satunya adalah kondisi drainase yang terganggu baik oleh pola masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan

maupun terhalangnya aliran drainase oleh bangunan. Persentase luasan genangan terhadap luas kota di Kota Cimahi kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan penurunan. Pada tahun 2017 persentase luasan genangan terhadap luas kota mencapai 0,38% lalu mengalami penurunan sampai dengan tahun 2020 namun mengalami peningkatan di tahun 2021 sehingga luas genangan masih menyisakan 0,09%.

**Tabel 2.32.**  
**Persentase Luasan Genangan Terhadap Luas Kota**  
**Tahun 2017-2021**

INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase luasan genangan terhadap luas kota	0,38	0,14	0,07	0,07	0,09

*Sumber : DPKP Kota Cimahi, 2022, diolah*

#### **d. Akses Sanitasi Layak**

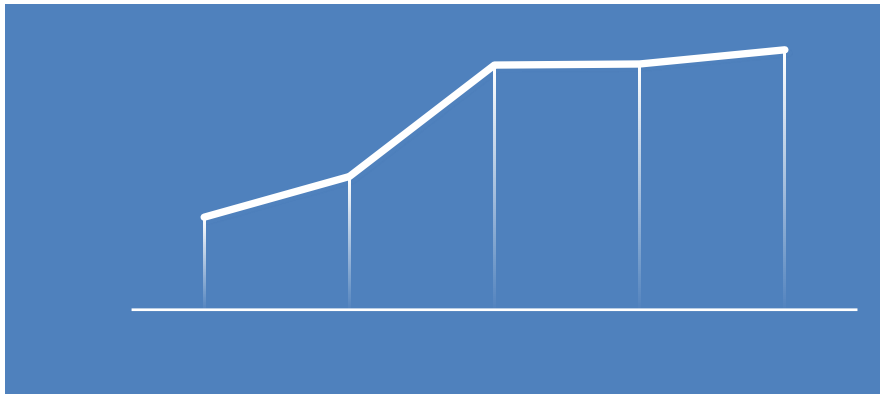
Sanitasi yang baik merupakan elemen penting yang menunjang kesehatan manusia. Sanitasi berhubungan dengan kesehatan lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Buruknya kondisi sanitasi akan berdampak negatif di banyak aspek kehidupan, mulai dari turunnya kualitas lingkungan hidup masyarakat, tercemarnya sumber air minum bagi masyarakat, meningkatnya jumlah kejadian diare dan munculnya beberapa penyakit.

Akses KK menggunakan sanitasi layak (jamban sehat) di Kota Cimahi terus mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2017 persentase akses tersebut berada pada angka 70.02% pada tahun 2017, naik menjadi 72.67% pada tahun 2018, 79.9% pada tahun 2019, 80.0% pada tahun 2020, dan kembali meningkat menjadi 80.9% pada tahun 2021. Akses KK menggunakan Jamban tidak sehat (29.1%) disebabkan oleh dua hal yang pertama ada yang tidak punya jamban sekali sehingga BAB nya



langsung ke selokan (BAB sembarang), dan sebagian besarnya sudah memiliki jamban tetapi tidak memiliki *septic tank*.

**Gambar 2.40.**  
**Penduduk Dengan Akses Sanitasi Layak di Kota Cimahi**  
**Tahun 2017-2021**



Sumber : Profil Kesehatan 2022, diolah

**e. Rumah Sehat**

Pada tahun 2021 cakupan rumah di Kota Cimahi yang telah memenuhi kriteria sebagai Rumah Sehat adalah sejumlah 69,46%, meningkat cukup besar dibandingkan tahun 2020 yang berada di angka 64,17%, 65,04% di tahun 2019, 65% di tahun 2018, dan 63,97% di tahun 2017. Hal ini merupakan hasil dari terus dilakukannya sosialisasi secara berkala sehingga masyarakat sudah mulai memahami kriteria rumah sehat.

**Gambar 2.41.**  
**Persentase Rumah Sehat Kota Cimahi Tahun 2017-2021**



*Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2022, diolah*

## **5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

### **a. Keamanan dan Ketertiban Umum**

Isu tindak kejahatan dan kriminalitas menjadi salah satu isu yang penting untuk diselesaikan karena berkaitan dengan keamanan. Angka kriminalitas di Kota Cimahi menjadi salah satu fokus perhatian baik oleh pemerintah maupun aparat keamanan. Berdasarkan data Tahun 2018 dari Kepolisian Resort Kota Cimahi terdapat beberapa titik rawan kriminalitas yang ada di Kota Cimahi, yaitu : Pesantren, Cimahi Utara; Sentral, Cimahi Utara; Permana, Cimahi Utara; Cipageran, Cimahi Utara; Setiamanah, Cimahi Tengah; Padasuka, Cimahi Tengah; Leuwigajah, Cimahi Selatan; Cimindi, Cimahi Tengah; Contong, Cimahi Tengah; dan Nanjung, Cimahi Selatan.

Data di atas menunjukkan bahwa Kota Cimahi masih terdapat potensi konflik dan rawan terjadi tindak kriminal. Dengan demikian diperlukan upaya peningkatan kesiapan dalam pengelolaan, terlebih posisi Kota Cimahi sebagai daerah perlintasan area metropolitan. Selain itu, gangguan keamanan dan ketertiban yang sering muncul dan berpotensi berkembang adalah konflik antara buruh dan pengusaha dalam pengelolaan manajemen perusahaan, terutama menyangkut kenaikan upah minimum kota (UMK). Hal tersebut dikarenakan banyak perusahaan industri yang melibatkan masyarakat sebagai pegawainya.

Selanjutnya berdasarkan data yang tersedia, diketahui bahwa Persentase penanganan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kota Cimahi selama kurun waktu tahun 2018 sampai dengan 2021 yaitu 100%.

**Tabel 2.33.**  
**Persentase Penanganan Gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Kota Cimahi Tahun 2018-2021**

INDIKATOR	2018	2019	2020	2021
Persentase Penanganan Gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat	100	100	100	100

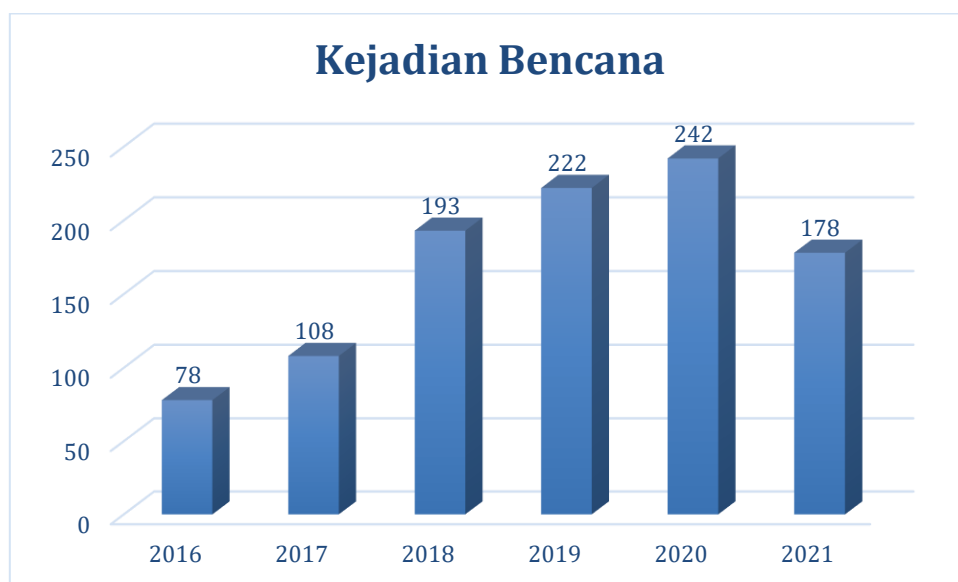
*Sumber : Satpol PP Kota Cimahi, 2022, diolah*

**b. Kebencanaan**

Kota Cimahi termasuk menjadi wilayah yang rentan mengalami bencana. Bencana yang berpotensi besar melanda wilayah Kota Cimahi adalah tanah longsor dan banjir. Berdasarkan peta rawan bencana Kota Cimahi sebagaimana dimuat pada bagian awal bab ini, menunjukkan bahwa wilayah Kota Cimahi mengalami rawan bencana tanah longsor berada di sebagian wilayah Kecamatan Cimahi Utara dan Kecamatan Cimahi Selatan. Wilayah tanah longsor terjadi pada wilayah dengan kelerengan diatas 15%. Sementara itu, wilayah yang berpotensi banjir berlokasi di Cimahi Selatan. Bencana banjir dapat disebabkan adanya banjir bandang atau banjir akibat luapan sungai.

Kota Cimahi juga dihadapkan dengan bencana aliran lahar gunung berapi dan kebakaran. Wilayah rawan bencana aliran lahar gunung berapi berlokasi di daerah aliran sungai-sungai yang hulunya berasal dari Gunung Tangkuban Perahu. Berdasarkan data dari IRBI diketahui bahwa Indeks Risiko Bencana di Kota Cimahi pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 berada pada Kategori Kelas Resiko Sedang. Adapun kejadian bencana di Kota Cimahi dalam kurun waktu tahun 2016-2021 dapat digambarkan pada gambar di bawah ini :

**Gambar 2.42.**  
**Kejadian Bencana di Kota Cimahi Tahun 2016 – 2021**



*Sumber : BPBD Kota Cimahi Tahun 2022, diolah.*

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa kejadian bencana di Kota Cimahi dalam kurun waktu tahun 2016-2020 mengalami peningkatan yang signifikan yang semula pada tahun 2016 sebesar 75 kejadian meningkat sampai 242 kejadian bencana di tahun 2020. Namun, pada Tahun 2021, kejadian bencana di Kota Cimahi Kembali turun menjadi 144 kejadian.

Sementara itu, kepadatan penduduk dan bangunan yang ada di Kota Cimahi menyebabkan Kota Cimahi seringkali menghadapi bencana kebakaran. Kondisi tersebut dapat digambarkan dalam data terkait dengan jumlah bencana kebakaran Kota Cimahi berikut ini :

**Tabel 2.34.**  
**Kejadian Kebakaran di Kota Cimahi Tahun 2016-2021**

NO	TAHUN	KEJADIAN KEBAKARAN	KORBAN JIWA	KERUGIAN MATERI (Rp)
1	2016	38 Kejadian	-	5.795.100.000
2	2017	5 Kejadian	-	210.000.000
3	2018	90 Kejadian	-	11.656.050.000

NO	TAHUN	KEJADIAN KEBAKARAN	KORBAN JIWA	KERUGIAN MATERI (Rp)
4	2019	74 Kejadian	1 meninggal, 2 luka sedang, 1 luka ringan	4.307.700.000
5	2020	68 Kejadian	2 luka ringan	9.306.500.000
6	2021	54 Kejadian	1 luka berat, 3 luka sedang, 4 luka ringan	6.480.700.000

Sumber : Pemadam Kebakaran Kota Cimahi Tahun 2022

Data tersebut menunjukkan bahwa potensi bencana kebakaran di Kota Cimahi masih tinggi serta menimbulkan kerugian yang cukup besar. Dari data kejadian bencana dan kejadian kebakaran di Kota Cimahi menunjukkan bahwa tingginya angka kejadian bencana di kota Cimahi harus menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana baik kesiapsiagaan bagi Pemerintah maupun kesiapsiagaan bagi masyarakat. Selain itu, kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana kebakaran juga masih rendah sehingga bencana yang muncul tidak mendapat penanganan yang cepat karena harus menunggu petugas dari pemerintah Kota karena selama ini masyarakat belum disiapkan dalam menghadapi bencana paling tidak untuk mengambil tindakan awal penanggulangan bencana.

Kota Cimahi telah memiliki daerah evakuasi bencana dan rencana mitigasi bencana. Daerah evakuasi bencana di Kota Cimahi dijelaskan dalam tabel berikut :

**Tabel 2.35.**  
**Daerah Evakuasi Bencana Kota Cimahi**

No	Kelurahan	Kecamatan	Daerah Evakuasi Bencana
1	Cipageran	Cimahi Utara	Stadion Sangkuriang, ruang terbuka, dan gedung atau bangunan

No	Kelurahan	Kecamatan	Daerah Evakuasi Bencana
2	Citeureup	Cimahi Utara	Komplek Perkantoran Pemerintah Kota, ruang terbuka, dan gedung atau bangunan
3	Cibabat	Cimahi Utara	Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi, ruang terbuka, dan gedung atau bangunan
4	Pasirkaliki	Cimahi Utara	Kawasan ruang terbuka, dan gedung atau bangunan
5	Padasuka	Cimahi Tengah	Volodrome, ruang terbuka, dan gedung atau bangunan
6	Setiamanah	Cimahi Tengah	Kawasan Militer, ruang terbuka, dan gedung atau bangunan
7	Cimahi	Cimahi Tengah	Alun-alun Kota, ruang terbuka, dan gedung atau bangunan
8	Karangmekar	Cimahi Tengah	Kawasan Militer, ruang terbuka, dan gedung atau bangunan
9	Cigugur Tengah	Cimahi Tengah	Rusunawa Cigugur Tengah, ruang terbuka, dan gedung atau bangunan
10	Baros	Cimahi Tengah	Kawasan Militer, ruang terbuka, dan gedung atau bangunan
11	Cibeber	Cimahi Selatan	Kawasan ruang terbuka, dan gedung atau bangunan
12	Leuwigajah	Cimahi Selatan	Rusunawa Leuwigajah, ruang terbuka, dan gedung atau bangunan
13	Utama	Cimahi Selatan	SMK Negeri 1 Kota Cimahi, ruang terbuka, dan gedung atau bangunan
14	Cibeureum	Cimahi Selatan	ruang terbuka, dan gedung atau bangunan terdekat
15	Melong	Cimahi Selatan	Rusunawa Melong, ruang terbuka, dan gedung atau bangunan

Sumber : RTRW Kota Cimahi 2012-2032

Data tersebut menunjukkan bahwa Kota Cimahi memiliki daerah evakuasi bencana di semua kelurahan dan kecamatan. Daerah evakuasi

bencana di Kota Cimahi direncanakan lebih difokuskan di ruang terbuka, seperti alun-alun, gedung, dan kawasan yang terbuka.

Kota Cimahi melakukan upaya mitigasi dan adaptasi bencana pada kawasan rawan bencana dengan melakukan tiga aspek mitigasi bencana pada kawasan rawan longsor, yaitu: menetapkan tingkat bahaya longsor di masing-masing kawasan, melakukan penanaman tanaman keras di kawasan rawan longsor, dan menetapkan kawasan kawasan rawan gerakan tanah dan longsor sebagai ruang terbuka hijau (RTH) pengaman lingkungan. Sementara itu, pemerintah Kota Cimahi melakukan tiga aspek mitigasi bencana pada kawasan rawan aliran gunung berapi, yaitu menetapkan tingkat bahaya aliran lahar gunung berapi di masing-masing kawasan, memindahkan bangunan yang ada di kawasan rawan aliran lahar gunung berapi tingkat tinggi, dan mengembangkan kawasan dan evakuasi bencana di Kecamatan Cimahi Utara.

Beberapa indikator kebencanaan di Kota Cimahi selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan kinerja yang cukup baik. Adapun rinciannya disajikan pada tabel di bawah :

**Tabel 2.36.**  
**Indikator Kebencanaan di Kota Cimahi Tahun 2017-2021**

NO	INDIKATOR	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks resiko bencana	Kategori	Kelas Resiko Sedang	Kelas Resiko Sedang	Kelas Resiko Sedang	Kelas Resiko Sedang	Kelas Resiko Sedang
2	Waktu tanggap bencana	Menit	15	15	15	15	15
3	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan bantuan	Persen	100	100	100	100	100
4	Persentase luasan banjir terhadap luas kota	Persen	0,38	0,14	0,07	1,03	0,004
5	Jumlah kejadian bencana yang ditangani	Kejadian	130	151	222	242	178

*Sumber : BPBD Kota Cimahi, 2020, diolah*

## **6. Sosial**

Urusan sosial merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Hal tersebut merupakan kepanjangan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menyebutkan bahwa negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dan dalam memenuhi SPM sesuai dengan ketentuan Permensos 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/kota mendefinisikan Standar Teknis sebagai standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Standar Teknis Pelayanan Dasar adalah ketentuan mengenai mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar pada standar pelayanan minimal bidang sosial di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota yang berhak diperoleh setiap penerima Pelayanan Dasar secara minimal.

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Dalam implementasinya kesejahteraan sosial memang tidak dapat diwujudkan hanya dengan intervensi-intervensi sosial saja namun membutuhkan campur tangan dari penyelenggaraan urusan lainnya. Dalam prakteknya urusan sosial lebih fokus pada penanganan dampak-dampak atau fenomena sosial yang membutuhkan intervensi sosial seperti keberadaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). PPKS memiliki 21 kriteria mulai dari anak terlantar hingga pada keluarga



Bermasalah Sosial Psikologis. Adapun kondisi PPKS di Kota Cimahi dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 2.37.**  
**Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**  
**Kota Cimahi Tahun 2019 - 2021**

No	Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Anak Bayi Terlantar	38	38	38
2	Anak Terlantar	593	570	201
3	Anak yang berhadapan dengan Hukum	34	5	6
4	Anak Jalanan	65	66	67
5	Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)	285	278	513
6	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah	26	26	26
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	5	5	5
8	Lanjut usia terlantar	2.812	2.614	6538
9	Penyandang disabilitas	1.137	1.144	795
10	Tuna susila	29	0	0
11	Gelandangan	2	29	29
12	Pengemis	70	2	2
13	Pemulung	46	70	70
14	Kelompok Minoritas	18	38	52
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	74	18	18
16	Korban Penyalahgunaan NAPZA	4	74	74
17	Korban <i>Trafficking</i>	7	4	4
18	Korban tindak kekerasan	3	7	7

No	Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
19	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	1.857	3	3
20	Fakir Miskin	10.239	10.214	10.213
21	Keluarga bermasalah sosial psikologis	130	129	26
<b>Jumlah</b>		<b>17.474</b>	<b>17.210</b>	<b>14.405</b>

Sumber : Dinas Sosial Kota Cimahi, 2021

Data diatas menunjukkan bahwa variasi PPKS didominasi oleh fakir miskin, penyandang Disabilitas dan lanjut usia terlantar. Tingginya fakir miskin di Kota Cimahi yang terdata dan terverivali sebanyak 10.213 jiwa. Hal tersebut menunjukkan bahwa belum adanya pemerataan hasil pembangunan sehingga masih menimbulkan berbagai permasalahan sosial. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Kota Cimahi harus fokus dalam memberikan pelayaa dan perlindungan kepada PPKS. Pada Tahun 2021 total Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial sebanyak 14.405 jiwa.

**Tabel 2.38.**  
**Jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kota Cimahi Tahun 2021**

JUMLAH DTKS BERDASARKAN ANGGOTA RUMAH TANGGA (JIWA)			
KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH (2020)	JUMLAH (2021)
CIMAHI SELATAN	MELONG	13.258	31.795
	CIBEUREUM	13.292	39.897
	UTAMA	6.157	16.091
	LEUWIGAJAH	9.418	26.436
	CIBEBER	6.665	16.711
CIMAHI TENGAH	BAROS	3.650	9.870
	CIGUGUR TENGAH	10.235	19.442

	KARANGMEKAR	2.742	7.742
	SETIAMANAH	5.039	12.477
	PADASUKA	7.682	24.387
	CIMAH	3.427	7.773
CIMAH UTARA	PASIRKALIKI	2.795	7.224
	CIBABAT	10.956	23.605
	CITEUREUP	8.657	19.141
	CIPAGERAN	11.324	25.537
<b>TOTAL</b>		<b>115.297</b>	<b>288.185</b>

Sumber : Dinas Sosial Kota Cimahi Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa jumlah DTKS tiap kelurahan berbeda, namun ada beberapa kelurahan yang angkanya cukup tinggi yaitu seperti di kelurahan Melong, Cibeureum, Cigugur tengah, Cibabat, dan Cipageran.

Tingginya data DTKS di beberapa kelurahan tersebut menandakan bahwa belum terpenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri dan hidup dalam kondisi kemiskinan. Mereka umumnya mengalami hambatan fungsi sosial dalam hidup bermasyarakat, kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dasar dan tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini, yang dihadapi adalah belum terpenuhinya pelayanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, sandang, pangan, papan, dan kebutuhan dasar lainnya. Pada tahun 2021 data DTKS sebanyak 288.185 ART/jiwa yang tersebar di 15 kelurahan.

Pemenuhan kebutuhan dasar bagi PPKS membutuhkan pengelolaan tersendiri, karena jangkauan dan populasi sasaran yang luas membutuhkan koordinasi dan kemitraan dalam pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan fungsi-fungsi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui pendekatan dan intervensi profesi pekerjaan sosial sehingga PPKS dapat ditingkatkan fungsi sosialnya agar mampu mengakses pelayanan sosial dasar.

Keterbatasan kemampuan pemerintah dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial diperlukan efektifitas sistem perlindungan sosial melalui pelayanan rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan sosial serta program kompensasi bagi masyarakat miskin yang terkena dampak negatif dari berbagai bencana social dan kebijakan ekonomi.

Dalam rangka mengatasi permasalahan sosial, pemerintah perlu menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial yang berkualitas dan produktif sehingga dapat meningkatkan kapabilitas, harkat, martabat dan kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial, mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat, mengembangkan sistem perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial, serta memperkuat ketahanan sosial bagi setiap warga agar tidak mengalami masalah kesejahteraan sosial.

Keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat miskin diwujudkan dengan peningkatan penyediaan sarana prasarana pelayanan dan rehabilitasi sosial, bantuan sosial, pemberdayaan sosial ekonomi, pemberian jaminan sosial dan peningkatan kualitas manajemen kelembagaan sosial masyarakat. Perlu dicermati khusus bidang perlindungan dan kesejahteraan sosial seharusnya dapat meningkatkan aksesibilitas PPKS terhadap pelayanan sosial dasar, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat, sehingga pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, anak telantar termasuk anak jalanan, lanjut usia (lansia) telantar, penyandang cacat telantar, korban bencana alam dan sosial (pengungsi), dan kelompok rentan lainnya dapat dicapai. Upaya pemberdayaan, rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial bagi keluarga miskin tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, namun didorong peran aktif dan ketahanan sosial masyarakat serta stakeholder lainnya.

Dengan memperhatikan situasi dan perkembangan aneka masalah sosial yang dihadapi Kota Cimahi perlu kegiatan lanjutan dan terobosan antara lain dengan meningkatkan SLRT dan PUSKESOS yang ada di setiap kelurahan serta kegiatan pelatihan keterampilan, bimbingan dan motivasi,

sehingga PPKS memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah yang dihadapinya dan dapat mengakses berbagai pelayanan sosial dasar secara mandiri.

### **2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**

#### **1. Tenaga kerja**

**Permasalahan di bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu masalah terbesar yang menjadi perhatian pemerintah.** Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja serta masalah perselisihan tenaga kerja dengan perusahaan merupakan sebagian kecil dari berbagai masalah yang dihadapi pemerintah pada urusan tenaga kerja. Oleh karena itu Pemerintah Kota Cimahi terus berusaha untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan di atas melalui peningkatan kompetensi pencari kerja dan peningkatan hubungan industrial.

Peningkatan kompetensi pencari kerja yang termasuk dalam angkatan kerja Kota Cimahi dilakukan melalui Pendidikan dan Pelatihan Kerja, Pemagangan dan Sertifikasi Kerja. Sasaran dari kegiatan ini adalah angkatan kerja yang terdaftar sebagai pencari kerja di Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi. Pendidikan dan pelatihan kerja dilaksanakan secara swakelola bekerja sama dengan beberapa LPK di Kota Cimahi yang telah bersertifikat. Meskipun secara kuantitas perkembangan jumlah peserta pelatihan ada pengurangan tetapi secara kualitas ditingkatkan dengan menambah jam pelatihan sesuai standar dan pemberian sertifikat. Pelaksanaan sertifikat kerja bagi pencari kerja yang telah memiliki keterampilan kerja dilakukan dengan lembaga sertifikasi yang diakui secara nasional. sedangkan pemagangan diberikan kuota oleh Dinas

Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat untuk mengirimkan peserta magang. Selain dari APBD, Kota Cimahi juga mendapatkan kuota peserta pelatihan dari APBN melalui Kementerian Tenaga Kerja yang bekerja sama dengan BBLK. Hubungan Industrial berkaitan erat dengan hubungan tenaga kerja yang dapat diwakili oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan perusahaan dan pemerintah daerah. Peningkatan Hubungan Industrial dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dengan berkurangnya angka perselisihan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja melalui pemberian jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan serta perlindungan kerja melalui adanya Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

**Tabel 2.39.**  
**Data Pendidikan dan Pelatihan Kerja serta Hubungan Industrial**  
**Kota Cimahi Tahun 2018-2021**

NO	URAIAN	TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
<b>I</b>	<b>Pendidikan dan Pelatihan Kerja</b>				
1	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar yang Mengikuti Pelatihan (APBD)	500	160	100	188
2	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar yang Mengikuti Pelatihan (APBD Provinsi/APBN)	-	118	175	8
3	Jumlah Peserta Pelatihan Yang ditempatkan/Bekerja	110	92	96	453
4	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar yang Mendapatkan Pemagangan (APBN)	40	20	0	0
5	Jumlah Peserta Pemagangan Yang ditempatkan (APBN)	20	7	0	0
6	Jumlah Pencari Kerja Bersertifikat (LSP/BNSP)	-	118	175	8
7	Jumlah Pencari Kerja Bersertifikat (LSP/BNSP) Yang ditempatkan	-	3	0	0
<b>II</b>	<b>Hubungan Industrial</b>				
1	Jumlah Peraturan Perusahaan (PP)	36	36	43	37
2	Jumlah Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	11	5	4	4
3	Jumlah SP / SB	6	6	6	6

NO	URAIAN	TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
4	Jumlah Lembaga Bipartit	10	9	9	9
5	Perusahaan peserta jamsostek aktif	120	241	276	299
6	Tenaga kerja peserta jamsostek aktif	56.286	53.448	51.203	64.202
7	Jumlah Perusahaan	593	619	619	819
8	Jumlah Perusahaan Tata Kelola Layak	n/a	233	253	280
9	Jumlah Tenaga Kerja	47.812	59.007	60.068	67.185
10	Perselisihan				
	- Jumlah Kasus Didaftarkan	25	24	42	46
	- Jumlah Kasus Selesai dengan PB	17	18	18	24
11	Upah Minimum Kota (UMK)	2.678.028,45	2.893.074,13	3.139.271,74	3.241.929,00

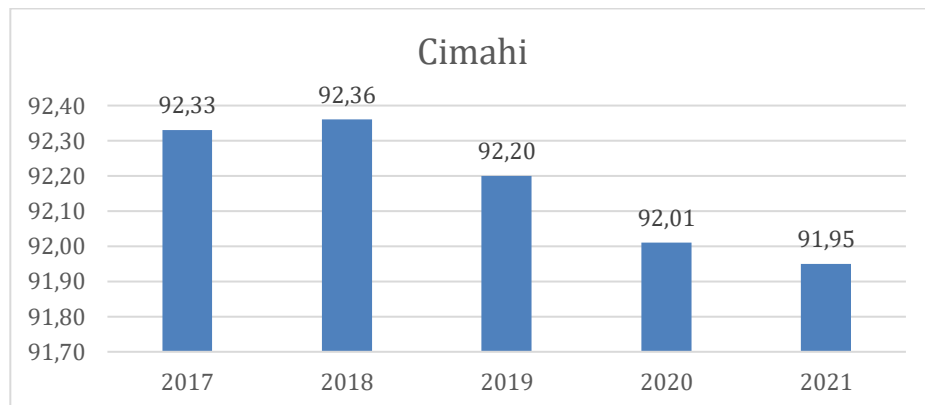
Sumber : Disnaker Kota Cimahi, 2021

### 1. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peranan perempuan dalam pembangunan di Kota Cimahi cukup strategis, baik perorangan maupun melalui organisasi-organisasi perempuan. Dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 pelatihan Manajemen Berusaha diberikan kepada PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) di 15 kelurahan di Kota Cimahi dan 36 organisasi perempuan dalam rangka peningkatan kemampuan organisasi perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan. Pembinaan Posyandu dan Pokjanel dilakukan melalui pelatihan-pelatihan bagi kader posyandu dan penyelenggaraan lomba posyandu serta pembinaan kepada Kader PKK.

Pembangunan gender di suatu daerah dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG berfungsi untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Nilai IPG berkisar antara 0-100%. Bila nilai IPG semakin tinggi, maka semakin tinggi kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

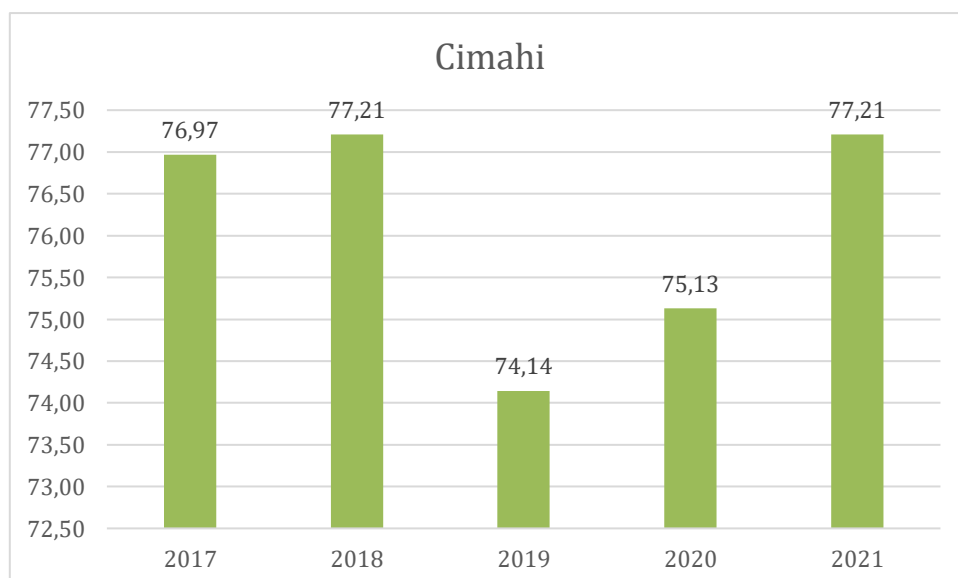
**Gambar 2.43.**  
**Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Cimahi Tahun 2017-2021**



Sumber : BPS Jawa Barat, 2021

Data di atas menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Cimahi selama kurun waktu 2017 sampai dengan 2021 mengalami peningkatan fluktuatif, dimana pada tahun 2017 angkanya sebesar 92,23 dan pada tahun 2018 naik menjadi 92,36. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 92,01 dan pada tahun 2021 turun kembali menjadi 91,95. Hal ini dikarenakan karena adanya pandemi *Covid-19* yang melanda Indonesia sejak tahun 2020.

**Gambar 2.44.**  
**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Cimahi Tahun 2017-2021**



Sumber : BPS Jawa Barat, 2021



Sama halnya dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Cimahi juga pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 selalu mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2017 angkanya sebesar 76,97 dan mengalami kenaikan tahun 2018 menjadi 77,21. Namun pada Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 75,13, dan naik kembali menjadi 77,21 pada tahun 2021. Hal ini menandakan posisi tawar perempuan meningkatkan seiring dengan meningkatnya keterwakilan perempuan di parlemen, posisi perempuan sebagai tenaga profesionalitas meningkat serta peran perempuan yang meningkat dalam hal pendapatan.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada dasarnya sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu merupakan suatu indeks untuk mengetahui pencapaian pembangunan manusia, namun Indeks Pembangunan Gender (IPG) lebih mengacu pada data terpilah antara laki-laki dan perempuan. Pemilahan antara laki-laki dan perempuan ini untuk mengetahui kondisi pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan salah satu indeks yang menunjukkan tolak ukur keaktifan perempuan pada ranah ekonomi dan politik, yang mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan, serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Berdasarkan data capaian IPG dan IDG di atas, menunjukkan bahwa peran serta keterlibatan dan keaktifan masyarakat terutama kaum perempuan mengalami fluktuatif, hal ini tidak terlepas dari kondisi situasi sosial, ekonomi dan politik daerah saat itu.

Perempuan dan anak merupakan kaum rentan akan kejahatan yang perlu untuk dilindungi. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Negara harus menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta, sehingga kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dapat terjaga dengan baik.

Selain itu terhadap perempuan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan suatu masalah yang sudah lama terjadi di tengah-tengah masyarakat bagaikan fenomena gunung es. KDRT merupakan suatu masalah yang sangat khas karena KDRT terjadi pada semua lapisan masyarakat mulai dari masyarakat berstatus sosial rendah sampai masyarakat berstatus sosial tinggi. Sebagian besar korban KDRT adalah perempuan dan anak serta pelakunya adalah orang-orang yang ter subordinasi di dalam rumah tangga itu. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah persoalan yang rumit untuk dipecahkan, ada banyak alasan, boleh jadi pelaku KDRT benar-benar tidak menyadari bahwa apa yang telah ia lakukan adalah merupakan tindak KDRT atau mengabaikannya lantaran berlindung diri di bawah norma-norma tertentu yang telah mapan dalam masyarakat. Sehingga menganggap perbuatan KDRT sebagai hal yang wajar dan pribadi.

Dalam bidang perlindungan perempuan dan anak di Kota Cimahi telah dibentuk P2TP2A, di Bawah ini digambarkan data kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak.

**Tabel 2.40.**  
**Data Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak**

NO	TAHUN	TINDAK KEKERASAN		JUMLAH
		TERHADAP ANAK	TERHADAP PEREMPUAN	
1	2017	18	6	24
2	2018	20	9	29
3	2019	20	10	30
4	2020	11	6	17
5	2021	14	12	26

Sumber : Dp2kbp3a 2021

Berdasarkan data di atas, untuk penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dari tahun 2017 hingga 2019 mengalami kenaikan kasus. Dari 24 kasus pada 2017 menjadi 30 pada tahun 2019, dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 17 kasus. Pada 2021 kasus naik kembali menjadi 26 kasus.

## **2. Pangan**

### **a. Ketersediaan dan Konsumsi Pangan**

Ketersediaan pangan merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan suatu wilayah. Penyediaan pangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan akan pangan dan gizi bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan. Dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan kuantitas serta kualitas konsumsi pangan, diperlukan target pencapaian angka ketersediaan pangan per kapita per tahun. Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) XI tahun 2018 merekomendasikan ketetapan tingkat ketersediaan pangan per kapita bagi setiap penduduk suatu wilayah, tingkat penyediaan energi sebesar 2.400 kkal/kapita/hari, sedangkan untuk protein sebesar 63 gram/kapita/hari.

Ketersediaan energi di Kota Cimahi tahun 2020 adalah sebesar 2.318 kkal/kapita/hari. Ketersediaan energi Kota Cimahi masih di bawah standar 2.400 kkal/kapita/hari, namun sudah dapat dikategorikan cukup karena lebih tinggi dari 90% AKE. Ketersediaan Protein juga sudah melebihi standar 63 gram/kapita/hari yaitu 107,7% AKP. Ketersediaan pangan yang berlebih adalah padi-padian, pangan hewani, minyak dan lemak, dan sayur buah. Ketersediaan pangan yang masih kurang adalah umbi-umbian, buah biji berminyak, kacang-kacangan dan gula.

Ketersediaan pangan yang cukup dan merata serta Konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang merupakan 2 (dua) komponen utama yang harus dipenuhi dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan. Adapun situasi Ketersediaan Pangan Kota Cimahi

Tahun 2020 berdasarkan data Neraca Bahan Makanan dan Pola Pangan Harapan Ketersediaan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.41.**  
**Ketersediaan Pangan Kota Cimahi Tahun 2021**

Kelompok Pangan	Gram/Kap /hari	Energi				Protein		Skor PPH	
		kkl/kap/hari		%AKE		gram/kap/hari	%AKP**)		
		Aktual	Ideal	Aktual	Ideal			Aktual	Ideal
Padi-padian	379,4	1.331	1.200	55,4	50,0	33,6	53,3	25,0	25,0
Umbi-umbian	28,7	36	144	1,5	6,0	0	0,3	0,7	2,5
Pangan Hewani	314,7	295	288	12,3	12,0	21	32,6	24,0	24,0
Minyak dan Lemak	37,3	336	240	14,0	10,0	0,0	0,0	5,0	5,0
Buah/biji berminyak	1,0	2	72	0,1	3,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Kacang-kacangan	26,1	100	120	4,2	5,0	10,3	16,3	8,4	10,0
Gula	16,8	61	120	2,6	5,0	0,1	0,1	1,3	2,5
Sayur dan Buah	470,3	157	144	6,6	6,0	3,1	5,0	30,0	30,0
Lain-lain	-	0	72	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Total</b>		<b>2,318</b>	<b>2.400</b>	<b>96,6</b>	<b>100,0</b>	<b>67,8</b>	<b>107,7</b>	<b>94,4</b>	<b>100</b>

Sumber : Neraca Bahan Makanan dan Pola Pangan Harapan Ketersediaan (Dispangtan 2021)

Keterangan : \*) Angka Kecukupan Energi (AKE):2400 kkal/kap/hari

\*\*\*) Angka Kecukupan Protein (AKP):63gr/kap/hari

Berdasarkan data tersebut skor PPH Ketersediaan Kota Cimahi Tahun 2021 yaitu sebesar 94,4 poin dari idealnya 100. Jika nilai skor PPH semakin mendekati angka ideal, maka dapat dikatakan ketersediaan pangan yang ada dalam suatu wilayah cukup beragam. Ketersediaan pangan yang perlu ditingkatkan keragamannya adalah umbi-umbian (0,75

dari 0,25), buah/biji berminyak (0,0 dari 1,0), kacang-kacangan (8,4 dari 10), dan gula (1,3 dari 2,5).

Selain ketersediaan pangan, Pemerintah Kota Cimahi juga wajib meningkatkan kesadaran masyarakat dan membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA) serta sesuai dengan potensi dan kearifan lokal di Kota Cimahi. Penganekaragaman konsumsi pangan diukur melalui pencapaian nilai PPH Konsumsi, Angka Kecukupan Energi (AKE) dan Angka Kecukupan Gizi (AKG). Situasi Konsumsi Pangan rata-rata penduduk Kota Cimahi Tahun 2020 berdasarkan data Susenas BPS Tahun 2020 dan diolah oleh Dispangtan Kota Cimahi digambarkan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 2.42.**  
**Konsumsi Pangan Rata-Rata di Kota Cimahi Tahun 2021**

No	Kelompok Pangan	Gram /Kap /hari	Energi (kkl/kap /hr)	%AKE Aktual	Protein (g/kap/hr)	%AKP Aktual	Skor PPH Aktual
1	Padi-padian	280,7	1.185	55,1	27,2	96,7	25
2	Umbi-umbian	34,4	34	1,6	0,4	2,8	0,8
3	Pangan Hewani	126,9	284	13,2	22,4	23,2	24
4	Minyak dan Lemak	34,4	306	14,2	0,1	24,9	5,0
5	Buah/biji berminyak	1,2	7	0,3	0,2	0,6	0,2
6	Kacang-kacangan	30,5	70	3,2	7,2	5,7	6,5
7	Gula	14,3	56	2,6	0,2	4,6	1,3
8	Sayur dan Buah	204,2	88	4,1	3,1	7,2	20,5
9	Lain-lain	92,8	65	3,0	1,2	5,3	

No	Kelompok Pangan	Gram /Kap /hari	Energi (kkl/kap /hr)	%AKE Aktual	Protein (g/kap/hr)	%AKP Aktual	Skor PPH Aktual
	<b>Total</b>		<b>2.093,9</b>	<b>97,4</b>	<b>61,9</b>	<b>170,9</b>	<b>83,3</b>

Sumber : BPS dan Dispangtan, 2021, diolah

Ket : \*) Angka Kecukupan Energi (AKE):2400 kkal/kap/hari

\*\*\*) Angka Kecukupan Protein (AKP):63gr/kap/hari

Berdasarkan tabel diatas konsumsi kelompok pangan masyarakat Kota Cimahi secara kuantitas sudah cukup, namun kualitas/keragaman konsumsi pangan penduduk Kota Cimahi masih belum optimal. Pencapaian skor PPH Konsumsi Kota Cimahi baru sebesar 83,8 poin. Capaian tersebut terpaut 16,2 poin dari skor PPH ideal yaitu 100. Adapun kelompok pangan yang skor PPH nya masih kurang yakni padi-padian, umbi-umbian, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, serta gula; karena skor PPH untuk komoditi pangan tersebut berada dibawah angka ideal. Sementara itu, kelompok pangan pangan hewani, kacang-kacangan dan sayur dan buah sudah mencapai skor maksimal.

#### **b. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dan PPH Konsumsi**

**Tabel 2.43.**  
**Penambahan Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dan PPH Konsumsi Kota Cimahi Tahun 2017-2021**

INDIKATOR	Skor Ideal	2017	2018	2019	2020	2021
Pola Pangan Harapan ketersediaan	100	96,2	93,4	92,9	-	94,4
Pola Pangan Harapan Konsumsi	100	82,1	79,1	83,8	84,4	83,3

Sumber : Dispangtan Kota Cimahi, 2021, diolah

Berdasarkan data pada tabel diatas, skor PPH Ketersediaan Kota Cimahi belum memenuhi target baik di tahun 2019 maupun di

tahun 2021, namun realisasi di tahun 2021 sudah berada diatas capaian Tahun 2019 naik 1,5 poin atau naik 1,6%. Oleh karenanya pada penyusunan laporan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan PPH Ketersediaan Kota Cimahi (2021) direkomendasikan untuk ditetapkan sasaran baru. Dengan adanya kesenjangan antara angka target dan realisasi PPH Ketersediaan tersebut maka diperlukan perencanaan ketersediaan pangan yang baik di Kota Cimahi.

Disisi lain, indikator kualitas konsumsi pangan ditunjukkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi yang dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan. PPH biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan yang ideal di suatu wilayah. Berdasarkan Tabel 2.45. dapat dilihat bahwa skor PPH Konsumsi Kota Cimahi pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 1,1 point dari tahun sebelumnya, yang semula 84,4 menjadi 83,3 point di tahun 2021. (Dispangtan Cimahi, 2021)

Berdasarkan data evaluasi pencapaian PPH konsumsi maupun PPH Ketersediaan Kota Cimahi pada Tahun 2021 belum mencapai kondisi ideal sehingga pencapaian kinerja ini perlu terus ditingkatkan hingga tahun 2022 (akhir periode RPJMD) mendatang melalui sinergitas program dan kegiatan pangan dan gizi lintas perangkat daerah mulai dari sektor hulu hingga hilir. Untuk meningkatkan skor PPH Konsumsi maka sasaran program lintas sektoral dengan tujuan akhir perbaikan konsumsi pangan harus diutamakan pada penduduk dengan golongan pengeluaran <Rp 750.000/bulan karena merupakan kelompok rentan dengan jumlah dan mutu konsumsi yang masih rendah.

### **3. Pertanian**

Tahun 2015 Kota Cimahi memiliki aset tanah sebanyak 259 bidang tanah dimana 137 bidang telah tersertifikasi sedangkan sisanya sejumlah 122 bidang tanah masih dalam proses. Mengingat kebutuhan masyarakat akan fasilitas umum, direncanakan pembelian tanah untuk kepentingan umum dalam lima tahun ke depan.

Pemerintah daerah melalui OPD BPKAD Kota Cimahi memiliki salah satu kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban serta pengamanan Barang Milik Daerah yaitu kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah yang terdiri dari Pensertifikatan tanah, Penyusunan Laporan *Stock Opname* Persediaan dan Pemasangan Plang pada Aset Tanah/Bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Cimahi. Pada Tahun 2019 BPKAD telah berhasil membuat 18 sertifikat tanah sehingga total sertifikat yang dimiliki menjadi 236 sertifikat dengan luas tanah 603.257m<sup>2</sup> dari luas tanah yang seharusnya bersertifikat seluas 1.447.501m<sup>2</sup>. Sedangkan pemasangan plang kepemilikan aset pada tahun 2019 telah dipasang sebanyak 20 plang.

Kondisi pertanahan di Kota Cimahi mengalami keterbatasan lahan sehingga untuk pembelian lahan terutama dengan luasan yang besar sulit untuk terealisasi ditambah lagi dengan faktor lain seperti harga tanah dan kepemilikan lahan yang sering terjadi sengketa antar beberapa pihak.

Pemerintah Kota Cimahi sangat *concern* dalam mengatasi konflik dan sengketa tanah yang terjadi di Kota Cimahi. Berdasarkan data diketahui bahwa Persentase penyelesaian konflik dan sengketa tanah yang difasilitasi selama kurun waktu tahun 2017 dan 2018 yaitu 100%.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, dan Rincian Tugas pada Perangkat Daerah Kota Cimahi, urusan pemerintahan bidang pertanahan berada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Program yang diusung yaitu Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan, Program Pengelolaan Tanah Kosong, dan Program Penatagunaan Tanah.

#### **4. Perhubungan**

##### **a. Tingkat Pelayanan Jalan/Level of Service (LOS)**

Berdasarkan hasil Traffic Counting yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Cimahi di Tahun 2021 pada 15 (lima belas) Ruas Jalan Kota Cimahi yang selama ini menjadi titik kemacetan, diketahui bahwa Tingkat Pelayanan Jalan/Level of Service (LOS) di Kota Cimahi pada tahun 2021 berada di Kategori C (dengan nilai Nisbah Volume



Kapasitas (*Volume Capacity Ratio* (VCR)) adalah sebesar = 0,66. Adapun perbandingan kondisi LOS Kota Cimahi dari tahun 2017 s.d. tahun 2021 disampaikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.44.**  
**Tingkat Pelayanan Jalan/ *Level of Service* (LOS) di Kota Cimahi Tahun 2017-2021**

INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Level of Service</i> (LOS) Kota Cimahi	D	C	C	C	C

*Sumber : Dinas Perhubungan Kota Cimahi, 2021, diolah.*

Berdasarkan batasan nilai dari setiap tingkat pelayanan dipengaruhi oleh fungsi jalan dan dimana jalan tersebut berada, dengan tingkat pelayanan yang diperoleh, maka dapat ditentukan jalan tersebut masuk dalam tingkat pelayanan tertentu berdasarkan Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997, adalah sebagai berikut :

Kondisi LOS di Kota Cimahi dipengaruhi juga oleh Rasio antara Volume Lalu Lintas dan Kapasitas Jalan, apabila semakin meningkatnya jumlah kendaraan yang ada di Kota Cimahi, dan tidak diimbangi dengan penambahan kapasitas jalan, maka nilai VCR setiap ruas jalan akan semakin rendah, tentu hal tersebut akan mempengaruhi nilai LOS di Kota Cimahi. Saat ini pada beberapa ruas jalan di Kota Cimahi masih banyak yang belum didukung dengan fasilitas perlengkapan jalan seperti trotoar, drainase jalan, jalur sepeda dan fasilitas penyandang cacat, sehingga mempengaruhi juga. Adapun, kondisi VCR di Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.45.**  
***Volume Capacity Ratio* (VCR) di Kota Cimahi Tahun 2017-2021**

INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021
-----------	------	------	------	------	------

<i>Volume Capacity Ratio</i>	0,79	0,59	0,64	0,72	0,66
------------------------------	------	------	------	------	------

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Cimahi, 2021, diolah.

Dalam mempertahankan capaian atau meningkatkan nilai LOS dan nilai VCR, maka diperlukan upaya melalui penambahan kapasitas ruas jalan, persimpangan jalan (radius tikung), perlintasan kereta api tidak sebidang, menghitung tingkat pelayanan setiap ruas jalan, melakukan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dengan Sistem Satu Arah (SSA), penanganan hambatan samping, serta diperlukan adanya perencanaan transportasi massal (*Urban Mobility Plan*) Metropolitan Bandung Raya di Kawasan Cekungan Bandung, yang disusun atau berada di bawah otoritas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, sehingga diharapkan dapat terjadi penurunan titik kemacetan.

**b. Rasio Konektivitas Kota**

Sesuai kondisi geografis, Kota Cimahi tidak memiliki angkutan sungai danau dan penyeberangan, namun di Kota Cimahi hanya terdapat angkutan jalan dengan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, hanya mengelola angkutan umum perkotaan trayek dalam kota. Berikut disampaikan tabel konektivitas jaringan angkutan yang dijadikan dasar perhitungan rasio konektivitas kota, adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.46.**  
**Rasio Konektivitas Jaringan Trayek Angkutan Di Kota Cimahi**  
**Tahun 2021**

<b>NO</b>	<b>TRAYEK ANGKUTAN DALAM KOTA</b>	<b>JARAK</b>	<b>REALISASI</b>	<b>BOBOT (%)</b>
1	Pasar Antri – Leuwigajah - Cimindi	7,5	100	15
2	Pasar Antri - Cibeber Via Baros	8,7	99	40
3	Pasar Antri - Cibeber Via Contong	6	76	30
4	Citeureup – Term. Cimindi Via Pemkot	9	15	15
<b>J U M L A H</b>			<b>275</b>	<b>100</b>

*Sumber : Dinas Perhubungan Kota Cimahi, 2021, diolah.*

Berdasarkan hasil kajian jaringan trayek angkutan umum dalam kota (*rerouting*) pada tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Cimahi, telah dihasilkan kebutuhan jaringan trayek angkutan umum perkotaan yaitu: trayek Pasar Antri – Leuwigajah - Cimindi; Trayek Pasar Antri – Cibeber via Baros; Trayek Pasar Antri – Cibeber via Contong, Trayek Citeureup – Terminal Cimindi Via Pemkot; dan Trayek Pasar Antri – Citeureup via Padasuka. Namun, dari 5 (lima) kebutuhan trayek saat ini, baru terealisasi sebanyak 4 (empat) trayek, untuk merealisasikan 5 (lima) trayek masih diperlukan waktu beberapa tahun ke depan, yang di dahului dengan sosialisasi dan kajian lebih lanjut. Adapun, dengan kondisi bobot trayek di Kota Cimahi yang berada pada atau lintas dengan bobot trayek atau lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), maka bobotnya adalah 0,8. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus jaringan trayek angkutan perkotaan yang sudah terlayani dibanding dengan data usulan kebutuhan jaringan trayek angkutan perkotaan maka Rasio

Konektivitas Kota Cimahi pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 2.47.**  
**Rasio Konektivitas Kota Cimahi Tahun 2019-2021**

INDIKATOR	2019	2020	2021
Rasio Konektivitas	0,64	0,64	0,64

*Sumber : Dinas Perhubungan Kota Cimahi, 2021, diolah.*

**c. Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.**

Kondisi fasilitas terminal penumpang di Kota Cimahi hanya melayani penumpang angkutan jalan yang dilayani oleh 3 (tiga) terminal tipe C, berikut ini dijelaskan terminal yang melayani beberapa rute trayek, sebagai berikut :

**Tabel 2.48.**  
**Fasilitas Terminal Penumpang Di Kota Cimahi**

No	Terminal	Rute Trayek
1	Terminal Pasar Antri Baru	PasarAntri – Cibeber Via Contong PasarAntri – Cibeber Via Baros PasarAntri – Cipatik – Soreang PasarAntri – Cangkorah PasarAntri - Parongpong
2	Terminal Cimindi	Cimindi – Cipatik Cimindi–Leuwigajah – PasarAntri Cimindi – MargaAsih Via Cibaligo MelongAsih – Elang
3	Terminal Pasar Atas	PasarAtas – Cisarua PasarAtas – Cidahu – Pakuhaji PasarAtas – PuriPermata – Cilame Cimindi - Citeureup

*Sumber : Dinas Perhubungan Kota Cimahi, 2021, diolah.*

**d. Pelayanan Uji Berkala di Kota Cimahi**

Dalam rangka memenuhi standar keselamatan dan keamanan transportasi sesuai dengan standar keselamatan dan keamanan yang

berlaku, Pemerintah Daerah Kota Cimahi telah memiliki Balai Pengujian Kendaraan Bermotor dengan akreditasi B, dan menerima pelayanan kendaraan yang wajib baik kendaraan berdomisili di Kota Cimahi dan domisili di luar wilayah Kota Cimahi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 30 Tahun 2020, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor, diatur jenis kendaraan yang dilakukan pengujian. Berikut disampaikan jumlah kendaraan wajib uji serta jumlah kendaraan yang diuji pada tahun 2021, adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.49.**  
**Jumlah Kendaraan Wajib Tahun 2021 di Kota Cimahi**

Mobil Penumpang	Mobil Bus	Mobil Barang	Kereta Tempelan	Kereta Gandengan	Kendaraan Khusus	Jumlah
1.686	410	6.908	12	9.267	141	9.167

*Sumber : Dinas Perhubungan Kota Cimahi, 2021, diolah.*

**Tabel 2.50.**  
**Kendaraan Yang Diuji UPTD Dinas Perhubungan Kota Cimahi Tahun 2021**

Bulan	Mobil Penumpang	Mobil Bus	Mobil Barang	Mobil Khusus	Total
Januari	63	26	560	13	662
Februari	63	27	616	6	712
Maret	81	17	612	12	722
April	45	7	500	13	565
Mei	23	11	450	5	489
Juni	47	26	581	14	668
Juli	25	17	458	13	513

Bulan	Mobil Penumpang	Mobil Bus	Mobil Barang	Mobil Khusus	Total
Agustus	48	25	634	10	717
September	73	18	596	13	700
Oktober	42	9	558	13	622
November	49	12	505	10	576
Desember	53	28	590	13	684
<b>Jumlah</b>	<b>612</b>	<b>223</b>	<b>6.660</b>	<b>135</b>	<b>7.630</b>

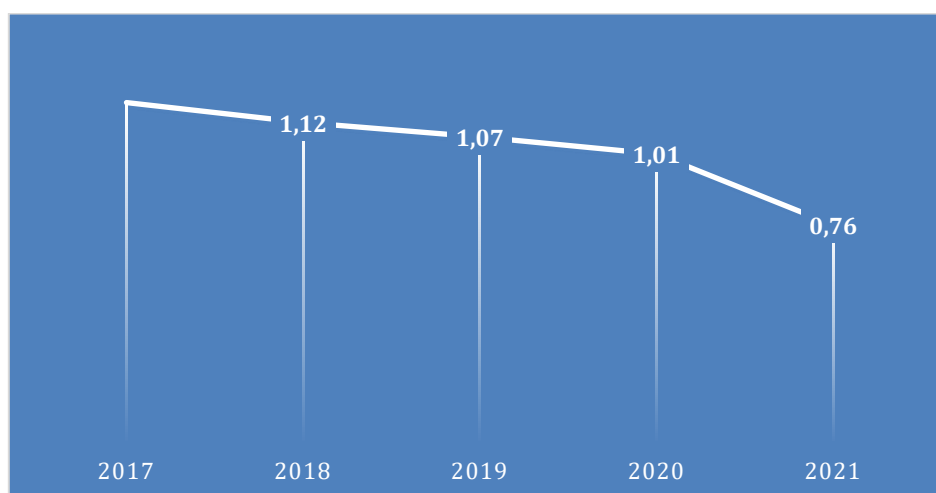
Sumber : Dinas Perhubungan Kota Cimahi, 2021, diolah.

#### e. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB)

Laju pertumbuhan penduduk Kota Cimahi pada tahun 2021 adalah sebesar 0,76%, angka ini mengalami penurunan dari tahun 2017 yang angkanya sebesar 1.19. Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Cimahi pada Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 2.45.**

#### **Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Cimahi Tahun 2017-2021**



Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka Tahun 2022

Tren penurunan laju pertumbuhan penduduk dapat merupakan kontribusi dari keberhasilan program Keluarga Berencana. Angka

Cakupan Peserta KB aktif menunjukkan tingkat pemanfaatan kontrasepsi di antara para PUS.

Sasaran pelaksanaan program KB yaitu Pasangan Usia Subur. Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami-istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun. Peserta KB Aktif adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan. Peserta KB Baru adalah pasangan usia subur yang baru pertama kali menggunakan alat/cara kontrasepsi dan atau pasangan usia subur yang kembali menggunakan metode kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran.

**Gambar 2.46.**  
**Persentase Peserta KB Baru dan KB Aktif Kota Cimahi**  
**Tahun 2017-2020**



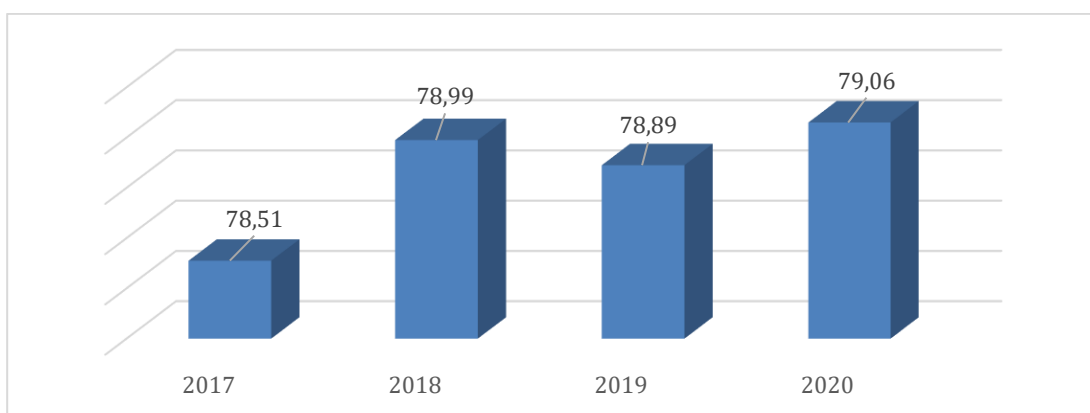
Sumber : DP2KBP3A, 2020

Jumlah Peserta KB baru tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2017 jumlah peserta KB Baru mencapai 5.434 akseptor baru dan mengalami penurunan sampai dengan tahun 2020 menjadi 3249. Hal ini terjadi dikarenakan ada penurunan jumlah target setiap tahunnya pada pasangan usia subur.

Selanjutnya, untuk peserta KB Aktif tahun 2017 sampai dengan 2020 cenderung mengalami peningkatan dimana pada tahun 2017 mencapai sebesar 73.209 akseptor naik menjadi 74.290 akseptor pada tahun 2020. Pada tahun 2021 peserta KB Aktif sebesar 74.856 dan peserta KB baru sebesar 3860. Hal ini terjadi karena ada penambahan dari akseptor KB baru.

Untuk Akseptor KB pada tahun 2017-2021 disajikan pada gambar sebagai berikut :

**Gambar 2.47.**  
**Rasio Akseptor KB di Kota Cimahi Tahun 2017-2020**



Sumber : DP2KBP3A, 2020

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Rasio Akseptor KB di Kota Cimahi dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 cenderung mengalami peningkatan yang mana pada tahun 2017 semula mencapai angka sebesar 78,51% menjadi 79,02% pada tahun 2020, dan pada tahun 2021 menjadi 79,13%. Hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Keluarga Berencana dalam mewujudkan kualitas keluarga.

**f. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dilaksanakan melalui keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dimulai sejak tahun 2004 silam serta terus dilakukan upaya-upaya untuk mendorong agar partisipasi dan gotong royong masyarakat terus tumbuh



berkembang sehingga masyarakat akan ikut serta secara aktif dalam pelaksanaan pembangunan, selain itu untuk efektifitas dan efisiensi pembangunan didorong dengan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan serta pengawasan.

Adapun Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kota Cimahi pada tahun 2017 mencapai 80% dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020 hingga mencapai 100%.

**Tabel 2.51.**  
**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kota Cimahi**  
**Tahun 2017-2020**

INDIKATOR	2017	2018	2019	2020
Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	80	95,1	100	100

Sumber : Bag. Pemerintahan-Setda Kota Cimahi, 2020, diolah

Dengan kompleksitas masalah perkotaan maka pemberdayaan masyarakat juga bisa dilakukan melalui pendekatan kewirausahaan sosial (*sosio entrepreneurship*) yang memadukan usaha (bisnis) untuk menyelesaikan masalah sosial dan lingkungan hidup. Pendekatan ini dinilai lebih *sustainable* karena menjadi lebih mandiri, memiliki strategi yang jelas menitikberatkan kepada tujuan utama menyelesaikan masalah sosial dan lingkungan bukan untuk akumulasi modal/kekayaan/keuntungan. Strategi penumbuhkembangan iklim kewirausahaan sosial akan menjadi salah satu inovasi bagi pengentasan kemiskinan di Kota Cimahi dan peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat.

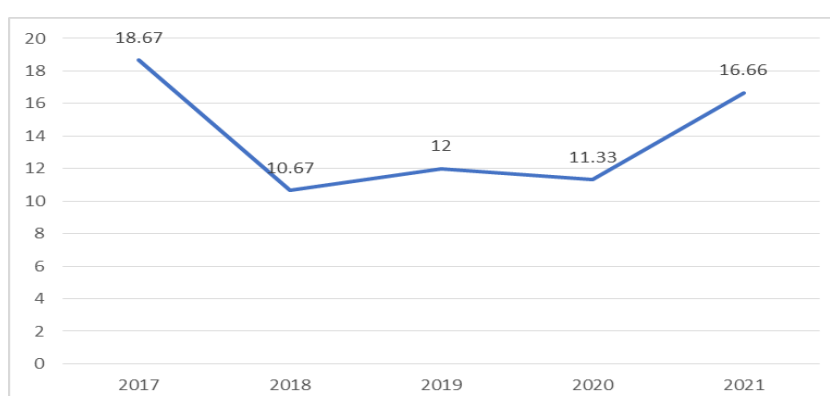
## **5. Lingkungan Hidup**

Berdasarkan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2021, isu lingkungan prioritas di Kota Cimahi adalah kualitas dan kuantitas air, kualitas udara, persampahan dan tata guna lahan.

### **1. Indeks Kualitas Air**

Indeks Kualitas Air (IKA) adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Untuk IKA di Kota Cimahi pada tahun 2017 mencapai 18,67 poin dan mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi 10,67 poin. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 12 poin namun pada tahun 2020 turun sedikit menjadi 11,33, tahun 2021 indeks kualitas air naik menjadi 16,66. Nilai indeks kualitas air terus mengalami perbaikan seiring dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur sanitasi, meningkatnya pengawasan terhadap pelaku usaha yang menghasilkan limbah cair serta meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat. Grafik peningkatan indeks kualitas air ini dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 2.48.**  
**Indeks Kualitas Air di Kota Cimahi Tahun 2017-2021**



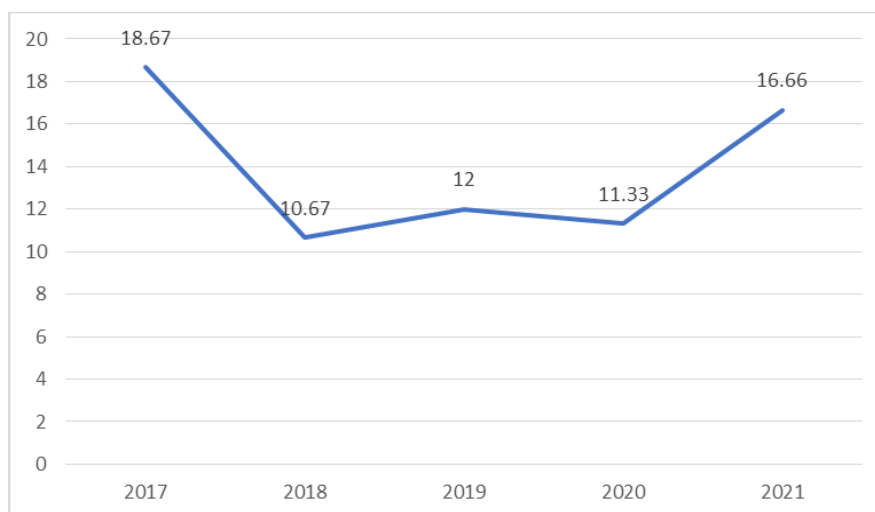
*Sumber : DIKPLHD Kota Cimahi Tahun 2021 dan LKIP DLH 2021*

## **2. Indeks Kualitas Udara**

Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Berdasarkan data yang tersedia, diketahui bahwa IKU di Kota Cimahi selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan dan peningkatan. Tahun 2017 mencapai 39,21 poin dan pada tahun 2018 turun menjadi 27,03 poin. Tahun 2019 naik menjadi 73 poin namun 2020 turun menjadi 65.25 poin, dan Tahun 2021 naik menjadi 75,44 poin, hal ini dampak dari

adanya pandemi *Covid-19* yang membatasi aktivitas masyarakat, selain itu upaya yang dilakukan dalam memantau emisi bergerak dan sumber tak bergerak sesuai tugas fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup. Dinamika nilai IKU dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 2.49.**  
**Indeks Kualitas Udara di Kota Cimahi Tahun 2017-2021**

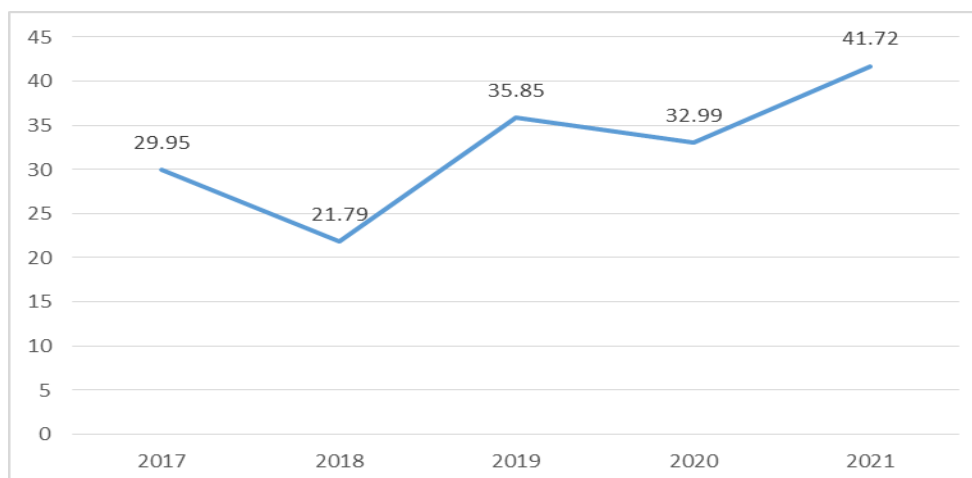


Sumber : DIKPLHD Kota Cimahi Tahun 2021 dan LKIP DLH 2021

### **3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut. Khusus untuk kota/kabupaten tidak memperhitungkan Indeks Kualitas Air Laut (Permen LHK No. 27 Tahun 2021 Tentang IKLH). IKLH di Kota Cimahi pada tahun 2017 mencapai 29,95 sedangkan tahun 2018 turun menjadi 21,79. Tahun 2019 naik kembali menjadi 35,85 namun tahun 2020 turun lagi menjadi 32,99, naik turunnya nilai IKLH bergantung pada indeks kualitas air, udara dan tutupan lahan, untuk tahun 2021 nilai IKLH sebesar 41,72 hal ini disebabkan meningkatnya indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan lahan berdasarkan data LKIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 2.50.**  
**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kota Cimahi**  
**Tahun 2017-2021**



*Sumber : DIKPLHD Kota Cimahi Tahun 2021 dan LKIP DLH 2021*

#### **4. Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)**

Persentase Ruang Terbuka Hijau di Kota Cimahi pada tahun 2017 mencapai 11,15% dan pada tahun 2018 mencapai 11,65%. Namun pada tahun 2019 menurun menjadi 1,09% hal ini disebabkan berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, bahwa RTH meliputi taman RT, taman RW, taman kelurahan, taman kecamatan, taman kota, hutan kota, pemakaman. Sedangkan pada tahun 2017 dan 2018 perhitungan RTH masih memasukkan RTH jalur hijau, sempadan sungai dan sempadan lainnya sehingga luasannya lebih besar dari tahun 2019. Tahun 2020 persentase RTH naik menjadi 1,13%, dan Tahun 2021 menjadi 1,14%, karena adanya penambahan pembangunan taman lingkungan dan serah terima PSU dari pengembang.

**Tabel 2.52.**  
**Persentase Ruang Terbuka Hijau di Kota Cimahi Tahun 2017-2021**

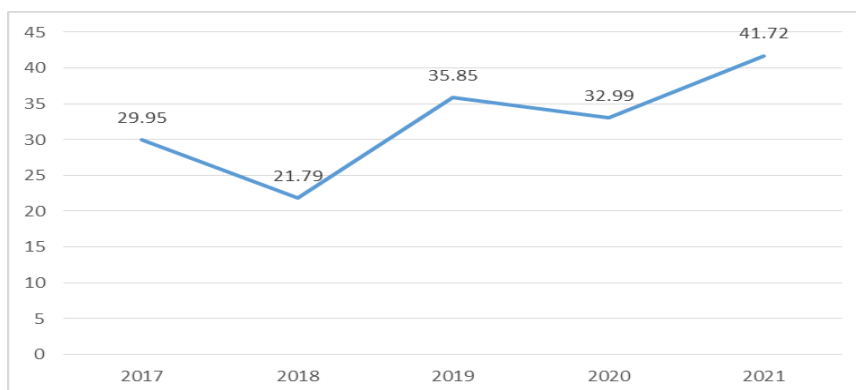
<b>Indikator</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Ruang Terbuka Hijau (%)	11,15	11,65	1,09	1,13	1,14

*Sumber : DLH Kota Cimahi Tahun 2022*

## 5. Persentase Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah di Kota Cimahi dilaksanakan melalui program pengurangan dan penanganan sampah. Penanganan sampah yang dilakukan melalui pembuangan sampah ke TPA sedangkan pengurangan sampah melalui 3R, komposting dan pembuatan biogas. Dari data yang tersedia diketahui bahwa persentase pengelolaan sampah di Kota Cimahi pada tahun 2017 sebesar 87% dan mengalami peningkatan di tahun 2018-2020 masing-masing 95%, 96,8% dan 97,85%, sedangkan pada tahun 2021 persentase pengelolaan sampah sebesar 94,07%, hal ini disebabkan berkurangnya penanganan sampah ke TPA, jumlah sampah yang dibuang ke TPA menurun menjadi 76,87% dari tahun 2020 sebesar 83,72% .

**Gambar 2.51.**  
**Persentase Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi Tahun 2017-2021**



Sumber : DIKPLHD Kota Cimahi Tahun 2021 dan LKIP DLH 2021

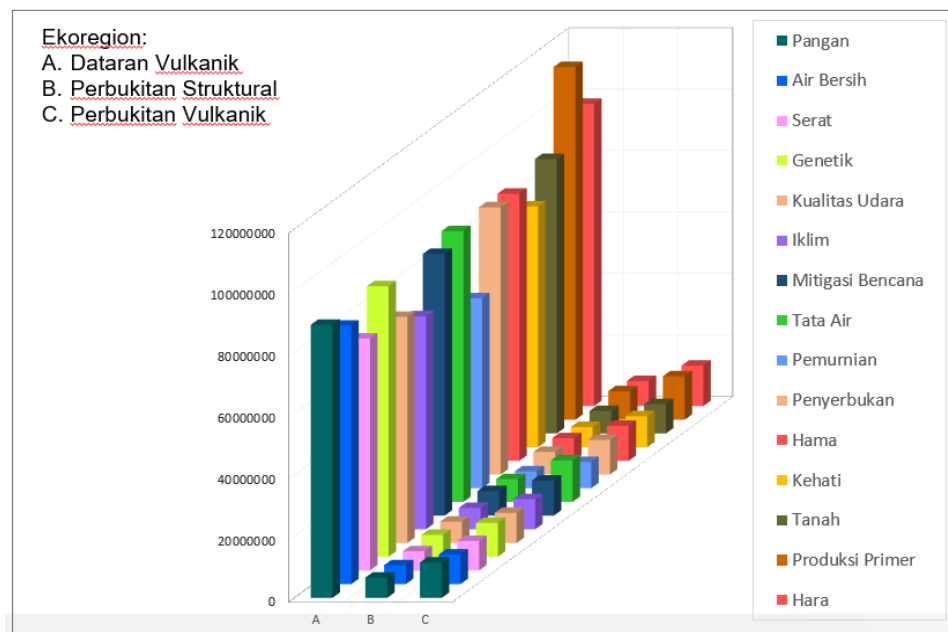
Selain beberapa indikator kinerja bidang lingkungan hidup yang telah disajikan diatas, kinerja bidang ini juga dilengkapi dengan hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2018-2023. Beberapa informasi kondisi lingkungan hidup Kota Cimahi berdasarkan KLHS disajikan sebagai berikut :

### a. Kinerja Layanan Ekosistem/Jasa Lingkungan

Nilai setiap jasa lingkungan disebut dengan Indeks Jasa Ekosistem (IJE). Setiap satu unit wilayah ekoregion memiliki satu jasa lingkungan

yang dominan. Jasa lingkungan dominan dapat dilihat dengan melakukan pemetaan jasa lingkungan maksimum. Jasa lingkungan maksimum dihasilkan dari perkalian antara luas satu unit wilayah ekoregion dengan setiap nilai IJE yang ada di dalam wilayah ekoregion tersebut. Nilai yang maksimum dari hasil perkalian tersebut menunjukkan jenis jasa ekosistem dominan untuk satu unit wilayah ekoregion (BPLHD Provinsi Jawa Barat, 2017). Hasil kali IJE dengan luas setiap ekoregion di Kota Cimahi ditunjukkan pada gambar di bawah :

**Gambar 2.52.**  
**Hasil Kali IJE Dengan Luas Setiap Ekoregion di Kota Cimahi**



Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Ekoregion Dataran Vulkanik Jalur Gunung Karang – Merapi – Raung memiliki nilai jasa lingkungan sangat tinggi karena wilayahnya yang sangat luas sekitar 85% dari Kota Cimahi. Jasa lingkungan dominan pada Ekoregion Dataran Vulkanik Jalur Gunung Karang – Merapi – Raung di Kota Cimahi adalah produksi primer, siklus hara, regenerasi tanah, penyedia pangan, dan pengaturan air dan banjir. Jasa lingkungan dominan pada Ekoregion Perbukitan Struktural Blok Selatan Jawa di Kota Cimahi adalah produksi primer, siklus hara,

pengaturan mitigasi bencana, pengaturan air dan banjir, dan regenerasi tanah. Sedangkan jasa lingkungan dominan pada Ekoregion Perbukitan Vulkanik Jalur Gunung Karang – Merapi – Raung di Kota Cimahi adalah produksi primer, pengaturan air dan banjir, siklus hara, penyedia pangan, dan pengendalian hama.

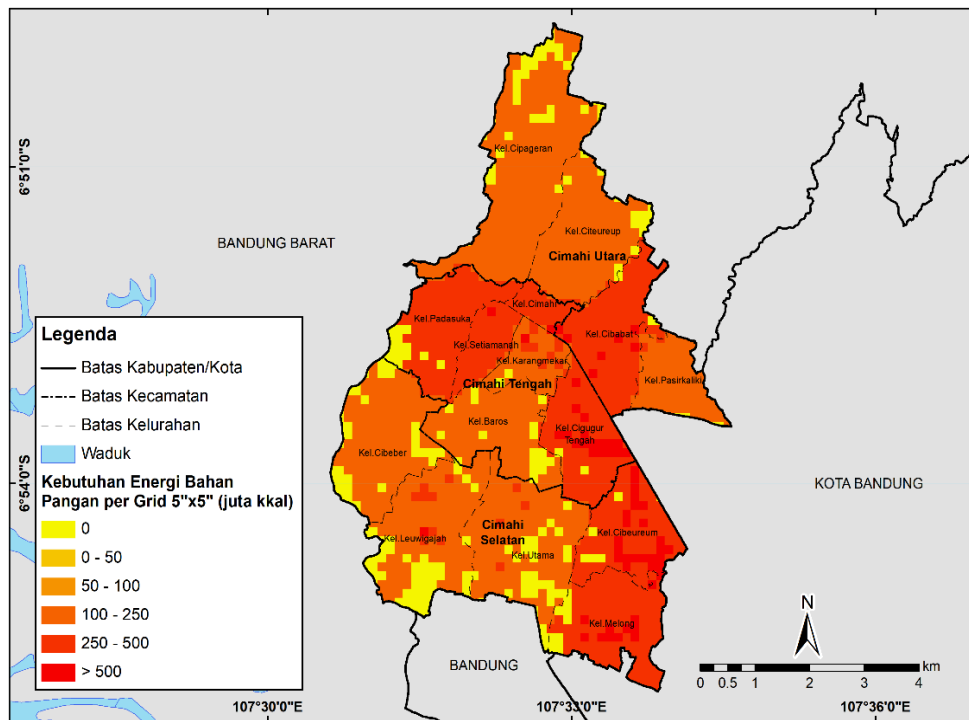
**b. Kapasitas Daya Dukung Lingkungan Hidup Ambang Batas dan Status DDLH Penyedia Pangan**

Ambang batas dan status daya dukung lingkungan hidup (DDLH) penyedia pangan dimodelkan secara kuantitatif melalui beberapa tahapan, yaitu perhitungan kebutuhan bahan pangan, ketersediaan bahan pangan, dan selisih ketersediaan. Dari ketiga hasil perhitungan tersebut, maka dapat dilakukan perhitungan ambang batas untuk menentukan status daya dukung terhadap penyedia pangan. Analisis penghitungan daya dukung lingkungan hidup menggunakan peta dengan sistem grid 5"x5" sehingga akan mengakibatkan adanya perbedaan penghitungan luas wilayah dibandingkan dengan luas wilayah Kota Cimahi yang dihitung secara utuh. Namun demikian hal ini tidak menjadi masalah yang besar, karena deliniasi wilayah berdasarkan daya dukung lingkungan yang dihasilkan dari analisis grid ini bersifat fungsional, bukan administratif.

Kebutuhan bahan pangan dihitung berdasarkan jumlah penduduk di setiap grid yang dikalikan dengan besarnya kebutuhan energi bahan pangan individu untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas harian, yang direpresentasikan dengan nilai Angka Kecukupan Energi (AKE). Gambar di bawah menunjukkan sebaran kebutuhan energi bahan pangan di Kota Cimahi tahun 2016. Berdasarkan peta sebaran kebutuhan tersebut, Kota Cimahi memiliki kebutuhan pangan yang cukup tinggi dan tersebar merata di seluruh wilayah Kota Cimahi. Beberapa kawasan memiliki nilai kebutuhan pangan bernilai nol karena tidak terdapat penduduk pada kawasan tersebut. Kawasan dengan nilai kebutuhan nol adalah kawasan dengan tutupan lahan berupa perkebunan atau sawah/ladang. Wilayah dengan nilai kebutuhan pangan tinggi berada di sekitar pusat Kota Cimahi dan wilayah yang

berbatasan dengan Kota Bandung, diantaranya adalah Kelurahan Cimahi, Kelurahan Setiamanah, Kelurahan Cigugur Tengah, dan Kelurahan Padasuka di Kecamatan Cimahi Tengah, Kelurahan Cibabat di Kecamatan Cimahi Utara, serta Kelurahan Cibeureum dan Kelurahan Melong di Kecamatan Cimahi Selatan.

**Gambar 2.53.**  
**Kebutuhan Energi Bahan Pangan di Kota Cimahi Tahun 2016**  
**Dalam Sistem Grid 5"X5"**



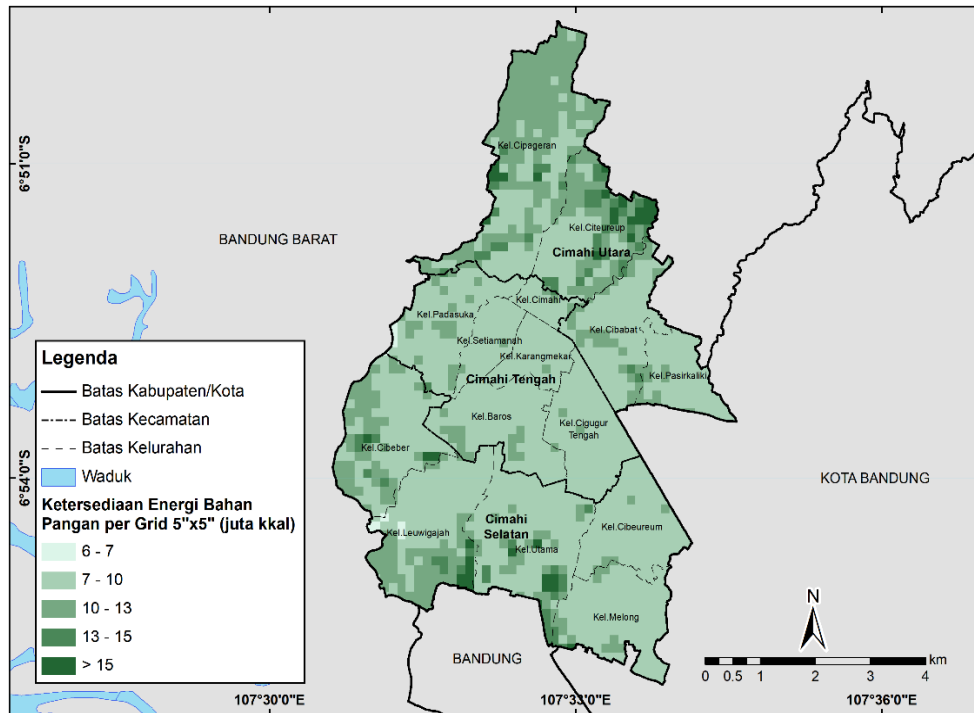
Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Ketersediaan pangan diperoleh melalui perhitungan menggunakan data produksi tanaman pangan, perkebunan, dan hasil peternakan. Peta sebaran ketersediaan pangan pada Kota Cimahi ditunjukkan pada gambar di bawah. Hampir seluruh wilayah di Kota Cimahi memiliki nilai ketersediaan rendah, terutama pada Kecamatan Cimahi Tengah sebagai pusat Kota. Wilayah dengan sebaran ketersediaan pangan dengan nilai tinggi berada bagian utara dan selatan Kota Cimahi. Wilayah ini didominasi oleh tutupan lahan berupa sawah, ladang, dan perkebunan, dengan nilai ketersediaan pangan tertinggi berada pada kawasan sawah. Ketersediaan pangan cukup tinggi berada di Kelurahan



Citeureup dan Kelurahan Cipageran di Kecamatan Cimahi Utara, serta Kelurahan Utama, Kelurahan Leuwigajah, dan Kelurahan Cibeber di Kecamatan Cimahi Selatan.

**Gambar 2.54.**  
**Ketersediaan Energi Bahan Pangan di Kota Cimahi Tahun 2016**  
**Dalam Sistem Grid 5"X5"**



Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Setelah diperoleh sebaran kebutuhan dan ketersediaan bahan pangan, selanjutnya dihitung nilai selisih ketersediaan bahan pangan. Pada gambar di atas menunjukkan peta selisih ketersediaan bahan pangan di Kota Cimahi. Pada perhitungan hasil selisih ketersediaan, Kota Cimahi didominasi oleh selisih ketersediaan yang bernilai negatif, terutama pada Kelurahan Cimahi dan Kelurahan Setiamanah di Kecamatan Cimahi Tengah, dan Kelurahan Cibeureum dan Kelurahan Melong di Kecamatan Cimahi Selatan. Nilai ketersediaan, kebutuhan, dan selisih ketersediaan bahan pangan juga dihitung pada setiap kecamatan di Kota Cimahi yang ditunjukkan oleh tabel di bawah. Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa secara akumulasi, selisih ketersediaan bahan pangan di Kota Cimahi bernilai negatif di setiap

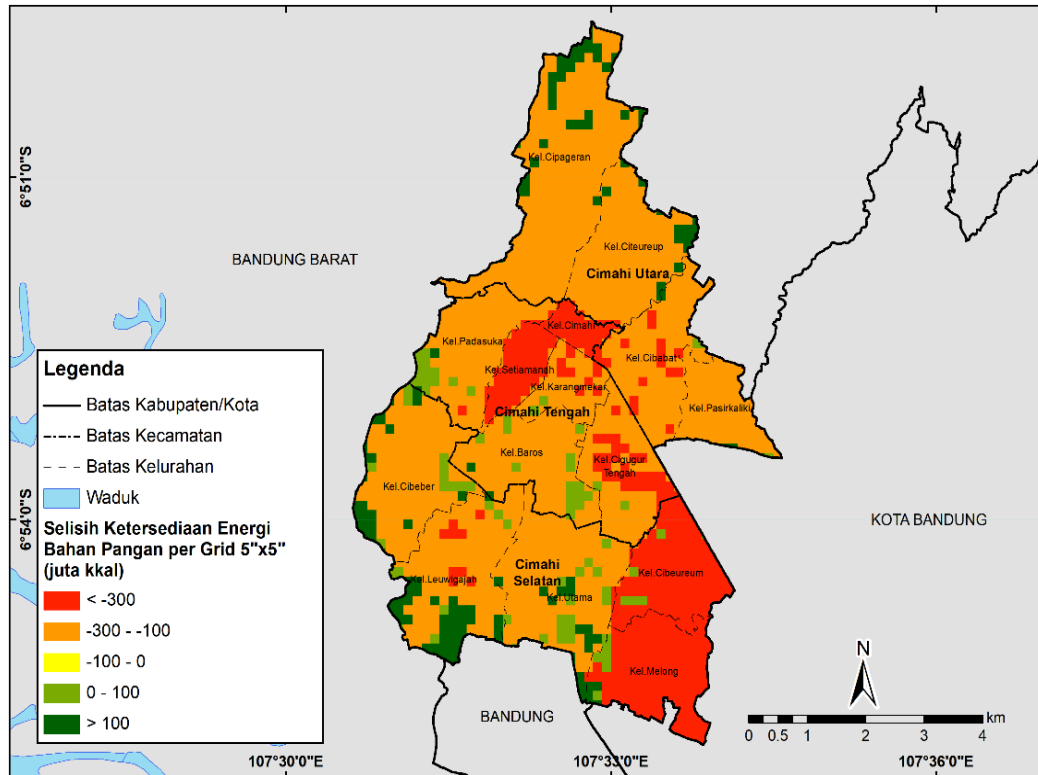
kecamatan. Selisih negatif menunjukkan bahwa daerah tersebut sudah tidak dapat menunjang kebutuhan pangan. Namun, yang perlu diperhatikan adalah perhitungan ini menggunakan konsep insitu, yaitu perhitungan ketersediaan sumber daya hanya pada Kota Cimahi tanpa melibatkan aliran dari dan/atau ke wilayah lain. Jadi, selisih negatif tidak mengindikasikan bahwa pada daerah tersebut terjadi kelaparan.

**Tabel 2.53.**  
**Nilai Ketersediaan, Kebutuhan, dan Selisih Ketersediaan Energi Pangan di Setiap Kecamatan di Kota Cimahi Tahun 2016**

Kecamatan	Energi Bahan Pangan (juta kkal)		
	Ketersediaan	Kebutuhan	Selisih
Kecamatan Cimahi Selatan	7.776,54	176.579,74	-168.803,20
Kecamatan Cimahi Tengah	4.244,33	121.506,77	-117.262,43
Kecamatan Cimahi Utara	7.190,34	119.114,85	-111.924,50

*Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2018-2023*

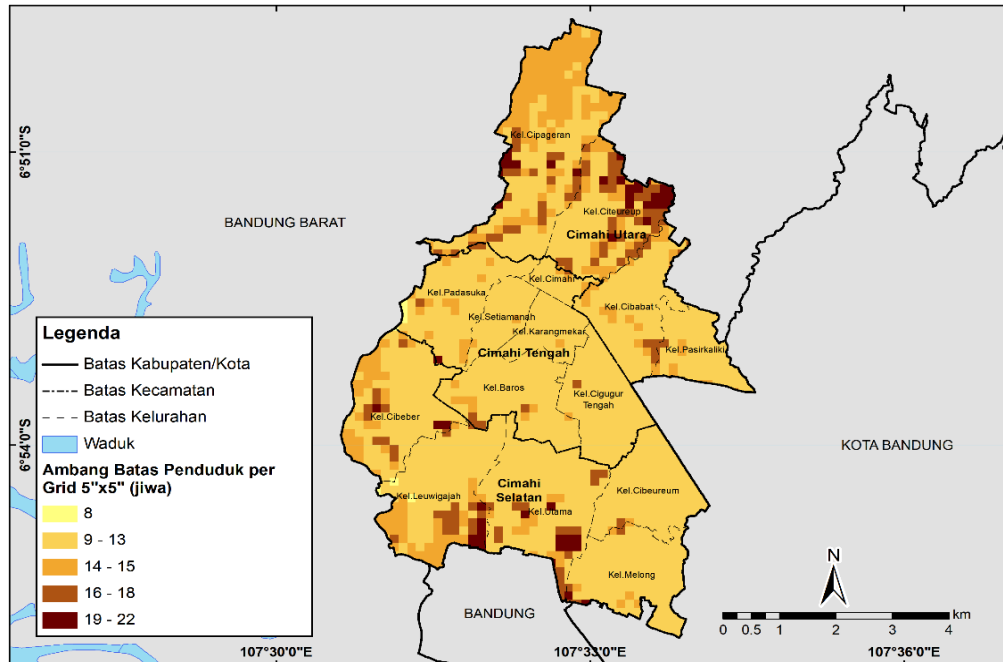
**Gambar 2.55.**  
**Selisih Ketersediaan Energi Bahan Pangan di Kota Cimahi**  
**Tahun 2016 Dalam Sistem Grid 5”X5”**



*Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022*

Penentuan nilai ambang batas dilakukan dengan membandingkan antara ketersediaan dan kebutuhan energi bahan pangan. Hasil analisis menunjukkan jumlah penduduk yang penyediaan pangannya dapat didukung oleh Kota Cimahi. Sebaran nilai ambang batas penduduk untuk bahan pangan terdapat pada gambar di bawah. Sebagian besar Kota Cimahi memiliki nilai ambang batas rendah, yaitu pada angka 8 hingga 13 jiwa. Hal ini disebabkan rendahnya ketersediaan bahan pangan, namun terdapat kebutuhan yang tinggi akan bahan pangan di Kota Cimahi.

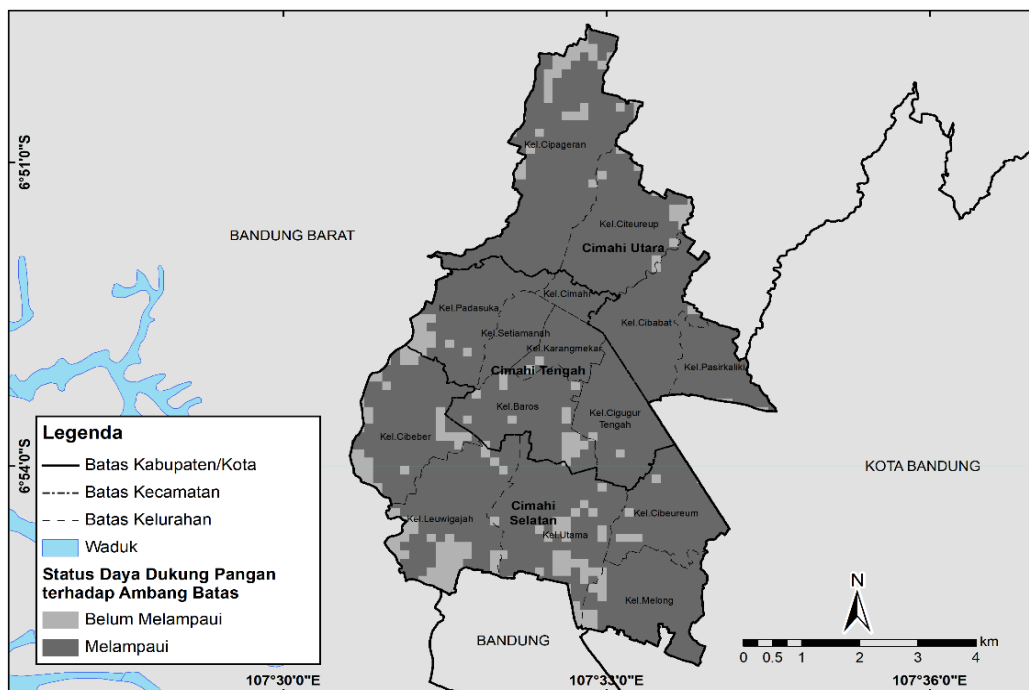
**Gambar 2.56.**  
**Ambang Batas Penduduk Untuk DDLH Penyedia Bahan Pangan**  
**di Kota Cimahi Tahun 2016 Dalam Sistem Grid 5”X5”**



*Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022*

Nilai ambang batas digunakan untuk menentukan status daya dukung Kota Cimahi terhadap penyediaan bahan pangan. Status ini ditentukan dengan membandingkan ambang batas penduduk dengan jumlah penduduk yang terdapat pada lokasi tersebut. Apabila jumlah penduduk lebih rendah dari ambang batasnya, maka lokasi tersebut masih mampu mendukung kebutuhannya. Sebaliknya, apabila jumlah penduduk lebih besar dibandingkan nilai ambang batas, atau yang disebut dengan melampaui ambang batas, maka lokasi tersebut sudah tidak mampu mendukung kebutuhan pangan. Seperti yang terlihat pada gambar di bawah, status daya dukung penyedia pangan sebagian besar telah melampaui ambang batas.

**Gambar 2.57.**  
**Status DDLH Penyedia Pangan Di Kota Cimahi Tahun 2016**  
**Dalam Sistem Grid 5”X5”**



*Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022*

**Tabel 2.54.**  
**Luas Wilayah Yang Masih Mendukung Penyedia Bahan Pangan**  
**di Kota Cimahi Tahun 2016**

KECAMATAN	Luas Kecamatan (Ha)	Luas Mendukung	
		Ha	%
Kecamatan Cimahi Selatan	1.739,95	268,57	15,43%
Kecamatan Cimahi Tengah	1.099,48	81,01	7,36%
Kecamatan Cimahi Utara	1.404,69	105,31	7,49%
<b>KOTA CIMAHI</b>	<b>4.244,11</b>	<b>454,89</b>	<b>10,71%</b>

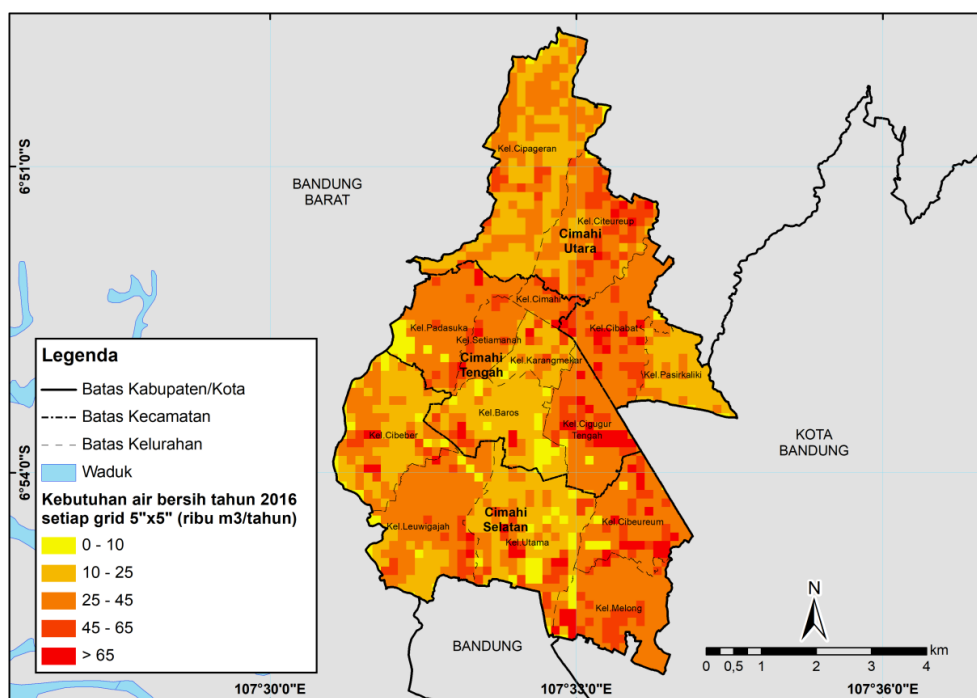
*Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022*

**c. Ambang Batas dan Status DDLH Penyedia Air**

Ambang batas dan status DDLH jasa ekosistem penyedia air bersih dihitung menggunakan sumber daya air yang berasal dari air permukaan. Perhitungan didahului dengan menghitung ketersediaan dan kebutuhan jasa ekosistem air bersih yang hasil analisisnya

menunjukkan tingkat kebutuhan dan ketersediaan air bersih. Kebutuhan air bersih yang dihitung terdiri atas kebutuhan air domestik dan kebutuhan air lahan. Kebutuhan air bersih yang tinggi tersebar di tiga kecamatan dimana sebagian besar terdapat di Kelurahan Setiamanah, Kelurahan Cimahi, Kelurahan Cigugur Tengah, Kelurahan Cibereum, Kelurahan Melong, dan Kelurahan Cibabat.

**Gambar 2.58.**  
**Kebutuhan Air Bersih Di Kota Cimahi Tahun 2016 Dalam Sistem Grid 5"X5"**

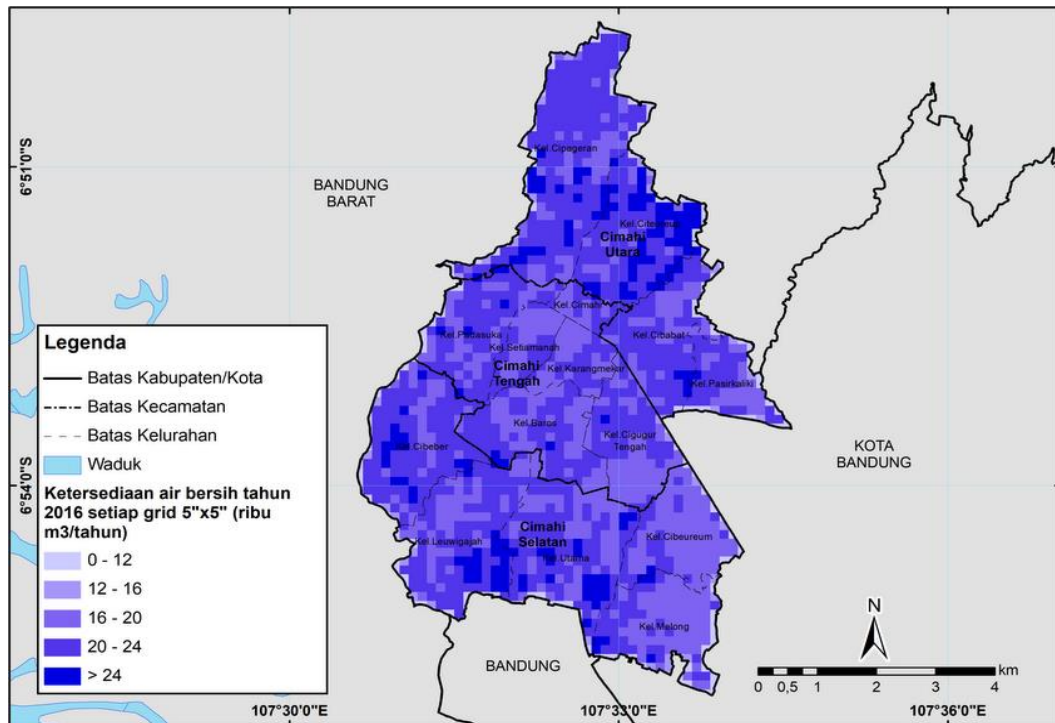


Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Ketersediaan air bersih Kota Cimahi memiliki pola distribusi yang hampir berkebalikan dengan pola kebutuhan air bersih. Wilayah dengan ketersediaan air bersih tinggi sebagian besar terletak di Kecamatan Cimahi Selatan dan Kecamatan Cimahi Utara tepatnya di Kelurahan Utama, Kelurahan Leuwigajah, Kelurahan Cibeber, Kelurahan Citeureup, dan Kelurahan Cipageran. Wilayah-wilayah tersebut memiliki tutupan lahan sawah, pertanian lahan kering, dan perkebunan yang cukup besar dibanding wilayah kelurahan lainnya.

Sementara wilayah dengan ketersediaan air bersih rendah didominasi oleh tutupan lahan terbangun.

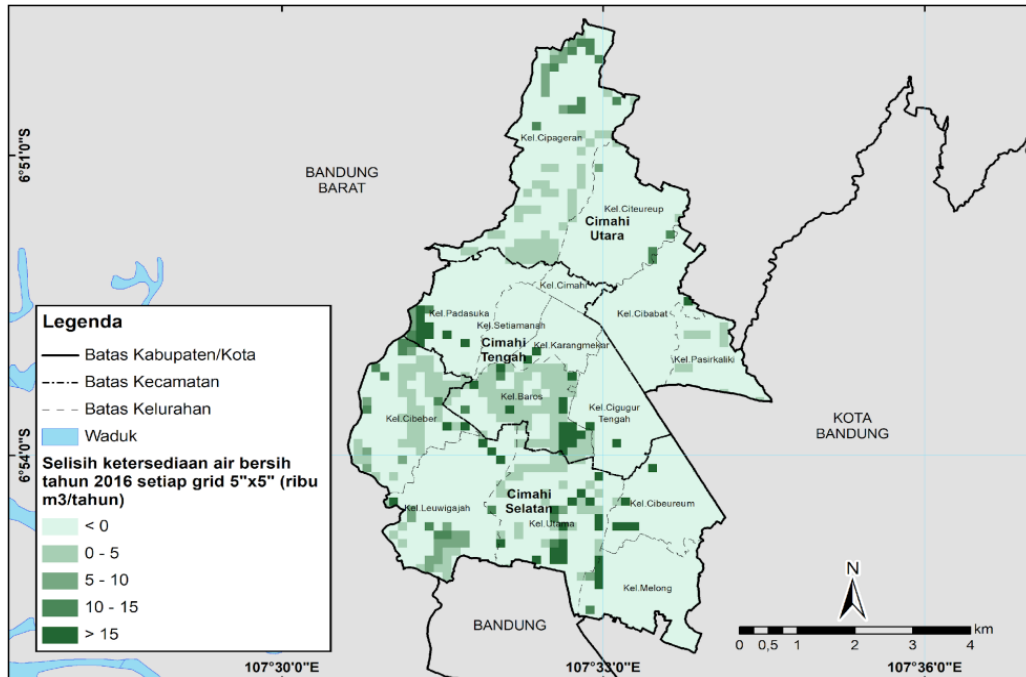
**Gambar 2.59.**  
**Ketersediaan Air Bersih di Kota Cimahi Tahun 2016**  
**Dalam Sistem Grid 5"X5"**



Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Dari nilai kebutuhan dan ketersediaan air bersih selanjutnya dapat diperoleh nilai selisih ketersediaan air bersih. Sebagian besar selisih ketersediaan air bersih di wilayah Kota Cimahi bernilai negatif. Sedangkan selisih ketersediaan air bersih positif paling banyak tersebar wilayah bagian selatan seperti di kelurahan Baros, Kelurahan Utama, Kelurahan Padasuka, Kelurahan Cibeber, dan Kelurahan Leuwigajah.

**Gambar 2.60.**  
**Selisih Ketersediaan Air Bersih Di Kota Cimahi Tahun 2016**  
**Dalam Sistem Grid 5"X5"**



*Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022*

Nilai akumulasi dari kebutuhan, ketersediaan, dan selisih akumulasi air bersih di setiap kecamatan Kota Cimahi ditunjukkan pada table di bawah. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua kecamatan di Kota Cimahi memiliki selisih ketersediaan negatif. Hal ini menunjukkan bahwa secara akumulatif selisih ketersediaan air bersih Kota Cimahi sudah defisit, yang artinya jumlah kebutuhan air bersih lebih tinggi dari jumlah ketersediaan air bersih sehingga air yang tersedia sudah tidak dapat menunjang kebutuhan air bersih. Namun, yang perlu diperhatikan adalah perhitungan ini menggunakan konsep in situ, yaitu perhitungan ketersediaan sumber daya hanya pada Kota Cimahi tanpa melibatkan aliran dari dan/atau ke wilayah lain.



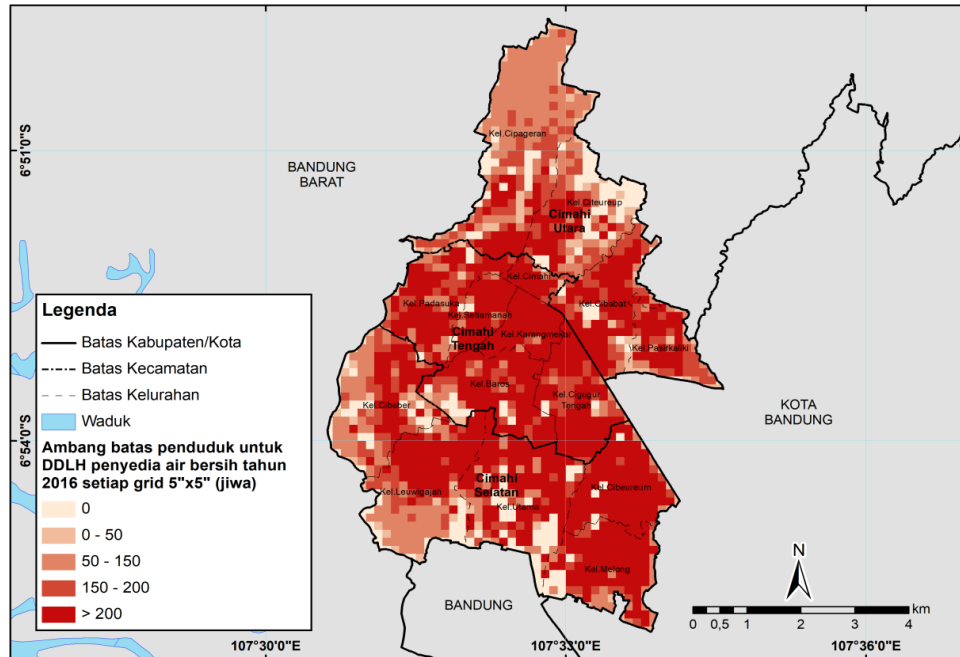
**Tabel 2.55.**  
**Akumulasi Ketersediaan, Kebutuhan, Dan Selisih Ketersediaan Energi Air Di Setiap Kecamatan Di Kota Cimahi Tahun 2016**

Kecamatan	Air Bersih (m <sup>3</sup> /tahun)		
	Ketersediaan	Kebutuhan	Selisih Ketersediaan
Kec. Cimahi Selatan	15.235.680,03	26.018.843,65	-10.783.163,61
Kec. Cimahi Tengah	9.523.542,07	15.643.863,00	-6.120.320,93
Kec. Cimahi Utara	12.579.185,59	19.380.280,08	-6.801.094,49

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Dari nilai kebutuhan dan ketersediaan air bersih, selanjutnya dapat dihitung nilai ambang batas dan status DDLH penyedia air bersih Kota Cimahi. Ambang batas dihitung melalui perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan air lahan. Peta ambang batas ditunjukkan pada gambar di bawah. Peta ambang batas menunjukkan jumlah penduduk yang dapat dipenuhi kebutuhan air dari ketersediaan yang ada di wilayah itu sendiri (*closed system*).

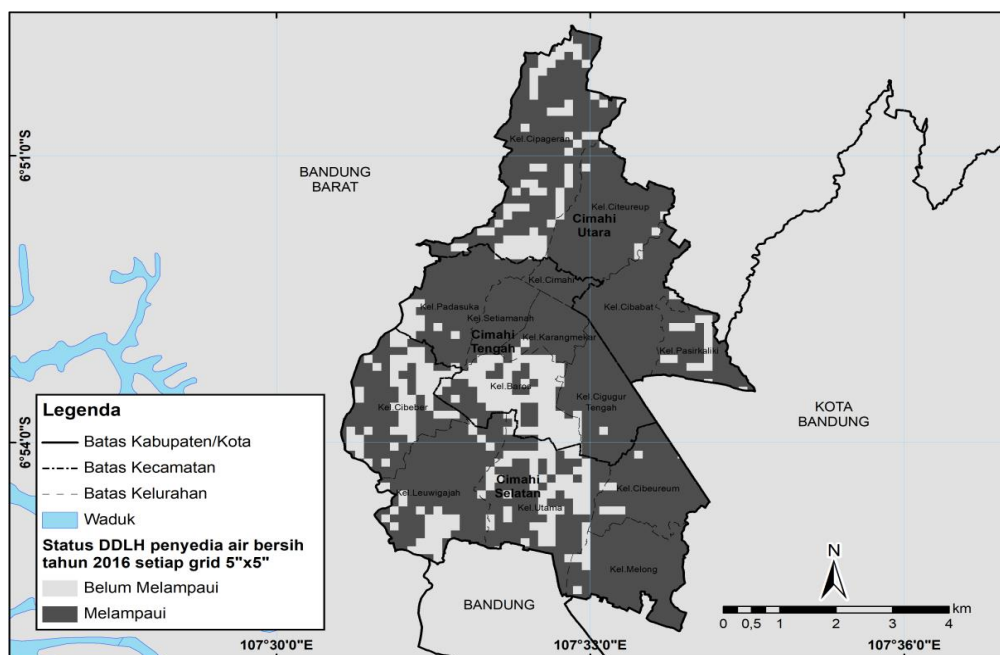
**Gambar 2.61.**  
**Ambang Batas Penduduk Untuk DDLH Penyedia Air Bersih**  
**Di Kota Cimahi Tahun 2016 Dalam Sistem Grid 5”X5”**



*Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022*

Status daya dukung DDLH penyedia air bersih dianalisis berdasarkan hasil perhitungan selisih antara ambang batas dengan jumlah penduduk yang tinggal di setiap grid. Selisih yang bernilai negatif menunjukkan ambang batas air bersih dalam grid tersebut telah melampaui, yang artinya bahwa jumlah penduduk yang dapat dipenuhi kebutuhan air lebih kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk yang tinggal dalam grid tersebut, dan sebaliknya. Peta status daya dukung DDLH penyedia air bersih ditunjukkan pada gambar di bawah :

**Gambar 2.62.**  
**Status DDLH Penyedia Air Di Kota Cimahi Tahun 2016**  
**Dalam Sistem Grid 5”X5”**



*Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022*

**Tabel 2.56.**  
**Luas Wilayah Yang Belum Melampaui Ambang Batas DDLH Penyedia**  
**Air Bersih Di Kota Cimahi Tahun 2016**

Kecamatan	Luas Kecamatan	Luas Belum Melampaui	
	(Ha)	(Ha)	(%)
Kec. Cimahi Selatan	1.739,95	405,50	23,31%
Kec. Cimahi Tengah	1.099,48	240,18	21,84%
Kec. Cimahi Utara	1.404,69	217,64	15,49%
<b>KOTA CIMAHI</b>	<b>4.244,11</b>	<b>863,32</b>	<b>20,34%</b>

*Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2018-2023*

Berdasarkan peta status daya dukung air diketahui bahwa sebagian besar wilayah Kota Cimahi sudah melampaui ambang batas DDLH penyedia air bersih. Daya dukung melampaui paling banyak tersebar di Kecamatan Cimahi Utara. Wilayah dengan daya dukung belum melampaui ambang batas relatif sedikit yakni sekitar 20,34% dari luas Kota Cimahi. Wilayah belum melampaui sebagian besar

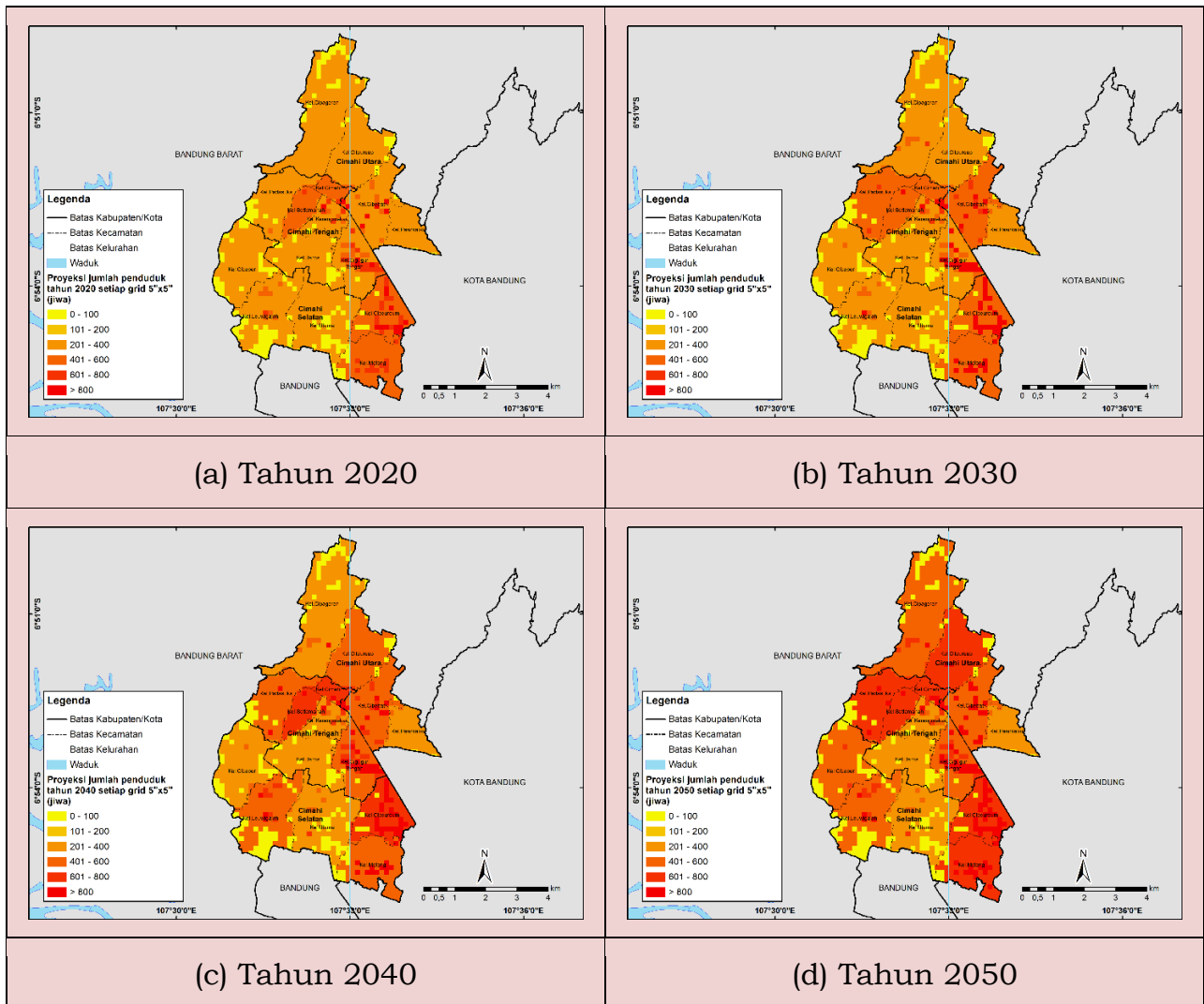
terdapat di Kelurahan Utama, Kelurahan Baros, Kelurahan Leuwigajah, Kelurahan Cibeber, Kelurahan Cipageran, dan Kelurahan Pasirkaliki. Wilayah dengan status daya dukung telah melampaui memiliki ketergantungan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih terhadap wilayah lain yang memiliki daya dukung belum melampaui. Sehingga wilayah yang belum melampaui tersebut perlu dipelihara fungsinya sebagai lahan penyedia air bersih karena sangat berperan penting sebagai sumber penyedia air bersih untuk wilayah lain.

### **1) Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup**

#### a) Tekanan Penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu fenomena yang dapat menyebabkan adanya tekanan terhadap kondisi lingkungan. Oleh karena itu, analisis tekanan terhadap lingkungan hidup diawali dengan analisis tekanan atau pertumbuhan penduduk pada waktu tertentu, yaitu berupa model spasial proyeksi penduduk tahun 2020, 2030, 2040, dan 2050. Model proyeksi penduduk ini diturunkan dari model distribusi penduduk tahun 2016 sebagai tahun dasar, dengan memperhitungkan laju pertumbuhan penduduk di setiap kelurahan di Kota Cimahi.

**Gambar 2.63.**  
**Model Proyeksi Penduduk Tahun : (A) 2020, (B) 2030, (C) 2040,**  
**Dan (D) 2050 Di Kota Cimahi Dalam Sistem Grid 5"X5"**



*Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022*

Berdasarkan hasil pemodelan proyeksi penduduk dari tahun 2016 ke 2020 hingga 2050, peningkatan jumlah penduduk banyak terjadi di sekitar pusat Kota Cimahi, yaitu di sekitar Kelurahan Cimahi (Kec. Cimahi Tengah) serta di sekitar wilayah tenggara Kota Cimahi yang berbatasan dengan Kota Bandung, yaitu di Kelurahan Cibeureum dan Kelurahan Melong (Kec. Cimahi Selatan). Kondisi ini dapat merepresentasikan pola tekanan penduduk yang menyebar dari wilayah pusat kota dan dari wilayah yang berbatasan dengan Kota Bandung sebagai kawasan penyangga dari Kota Bandung. Dengan kata lain, pola

tekanan penduduk ini menyebar ke sekitar wilayah yang pada dasarnya telah memiliki kepadatan penduduk yang tinggi.

Tekanan penduduk di Kota Cimahi ini memberikan dampak tekanan terhadap kondisi lingkungan hidup di waktu mendatang. Berikut ini, diuraikan beberapa proyeksi dampak tekanan penduduk terhadap kondisi lingkungan, yaitu dalam hal timbulan sampah, timbulan lumpur tinja, dan potensi beban pencemar di Kota Cimahi; serta analisis mengenai status daya tampung beban pencemar sungai dan analisis penurunan muka air tanah di Kota Cimahi;

b) Potensi Timbulan Sampah

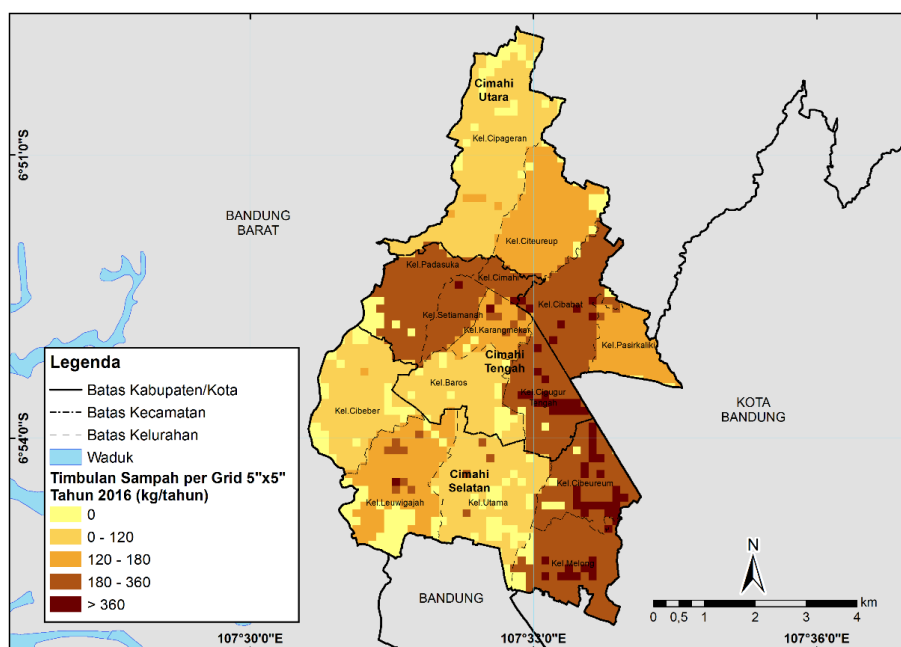
Dengan meningkatnya jumlah timbulan sampah seiring dengan pertumbuhan penduduk, sarana dan prasarana persampahan yang terbatas dapat menimbulkan permasalahan, seperti masalah kesehatan, bahaya banjir, pencemaran air bersih, pencemaran tanah, tersumbatnya saluran air, dan permasalahan lingkungan lainnya. Kota Cimahi menghasilkan sampah hingga 300 ribu ton setiap tahunnya.

Berdasarkan laporan daya dukung dan daya tampung Kota Cimahi tahun 2019, angka timbulan sampah per kapita untuk kawasan permukiman Kota Cimahi dari hasil sampling ditetapkan sebesar 2,49 liter/org/hari atau 0,48 kg/org/hari dengan berat jenis sampah sebesar 195,57 kg/m<sup>3</sup>. Berdasarkan hasil pengamatan di TPPAS Sarimukti, dihasilkan bahwa proporsi timbulan sampah permukiman Kota Cimahi adalah sebesar 63% dari timbulan sampah kota. Sehingga proporsi timbulan sampah non permukiman hanya 37% nya saja dari total sampah kota. Sampah permukiman memiliki komposisi terbesar di karenakan pola konsumsi dan pertumbuhan penduduk di Kota Cimahi yang meningkat setiap tahunnya.

Sebaran potensi timbulan sampah dimodelkan dengan menggunakan distribusi penduduk dan jumlah sampah yang

dihasilkan per kapita per hari di wilayah Kota Cimahi, yaitu 0,544 kg/orang/hari.

**Gambar 2.64.**  
**Potensi Timbulan Sampah Di Kota Cimahi Tahun 2016**  
**Dalam Sistem Grid 5”X5”**



Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Pola sebaran dari potensi timbulan sampah bergantung pada pola distribusi penduduk, karena pemodelan timbulan sampah hanya mempertimbangkan sampah yang bersumber dari domestik. Secara spasial, timbulan sampah yang cukup tinggi di Kota Cimahi terdapat di Kecamatan Cimahi Selatan yaitu Kelurahan Melong dan Kelurahan Cibeureum. Terdapat pula timbulan sampah yang cukup tinggi di Kecamatan Cimahi Tengah yaitu Kelurahan Cigugur Tengah, Kelurahan Cimahi, dan Kelurahan Padasuka; serta di Kecamatan Cimahi Utara yaitu seluruh Kelurahan Cibabat, khususnya di Kelurahan Cibabat yang lokasinya berdekatan dengan Kecamatan Cimahi Tengah. Jika dilihat dari tutupan lahan, timbulan sampah yang tinggi berada pada wilayah permukiman. Sementara itu, dihasilkan bahwa pada Kecamatan Cimahi Utara dan

Kecamatan Cimahi Selatan memiliki timbulan sampah yang kecil.

Dengan jumlah penduduk yang tiap tahun semakin meningkat, nilai potensi timbulan sampah yang dihasilkan juga akan semakin meningkat. Pemodelan potensi timbulan sampah juga dapat diproyeksikan ke tahun 2020, 2030, 2040, dan 2050, dengan nilai yang terlihat pada tabel di bawah. Berdasarkan tabel tersebut, Kecamatan Cimahi Selatan merupakan kecamatan yang memiliki potensi timbulan sampah paling besar. Meskipun secara spasial terlihat bahwa hampir sebagian besar wilayah Kecamatan Cimahi Utara memiliki peningkatan timbulan sampah yang tinggi, namun apabila diakumulasikan, peningkatan jumlah timbulan sampah di kecamatan Cimahi Selatan lebih besar.

**Tabel 2.57.**  
**Timbulan Sampah Per Kecamatan Di Kota Cimahi 2016-2050**

Kecamatan	Kelurahan	Timbulan Sampah (kg/tahun)				
		2016	2020	2030	2040	2050
Kecamatan Cimahi Selatan	Cibeber	14374,66	15854,88	20364,64	26109,28	33556
	Cibeureum	32161,28	34212,16	39923,07	46572,38	54287
	Leuwigajah	23514,94	24941,86	28789,02	33254,18	38430
	Melong	34030,46	35610,24	39827,33	44525,86	49809
	Utama	18326,27	19177,63	21659,9	24443,55	27635
	<b>Total</b>	<b>122407,6</b>	<b>129796,8</b>	<b>150564</b>	<b>174905,2</b>	<b>203717</b>
Kecamatan Cimahi Tengah	Baros	11038,3	11264,06	11763,46	12318,34	12954
	Cigugur Tengah	24984,83	26023,87	28857,02	31994,82	35464
	Cimahi	6870,72	7245,536	8256,288	9409,024	10735

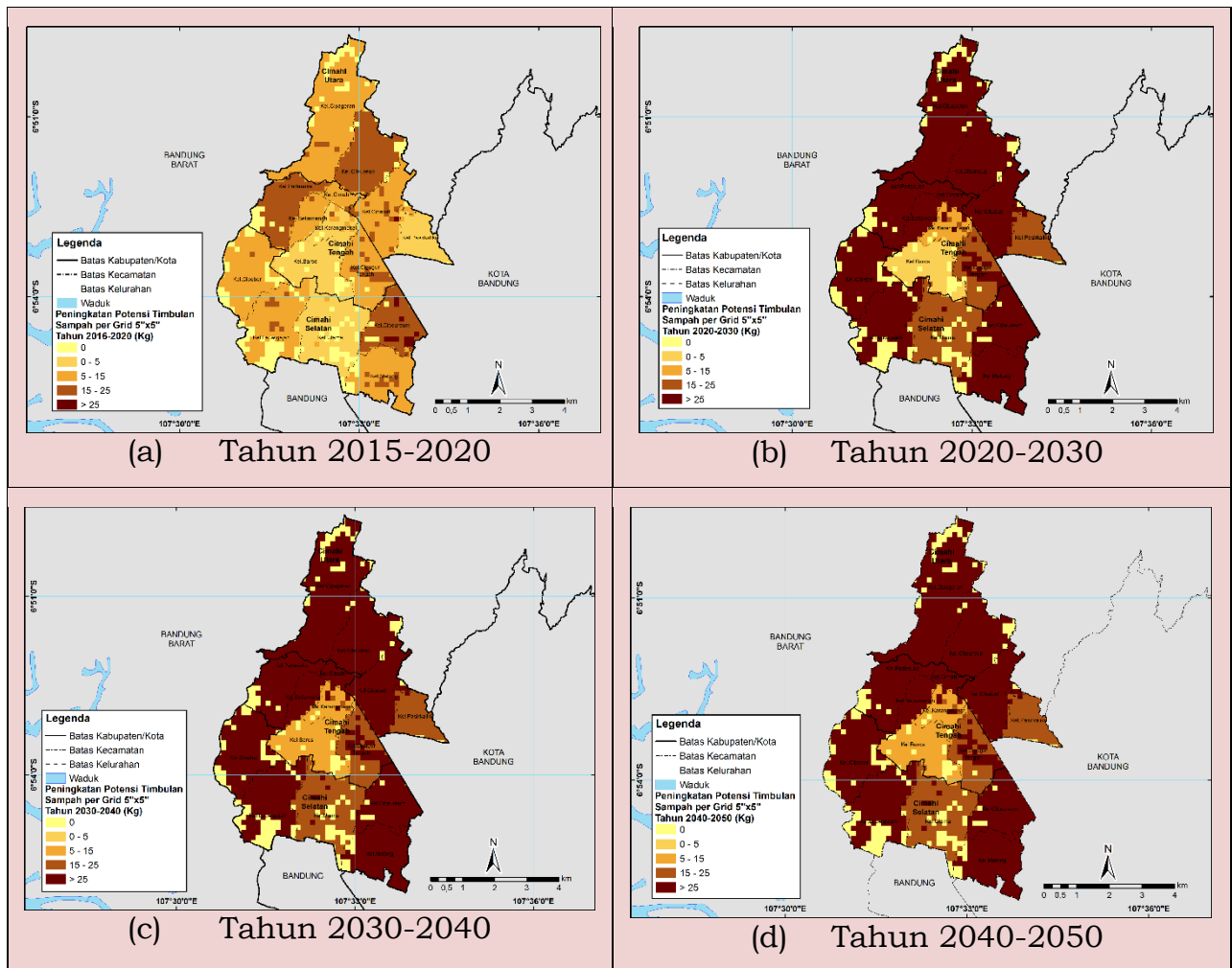


Kecamatan	Kelurahan	Timbulan Sampah (kg/tahun)				
		2016	2020	2030	2040	2050
	Karangmekar	8589,76	8888,96	9681,024	10540,54	11502
	Padasuka	20438,62	22160,38	27119,49	33176,93	40569
	Setiamanah	12308	12903,14	14532,42	16368,42	18443
	<b>Total</b>	<b>84230,24</b>	<b>88485,95</b>	<b>100209,7</b>	<b>113808,1</b>	<b>129667</b>
Kecamatan Cimahi Utara	Cibabat	28279,3	29709,47	33810,14	38392,8	43706
	Cipageran	24718,82	27707,55	36718,37	48597,15	64489
	Citeureup	19827,71	22047,23	28853,76	37805,82	49606
	Pasirkaliki	9746,304	10231,55	11599,17	13143,04	14916
	<b>Total</b>	<b>82572,13</b>	<b>89695,81</b>	<b>110981,4</b>	<b>137938,8</b>	<b>172717</b>
<b>Total</b>		<b>289210</b>	<b>307978,5</b>	<b>361755,1</b>	<b>426652,1</b>	<b>506101</b>

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2018-2023 (Konfirmasi sumber data)

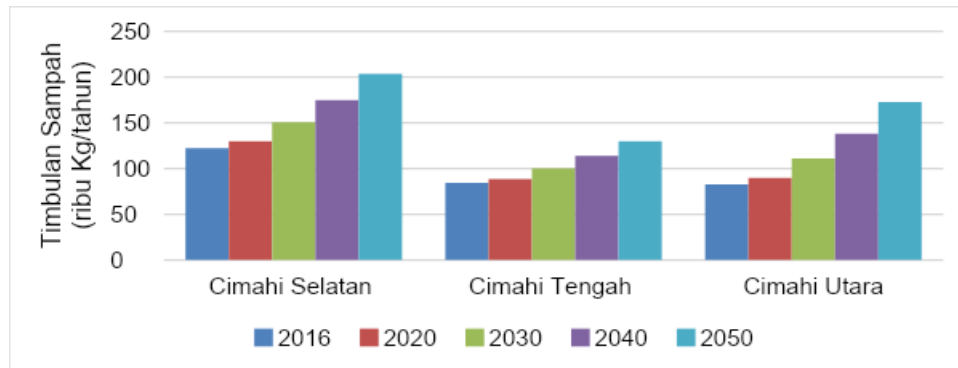
Dari tahun 2016 ke tahun 2020, timbulan sampah di Kota Cimahi mengalami peningkatan sebesar 6,48%. Sementara itu, secara rata-rata, peningkatan timbulan sampah dari tahun 2020 ke tahun 2050 yang dihitung dengan periode per 10 tahun adalah sebesar 17,87%. Secara spasial, terlihat bahwa Kecamatan Cimahi Utara mengalami peningkatan timbulan sampah yang cukup signifikan, terutama dari tahun 2016 ke tahun 2020. Jika dilihat dari nilai potensi timbulan sampah per kecamatan, peningkatan potensi timbulan sampah paling tinggi terjadi pada tahun 2040 ke tahun 2050 (18,62%). Secara lebih detail, sebaran dari peningkatan timbulan sampah di Kota Cimahi dapat dilihat pada Gambar 2.59, serta statistik nilai potensi timbulan sampah dari tahun 2016, 2020, 2030, 2040, dan 2050 pada setiap kecamatan di Kota Cimahi dapat dilihat pada Gambar 2.65;

**Gambar 2.65.**  
**Peningkatan potensi timbunan sampah pada sistem grid 5"x5"**  
**Kota Cimahi tahun : (a) 2016 – 2020, (b) 2020 – 2030, (c) 2030 –**  
**2040, dan (d) 2040 – 2050**



Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

**Gambar 2.66.**  
**Potensi Timbulan Sampah Setiap Kecamatan Di Kota Cimahi**  
**Tahun 2016-2050**



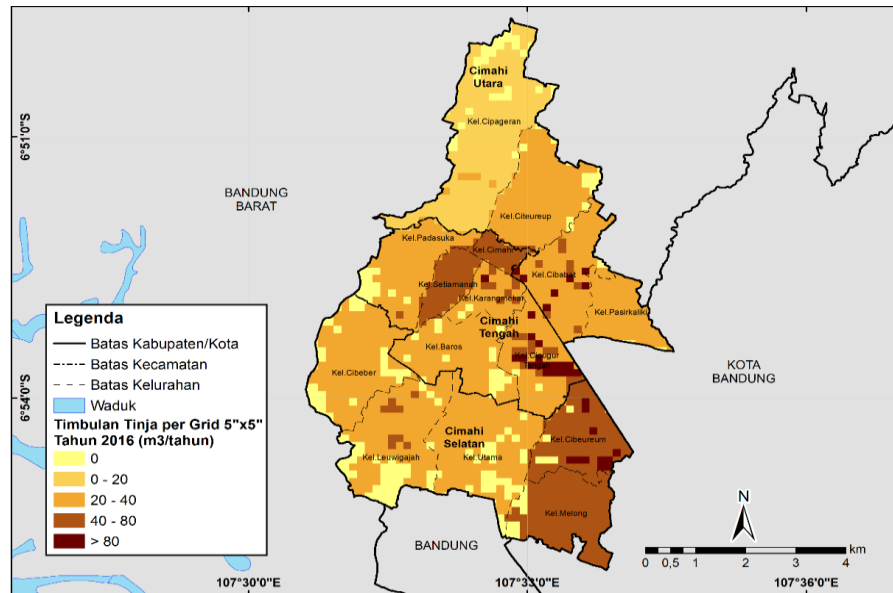
Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

c) Inovasi pengembangan kewirausahaan sosial untuk mengolah sampah organik dan anorganik telah dilakukan di Kota Cimahi melalui pembinaan bank sampah kota (Bank Sampah Samici) dan juga pengolah sampah organik menggunakan metode *black soldier flies* (BSF). Perlu terus didorong hilirisasi produk yang memberi nilai tambah ekonomi, sosial (pemberdayaan) dan lingkungan hidup dalam upaya penanganan sampah;

d) Potensi Timbulan Lumpur Tinja

Selain sampah, tekanan penduduk juga akan berdampak peningkatan timbulan lumpur tinja. Lumpur tinja adalah salah satu air limbah domestik yang dapat menyebabkan degradasi dan pencemaran lingkungan. Permen PU tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat, Buku 4 Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) menetapkan bahwa nilai timbulan lumpur tinja yang ditetapkan sebagai standar adalah 0,1095 m<sup>3</sup>/orang/tahun. Sebaran timbulan lumpur tinja ini juga akan mengikuti pola persebaran penduduk. Dengan menggunakan hasil pemodelan distribusi penduduk dan tekanan penduduk, maka timbulan lumpur tinja beserta nilai proyeksinya dapat dimodelkan. Gambar di halaman selanjutnya merupakan sebaran dari potensi timbulan lumpur tinja di wilayah Kota Cimahi pada tahun 2016.

**Gambar 2.67.**  
**Potensi Timbulan Lumpur Tinja Di Kota Cimahi Tahun 2016**  
**Pada Sistem Grid 5"X5"**



*Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022*

Jika dilihat berdasarkan pola sebarannya, terlihat bahwa Kecamatan Cimahi Selatan yaitu Kelurahan Melong dan Cibereum; serta Kecamatan Cimahi Tengah yaitu Kelurahan Cigugur, Karangmekar, Setiamanah, dan Cimahi memiliki potensi timbulan lumpur tinja yang tinggi. Selain itu, sebagian kecil pada Kelurahan Cimahi Utara terdapat juga potensi timbulan lumpur tinja pada Kelurahan Cibabat.

Dengan menggunakan tekanan penduduk, potensi timbulan lumpur tinja diproyeksikan ke tahun 2020 hingga 2050 dengan periode per 10 tahun. Tabel di bawah menunjukkan nilai dari potensi timbulan lumpur tinja setiap kecamatan di Kota Cimahi pada tahun 2016, 2020, 2030, 2040, dan 2050. Dari tabel, terlihat bahwa kecamatan yang memiliki timbulan lumpur tinja terbesar adalah Kecamatan Cimahi Selatan. Walaupun secara spasial sebagian besar wilayah di Kecamatan Cimahi Utara memiliki peningkatan timbulan lumpur tinja yang besar, namun apabila diakumulasikan, peningkatan jumlah timbulan tinja di

kecamatan Cimahi Selatan lebih besar. Sementara itu, Kecamatan Cimahi Tengah adalah kecamatan yang memiliki timbulan lumpur tinja paling kecil jika dibandingkan dengan kecamatan lain di Kota Cimahi.

**Tabel 2.58.**  
**Timbulan Lumpur Tinja Per Kecamatan Di Kota Cimahi**  
**Tahun 2016-2050**

Kecamatan	Kelurahan	Timbulan Tinja (m <sup>3</sup> /tahun)				
		2016	2020	2030	2040	2050
Kecamatan Cimahi Selatan	Cibeber	2893,428	3191,377	4099,133	5255,452	6750,894
	Cibeureum	6473,64	6886,455	8035,986	9374,404	10934,12
	Leuwigajah	4733,247	5020,465	5794,85	6693,625	7732,452
	Melong	6849,882	7167,87	8016,714	8962,466	10032,72
	Utama	3688,836	3860,204	4359,852	4920,164	5561,943
	<b>Total</b>	<b>24639,03</b>	<b>26126,37</b>	<b>30306,53</b>	<b>35206,11</b>	<b>41012,13</b>
Kecamatan Cimahi Tengah	Baros	2221,865	2267,307	2367,828	2479,518	2602,377
	Cigugur Tengah	5029,116	5238,261	5808,537	6440,133	7145,423
	Cimahi	1382,985	1458,431	1661,882	1893,912	2160,764
	Karangmekar	1729,005	1789,23	1948,662	2121,672	2312,859
	Padasuka	4114,025	4460,592	5458,794	6678,076	8156,655
	Setiamanah	2477,438	2597,231	2925,183	3294,746	3711,174
	<b>Total</b>	<b>16954,43</b>	<b>17811,05</b>	<b>20170,89</b>	<b>22908,06</b>	<b>26089,25</b>
Kecamatan Cimahi Utara	Cibabat	5692,248	5980,124	6805,534	7727,963	8790,879
	Cipageran	4975,571	5577,164	7390,922	9781,963	12969,29
	Citeureup	3991,056	4437,816	5807,88	7609,812	9973,807
	Pasirkaliki	1961,802	2059,476	2334,759	2645,52	3000,519

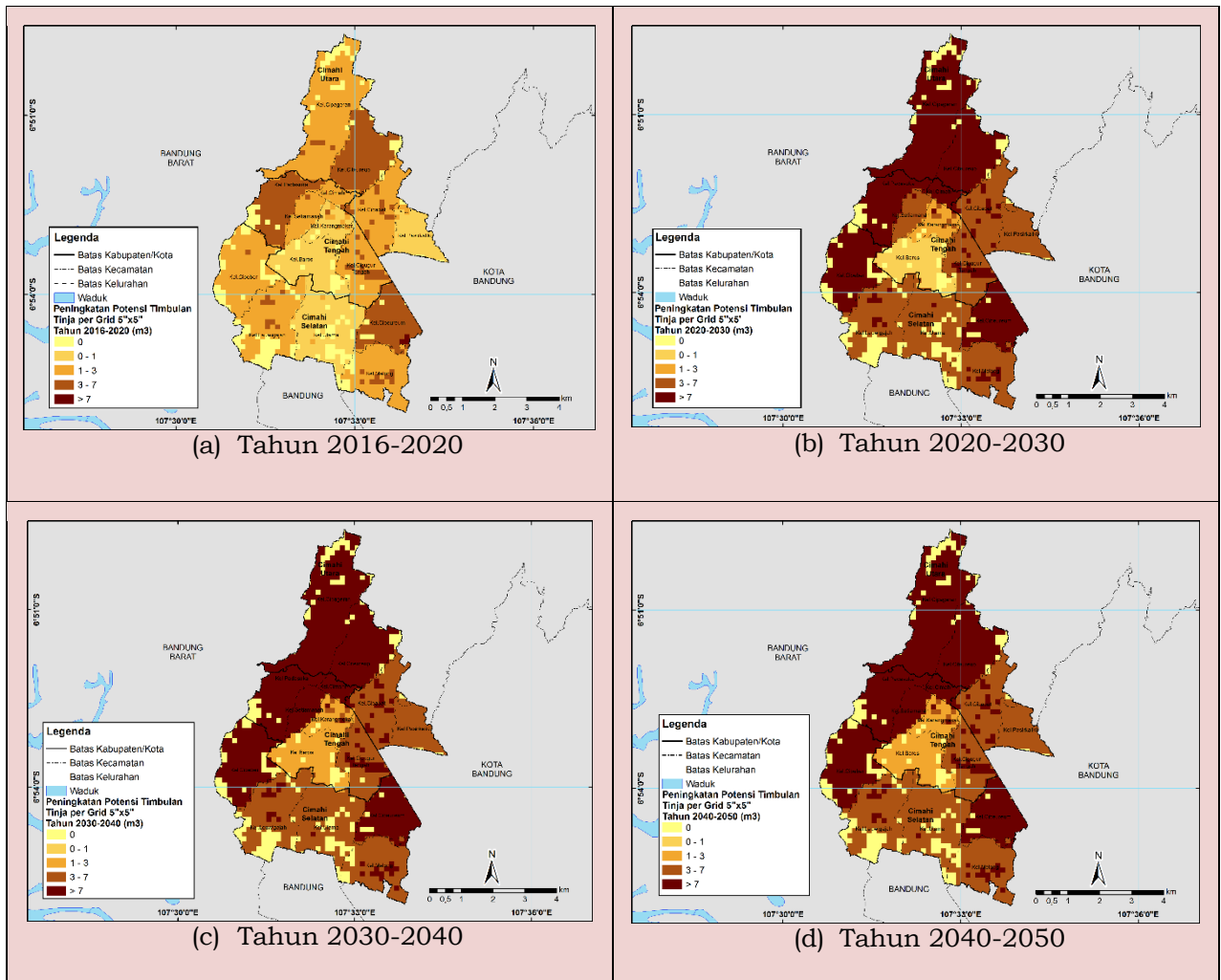
Kecamatan	Kelurahan	Timbulan Tinja (m <sup>3</sup> /tahun)				
		2016	2020	2030	2040	2050
	<b>Total</b>	<b>16620,68</b>	<b>18054,58</b>	<b>22339,1</b>	<b>27765,26</b>	<b>34734,49</b>
<b>Total</b>		<b>58214,14</b>	<b>61992</b>	<b>72816,51</b>	<b>85879,43</b>	<b>101835,9</b>

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Kota Cimahi mengalami peningkatan timbulan lumpur tinja sebesar 6,48% dari tahun 2016 ke tahun 2020. Selanjutnya, dari tahun 2020 hingga tahun 2050, rata-rata besarnya peningkatan timbulan lumpur tinja dengan periode waktu per 10 tahun adalah 17,87%. Peningkatan timbunan lumpur tinja paling tinggi terjadi antara tahun 2040 dan 2050, yaitu sebesar 18,62%. Peningkatan potensi lumpur tinja ini tersebar dengan pola seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.68.

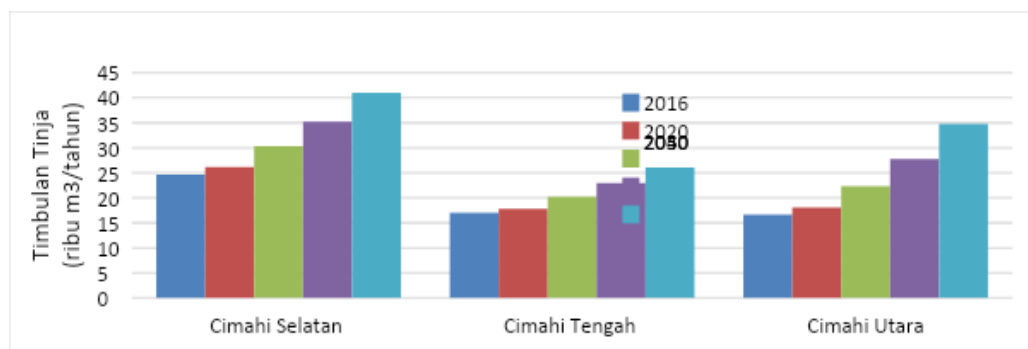
Peningkatan jumlah timbulan lumpur tinja terlihat signifikan terjadi di Kecamatan Cimahi Utara. Dari tahun 2016 ke tahun 2020, peningkatan timbulan tinja di Kecamatan Cimahi Utara adalah 8,62%, sedangkan dari peningkatan rata-rata dari tahun 2020 hingga 2050 dengan periode perhitungan per 10 tahun adalah 24,37%. Grafik nilai timbulan lumpur tinja setiap kecamatan di Kota Cimahi di tahun 2015, 2020, 2030, 2040, dan 2050 ditunjukkan pada Gambar 2.69.

**Gambar 2.68.**  
**Peningkatan potensi timbunan lumpur tinja pada sistem grid 5"x5" di Kota Cimahi tahun : (a) 2016 – 2020, (b) 2020 – 2030, (c) 2030 – 2040, dan (d) 2040 – 2050**



Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

**Gambar 2.69.**  
**Grafik Potensi Timbunan Lumpur Tinja Setiap Kecamatan Di Kota Cimahi Tahun 2016-2050**



Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

e) Potensi Beban Pencemar Air Sungai

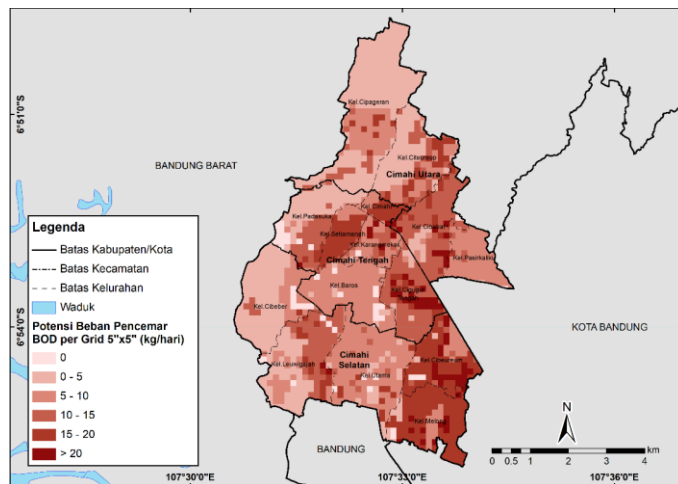
Berdasarkan Laporan Daya Dukung dan Daya Tampung Kota Cimahi Tahun 2019, sebanyak 100.029 rumah tangga dari 164.903 rumah tangga di Kota Cimahi telah memiliki fasilitas tempat buang air besar sendiri (60,65%), sementara 4.874 rumah tangga (39,34%) tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar sendiri. Hal ini dapat memicu perilaku hidup tidak sehat yaitu melakukan Buang Air Besar (BAB) di tempat yang tidak memadai sehingga berpotensi mencemari badan air. Pemerintah Kota Cimahi terus berupaya untuk meningkatkan fasilitas sanitasi masyarakat. tahun 2017 mengalami peningkatan fasilitas tempat buang air besar sendiri yang sebelumnya adalah 41% meningkat menjadi 61%.

Potensi beban pencemar yang dimodelkan pada dokumen ini adalah potensi dari sumber yang dapat menghasilkan beban pencemar, berasal dari sumber domestik, pertanian, dan penggunaan lahan. Adapun zat beban pencemar yang dihitung adalah BOD, COD, dan TSS untuk sumber domestik dan pertanian, serta BOD dan COD untuk sumber penggunaan lahan. Potensi beban pencemar domestik dianalisis berdasarkan hasil pemodelan distribusi penduduk di setiap grid dengan mempertimbangkan parameter faktor emisi penduduk, rasio ekivalen kota serta koefisien transfer beban. Potensi beban pencemar pertanian dan penggunaan lahan (non-titik) dianalisis berdasarkan pemodelan luas lahan di setiap grid dan faktor emisi zat pencemar untuk setiap jenis lahan. Lahan yang dimaksud meliputi lahan terbangun dan hutan. Untuk lahan pertanian, yang digunakan adalah sawah dan perkebunan/ladang. Potensi beban pencemar total pada masing-masing zat pencemar BOD, COD, dan TSS diperoleh berdasarkan akumulasi beban pencemar sumber domestik, pertanian, dan penggunaan lahan.

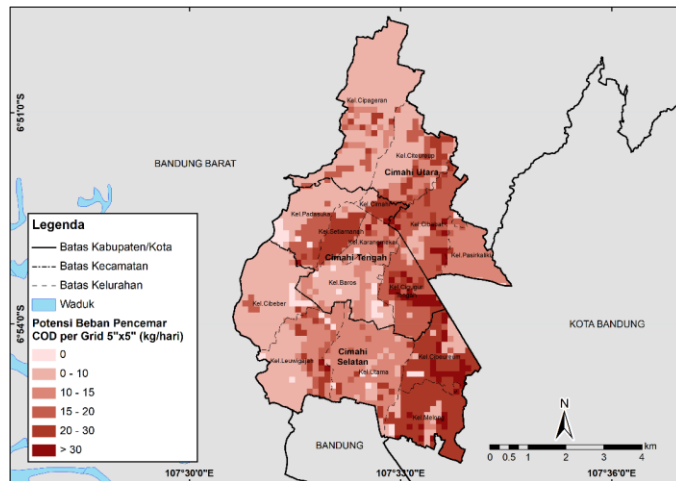


Hasil pemodelan menunjukkan bahwa zat pencemar BOD dan COD memiliki pola sebaran yang serupa, dan sedikit berbeda dengan pola sebaran zat pencemar TSS. Zat BOD dan COD dengan potensi tinggi berada di beberapa kelurahan, seperti Kelurahan Cimahi, Kelurahan Setiamanah, sebagian wilayah Kelurahan Padasuka dan Kelurahan Cigugur Tengah di Kecamatan Cimahi Tengah, Kelurahan Cibabat dan sebagian wilayah Kelurahan Citeureup di Kecamatan Cimahi Utara, serta Kelurahan Cibeureum, Kelurahan Melong, dan sebagian wilayah Kelurahan Leuwigajah di Kecamatan Cimahi Selatan. Sedangkan untuk zat pencemar TSS, nilai tinggi hampir tersebar merata di seluruh kelurahan kecuali pada sebagian besar wilayah Kelurahan Cipageran di Kecamatan Cimahi utara dan Kelurahan Cibeber di Kecamatan Cimahi Selatan.

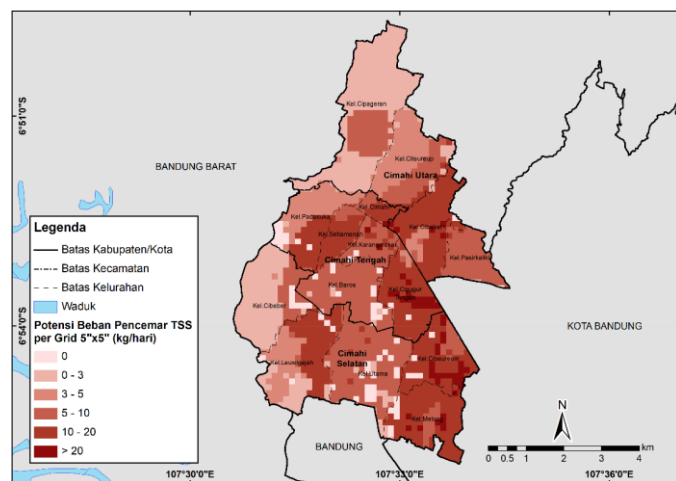
**Gambar 2.70.**  
**Potensi Beban Pencemar Air Sungai Di Kota Cimahi Tahun 2016**  
**Dalam Sistem Grid 5"x5"**



(a) Parameter BOD



(b) Parameter COD

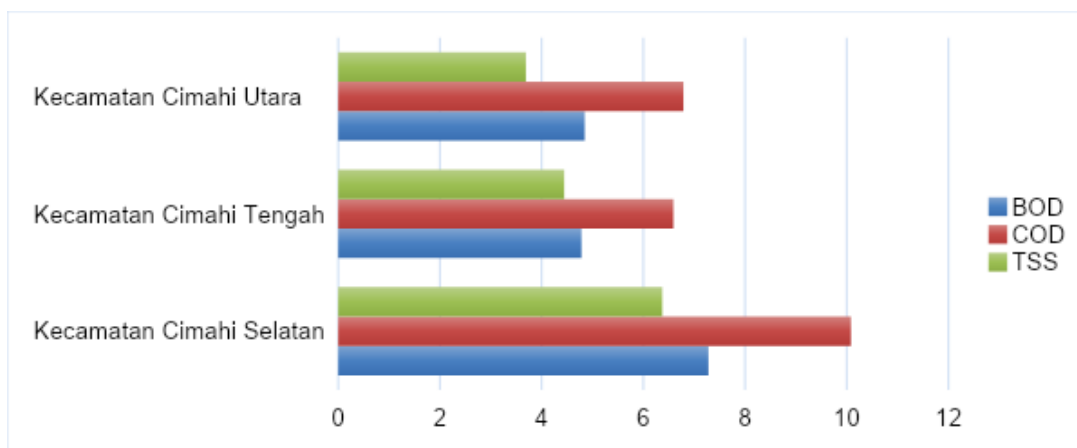


(c) Parameter TSS

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Gambar di bawah menunjukkan nilai akumulasi setiap zat pencemar di setiap kecamatan di Kota Cimahi tahun 2016. Pada grafik tersebut, terlihat bahwa Kecamatan Cimahi Selatan memiliki nilai potensi beban pencemar paling tinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Untuk zat pencemar, COD merupakan zat pencemar yang berpotensi memiliki nilai paling tinggi dibandingkan zat pencemar lainnya untuk setiap kecamatan di Kota Cimahi.

**Gambar 2.71.**  
**Potensi Beban Pencemar Setiap Zat Di Setiap Kecamatan**  
**Di Kota Cimahi Tahun 2016**



Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Dengan adanya peningkatan jumlah penduduk, potensi beban pencemar Kota Cimahi juga berpotensi mengalami peningkatan, terutama beban pencemar yang bersumber dari domestik. Peningkatan potensi beban pencemar di Kota Cimahi dimodelkan untuk tahun 2016 hingga 2050, yaitu dari 2016 ke 2020 dan 2020 hingga 2050 dengan periode perhitungan per 10 tahun. Dari tiga kecamatan yang terdapat di Kota Cimahi, Kecamatan Cimahi Selatan merupakan kecamatan yang memiliki potensi beban pencemar yang paling besar dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Sementara untuk jenis zat pencemar, zat COD merupakan zat pencemar dengan angka tertinggi pada ketiga kecamatan yang ada.

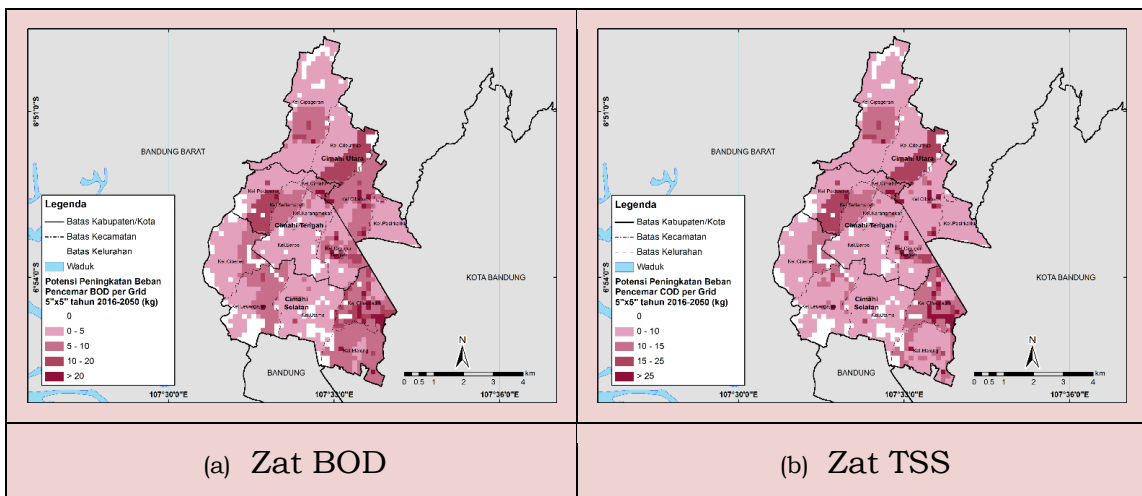
**Tabel 2.59.**  
**Nilai Potensi Beban Pencemar Per Kecamatan Di Kota Cimahi**

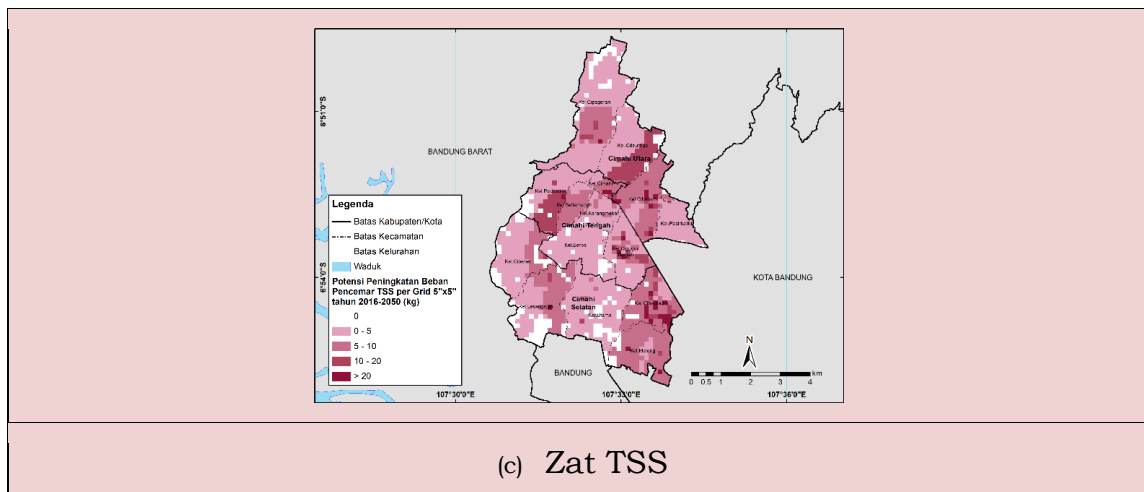
Kecamatan	Zat Pencemar (kg/hari)	Tahun		
		2016	2020	2050
Cimahi Selatan	BOD	7279,37	7663,34	11422,06
	COD	10081,89	10609,83	15778,07
	TSS	6372,07	6736,93	10307,72
Cimahi Tengah	BOD	4783,05	4999,59	7066,12
	COD	6590,25	6887,93	9729,41
	TSS	4442,48	4648,68	6611,87
Cimahi Utara	BOD	4847,30	5144,92	8502,30
	COD	6787,25	7196,48	11812,88
	TSS	3690,05	3972,78	7162,30

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Walaupun memiliki nilai tertinggi, pada perhitungan rata-rata peningkatan potensi beban pencemar dari tahun 2020 hingga 2025 dengan periode per 10 tahun, zat COD justru memiliki nilai persentase peningkatan paling kecil dibandingkan zat yang lain. Zat yang mengalami presentasi peningkatan tertinggi pada ketiga kecamatan di Kota Cimahi adalah zat pencemar TSS. Peningkatan zat pencemar TSS tertinggi terjadi di Kecamatan Cimahi Utara dengan persentase sebesar 14,84%. Pada Kecamatan Cimahi Selatan, nilai persentase peningkatan zat BOD, COD, dan TSS masing-masing secara berurutan adalah 10,97%; 10,92%; dan 11,55%. Pada Kecamatan Cimahi Tengah, nilai persentase peningkatan zat BOD, COD, dan TSS adalah 9,75%; 9,73%; dan 9,90%. Sementara di Kecamatan Cimahi Utara, nilai persentase peningkatan zat BOD, COD, dan TSS adalah 13,16%; 13,03%; dan 14,84%.

**Gambar 2.72.**  
**Peningkatan Potensi Beban Pencemar Dari Tahun 2016 Ke Tahun 2050 Di Kota Cimahi**





Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

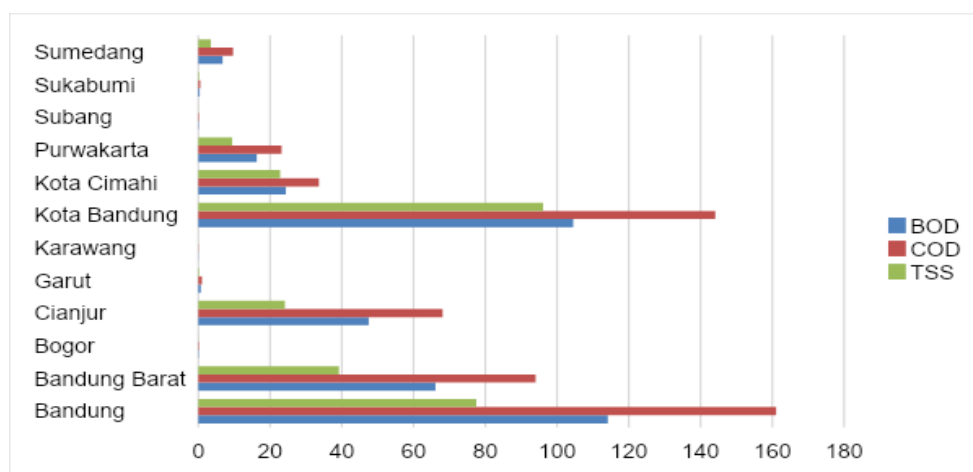
Kota Cimahi merupakan wilayah yang berada dalam cakupan Wilayah Sungai (WS) Citarum, yaitu pada dua Wilayah Distrik (WD), yaitu WD Citarum Tengah dan WD Cekungan Bandung. Dari seluruh luasan Kota Cimahi, luasan WD Citarum Tengah lebih mendominasi yaitu sekitar 99% dengan hanya 1% dari luasan Kota Cimahi merupakan bagian dari WD Cekungan Bandung. Selain Kota Cimahi, kedua WD ini juga mencakup beberapa kabupaten/kota lain di Jawa Barat, seperti Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan sebagian kecil Kabupaten Sumedang untuk WD Cekungan Bandung, serta Kabupaten Bandung Barat, sebagian Kabupaten Cianjur, dan sebagian Kabupaten Purwakarta untuk WD Citarum Tengah. Hal ini menyebabkan adanya tambahan potensi beban pencemar air sungai pada Kota Cimahi yang berasal dari beberapa daerah dalam cakupan kedua WD tersebut. Tabel di bawah menunjukkan nilai akumulasi dari potensi beban pencemar dari beberapa kabupaten/kota yang wilayahnya tercakup oleh WD Citarum Tengah dan WD Cekungan Bandung.

**Tabel 2.60.**  
**Nilai Potensi Beban Pencemar Di Wilayah Kabupaten/Kota Yang Berada Dalam WD Citarum Tengah Dan WD Cekungan Bandung**

KABUPATEN	Zat Pencemar (kg/ hari)		
	BOD	COD	TSS
Bandung	114.150	161.055	77.477
Bandung Barat	66.106	94.025	39.200
Bogor	128	186	45
Cianjur	47.503	68.100	24.127
Garut	688	1.003	223
Karawang	51	76	-
Kota Bandung	104.500	144.108	96.099
Kota Cimahi	24.403	33.604	22.810
Purwakarta	16.299	23.212	9.433
Subang	128	188	26
Sukabumi	382	543	228
Sumedang	6.762	9.686	3.490
<b>TOTAL</b>	<b>381.101</b>	<b>535.787</b>	<b>273.158</b>

*Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022*

**Gambar 2.73.**  
**Potensi Beban Pencemar Setiap Zat Di Wilayah Kabupaten/Kota Yang Berada Dalam WD Citarum Tengah Dan WD Cekungan Bandung**

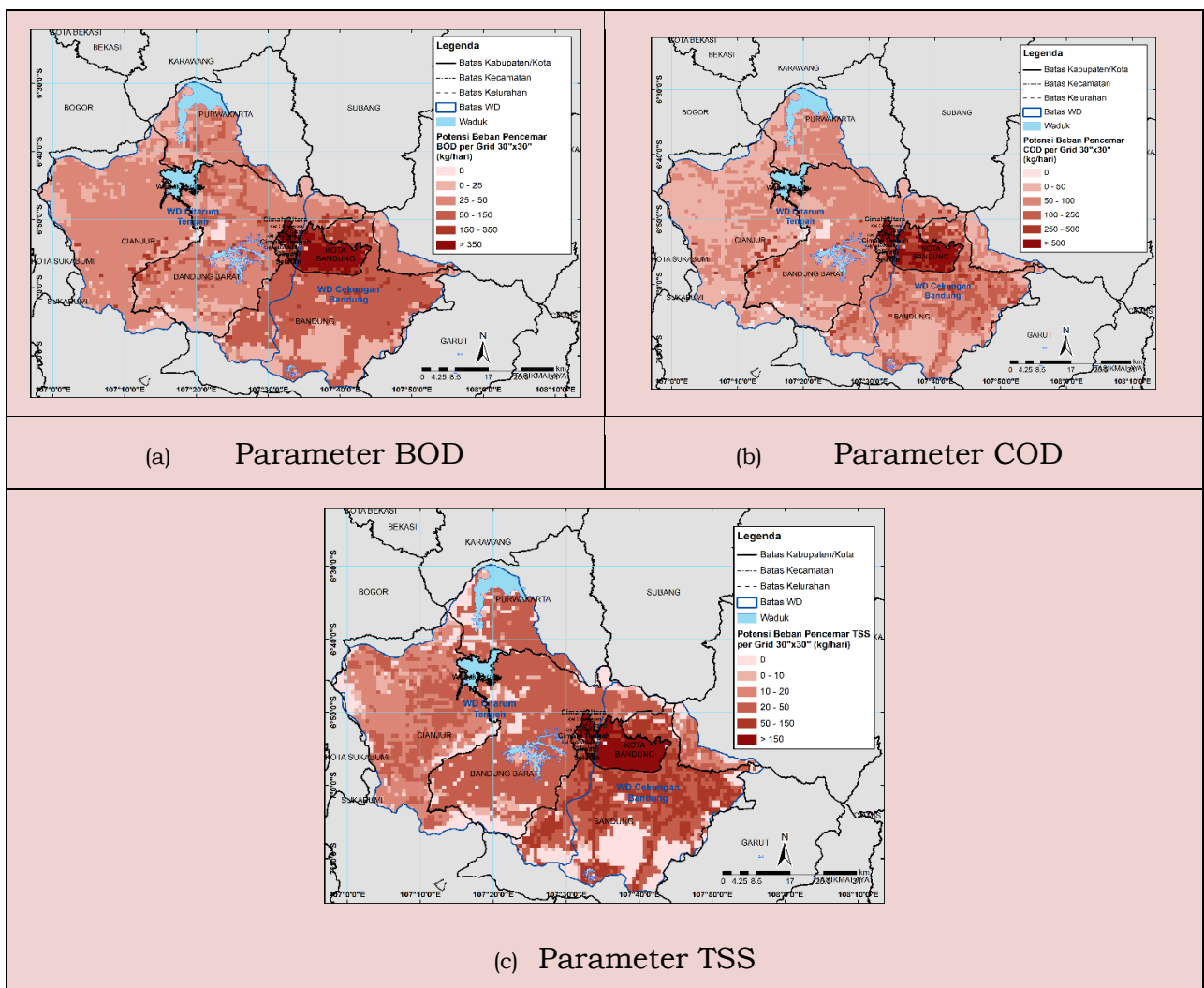


*Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022*

Dari hasil rekapitulasi nilai potensi beban pencemar beserta grafiknya, terlihat bahwa nilai potensi beban pencemar tertinggi bersumber dari Kabupaten Bandung dan Kota Bandung. Kedua wilayah ini berada dalam cakupan WD Cekungan Bandung. Sementara dalam cakupan WD Citarum Tengah yang

mendominasi wilayah di Kota Cimahi, potensi beban pencemar dengan nilai tinggi berada di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur, yang kemudian di posisi ketiga ditempati oleh Kota Cimahi. Gambar di bawah menunjukkan sebaran dari potensi beban pencemar yang ada di masing-masing WD. Apabila dilihat dari sebarannya, nilai potensi beban pencemar tinggi untuk setiap gridnya justru berada di Kota Bandung dan Kota Cimahi. Namun, apabila diakumulasikan, karena luasan kedua kota ini tergolong kecil, total nilai potensi beban pencemarnya menjadi kecil pula;

**Gambar 2.74.**  
**Potensi Beban Pencemar Air Sungai Di WD Citarum Tengah Dan WD Cekungan Bandung Dalam Sistem Grid 30"X30"**



Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

f) Kualitas Air Sungai

Berdasarkan Laporan Daya Dukung dan Daya Tampung Kota Cimahi tahun 2019, dilakukan pengukuran lapangan pada lima sungai di Kota Cimahi untuk dilakukan analisis kualitas air sungai pada musim pancaroba dan kemarau. Pengambilan sampling untuk musim pancaroba dilaksanakan pada Bulan Mei tahun 2019 dan untuk musim kemarau dilaksanakan pada Bulan Agustus 2019.

Daya Tampung beban Pencemaran Air (DTBPA) dihitung dengan menggunakan selisih antara beban pencemaran aktual dengan beban pencemaran maksimum. Beban pencemar aktual Sungai Citarum dari Kota Cimahi dihitung berdasarkan konsentrasi pencemar dari anak-anak sungai yang masuk ke dalam DAS Citarum. Berdasarkan hasil perhitungan tidak semua parameter dapat ditentukan nilai DTBPA karena ada beberapa parameter yang tidak memiliki baku mutu atau nilai hasil analisis di lapangan konsentrasinya nol. Angka DTBPA yang negatif menunjukkan bahwa daya tampung beban pencemaran di sungai sudah melebihi untuk parameter tersebut.

Pada Laporan Daya Dukung dan Daya Tampung Kota Cimahi tahun 2019, disampaikan hasil pemantauan di Sungai Cimahi, Cisangkan, Cibabat, Cibaligo, dan Cibeureum pada musim kemarau dan pancaroba di bagian hulu, tengah, dan hilir terdapat parameter yang tidak memenuhi baku mutu diantaranya yaitu TDS, TSS, NO<sub>2</sub>, Zn, BOD<sub>5</sub>, COD, DO, Total P, dan Fecal coli dll. Mutu air berdasarkan hasil perhitungan pada musim pancaroba dan kemarau dengan menggunakan nilai indeks pencemaran air Sungai Cimahi, Cisangkan, Cibabat, Cibaligo, dan Cibeureum di bagian hulu, tengah, dan hilir termasuk kategori cemar sedang berat.



**Tabel 2.61.**  
**Indeks Pencemaran Air Sungai**

No	Nama Sungai	Lokasi Pemantauan	Musim Pancaroba		Musim kemarau	
			Nilai IP	Status Mutu Air	Nilai IP	Status Mutu Air
1	Cimahi	Hulu	1.101	Cemar Berat	341,72	Cemar Berat
		Tengah	241	Cemar Berat	7.128,16	Cemar Berat
		Hilir	1.102	Cemar Berat	21.455,38	Cemar Berat
2	Cisangkan	Tengah	461	Cemar Berat	24.217,17	Cemar Berat
		Hulu	1.102	Cemar Berat	23.612,94	Cemar Berat
		Hilir	119	Cemar Berat	17.349,97	Cemar Berat
3	Cibaligo	Hulu	1.102	Cemar Berat	21.450,97	Cemar Berat
		Tengah	1.102	Cemar Berat	13.015,45	Cemar Berat
		Hilir	1.103	Cemar Berat	72.770,91	Cemar Berat
4	Cibeureum	Hulu	461	Cemar Berat	11.884,16	Cemar Berat
		Tengah	241	Cemar Berat	7.710,91	Cemar Berat
		Hilir	461	Cemar Berat	24.217,92	Cemar Berat
5	Cibabat	Hulu	1.102	Cemar Berat	1.170,08	Cemar Berat
		Tengah	1.102	Cemar Berat	20.997,65	Cemar Berat
		Hilir	1.101	Cemar Berat	77.091,97	Cemar Berat

*Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022*

Hasil perhitungan DTBPA pada Sungai Cimahi menunjukkan hasil bahwa pada musim pancaroba parameter yang telah melebihi daya tampungnya yaitu BOD<sub>5</sub>, COD, TSS, Nitrit, klorin bebas, dan fenol. Sementara pada musim kemarau, parameter yang sudah melebihi daya tampung di Sungai Cimahi terdiri dari: TDS, TSS, BOD<sub>5</sub>, COD, Fosfat, Klorin bebas, Zink, Fenol dan detergen sebagai MBAS.

Perhitungan DTBPA pada Sungai Cisangkan menunjukkan hasil bahwa pada musim pancaroba parameter yang telah melebihi daya tampungnya yaitu BOD5, COD, Fosfat, Timbal, Zink, Nitrit, klorin bebas, dan fenol. Sementara pada musim kemarau, parameter yang sudah melebihi daya tampung terdiri dari : TSS, BOD5, COD, Fosfat, Zink, Sulfat, Klorin bebas, Barium, Fenol dan detergen sebagai MBAS.

DTBPA pada Sungai Cibeureum menunjukkan bahwa pada musim pancaroba parameter yang telah melebihi daya tampungnya yaitu TSS, BOD5, COD, Fosfat, Timbal, Zink, Nitrit, klorin bebas, minyak dan lemak, dan fenol. Pada musim kemarau, parameter yang sudah melebihi daya tampung di Sungai Cibeureum terdiri dari : TSS, BOD5, COD, Fosfat, Zink, Nitrit, Klorin bebas, Fenol dan detergen sebagai MBAS.

Perhitungan DTBPA pada Sungai Cibabat menunjukkan bahwa pada musim pancaroba, parameter yang telah melebihi daya tampungnya yaitu : BOD5, COD, Fosfat, Timbal, Zink, Nitrit, klorin bebas, fenol, dan detergen sebagai MBAS. Sementara pada musim kemarau, parameter yang sudah melebihi daya tampung di Sungai Cibabat terdiri dari: TDS, TSS, BOD5, COD, Fosfat, Zink, Nitrit, Nitrat, Flourida, Klorin bebas, Sulfat, Fenol dan detergen sebagai MBAS.

Pada Sungai Cibaligo, parameter yang telah melebihi daya tampungnya pada musim pancaroba yaitu : TDS, TSS, BOD5, COD, Fosfat, Tembaga, Timbal, Zink, Sulfida, Sianida, Nitrit, Flourida, klorin bebas, fenol, dan detergen sebagai MBAS. Sementara pada musim kemarau, parameter yang sudah melebihi daya tampung di Sungai Cibaligo terdiri dari: TSS, BOD5, COD, Fosfat, Timbal, Zink, Sulfida, Nitrit, Klorin bebas, Sulfat, Fenol dan detergen sebagai MBAS;

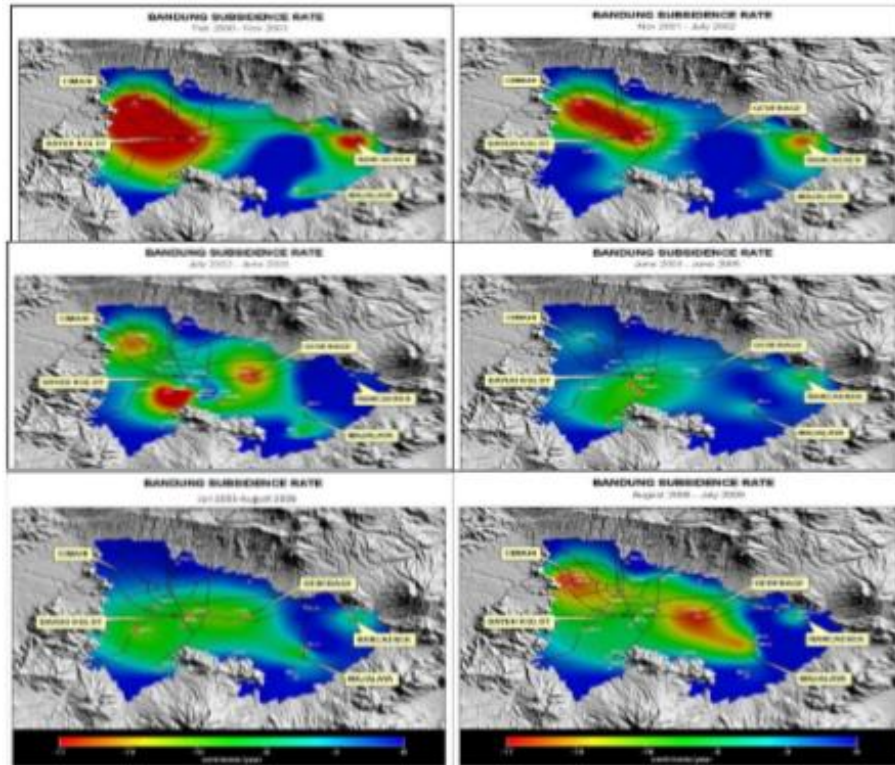
g) Penurunan Muka Tanah (*Land Subsidence*)

Penurunan muka tanah atau land subsidence adalah fenomena penurunan dari permukaan atau topografi tanah. Turunnya

permukaan tanah biasanya terjadi disebabkan karena pengambilan air tanah yang berlebihan. Fenomena ini sering terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Wilayah Cekungan Bandung cukup rentan terhadap penurunan muka tanah, yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa Kota Cimahi masuk dalam wilayah cekungan ini. Penurunan muka tanah di wilayah Cekungan Bandung diduga diakibatkan oleh ekstraksi air tanah yang berlebihan (Abidin, et al., 2008). Tercatat hampir semua industri di wilayah Cekungan Bandung menggunakan bahan baku berupa air tanah (Gumilar, et al., 2012). Terdapat beberapa penelitian terkait penurunan muka tanah di Cekungan Bandung. Dari beberapa penelitian tersebut menghasilkan bahwa Kota Cimahi memiliki laju penurunan muka tanah yang signifikan.

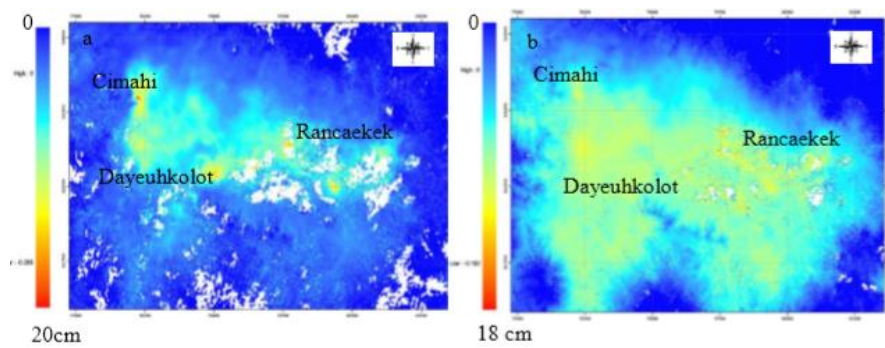
Gumilar et al., (2012) meneliti penurunan muka tanah di Cekungan Bandung dengan menggunakan metode survei GPS dan InSAR. Berdasarkan hasil pengolahan data GPS dari tahun 2000-2009, wilayah Kota Cimahi khususnya wilayah Leuwigajah mengalami penurunan cukup besar hingga mencapai 14 cm per tahun. Wilayah tersebut merupakan kawasan industri yang diduga mengambil banyak air tanah (artesis). Sedangkan berdasarkan pengolahan data InSAR pada kurun waktu Januari 2009-Desember 2010, wilayah Kota Cimahi juga mengalami penurunan muka tanah yang sangat besar sekitar 12 cm. Pengolahan data InSAR masih memiliki ketelitian dibawah GPS. Berdasarkan penelitian dari Heri Andreas tahun 2018, laju penurunan muka tanah di wilayah Kota Cimahi sangat besar sekitar 15-20 cm per tahun (Andreas, et al., 2018).

**Gambar 2.75.**  
**Penurunan Muka Tanah Di Cekungan Bandung Berdasarkan Data GPS Tahun 2000-2009**



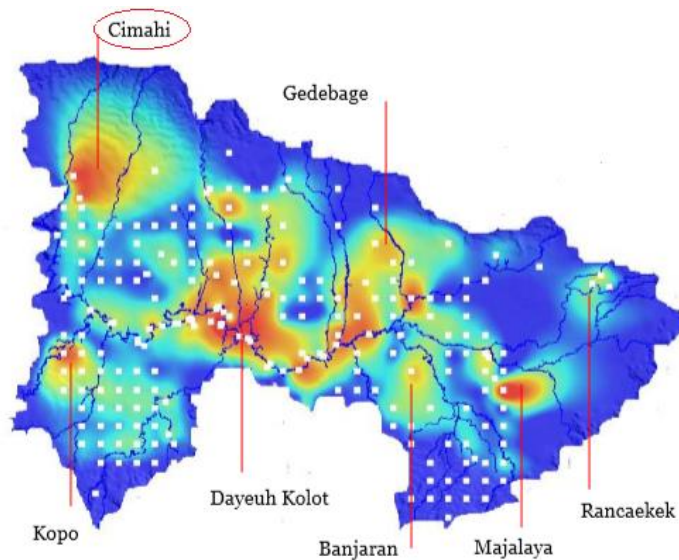
*Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022*

**Gambar 2.76.**  
**Penurunan Muka Tanah Di Cekungan Bandung Berdasarkan Pengolahan Data InSAR pada (a) Januari 2009-Desember 2009 dan (b) Desember 2009-Mei 2010**



*Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022*

**Gambar 2.77.**  
**Penurunan Muka Tanah Di Cekungan Bandung**



Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Dikutip dalam *tempo.co* pada 2 Desember 2019, menurut Irwan Gumilar (ketua Tim Riset ITB terkait penurunan muka tanah di Bandung), penurunan muka tanah per 1 meter akan berdampak pada penurunan air tanah dalam atau minus 20 meter. Total penurunan muka tanah di beberapa wilayah di Bandung termasuk Leuwigajah Kota Cimahi ada yang mencapai 3-4 meter, yang artinya penurunan air tanah berkisar 60-80 meter. Dengan batas minimal minus 45 meter, maka kondisi air tanah dalam daerah tersebut sudah tergolong rusak. Kerusakan air tanah dalam waktu yang lama akan menyebabkan air tanah menjadi krisis dan habis;

h) Lahan Kritis

Terbentuknya lahan kritis dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti topografi, jenis tanah, tingkatan erosi, dan tutupan vegetasi. Unsur-unsur topografi yang paling berpengaruh terhadap timbulnya lahan kritis adalah kemiringan lereng. Selain itu, panjang lereng, dan bentuk lereng akan mempengaruhi besarnya erosi dan aliran lahan, sehingga dapat menyebabkan terbentuknya lahan kritis, yaitu lahan yang

fungsinya kurang baik sebagai media produksi untuk menumbuhkan tanaman yang dibudidayakan atau yang tidak dibudidayakan.

Kemiringan lereng merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dan mengendalikan proses-proses pembentukan tanah. Kemiringan lereng terutama akan berpengaruh terhadap erosi yang terjadi, semakin besar persentase kemiringan lereng akan memberikan daya erosivitas pada hujan yang semakin besar, sehingga mempengaruhi material kesuburan dan sifat fisika tanah melalui pelepasan yang terjadi di permukaannya.

Luas lahan kritis di Kota Cimahi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 tentang Penetapan Lahan Kritis Nasional terdiri atas empat kriteria, dengan luas lahan sangat kritis sebesar 567,62 Ha atau 13,36% dari luas wilayah, dan luas lahan kritis sebesar 121,86 Ha atau 2,87% dari luas wilayah Kota Cimahi.

**Gambar 2.78.**

**Peta Lahan Kritis Kota Cimahi**

















































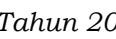




Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

## 2) Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Penilaian efisiensi dilakukan untuk melihat seberapa optimal suatu sumber daya alam telah dimanfaatkan. Nilai efisiensi diperoleh dengan membandingkan pola ruang yang direncanakan dengan kondisi tutupan lahan eksisting yang direpresentasikan melalui indeks jasa ekosistem (IJE). Terdapat tiga jenis efisiensi yang dinilai pada kajian ini, yaitu efisiensi penyedia pangan, efisiensi penyedia air dan efisiensi pengaturan tata air.

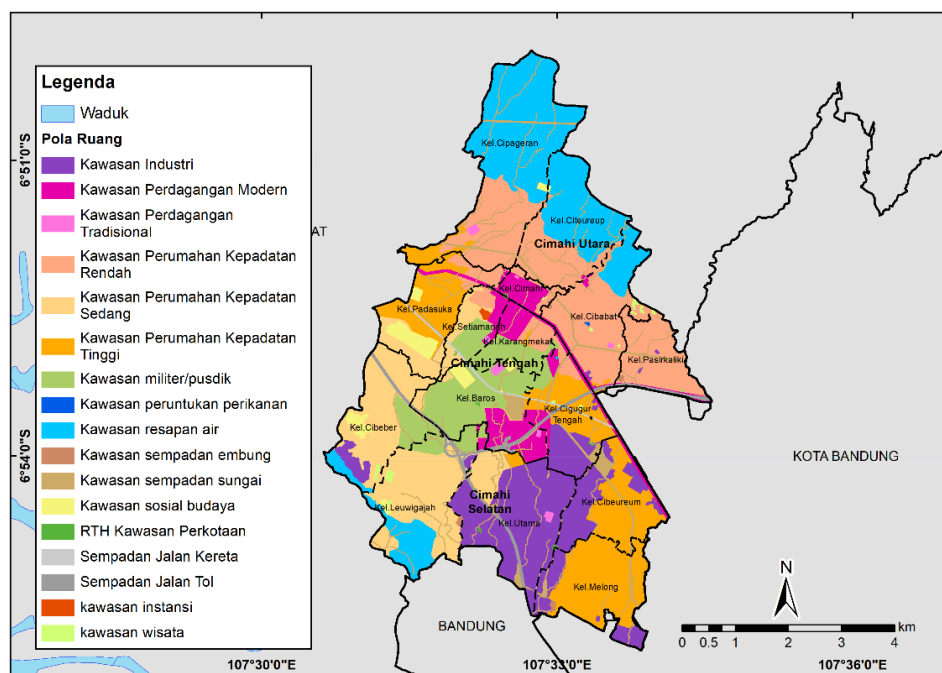
Nilai efisiensi yang tinggi akan diperoleh pada pola ruang yang memiliki kesesuaian dengan kondisi tutupan lahan eksisting. Hal yang perlu diperhatikan adalah nilai efisiensi tinggi bukanlah suatu indikasi bahwa wilayah tersebut memiliki nilai IJE penyedia pangan, air, atau pengaturan tata air dan banjir yang tinggi, namun nilai efisiensi tinggi menunjukkan bahwa pola ruang di wilayah tersebut telah dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya.

**Tabel 2.62.**  
**Efisiensi Pemanfaatan SDA Pada Setiap Pola Ruang Kota Cimahi**

Pola Ruang	Penyedia Pangan	Penyedia Air	Pengaturan Tata Air
Kawasan Industri	 53,17%	 50,54%	 51,38%
Kawasan Instansi	 100,00%	 100,00%	 90,61%
Kawasan militer/pusdik	 51,37%	 49,68%	 53,76%
Kawasan Perdagangan Modern	 49,32%	 48,59%	 51,53%
Kawasan Perdagangan Tradisional	 51,91%	 50,00%	 54,54%
Kawasan Perumahan Kepadatan Rendah	 53,31%	 50,58%	 52,56%
Kawasan Perumahan Kepadatan Sedang	 53,92%	 50,88%	 54,35%
Kawasan Perumahan Kepadatan Tinggi	 50,80%	 49,33%	 51,26%
Kawasan peruntukan perikanan	 89,88%	 93,15%	 80,82%
Kawasan resapan air	 61,52%	 53,15%	 66,03%
Kawasan sempadan embung	 65,56%	 57,62%	 60,93%
Kawasan sempadan sungai	 58,17%	 54,12%	 58,77%
Kawasan sosial budaya	 54,06%	 51,77%	 59,86%
Kawasan Wisata	 49,40%	 65,77%	 71,23%
RTH Kawasan Perkotaan	 55,39%	 48,04%	 49,03%
Sempadan Jalan Kereta Api	 48,53%	 65,19%	 70,73%
Sempadan Jalan Tol	 53,49%	 50,67%	 61,70%

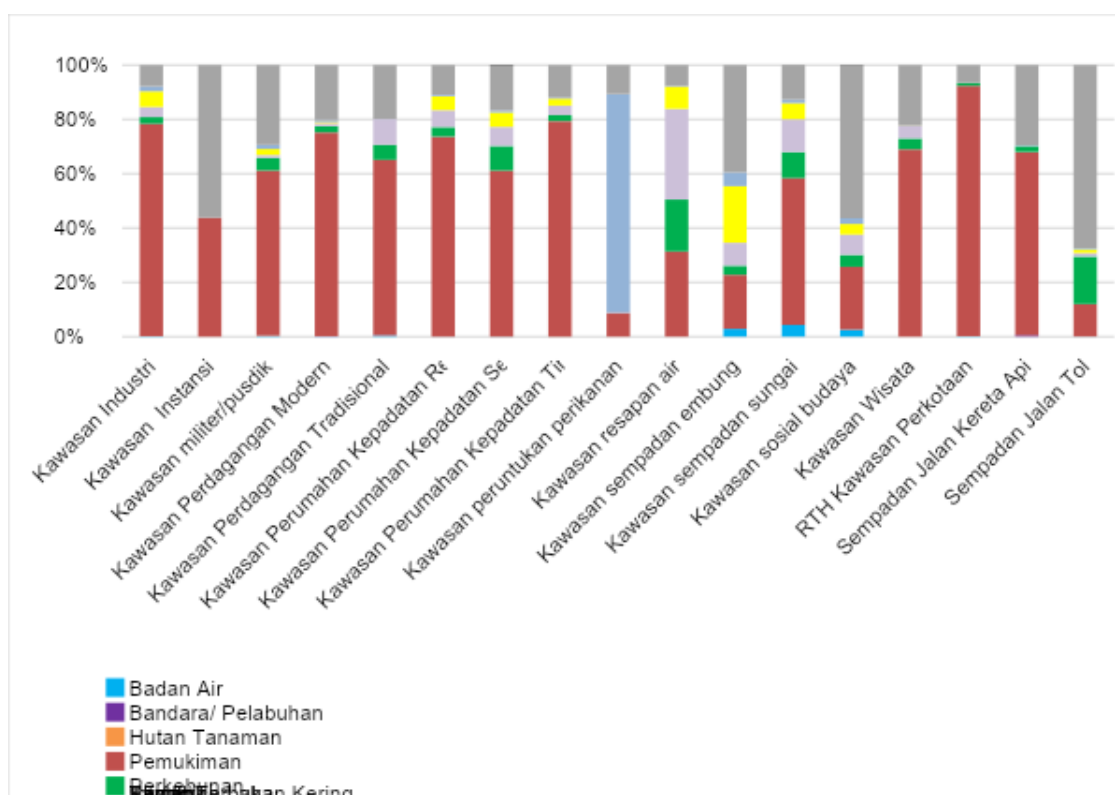
Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

**Gambar 2.79.**  
**Pola Ruang Kota Cimahi**



Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

**Gambar 2.80.**  
**Proporsi Tutupan Lahan Pada Setiap Jenis Pola Ruang di Kota Cimahi**



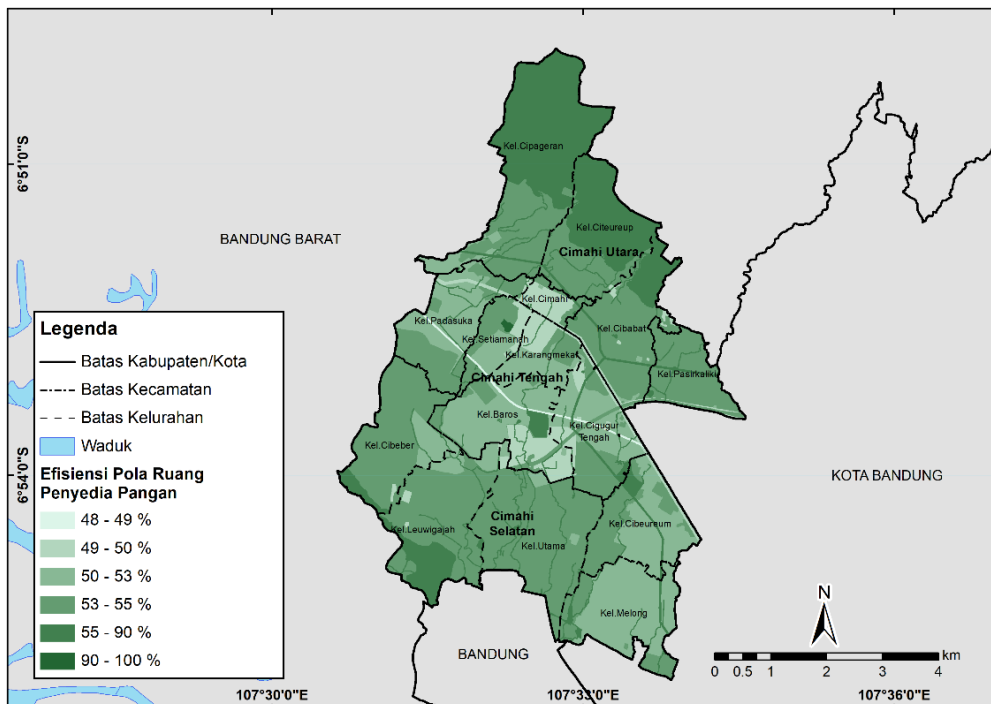
Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022



### 3) Efisiensi Penyediaan Pangan

Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam untuk penyediaan pangan di Kota Cimahi berada pada kisaran nilai antara 49% hingga 55%, yang tersebar merata hampir pada semua wilayah di Kota Cimahi. Sementara untuk nilai efisiensi tinggi yang lebih dari 60% tersebar pada sebagian kecil wilayah di Kecamatan Cimahi Tengah, yaitu Kelurahan Baros dan Kelurahan Setiamanah, di bagian utara Kecamatan Cimahi Utara, yaitu sebagian wilayah pada Kelurahan Cipageran, Kelurahan Citeureup, dan Kelurahan Cibabat, serta bagian barat daya dari Kecamatan Cimahi Selatan, yaitu sebagian kecil pada Kelurahan Cibeureum, Kelurahan Leuwigajah, dan Kelurahan Cibeber. Gambar di bawah menunjukkan sebaran nilai efisiensi pemanfaatan sumber daya alam untuk penyediaan pangan di Kota Cimahi. Nilai efisiensi tinggi menunjukkan bahwa pemanfaatan lahan secara faktual pada suatu pola ruang sesuai dengan yang direncanakan.

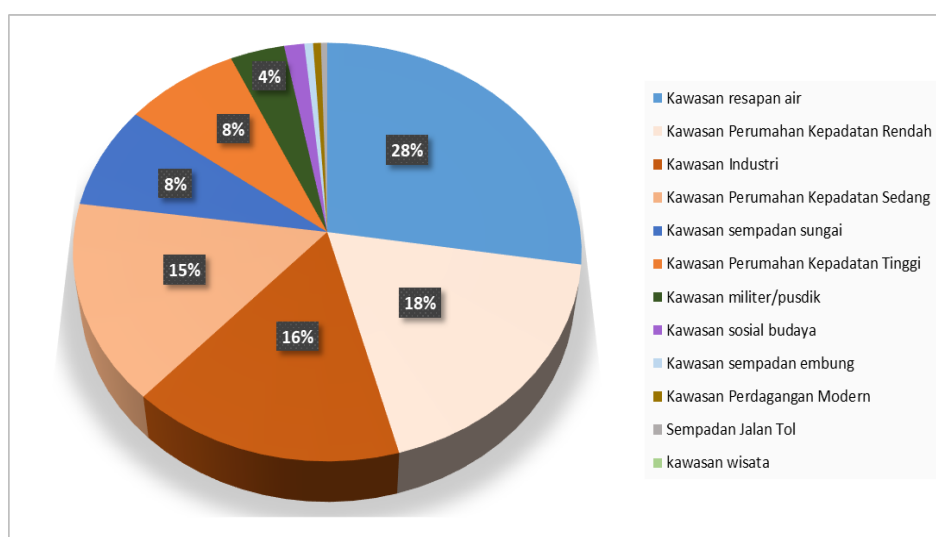
**Gambar 2.81.**  
**Efisiensi Penyediaan Pangan Di Kota Cimahi**



Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Sawah merupakan salah satu tutupan lahan yang memiliki potensi tinggi dalam hal penyediaan pangan di Kota Cimahi. Namun, apabila dilihat dari pola ruangnya, tutupan lahan sawah ini tersebar dalam beberapa pola ruang seperti kawasan resapan air, kawasan perumahan kepadatan rendah, kawasan industri, dan beberapa kawasan lain. Nilai efisiensi penyediaan pangan pada kawasan resapan air yang memiliki proporsi luasan sawah terbesar diantara kawasan lainnya adalah 61,52%. Sementara untuk kawasan lain yang juga memiliki luasan sawah cukup besar seperti kawasan perumahan kepadatan rendah dan kawasan industri, memiliki nilai efisiensi penyediaan pangan sebesar 53,31% dan 53,17%. Walaupun terbilang cukup tinggi, namun nilai efisiensi ini belum optimum. Sehingga jenis tutupan lahan pada setiap pola ruang perlu diperhatikan kembali, misalnya sawah yang memiliki proporsi luasan cukup besar pada kawasan industri.

**Gambar 2.82.**  
**Proporsi Luas Tutupan Lahan Sawah Pada Pola Ruang di Kota Cimahi**



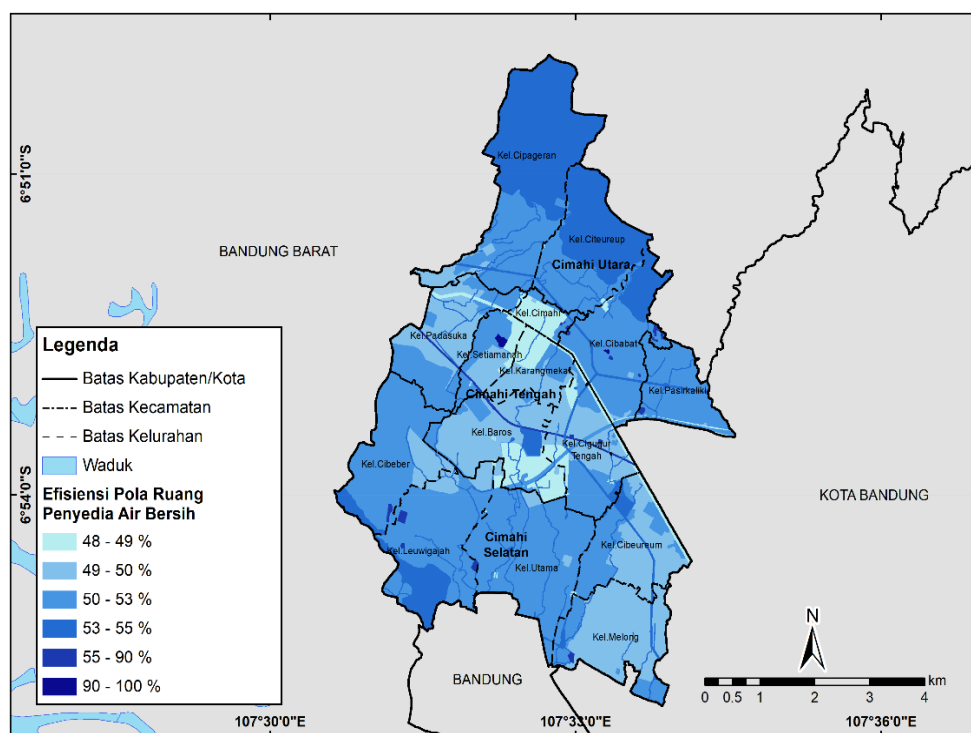
Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

#### 4) Efisiensi Penyediaan Air

Sebaran nilai efisiensi pemanfaatan sumber daya alam untuk penyediaan air bersih di Kota Cimahi memiliki pola yang sama

dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam untuk penyediaan pangan. Nilai rata-rata yang mendominasi efisiensi penyediaan air bersih juga berkisar antara 49% hingga 55%, dengan nilai efisiensi tertinggi yaitu 100% yang dimiliki oleh pola ruang kawasan Instansi dan 93,15% untuk kawasan peruntukan perikanan. Pada peta sebaran juga masih terlihat nilai efisiensi tinggi di bagian utara dan barat daya Kota Cimahi yang berada pada pola ruang resapan air. Sementara untuk nilai efisiensi rendah di Kecamatan Cimahi Tengah yang dimiliki oleh pola ruang Kawasan perdagangan modern. Pola ruang dengan nilai efisiensi penyedia air yang tinggi bukan merupakan indikasi bahwa kawasan tersebut memiliki potensi yang tinggi pula dalam hal penyediaan air di Kota Cimahi. Nilai efisiensi tinggi menunjukkan bahwa pemanfaatan lahan secara faktual pada suatu pola ruang sesuai dengan yang direncanakan.

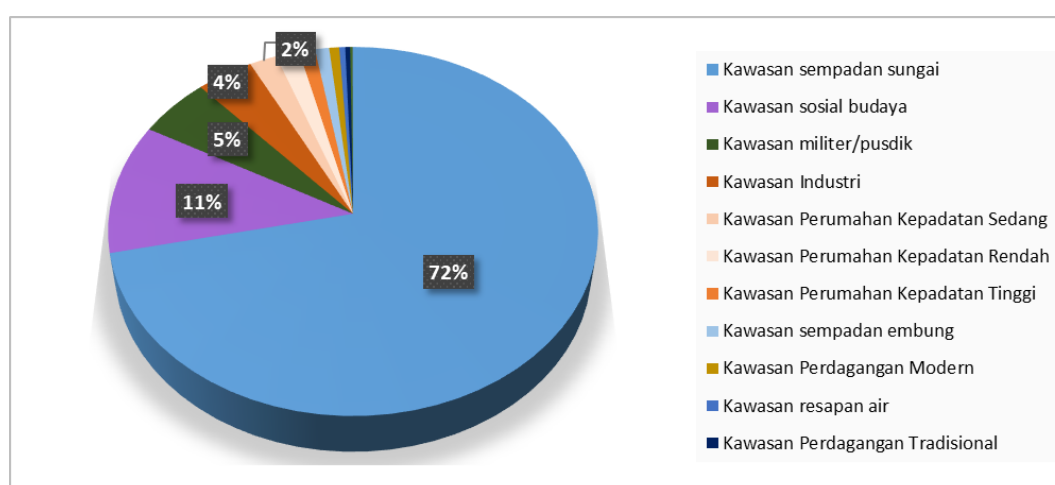
**Gambar 2.83.**  
**Efisiensi Penyediaan Air Bersih Di Kota Cimahi**



Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Potensi penyediaan air yang tinggi terdapat pada tutupan lahan berupa badan air. Seperti halnya efisiensi penyediaan pangan, luasan tutupan lahan badan air tersebar pada beberapa pola, dengan kawasan sempadan sungai yang paling mendominasi dengan proporsi luas 72%. Namun, kawasan sempadan sungai memiliki nilai efisiensi penyediaan air sebesar 54,12%. Untuk kawasan peruntukan perikanan, pemanfaatan dari tutupan lahannya telah sesuai dengan adanya badan air yang mendominasi kawasan ini.

**Gambar 2.84.**  
**Proporsi Luas Tutupan Lahan Badan Air Pada Pola Ruang di Kota Cimahi**

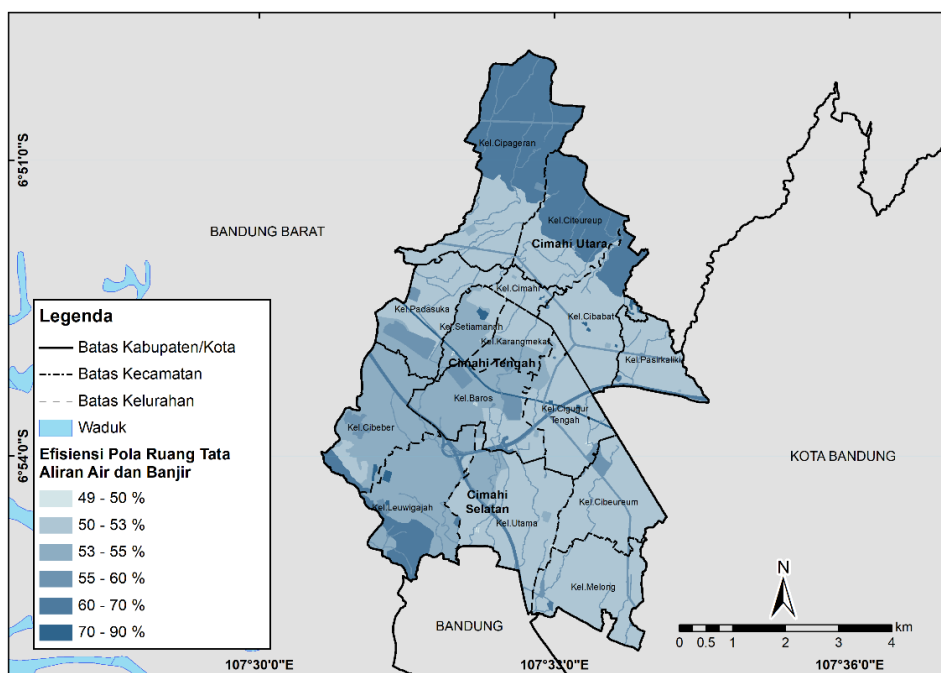


Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

### 5) Efisiensi Pengaturan Tata Air dan Banjir

Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam untuk pemanfaatan tata air dan banjir di Kota Cimahi juga memiliki nilai yang tersebar hampir merata, yaitu 49% hingga 55% hampir di semua wilayah, serta lebih dari 60% di sebagian kecil Kelurahan Setiamanah pada Kecamatan Cimahi Tengah, di bagian utara Kecamatan Cimahi Utara, yaitu sebagian wilayah pada Kelurahan Cipageran, Kelurahan Citeureup, dan Kelurahan Cibabat, serta bagian barat daya dari Kecamatan Cimahi Selatan, yaitu sebagian kecil pada Kelurahan Leuwigajah, dan Kelurahan Cibeber.

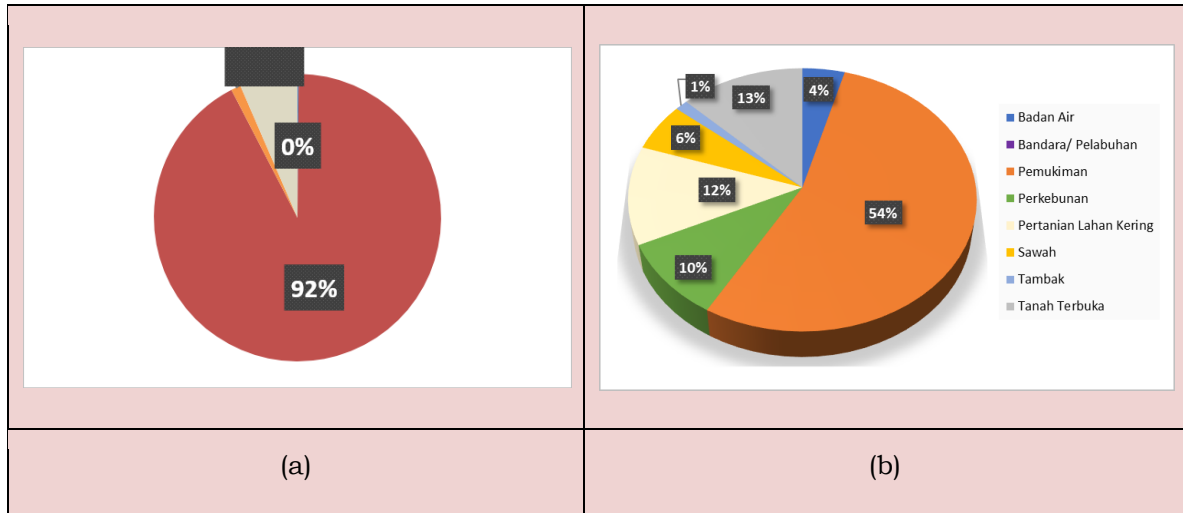
**Gambar 2.85.**  
**Efisiensi Pengaturan Tata Air Dan Banjir Di Kota Cimahi**



*Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022*

Pada efisiensi pengaturan tata air dan banjir, rencana pola ruang yang harus diperhatikan efisiensinya terutama adalah kawasan resapan air, kawasan sempadan sungai, kawasan sempadan embung, dan kawasan RTH perkotaan. Pada kawasan tersebut, masing-masing memiliki nilai efisiensi pengaturan tata air dan banjir sebesar 66,03%, 58,77%, 60,93%, dan 49,03%. Proporsi tutupan lahan pada kawasan tersebut harus diperhatikan. Pada kawasan resapan air, kawasan sempadan sungai, kawasan sempadan embung, dan kawasan RTH perkotaan, tutupan lahan yang mendominasi adalah permukiman. Sebagai contoh, gambar di bawah menunjukkan proporsi luasan tutupan lahan pada pola ruang RTH perkotaan dan sempadan sungai.

**Gambar 2.86.**  
**Proporsi Luas Tutupan Lahan Pada Pola Ruang (A) RTH**  
**Perkotaan Dan (B) Sempadan Sungai Di Kota Cimahi**

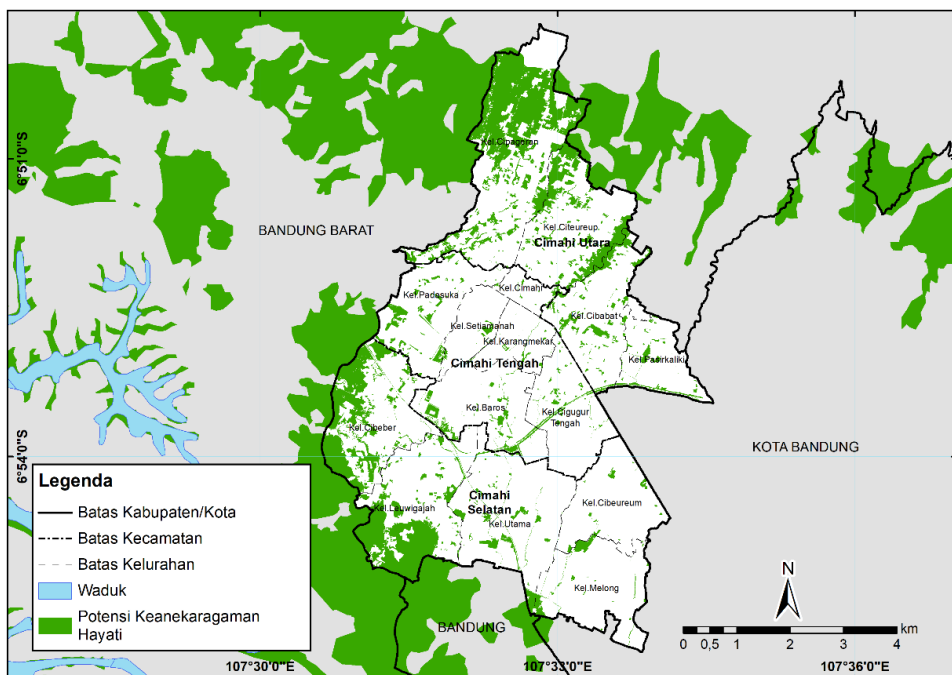


Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

### 6) Potensi dan Ketahanan Keanekaragaman Hayati

Gambar di bawah menunjukkan bahwa seluruh Kota Cimahi mempunyai potensi keanekaragaman hayati. Kelurahan Cipageran, Citeureup, Cibeber dan Leuwigajah memiliki potensi keanekaragaman hayati paling banyak.

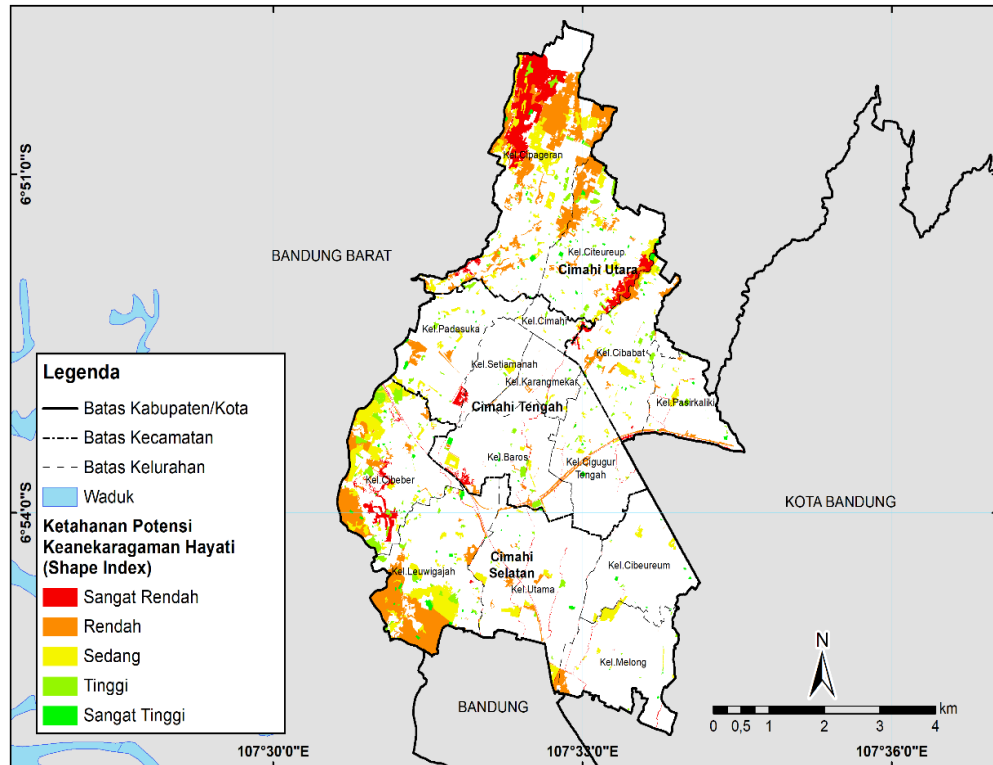
**Gambar 2.87.**  
**Potensi Keanekaragaman Hayati Di Kota Cimahi Dan Sekitarnya**



*Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022*

Ketahanan potensi jasa pendukung habitat dan keanekaragaman hayati didapat dari melihat bentuk geometris wilayah dengan melihat nilai shape index dari sebuah kawasan yang memiliki nilai jasa ekosistem yang tinggi. Secara umum Kota Cimahi memiliki ketahanan potensi jasa pendukung habitat dan keanekaragaman hayati yang mayoritas sangat rendah dan rendah, selain itu terdapat potensi jasa pendukung habitat dan keanekaragaman hayati yang memiliki ketahanan sedang hingga tinggi. Indeks jasa ekosistem keanekaragaman hayati yang sangat tinggi hingga rendah ini terutama tersebar di wilayah Ekoregion Perbukitan Vulkanik di Kecamatan Cimahi Utara, bagian utara wilayah Ekoregion Dataran Vulkanik yang berhubungan dengan Perbukitan Vulkanik, dan sisi barat Cimahi yang merupakan perpaduan wilayah Ekoregion Perbukitan Struktural dan Dataran Vulkanik. Hal ini didukung oleh fakta bahwa perbukitan vulkanik di sisi utara Kota Cimahi masih sedikit-banyak terhubung dengan ekosistem alami di kawasan hutan lindung dan cagar alam Gunung Burangrang dan Tangkuban Parahu. Indeks jasa ekosistem keanekaragaman hayati yang tinggi, terutama di bagian utara wilayah ekoregion perbukitan vulkanik di Kecamatan Cimahi Utara bukan merupakan kawasan yang terpisah batas administrasi namun sebagai kesatuan kawasan dengan kabupaten di sekitarnya, yaitu Kabupaten Bandung Barat. Oleh karena itu, dibutuhkan interaksi/kerja sama antara Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat dalam pengelolaan wilayah yang berpotensi sebagai pendukung keanekaragaman hayati tersebut.

**Gambar 2.88.**  
**Tingkat Ketahanan Dari Potensi Keanekaragaman Hayati di Kota Cimahi**



Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Nilai yang sangat rendah tersebut didapat pada wilayah yang memiliki bentuk yang memanjang ataupun menjari (bentuk yang tidak compact) sehingga mudah terganggu. Hal ini merupakan sebuah ancaman karena di Kota Cimahi tercatat ditemukan jenis-jenis burung yang memiliki status dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 (Noerdjito & Maryanto, 2001), namun dengan status *Least Concerned* berdasarkan data IUCN. Adapun jenis burung yang dilindungi tersebut adalah Burung Manintin (*Enicurus spp*), Kuntul Kerbau (*Bubulcus ibis*), Cekakak (*Halycon spp.*; burung-burung dari suku Alcedinidae), dan Sriganti (*Nectarinia jugularis*) (DLH Kota Cimahi, 2015). Dari jenis-jenis burung tersebut, sebagian besar memiliki sebaran habitat di daerah pegunungan dan dataran tinggi, khususnya di daerah riparian, dengan pakan utama serangga (manintin), fauna darat dan air (cekakak), dan nektar bunga (sriganti). Kuntul kerbau, di sisi lain,



hidup di daerah persawahan dan lahan basah, serta mengkonsumsi serangga di area tersebut. Oleh karena itu, jenis-jenis burung ini memiliki peran penting di dalam pengendalian populasi hama dan penyerbukan alami.

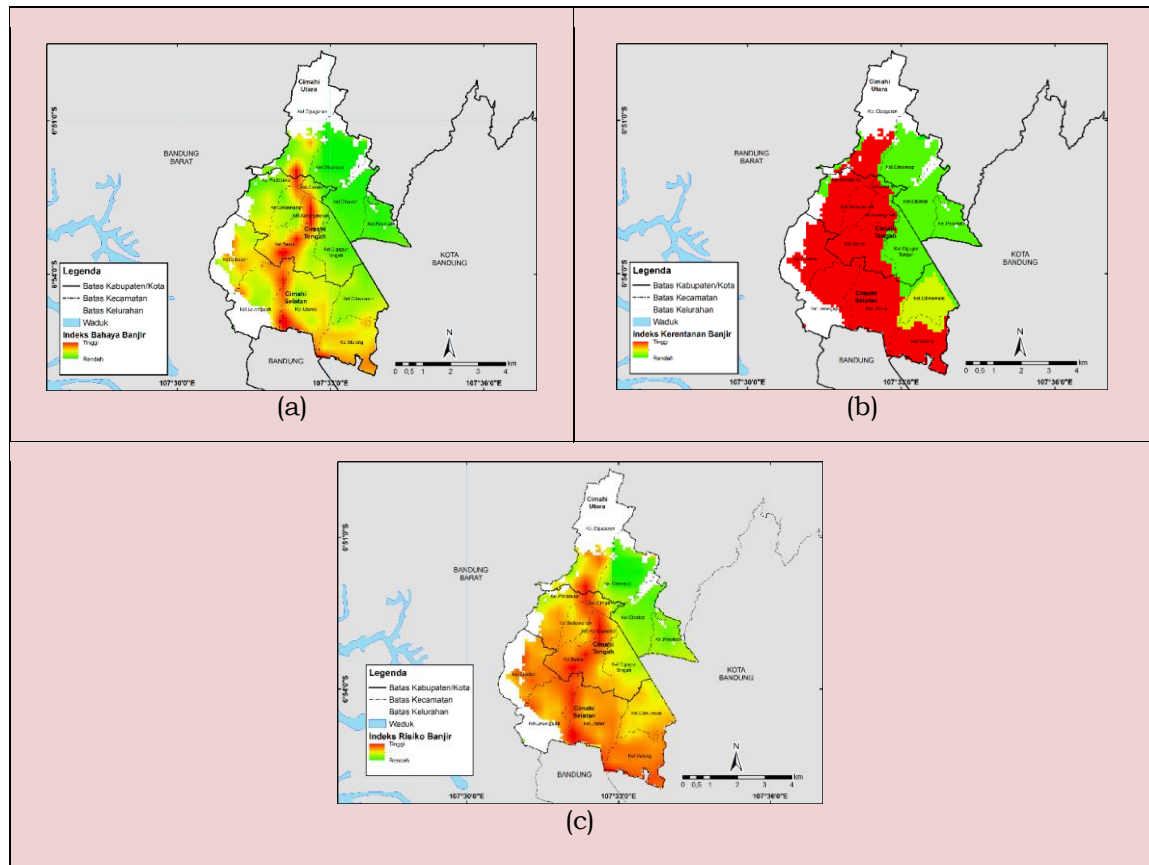
Di hutan pada area Cireundeu Kelurahan Leuwigajah Kota Cimahi masih terdapat hewan endemik yang dilindungi seperti kucing hutan, luwak, dan juga landak. Sayangnya hewan - hewan ini masih sering diburu oleh warga sekitar. Untuk itu perlu dilakukan perlindungan dan konservasi hewan - hewan endemik kota Cimahi tersebut. Selain itu Kota Cimahi pun telah memiliki durian endemik dataran tinggi asli Kota Cimahi yang diberi nama Durian Kamajaya. Diharapkan durian ini dapat dikembangbiakan dan ditanam pada lahan-lahan kritis (hutan kota) yang bermanfaat bagi konservasi dan juga memberikan nilai tambah ekonomi.

## **7) Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi terhadap Perubahan Iklim**

### **a) Banjir**

Dalam Perka BNPB No. 7 Tahun 2012, didefinisikan bahwa banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendahnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Tercatat 22 kejadian banjir yang terjadi di Kota Cimahi pada tahun 2016. Jumlah ini kemudian meningkat di tahun 2018 yaitu sebanyak 33 kali. BNPB melakukan penilaian terhadap indeks bahaya banjir berdasarkan kemiringan lereng dan jarak lokasi rawan banjir terhadap sungai (RBI, 2016). Peta indeks bahaya banjir untuk Kota Cimahi terdapat pada gambar di bawah :

**Gambar 2.89.**  
**Peta Indeks (A) Bahaya; (B) Kerentanan; Dan (C) Risiko Banjir**  
**Di Kota Cimahi**



Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Kota Cimahi memiliki indeks bahaya banjir mulai dari kelas tinggi hingga rendah, namun didominasi oleh kelas sedang dan rendah. Indeks bahaya banjir tinggi berada di Kecamatan Cimahi Selatan, Tengah dan sebagian kecil di Kecamatan Cimahi Utara. Untuk Indeks bahaya banjir rendah mayoritas berada pada Kecamatan Cimahi Utara yaitu pada Kelurahan Citeureup, Cibabat, Pasirkaliki dan Cipageran. Selain itu, terdapat indeks bahaya banjir rendah pada sebagian wilayah di Kecamatan Cimahi Tengah yaitu Kelurahan Padasuka, Setiamanah, Cimahi, Karangmekar dan Cigugur Tengah.

Indeks kerentanan banjir pada wilayah ini bernilai tinggi hingga rendah, dengan kelas tinggi mendominasi. Kerentanan tingkat tinggi berada pada kawasan dengan indeks bahaya banjir yang

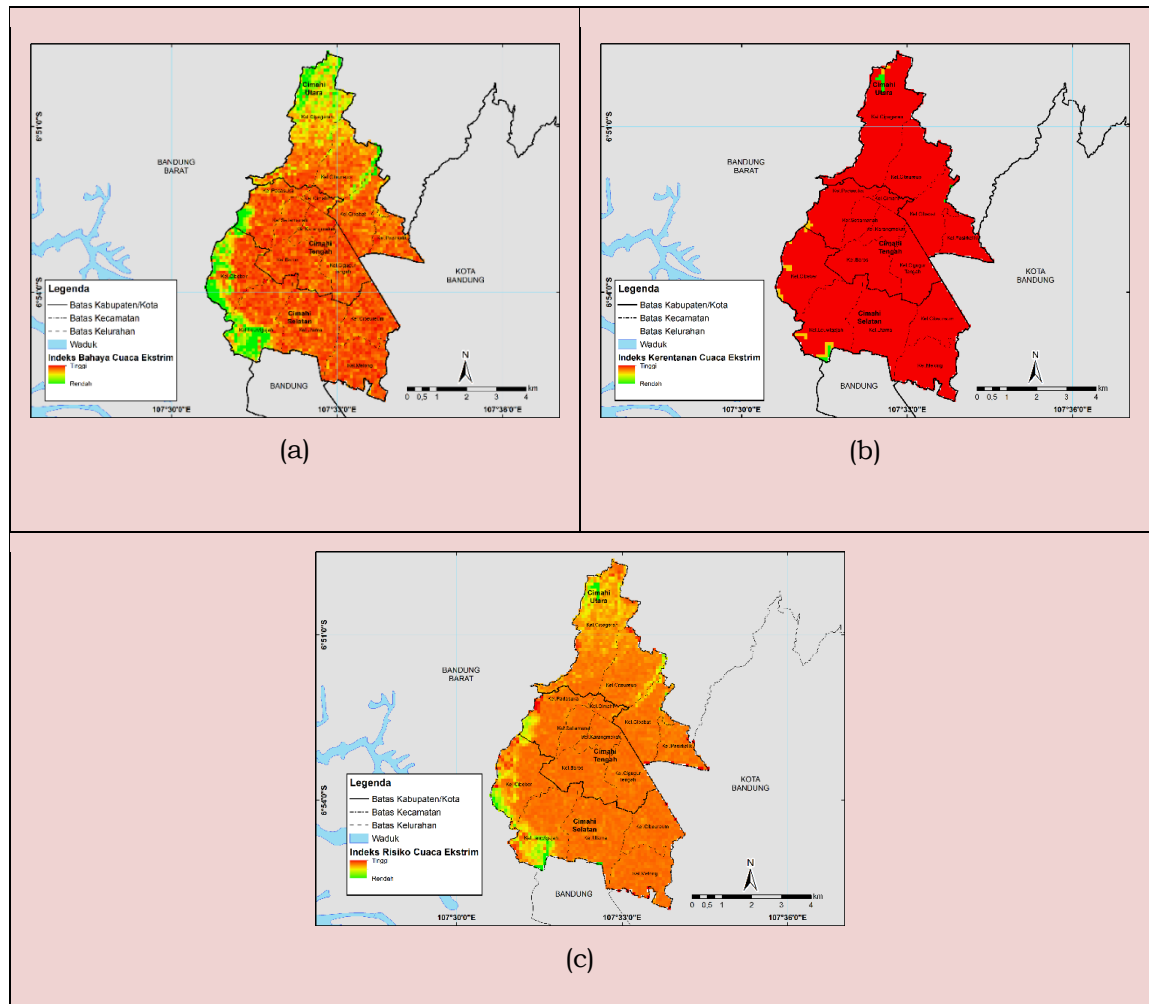
tinggi hingga rendah, sedangkan untuk indeks kerentanan sedang hanya terdapat pada Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan;

b) Cuaca Ekstrem

Indeks bahaya cuaca ekstrim dibuat dengan menggunakan tiga parameter, yaitu keterbukaan lahan, kemiringan lereng, dan curah hujan tahunan (RBI, 2016). Keterbukaan lahan yang dipertimbangkan meliputi beberapa jenis lahan, seperti hutan, kebun/perkebunan, tegalan/ladang, sawah, dan lahan terbuka. Gambar adalah peta indeks bahaya cuaca ekstrim di Kota Cimahi. Indeks bahaya cuaca ekstrim tersebar pada seluruh kecamatan di Kota Cimahi dengan indeks tinggi hingga rendah. Indeks bahaya cuaca ekstrim yang dominan di wilayah ini adalah indeks pada kelas tinggi.

Pada lokasi yang sama, digambarkan nilai indeks kerentanan cuaca ekstrim. Berbeda dengan indeks bahaya, indeks kerentanan cuaca ekstrim di Kota Cimahi didominasi oleh indeks tinggi dengan pola persebaran yang merata pada Kota Cimahi. Namun, terdapat pada sebagian kecil di Kecamatan Cimahi utara yaitu Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Tengah Kelurahan Padasuka, dan Kecamatan Cimahi Selatan Cipageran dan Leuwigajah memiliki indeks sedang hingga rendah. Dari kondisi potensi bahaya dan kerentanan tersebut, peta indeks risiko cuaca ekstrim dinilai dengan sebaran risiko seperti yang terlihat pada gambar di bawah :

**Gambar 2.90.**  
**Peta Indeks (A) Bahaya; (B) Kerentanan; Dan (C) Risiko Cuaca Ekstrim Di Kota Cimahi**



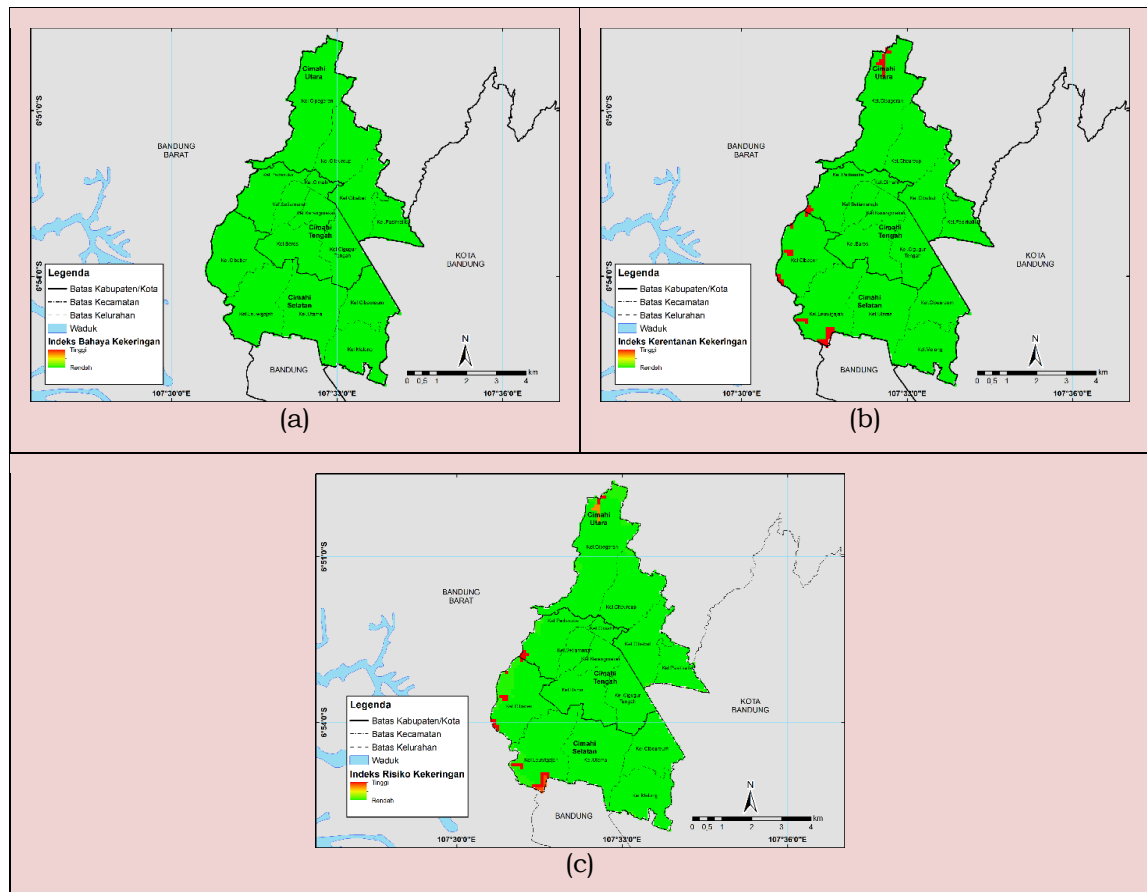
*Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022*

c) Kekeringan

Potensi bahaya kekeringan dapat terjadi di seluruh wilayah Kota Cimahi. Indeks bahaya kekeringan yang dapat dilihat pada **Gambar 2.91. (a)**, menunjukkan bahwa Kota Cimahi memiliki potensi bahaya kekeringan pada kelas rendah yang tersebar merata di seluruh kelurahan. Seperti indeks bahaya kekeringan, kelas kerentanan rendah mendominasi Kota Cimahi dapat dilihat pada **Gambar 2.91. (b)**. Namun, terdapat pada sebagian kecil di Kecamatan Cimahi utara yaitu Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Tengah Kelurahan Padasuka, dan

Kecamatan Cimahi Selatan Cipageran dan Leuwigajah memiliki indeks kerentanaan kekeringan tinggi;

**Gambar 2.91.**  
**Peta Indeks (A) Bahaya; (B) Kerentanan; Dan (C) Risiko**  
**Kekeringan Di Kota Cimahi**

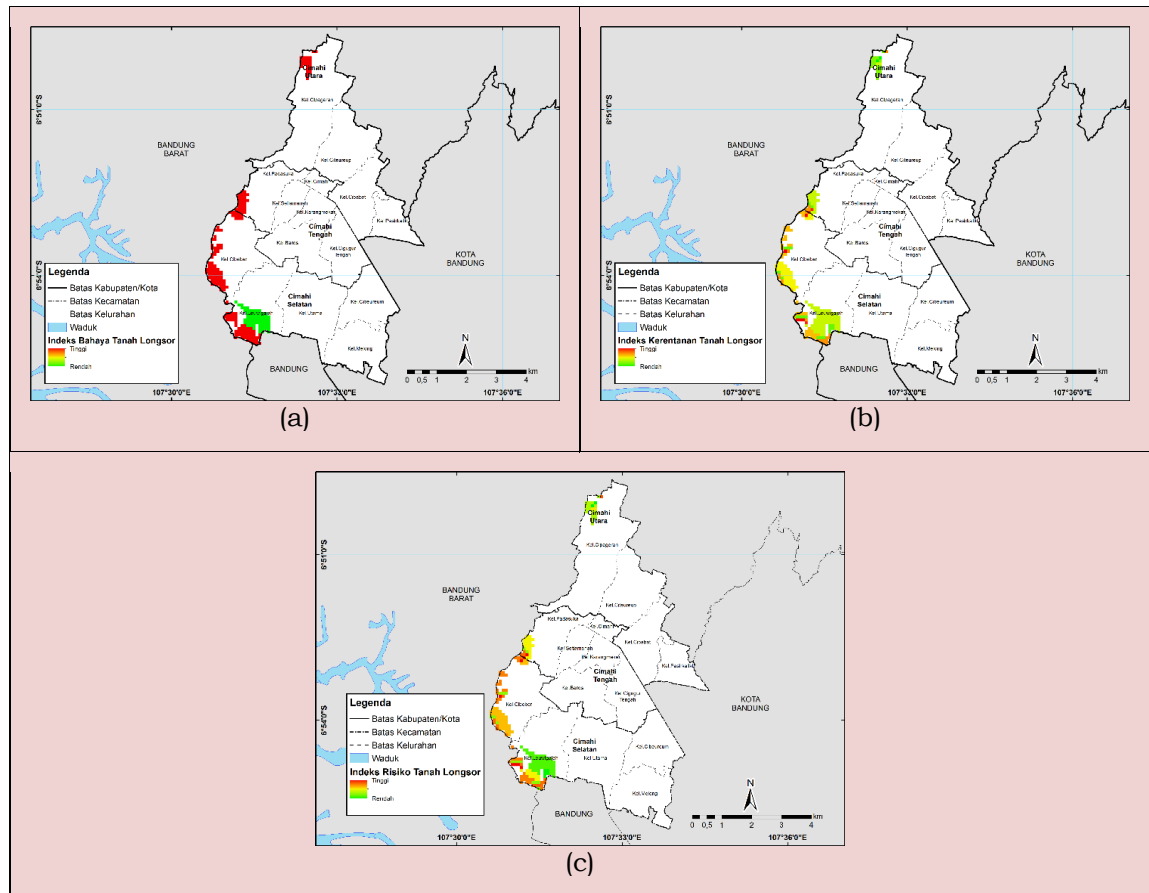


Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

d) Tanah Longsor

Potensi bahaya tanah longsor hanya dapat terjadi di sebagian wilayah Kota Cimahi. Indeks tanah longsor menunjukkan bahwa Kota Cimahi memiliki potensi bahaya tanah longsor pada kelas tinggi hingga rendah pada sebagian kecil wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat yaitu di Kecamatan Cimahi utara yaitu Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Tengah Kelurahan Padasuka, dan Kecamatan Cimahi Selatan Cipageran dan Leuwigajah. Pada lokasi yang sama, digambarkan nilai indeks kerentanan tanah longsor yang memiliki nilai indeks kerentanan tinggi hingga rendah;

**Gambar 2.92.**  
**Peta Indeks (A) Bahaya; (B) Kerentanan; Dan (C) Risiko Tanah Longsor di Kota Cimahi**



*Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022*

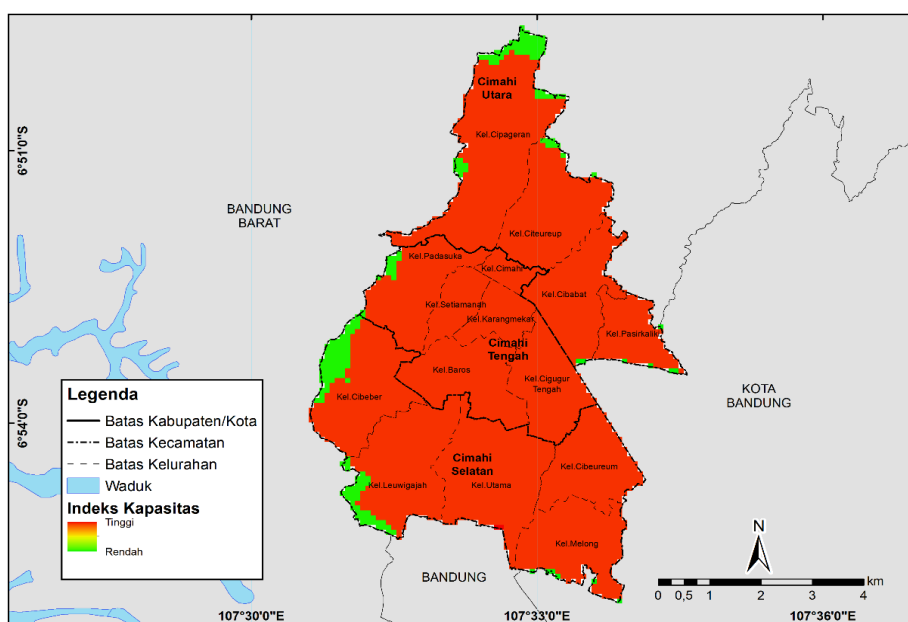
e) Kapasitas Adaptasi terhadap Perubahan Iklim

Indeks jasa ekosistem mitigasi bencana adalah salah satu hal yang dapat digunakan untuk menilai kapasitas adaptasi suatu wilayah dalam menghadapi bencana. Kapasitas adaptasi didefinisikan sebagai kemampuan untuk berubah, dalam hal ini kemampuan atau potensi suatu sistem untuk menyesuaikan dengan kerusakan, mengambil keuntungan dari suatu kesempatan, dan merespon suatu konsekuensi (IPCC, 2007). Jasa ekosistem mitigasi bencana mengindikasikan adanya infrastruktur dari alam untuk melindungi dan mencegah terjadinya bencana, seperti kebakaran lahan, erosi, abrasi, dan longsor. Nilai IJE yang semakin tinggi menunjukkan bahwa

kondisi alam pada wilayah tersebut mampu menjadi pelindung alami dari suatu bencana, dan sebaliknya.

Adaptasi merupakan proses, aksi, atau luaran dalam suatu sistem untuk meningkatkan kemampuan sistem dalam menghadapi, mengelola, atau menyesuaikan terhadap perubahan kondisi, tekanan, bahaya, risiko atau kesempatan (Smit & Wandel, 2006). Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh BNPB (2016), Kota Cimahi memiliki indeks kapasitas adaptasi yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa apabila terjadi bencana di Kota Cimahi, maka Kota Cimahi dapat dengan cepat melakukan penyesuaian dan berusaha untuk kembali pada keadaan semula, sebelum terjadi bencana. Mitigasi bencana merupakan indikasi adanya infrastruktur yang terbentuk dari alam untuk melindungi dan mencegah beberapa bencana, seperti kebakaran lahan, erosi, abrasi, dan longsor. Nilai indeks yang tinggi menunjukkan bahwa kondisi alam di wilayah tersebut mampu menjadi pelindung terhadap bencana, dan sebaliknya.

**Gambar 2.93.**  
**Peta Indeks Kapasitas Daerah Kota Cimahi**



Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

## **6. Komunikasi dan Informatika**

Pembangunan komunikasi dan informasi diterapkan pada jaringan dan Sistem Informasi pada beberapa Perangkat Daerah, yaitu pembangunan jaringan komunikasi informasi berbasis internet, salah satunya adalah pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk pelayanan kependudukan, pembangunan jaringan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) di Dinas Kesehatan dan Puskesmas, serta tersedianya Gedung *Baros Information Technology Creative* (BITC) sebagai sentral pengembangan pengelolaan kawasan klaster industri telematika.

Pembangunan sistem informasi perlu ditingkatkan dan diperluas, serta diarahkan pada pengembangan dan penyempurnaan penyelenggaraan sistem informasi berbasis IT, diantaranya melalui kegiatan pengembangan dan operasi website *www.cimahikota.go.id*, pesan penduduk (pesduk), siaran radio, televisi, jumpa pers, *release* berita, serta pameran potensi daerah sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan citra kota Cimahi.

Pemerintah Kota Cimahi telah mengembangkan *e-Government* Kota Cimahi yang termuat dalam Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan *e-Government* di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Pembangunan Infrastruktur Jaringan yang menghubungkan seluruh perangkat daerah, baik di lingkungan Internal Perkantoran Pemerintah Daerah Kota Cimahi maupun perangkat daerah yang ada di luar Perkantoran Pemerintah Daerah Kota Cimahi (DPRD, RSUD Cibabat, 13 Puskesmas dan 2 Puskesmas pembantu, 3 Kecamatan dan 15 Kelurahan) serta pembuatan Aplikasi *e-Government* di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi meliputi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pelayanan Publik dan Aplikasi Tata Kelola Pemerintahan.



**Tabel 2.63.**  
**Cakupan Pengembangan E-Government Daerah di Kota Cimahi**  
**Tahun 2017-2021**

INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan pengembangan <i>e-Government</i> daerah	10	58	100	40%	91%

*Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi, 2021, diolah*

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Cakupan pengembangan *e-Government* daerah di Kota Cimahi pada tahun 2017 mencapai 10% dan mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2018 menjadi 58%. Di Tahun 2019 kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 100%. Namun, pada tahun 2020 kembali terjadi penurunan menjadi 40% disebabkan adanya penurunan anggaran akibat *refocusing* anggaran untuk penanganan *Covid-19*, sehingga penyelenggaraan program kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Pada Tahun 2021, meskipun belum mencapai 100%, namun cakupan pengembangan *e-Government* daerah kembali meningkat menjadi 91%.

Selanjutnya untuk Cakupan layanan informasi pembangunan daerah di Kota Cimahi pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2017 angkanya sebesar 40% dan mengalami kenaikan di tahun 2018 menjadi 83%, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali hingga menjadi 50%. Namun, di Tahun 2020 dan 2021 kembali terjadi peningkatan hingga mencapai 55% dan 60%.

**Tabel 2.64.**  
**Cakupan Layanan Informasi Pembangunan Daerah di Kota Cimahi**  
**Tahun 2017-2021**

INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan layanan informasi pembangunan daerah	40	83	50	55%	60%

*Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi, 2021, diolah*

Selanjutnya, untuk Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Cimahi pada tahun 2019 mencapai 3,16 dan mengalami kenaikan di tahun 2020 menjadi 3,30. Namun pada Tahun 2021 Indeks SPBE justru mengalami penurunan menjadi 2,75. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.65.**  
**Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**  
**Kota Cimahi Tahun 2018-2021**

INDIKATOR	2018	2019	2020	2021
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,20	3,16	3.30	2,75

*Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi, 2021, diolah*

Dalam bidang komunikasi dan informasi masih terdapat kendala dalam membangun sistem komunikasi dan informasi, antara lain :

- a. Membangun sistem komunikasi dan informasi dengan lebih terintegrasi sehingga tidak bersifat parsial;
- b. Masih perlu ditingkatkannya kuantitas dan kualitas SDM di bidang teknologi informasi; dan
- c. Unit organisasi pendukung yang mengkoordinasikan dan mengintegrasikan pengelolaan, penyediaan dan pengolahan transaksi informasi perlu ditingkatkan agar berperan lebih optimal.

## **7. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**

### **a. Koperasi**

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Jumlah Koperasi di Kota Cimahi pada periode tahun 2017-2021 terus mengalami penurunan dari 340 koperasi menjadi 269 koperasi. Berbagai

upaya sudah dilakukan untuk meningkatkan minat berkoperasi dan menguatkan koperasi yang sudah terbentuk, antara lain dengan : Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian untuk pra koperasi, diklat pengurus koperasi, *coaching clinic* untuk koperasi yang tidak aktif, pendampingan dan pemberian penghargaan kepada koperasi yang berprestasi.

Beberapa indikator yang berkaitan dengan koperasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.66.**  
**Indikator Bidang Koperasi Tahun 2016-2021**

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Koperasi	340	317	259	262	269
2	Koperasi Yang melaksanakan RAT (Koperasi Aktif)	89	103	105	70	80
3	Koperasi Sehat	33	36	40	11	33
4	Total Anggota Koperasi	50.137	43.909	51.402	52.740	52.956
5	Modal Sendiri	104.790.668.344	190.821.281.867	190.293.684.179	216.854.093.652	231.683.723.202
6	Modal Luar	106.725.450.190	133.131.698.017	141.490.036.366	148.308.833.901	157.037.306.320
7	Jumlah Aset	269.618.733.813	308.973.217.173	331.660.159.344	365.034.221.903	388.721.029.522
8	Volume Usaha	232.233.875.528	223.626.012.002	196.750.706.437	223.156.932.580	248.589.922.665
9	Sisa Hasil Usaha (SHU)	18.734.009.256	17.422.475.171	18.480.542.645	19.815.193.565	18.917.210.259

*Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cimahi, 2021, diolah*

Pada tahun 2021 dilaksanakan kegiatan *coaching clinic* yang bertujuan untuk mengetahui permasalahan atau penyebab koperasi tidak aktif dengan melakukan pendampingan untuk memperbaiki kondisi Koperasi sehingga koperasi dapat aktif kembali, dengan hasil : 14 koperasi

yang diaktifkan kembali, 5 koperasi masih dalam proses Penyelesaian dan 13 koperasi rencana Pembubaran.

Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT juga mengalami fluktuatif. Menurun di tahun 2020 sebanyak 70 koperasi dan meningkat di tahun 2021 menjadi 80 koperasi. namun demikian yang dapat dilakukan penilaian kesehatan Koperasinya sebanyak 65 (enam puluh lima) Koperasi dengan hasil dari penilaian kesehatan koperasi : 33 koperasi dengan predikat “sehat” , 32 koperasi dengan predikat “cukup Sehat” dan tidak ada koperasi dengan predikat “dalam pengawasan”.

Sedangkan upaya untuk menguatkan koperasi dilakukan pendidikan dan pelatihan koperasi antara lain : Pengawasan Koperasi , Sertifikasi Juru Buku, Sertifikasi Manajer dan Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian.

Selain kegiatan yang dibiayai APBD, juga terdapat beberapa kegiatan yang merupakan kolaborasi/sinergitas melalui program pengabdian masyarakat dari Perguruan Tinggi, yakni Kegiatan pelatihan akuntansi oleh Universitas Ahmad Yani (UNJANI) dan Pelatihan dan pendampingan Koperasi oleh Politeknik Negeri Bandung Catatan kinerja koperasi di Kota Cimahi yang perlu menjadi perhatian antara lain : 1) Pembentukan 7 koperasi baru yang telah berbadan hukum di tahun 2021, memberi semangat positif yang secara otomatis meningkatkan jumlah anggota koperasi di Kota Cimahi dan asset koperasi; 2) Kondisi pandemi *Covid-19* menyebabkan banyak koperasi-koperasi besar dalam memenuhi kebutuhan anggota terpaksa menggunakan modal pinjaman yang mengharuskan koperasi membayar jasa pada pihak ke tiga sehingga jasa untuk koperasi sendiri berkurang sedangkan biaya operasional masih tetap besar seperti gaji pegawai, hal ini yang menyebabkan tahun 2021 SHU koperasi mengalami penurunan walaupun volume usahanya naik. Selain itu karena kondisi pandemi banyak anggota yang terkendala dalam pembayaran pinjaman/cicilan kepada koperasi.

#### **b. Usaha Kecil dan Menengah**

Usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri

sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Sedangkan Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Pengembangan UMKM mulai dikuatkan dengan Pengembangan Ekonomi Lokal Klaster dan Sentra Bisnis. Dari data Sensus Ekonomi tahun 2015 terdapat potensi 4 (empat) klaster industri unggulan di Kota Cimahi yaitu :

- a. Klaster industri makanan dan minuman;
- b. Klaster industri tekstil dan produk tekstil;
- c. Klaster industri kerajinan; dan
- d. Klaster industri telematika.

Pada RPJMD Perubahan 2017-2022, Strategi Optimalisasi Pengembangan UMKM dengan arah kebijakan meningkatkan fasilitasi bagi pengembangan UMKM dan meningkatkan skala usaha UMKM, diterjemahkan dengan program pemberdayaan UMKM dan program pengembangan UMKM.

Kedua program tersebut, ditujukan untuk menguatkan Pemulihan Ekonomi, terutama mengantisipasi dampak Pandemi *Covid-19*. Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain : FGD dengan stakeholder ABCGM (Akademisi, Bisnis, *Community*, *Government* dan Media) dalam rangka mensinkronkan program-program terkait pemulihan ekonomi. Output dari kegiatan ini adalah dokumen kesepakatan bersama terkait program kegiatan pemulihan ekonomi pada setiap stakeholder ABCGM. Pembuatan Aplikasi BPUM (Bantuan Pemerintah Usaha Mikro) untuk mempermudah proses pendaftaran BPUM 2021 sehingga proses pendaftaran NIB oleh 908 pelaku

usaha lebih cepat dan paperless yang memenuhi persyaratan diusulkan ke Kementrian KUKM melalui Dinas KUK Provinsi Jawa Barat. Pelatihan kewirausahaan bagi 75 orang WUB untuk menumbuhkan jumlah kewirausahaan baru di Kota Cimahi, Workshop Keterampilan Teknis bertujuan melatih pelaku usaha di bidang kuliner dan craft untuk mendukung program pariwisata di Legok Awi Cipageran. Koordinasi dan untuk memperluas kemitraan UMKM melalui tahapan penjagaan kemitraan, kurasi produk UKM dan Penandatanganan Kerjasama.

Pengembangan UMKM dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil dengan ditujukan untuk membantu mempercepat UKM naik kelas, merupakan hasil seleksi dari peserta kegiatan pendampingan CSBI difokuskan pada akselerasi pendampingan akses pasar dengan memanfaatkan teknologi digital dan *Networking*. Inkubator Bisnis 2021 dilaksanakan berupaka pelatihan, pendampingan dan pemasaran produk yang merupakan program bersama di 3 bidang Disdakoperin dan UPT Cimahi Technopark, dengan hasil adalah 3 tenant start up yang aktif dan mengalami progress yang sangat baik untuk pengembangan *start up* yaitu *Invinic*, *My Pet* dan *icommit* sedangkan 4 *startup* lainnya masih berproses untuk menemukan pasar yang tepat yaitu Dijait, Sheedoutled, Parakarsa dan Ngaderes.

Kegiatan lain adalah Fasilitasi Halal Bagi UKM bertujuan untuk membantu UKM naik kelas dengan melengkapi dokumen halal bagi pelaku usaha klaster makanan minuman maka kesempatan para pelaku usaha lebih luas memasarkan produk-produk kulinernya, dilaksanakan oleh PT. Sucofindo Dari 79 UKM yang mengikuti kegiatan halal ini 27 sudah selesai sampai dikeluarkannya sertifikat halal, sementara sisanya masih menunggu proses sidang fatwa MUI. Fasilitasi HAKI Merek bertujuan untuk membantu para pelaku usaha mendapatkan legalitas dalam merk usahanya untuk menjamin keberlangsungan usaha. Dari 130 fasilitas HAKI yang disediakan, hanya 78 pelaku usaha yang dapat memenuhi persyaratan.

Fasilitasi Desain dan Kemasan bekerjasama dengan Fakultas

Desain Komunikasi Visual Universitas Pendidikan Indonesia, tanpa menggunakan anggaran APBD Kota Cimahi. Kegiatan ini berkolaborasi dalam Program Kampus Merdeka UPI yang dikawal bersama dosen dan mahasiswa jurusan DKV. Desain Label dan Desain Editorial; untuk 50 kelompok UKM, hasil desain dapat diakses melalui link : [https://drive.google.com/drive/folders/1KM2292cEaTOPwxWtbX1E\\_vEtKpDlDB?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1KM2292cEaTOPwxWtbX1E_vEtKpDlDB?usp=sharing).

Selain itu, dilaksanakan juga Fasilitas Dekranasda Kota Cimahi antara lain Workshop bagi anggota Dekranasda, Temu Usaha Dekranasda, Gelar Produk dan keikutsertaan pada Rakerda Dekranasda Provinsi Jawa Barat.

Selain itu, dilaksakan juga Fasilitas Pelatihan dan Pengembangan Usaha Bagi UMKM yang merupakan kegiatan lanjutan dari CSBI 2020, dengan pendampingan bagi 76 kelompok juara CSBI untuk memastikan bahwa inovasi yang disampaikan dalam proposal penilaian CSBI dapat direalisasikan dan ditingkatkan. Selain itu juga untuk memastikan bahwa uang hadiah CSBI yang diterima oleh para kelompok juara ini dimanfaatkan untuk pengembangan usaha atau inovasi kelompok.

Untuk pencapaian keberhasilan UKM kelompok Juara CSBI berdasarkan data yang diterima oleh Bidang KUKM melalui pengumpulan dokumen lomba CSBI 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.67.**  
**dokumen lomba CSBI 2021**

No	Indikator	2020	2021	% kenaikan 2020-2021
1	Jumlah omzet	2.899.756.341	3.454.949.769	19,15%
2	Jumlah Aset	1.118.380.000	1.858.668.750	66,19%
3	Tenaga Kerja	118	151	27,97%

Sumber : Disdagkoperin 2021 (diolah)

Bidang KUKM pada akhir tahun 2021, untuk mengukur tingkat

keberhasilan pelaksanaan kegiatan terkait UMKM, pada bulan Desember telah dilakukan survey terhadap para peserta yang terlibat dalam kegiatan sepanjang tahun 2021, dari target 360 peserta hanya 239 yang menyampaikan progress laporan usahanya sepanjang tahun 2021 dan juga berdasarkan data yang diperoleh dari data OSS, dengan hasil data sebagai berikut :

**Tabel 2.68.**  
**Laporan usaha Tahun 2020-2021**

No	Indikator	2020	2021	% Kenaikan	Rata-Rata
1	Jumlah Usaha Mikro	1.132	6.951	514%	
2	Jumlah omzet	11.303.202.300	14.509.259.000	28,36%	60.708.197
3	Jumlah Aset	10.860.225.000	11.925.405.000	9,81%	49.897.092
4	Tenaga Kerja	476	529	11,13%	2

*Sumber : Disdagkoperin 2021 (diolah)*

Jumlah UKM yang mengalami peningkatan omzet sebanyak 166 pelaku usaha atau 69,45%, sementara sisanya mengalami penurunan atau omzet yang tetap di tahun 2021. Sedangkan untuk jumlah pelaku usaha mikro mengalami peningkatan sebanyak 514.

## **8. Penanaman Modal**

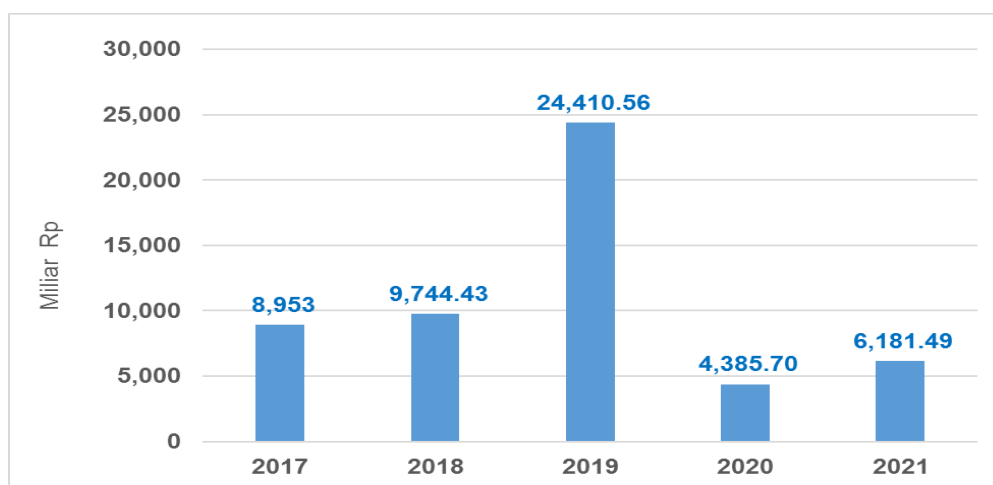
Sektor usaha dengan kontribusi terbesar pada PDRB Kota Cimahi adalah Industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, informasi dan komunikasi serta transportasi dan pergudangan. Sektor-sektor tersebut berpotensi untuk meningkatkan investasi di Kota Cimahi.

Berdasarkan data yang tersedia diketahui bahwa Realisasi Investasi (PMA/PMDN) di Kota Cimahi pada tahun 2017 mencapai Rp.8,95 triliun, dan terus mengalami peningkatan hingga puncaknya pada tahun 2019 menjadi Rp.24,41 triliun. Pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis di saat pandemi mulai berlangsung, yakni hanya mencapai hampir Rp.4,9 triliun dan naik menjadi sekitar Rp.6,18 triliun pada



tahun 2021. Hal ini menunjukkan situasi mulai membaik dan masyarakat mulai beradaptasi dengan kebiasaan baru pandemi *Covid-19*.

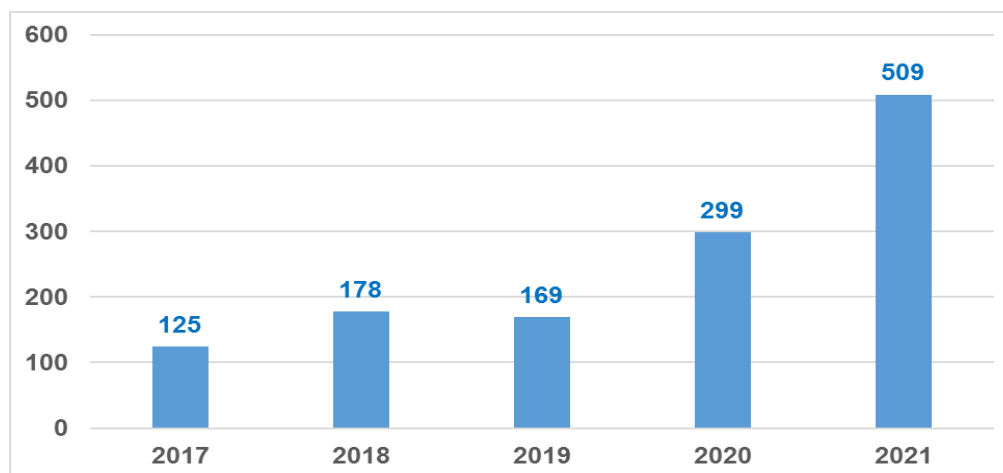
**Gambar 2.94.**  
**Realisasi Investasi (PMA/PMDN) di Kota Cimahi**  
**Tahun 2017-2021**



Sumber : DPMPSTSP Kota Cimahi, 2022 diolah

Adapun Jumlah perusahaan yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) pada tahun 2017 yaitu sebesar 125 perusahaan dan meningkat secara drastis pada tahun 2020 dan 2021 menjadi 299 perusahaan dan 509 perusahaan. Peningkatan tersebut juga karena UMKM pun wajib untuk menyampaikan LKPM. Selengkapnya perkembangan jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM di Kota Cimahi Tahun 2017 hingga tahun 2021 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

**Gambar 2.95.**  
**Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM di Kota Cimahi**  
**Tahun 2017-2021**



*Sumber : DPMPSTSP Kota Cimahi, 2022, diolah*

Diharapkan pelayanan izin usaha akan menjadi lebih efisien dengan memanfaatkan pelayanan terintegrasi di MPP (Mall Pelayanan Publik) dengan menggunakan sistem informasi yang baik sehingga bisa lebih cepat dan meminimalkan interaksi langsung dengan pemohon perizinan.

## **9. Kepemudaan dan Olahraga**

Pembangunan pemuda dan olahraga mempunyai peran strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pemuda memiliki peran aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan. Sementara itu, olahraga memiliki peran untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh, menanamkan nilai moral, akhlak mulia, sportivitas, disiplin, serta mempererat persatuan dan kesatuan.

Perkembangan aktivitas kepemudaan dan olahraga di Kota Cimahi hingga saat ini cukup dinamis. Persentase Pemuda yang berperan serta dalam pembangunan selama kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan walaupun sedikit. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.69.**  
**Pemuda yang berperan serta dalam Pembangunan di Kota Cimahi**  
**Tahun 2019-2021**

INDIKATOR	2019	2020	2021
Persentasi Partisipasi Pemuda terhadap Pembangunan	10%	11%	11.20%

*Sumber : Disbudparpora Kota Cimahi, 2021, diolah*

Terkait dengan urusan kepemudaan, antusiasme kepemudaan di Kota Cimahi cukup baik, hal ini dapat dilihat dilihat dengan semakin meningkatnya Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif yaitu sekitar 60% pada tahun 2021, yang semula hanya 50% di tahun 2017.

**Tabel 2.70.**  
**Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif di Kota Cimahi**  
**Tahun 2017-2021**

INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif	50	52	55	55	60

*Sumber : Disbudparpora Kota Cimahi, 2021, diolah*

Selanjutnya untuk cakupan persentase masyarakat yang aktif berolahraga dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2018 sebesar 44,94% dan pada tahun 2021 naik menjadi 46%. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.71.**  
**Persentase Masyarakat yang Aktif Berolahraga di Kota Cimahi**  
**Tahun 2018-2021**

INDIKATOR	2018	2019	2020	2021
-----------	------	------	------	------

Persentase Masyarakat yang Aktif Berolahraga	44,94	45,5	45,62	46
--	-------	------	-------	----

Sumber : Disbudparpora Kota Cimahi, 2020, diolah

Untuk Sarana dan Prasarana Olah Raga yang ada di Kota Cimahi sebagai berikut :

**Tabel 2.72.**  
**Data Sarana dan Prasarana Olahraga Di Kota Cimahi**

No	Uraian	Jumlah (Buah)	Kondisi
1	Lapangan Bola Kaki dilengkapi lintasan Atletik	6	Baik
2	Lapangan Basket	14	Baik
3	Lapangan Bola Volly	52	Baik
4	Lapangan Tennis	39	Baik
5	Kolam Renang	10	Baik
6	Lapangan/Gor Bulutangkis	49	Baik
7	Lapangan Futsal	17	Baik
8	Meja tenis Meja	41	Baik
9	Lapangan Bola/Sepak Bola	26	Baik
10	Lapangan Driving Golf	1	Baik
11	Fitness	3	Baik
12	Wall Climbing	2	Baik
13	Lapangan/ Gor Serbaguna	11	Baik

Sumber : Profil Disbudparpora Kota Cimahi 2019

Keterangan : Fasilitas sarana dan prasarana dikelola oleh berbagai stakeholder yaitu pemerintah, TNI/POLRI, Swasta, Masyarakat, dan sekolah.

**Tabel 2.73.**  
**Data Sarana Olahraga Milik PEMKOT Cimahi**

No	Uraian	Kondisi	Keterangan
1	Stadion Sangkuriang	Rusak Berat	PEMKOT (Bagian Aset)
2	Gor Sangkuring	Rusak Ringan	PEMKOT (Bagian Aset)
3	Lapangan Poral	Baik	PEMKOT (Bagian Aset)
4	Lapangan Cibaligo	Rusak	PEMKOT (Bagian Aset)

*Sumber : Profil Disbudparpora Kota Cimahi 2019*

Dilihat dari tabel sarana dan prasarana di atas Kota Cimahi memiliki sarana olahraga yang cukup banyak, tetapi yang dimiliki oleh Pemkot Cimahi hanya 4 sarana dan itupun kondisi 3 sarana dinyatakan rusak. Sebagian besar sarana olahraga adalah milik TNI, jadi akibat kurangnya sarana olahraga yang dimiliki Pemkot Cimahi kurang setiap ada even olahraga tingkat Kota maupun propinsi Dinas Pemuda dan olahraga harus menyewa sarana olahraga kepada pihak TNI sehingga biaya untuk sewa tempat membengkak.

Oleh karena itu untuk peningkatan sarana prasarana olah raga yang ada di Kota Cimahi perlu adanya pembangunan ataupun revitalisasi. Salah satu aset yang dimiliki oleh pemkot cimahi yaitu stadion sangkuriang kondisinya sekarang rusak berat, perlu diketahui stadion sangkuriang dulunya menjadi kebanggaan warga Cimahi dimana stadion sangkuriang merupakan homebase perserikatan Kota Cimahi, Persatuan Sepakbola Kota Cimahi (PERSEKOCI) yang masuk divisi III sampai 2006, serta menjadi lokasi kompetisi sepakbola antar sekolah. Untuk mengembalikan citra stadion sangkuriang sebagai Stadion legenda yang pernah menjadi kebanggaan masyarakat Cimahi perlu di usahakan yang sungguh-sungguh untuk memperbaiki atau merevitalisasi Stadion Sangkuriang Cimahi.

Dari permasalahan mengenai keterbatasan Lapangan Olahraga di Kota Cimahi pada Tahun 2016 Lapangan Krida Cimahi yang selalu digunakan oleh masyarakat sekitar untuk berolahraga khususnya olahraga

sepakbola yang berlokasi di Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan yang merupakan satu dari sedikitnya lapangan olahraga yang dimiliki Kota Cimahi dialihfungsikan menjadi Cimahi Technopark yang didasarkan pada hasil kajian dan rekomendasi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Hal tersebut semakin mengurangi jumlah Lapangan Olahraga yang ada di Kota Cimahi. Sebagai konsekuensi dari kebijakan untuk mengalihfungsikan Lapangan Krida Cimahi menjadi Cimahi *Technopark*, Pemerintah Kota Cimahi dituntut untuk segera mendapatkan lahan pengganti untuk Lapangan Krida tersebut. Hal itu merupakan syarat dari terbitnya rekomendasi dari Kemenpora RI untuk pengalihfungsian tersebut selain dari desakan masyarakat sekitar yaitu masyarakat Kelurahan Utama yang menuntut tersedianya lapangan olahraga yang sebelumnya biasa dipakai untuk kegiatan olahraga.

## 10. Statistik

Persentase ketersediaan data statistik daerah Kota Cimahi pada Tahun 2019 sebesar 74,07, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 75.

**Tabel 2.74.**  
**Persentase Perangkat daerah yang telah melakukan integrasi data statistik sektoral di Kota Cimahi Tahun 2018-2020**

INDIKATOR	2018	2019	2020
Persentase Perangkat daerah yang telah melakukan integrasi data statistik sektoral	10	74,07	75

*Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi, 2021, diolah*

## 11. Persandian

Keamanan Sistem Informasi sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Cimahi dalam menjamin ketepatan dan keakuratan penyampaian informasi. Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) adalah sebuah sistem yang berfungsi sebagai jejaring dalam pengumpulan data secara terpadu, *online*, dan *real time*, SIPD menjadi penting karena merupakan

media akuntabilitas publik yang memungkinkan bagi masyarakat untuk dapat terlibat dalam mengevaluasi kinerja, program pembangunan, serta mengevaluasi capaian-capaian pembangunan. Agar kinerja layanan informasi pembangunan daerah di Kota Cimahi menjadi lebih optimal maka perlu melakukan peningkatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah dapat terlaksana dengan ditunjang oleh penerapan kebijakan peningkatan teknologi dan informasi di setiap instansi pemerintah, peningkatan keamanan informasi serta pengelolaan jaringan komunikasi. Dengan adanya sistem informasi yang dibangun dan dijalankan dengan tepat maka akan memberikan sebuah gambaran kinerja organisasi yang akurat bagi penggunaannya dalam pengambilan keputusan.

## **12. Kebudayaan**

Berbagai upaya telah dilakukan untuk reaktualisasi nilai budaya serta pranata sosial kemasyarakatan. Upaya tersebut telah menghasilkan adanya komunitas adat di Cipageran dan Kampung Hukum Adat Cireundeu sehingga Kota Cimahi memiliki keberagaman budaya dan kearifan lokal. Kehidupan Kampung Hukum Adat Cireundeu memegang teguh budaya leluhur seperti pola konsumsi pangan non beras (singkong) dan mengedepankan pelestarian lingkungan.

Kampung Hukum Adat Cireundeu secara rutin menyelenggarakan acara adat Seren Taun (Tutup Tahun) sebagai penanda pergantian tahun Saka Sunda. Acara itu digelar sebagai bentuk syukur atas segala karunia yang didapat selama setahun. Seren Taun Cireundeu telah diakui sebagai salah satu warisan budaya non benda.

Pengembangan kebudayaan di Kota Cimahi menemui masalah yang cukup pelik diantaranya menyangkut sarana atau gedung dan ruang publik sebagai wadah bagi seniman-seniman di Kota Cimahi untuk mengapresiasi karya seninya. Hal ini timbul karena keterbatasan lahan dalam pembangunan gedung kesenian dimaksud. Pengembangan budaya

lokal (tradisional) berupa kesenian/tarian dan sastra dapat menjadi potensi wisata di Kota Cimahi.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kota Cimahi juga fokus dalam melestarikan kebudayaan, hal ini dapat dilihat dengan semakin meningkatnya Persentase kebudayaan yang dilestarikan, dengan persentase pada tahun 2017 baru mencapai 24% dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 45%.

**Tabel 2.75.**  
**Persentase kebudayaan yang dilestarikan di Kota Cimahi**  
**Tahun 2017-2021**

INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase kebudayaan yang dilestarikan	24	29,63	45	65,71	79

*Sumber : Disbudparpora Kota Cimahi, 2021, diolah*

Pengembangan kebudayaan masih belum optimal seperti masih perlu ditindaklanjuti penggalan nilai-nilai sejarah dan arsitektur pada 23 bangunan-bangunan bersejarah (*heritage*) di Kota Cimahi untuk mendukung Cimahi sebagai kota wisata sejarah (*heritage*) dan wisata kesehatan.

Potensi budaya yang ada bisa dikembangkan melalui berbagai upaya baik penggalan potensi alam, nilai-nilai kesenian maupunsarana-prasarana yang perlu disiapkan sehingga diharapkan pelaku-pelaku budaya dan kesenian dapat mengembangkan potensi yang ada di masyarakat.

**Tabel 2.76.**  
**Data Cagar Budaya Yang Terverifikasi Hingga Tahun 2021**

NO	ID OBJEK	NAMA OBJEK	LOKASI OBJEK	KATEGORI
1	PO2019041500002	GEDUNG RIO X.NTER	Jl. PabrikAci, Kota Cimahi, Jawa Barat	Bangunan
2	PO2019041000016	GEDUNG THE HISTORICH	Jl. Gatot Subroto No. 19 Baros, Kota Cimahi, Jawa Barat	Bangunan



<b>NO</b>	<b>ID OBJEK</b>	<b>NAMA OBJEK</b>	<b>LOKASI OBJEK</b>	<b>KATEGORI</b>
3	PO2020071500001	GEREJA IMMANUEL	Jalan PasirKumeli 149 A Kota CimahiJawa Barat	Bangunan
4	PO2019041100482	GEREJA SANTO IGNATIUS	Jl. Raya Baros No. 8, Kota CimahiJawa Barat	Bangunan
5	PO2020090300003	HOTEL TJIMAH	Jl. Jend. H. Amir Machmud No.465 Kota CimahiJawa Barat	Bangunan
6	PO2019041600003	KOLAM RENANG BREAKLEUS	Jl. Sukimun RT 1 RW 4, Kota CimahiJawa Barat	Bangunan
7	PO2020072700002	KOLAM RENANG KATAK RIANG	Jl. PasirKumeli No. 39 Kota CimahiJawa Barat	Bangunan
8	PO2019052900058	LOJI	Jl. Alun-Alun Timur No. 634 Kota Cimahi, Jawa Barat	Bangunan
9	PO2020091600004	MAKAM EMBAH NURKARIM	Jl. Cigugur Tengah RT 02 RW 05 Kota Cimahi, Jawa Barat	Situs
10	PO2020090400001	MAKAM EMBAH TUMPANG	Jl. Gandawijaya, Pasar Antri, Kota Cimahi, Jawa Barat	Situs
11	PO2019111100001	MAKAM KEHORMATAN BELANDA	Jl. Kerkhof Gg. KurbaMiharjaLeuwigajah, Kota Cimahi, Jawa Barat	Bangunan
12	PO2019082100008	MASJID AGUNG CIMAH	Jl. Kaum No. 3, Kota Cimahi, Jawa Barat	Bangunan
13	PO2019053100010	MASJID USMAN DHOMIRI	Jl. KH Rd Usman Dhomiri No 133 Rt 04 Rw 08, Kota Cimahi, Jawa Barat	Bangunan
14	PO2019041100637	PENJARA PONCOL	Jl. Poncol Selatan No. 24, Kota CimahiJawa Barat	Bangunan
15	PO2020093000002	PESAWAT DAKOTA	Jl. Gatot Subroto No. 6, Baros Kota Cimahi, Jawa Barat	Benda
16	PO2020071300003	RUMAH KEDIAMAN AMIR MACHMUD	Jl. Ibu Sangki RT 3 RW 13, Kota Cimahi, Jawa Barat	Bangunan
17	PO2019053100011	RUMAH PEMOTONGAN HEWAN	Jl. Sukimun Rt 03 Rw 04, Baros, Jawa Barat	Bangunan
18	PO2020072700003	RUMAH PETINGGI BELANDA	Jl. Sriwijaya No 11, KarangMekar, Kota CimahiJawa Barat	Bangunan
19	PO2015061200050	RUMAH SAKIT DUSTIRA	Jl. Dr Dustira No. 1, Baros, Kota CimahiJawa Barat	Bangunan

NO	ID OBJEK	NAMA OBJEK	LOKASI OBJEK	KATEGORI
20	PO2019082100014	RUMAH VAN BLOMMEISTEIN	Jl. Jen H Amir Machmud No 89, Cibeureum, Kota Cimahi, Jawa Barat	Bangunan
21	PO2020091700001	SDN KARANG MEKAR MANDIRI 1	Jl. Jend Amir Machmud No.505, KarangMekar, Kota Cimahi, Jawa Barat	Bangunan
22	PO2020100600001	SDN BAROS MANDIRI 4	Jl. Baros No 06 Rt 01 Rw 15, Kota CimahiJawa Barat	Bangunan
23	PO2020072700001	SMPN 1 CIMAHI	Jl. Rd EmbangArtawidjaja, KarangMekar, Kota CimahiJawa Barat	Bangunan
24	PO2020072400002	SMPN 2 CIMAHI	Jl. Sudirman No 152, Kota Cimahi, Jawa Barat	Bangunan
25	PO2019041100637	STASIUN CIMAHI	Jl. Stasiun No 1, Kota CimahiJawa Barat	Bangunan

### 13. Perpustakaan

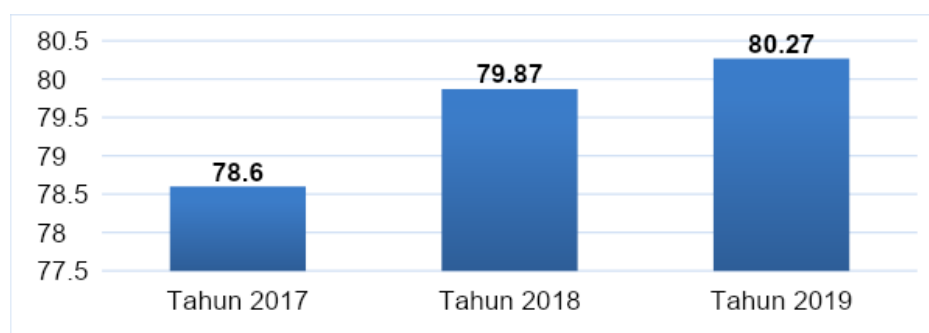
Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka, yang bertujuan sebagai penunjang kelangsungan pendidikan dan meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Jumlah perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan umum yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang beroperasi di wilayah pemerintah daerah. Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, mengolah, menyimpan, melestarikan dan menyebarluaskan bahan pustakanya untuk masyarakat umum.

Perpustakaan sebagai salah satu sarana penyedia kepustakaan untuk meningkatkan minat baca masyarakat, dimana imej masyarakat Indonesia sebagai salah satu negara dengan minat baca rendah perlu menjadi perhatian. Oleh karena itu melalui perpustakaan diharapkan kemampuan literasi masyarakat khususnya di Kota Cimahi dapat meningkat.

Dari data yang tersedia, diketahui bahwa tingkat Kepuasan pengunjung perpustakaan umum kota pada tahun 2017 mencapai

78,6% dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 hingga menjadi 79,87% dan di tahun 2019 menjadi 80,27%.

**Gambar 2.96.**  
**Tingkat Kepuasan Pengunjung Perpustakaan Umum Kota di Kota Cimahi Tahun 2017-2019**



*Sumber : Dinas Perpustakaan Kota Cimahi, 2020, diolah*

Sama halnya dengan Tingkat kepuasan pengunjung perpustakaan umum kota, Persentase sarana baca masyarakat yang aktif juga terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2017 angkanya mencapai 60%, tahun 2018 mencapai 62% dan pada tahun 2019 naik menjadi 68,5%.

**Gambar 2.97.**  
**Persentase Sarana Baca Masyarakat Yang Aktif Di Kota Cimahi Tahun 2017-2019**



*Sumber : Dinas Perpustakaan Kota Cimahi, 2020, diolah*

Dalam pengembangan perpustakaan terdapat beberapa komponen yang harus ditindaklanjuti antara lain peningkatan kualitas Sumber Daya

Manusia, sistem layanan, penyempurnaan koleksi, dan fasilitas pendukung termasuk pengembangan optimalisasi pemanfaatan layanan perpustakaan berbasis Teknologi Informasi (*e-library*).

#### **14. Kearsipan**

Berdasarkan data yang tersedia, diketahui bahwa Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku di Kota Cimahi pada Tahun 2018 hanya 8% dan pada tahun 2019 naik menjadi 18,50%. Hal tersebut berarti dalam pelaksanaan tata kearsipan terdapat beberapa kendala antara lain keterbatasan Sumber Daya Manusia di bidang kearsipan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara kuantitatif, masih terbatasnya tenaga profesional di bidang kearsipan; Secara kualitatif, arsiparis yang ada belum memiliki standar profesi yang ideal, serta belum dimilikinya sarana depo arsip yang memadai untuk menampung dokumen dokumen pemerintah daerah. Sementara itu, untuk Persentase sumber daya pelayanan kearsipan pada tahun 2017 dan 2018 telah mencapai 100%.

Selain itu upaya-upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan kualitas tata kelola kearsipan diantaranya adalah melaksanakan diklat teknis serta pelaksanaan pembinaan dan pendampingan, monitoring dan evaluasi pada sistem pengelolaan kearsipan. Untuk penanganan kearsipan kedepan diperlukan terobosan untuk membangun sistem kearsipan digital yang diharapkan menjadi salah satu solusi permasalahan yang selama ini terjadi.

#### **2.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan**

##### **1. Pariwisata**

Pariwisata di Kota Cimahi di dominasi oleh pariwisata berbasis kreativitas manusia dan budayanya. Sektor pariwisata di Kota Cimahi belum memberikan nilai tambah yang signifikan terhadap perekonomian kota.

Di Kota Cimahi telah terdapat 3 event tingkat kota bahkan internasional diantaranya **Baros International Animation Festival (BIAF)**,

**Gatsoe Street Carnival (GATREEC), dan pekan Seren Taun Cireundeu.**

Event - event ini berpotensi menjadi bangkitan ekonomi lokal dan dapat menjadi wadah ekspresi kreativitas warga Kota Cimahi. Selain itu, Kota Cimahi memiliki 2 bus Sakoci yang dapat digunakan oleh wisatawan untuk tur keliling Kota Cimahi. Meskipun demikian, perlu ditingkatkan kembali manajemen, fungsi dan manfaat dari Sakoci tersebut agar dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih signifikan bagi perekonomian kota.

Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kota Cimahi masih terbilang rendah, dimana pada tahun 2017 baru mencapai 546 Wisatawan, dan mengalami penurunan ditahun 2018 menjadi 392 wisatawan. Selanjutnya pada tahun 2019 mengalami sedikit peningkatan hingga menjadi 899 wisatawan dan menurun kembali di tahun 2020 menjadi 91 orang dan di tahun 2021 menjadi 5 orang. Untuk Jumlah wisatawan nusantara (wisnus) di Kota Cimahi pada tahun 2017 mencapai 3.526 Wisatawan, dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020 hingga menjadi 65.610 orang wisatawan nusantara, jumlah tersebut kembali mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 45.864 orang wisatawan nusantara.

**Tabel 2.77.**  
**Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Nusantara Di Kota Cimahi**  
**Tahun 2017-2021**

<b>INDIKATOR</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Jumlah Wisatawan Mancanegara (wisman)	546	392	899	91	5
Jumlah Wisatawan Nusantara (wisnus)	3.526	5.852	43.707	65.610	45.864

Sumber : Disbudparpora Kota Cimahi, 2022, diolah

Penurunan jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara pada tahun 2021 merupakan dampak Pandemi Covid-19.

**Tabel 2.78.**  
**Jumlah Tempat Akomodasi dan Kamar Menurut Jenis Akomodasi di Kota Cimahi Tahun 2019-2021**

Jenis Akomodasi	2019		2020		2021	
	Jumlah Akomodasi	Kamar	Jumlah Akomodasi	Kamar	Jumlah Akomodasi	Kamar
Hotel Bintang 3	1	63	1	63	1	63
Hotel melati	9	122	2	46	2	46
Hotel non melati	5	84	NA	NA	NA	NA
Penginapan Remaja	2	120	NA	NA	NA	NA
Pondok Wisata	16	22	NA	NA	NA	NA
Guest Jouse	NA	NA	4	63	4	63
Home Stay	NA	NA	17	22	17	72

Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka 2022

Jumlah tempat akomodasi dan kamar menurut jenis akomodasi di Kota Cimahi tidak mengalami penambahan yang signifikan bahkan cenderung stagnan pada tahun 2020 dan 2021.

Selanjutnya untuk Jumlah Rumah Makan/Restoran di kota Cimahi pada tahun 2018-2021 mengalami fluktuatif, pada tahun 2019 sempat mengalami peningkatan namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yaitu sebanyak 58 buah.

**Tabel 2.79.**  
**Jumlah Rumah Makan/Restoran Menurut Kecamatan di Kota Cimahi Tahun 2018-2021**

KECAMATAN	2018	2019	2020	2021
Cimahi Selatan	15	17	19	19
Cimahi Tengah	80	80	72	71
Cimahi Utara	19	19	23	23
	<b>114</b>	<b>116</b>	<b>114</b>	<b>113</b>

Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka ,2022

Kota Cimahi terus berupaya membangun, mengembangkan dan memasarkan destinasi wisata baru yang bertemakan potensi lokal Cimahi untuk menarik minat wisatawan nusantara maupun mancanegara. Upaya tersebut dilakukan melalui upaya penguatan daya tarik wisata melalui pengelolaan destinasi wisata yang telah ada maupun yang potensial akan dikembangkan, penguatan SDM pariwisata, dan fasilitasi perijinan usaha di sector pariwisata terus dilakukan Pemerintah Kota Cimahi, Pada tahun 2021 Kota Cimahi melalui bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat telah berhasil membangun ekowisata Cimenteng di Kawasan Cimahi Utara, diharapkan ekowisata Cimenteng tersebut dapat membantu masyarakat setempat untuk dapat menikmati hasil pembangunan tersebut melalui peningkatan lapangan kerja dan usaha.

## 2. Pertanian

Sektor pertanian bukan merupakan sektor unggulan untuk perekonomian Kota Cimahi. Meskipun demikian harus tetap dilakukan upaya pengembangan pada sektor ini.

Berdasarkan Buku Kota Cimahi Dalam Angka Tahun 2022 dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cimahi, terdapat 106,42 hektar lahan sawah yang menggunakan irigasi setengah teknis pada tahun 2016 dan 119 hektar pada tahun 2017-2021, serta 28 hektar menggunakan tadah hujan pada tahun 2016 dan berubah menjadi 17 ha pada tahun 2017-2021, sebagaimana tabel berikut ini :

**Tabel 2.80.**  
**Luas Lahan Sawah dan Luas Lahan Kering Dirinci Menurut Jenis Pengairan di Kota Cimahi Tahun 2016-2021**

Tahun	Luas Lahan Sawah (Ha)		Total (Ha)	Luas Lahan Kering (Ha)			
	Irigasi Setengah Teknis	Tadah Hujan		Pekarangan/Lahan untuk bangunan dan halaman sekitarnya	Tegal/ Kebun/ Ladang/ Huma	Kolam Tebat	Lainnya
2016	106,42	28	134,42	247,32	264	n/a	n/a
2017	119	17	136	n/a	n/a	n/a	n/a

Tahun	Luas Lahan Sawah (Ha)		Total (Ha)	Luas Lahan Kering (Ha)			
	Irigasi Setengah Teknis	Tadah Hujan		Pekarangan/Lahan untuk bangunan dan halaman sekitarnya	Tegal/ Kebun/ Ladang/ Huma	Kolam Tebat	Lainnya
2018	119	17	136	n/a	184	5	2
2019	119	17	136	-	184	-	-
2020	119	17	136	-	189	-	-
2021	119	17	136	-	189	-	-

Sumber : BPS dan Dispangtan, 2022

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa Kota Cimahi memiliki ketersediaan lahan yang terbatas. Terbatasnya lahan di Kota Cimahi berpengaruh terhadap produksi dan produktivitas hasil pertanian. Angka produktivitas pertanian di Kota Cimahi terbilang cukup rendah. Produk-produk pertanian pangan seperti padi, palawija dan hortikultura masih menjadi produk dominan yang dihasilkan Kota Cimahi, namun demikian dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ketiganya mengalami tren penurunan hasil produksi.

Berdasarkan data Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2022, terdapat peningkatan Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi di Kota Cimahi jika dibandingkan tahun 2020 maupun tahun 2019. Dapat disimpulkan dalam 3 tahun (2019-2021) terdapat perbaikan pengembangan pola penanaman pertanian padi yang ada di Kota Cimahi.

**Tabel 2.81.**  
**Luas Panen, Produktivitas, Produksi di Kota Cimahi Tahun 2019-2021**

TAHUN	2019	2020	2021
Luas Panen (ha)	70,93	80,33	168
Produktivitas (kw/ha)	57,32	57,84	69
Produksi (kw/ha)	406,54	464,65	1159.6

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi, 2022



Namun demikian, bila dibandingkan daerah lain produksi pertanian Kota Cimahi masih rendah, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adalah adanya alih fungsi lahan pertanian di Kota Cimahi, rendahnya kapasitas SDM petani, terbatasnya penerapan teknologi pertanian, masih rendahnya kualitas infrastruktur pendukung produksi hasil pertanian di Kota Cimahi serta manajemen pengelolaan hasil pertanian yang masih kurang. Sektor pertanian di Kota Cimahi juga tidak memiliki kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Cimahi dan cenderung menurun seperti yang terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.82.**  
**Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB ADHB Kota Cimahi**  
**Tahun 2017-2021**

URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan (%)	0,22	0,22	0,20	0,21	0,20

*Sumber : BPS Kota Cimahi, 2022*

Sektor pertanian di Kota Cimahi juga tidak memiliki kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Cimahi, yakni hanya menyumbangkan 0,20 % dari total PDRB ADHB Kota Cimahi yang mencapai 66.970,57 milyar rupiah pada Tahun 2021. Nilai PDRB tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 67.382,19 milyar rupiah seperti yang terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.83.**  
**Nilai PDRB ADHK Sektor Pertanian Kota Cimahi Tahun 2017-2021**

URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
Nilai PDRB ADHB sektor pertanian (Pangan, Pertanian, Peternakan) (Milyar Rupiah)	58.533,77	60.598,60	64.894,65	67.382,19	66.970,57

*Sumber : BPS Kota Cimahi, 2022, diolah*

Dari data diatas dapat dilihat bahwa nilai PDRB ADHB sektor pertanian mengalami tren peningkatan selama periode tahun 2017-2020 namun mengalami penurunan pada tahun 2021. Berdasarkan data pada Tabel 2.84 dijelaskan bahwa Laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha di sektor pertanian mengalami fluktuasi, namun pada tahun 2021 nilainya mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2020 sebesar 1,84 persen, seperti yang dijelaskan dalam table di bawah ini :

**Tabel 2.84.**  
**Nilai Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian Kota Cimahi**  
**Tahun 2017-2021 (Persen)**

URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
Nilai Laju Pertumbuhan PDRB sector pertanian (Pangan, Pertanian, Peternakan)	0,82	0,54	2,38	3,18	1,34

Sumber : BPS Kota Cimahi, 2022, diolah

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Cimahi untuk meningkatkan sektor pertanian diantaranya dengan pemanfaatan teknologi, yakni dengan penggunaan bibit dan pupuk berkualitas untuk menghasilkan produktivitas produk pertanian yang lebih tinggi walaupun jumlah lahan pertanian di Kota Cimahi terjadi penurunan.

Selain upaya di atas, untuk mengatasi beberapa keterbatasan di sektor pertanian, strategi pengembangan rantai nilai pada klaster/sentra produk pertanian menjadi sasaran kerja sektor. Adapun strategi tersebut antara lain pembentukan sentra ikan hias di Cibabat; sentra susu sapi dan tauge di Cipageran; dan pengembangan produk pertanian diantaranya adalah pengembangan buah Durian Kamajaya, pembentukan kampung anggur di Kelurahan Cimahi, pemanfaatan teknologi IOT (*internet of thinking*) untuk budidaya tanaman hortikultura untuk intensifikasi lahan pertanian terbatas di perkotaan. Ke depannya akan dikembangkan pula tanaman herbal dan produk turunannya serta madu dan lebah di beberapa lokasi

agroforestri di Bukit Padakasih Cibeber, Cimenteng, Legok Jawa, dan ex-TPA Leuwigajah. Strategi pengembangan rantai nilai (hilirisasi) produk pertanian tersebut dapat dilakukan untuk dapat mendorong lahirnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM) khususnya UKM di sektor pertanian.

a. Sub Sektor Peternakan

Pada sub-sektor peternakan, unggas merupakan ternak yang paling banyak dibudidayakan di Kota Cimahi, beberapa komoditi unggas yang dibudidayakan di Kota Cimahi diantaranya adalah ayam buras, ayam pedaging, ayam petelur dan itik. Berdasarkan data Dispangtan terdapat penurunan produksi ayam buras, ayam pedaging, ayam petelur dan Itik di tahun 2021 jika dibandingkan data produksi tahun 2020, data disajikan pada Tabel 2.85. Komoditas unggas jenis ayam pedaging adalah komoditas ternak unggas yang paling mendominasi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi yang dapat dikembangkan dari sub-sektor peternakan.

**Tabel 2.85.**  
**Jumlah Ternak Ayam Buras dan Ras Pedaging di Kota Cimahi**  
**Tahun 2017-2021**

JENIS UNGGAS	2017	2018	2019	2020	2021
Ayam Buras	-	16.524	-	14.712	14000
Ayam Ras Pedaging	-	37.694	37.694	37.758	37000
Ayam Petelur	-	-	-	630	209
Itik	-	1.823	2515	2.464	2000

Sumber : Dispangtan Cimahi, 2022

Data Tabel diatas menunjukkan bahwa ternak domba adalah salah satu komoditas ternak ruminansia terbanyak di kota Cimahi. Selain ternak domba, Kota Cimahi juga memiliki ternak sapi potong, kerbau, kambing dan sapi perah. Berdasarkan Data Tabel 2.86 menunjukkan bahwa

produksi ternak domba dan sapi perah di Kota Cimahi mengalami peningkatan di tahun 2021, sedangkan untuk ternak sapi potong, kerbau dan kambing mengalami penurunan di tahun 2021.

**Tabel 2.86.**  
**Jumlah dan Jenis Komoditas Ternak Ruminansia di Kota Cimahi Tahun 2017-2021**

Jenis Ternak	Jumlah (ekor)				
	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Sapi Potong	201	211	210	342	300
Kerbau	12	13	6	5	3
Domba	1877	1845	3183	2.873	2900
Kambing	0	0	108	90	80
Sapi Perah	362	464	358	552	558

Sumber : Dispangtan Kota Cimahi, 2022

**Tabel 2.87.**  
**Produksi Hasil Peternakan dan Tanaman Padi di Kota Cimahi Tahun 2017-2021**

INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021
Produksi Hasil Peternakan (Daging) (Ton)	100	1.004	777,93	357,78	1206 ton
Produksi Hasil Peternakan (Susu) (Liter)	750	823	867.029	1.336.871	1.351.000
Produksi hasil tanaman padi (ton)	1.674,13	1.559,4	1.693,2	1.566	1159.2

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian, 2022,

Tabel diatas menjelaskan bahwa hasil produksi peternakan (daging) di Kota Cimahi pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2017 produksinya mencapai 100 ton, dan mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2018

menjadi 1.004 ton, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali hingga menjadi 777,93 ton, di tahun 2020 menjadi 357,78 ton, dan mengalami peningkatan Kembali di tahun 2021 yaitu sebesar 1206 ton.

Sedangkan peningkatan produksi susu dari tahun 2019 hingga tahun 2021 mengalami trend peningkatan, di tahun 2021 produksi hasil susu di Kota Cimahi mencapai 1.351.000 liter.peningkatan ini didukung program nasional SIKOMANDAN (Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri) yakni upaya khusus percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau bunting, sehingga populasi sapi perah meningkat.

Produksi hasil tanaman padi di Kota Cimahi mengalami fluktuasi dari tahun 2017 hingga 2021, penggunaan teknologi tepat guna untuk peningkatan produksi padi di kota Cimahi sangat dibutuhkan karena penurunan luas lahan yang terus terjadi di Kota Cimahi, sehingga upaya intensifikasi pertanian akan lebih efektif dialakukan di kota Cimahi dibandingkan usaha ekstensifikasi.

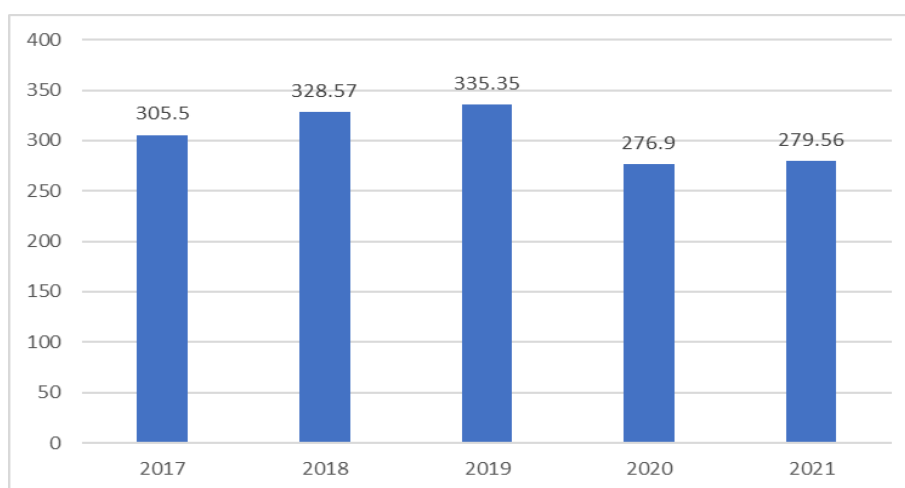
b. Sub Sektor Perikanan

Kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian di Kota Cimahi sangat kecil. Persoalan tersebut dikarenakan secara topografi wilayah Kota Cimahi yang bukan daerah pantai serta terbatasnya lahan untuk budidaya ikan, khususnya budidaya ikan konsumsi. Potensi Perikanan Budidaya di Kota Cimahi meliputi : pembesaran ikan konsumsi, pembenihan ikan konsumsi, dan budidaya ikan hias.

Produksi perikanan hanya disumbang dari budidaya ikan di kolam air tenang, baik untuk ikan konsumsi maupun untuk ikan hias. Jika dibandingkan dengan daerah lain atau di Provinsi Jawa Barat, tingkat produksi perikanan tergolong rendah (khususnya produksi ikan konsumsi). Akan tetapi Pemerintah Kota Cimahi terus meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya di Kota Cimahi, dimana pada tahun 2017 hingga tahun 2019 jumlah produksi pembesaran ikan konsumsi mengalami tren peningkatan, namun pada tahun 2020 sempat

mengalami penurunan produksi dan pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 279,56 ton. Penurunan produksi pembesaran ikan konsumsi pada tahun 2020 ini dikarenakan terpengaruh oleh kondisi pandemi *Covid-19*, yang mana di awal pandemi *Covid-19* pembudidaya ikan mengalami kesulitan dalam pengadaan benih ikan dan juga pakan ikan karena adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) antar wilayah. Namun pada tahun 2021 produksi ikan konsumsi mengalami peningkatan kembali akibat adanya pelonggaran PPKM sehingga mobilitas petani ikan budidaya tidak terganggu untuk meningkatkan produksinya.

**Gambar 2.98.**  
**Produksi Perikanan Budidaya di Kota Cimahi Tahun 2017-2021**



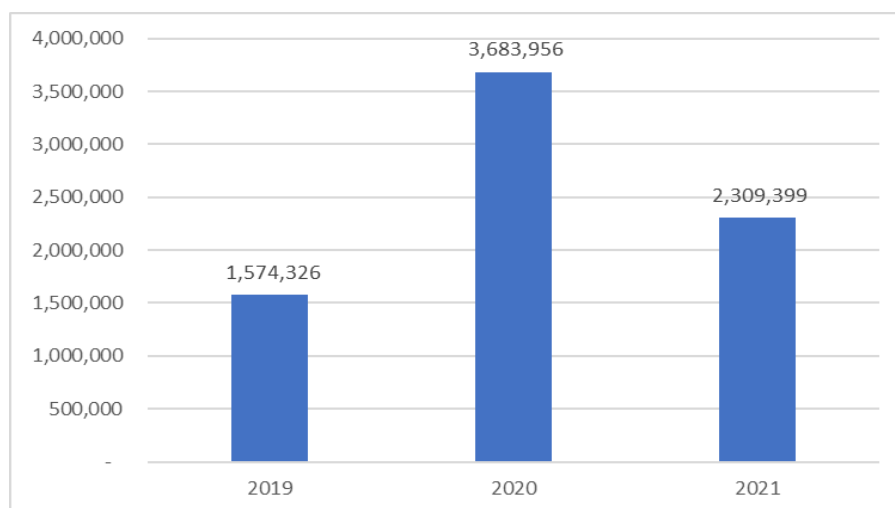
Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2022, diolah

Selain perikanan budidaya (pembesaran dan pembenihan ikan konsumsi), di Kota Cimahi juga terdapat potensi usaha perikanan yang memiliki nilai tambah (*added value*) yang besar dan tidak terlalu memakan lahan dan akan cocok bila dikembangkan di wilayah perkotaan yaitu pengembangan ikan hias. Dengan karakteristik wilayah perkotaan dan sangat dekat dengan Ibukota Provinsi maka target pasar ikan hias masih sangat terbuka. Saat ini usaha tersebut sudah mulai dirintis melalui Balai Benih Ikan Air Tawar (BBIAT) untuk membantu masalah bibit. Akan tetapi strategi tersebut belum optimal karena belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang hal tersebut.

Kedepan, Kota Cimahi diharapkan dapat mulai melirik usaha ikan hias berbasis kerakyatan berupa sentra ikan hias.

Di Kota Cimahi sendiri pada tahun 2017 baru terdapat 3 jenis ikan hias yang dikembangkan, dan itu juga mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi hanya 2 jenis. Tahun 2020 pengembangan ikan hias baik itu di UPTD Balai Benih Ikan Air Tawar (BBIAT) Kota Cimahi maupun di para pembudidaya ikan hias menjadi 10 jenis, yaitu cupang, corydoras, guppy, siklid, platy, manvis, koi, rasbora, udang mexico, dan udang marlboro.

**Gambar 2.99.**  
**Produksi Ikan Hias yang dikembangkan di Kota Cimahi**  
**Tahun 2019-2021**



Sumber : Dinas Pertanian Kota Cimahi, 2022, diolah

Berdasarkan data pada Gambar 2.99 Produksi ikan hias di Kota Cimahi pada tahun 2019 adalah 1.574.326 ekor, pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 3.683.956 ekor, namun pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 2.309.399 ekor.

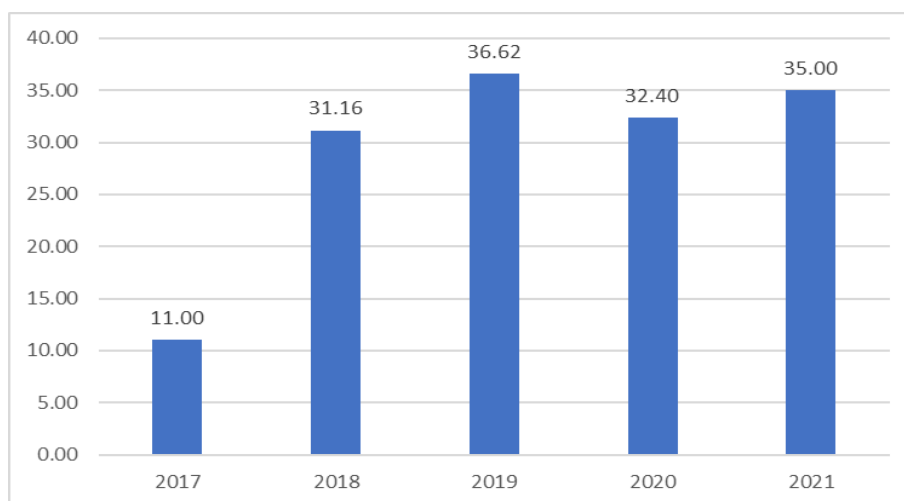
c. **Konsumsi Ikan**

Ikan merupakan salah satu sumber protein hewani yang dapat menjadi alternatif di tengah permasalahan yang dihadapi dalam produksi daging. Tingkat Konsumsi Ikan oleh Masyarakat di Kota Cimahi pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami peningkatan.

Pada tahun 2017 mencapai 11 Kg/Kap/Thn, dan meningkat di tahun 2018 menjadi 31,16 Kg/Kap/Thn, Tahun 2019 menjadi 36,62 Kg/Kap/Thn, Tahun 2020 menjadi 32,40 kg/kap/tahun, dan Tahun 2021 kembali meningkat menjadi 35 Kg/Kap/Thn. Penurunan AKI di tahun 2020 kemungkinan dipengaruhi oleh kondisi Pandemi *Covid-19* yang menyebabkan adanya penurunan pengeluaran konsumsi per kapita masyarakat, pada tahun 2021 AKI kembali meningkat kemungkinan disebabkan adanya perbaikan kondisi perekonomian masyarakat akibat adanya pemulihan ekonomi pasca pandemi *Covid-19*.

Adapun data Tingkat Konsumsi Ikan oleh Masyarakat di Kota Cimahi pada tahun 2017-2021 disajikan pada tabel sebagai berikut :

**Gambar 2.100.**  
**Tingkat Konsumsi Ikan Oleh Masyarakat di Kota Cimahi**  
**Tahun 2017-2021**



Sumber : Dispangtan Kota Cimahi, 2022, diolah

### 3. Perdagangan

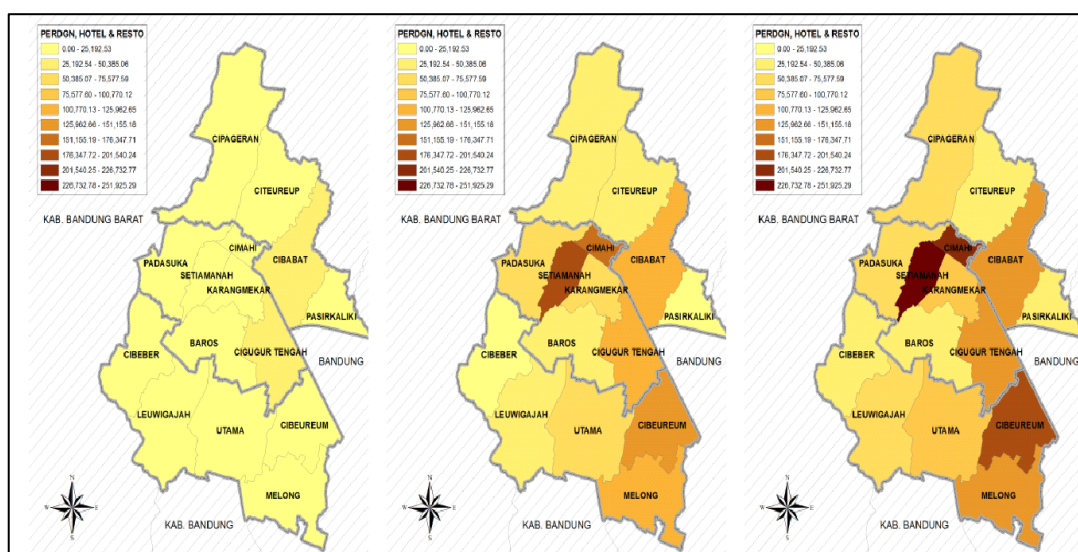
Kontribusi sektor perdagangan dan jasa menempati posisi ketiga sekaligus juga mendukung sektor utama perekonomian yaitu sektor industri pengolahan. Perkembangan sektor perdagangan di Kota Cimahi dalam periode tiga tahun terakhir terlihat cukup signifikan. Aktivitas sektor ini menyebar di semua wilayah, tetapi pertumbuhan paling pesat berada di



Cimahi Tengah. Berdasarkan fakta diatas, kita dapat mengambil pola tingkah laku aktivitas perdagangan di Kota Cimahi, yaitu aktivitas perdagangan di Kota Cimahi akan berada di daerah pusat kota, dan akan mengikuti aktivitas kegiatan lain, yaitu aktivitas industri dan aktivitas pemerintahan.

Gambaran pertumbuhan sektor perdagangan di Kota Cimahi sebagai berikut :

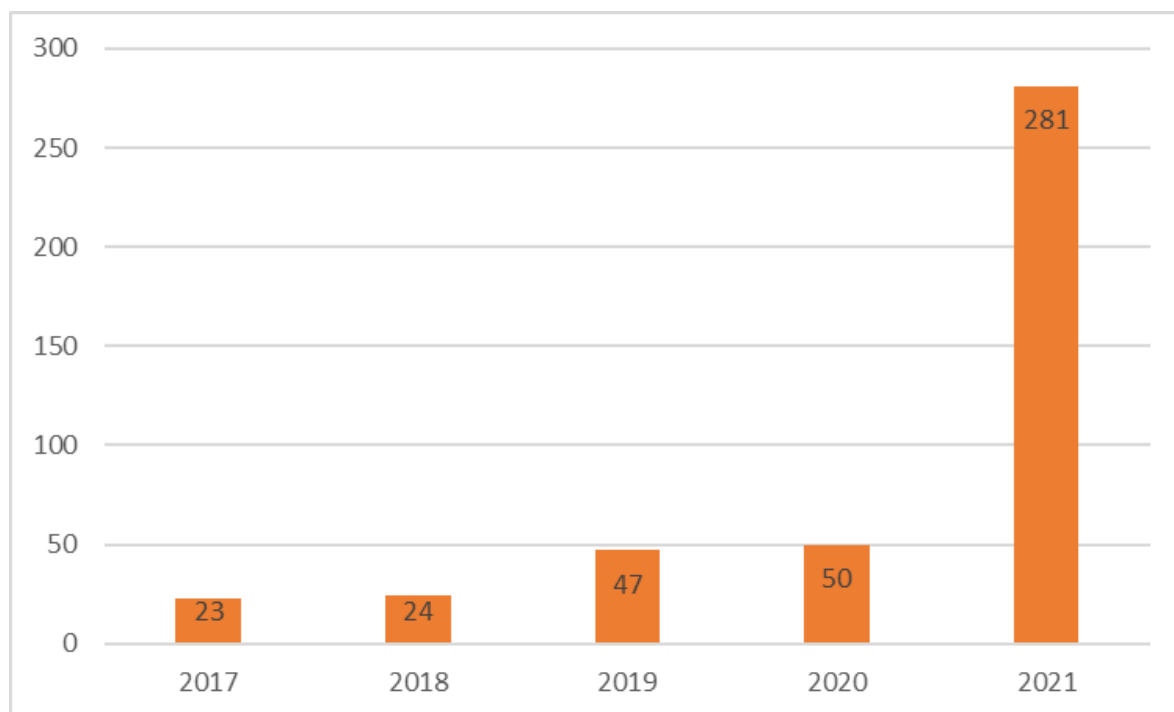
**Gambar 2.101.**  
**Sebaran Aktivitas Sektor Perdagangan**



Sumber : Bappeda Kota Cimahi, 2017

Pengembangan di sektor perdagangan diantaranya dilakukan melalui pengembangan pasar tradisional barat dan promosi produk IKM/UKM. Peningkatan kualitas pasar tradisional diwujudkan dengan menciptakan pasar yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) di mana pada tahun 2021 baru ada 1 dari 8 pasar tradisional (4 di antaranya dikelola oleh pemerintah kota) yang telah sesuai dengan SNI. Adapun untuk promosi produk UKM/IKM, Jumlah IKM/UKM yang mengikuti promosi di level lokal, regional dan nasional juga masih terbilang rendah meskipun mengalami peningkatan di tahun 2020 yang berjumlah 50 IKM/UKM.

**Gambar 2.102.**  
**IKM/UKM Yang Mengikuti Promosi Di Level Lokal, Regional Dan Nasional di Kota Cimahi Tahun 2017-2021**



*Sumber : Disdagkoperin Kota Cimahi, 2022, diolah*

Pada tahun 2021 Jumlah IKM/UKM yang mengikuti promosi di level lokal, regional dan nasional mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2021, semua bazar yang diadakan baik secara daring dan tatap muka dimasukkan dalam perhitungan.

#### **4. Perindustrian**

Sektor industri menjadi *leading* sektor ekonomi Kota Cimahi. Sektor ini mampu menyumbang lebih dari 45% terhadap total PDRB. Pertumbuhan sektor industri terbesar terdapat pada industri pengolahan, terutama industri tekstil. Walaupun menyumbang kontribusi yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, pertumbuhan kontribusi sektor industri pengolahan mengalami tren penurunan dalam lima tahun terakhir. Berikut adalah data tentang pertumbuhan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB.

**Tabel 2.88.**  
**Laju Pertumbuhan dan Peranan Kategori Industri Pengolahan di Kota Cimahi (Persen), 2017-2021**

PDRB	2017	2018	2019	2020	2021
Laju Pertumbuhan	4.13	7.70	13.96	-7.04	0.43
Peranan	45.90	46.65	48.65	47.58	46.31

*Sumber : BPS, Produk Domestik Regional Bruto Kota Cimahi Menurut Lapangan Usaha 2017 - 2021*

*\*Angka Sementara \*\* Angka Sangat Sementara*

Dari tabel di atas, diketahui bahwa pada 2017-2021, laju pertumbuhan Kategori Industri Pengolahan cenderung fluktuatif dengan tren meningkat sampai dengan tahun 2019 dan sempat mengalami penurunan sebesar -7,04% pada tahun 2020, sedangkan pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan menjadi 0,43%. Sektor Industri Pengolahan merupakan sektor yang memegang peranan terbesar dalam PDRB Kota Cimahi. Pada tahun 2021 peranannya mencapai 46,31%. Sedikit menurun jika dibandingkan dengan tahun 2020.

Selain memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian kota, Sektor Industri Pengolahan terutama Industri Sedang Besar juga menyerap tenaga kerja yang sangat besar. Akan tetapi seiring dengan menurunnya jumlah industri di Kota Cimahi, jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor industri pun mengalami penurunan setiap tahunnya seperti yang tergambar pada tabel berikut ini :

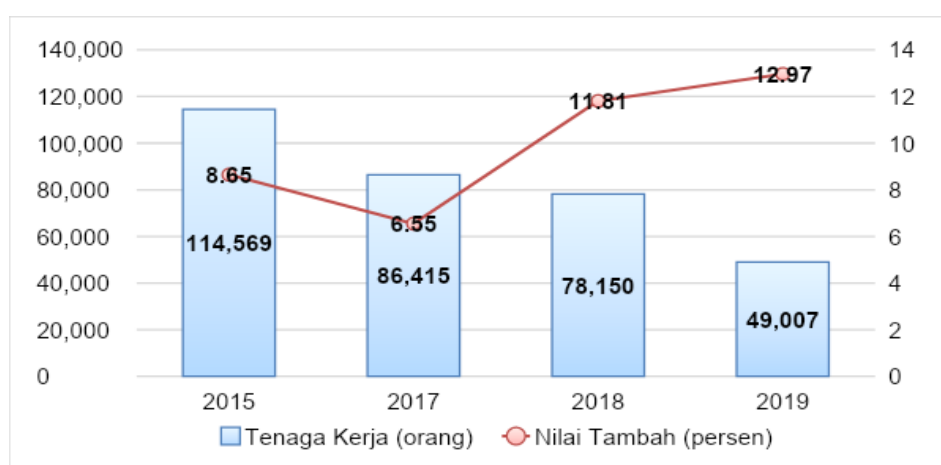
**Tabel 2.89.**  
**Jumlah Industri Sedang Besar dan Tenaga Kerja Kota Cimahi Tahun 2016 - 2020**

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Industri	593	275	595	619	691
Tenaga Kerja (orang)	83.085	62.868	81.920	59.007	60.068

*Sumber : Disnaker Kota Cimahi, 2021, diolah*

Meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri di Tahun 2018-2019 setelah sebelumnya mengalami perlambatan sangat berpengaruh terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Cimahi. Akan tetapi peningkatan laju pertumbuhan sektor industri tersebut tidak bisa serta merta meningkatkan penyerapan jumlah tenaga kerja di sektor industri pengolahan. Seperti yang terlihat pada Gambar 2.49 jumlah tenaga kerja pada industri sedang besar tahun 2019 mengalami penurunan 37,29 % dari tahun sebelumnya di saat nilai tambah bruto sektor industri pengolahan mengalami peningkatan.

**Gambar 2.103.**  
**Tenaga Kerja Industri Sedang Besar dan Nilai Tambah Industri Pengolahan Kota Cimahi Tahun 2015 - 2019**



Sumber : BPS Kota Cimahi, 2020, diolah

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwasanya yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota terbatas pada Industri Kecil Menengah (IKM). IKM di Kota Cimahi juga memberikan kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kota Cimahi memberikan beberapa program fasilitasi terhadap IKM agar dapat meningkatkan standar mutunya sehingga bisa meningkatkan kapasitas dan kualitasnya sehingga bisa lebih banyak menyerap tenaga kerja dan bersaing dengan IKM dari daerah lainnya.

**Tabel 2.90.**  
**Jumlah IKM yang Mendapatkan Fasilitas Tahun 2019 dan 2021**

NO	JENIS FASILITASI	Jumlah IKM			Keterangan
		2019	2020	2021	
1.	Uji Nilai Gizi dan Kadaluarsa Produk IKM Klaster Makanan dan Minuman Kota Cimahi	66	60	-	Tidak dilaksanakan karena Refocusing Anggaran dan pemberlakuan PPKM
2.	Desiminasi dan Cetak Desain Merk dan Kemasan Produk IKM Klaster Makanan dan Minuman	56	-	-	
3.	Festival Seleksi <i>Food Ethnic</i> dan Makanan & Minuman Halal Tingkat Kota Cimahi	147	-	-	
4.	<i>Workshop</i> Diversifikasi Olahan Pangan	104	-	-	
5.	<i>Workshop Good Manufacturing Practices (GMP)</i>	25	-	50	
6.	Peningkatan Standar Mutu Produk bagi Pelaku IKM Makanan dan Minuman (PIRT, Sertifikat Halal, HAKI)	115	-	-	Tidak dilaksanakan karena Refocusing Anggaran dan pemberlakuan PPKM
7.	<i>Workshop</i> Teknologi Industri di Bidang Pengolahan Pangan	-	-	-	
8.	Pelatihan Teknis Pembuatan Faceshield	-	50	-	
9.	Pelatihan PMT ( <i>Production Motivation Training</i> ) untuk IKM Craft, Fashion dan Makan-Minuman	-	200	-	
10.	Pelatihan Produksi Bersih untuk IKM <i>Craft</i> , Fashion dan Makanan-Minuman	-	200	100	
11.	Pelatihan Optimalisasi Sosmed untuk IKM <i>Craft</i> , Fashion dan Makanan-Minuman	-	100	100	
12.	Pelatihan Inkubasi Bisnis	-	30	25	
13.	Sosialisasi dan bintek SIINAS	-	25	75	
14.	Pelatihan HACCP	-	-	50	

Sumber : Disdagkoperin Kota Cimahi, 2021, diolah

Selain potensi pada sektor industri pengolahan, saat ini pun di Kota Cimahi sedang dikembangkan pula sektor industri digital kreatif yang merupakan salah satu sektor industri potensial yang bertumpu pada kreatifitas Sumber Daya Manusia (SDM). Selain itu sektor industri digital kreatif ini tentu saja sangat selaras dengan tujuan pembangunan industri

nasional yang mengarah pada revolusi industri 4.0 sebagaimana telah dicanangkan oleh pemerintah pusat dan mendukung konsep *green industry* (industri hijau), yang berkontribusi signifikan terhadap sektor perekonomian, namun sangat ramah lingkungan dan minim polusi.

Gedung *Baros Information Technology Creative Centre* ( BITC ) sebagai bagian dari Kawasan Cimahi Techno Park saat ini menjadi salah satu kawasan pusat pengembangan sektor industri digital kreatif di Kota Cimahi dan telah menjadi salah satu percontohan nasional kawasan perkantoran bersama (*co working space*) yang dikelola oleh pemerintah daerah (dalam hal ini dikelola oleh UPT Cimahi *Technopark*).

Pada Gedung BITC saat ini, terdapat aktifitas bisnis para *start up* pelaku industri digital kreatif dengan data sebagai berikut :

**Tabel 2.91.**  
**Jumlah Tenaga Kerja dan Realisasi Retribusi Daerah dari Tenant di BITC**

Jumlah Tenant	Jumlah Tenaga Kerja	Realisasi Kontribusi PAD (Retribusi Daerah) [Rp]			
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
24 perusahaan industri digital kreatif	182 orang	278.897.500	529.683.500	488.063.150	640.289.725

Sumber : Disdagkoperin, 2021\*

Data di atas menunjukkan peningkatan realisasi kontribusi PAD disetiap tahunnya. Selain data di atas, *multiplier effect* yang timbul dengan adanya Gedung BITC di kawasan Baros Cimahi Tengah tersebut adalah mulai menggeliatnya sektor perekonomian di sekitar gedung hal ini terindikasi dengan mulai maraknya warung makan, toko dan kost-kostan yang ada di sekitar kawasan.

## 5. Transmigrasi

Program transmigrasi di Kota Cimahi bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat sehingga dapat memiliki penghasilan yang tetap.

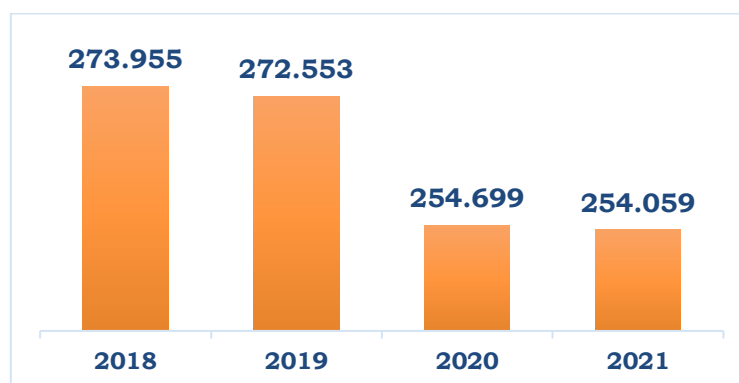
**Tabel 2.92.**  
**Data Statistik Ketenagakerjaan Kota Cimahi Tahun 2018-2021**

NO	URAIAN	TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Usia Kerja				
2	Angkatan Kerja	297.539	296.513	293.754	292.252
3	Bekerja	273.955	272.553	254.699	254.059
4	Pengangguran	23.584	23.960	39.055	38.193
5	Bukan Angkatan Kerja	163.824	171.229	174.993	180.704
6	Sekolah	n/a	51.684	44.353	40.231
7	Mengurus RT	n/a	103.340	110.791	108.829
8	Lainnya	n/a	16.205	19.849	31.644
9	TPAK (%)	64,49	63,39	62,67	61.79
10	Laki laki	82,79	79,88	79,02	77.43
11	Perempuan	46,13	46,87	46,19	46.05
12	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,93	8,08	13,03	13.07
13	Bekerja	273.955	272.553	254.699	254.059
14	UMK (Rp/bln)	2.678.028,45	2.893.074,13	3.139.271,74	3.241.929,00

*Sumber : Data BPS dan Disnaker Kota Cimahi 2022*

Berdasarkan data yang tersedia, diketahui bahwa Angka Kesempatan Kerja di Kota Cimahi pada tahun 2018-2021 terus mengalami penurunan. Dari 273.955 orang (2018), 272.553 orang (2019), 254.699 orang (2020) dan orang pada tahun 2021 menjadi 254.059 orang. Penurunan 4 (empat) tahun ini menjadi hal yang pantas menjadi perhatian.

**Gambar 2.104.**  
**Angka Kesempatan Kerja Di Kota Cimahi Tahun 2018-2021**



Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi, 2022, diolah

Akan tetapi, pelaksanaan Program Transmigrasi di Kota Cimahi dinilai tidak efektif. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pengiriman beberapa keluarga ke daerah tujuan transmigrasi, dari 5 KK yang dikirimkan ada 2 KK yang kembali pulang. Meskipun masih ada keluarga yang tetap bertahan di daerah transmigrasi masih memerlukan dukungan finansial dari Pemerintah Kota Cimahi. Monitoring terhadap keluarga transmigran terakhir dilaksanakan Tahun 2018.

Pada Tahun 2019 dilaksanakan Sosialisasi Animo Transmigrasi kepada masyarakat 100 orang. Dari 100 orang tersebut, ada 10 KK yang semula berminat bertransmigrasi. Namun kemudian mundur karena 2 (dua) sebab : 1). Perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat bahwa untuk Program Pengiriman Transmigran dilakukan dengan *sharing* biaya, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten dan Kota; 2). Mundurnya minat bertransmigrasi karena lokasi tujuan tidak sesuai yang diharapkan calon transmigran. Dari hal tersebut, disimpulkan berdasarkan dari hasil evaluasi belum efektifnya program pengiriman transmigrasi ini.

#### **2.3.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**

##### **1. Sekretariat Daerah**

##### **a. Indeks Reformasi Birokrasi**

Perubahan-perubahan pada area tertentu dalam lingkup birokrasi diharapkan menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendukung



pencapaian tiga sasaran Reformasi Birokrasi. Area-area perubahan tersebut meliputi : mental, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan, dan pelayanan publik. Pengukuran keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi ditunjukkan dengan Indeks Reformasi Birokrasi. Adapun nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kota Cimahi ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.93.**  
**Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Kota Cimahi Tahun 2018-2020**

URAIAN	2018	2019	2020
Indeks Reformasi Birokrasi	52,09 (CC)	60,01 (B)	59,22 (CC)

*Sumber : Setda Kota Cimahi, 2021 diolah*

Dari data didapatkan bahwa nilai Indeks Reformasi Birokrasi masih memerlukan perhatian khusus sehubungan dengan penurunan nilai di tahun 2020. Upaya yang perlu dilakukan dalam perencanaan 2023-2026 adalah memasukan unsur penilaian Reformasi Birokrasi pada penilaian Indikator Kinerja Utama pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dari masing-masing perangkat daerah dengan target pencapaian nilai Indeks Reformasi Birokrasi (B);

**b. SAKIP**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan bentuk rangkaian upaya untuk mewujudkan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Selain itu, laporan ini juga merupakan wujud transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Hasil penilaian dari laporan LAKIP Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang umumnya disebut SAKIP beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan nilai yang signifikan dari tahun 2017 sampai dengan 2020 dengan kategori Nilai B. Penilaian

tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Pemerintah Kota Cimahi menunjukkan hasil yang baik.

**Tabel 2.94.**  
**Nilai SAKIP Kota Cimahi Tahun 2017-2020**

URAIAN	2017	2018	2019	2020
Nilai SAKIP Kota Cimahi	60,68 (B)	63,99 (B)	66 (B)	65,07 (B)

Sumber : Setda Kota Cimahi, 2021, diolah

**c. Nilai LPPD**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri atas :

- 1) Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- 2) Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan.

Adapun nilai LPPD Kota Cimahi disajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.95.**  
**Indikator Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)**  
**Kota Cimahi Tahun 2017-2020**

URAIAN	2017	2018	2019	2020
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	(Sangat Tinggi)	(Sangat Tinggi)	(Sangat Tinggi)	(Sangat Tinggi)

Sumber : Ditjen Otonomi Daerah, Kemendagri, 2021

\* Inspektorat Provinsi Jawa Barat, 2021

Dari tabel diatas, diketahui bahwa nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Cimahi pada Tahun 2017 hingga

2020 dengan status tetap Sangat Tinggi. Hal ini dipengaruhi salah satunya adalah terkait dengan hasil penilaian terhadap capaian IKK yang meningkat, sehingga berpengaruh terhadap penilaian LPPD secara keseluruhan;

**d. Indeks Profesionalitas ASN**

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya pada bulan April. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi : a. Kualifikasi; b. Kompetensi; c. Kinerja; dan d. Disiplin.

Oleh karena itu BKPSDMD melakukan secara berkesinambungan melakukan inventarisasi dan validasi terhadap data terkait dengan 4 dimensi yang dimiliki oleh setiap ASN di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.

**Tabel 2.96.**  
**Indikator Indeks Profesionalitas ASN Kota Cimahi**  
**Tahun 2017-2021**

URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Profesionalitas ASN	75	68	72	53,23	45,04

*Sumber : BKSDM Kota Cimahi, 2021, diolah*

Berdasarkan tabel tersebut capaian Indikator Profesionalitas ASN pada tahun 2021 mengalami penurunan karena adanya keterbatasan anggaran untuk pengadaan Bimtek dan Diklat yang direfokuskan untuk penanganan Covid-19. Selain itu masih perlunya peningkatan pengumpulan SKP ASN tepat waktu karena masih banyak mengalami keterlambatan. Masih banyaknya ASN yang belum melaporkan ke BKPSDMD mengenai Bimtek dan Diklat yang telah diikuti.

Untuk meningkatkan Nilai IP-ASN diarahkan untuk meningkatkan inovasi dan dukungan dari semua OPD misalkan dengan meningkatkan inventarisir Bimtek/Diklat, penggunaan SKP *online*, pengadaan Seminar/Bimtek/Diklat online dan dimasukkannya Indikator IP ASN agar diampu oleh setiap OPD tidak hanya diampu oleh BKPSDMD;

**e. Survey Kepuasan Masyarakat**

Survei kepuasan masyarakat merupakan data otentik tentang respon masyarakat dan persepsi masyarakat terhadap setiap jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Adapun nilai atau predikat Survei kepuasan masyarakat terhadap pemerintah daerah Kota Cimahi mengalami peningkatan. Hasil survei tersebut disajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.97.**  
**Indikator Survey Kepuasan Masyarakat Kota Cimahi**  
**Tahun 2017-2020**

URAIAN	2017	2018	2019	2020
Survey Kepuasan Masyarakat	76	80,99	80,75	81,57

*Sumber : Setda Kota Cimahi, 2021, diolah*

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Survey Kepuasan Masyarakat di Kota Cimahi pada tahun 2017 sebesar 76% dan mengalami peningkatan di tahun 2018 menjadi 80,99%, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali hingga menjadi 80,75% dan meningkat di tahun 2020 menjadi 81,57%.

Bahwa berdasarkan data, untuk SKM mengalami penurunan, dengan demikian sangat dimungkinkan ada *gap persepsi* antara pemberi layanan dengan yang menerima layanan. Menjadi tugas bersama agar setiap penerima layanan menerima informasi yang utuh terkait dengan layanan yang diberikan untuk mengurangi gap persepsi termaksud.

## 2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Sekretariat DPRD sebagai perangkat daerah yang mempunyai fungsi dalam memfasilitasi peningkatan kapasitas DPRD Kota Cimahi untuk melaksanakan fungsi pengawasan, legislasi dan anggaran telah dilaksanakan secara optimal dengan capaian kinerja seperti tabel dibawah ini :

**Tabel 2.98.**  
**Indikator Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**  
**Kota Cimahi Tahun 2017-2020**

URAIAN	2017	2018	2019	2020
Persentase fasilitasi kegiatan DPRD Kota Cimahi yang sesuai standar (%)	N/A	42	99	99

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Cimahi, 2021, diolah

### 2.3.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

#### 1. Perencanaan

Kinerja pada fungsi perencanaan pembangunan Kota Cimahi ditunjukkan oleh beberapa indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel di bawah. Berdasarkan informasi tersebut, diketahui bahwa perencanaan Kota Cimahi telah baik dan memenuhi amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Tabel 2.99.**  
**Indikator Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah**  
**Kota Cimahi Tahun 2016-2020**

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPd yang telah ditetapkan dengan Peraturan Wali kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
4	Persentase Keselarasan Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD (%)	n/a	n/a	100	100	100

Sumber : Bappeda Kota Cimahi, 2021, diolah

## 2. Keuangan

### a. Penetapan APBD Tepat Waktu

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan Undang-Undang mengenai keuangan negara. Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, maka Pemerintah Daerah Kota Cimahi setiap tahun menetapkan Perda tentang APBD Kota Cimahi dan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD Kota Cimahi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Penetapan APBD yang tepat waktu merupakan hal penting yang harus dilakukan agar proses pembangunan di Kota Cimahi dapat berjalan dengan maksimal pada tahun anggaran berkenaan dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;

### b. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Salah satu indikator penting untuk menilai pengelolaan keuangan sebuah institusi pemerintah yaitu Penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK RI. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2015 sampai dengan 2021 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);

### c. Rasio Utilisasi Aset

Semakin tinggi rasio utilisasi aset berarti semakin baik manajemen dalam memanfaatkan aset untuk mencapai tujuan organisasi dan juga menunjukkan bahwa pengelolaan aset berjalan semakin efisien. Pada tahun 2021, rasio utilisasi aset telah mencapai 66,7%. Angka ini lebih baik dari target rasio utilisasi aset yang sebesar 40%.

### 3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Kinerja kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi ditunjukkan oleh beberapa indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel di bawah :

**Tabel 2.100.**  
**Indikator Kinerja Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**  
**Kota Cimahi Tahun 2017-2019**

NO	URAIAN	2019	2020	2021
1	Persentase ASN yang dibina (%)	100	100	100
2	Persentase ASN yang kompeten (%)	60	41	67
3	Persentase pelanggaran disiplin (%)	0,6	5	4,99
4	Penilaian kinerja pegawai (SKP) (%)	87	26	68

Sumber : BPSDM Kota Cimahi, 2021, diolah

### 4. Penelitian dan Pengembangan

Urusan penelitian dan pengembangan di Kota Cimahi baru secara spesifik ditangani dan dikoordinasikan oleh sebuah bidang litbang di Bappeda Kota Cimahi pada tahun 2019. Adapun strategi pembinaan urusan ini lebih diarahkan kepada 4 ( empat ) hal, yaitu :

- a. Penyelenggaraan penelitian bagi penyusunan kebijakan pembangunan bekerjasama dengan perguruan tinggi dan Lembaga litbang lainnya;
- b. Penelitian yang bersifat terapan dan implementatif dengan membuat beberapa *pilot project* di beberapa lokasi (lokus) seperti pengembangan kewirausahaan sosial melalui seni pertunjukan di Cireundeu, pengembangan *agroforestry* di Bukit Padakasih Cibeber dan Legok Jawa Cipageran, penanganan sampah dengan metode *black soldier flies* di Kelurahan Padasuka; inovasi Gaskeun yang mensosialisasikan portal katalog produk para pelaku UMKM di Kota Cimahi dengan pasar-pasar potensial diantaranya ASN Kota Cimahi; Penelitian Kultur jaringan Durian Kamajaya Kota Cimahi dan teknologi penyaringan air sungai

menjadi air bersih dengan teknologi HR WTP Kerjasama dengan BP2D JABAR dan ITB;

- c. Pengembangan inovasi dan daya saing Kota Cimahi diantaranya dengan berdirinya *Cimahi Technopark (CTP)* dengan fasilitas *Gedung CTP* dan *BITC (Baros Information & Technology Centre)* yang berfungsi untuk membangun sinergi dan pertumbuhan interaksi antar unsur kelembagaan IPTEK (*Akademic - Business - Government – Community – Media*) serta memberikan layanan di bidang riset dan pengembangan iptek *Gedung*; *Kompetisi Inovasi Cimahi Motekar Award (ChiMA)* sebagai kompetisi inovasi tingkat Kota Cimahi yang bertujuan sebagai salah satu stimulus untuk menumbuhkan iklim inovasi di kalangan ASN juga masyarakat Kota Cimahi; serta bekerjasama dengan banyak perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri dalam serta lembaga kerjasama hibah riset internasional dari Uni Eropa maupun *Value-chain Capacity Building Network (VCBN)*; dan
- d. Pelaksanaan KKN tematik sebagai salah satu media untuk melakukan diseminasi dan difusi hasil penelitian terapan dan *pilot project* yang ada di PT kepada masyarakat penerima manfaat, diantaranya dengan (1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNJANI terkait KKN Digital Marketing pada UMKM di Kota Cimahi (2) Institut Seni Budaya Indonesia terkait KKN Seni Pertunjukan (Pasar Wisata Legok Awi berbasis Kreatifitas Seni Budaya ) pada kel. Cipageran Kota Cimahi (3) Sekolah Ilmu Ekonomi dan Pariwisata (STIEPAR) Yapari Bandung terkait KKN di Pasar Wisata Legok Awi di Kelurahan Cipageran Cimahi Utara Kota Cimahi (4) KKN Universitas Muhammadiyah Bandung untuk piloting pengolahan sampah organik dengan metode *Black Soldier Fly* di komunitas Magotsuka Kelurahan Padasuka.

Untuk mendorong peningkatan kapasitas inovasi organisasi dan sumberdaya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam bidang pelayanan publik di Kota Cimahi akan dikembangkan konsep *corporate university (CorpU)*. Pelaksanaan CorpU bisa dilakukan melalui kerjasama dengan Kantor Pemerintahan lainnya (Kementrian atau Provinsi), Badan Usaha



Milik Negara (BUMN), perusahaan swasta baik nasional maupun internasional atau dengan lembaga *training* lainnya.

**Tabel 2.101.**  
**Indikator Penelitian dan Pengembangan di Kota Cimahi**  
**Tahun 2017-2020**

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020
1	Persentase kajian penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai bahan kebijakan pembangunan (%)	n/a	25	75	75

*Sumber : Bappeda Kota Cimahi, 2020, diolah*

Pengelolaan dan koordinasi urusan penelitian ataupun kajian di Cimahi dilakukan pada 3 kelompok tugas yaitu penelitian/kajian bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan penyusunan kebijakan, kajian/penelitian bagi perencanaan pembangunan dan kajian teknis seperti *feasibility studies* (FS) maupun DED.

Sejak berdirinya lembaga kelitbangan Kota Cimahi pada tahun 2019, Kota Cimahi telah mengikuti berbagai pengukuran indeks kelitbangan yang diselenggarakan oleh kementerian diantaranya Indeks Daya Saing Daerah (Kemristek/BRIN), Indeks Inovasi Daerah (Kemendagri), Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Kemendagri), RIDa- Radar Inovasi Daerah (BPPT/BRIN) dan telah menerima penghargaan-penghargaan di bidang inovasi dan kelitbangan diantaranya :

- a. Juara I tahun 2019 tingkat nasional untuk perkotaan dengan indeks daya saing tertinggi melalui Anugerah IPTEK dan Inovasi Budhipraja dari Kemenristek;
- b. Juara 5 Kota melalui penghargaan *Innovative Government Award (IGA)* dengan indeks inovasi tertinggi di Indonesia dari Kementerian Dalam Negeri (tahun 2019);
- c. Masuk Top 99 dan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik melalui *Gastrodiplomacy* Cireundeu dari Kementerian PAN dan RB (tahun 2019);

- d. Peringkat 3 Kategori Kota Anugerah Pemerintah Daerah Inovatif pada Tahun 2020 dari Kemenristek/BRIN;
- e. Predikat Kota Sangat Inovatif Pada Ajang *Innovative Government Award* Tahun 2020 dari Kemendagri;
- f. Top 10 Kompetisi Inovasi Jawa Barat untuk Inovasi Bidik Co-Space (UPTD Cimahi Technopark - Disdagkoperin) pada Tahun 2021;
- g. Top 45 Kompetisi Inovasi Jawa Barat untuk Inovasi MPOK NOR KOCI (RSUD Cibabat) pada Tahun 2021; dan
- h. Predikat Kota Terinovatif dengan Peringkat Indeks Inovasi Daerah ke-4 pada Ajang *Innovative Government Award* Tahun 2022 dari Kemendagri.

Direncanakan pada tahun 2022 ini akan disusun Dokumen Sistem Inovasi daerah (SIDa) Kota Cimahi.

Penguatan kelembagaan, SDM, jaringan kerjasama dengan perangkat daerah dan perguruan tinggi serta pemberi hibah penelitian khususnya dalam pelaksanaan penelitian terapan berupa *pilot project* menjadi target kerja kelitbangan hingga tahun 2022.

Penguatan bidang urusan penelitian dan pengembangan di Kota Cimahi harus didukung oleh sumber daya manusia yang memadai seperti fungsional peneliti, perekayasa dan analis kebijakan. Saat ini Kota Cimahi memiliki satu orang Peneliti Ahli Muda dengan kompetensi di bidang Transportasi Darat serta dua orang Analis Kebijakan Ahli Muda.

#### **2.3.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**

Kinerja pengawasan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Cimahi ditunjukkan oleh beberapa indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel di bawah :

**Tabel 2.102.**  
**Indikator Pengawasan di Kota Cimahi Tahun 2017-2020**

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020
1	Persentase PD dengan hasil evaluasi LKIP kategori BB	N/A	N/A	N/A	71,43
2	Nilai Maturitas SPIP	-	1,28	1,268	1,268

Sumber : Inspektorat Kota Cimahi, 2021, diolah

#### **2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH**

Daya Saing sebuah bangsa dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas daya pembangunan sebuah bangsa diantaranya adalah kualitas pertumbuhan ekonomi dengan melihat laju pertumbuhan ekonomi serta ketimpangan pendapatan dan wilayah. Indikator lain yang dapat digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari indeks kemampuan daya beli, indeks pendidikan dan indeks kesehatan.

Selain kedua indikator di atas, dalam era globalisasi ini dalam rangka reformasi daya saing, untuk mengukur capaian peningkatan daya saing, *The World Economic Forum* setiap tahunnya telah menerbitkan sebuah indeks yang disebut Indeks Daya Saing. Indeks ini memiliki 114 indikator yang kemudian dikelompokkan menjadi 12 pilar. Salah satu dari indikator tersebut adalah inovasi dan faktor-faktor kemajuan usaha (*business sophistication factors*).

Dalam level nasional, berkaitan dengan pengukuran indeks daya saing terdapat *tools* atau alat ukur diantaranya Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dan Indeks Radar Sistem Inovasi Daerah (RIDa) dua alat ukur ini dikembangkan oleh Kemenristek/BRIN. Untuk IDSD Kota Cimahi Pada tahun 2019 dan tahun 2020 berhasil meraih predikat sangat tinggi, sedangkan pada tahun 2021 hingga saat ini pengukuran dan penilaian masih berjalan dikarenakan adanya transisi kelembagaan yang terjadi pada

BRIN, namun demikian apabila dilihat dari berbagai indikator yang diukur pada tahun 2021 ini (data yang diukur adalah data tahun 2020 diperbandingkan dengan data tahun 2019) mengalami beberapa penurunan skor, hal ini disebabkan dikarenakan adanya musibah dunia Pandemi *Covid-19* yang mengguncang seluruh dunia pada awal tahun 2020 hingga saat ini.

Untuk pengukuran RIDA pada tahun 2021 Kota Cimahi berhasil mencapai skor 83,79 yang sangat baik dan merupakan peringkat pertama dari seluruh responden Kabupaten/Kota yang dinilai, namun demikian sinkronisasi SIDA Kota Cimahi terhadap pelaksanaan program belum bisa dibuktikan, dikarenakan Road Map SIDA tahun berjalan belum tersedia

Inovasi biasanya berkembang dalam klaster-klaster industri karena di dalam klaster industri inilah akan terjadi penyebaran dan penyerapan pengetahuan dan difusi inovasi (*knowledge spillover and innovation diffusion*). Kota Cimahi sejak tahun 2012 mencoba mengarahkan pembangunan ekonomi melalui Pengembangan Ekonomi Lokal dengan membangun sentra. Pada sentra-sentra inilah inovasi akan tumbuh dan menghasilkan produk-produk unggulan yang inovatif. Jika saja pembangunan sentra-sentra ataupun klaster-klaster ini dipadukan dengan pembangunan sektor lainnya seperti fisik infrastruktur/lingkungan hidup, pendidikan (formal/informal), sosial, budaya dan kesehatan maka pembangunan sentra-sentra ini akan terjadi dengan lebih cepat dan lebih berkesinambungan. Kolaborasi antara banyak sektor (*stakeholder*) dalam proses pembangunan klaster/sentra ini dilakukan secara terstruktur dan sistematis dalam sebuah Sistem Inovasi Daerah (SIDa).

Sebagai salah satu implementasi pelaksanaan SIDa, Kota Cimahi membangun Gedung BITC (*Baros Information Technology Creative*) sebagai Gedung bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan konsep Cimahi *Techno Park*. Gedung ini diharapkan dapat memicu bangkitnya aktivitas ekonomi kota khususnya klaster industri telematika dan animasi. Strategi pengembangan klaster industri telematika dan animasi berorientasi kepada

lahirnya para pelaku usaha baru (*startup firms*) serta komunitas-komunitas wanita, anak muda dan pengguna internet (*women, youth, netizen*).

Pengembangan kawasan BITC juga diharapkan dapat menjadi *brand image* bagi identitas lokal kota. Lahirnya pelaku usaha baru ini akan menjadi cermin dari daya tarik investasi di Kota Cimahi. Khusus untuk klaster industri telematika dan animasi, sejak tahun 2011 pembinaan *startup* dilakukan melalui kegiatan inkubasi industri dan pemberian kemudahan perizinan berusaha. Keberadaan Cimahi *Technopark* selain sebuah kawasan terintegrasi untuk melahirkan para wirausaha baru, mengakselerasi para pelaku UMKM/IKM eksisting dan mendorong karya-karya kreatif inovatif untuk dikomersialisasikan, juga diharapkan mampu mendorong upaya peningkatan inovasi melalui program dan kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi yang implementatif (*applied research*).

Untuk meningkatkan budaya inovasi dan mendorong tumbuh kembangnya inovasi maka Kota Cimahi sejak tahun 2021 telah menyelenggarakan Kompetisi inovasi Cimahi Motekar Award (ChiMa Award) di Kota Cimahi, dengan beberapa kelompok kategori diantaranya :

1. Kelompok SKPD termasuk RSUD Cibabat;
2. Kelompok Kelurahan;
3. Kelompok Puskesmas/UPTD/BLUD Kecuali RSUD Cibabat;
4. Kelompok Dosen Perguruan Tinggi;
5. Kelompok Umum/Masyarakat/Komunitas; serta
6. Kelompok Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Umat (Kerjasama dengan Baznas Kota Cimahi).

Selain itu untuk terus melahirkan inovasi-inovasi baru serta mengembangkan inovasi yang telah ada (eksisting) telah dibentuk pula TIM KLINSING (Klinik Inovasi Keliling) yang berfungsi untuk mendampingi seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

Peran ilmu pengetahuan dan teknologi sangat kental dalam merumuskan perencanaan pembangunan di Kota Cimahi. Pemanfaatan

data sangat terlihat dalam merumuskan sektor-sektor unggulan termasuk juga pusat-pusat produk unggulan kota (sentra ekonomi). Dimungkinkannya banyak dari hasil-hasil penelitian digunakan dalam proses perencanaan pembangunan di Kota Cimahi disebabkan sebagai berikut :

1. Kualitas SDM yang baik dengan jumlah ASN berpendidikan minimal S2 sebanyak 32 orang dari total 49 orang ASN, sehingga tidak sulit berdiskusi mengenai hasil penelitian dengan para perencana di Bappeda Kota Cimahi;
2. Bidang urusan kelitbangan berada pada satu institusi bidang urusan perencanaan pembangunan, sehingga terjadi komunikasi dan diskusi kebijakan pembangunan;
3. Kota Cimahi sudah terbiasa bekerja dengan IT dan ilmu pengetahuan berkat adanya Cimahi Technopark. Kegiatan kreatif dan inovatif yang dilakukan bersama pengusaha-pengusaha muda (*start up*) sangat mewarnai kebijakan pembangunan di Kota Cimahi;
4. Dalam melakukan riset, Kota Cimahi telah mampu mengakses sumber pembiayaan dari pihak eksternal baik dari hibah penelitian bersama beberapa dosen dan juga hibah penelitian dari Uni Eropa dan *Value-Chain Capacity Building Network (VCBN)* yang berkantor di Swiss; dan
5. Sejak dikelolanya urusan bidang kelitbangan secara lebih fokus kepada kajian terapan melalui pembuatan pilot project di beberapa lokasi sejak tahun 2018 bekerja bersama para perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta masyarakat, hasil percontohan konsep di beberapa lokasi menunjukkan hasil yang baik, sehingga bisa memberikan input tidak hanya bagi perencanaan pembangunan tetapi lebih jauh lagi menjadi contoh bagi implementasi program dan kegiatan di PD.

Beberapa percontohan *pilot project* diantaranya :

- a. Pembangunan model kolektif Sentra Keripik Pedas Setiamanah;
- b. Pembangunan model rantai nilai Sentra Susu Dan Produk Susu Cipageran Kota Cimahi;

- c. Percontohan pengembangan kewirausahaan sosial berbasis pariwisata budaya di Cireundeu Kota Cimahi;
- d. Percontohan pengembangan destinasi wisata alam berbasis kolaborasi dengan multi stakeholders di Legok Awi Cipageran Kota Cimahi; dan
- e. Piloting Pengolahan Sampah Organik dengan Metode Maggot BSF. Berhasil diperolehnya prestasi penghargaan inovasi dan kreatifitas di

Kota Cimahi diantaranya :

1. Top 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik dari Kemenpan RB Tahun 2018 dan 2019;
2. Peringkat ke-5 kota dengan Indeks Inovasi Tertinggi melalui *Innovative Government Award* (IGA) Kemendagri tahun 2019 dan Peringkat ke-12 pada tahun 2020, serta peringkat ke-4 Nasional pada tahun 2021 dan menjadi kota terinovatif;
3. Top 5 *outstanding achievement of Public Service Innovation* tahun 2020 dari Kemenpan RB;
4. Top 45 dan Top 10 Kompetisi Inovasi Jawa Barat (KIJB) pada tahun 2021;
5. Ditetapkan sebagai 11 Kab/Kota (KaTa) kreatif oleh Kemenparekraf RI tahun 2021; dan
6. Mendapatkan penghargaan pada dimensi *Smart Economy* pada evaluasi program *Smart City* tahun 2021.

Telah berhasilnya beberapa *pilot project* dan capaian prestasi penghargaan nasional dan internasional dinilai telah berhasil meningkatkan daya saing daerah Kota Cimahi dan mampu meyakinkan para Perangkat Daerah (PD) teknis untuk berkolaborasi melaksanakan beberapa program dan kegiatan yang hingga saat ini sedang berjalan di antaranya :

1. Pengembangan *agro-forestry* yang mengintegrasikan budidaya dan konservasi Durian Kamajaya sebagai durian asli dataran tinggi Kota Cimahi bersama Dinas Pangan dan Pertanian serta Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi. Lokus terdapat di dua lokasi yaitu di Bukit Padakasih Kelurahan Cibeber dan Hutan Kota Kelurahan Cipageran

- bersama UNPAD, IPB, Dinas Pangan dan Pertanian dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi;
2. Pengembangan kewirausahaan sosial melalui pemanfaatan larva maggot BSF untuk mengolah sampah organik dengan DLH Kota Cimahi di Kelurahan Padasuka bersama Universitas Muhammadiyah Bandung (UMBdg);
  3. Pengembangan padi Organik antara komunitas petani dengan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi;
  4. Pendampingan kewirausahaan melalui kegiatan Tematik setiap tahun kepada 50 UMKM bekerjasama dengan Disdagkoperin, UKM serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI), serta pendampingan Kawasan Seni dan Budaya dari ISBI Bandung dan STIEPAR YAPARI melalui kegiatan KKN tematik;
  5. *Pilot project* instalasi pengolahan air Kota Cimahi bekerjasama dengan ITB, BP2D Jabar, *Manchester University* dan DPKP Kota Cimahi;
  6. Pengembangan kapasitas Inovasi ASN Kota Cimahi bekerjasama dengan *Faculty of Engineering National University of Singapore* (NUS) dan UNPAR;
  7. Pengembangan destinasi wisata alam berbasis kolaborasi dengan multi stakeholders di Legok Awi Cipageran Kota Cimahi, bekerjasama dengan diantaranya ISBI Bandung dan STIEPAR; dan
  8. Pengembangan portal katalog *marketplace* [umkmcimahi.com](http://umkmcimahi.com) melalui program inovatif GASKEUN (Gerakan Aksi Selamatkan Kelompok Usaha Mikro Untuk Negeri) Kota Cimahi.

#### **2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**

##### **1. PDRB ADHB Menurut Pengeluaran**

Produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi suatu daerah. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga berlaku 2010 Kota Cimahi pada periode 2017-2021 dapat dilihat dari tabel berikut ini :



**Tabel 2.103.**  
**PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Menurut Jenis Pengeluaran**  
**Kota Cimahi Tahun 2017-2021 (Miliar Rupiah)**

<b>PDRB Pengeluaran (Seri 2010)</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	20.276,01	21.918,08	23.455,65	23.316,59	23.996,23
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	61,18	71,78	76,56	76,05	77,35
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.654,40	1.732,81	1.835,80	1.825,36	1.880,50
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	9.424,00	10.210,88	10.766,80	10.061,79	11.439,11
Perubahan Inventori	1.024,00	1.096,71	1.135,56	493,10	-211,24
Net Ekspor Barang dan Jasa	-5.859,51	-5.790,22	-4.630,82	-3.562,20	-2.924,55
<b>PDRB</b>	<b>26.580,08</b>	<b>29.240,03</b>	<b>32.639,54</b>	<b>32.210,69</b>	<b>34.257,40</b>

*Sumber : BPS Kota Cimahi, 2022*

## **2. PDRB ADHK Menurut Pengeluaran**

PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang dievaluasi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir.

Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Kota Cimahi pada periode 2017-2021 dapat dilihat dari tabel berikut ini :

**Tabel 2.104.**  
**PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran**  
**Kota Cimahi Tahun 2016-2020 (Miliar Rupiah)**

<b>PDRB Pengeluaran (Seri 2010)</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	14.815,38	15.505,45	16.138,02	15.696,18	15.961,42
Pengeluaran Konsumsi LNPR	45,59	51,78	53,41	52,25	52,23
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.058,15	1.079,54	1.133,88	1.111,04	1.117,58
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	6.846,37	7.284,43	7.550,13	7.033,98	7.522,03
Perubahan Inventori	632,51	654,25	664,84	277,13	(116,08)
Net Ekspor Barang dan Jasa	-3.490,87	-3.382,86	-2.684,23	-1.830,01	(1.261,40)
<b>PDRB</b>	<b>19.907,13</b>	<b>21.192,60</b>	<b>22.856,04</b>	<b>22.340,56</b>	<b>23.275,78</b>

Sumber : BPS Kota Cimahi, 2022

### 3. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan

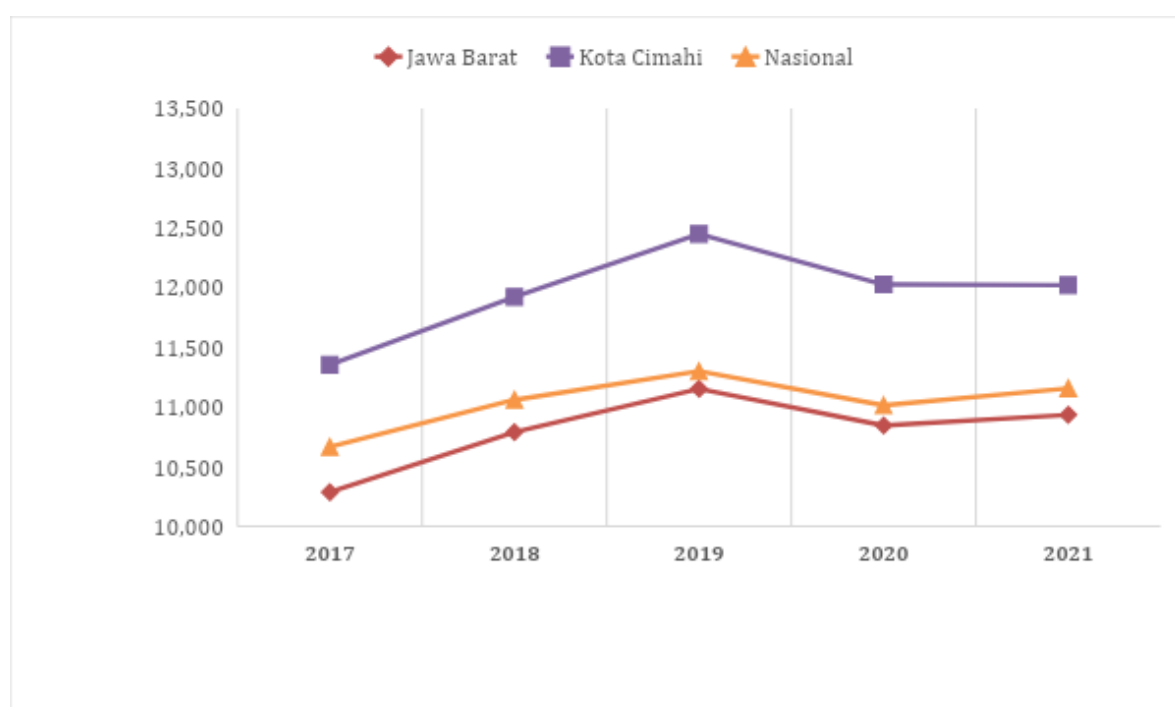
Pengeluaran per kapita yang disesuaikan merupakan salah satu komponen dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengukur standar hidup layak (*decent standard of living*). Pengeluaran per kapita yang disesuaikan adalah nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity/ppp*). Rata-rata pengeluaran perkapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100, sedangkan penghitungan PPP menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan 30 komoditas merupakan komoditas non makanan.

Perkembangan pengeluaran per kapita disesuaikan Kota Cimahi selama periode 2017-2021 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 mencapai 12.448 ribu rupiah/orang, yang berarti naik sebesar 4,42% dibanding tahun sebelumnya yang sebesar

11.921 ribu rupiah/orang. Namun saat pandemi Covid-19 berlangsung, pengeluaran per kapita disesuaikan Kota Cimahi mengalami penurunan menjadi 12.025 ribu rupiah/orang di tahun 2020 atau (-3,40 %) dan terus menurun menjadi 12.019 ribu rupiah/orang di tahun 2021 atau (-0,050 %)

Apabila dibandingkan dengan perkembangan pengeluaran per kapita disesuaikan, posisi Kota Cimahi selalu berada di atas Jawa Barat dan Nasional di setiap tahunnya (2017-2021). Pengeluaran per kapita disesuaikan ketiga tingkat pemerintahan ini menunjukkan kecenderungan yang sama yaitu mengalami peningkatan pada tahun 2017-2019, namun menurun di tahun 2020 dan 2021 akibat pandemi Covid-19.

**Gambar 2.105.**  
**Perkembangan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2017-2021**



Sumber : 1. BPS Provinsi Jawa Barat, 2021, diolah  
 2. BPS RI, 2021, diolah

#### 4. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kota Cimahi, ternyata sebagian besar masih

digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kota Cimahi maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga.

Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumah tangga adalah sebagai konsumen akhir (*final consumer*) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumah tangga khusus (seperti penjara, asrama dan lain lain). Selanjutnya, berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut akan diklasifikasikan menurut 7 (tujuh) kelompok COICOP (*Classification of Individual Consumption by Purpose*), yaitu kelompok makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; angkutan dan komunikasi; restoran dan hotel; serta kelompok barang dan jasa lainnya.

**Tabel 2.105.**  
**Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga**  
**Kota Cimahi Tahun 2017-2021**

URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Total Konsumsi Rumah Tangga</b>					
ADHB (Juta Rp)	20.276.012,95	21.918.077,67	23.455.648,84	23.316.589,80	23.996.231,74
ADHK 2010 (Juta Rp)	14.815.382,38	15.505.454,14	16.138.021,95	15.696.178,65	15.961.421,07
<b>Proporsi terhadap PDRB</b>					
(% ADHB)	76,28	74,96	71,86	72,39	70,05
<b>Kapita (Ribu Rp)</b>					
ADHB (ribu Rp)	33.731,57	36.060,68	38.182,48	41.021,45	41.978,46
ADHK 2010 (ribu Rp)	24.647,16	25.510,32	26.270,42	27.614,67	27.922,55
<b>Pertumbuhan</b>					
Total konsumsi RT	4,70	4,66	4,08	-2,74	1,69
Perkapita	3,47	3,50	5,18	3,00	1,03
<b>Jumlah penduduk (orang)</b>	601.099	607.811	<b>601.450</b>	<b>567.935</b>	571.632

*Sumber : PDRB Kota Cimahi Menurut Pengeluaran 2017-2021*

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga pada tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017-2019 mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Hal tersebut terjadi karena secara umum tingkat pendapatan masyarakat akan naik dan di sisi lain persediaan atau penawaran berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik bertambah. Kondisi semacam ini memicu naiknya belanja untuk keperluan konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga. Secara rata-rata, konsumsi per rumah tangga dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik menurut atas dasar harga berlaku.

Pada tahun 2020 adanya pandemi *Covid-19* menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat yang cukup signifikan. Dengan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maka hanya kegiatan ekonomi tertentu yang tetap dapat beroperasi dan bertahan selama pandemi. Sedangkan kegiatan ekonomi yang rentan saat pandemi, mengalami dampak yang cukup berat. Masyarakat yang bekerja pada kegiatan ekonomi yang rentan ini akhirnya ikut mengalami dampak yang buruk misalnya pengurangan jam kerja atau bahkan dampak terburuknya adalah mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hal ini akhirnya berdampak pada pendapatan masyarakat. Terlihat dari laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang menurun pada tahun 2020 menjadi -2,74%. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga selalu berada di rentang 4-5%. <https://cimahikota.bps.go.id> Produk Domestik Regional Bruto Kota Cimahi Menurut Pengeluaran 2017-2021 47 Namun pada tahun 2021, terutama pada triwulan akhir 2021, kondisi pandemi berangsur mulai menurun dan perekonomian mulai membaik, sehingga aktivitas masyarakat mulai bergerak positif, termasuk konsumsi rumah tangga meskipun hanya tumbuh sebesar 1,69%.

##### **5. Perkembangan jumlah perusahaan *start up* yang tergabung dalam Inkubator Bisnis**

Salah satu program dan kegiatan unggulan yang dilaksanakan di Cimahi *Techno Park* sebagai salah satu kawasan pusat pengembangan

ekonomi di Kota Cimahi adalah Program Inkubator Bisnis dan Teknologi, *output* dari program ini adalah untuk menghasilkan perusahaan-perusahaan rintisan atau yang dikenal dengan *start up* sebagai salah satu upaya untuk mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi kota.

**Tabel 2.106.**  
**Data Perkembangan Jumlah *Start Up* yang tergabung dalam Program Inkubator Bisnis tahun 2017 - 2021**

No	Tahun	Jumlah <i>Start Up</i>
1	2017	14 Kelompok Start up & 10 Animator Graduate
2	2018	5 Kelompok Start Up & 12 Animator dalam pendampingan Pengembangan IP Animasi
3	2019	5 Kelompok Start Up & 12 Animator dalam pendampingan Pengembangan IP Animasi
4	2020	22 Kelompok Start Up
5	2021	11 Kelompok Start Up dan 13 Tim Makerspace Digital Kreatif (Pra Inkubasi)

#### **6. Kontribusi PAD (Pendapatan Asli Daerah) terhadap total pendapatan daerah**

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah adalah salah satu indikator kemandirian keuangan daerah, peningkatan besaran kontribusi dari tahun ke tahun menjadi salah satu target yang harus direalisasikan sebagai salah satu capaian kinerja pemerintah Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Kota Cimahi.

**Tabel 2.107.**  
**Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Kota Cimahi Tahun 2017 sampai dengan 2021**

	2017	2018	2019	2020
Pendapatan Daerah	1.351.088.087.800,88	1.316.171.844.179,39	1.449.377.055.729,15	1.387.967.361.913,46
Pendapatan Asli Daerah	383.973.425.351,88	334.988.775.127,39	379.663.505.399,15	357.929.044.692,46

#### **2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dapat menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktifitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. IDSD juga dapat diartikan sebagai refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah. Pentingnya IDSD sebagai alat untuk menilai keberhasilan suatu daerah untuk dapat bersaing dengan daerah lain dan mendukung daya saing.

Memperhatikan betapa pentingnya daya saing, maka daya saing tersebut menjadi tiga prioritas penting dari sembilan visi, misi, dan program aksi Presiden Joko Widodo yang dikenal dengan sebutan Nawacita. Tiga prioritas yang terkait dengan daya saing adalah (1) meningkatkan kualitas hidup manusia; (2) meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; dan (3) mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik.

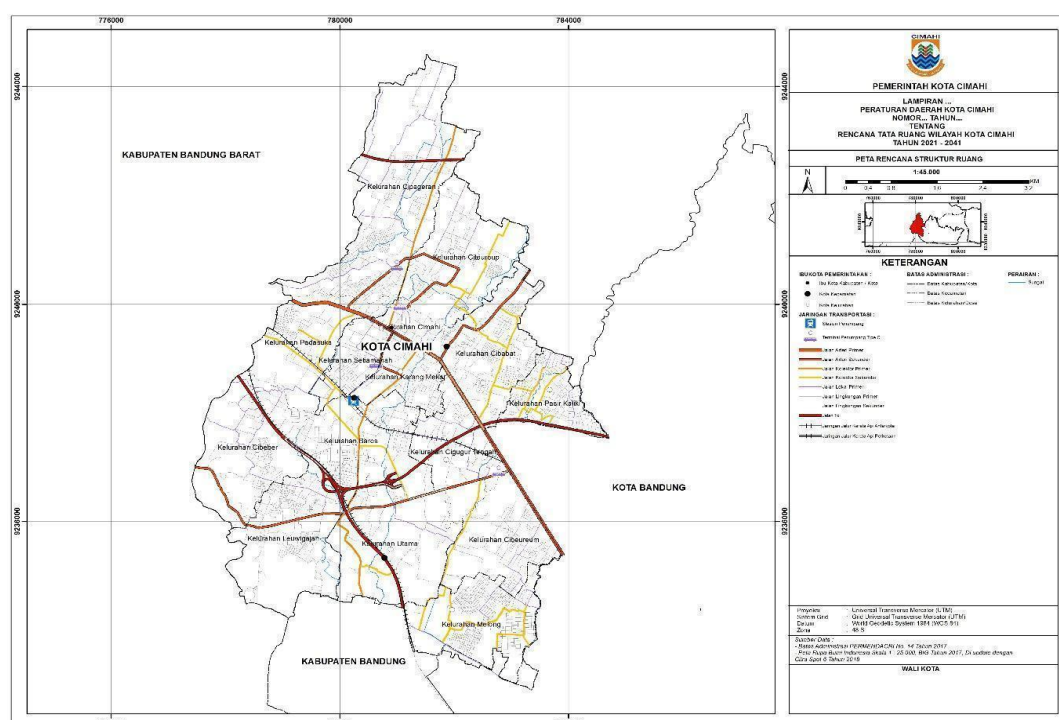
Pembangunan Infrastruktur dan kewilayahan menjadi modal pembangunan untuk meningkatkan daya saing daerah melalui pembangunan sarana prasarana terhadap akses sektor-sektor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan fungsi sosial. Berdasarkan review RTRW Kota Cimahi tahun 2020, strategi peningkatan keterpaduan infrastruktur, sarana dan prasarana dalam menunjang pusat perdagangan dan jasa, pusat ekonomi kreatif, pusat pariwisata, dan pusat industri non-polutif diantaranya :

1. penataan dan pengembangan infrastruktur wilayah dalam rangka meningkatkan kualitas serta jangkauan pelayanan sarana dan prasarana wilayah yang terpadu dalam mendukung Kota Cimahi sebagai pusat perdagangan dan jasa, industri, ekonomi kreatif, dan industri non-polutif;
2. membuka dan meningkatkan aksesibilitas yang seimbang menuju pusat-pusat kegiatan, baik untuk di wilayah bagian utara, tengah dan bagian selatan; dan

3. mengembangkan infrastruktur dan sistem jaringan prasarana perkotaan secara terintegrasi dengan pengembangan jalan, kereta api, terminal, yang menghubungkan antar pusat kegiatan serta antar pusat kegiatan dengan hinterlandnya berbasis mitigasi bencana.

Peningkatan keterpaduan infrastruktur terutama yang menghubungkan pusat perdagangan dan jasa dengan pusat-pusat kegiatan lainnya dapat digambarkan dalam peta jaringan jalan yang menghubungkan pusat pelayanan Kota dengan sub pelayanan kota sebagaimana berikut :

**Gambar 2.106.**  
**peta jaringan jalan yang menghubungkan pusat pelayanan Kota dengan sub pelayanan kota**



Selain dari jaringan jalan yang menghubungkan antar wilayah, beberapa infrastruktur pendukung kota di bangun untuk meningkatkan pelayanan perkotaan sebagai berikut :

1. Pembangunan *double track* di Leuwigajah;
2. Pembangunan *Mall* Pelayanan Publik;
3. Proses Pembangunan *Underpass*;
4. Pembangunan *Flyover* Padasuka;



5. Peningkatan akses pelayanan air bersih;
6. Pembangunan sarana pengelolaan air limbah; dan
7. Pembangunan taman-taman publik.

Untuk mendukung daya saing daerah, selain pembangunan infrastruktur kepastian pembangunan juga di dukung melalui ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diindikasikan dengan beberapa indikator, yaitu Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang, dan Persentase Bangunan Berizin. Berdasarkan data Dinas PUPR Kota Cimahi, persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan dan mencapai 60,92% pada Tahun 2019, hal ini menunjukkan semakin baiknya pemahaman dan ketaatan seluruh masyarakat Cimahi dalam mematuhi peraturan tata ruang.

**Tabel 2.108.**  
**Persentase Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang di Kota Cimahi Tahun 2017-2019**

URAIAN	2017	2018	2019
Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang	58,82%	64,71%	76,47%

*Sumber : Dinas PUPR Kota Cimahi, 2020, diolah*

Sementara indikator persentase bangunan berizin belum optimal pencapaiannya walaupun trennya meningkat setiap tahun. Pada Tahun 2019, persentase bangunan berizin mencapai 30,50%.

**Tabel 2.109.**  
**Persentase Bangunan Berizin di Kota Cimahi Tahun 2017-2019**

URAIAN	2017	2018	2019
Persentase Bangunan Berizin	29,60%	29,84%	30,50%

*Sumber : Dinas PUPR Kota Cimahi, 2020, diolah*

### **2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi**

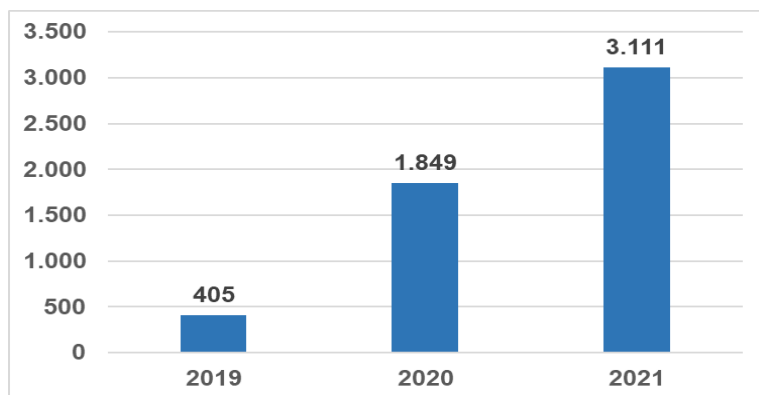
Daya saing merupakan salah satu kriteria keberhasilan bagi setiap daerah untuk mencapai standar hidup yang lebih tinggi dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya yang dimilikinya. Salah satu aspek penting daya saing adalah iklim investasi. Investasi merupakan salah satu komponen pembentuk produk domestik bruto atau produk domestik regional bruto (PDRB) bagi daerah. Investasi akan memberikan lebih banyak input ke dalam proses produksi baik dari sisi modal maupun tenaga kerja dan berbanding lurus dengan hal tersebut maka nilai tambah dapat meningkat. Oleh karena itu, iklim investasi yang baik akan mendorong meningkatnya investasi yang dilakukan sehingga akan memberikan dampak pada semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Peningkatan iklim investasi merupakan tugas penting bagi pemerintah. Meskipun demikian, peran serta seluruh lapisan masyarakat sangat dibutuhkan dalam peningkatan iklim investasi.

Secara umum, peningkatan iklim investasi dapat dilihat dari pelaku usaha yang berinvestasi dan nilai investasi yang ditanamkan. Semenjak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang kemudian digantikan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bahwasanya setiap pelaku usaha harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Pendaftaran NIB tersebut dilakukan melalui aplikasi *Online Single Sub Mission* (OSS) v.1.1 (sampai dengan Juni 2021) dan OSS-RBA (*OSS Risk-Based Approach*) mulai dari Bulan Juli 2021 hingga sekarang. Perubahan aplikasi ini berakibat pada ketidakkontinuan rincian data OSS.

Berdasarkan data DPMPSTP, diketahui bahwa penerbitan NIB di Kota Cimahi mengalami lonjakan yang signifikan. Jumlah NIB yang diterbitkan pada tahun 2019 yang hanya berjumlah 405 buah meningkat menjadi 1.849 buah pada tahun 2020 dan 3.111 buah pada tahun 2021.

Hal ini tidak lepas dari kemudahan penggunaan aplikasi OSS dan kewajiban semua pelaku usaha termasuk UMKM untuk memiliki NIB.

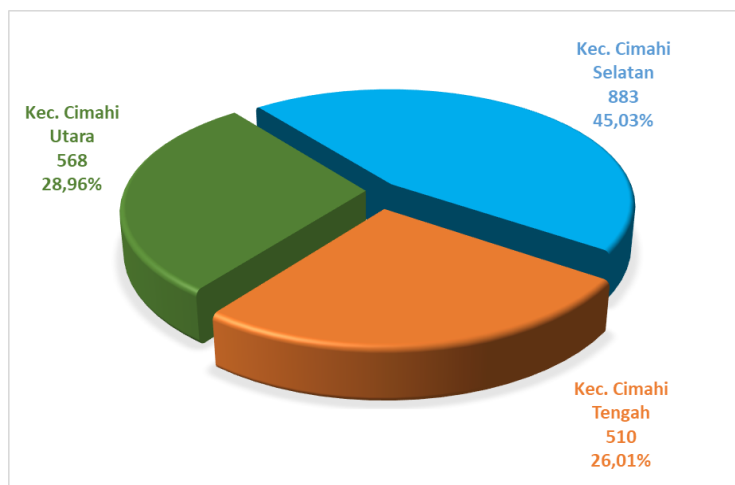
**Gambar 2.107.**  
**Jumlah Penerbitan NIB di Kota Cimahi Tahun 2019-2021**



Sumber : DPMPTSP, olahan Bappelitbangda

Berdasarkan data OSS-RBA, penerbitan NIB tahun 2021 terbanyak berada di Kecamatan Cimahi selatan yang mencapai 883 NIB yang diterbitkan atau sekitar 45,03% dari total NIB yang diterbitkan melalui OSS-RBA.

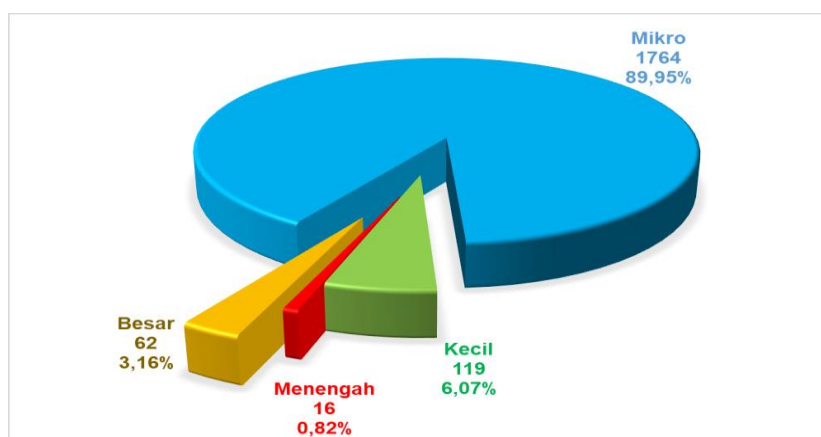
**Gambar 2.108.**  
**Sebaran Penerbitan NIB di Kota Cimahi Tahun 2021 melalui Berdasarkan Kecamatan**



Sumber : OSS-RBA (DPMPTSP), olahan Bappelitbangda

Bila dilihat berdasarkan skala usaha diketahui bahwa untuk skala Mikro merupakan NIB yang paling banyak diterbitkan, yakni mencapai 1.764 NIB atau sekitar 89,95% dari total NIB yang diterbitkan melalui OSS RBA.

**Gambar 2.109.**  
**Penerbitan NIB di Kota Cimahi Tahun 2021**  
**Berdasarkan Skala Usaha**



Sumber : OSS-RBA (DPMPTSP), olahan Bappeda

#### 2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah faktor penting penentu daya saing suatu daerah, namun pengertian sumber daya manusia tidak dalam artian jumlah, tapi lebih pada kualitas. Inilah yang menjadi penjelas mengapa daerah dengan sumber daya manusia yang tersedia melimpah namun tidak mempunyai daya saing yang tinggi, karena kualitasnya yang masih rendah.

Daya saing sumberdaya manusia berkaitan erat dengan indeks saing global, dimana adalah daya saing global ini tidak hanya relevan bagi perdagangan internasional (ekspor dan impor) tetapi juga investasi : negara dengan indeks daya saing global (*global competitiveness index*; GCI) yang tinggi akan lebih menarik bagi investor asing karena secara potensial negara tersebut memberikan keuntungan bisnis lebih besar dari pada negara dengan GCI yang rendah.

Metodologi yang digunakan oleh WEF (*World Economy Forum*) untuk menentukan daya saing global sebuah negara adalah suatu kombinasi

antara analisis data sekunder dan analisis data primer yang meliputi sejumlah aspek yang secara teoritis dianggap sangat berpengaruh terhadap tingkat daya saing suatu negara/ekonomi, dan dalam penghitungan dengan rumus-rumus tertentu, masing-masing aspek/faktor tersebut diberi bobot-bobot tertentu yang besarnya didasarkan pada signifikansi dari pengaruh dari aspek bersangkutan.

Ada 12 indikator yang digunakan oleh WEF untuk menentukan GCI yakni, institusi, infrastruktur, stabilitas ekonomi makro, kesehatan dan pendidikan dasar, pendidikan tinggi dan training, efisiensi pasar barang, efisiensi pasar tenaga kerja, sophistikasi pasar keuangan, kesiapan teknologi, ukuran pasar, sophistikasi bisnis, inovasi. Ke 12 indikator tersebut dapat dipilah menjadi faktor yang mempunyai korelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi yakni kelembagaan, infrastruktur, kondisi ekonomi makro dan tingkat pendidikan serta kesehatan masyarakat. Kemudian faktor yang bisa meningkatkan produktivitas ekonomi yang terkait dengan kualitas sumber daya manusia yakni pendidikan dan pelatihan, kinerja pasar yang efisien, dan kesiapan teknologi. Faktor yang lain adalah faktor inovasi yang diukur dari kecanggihan proses produksi di dalam perusahaan yang secara bersama menentukan tingkat inovasi suatu negara.

Media komparatif yang lain yang dapat digunakan untuk menunjukkan daya saing sumber daya manusia adalah Laporan Pembangunan Manusia dengan melihat indeks pembangunan sumber daya manusia (*Human Development Index*-HDI). Indikator yang digunakan dalam menentukan indeks pembangunan manusia adalah angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per capita.

Angka harapan hidup merupakan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka Harapan Hidup digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan

kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Angka Harapan Hidup yang dihitung untuk Kota Cimahi berdasarkan data BPS Tahun 2020 adalah 74,03 tahun, artinya bayi-bayi yang dilahirkan menjelang tahun 2020 cenderung akan dapat hidup sampai 74 tahun. Angka Harapan Hidup ini menunjukkan adanya peningkatan kehidupan dan kesejahteraan Kota Cimahi.

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan salah satu output yang dapat digunakan untuk memotret pemerataan pembangunan pendidikan. Karena HLS mengukur kesempatan pendidikan seorang penduduk di mulai pada usia tujuh tahun. Angka Harapan Lama Sekolah mengindikasikan makin tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah. Semakin tinggi angka harapan lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Asumsi yang berlaku secara umum bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kualitas seseorang, baik pola pikir maupun pola tindakannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan meningkatkan daya saing.

Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator sosial di bidang pendidikan yang mencerminkan lama bersekolah masyarakat yang ada di suatu daerah. Besarnya angka rata-rata lama sekolah masyarakat di suatu daerah akan berpengaruh terhadap kualitas pendidikan masyarakat di daerah tersebut. Apabila kualitas rata-rata lama sekolah masyarakat meningkat, maka akan berpengaruh meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat tersebut. Hal ini dikarenakan peningkatan kesejahteraan akan mendorong produktivitas atau meningkatkan aktivitas dalam bekerja ataupun melaksanakan pendidikan.

Angka harapan lama sekolah di Kota Cimahi pada tahun 2020 adalah 13, 80 tahun dan rata-rata lama sekolah 10,96 tahun. Dari data ini dapat dikatakan bahwa rata-rata penduduk kota cimahi lulusan SMP atau hanya bersekolah sampai kelas 2 SMA, kondisi ini tidak memungkinkan untuk meningkatkan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk

itu perlu peningkatan daya saing manusia di Kota Cimahi dengan terus mengupayakan peningkatan pendidikan bagi masyarakatnya.

Tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat merupakan faktor dominan yang perlu mendapat prioritas utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat yang tinggi menentukan kemampuan untuk menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baik dalam kaitannya dengan teknologi sampai kelembagaan yang penting dalam upaya meningkatkan tingkat kesejahteraan penduduk. Oleh sebab itu, dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi perlu pula dilakukan pembangunan manusia, termasuk dalam konteks ekonomi daerah. Kebijakan pembangunan yang tidak mendorong peningkatan kualitas manusia hanya akan membuat daerah yang bersangkutan tertinggal dari daerah lain.

Untuk menghadapi perdagangan bebas yang tidak dapat ditunda lagi dan siap atau tidak siap akan dihadapi oleh semua penduduk di dunia, maka peningkatan daya saing sumber daya manusia merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dalam hal ini meningkatkan kualitas sumber daya manusia bukan hanya kuantitas sumber daya manusia. Dengan peningkatan kualitas baik melalui pendidikan formal maupun dengan pelatihan-pelatihan yang intensif, diharapkan akan mampu menciptakan knowledge dan inovasi yang merupakan dua kata kunci bagi daya saing menuju globalisasi. Hanya dengan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sajalah suatu daerah akan siap dan mampu menghadapi globalisasi.

#### **1. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)**

Kota Cimahi termasuk kota yang memiliki angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang sangat besar yang seharusnya menjadi modal atau potensi untuk menciptakan pertumbuhan yang tinggi, sesuai dengan arah prediksi dari bonus demografi. Peningkatan kuantitas tenaga kerja diharapkan dapat berbanding lurus dengan kualitas tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan angka penyerapan tenaga kerja. Kualitas tenaga kerja

di Kota Cimahi salah satunya dapat terlihat dari latar belakang pendidikan pencari kerja.

Menurut data pencari kerja dari Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi, angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan paling banyak memiliki latar belakang pendidikan setingkat SMA/SMK. Jumlah pencari kerja paling banyak pada urutan kedua adalah jenjang pendidikan S1/S2, seperti yang tergambar pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.110.**  
**Banyaknya Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan**  
**di Kota Cimahi Tahun 2015-2019**

Tahun	Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan						Jumlah
	SD	SLTP	SLTA	D1/D2	D3	S1/S2	
2015	17	143	2.208	138	1.478	1.491	5.475
2016	20	149	1.714	16	317	443	2.659
2017	6	110	1.705	20	172	244	2.257
2019*	11	82	2.339	212		402	3.046

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi, 2017, diolah

\*Kota Cimahi Dalam Angka Tahun 2020, diolah

Kondisi yang diharapkan ternyata belum bisa terwujud karena kemungkinan adanya ketidaksesuaian (*mismatch*) antara karakteristik angkatan kerja dengan karakteristik jenis pekerjaan yang ada. Latar belakang pendidikan saja belum menjadi syarat cukup untuk dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Kompetensi yang berkaitan dengan keterampilan dan keahlian yang bersertifikasi telah menjadi syarat penting bagi tenaga kerja untuk dapat memasuki pasar kerja. Kurangnya sinergi antara para pelaku industri seperti perusahaan, Apindo, Balai Latihan Kerja (BLK) mengenai kesesuaian kompetensi dan penyerapan langsung tenaga kerja yang telah siap pakai juga menjadi salah satu penyebab kurangnya penyerapan tenaga kerja di Kota Cimahi.



## 2. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Semakin tinggi rasio ketergantungan maka semakin tinggi pula beban yang ditanggung, begitu pula sebaliknya. Indikator ini dihitung dengan rumus formula jumlah penduduk usia tidak produktif (usia <15 tahun + usia >64 tahun) dibagi jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64) dan dikalikan 100.

**Tabel 2.111.**  
**Rasio Ketergantungan di Kota Cimahi Tahun 2015-2019**

INDIKATOR	2015	2016	2017	2018	2019
Rasio Ketergantungan	18,54	18,58	18,59	18,49	15,23

*Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka 2020, diolah*

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa rasio ketergantungan di Kota Cimahi selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan kecenderungan penurunan. Walau demikian, di tahun 2016 dan 2017 sempat terjadi perlambatan penurunan. Setelah tahun 2017, rasio ketergantungan kembali menurun dan bahkan cukup signifikan turun pada tahun 2019 menjadi 15,23%. Ini berarti 1 penduduk usia produktif di Cimahi menanggung beban 15 orang tidak produktif.

### 2.5. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOTA CIMAH TAHUN 2017-2021

Pelaksanaan RPJMD Kota Cimahi tahun 2017-2022 telah memasuki tahun keempat. Sejak pelaksanaan tahun pertama, telah dilakukan evaluasi terhadap hasil RPJMD. Berdasarkan evaluasi pada Tahun 2019, maka diperlukan adanya perubahan terhadap RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022, yang kemudian Dokumen Perubahan RPJMD tersebut ditetapkan pada Tahun 2021 berdasarkan Perda Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2021. Perubahan tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Adapun hasil evaluasi terhadap IKU Kota Cimahi sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.112.**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Cimahi Tahun 2017-2021**

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (indeks)	76,95	*)	*)	*)	*)	*)	*)	77,86	78,06
2	Indeks Pendidikan (indeks)	74,66	74,1	74,72	74,15	74,81	74,2	74,87	74,84	75,29
3	Indeks Kesehatan (indeks)	82,45	82,47	82,69	82,49	82,91	82,51	83,12	82,94	83,4
4	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,31	1,25	1,12	1,2	1,07	1,15	0,48	1,02	0,76
5	Indeks reformasi birokrasi	n/a	*)	*)	*)	*)	*)	*)	60,43 (B)	Belum ada data
6	Nilai SAKIP (predikat)	B	B	B	BB	B	BB	B	B	B
7	Nilai LPPD (predikat)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Tinggi
8	Opini BPK (predikat)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	75	75	68	77	72	79	53,23	58	45,04
10	Survey Kepuasan Masyarakat (Nilai)	76	78	80,99	80	80,75	82	81,57	82,37	82,76
11	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Indeks)	**)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	3,18	2,75
12	PDRB per Kapita (Juta Rp)	33,12	*)	*)	*)	*)	*)	*)	36,29	59,93
12	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,43	5,64	5,68	5,66	6,84	5,69	-2,26	3,69	4,19
13	Indeks Gini (indeks)	0,41	0,4	0,364	0,4	0,363	0,39	0,38	0,39	0,415
14	Indeks Williamson (indeks)	0,35	0,34	N/A	0,33	N/A	0,32	N/A	***)	***)
15	Angka Kemiskinan (%)	5,9	5,77	4,94	5,61	4,39	5,45	5,11	5,07	5,35

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
16	Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) (%)	8,43	8,26	7,93	7,52	8,08	6,78	13,30	12,64	13,07
17	Tingkat Pelayanan Jalan / <i>Level of Service</i> (LOS) (Predikat)	D	D	C	D	C	D	C	C	C
18	Persentase pengelolaan sampah (%)	87	98	95	100	96,06	100	97,61	***)	***)
19	Persentase cakupan layanan air limbah domestik (%)	70,1	76,75	82,66	83,41	75,98	90,06	75,83	***)	***)
20	Persentase luasan genangan terhadap luas kota (%)	0,38	0,31	0,14	0,23	0,07	0,15	0,07	***)	***)
21	Persentase cakupan pelayanan air bersih (%)	69,17	70,52	69,34	72,02	70,35	79,24	69,82	***)	***)
22	Rasio luas kawasan kumuh (%)	4,39	3,96	1,88	3,78	3,16	2,91	0,36	0,18	0,08
23	Indeks Resiko bencana (indeks)	Kelas Resiko Sedang	Kelas Resiko Sedang	Kelas Resiko Sedang	Kelas Resiko Sedang	Kelas Resiko Sedang	Kelas Resiko Sedang	Kelas Resiko Sedang	Kelas Resiko Sedang	Kelas Resiko Sedang
24	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (indeks)	31,83	32,25	32,67	33,3	46,8	34,13	38,21	34,36	41,69
25	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan (%)	80	80	95,1	80	100	80	95,1	81,25	100
26	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (indeks)	73,38	73,63	77,21	73,75	74,14	74	75,13	74,5	77,21
27	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (indeks)	92,23	92,3	92,36	92,5	92,2	92,7	92,01	92,4	91,95

Sumber : Bappeda, 2022

Keterangan : \*) Penambahan indikator pada Perubahan RPJMD dari indikator tujuan

\*\*\*) Indikator baru digunakan pada Perubahan RPJMD, belum ada datanya pada tahun 2017 (kondisi awal)

\*\*\*) Indikator tidak digunakan lagi sebagai IKU Pemda pada Perubahan RPJMD

Pada Tabel Capaian IKU Kota Cimahi dapat dilihat bahwa terdapat 5 IKU Kota Cimahi yang tidak lagi digunakan di Tahun 2021 dan 2022, yaitu **Indeks Wiliamson**, Persentase pengelolaan sampah, Persentase cakupan

layanan air limbah domestik, Persentase luasan genangan terhadap luas kota, dan Persentase cakupan pelayanan air bersih. Indeks Wiliamson tidak lagi digunakan karena sejak tahun 2018 data tersebut tidak dapat tersedia di BPS, sehingga evaluasi tidak dapat dilakukan terhadap target yang telah direncanakan sebelumnya dalam dokumen RPJMD murni Kota Cimahi Tahun 2017-2022. Empat IKU lainnya tidak lagi digunakan karena hasil evaluasi menunjukkan bahwa IKU tersebut merupakan satu bagian dalam menilai capaian IKU Rasio Luas Kawasan Kumuh. Selanjutnya, tabel berikut menunjukkan hasil evaluasi IKK Kota Cimahi sampai dengan Tahun 2021.

**Tabel 2.113.**  
**Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**  
**Kota Cimahi Tahun 2018-2020**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target RPJMD	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A</b>	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>						
<b>1</b>	<b>Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</b>						
<b>1.1</b>	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>						
1.1.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,64	5,57	5,71%	6,84%	5,75	-2,26
1.1.2	PDRB atas Dasar Harga Berlaku (dalam Juta Rupiah)	29.333.942	28.992.532	32.081.819	32.226.020	35.100.381	32.210.686,6
1.1.3	PDRB atas Dasar Harga Konstan (dalam Juta Rupiah)	21.078.192	21.038.451	22.281.757	22.641.830	23.562.958	22.340.561,7
1.1.4	Laju Pertumbuhan Investasi	0,60	-1,02%	1,20%	175,44%	1,81	-67,61

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target RPJMD	Realisasi
1.1.5	Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	5,69	4,05	5,71%	9,40%	5,74	-4,96
1.1.6	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	5,82	4,24	5,83%	3,63%	5,84	-8,05
1.1.7	PDRB per kapita (juta rupiah)	46,13	45,94	48,76	52,46	51,57	59,93
1.1.8	Indeks Gini	0,40	0,36	0,40	0,363	0,39	0,415
1.1.9	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Juta Rp/Tahun)	11.373	11.921	11.547	12.448	11.705	12.025
1.1.10	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	0,17	0,19	0,17	0,20	0,17	0,21
1.1.11	Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) per kecamatan	0,34	N/A	0,33	N/A	0,32	N/A
1.1.12	Kontribusi PDRB Per Kecamatan terhadap PDRB Kota (%)	Cimahi Selatan : 57	N/A	Cimahi Selatan : 57	N/A	Cimahi Selatan : 55	N/A
		Cimahi Tengah : 26	N/A	Cimahi Tengah : 26	N/A	Cimahi Tengah : 27	N/A

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target RPJMD	Realisasi
		Cimahi Utara : 17	N/A	Cimahi Utara : 17	N/A	Cimahi Utara : 18	N/A
1.1.13	Angka Kemiskinan	5,77	4,94	5,610%	4,39%	5,454	5,11
1.1.14	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,60	7,93	7,52%	8,08%	6,78	13,30
1.1.15	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar	1,20	23,59	1,64%	37,93%	2,08	29,10
1.1.16	Persentase PMKS yang diberdayakan	6,49	5,60	6,79%	67,42%	7,1	7,10
1.1.17	Persentase PMKS yang direhabilitasi	6,29	6,42	6,42%	57,69%	6,54	17,10
1.1.18	Jumlah KK yang terverifikasi dan tervalidasi untuk menerima BPNT	18.724	15.818	18.724	16.642	18.724	22.236,00
1.1.19	Persentase PAD terhadap pendapatan	25,40	25,45	30,28%	26,02%	32,45	25,79
1.1.20	SAKIP	B	B	BB	B	BB	B

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target RPJMD	Realisasi
1.1.21	Nilai LPPD	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	sangat tinggi
1.1.22	Indeks Profesionalitas ASN	75,00	68	77	72	79	53,23
1.1.23	Survey Kepuasan Masyarakat	78	80,99	80	80,75	81,56	81,57
1.1.24	Persentase Prolegda yang disahkan	92	90	95%		95	86,33
1.1.25	Nilai LAKIP	B	B	75 (BB)	B	79 (BB)	N/A
1.1.26	Persentase Penyelesaian atau penanganan permasalahan hukum	100	168	100%	160,42%	100	100,00
1.1.27	Level APIP sesuai standar kompetensi menuju level APIP/IACM (Internal Audit Capability Model) berkelanjutan	Level 2	level 2	Level 3	Level 2	Level 3	2,00
1.1.28	Nilai Maturitas SPIP	2	1,26	3	1,268	3	1,27
1.1.29	Persentase Kenaikan PAD dari Sektor Pariwisata	16%	3,69%	17%	12,90%	18	15,00



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target RPJMD	Realisasi
<b>B</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>						
<b>I</b>	<b>Layanan Urusan Wajib Dasar</b>						
<b>2.1</b>	<b>Pendidikan</b>						
2.1.1	Indeks Pendidikan	74,1	74,66	74,15	74,81	74,2	74,87
2.1.2	Angka rata-rata lama sekolah	11,1	10,93	11,2	10,94	11,3	10,95
2.1.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	101,96	105,60	102,23	104,14	102,5	95,57
2.1.4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	96,00	98,60	96,27	98,69	96,54	90,83
2.1.5	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD	96,65	93,63	96,92	102,72	97,19	93,25
2.1.6	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	89,00	99,60	89,27	97,49	89,54	91,27

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target RPJMD	Realisasi
2.1.7	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	75,56	82,30	75,83	78,90	76,1	83,03
2.1.8	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP	78,51	73,65	78,78	80,01	79,05	87,53
2.1.9	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan TK/RA	76,27	81,40	76,54	35,24	76,81	67,64
2.1.10	Persentase TK terakreditasi	10,71	54,05	19,64%	77,36%	28,57	77,36
2.1.11	Persentase PAUD terakreditasi	8,85	23,92	17,70%	28,84%	26,55	28,57
2.1.12	Angka Melek Huruf (AMH)	99,98	99,98	99,984	99,99	99,986	99,99
2.1.13	Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal Terakreditasi	22,50	19,40	48%	50,00%	60	38,30
2.1.14	Nilai Rata-rata Ujian Sekolah SD	219,94	229,58	225	221,39	230	246,09
2.1.15	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan TK	75,00	22,00	80	59,77	80	57,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target RPJMD	Realisasi
	yang memenuhi standar kompetensi						
2.1.16	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan SD yang memenuhi standar kompetensi	75,00	48,00	80	52,54	80	67,95
2.1.17	Persentase SD yang terakreditasi A	44,80	40,80	60,00%	49,60%	64	50,86
2.1.18	Persentase SD yang terakreditasi B	55,20	56,80	40,00%	48,00%	36	46,55
2.1.19	Persentase angka kelulusan SD	100,00	100,00	100%	100%	100	100,00
2.1.20	Nilai Rata-rata UN SMP	230,18	216,24	244	229,90	258	322,18
2.1.21	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan SMP yang memenuhi standar kompetensi	75,00	60	80	77,78	80	51,29
2.1.22	Persentase SMP yang terakreditasi A	61,11	69,44	63,89%	65,00%	66,67	57,78

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target RPJMD	Realisasi
2.1.23	Persentase sekolah SMP yang terakreditasi B	36,11	27,78	33,33%	20,00%	30,56	17,78
2.1.24	Persentase sekolah SMP yang terakreditasi C	2,78	0,00	2,78%	2,50%	2,78	2,22
2.1.25	Persentase angka kelulusan SMP	100,00	100,00	100%	100%	100	99,94
2.1.26	% siswa kelas II paham literasi	70,00	70,00	75%	77,58%	80	85,02
2.1.27	Tingkat capaian kota layak anak	500	500	525	525	550	N/A
2.1.28	Peningkatan Kategori Anugerah Parahita Ekapraya	Madya	Tidak dapat anugerah	Madya	Non peringkat	Madya	Tidak Mengikuti
2.1.29	Jumlah perpustakaan yang memenuhi standar	0	152	4	13	5	13,00
2.1.30	Cakupan Pelayanan kesehatan ibu bersalin	91,82	96,24	100	97,31	100	94,21
2.1.31	Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	91,09	94,42	100	94,95	100	91,67

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target RPJMD	Realisasi
2.1.32	Persentase rematri mendapat Tablet Tambah darah (TTD)	32,6	38,92	33	62,24	34	15,40
2.1.33	Persentase Ibu hamil KEK	2,41	3,15	< 10 %	3,53%	< 10	3,15
2.1.34	persentase stunting pada Batuta	< 12.04	< 12.04	< 12,04%	6,98%	< 12,04	9,81
2.1.35	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	100	100	69,94	100	87,59
2.1.36	Cakupan Rumah Tangga ber-PHBS	52,66	49,86	60	50,93	65	52,94
2.1.37	Cakupan pembinaan Sekolah ber-PHBS	100	100	100	N/A	100	55,34
2.1.38	Cakupan RW Siaga Aktif yang meningkat stratanya	37,18	38,14	62	N/A	62	62,82
2.1.39	Cakupan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di fasyankes	NA	5	7	18,14	9	8,91

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target RPJMD	Realisasi
2.1.40	Cakupan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di tempat bermain anak	NA	N/A	7	N/A	9	N/A
2.1.41	Persentase sarana IRTP yang diaudit	100	100	100%	100%	100	37,00
2.1.42	Persentase akses penduduk terhadap air minum berkualitas	81,99	87,51	83	95,83	84	97,76
2.1.43	Persentase akses penduduk terhadap jamban sehat	70,5	72,6	71	79,9	71,5	80,00
2.1.44	Persentase rumah sehat	63,96	65,04	65	68	66	67,72
2.1.45	Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan TB	109,89	107,14	100	135,23	100	81,25
2.1.46	Angka Bebas Jentik (ABJ)	81,17	91,9	≥95%	89,05%	>= 95	88,73
2.1.47	Penemuan Kasus AFP ≥ 2 per 100.000 pddk < 15 tahun	6,15	3	≥ 2/100000	4	≥ 2/100000	1

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target RPJMD	Realisasi
2.1.48	Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	100	60,98	100	69,02	100	79,45
2.1.49	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	93,6	93,59	93	93,61	93,5	85,91
2.1.50	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	3,08	90,27	100	90,08	100	69,44
2.1.51	Cakupan Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	7,88	65,65	100	72,96	100	37,82
2.1.52	Cakupan Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Mellitus	15,62	96,8	100	98,36	100	100,81
2.1.53	Cakupan Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat	72,63	79,88	100	114,32	100	119,10
2.1.54	Jumlah Pos UKK yang terbentuk	6	6	8	11	10	13,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target RPJMD	Realisasi
2.1.55	Jumlah pengadaan sarana kendaraan operasional ( ambulans ) di Kelurahan	15	15	15	Telah terealisasi di tahun 2018	15	Telah terealisasi di tahun 2018
2.1.56	Terjaminnya perlindungan kesehatan bagi 40 % PBI JKN Kota Cimahi	95,91	99,33	100	85,35	100	100,00
2.1.57	Persentase kepesertaan ke FKTP Puskesmas Kota Cimahi	57,37	43,72	58,5%	45%	59,8	N/A
2.1.58	1. Pelayanan Gawat Darurat (Jumlah Pasien)	47.357	43.111	48.305	48.283	49.271	32.981,00
2.1.59	2. Pelayanan Rawat Jalan (Jumlah Pasien)	184.508	207.754	188.198	126.889	191.962	67.216,00
2.1.60	3. Pelayanan Rawat Inap (Jumlah Pasien)	29.574	22.469	30.165	25.796	30.768	15.629,00
2.1.61	4. Pelayanan Bedah Sentral (Jumlah Tindakan)	4.220	3.670	4.304	3.718	4.390	2.216,00



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target RPJMD	Realisasi
2.1.62	5. Pelayanan Persalinan (Jumlah Pasien)	2.399	2.737	2.447	2.647	2.496	1.954,00
2.1.63	6. Pelayanan ICU (Jumlah Pasien)	662	648	675	713	689	629,00
2.1.64	7. Pelayanan Radiologi (Jumlah Tindakan)	23.581	26.588	24.053	25.975	24.534	18.743,00
2.1.65	8. Pelayanan Lab Klinik (Jumlah Tindakan)	401.269	421.353	420.662	442.901	440.055	316.582,00
2.1.66	9. Pelayanan Lab PA (Jumlah Tindakan)	2.107	2.254	2.149	2.059	2.192	1.214,00
2.1.67	10. Pelayanan Farmasi (Jumlah Resep)	227.493	228.570	238.868	208.237	250.811	164.682,00
2.1.68	11. Pelayanan UTD RS ((Jumlah Labu Darah)	13.566	12.402	13.837	14.133	14.114	12.588,00
2.1.69	12. Pelayanan Hemodialisa (Jumlah Tindakan)	7.549	9.078	12.096	9.096	16.128	9.378,00
2.1.70	13. Pelayanan Rehabilitasi Medis (Jumlah Pasien)	19.943	14.644	20.342	13.828	20.749	3.640,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target RPJMD	Realisasi
<b>3.1</b>	<b>Kesehatan</b>						
3.1.1	Indeks Kesehatan	82,47	82,48	82,49	82,91	82,51	83,12
3.1.2	AKI	102	102,16	101,5	120,26	101	115,82
3.1.3	AKB	7,12	4,18	7,1	5,83	7	6,66
3.1.4	Angka Kesakitan	41,5	41,68	41,1	46,74	40,7	N/A
3.1.5	Indek Keluarga Sehat	0,4	0,29	40,5	22	41	0,22
3.1.6	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan nasional	88,26	88,26	90%	91,70%	92	93,67
3.1.7	Persentase puskesmas terakreditasi minimal dengan strata Madya	61,54	61,54	76,92	92,31	84,62	92,31
3.1.8	Kepuasan pelanggan Pelayanan Kesehatan Dasar	73,25	78,74	74,00%	86,20%	74,5	74,5

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target RPJMD	Realisasi
3.1.9	Prevalensi kurang gizi	< 10 %	6,29%	<10%	5,58%	< 10	7,7
<b>4.1</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>						
4.1.1	Persentase bangunan gedung yang memiliki sertifikat laik fungsi	33	0	50%	0%	67	8,69
4.1.2	Tingkat Pelayanan Jalan / Level of Service (LOS)	D	C	D	C	D	C
4.1.3	Rasio volume kapasitas (VCR)	0,84	0,79	0,80	0,64	0,76	0,72
4.1.4	Kapasitas jalan se-Kota Cimahi	106.173	105.573	107.473	105.493	108.073	108.073
4.1.5	Kapasitas Jembatan se-Kota Cimahi	3.234	3.234	3.234	2.661	3.234	3.234
4.1.6	% kondisi jalan dan jembatan yang mantap	93	93,91	93,5%	99,2%	94	94,02

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target RPJMD	Realisasi
4.1.7	Rasio Rumah Tidak Layak Huni	1,30	0,5	1,04%	0,47%	0,78	0,78
4.1.8	Rasio Tempat Pemakaman Umum (TPU) per satuan penduduk	73,86	10,4	74,16	75,88	74,44	74,44
4.1.9	Persentase luas taman terhadap luas kota	0,204	0,204	0,216%	0,216%	0,229	0,23
4.1.10	Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	64,71	64,71	76,47%	76,47%	88,24	62,00
4.1.11	Persentase bangunan berizin	29,6	29,84	30,50%	30,50%	32,7	N/A
<b>4.2</b>	<b>Penataan Ruang</b>						
<b>4.3</b>	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>						

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target RPJMD	Realisasi
4.3.1	Persentase pengelolaan sampah	98%	95%	100%	96,06%	100%	96,06%
4.3.2	Persentase cakupan layanan air limbah domestik	76,75	82,66	90,06%	75,98%	92,81	75,98
4.3.3	Persentase luasan genangan terhadap luas kota	0,31	0,14	0,23%	0,12%	0,15	0,07
4.3.4	Persentase cakupan pelayanan air bersih	70,52	69,34	70,87%	70,35%	73,16	69,82
4.3.5	Rasio Luas Kawasan Kumuh	3,96	1,88	3,78%	3,16%	2,91	0,36
<b>4.4</b>	<b>Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</b>						
4.4.1	Persentase penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	64	78,61	69%	N/A	74	91,67

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target RPJMD	Realisasi
4.4.2	Persentase Penanganan Gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat	100	100	100%	100%	100	100,00
4.4.3	Indeks Resiko Bencana	Kelas Resiko Sedang	Kelas resiko sedang	Kelas Resiko Sedang	Kelas Resiko Sedang	Kelas Resiko Sedang	Kelas Resiko Sedang
4.4.4	Waktu Tanggap Bencana	15	15	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit
4.4.5	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan bantuan	100	100	100%	100%	100	100,00
4.4.6	Persentase luasan banjir terhadap luas kota	1,04	0,14	0,47%	1,028%	0,54	1,03
4.4.7	dokumen kajian mitigasi bencana	1	4	2	2	0	0,00
4.4.8	jumlah kejadian bencana yang ditangani	80	151	75	222	70	242,00
<b>II</b>	<b>Layanan Urusan Wajib Non Dasar</b>						

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target RPJMD	Realisasi
<b>4.5</b>	<b>Tenaga Kerja</b>						
4.5.1	Angka Kesempatan Kerja (Orang)	273.616	273.955	291.115	272.553	300.209	254.699
<b>4.6</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>						
4.6.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,33	92,33	92,50	92,20	92,7	92,01
4.6.2	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan terpadu	100	100	100%	100%	100	100,00
4.6.3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,63	77,21	73,75%	74,14	74	75,13
4.6.4	Sumbangan perempuan dalam pendapatan keluarga	29,5	29,8	29,75%	31,11%	30,5	30,52
4.6.5	Keterlibatan perempuan dalam parlemen	20	26	20%	29,87%	20	24,44

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target RPJMD	Realisasi
4.6.6	Persentase perempuan sebagai tenaga manager profesional administrasi teknisi	46	49,32	46,30%	49,49%	46,75	48,25
4.6.7	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	70	79	80%	96,43%	90	85,00
<b>4.7</b>	<b>Pangan</b>						
4.7.1	Pola Pangan Harapan (PPH)	82,6	79,1	83,1	83,8	83,6	84,4
4.7.2	PPH ketersediaan	96,4	93,4	96,6	92,9	96,8	94,4
4.7.3	Tingkat Konsumsi Ikan oleh Masyarakat	11	15	12	31,16	13	31,00
4.7.4	Penguatan cadangan pangan	10	9,7	12	0	14	0,00



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target RPJMD	Realisasi
<b>4.8</b>	<b>Pertanahan</b>						
4.8.1	Penyelesaian izin lokasi	100	0	100%	0	100	0
<b>4.9</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>						
4.9.1	Indeks Kualitas Udara	40	52,03	42	70,23	44	65,25
4.9.2	Indeks Kualitas Air	39,2	11,33	39,8	45,35	40,3	11,33
4.9.3	Indeks Tutupan Lahan /Vegetasi	34,13	34,15	34,75	30,31	34,82	23,00
4.9.4	Persentase Ruang Terbuka Hijau	11,15	11,65	11,84%	1,09	11,94	1,13
4.9.5	Tersusunnya RPPLH Kota	0	0	1	1	1	0,00
<b>4.10</b>	<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>						

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target RPJMD	Realisasi
4.10.1	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk	96	98,79	97%	98,91%	98	98,59
4.10.2	Cakupan penerbitan akte kelahiran	73	45,11	78%	47,34%	82	48,18
4.10.3	Cakupan penerbitan akte kematian	65	65,24	70%	68,70%	75	79,99
4.10.4	Cakupan penerbitan kartu keluarga	96	90,58	97%	85,63%	98	76,42
<b>4.11</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>						
	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>						
4.11.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,25	1,12	1,20%	1,07%	1,15	0,48
4.11.2	Total Fertility Rate (TFR)	1,98	1,98	1,97	1,98	1,97	1,96
4.11.3	Rasio Akseptor KB	78,51	78,99	78,70%	78,89%	78,8	79,89

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target RPJMD	Realisasi
4.11.4	Persentase lembaga yang berdaya	100	100	100%	100%	100	N/A
4.11.5	Tingkat keswadayaan masyarakat	30	100	35%	100%	40	0
<b>4.12</b>	<b>Perhubungan</b>						
4.12.1	Persentase fasilitas lalu lintas yang layak	66	100	68%	32,32%	70	N/A
4.12.2	Persentase Angkutan yang Layak jalan	61,2	100	70,9%	37%	80,6	83,24
4.12.3	Persentase titik kemacetan	72	100	72%	20%	71	13,33
4.12.4	Persentase jaringan jalan yang terlayani angkutan umum	24,6	46,92	37,2%	51,58%	49,8	78,09
4.12.5	Persentase tersedianya halte dan terminal	65,38	70,37	73,08%	91,30%	80,77	85,22

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target RPJMD	Realisasi
<b>4.13</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>						
4.13.1	Cakupan pengembangan e-Government daerah	20	58,33	30%	100%	40	40,00
4.13.2	Cakupan layanan informasi pembangunan daerah	45	83	50%	50%	55	55,00
<b>4.14</b>	<b>Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah</b>						
4.14.1	Persentase kenaikan omset IKM/UKM selama mengikuti pameran promosi	9	N/A	13%	15%	17%	0,00
4.14.2	Jumlah IKM/UKM yang mengikuti promosi di level lokal, regional dan nasional	47	24	71	70	95	0,00
4.14.3	Jumlah wirausaha baru	15	2	20	21	45	11
4.14.4	Jumlah Koperasi Aktif	95	95	100	105	105	70

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target RPJMD	Realisasi
4.14.5	Jumlah IKM yang memenuhi standar mutu	320	418	520	486	720	547
<b>4.15 Penanaman Modal</b>							
4.15.1	jumlah jenis izin yang dapat dilayani sesuai standar pelayanan	2	2	3	3	4	4
4.15.2	Jumlah perusahaan yang melapor ke LKPM	145	178	165	169	185	299
4.15.3	Realisasi Investasi (PMA/PMDN)	Rp 9.007.040.000.000	Rp 9.744.433.463.274	Rp9.061.090.000.000	Rp24.410.560.302.066	9.115.450.000.000	5.685.630.739.622
<b>4.16 Kepemudaan dan Olah Raga</b>							
4.16.1	Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif	50	52	65%	55%	75	55,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target RPJMD	Realisasi
4.16.2	Persentase sumberdaya manusia yang terbina (atlit)	32,73	32,73	37,27%	37,27%	50,91	45,20
4.16.3	Persentase sumberdaya manusia yang terbina (pelatih)	58,97	58,97	68,80%	68,80%	78,62	78,62
4.16.4	Persentase sumberdaya manusia yang terbina (pembina)	3,03	N/A	21,2%	21,20%	36,4	36,40
4.16.5	Persentase sarana dan prasarana olahraga yang layak pakai (lapangan olahraga milik pemerintah)	1	1,1143	33,33%	33%	66,67	66,67
<b>4.17</b>	<b>Statistik</b>						
4.17.1	Persentase ketersediaan data statistik daerah	20	40	35%	36,77%	50	50
<b>4.18</b>	<b>Persandian</b>						

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target RPJMD	Realisasi
4.18.1	Persentase informasi yang aman	1	1	1,5%	100%	2	50
<b>4.19 Kebudayaan</b>							
4.19.1	Persentase kebudayaan yang dilestarikan	33	29,63	38%	45%	43	55,56
<b>4.20 Perpustakaan</b>							
4.20.1	Tingkat kepuasan pengunjung perpustakaan umum kota	78,8	79,87	78,7	80,27	78,8	80,32
4.20.2	Persentase sarana baca masyarakat yang aktif	60	62	65	68,5	68	5,26
<b>4.21 Kearsipan</b>							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target RPJMD	Realisasi
4.21.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	5	8	10%	18,50%	10	50,00
<b>III</b>	<b>LAYANAN URUSAN PILIHAN</b>						
<b>4.22</b>	<b>Pariwisata</b>						
4.22.1	Rasio Destinasi Wisata Baru	100	100	-	-	-	0,00
4.22.2	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	100	N/A	-	-	-	-
4.22.3	Jumlah destinasi wisata yang terkelola dengan baik	-	100	0	1	1	3,00
4.22.4	jumlah Wisatawan mancanegara (wisman)	575	392	600	899	635	91,00
4.22.5	jumlah wisatawan nusantara (wisnus)	3880	5852	4270	43707	4700	65610,00



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target RPJMD	Realisasi
<b>4.23</b>	<b>Pertanian</b>						
4.23.1	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	305	328,57	305	335,35	305	270,00
4.23.2	Produksi Hasil Peternakan (Daging)	800	1004	102	712,44	Daging : 104 ton/tahun	357,78
	Produksi Hasil Peternakan (Susu)	750.000	823.000	800	757,86	Susu : 850 l/tahun	1.336.871
4.23.3	Produksi hasil tanaman padi	1675,8	1559,4	1677,48	1693,2	1679,16	1387,20
4.23.4	Produktivitas hasil tanaman padi(ton/Ha)	6,5	6,67	6,5	6,7	6,7	6,80
<b>4.26</b>	<b>Perdagangan</b>						
4.26.1	Cakupan Bina Kelompok pedagang	2	2	3	3	4	3

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target RPJMD	Realisasi
4.26.2	Kontribusi Sektor perdagangan terhadap PDRB	17,74	16,55	17,76	16,84	17,78	15,07
4.26.3	Jumlah sentra jasa dan perdagangan	0	0	0	0	0	0
<b>4.27</b>	<b>Perindustrian</b>						
4.27.1	Kontribusi Sektor industri terhadap PDRB	45,73	45,65	45,75	48,49	45,77	47,74
4.27.2	Persentase kenaikan UMK	8,9	8,03	9,10%	8,03%	9,29	8,51
4.27.3	Jumlah Sentra Industri Pengolahan	2	2	2	2	3	2
<b>E</b>	<b>PENUNJANG URUSAN</b>						
<b>4.30</b>	<b>Perencanaan Pembangunan</b>						

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target RPJMD	Realisasi
4.30.1	Persentase penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan peraturan	100	100	100%	100%	100	100,00
4.30.2	Persentase penyusunan dan pelaksanaan perencanaan yang dimonitoring dan evaluasi	100	100	100%	100%	100	100,00
<b>4.31</b>	<b>Keuangan</b>						
4.31.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.31.2	Persentase SILPA	32,21	11	25,26%	100%	16,36	16,36
4.31.3	Persentase SILPA terhadap APBD	18,95	11	16,07%	11,05%	10,23	17,22
4.31.4	Perbandingan antara belanja tidak langsung dengan belanja langsung	69,97	67	57,19%	67,89%	59,86	49,78
4.31.5	Persentase dokumen anggaran yang tepat waktu	75	100	75%	100%	80	80,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target RPJMD	Realisasi
4.31.6	Persentase dokumen pelaporan yang tepat waktu	92	100	94%	100%	96	96,00
4.31.7	Persentase kelengkapan dokumen milik daerah	92	N/A	94%	100%	96	N/A
4.31.8	Persentase peningkatan pajak daerah	5	-18,52	5-10%	21,05	44507	-2,57
4.31.9	Realisasi target Pendapatan Daerah Total	90	96,89	90%	95,74%	90	95,60
<b>4.32</b>	<b>Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan</b>						
4.32.1	Persentase ASN yang kompeten	75	60	76%	41%	77	24,49
4.32.2	Persentase gap tunjangan kinerja dalam jabatan yang sama	30	52	27	N/A	25	N/A
4.32.3	Persentase pelanggaran disiplin	10	0,6	8%	5%	7	4,99

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target RPJMD	Realisasi
<b>4.33</b>	<b>Penelitian dan pengembangan</b>						
4.33.1	Persentase kajian, penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai bahan kebijakan	25	25	50%	75%	70	75,00

Sumber : hasil pengolahan data, 2020

**Tabel 2.114.**  
**Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**  
**Tahun 2021**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>				
1	Indeks Pendidikan	Indeks	*)	*)	-
2	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,9	11,08	Tercapai
3	Rata-Rata Nilai UN SD	Nilai	*)	*)	-
4	Rata-Rata Nilai UN SMP	Nilai	*)	*)	-
5	Persentase Siswa kelas 2 SD paham literasi	Persen	79,58	82,00	Tercapai
6	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,7	13,81	Tercapai
7	Rata-Rata Capaian SNP Jenjang PAUD	Nilai	36,63	74,00	Tercapai
8	Rata-Rata Capaian SNP Jenjang SD	Nilai	86,56	58,91	Tidak Tercapai
9	Rata-Rata Capaian SNP Jenjang SMP	Nilai	72,33	56,06	Tidak Tercapai
10	Rata-Rata Capaian SNP Jenjang DIKMAS	Nilai	51,25	76,00	Tercapai
11	Indeks Kesehatan	Indeks	*)	*)	-
12	AKI PER 100.000 KH	Nilai	*)	*)	-
13	AKB PER 1000 KH	Nilai	*)	*)	-
14	Indeks Keluarga Sehat	Indeks	*)	*)	-
15	Rasio Kematian Ibu (PER 100.000 KH)	Nilai	115,5	196,08	Tidak Tercapai
16	Rasio Kematian Bayi (PER 1000 KH)	Nilai	6,5	7,06	Tidak Tercapai
17	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan RSUD	Indeks	*)	*)	-
18	Akreditasi Rumah Sakit	Nilai	Paripurna (80)	Utama	Tercapai

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Keterangan
1	2	3	4	5	6
19	Persentase tingkat kemandapan jalan kota	Persen	93,37	94,02	Tercapai
20	Persentase bangunan pemerintahan yang memenuhi sertifikat laik fungsi	Persen	*)	*)	-
21	Persentase Bangunan Pemerintah Kota Dalam Kondisi Baik	Persen	71	100	Tercapai
22	Persentase kesesuaian pembangunan terhadap kebijakan rencana tata ruang	Persen	*)	*)	-
23	Persentase kesesuaian pembangunan dengan rencana rinci tata ruang	Persen	62	100	Tercapai
24	Persentase Rumah Layak Huni	Persen	80	100	Tercapai
25	Persentase Kawasan Kumuh	Persen	*)	*)	-
26	Luas Kawasan Kumuh Sedang dan Kumuh Ringan	Ha	5,17	7,23	Tidak Tercapai
27	Persentase Cakupan Pelayanan Air Bersih/Air Minum	Persen	69,65	89,79	Tercapai
28	Persentase Cakupan Layanan Air Limbah Domestik	Persen	76,78	80,55	Tercapai
29	Persentase luas genangan daerah rawan	Persen	0,057	0,09	Tidak Tercapai
30	Persentase luas genangan daerah tidak rawan	Persen	57,14	33,09	Tercapai
31	Angka Gangguan keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Kasus	1000	719,00	Tidak Tercapai
32	Persentase penurunan titik rawan trantibumas	Persen	*)	*)	-
33	Indeks Resiko Kebakaran	Indeks	59,4	54,80	Tercapai
34	Persentase wilayah yang tanggap bencana kebakaran	Persen	8	8,48	Tercapai
35	Waktu Tanggap Bencana	Menit	15	15,00	Tercapai

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Keterangan
1	2	3	4	5	6
36	Indeks Resiko bencana	Indeks	*)	*)	-
37	Persentase Wilayah Yang Siap Menghadapi Bencana	Persen	73,33	73,33	Tercapai
38	Persentase Respon tanggap darurat bencana	Persen	100	100,00	Tercapai
39	Persentase pemulihan sarana dan prasarana serta lingkungan terdampak bencana	Persen	100	100,00	Tercapai
40	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu	Persen	0	0,00	Belum ada Pemilu
41	Persentase organisasi kemasyarakatan/Kelompok Masyarakat yang terbina/terfasilitasi	Persen	36	54,00	Tercapai
42	Persentase potensi konflik terkait ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan trantibmas yang dapat dicegah dan ditangani	Persen	80	100,00	Tercapai
43	Laju pertumbuhan penduduk	Persen	*)	*)	-
44	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Predikat	*)	*)	-
45	Persentase Indikator Capaian Kota Layak Anak yang dipenuhi	Persen	50	70,64	Tercapai
46	Angka kemiskinan	Persen	*)	*)	-
47	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	*)	*)	-
48	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	*)	*)	-
49	Persentase Indikator Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) yang Dipenuhi	Persen	50	50,00	Tercapai
50	<i>Contraceptive Prevalence Rate</i> (CPR)	Persen	79	79,13	Tercapai
51	Cakupan PMKS yang meningkat taraf hidup, kualitas dan kelangsungan hidupnya	Persen	*)	*)	-



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Keterangan
1	2	3	4	5	6
52	Cakupan PMKS yang Mendapat Bantuan Sosial	Persen	25	36,34	Tercapai
53	Persentase perusahaan yang menerapkan UMSK	Persen	*)	*)	-
54	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	Persen	50	45,65	Tidak Tercapai
55	Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Orang	*)	*)	-
56	Persentase Pengangguran di Kota Cimahi	Persen	*)	*)	-
57	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Persen	65	95,56	Tercapai
58	Rasio penduduk yang bekerja	Persen	86,7	86,93	Tercapai
59	Nilai/skor PPH Ketersediaan	Nilai	93,5	94,40	Tercapai
60	Nilai/skor PPH Konsumsi	Nilai	*)	*)	-
61	Persentase peningkatan nilai PDRB sektor pertanian	Persen	0,24	0,21	Tidak Tercapai
62	Persentase tingkat capaian ketersediaan energi dan protein perkapita terhadap standar ideal	Persen	*)	*)	-
63	Tingkat capaian konsumsi energi dan protein perkapita terhadap standar ideal	Persen	*)	*)	-
64	Persentase peningkatan produktivitas hasil tanaman padi	Persen	1,54	4,70	Tercapai
65	Persentase peningkatan produksi susu	Persen	20	4,00	Tidak Tercapai
66	Persentase peningkatan produksi ikan budidaya	Persen	5	3,52	Tidak Tercapai
67	Persentase rata-rata peningkatan PAD dari sektor perikanan dan pertanian	Persen	7,5	10,50	Tercapai

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Keterangan
1	2	3	4	5	6
68	Persentase Pengelolaan Sampah	Persen	98	94,07	Tidak Tercapai
69	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Persen	*)	*)	-
70	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	10,1	16,66	Tercapai
71	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	71,03	75,44	Tercapai
72	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	22,91	22,38	Tidak Tercapai
73	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan tepat waktu	Persen	83	93,80	Tercapai
74	Persentase Stakeholder yang memanfaatkan database kependudukan	Persen	82	88,24	Tercapai
75	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84	79,01	Tidak Tercapai
76	Level Of Service (LOS)	Predikat	C	C	Tercapai
77	Tingkat Kelancaran lalu lintas (VCR)	Predikat	C	C	Tercapai
78	Persentase peningkatan pemustaka aktif	Persen	1,06	181,00	Tercapai
79	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Indeks	3,18	2,75	Tidak Tercapai
80	Indeks LAKE (Laporan Audit Kearsipan Eksternal)	Indeks	72,32	64,17	Tidak Tercapai
81	Persentase pemustaka aktif	Persen	*)	*)	-
82	Persentase Perangkat daerah yang telah melakukan integrasi data statistik sektoral	Persen	80	80,00	Tercapai
83	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	83	83,01	Tercapai
84	Nilai realisasi investasi	Rupiah	7.170.150.000.000	6.181.485.997.395,00	Tidak Tercapai
85	Persentase Kebudayaan yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Persen	50	56,00	Tercapai

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Keterangan
1	2	3	4	5	6
86	Persentase Partisipasi Pemuda terhadap Pembangunan	Persen	11,2	11,20	Tercapai
87	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman)	Orang	100	5,00	Tidak Tercapai
88	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara (Wisnus)	Orang	5.160	45.864,00	Tercapai
89	<i>Length of Stay</i> (Lama kunjungan wisata)	Hari	2 hari 1 malam	2 hari 1 malam	Tercapai
90	Persentase Masyarakat yang Aktif Berolahraga	Persen	45,5	46,17	Tercapai
91	Persentase Atlet yang Berprestasi	Persen	48	0,00	Tidak Tercapai
92	Persentase Koperasi yang Berkualitas dan Berprestasi	Persen	*)	*)	-
93	Persentase peningkatan omset UKM	Persen	16	40,00	Tercapai
94	Persentase peningkatan jumlah tenaga kerja UKM	Persen	19	30,00	Tercapai
95	Persentase Koperasi yang Berdaya Saing	Persen	5,7	0,00	Tidak Tercapai
96	Jumlah IKM yang Siap Ekspor	IKM	30	30,00	Tercapai
97	Persentase kasus kelangkaan bahan pokok dan barang strategis di masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	100	100,00	Tercapai
98	Jumlah IKM yang berdaya saing	Persen	*)	*)	-
99	Persentase IKM yang berdaya saing	Persen	71,8	71,80	Tercapai
100	Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP Kota	Nilai	*)	*)	-
101	Persentase hasil kelitbangan yang digunakan sebagai bahan kebijakan pembangunan	Persen	*)	*)	-

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Keterangan
1	2	3	4	5	6
102	Presentase hasil kelitbangan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan	Persen	75	75,00	Tercapai
103	Persentase Renstra selaras dengan RPJMD	Persen	100	100,00	Tercapai
104	Persentase Renja selaras dengan RKPD	Persen	100	100,00	Tercapai
105	Persentase RKPD selaras dengan RPJMD, RKP, RKPD Provinsi	Persen	100	100,00	Tercapai
106	Persentase usulan masyarakat dalam musrenbang tingkat kota yang diakomodir pada RKPD	Persen	100	100,00	Tercapai
107	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	26,61	27,65	Tercapai
108	Persentase Peningkatan PAD per Tahunnya	Persen	3,7	7,83	Tercapai
109	Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan SKPD sesuai dengan SAP	Persen	100	100,00	Tercapai
110	Penetapan APBD tepat Waktu	Persen	100	100,00	Tercapai
111	Rasio Utilisasi Aset	Persen	60	66,70	Tercapai
112	Indeks profesionalitas ASN	Indeks	58	45,03	Tidak Tercapai
113	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	Persen	79	79,83	Tercapai
114	Persentase PD dengan hasil evaluasi LKIP kategori BB	Persen	50	100,00	Tercapai
115	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Nilai	*)	*)	-
116	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3	1,27	Tidak Tercapai
117	Nilai SAKIP Kota	Nilai	B	B	Tercapai
118	Nilai LPPD	Nilai	Tinggi	Tinggi	Tercapai
119	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	B	Belum Ada Data	Belum Ada Data
120	Nilai rata-rata IKM Kota	Nilai	82,37	82,70	Tercapai

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Keterangan
1	2	3	4	5	6
121	Tingkat kepuasan anggota DPRD Kota Cimahi	Persen	B	B	Tercapai
122	Persentase fasilitasi kegiatan DPRD Kota Cimahi yang sesuai standar	Persen	99	84,00	Tidak Tercapai
123	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cimahi Selatan	Persen	86	87,33	Tercapai
124	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cimahi Tengah	Persen	82	91,96	Tercapai
125	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cimahi Utara	Persen	85	91,76	Tercapai
<b>II</b>	<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>				
1	Tingkat Pelayanan Jalan / <i>Level of Service</i> (LOS)	Predikat	C	C	Tercapai
2	Persentase pengelolaan sampah	Persen	*)	*)	-
3	Persentase cakupan layanan air limbah domestik	Persen	*)	*)	-
4	Persentase luasan genangan terhadap luas kota	Persen	*)	*)	-
5	Persentase cakupan pelayanan air bersih	Persen	*)	*)	-
6	Rasio luas kawasan kumuh	Persen	0,18	0,08	Tercapai
7	Indeks Resiko bencana	Indeks	Kelas Resiko Sedang	Kelas Resiko Sedang	Tercapai
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	34,36	41,69	Tercapai

## 2.6. PANDEMI COVID-19 DAN DAMPAKNYA

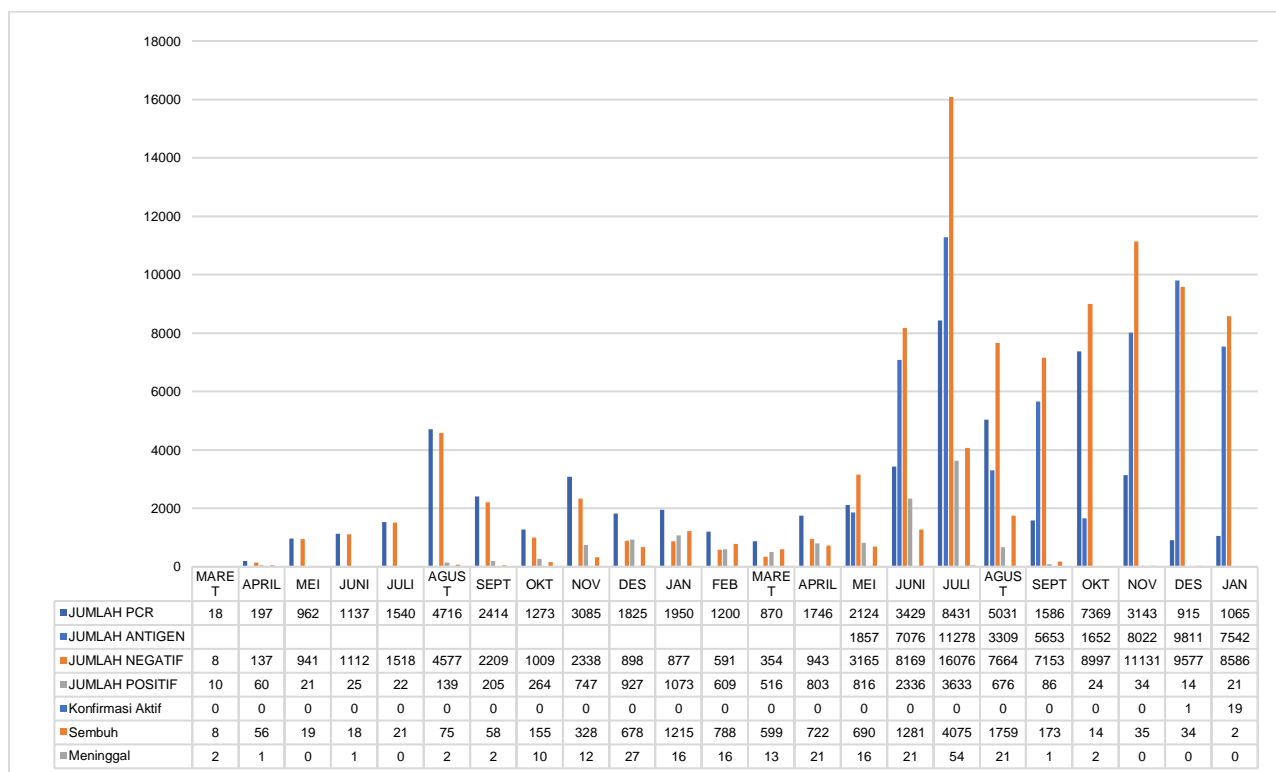
Dimulai dari tahun 2020, *World Health Organization* (WHO) telah mengumumkan penyakit *Covid-19* sebagai pandemi dimana serangan virus ini melanda hampir seluruh negara hingga ke Indonesia, tidak terkecuali

wilayah Jawa Barat, termasuk di dalamnya adalah Kota Cimahi. Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 telah menetapkan *Covid-19* sebagai bencana nasional sehingga membutuhkan upaya yang konkrit dan massal di seluruh Indonesia untuk memerangi wabah ini.

Sampai saat inipun wabah ini masih menunjukkan perkembangannya dan belum dinyatakan selesai sehingga akan tetap mempengaruhi proses pembangunan yang dilaksanakan di Kota Cimahi. Saat ini, berdasarkan data sampai dengan akhir Januari 2022 di Kota Cimahi telah terkonfirmasi 13.061 kasus positif *Covid-19* dengan 12.803 kasus sembuh, 238 orang meninggal dunia, dan 20 kasus aktif. Kondisi luar biasa wabah pandemi seperti ini yang tentunya harus diwaspadai dan diantisipasi dalam penanganannya baik secara preventif maupun juga kuratifnya.

Pelayanan kesehatan diutamakan bagi penyediaan fasilitas kesehatan bagi korban *Covid-19*. Selain itu, yang tidak kalah penting yaitu upaya memutus rantai dan mencegah munculnya angka pasien virus adalah edukasi publik untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan di tengah pandemi yang meliputi menjaga jarak, menghindari kerumunan, menggunakan masker, mencuci tangan, dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS). Selain itu upaya vaksinasi *Covid-19* juga dilakukan untuk memperkuat daya tahan tubuh masyarakat dalam menghadapi penyebaran *Covid-19* sehingga dampak negatif dari penyebaran penyakit ini dapat ditekan seminimal mungkin. Data-data terkait kapasitas tes PCR dan Antigen serta perkembangan kasus *Covid-19* per bulan dan kesiapan ruang isolasi Rumah Sakit di Kota Cimahi serta capaian vaksinasi *Covid-19* di Kota Cimahi dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut ini :

**Gambar 2.110.**  
**Penerbitan NIB di Kota Cimahi Tahun 2021**  
**Berdasarkan Skala Usaha**



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2022

Dari data-data pada gambar di atas, dapat dihitung bahwa kapasitas PCR dan Antigen di Kota Cimahi telah melayani 18,5% dari jumlah penduduk dengan seluruh kasus positif, suspek dan kontak erat dilakukan tracing (Penyelidikan Epidemiologi/PE) dan pemeriksaan RT-PCR. Positif rate berada di angka 11,89%, angka sembuh 98,11%, dan *case fatality rate* 1,82%.

**Tabel 2.115.**  
**Kesiapan Ruang Isolasi Rumah Sakit Kota Cimahi**

NO	NAMA RUMAH SAKIT	MERAH		KUNING		HIJAU	
		JUMLAH	TERISI	JUMLAH	TERISI	JUMLAH	TERISI
1	RS TK II DUSTIRA	16	2	81	16	0	0
2	RSUD CIBABAT	4	0	50	3	32	0
3	RS MITRA KASIH	4	0	6	0	40	0
4	RS KASIH BUNDA	0	0	18	0	0	0
5	RS AVISENA	0	0	2	0	4	0
6	RS MAL	0	0	1	0	7	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>24</b>	<b>2</b>	<b>158</b>	<b>19</b>	<b>83</b>	<b>0</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2022

Enam rumah sakit di Kota Cimahi telah menyediakan ruang isolasi untuk penderita *Covid-19* yang perlu untuk dilakukan karantina. Perawatan membutuhkan ruang isolasi minimum 10-14 hari (tergantung kondisi pasien). Sementara, per akhir Januari 2022 *Bed Occupancy Rate* (BOR) Kota Cimahi berada di angka 9,06%.

Data capaian vaksinasi *Covid-19* di Kota Cimahi sampai dengan akhir Januari 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.116.**  
**Data Capaian Vaksinasi Covid-19 Kota Cimahi Per Akhir Januari 2022**  
**Berdasarkan Dashboard KPCPEN**

PENERIMA VAKSIN		Dosis 1	Dosis 2	Dosis 3
Tenaga Kesehatan	Jumlah	5.813	5.589	3.699
	%	149,90%	144,12%	95,38%
Lansia	Jumlah	29.854	27.603	5.434
	%	72,93%	67,43%	13,27%
Petugas Publik	Jumlah	55.497	48.102	333
	%	242,17%	209,90%	1,45%
Masyarakat Umum & Masyarakat Rentan	Jumlah	261.478	244.790	10.509
	%	79,67%	74,59%	3,20%
Remaja	Jumlah	61.097	50.859	-
	%	106,23%	88,43%	0,00%
Ibu Hamil	Jumlah	141	134	-
	%	0,04%	0,04%	0,00%
Anak	Jumlah	45.710	8.053	-
	%	86,47%	15,23%	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>Jumlah</b>	<b>459.449</b>	<b>384.996</b>	<b>19.975</b>
	<b>%</b>	<b>101,33 %</b>	<b>84,91%</b>	<b>4,41%</b>

Sumber : Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Cimahi, 2022



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa masyarakat Kota Cimahi dari berbagai kalangan telah melakukan vaksinasi *Covid-19* dengan capaian yang cukup baik khususnya pada dosis pertama dan dosis kedua. Capaian vaksinasi dosis pertama untuk seluruh masyarakat Kota Cimahi bahkan telah mencapai 101,33% dari total sasaran. Sedangkan untuk dosis kedua telah mencapai 84,915 dari total sasaran. Untuk dosis ketiga atau dosis penguat (*booster*) baru mencapai 4,41% dari total sasaran karena memang untuk dosis ini baru dimulai awal tahun 2022 bagi masyarakat umum.

Sejak merebaknya virus ini berbagai kebijakan dan upaya telah dilakukan oleh pemerintah bersama dengan seluruh masyarakat. Selain penerapan *Work From Home* (WFH), menjaga jarak, mencuci tangan, penggunaan masker dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS), Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah juga telah merapkan berbagai kebijakan pembatasan perjalanan dan pergerakan masyarakat seperti kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang kemudian dilanjutkan dengan Pemberlakuan Pembatasan kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk mencegah semakin meluasnya penyebaran *Covid-19*.

Namun dengan adanya penerapan berbagai kebijakan pembatasan pergerakan dan kegiatan masyarakat ini telah membatasi ruang gerak penduduk untuk beraktivitas. Tidak hanya para pekerja yang diminta untuk bekerja di rumah, para anak didik juga telah menerapkan *school from home* dengan metode yang baru yaitu sekolah *online* di rumah. Pembatasan-pembatasan ini menyebabkan berbagai aktivitas sosial, ekonomi dan pembangunan terhambat bahkan ada yang berhenti sama sekali.

Kondisi ini berdampak pada meningkatnya angka pengangguran akibat terjadinya PHK serta semakin tidak menentunya dunia usaha dan secara khusus pada sektor informal. Diperkirakan pengangguran terselubung dan tenaga kerja pada sektor informal akan semakin meningkat seiring dengan semakin menurunnya kondisi perekonomian global. Penguatan jaring pengaman sosial menjadi kunci yang penting

dalam menghadapi meningkatnya angka pengangguran, kemiskinan dan ketidakpastian dunia usaha.

Sampai saat ini kebijakan pembatasan pergerakan dan kegiatan tetap dilakukan mengingat belum selesainya wabah *Covid-19* di Indonesia dan juga Kota Cimahi, walaupun terus dilakukan-pelonggaran-pelonggaran menyesuaikan dengan tren perkembangan kasus *Covid-19* yang terus melandai, walaupun tetap menjaga kewaspadaan dan protokol kesehatan yang ketat.

## **2.7. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)**

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, setiap daerah diwajibkan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Penetapan SPM berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran, adapun dalam penetapan SPM harus bersifat mutlak dan mudah distandarkan, sehingga setiap warga Negara memperoleh pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar secara minimal. Urusan Pemerintah Wajib yang Terkait Pelayanan Dasar menerapkan SPM. Dengan demikian terdapat 6 (enam) bidang SPM, yaitu : Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum; Perumahan Rakyat; Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan Sosial.

Adapun penerapan SPM di Kota Cimahi pada Tahun 2021, diuraikan sebagai berikut :

## 2.7.1. Realisasi Penerapan Indikator Standar Pelayanan Minimal

### 1. Bidang Urusan Pendidikan

Bidang Urusan Pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)-nya oleh Pemerintah. Isi muatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan terdiri dari :

#### a. Jenis Pelayanan Dasar

SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Dinas Pendidikan Kota Cimahi untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Program dan Kegiatan Tahun 2021.

Renstra Dinas Pendidikan tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan komprehensif dalam rangka penyusunan dan penetapan program dan kegiatan yang strategis untuk lima tahun kedepan. Renstra yang telah ditetapkan akan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Tahun 2021 yang merupakan dokumen perencanaan program/kegiatan pada tahun tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang teknis pelayanan minimal pendidikan, Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan di Kabupaten/Kota terdiri atas :

- 1) Pendidikan Usia Dini;
- 2) Pendidikan Dasar; dan
- 3) Pendidikan Kesetaraan.

**Tabel 2.117.**  
**Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar	Penerimaan Pelayanan Dasar
1	Pendidikan Anak Usia Dini	a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar;	Warga Negara Usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) Tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar	Penerimaan Pelayanan Dasar
2	Pendidikan Dasar	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar;	Warga Negara Usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas)
3.	Pendidikan Kesetaraan	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	Warga Negara Usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas)

#### b. Target dan Capaian SPM oleh Daerah

Bidang urusan Pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)-nya oleh Pemerintah. Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan terdiri dari :

**Tabel 2.118.**  
**Target dan Indikator Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Bidang Pendidikan**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	Setiap Tahun
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Setiap Tahun
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Setiap Tahun

#### c. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau di realisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan

membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan oleh Dinas Pendidikan berdasarkan sesuai dengan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018.

**Tabel 2.119.**  
**Perhitungan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan**

NO	JENIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL	PERHITUNGAN PENCAPAIAN PEMENUHAN
1	Pendidikan Dasar (SD)	<i>Jumlah Anak Usia 7 s.d. 15 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Pendidikan dasar</i> X 100% <i>*Jumlah Anak Usia 7 s.d. 15 Tahun di Kabupaten/Kota</i>
2	Pendidikan Kesetaraan	<i>Jumlah Anak Usia 7 s.d. 18 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah kesetaraan</i> X 100% <i>*Jumlah Anak Usia 7 s.d. 18 Tahun di Kabupaten/Kota</i>
3	Pendidikan Anak Usia Dini	<i>Jumlah Anak Usia 5 s.d. 6 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan anak usia dini</i> X 100% <i>*Jumlah Anak Usia 5 s.d. 6 Tahun di Kabupaten/Kota</i>

Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan di Kota Cimahi untuk Tahun 2021 sangatlah berat ini disebabkan oleh Pandemi *Covid-19* yang belum berakhir.

Berikut ini adalah Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan di Kota Cimahi untuk Tahun 2021 yaitu :

**Tabel 2.120.**  
**Realisasi SPM Bidang Pendidikan**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	TARGET CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN SPM	BATAS WAKTU PENCAPAIAN
1	Pendidikan Dasar	100%	88,85%	Setiap Tahun
2	Pendidikan Kesetaraan	100%	13,41%	Setiap Tahun
3	Pendidikan Anak Usia Dini	100%	56,95%	Setiap Tahun

Realisasi Standar Pelayanan Minimal Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan di Kota Cimahi dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 diantaranya :

1) Untuk Pendidikan Dasar

Indikator : Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs).

Berdasarkan hasil pencapaian SPM untuk Pendidikan Dasar mengalami penurunan sebesar 11,16% ini dikarenakan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan untuk Pendidikan Dasar Tahun 2019 dan Tahun 2020 sangat dipengaruhi oleh Anggaran dimiliki oleh Dinas Pendidikan. Sehingga tidak heran bahwa Perbandingan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Tahun 2019 dan Tahun 2020 terjadi penurunan realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Tahun 2019 dan Tahun 2020. Terjadinya penurunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Tahun 2019 dan Tahun 2020 ini disebabkan oleh Anggaran yang termuat pada program dan kegiatan dalam Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan berkurang. Dampak pengurangan Anggaran tersebut diakibatkan oleh Pandemi Covid 19 yang terjadi di awal tahun 2020, sedangkan untuk Tahun 2021 masih dalam kondisi Pandemi Covid 19 mengalami kenaikan sebesar 1,92% dari Tahun 2020 yaitu 88,85%. Kenaikan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan untuk Pendidikan Dasar Tahun 2021 disebabkan efisien dan efektifnya dalam pemilihan anggaran terhadap rasionalisasi anggaran.

2) Untuk Pendidikan kesetaraan

Indikator : Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

Berdasarkan hasil pencapaian SPM untuk Pendidikan kesetaraan mengalami penurunan sebesar 55,19% ini dikarenakan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan untuk Pendidikan Kesetaraan Tahun 2019 dan Tahun 2020 sangat dipengaruhi oleh Anggaran dimiliki oleh Dinas Pendidikan. Sehingga

tidak heran bahwa Perbandingan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Tahun 2019 dan Tahun 2020 terjadi penurunan realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Tahun 2019 dan Tahun 2020. Terjadinya penurunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Tahun 2019 dan Tahun 2020 ini disebabkan oleh Anggaran yang termuat pada program dan kegiatan dalam Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan berkurang. Dampak pengurangan Anggaran tersebut diakibatkan oleh Pandemi Covid 19 yang terjadi di awal tahun 2020 serta penambahan masyarakat miskin dari pandemi tersebut. Untuk pencapaian SPM untuk Pendidikan kesetaraan masih mengalami penurunan sebesar 28,99% menjadi 13,41%. Dampak Pandemi *Covid-19* masih berlanjut sehingga membuat pencapaian SPM untuk Pendidikan kesetaraan masih sulit untuk berkembang, selain itu banyak peserta didik untuk kesetaraan di atas usia 7-18 Tahun.

### 3) Untuk Pendidikan Anak Usia Dini

Indikator : Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD.

Berdasarkan hasil pencapaian SPM untuk Pendidikan Anak Usia Dini mengalami penurunan sebesar 23,02% ini dikarenakan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan untuk Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2019 dan Tahun 2020 sangat dipengaruhi oleh Anggaran dimiliki oleh Dinas Pendidikan. Sehingga tidak heran bahwa Perbandingan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Tahun 2019 dan Tahun 2020 terjadi penurunan realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Tahun 2019 dan Tahun 2020. Terjadinya penurunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Tahun 2019 dan Tahun 2020 ini disebabkan oleh Anggaran yang termuat pada program dan kegiatan dalam Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan untuk Pendidikan Anak Usia Dini berkurang. Dampak

pengurangan Anggaran tersebut diakibatkan oleh Pandemi Covid 19 yang terjadi diawal tahun 2020 serta banyak orang tua yang enggan untuk menyekolahkan anaknya ke TK. Untuk Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan untuk Pendidikan Anak Usia Dinin pada Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 8,42% menjadi 56,95% ini disebabkan oleh banyak orang tua yang masih enggan untuk menyekolahkan anaknya ke TK.

#### d. Alokasi Anggaran

Dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM bidang Pendidikan yang dilakukan setiap tahun ini tidak terlepas dari adanya dukungan sumber daya keuangan khususnya anggaran yang berkaitan langsung dengan pencapaian setiap indikator SPM. Anggaran yang digunakan berasal dari beberapa sumber yaitu dari APBD Kota Cimahi, APBN melalui DAK Fisik dan Non Fisik serta APBD Provinsi. Program dan kegiatan yang langsung berkaitan dengan penerapan dan pencapaian seluruh indikator SPM ini diantaranya :

**Tabel 2.121.**  
**Alokasi Anggaran dalam Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**  
**Bidang Pendidikan Tahun 2021**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI	SUMBER DANA
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	8.194.784.896	6.722.064.620	APBN (DID) APBD Kota Cimahi
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	83.219.354	9.338.708	APBN (DAK Fisik) APBD Kota Cimahi
3	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	6.188.531.646	4.595.431.075	APBN (DAK Fisik) APBD Kota Cimahi
4	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU	130.000.000	126.123.079	APBN (DAK Fisik)
5	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Perpustakaan	496.000.000	490.221.996	APBN (DAK Fisik)



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI	SUMBER DANA
6	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Perlengkapan	661.894.900	282.274.400	APBD Kota Cimahi
7	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	257.001.000	240.177.000	APBD Kota Cimahi
8	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	222.123.100	218.444.622	APBN (DAK Fisik)
9	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	505.970.600	385.863.022	APBN (DAK Fisik)
10	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Laboratorium	575.033.700	0	APBN (DAK Fisik)
11	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Perlengkapan	193.462.500	141.457.000	APBD Kota Cimahi
12	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	2.400.000.000	1.161.477.000	APBD Kota Cimahi
13	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	300.472.600	291.039.550	APBN (DAK Fisik)
14	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	284.416.000	196.762.500	APBD Kota Cimahi
15	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengelolaan Dana BOP PAUD	6.382.200.000	4.963.481.530	APBN (DAK Non Fisik)
16	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	138.758.400	123.561.000	APBD Kota Cimahi
17	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	1.658.560.000	611.364.138	APBD Kota Cimahi
18	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	3.201.700.000	2.842.440.244	APBN (DAK Fisik)

#### e. Dukungan Personil

Peran serta Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan SPM akan memberikan kontribusi yang besar dalam pencapaian target dari SPM ini. Berikut ini adalah Dukungan personil yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan diantaranya :

**Tabel 2.122.**  
**Jumlah Personil Urusan Pendidikan**

NO	PENDIDIKAN TERAKHIR	JUMLAH PERSONIL
1	STRATA III (S3)	2 Orang
2	STRATA II (S2)	33 Orang
3	STRATA I (S1)	34 Orang
4	DIPLOMA	2 Orang
5	SMA/SMK Sederajat	16 Orang

## 2. Bidang Urusan Kesehatan

Bidang Kesehatan merupakan salah satu dari 6 urusan wajib pemerintah yang di atur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM merupakan kewajiban minimal yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah daerah untuk rakyatnya, maka target SPM harus 100% setiap tahunnya.

### a. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019, untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten /Kota terdapat beberapa jenis pelayanan dasar, yaitu :

- 1) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
- 2) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
- 3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
- 4) Pelayanan Kesehatan Balita;
- 5) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar;
- 6) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif;
- 7) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut;

- 8) Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
- 9) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus;
- 10) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat;
- 11) Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (TB); dan
- 12) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

**b. Target Pencapaian SPM oleh Daerah**

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68) terdapat 12 (dua belas) jenis layanan dasar. Berikut adalah tabel mengenai SPM dengan 12 jenis layanan dasar.

**Tabel 2.123.**  
**Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan**

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara Usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %.	Setiap Tahun
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun usia lanjut sesuai standar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita Hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan.	100 %	Setiap Tahun
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100 %	Setiap Tahun
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun

Setiap jenis layanan dasar dalam SPM ini memiliki target 100%, dimana target ini juga merupakan target nasional yang harus dicapai oleh pemerintah daerah. Hasil capaian dari setiap indikator jenis layanan ini menunjukkan kinerja dari pemerintah daerah.

### c. Realisasi

Berikut Perbandingan capaian target SPM Bidang Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2021 :

**Tabel 2.124.**  
**Realisasi SPM Bidang Kesehatan Tahun 2021**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN TAHUN 2021			KETERANGAN
		SASARAN	CAPAIAN	%	
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	10.480	10.110	96,47	Capaian pelayanan kesehatan ibu hamil tahun 2021 masih mengalami kesenjangan sebesar 3,53% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini terjadi karena adanya pembatasan pada masa pandemi terutama kegiatan kunjungan luar gedung (kunjungan rumah, pendataan ibu hamil, kelas ibu, dan pembinaan jejaring puskesmas). Upaya yang telah dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan antara lain menerapkan protokol kesehatan dalam pelayanan, melaksanakan kelas Ibu secara daring, meningkatkan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN TAHUN 2021			KETERANGAN
		SASARAN	CAPAIAN	%	
					kerjasama dengan jejaring untuk peningkatan pencatatan dan pelaporan pelayanan dijejaring.
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	10.400	10.242	98,48	Cakupan Pelayanan Ibu bersalin Tahun 2021 mengalami kesenjangan sebesar 1,52% bila dibandingkan target. Hal ini terjadi karena adanya pembatasan pada masa pandemi terutama kegiatan kunjungan luar. Upaya untuk meningkatkan capaian Pelayanan Ibu bersalin adalah dengan perbaikan sistem pencatatan pelaporan dengan meningkatkan kerjasama dengan jejaring, termasuk fasilitas kesehatan luar wilayah, melaksanakan kunjungan rumah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	9.950	9.624	96,72	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir Tahun 2021 mengalami kesenjangan sebesar sebesar 3,28% dibandingkan target. Permasalahan yang dihadapi adalah adanya pembatasan kegiatan selama pandemi, kerja sama dengan jejaring belum optimal. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir adalah melaksanakan pemeriksaan kesehatan dengan memperhatikan protokol kesehatan, meningkatkan pendataan dan pemantauan ibu melahirkan dan bayi baru lahir secara daring, meningkatkan kerjasama dengan jejaring terutama dalam pencatatan dan pelaporan.
4	Pelayanan kesehatan balita	25.129	25.129	100	Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan balita adalah tetap melaksanakan pelayanan kesehatan dalam gedung dan luar gedung (posyandu, kunjungan rumah, kelas balita secara daring) dengan memperhatikan protokol Kesehatan, dan meningkatkan kerjasama dengan jejaring untuk meningkatkan kualitas pencatatan dan pelaporan.
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	69.586	69.586	100	Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan cakupan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar adalah meningkatkan integrasi program dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas, meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan penjangkaran kesehatan secara daring.
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	247.325	242.492	98,05	Capaian pelayanan kesehatan pada usia produktif tahun 2021 masih dibawah target (mengalami kesenjangan 1,95%). Permasalahan yang dihadapi karena kegiatan Posbindu PTM dan Pemantauan Pos UKK dibatasi selama pandemi, kegiatan skrining pada kelompok masyarakat usia produktif yang bekerja terbatas.

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN TAHUN 2021			KETERANGAN
		SASARAN	CAPAIAN	%	
					Sebagai upaya meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif dengan meningkatkan integrasi program untuk meningkatkan skrining faktor risiko bagi pengunjung puskesmas usia produktif. Melaksanakan Posbindu PTM di masyarakat dan kelompok khusus dengan menerapkan protokol kesehatan dan memperhatikan kondisi dan kesiapan wilayah.
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	31.712	31.712	100	Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut antara lain integrasi program dengan kegiatan vaksinasi Covid-19 pada lansia, kunjungan rumah lansia khususnya lansia resiko dengan memperhatikan protokol kesehatan, serta adanya kegiatan bulan kesehatan lansia.
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	57.440	55.830	97,20	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi tahun 2021 mengalami kesenjangan sebesar 2,8% dibandingkan target. Permasalahan yang dihadapi pada Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi antara lain kurangnya kesadaran penderita hipertensi tentang pentingnya memeriksakan kesehatan secara rutin, belum optimalnya kerja sama dengan jejaring. Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi adalah meningkatkan KIE tentang hipertensi (bahaya hipertensi, pengobatan hipertensi, penyuluhan pola hidup sehat serta pentingnya memeriksakan kesehatan secara teratur), meningkatkan kerjasama dengan jejaring klinik dan Rumah Sakit untuk optimalisasi pencatatan dan pelaporan, pelaksanaan posbindu PTM dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	9.716	9.716	100	Capaian Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus tahun 2021 sebesar 100%, Seluruh penderita DM yang telah ditetapkan sebagai sasaran yaitu 9716 orang telah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan pada penderita DM adalah optimalisasi kegiatan dengan integrasi program, kunjungan rumah untuk pasien yang tidak kontak, meningkatkan kerjasama dengan jejaring untuk perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan.
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	923	923	100	Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat adalah

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN TAHUN 2021			KETERANGAN
		SASARAN	CAPAIAN	%	
					meningkatkan kualitas pencatatan pelaporan puskesmas, jejaring maupun rumah sakit, serta kerja sama lintas sektor dalam penanganan kasus penemuan orang dengan gangguan jiwa. Selain itu pendampingan dan pelayanan rutin dilakukan oleh puskesmas dan dokter spesialis jiwa.
11	Pelayanan kesehatan orang terduga TB	2.576	2.576	100	Capaian Pelayanan kesehatan orang terduga TB meningkat dibandingkan tahun sebelumnya pada tahun 2020 sebesar 48,55% dan pada tahun 2021 menjadi 100% ada peningkatan sebesar 61,45%. Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain meningkatkan kegiatan promosi kesehatan untuk penemuan pasien TB, sehingga semua terduga TB dapat ditemukan secara dini, meningkatkan skrining dan penemuan orang terduga TB diseluruh poli/layanan Puskesmas (integrasi program) dan Perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan TB di Jejaring, meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dalam optimalisasi peran kader PMO.
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> )	6.391	5.979	93,55	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV masih mengalami kesenjangan sebesar 6,45%. Permasalahan yang dihadapi antara lain Skrining HIV bagi kelompok beresiko termasuk skrining HIV untuk ibu hamil belum optimal. Upaya yang dilakukan antara lain mobile VCT dan bimbingan teknis program, peningkatan layanan HIV di Jejaring dan kel penjangkau dan melanjutkan kegiatan Workshop <i>Triple Elimination/Eliminasi</i> penularan <i>Human Immunodeficiency Virus, Sifillis</i> , dan Hepatitis bagi Praktek Mandiri Bidan.

#### d. Alokasi Anggaran

Dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM bidang kesehatan yang dilakukan setiap tahun perlu dukungan sumber daya keuangan khususnya anggaran yang berkaitan langsung dengan pencapaian setiap indikator SPM. Anggaran yang digunakan berasal dari beberapa sumber yaitu dari APBD Kota Cimahi, APBN melalui DAK Non Fisik (Bantuan Operasional Kesehatan). Total anggaran SPM Bidang Kesehatan yang sudah tertuang dalam dokumen perencanaan sebesar 5.012.355.500,- Rupiah. Uraian alokasi anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.125.**  
**Alokasi Anggaran SPM bidang Kesehatan Tahun 2021**

No	Indikator	Alokasi Anggaran SPM		Total
		Dinas Kesehatan APBD, APBN (BOK)	Puskesmas (BOK)	
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	146.633.200	391.249.500	537.882.700
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	1.736.796.800	34.346.900	1.771.143.700
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	78.293.000	33.028.200	111.321.200
4	Pelayanan kesehatan balita	98.222.700	503.550.900	601.773.600
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	14.300.000	353.904.000	368.204.000
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	238.991.400	-	238.991.400
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	68.232.500	138.200.000	206.432.500
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	103.670.000	99.479.200	203.149.200
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	103.670.000	69.325.000	172.995.000
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	171.222.900	59.840.000	231.062.900
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	232.719.300	52.075.000	284.794.300
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	216.230.000	68.375.000	284.605.000
	<b>TOTAL</b>	<b>3.208.981.800</b>	<b>1.803.373.700</b>	<b>5.012.355.500</b>

Berdasarkan Tabel terlihat bahwa tidak ada alokasi anggaran BOK Puskesmas untuk indikator Pelayanan kesehatan pada usia produktif, hal ini sesuai surat Menteri Dalam Negeri Nomor 906/3017/keuda hal : Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Non Fisik Bidang Kesehatan dan DAK NonFisik Dana BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan TA. 2021sesuai dengan Juknis dari Kementerian Dalam Negeri tentang Penyusunan Anggaran BOK Tahun 2021.



**e. Dukungan Personil**

Standar ketenagaan dalam penerapan SPM Bidang Kesehatan ditetapkan Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber Daya Manusia Kesehatan Terdiri dari :

- 1) Tenaga Kesehatan meliputi :
  - a) Dokter umum;
  - b) Dokter spesialis kebidanan;
  - c) Dokter spesialis penyakit dalam;
  - d) Dokter spesialis paru;
  - e) Dokter spesialis kulit dan kelamin;
  - f) Dokter spesialis kedokteran jiwa/psikiatri;
  - g) Bidan;
  - h) Perawat;
  - i) Gizi;
  - j) Tenaga kesehatan masyarakat;
  - k) Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM); dan
  - l) Penata Rontgen.
  
- 2) Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu:
  - a) Kader kesehatan;
  - b) Guru PAUD;
  - c) Dokter kecil/ *peer counselor*;
  - d) kader Kesehatan Remaja;
  - e) Pendamping; dan
  - f) Penjangkau.

**Tabel 2.126.**  
**Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber Daya Manusia Kesehatan dalam Penerapan SPM Tahun 2021**

NO	JENIS TENAGA	JUMLAH
<b>A. Tenaga Kesehatan</b>		
1	Dokter umum	409
2	Dokter spesialis kebidanan	24
3	Dokter spesialis penyakit dalam	31
4	Dokter spesialis paru	6
5	Dokter spesialis kulit dan kelamin	11
6	Dokter spesialis kedokteran jiwa	9
7	Bidan	205
8	Perawat	1468
9	Gizi	40
10	Tenaga kesehatan masyarakat	45
11	Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	107
12	Penata Rontgen	64
<b>B. Tenaga Non Kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi</b>		
1	Kader kesehatan	2505
2	Guru PAUD (SDIDTK)	352
3	Dokter kecil/ peer conselor	2297
4	kader Kesehatan Remaja	1583
5	Pendamping	2
6	Penjangkau	10

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cimahi 2021

Data Tenaga Kesehatan dalam penerapan SPM Bidang Kesehatan pada tabel di atas merupakan seluruh tenaga di Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas yang ada di wilayah kerja Kota Cimahi berdasarkan data SDM Kesehatan dari seksi SDM Kesehatan, Mutu pelayanan dan sarana prasarana Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Cimahi.

### **3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum**

Setiap Standar Pelayanan Minimal memiliki standar teknis masing-masing yang sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Standar teknis tersebut ditetapkan oleh Kementerian terkait dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri dan kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian terkait.

Arah kebijakan pembangunan daerah berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu urusan pemerintahan yang terdapat dalam permendagri ini adalah ada 6 urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar salah satunya Bidang Urusan Pekerjaan Umum.

**a. Jenis Pelayanan Dasar**

Jenis pelayanan dasar SPM Pekerjaan Umum yang jadi kewenangan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota sesuai Pasal 4 Ayat 2 huruf a dan Pasal 5 ayat (2) terdapat 2 Jenis Pelayanan Dasar, terdiri dari :

- 1) Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari; dan
- 2) Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.

**b. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari Hari**

Penyediaan air minum merupakan tugas konkuren, sehingga penyediaan air minum bagi masyarakat merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten Kota. Kewenangan Kabupaten/Kota terbatas terhadap pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari. Adapun Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar adalah sebagai berikut :

- 1) Pernyataan Standar

Nilai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum di tetapkan berdasarkan Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan SPAM bukan jaringan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota.

2) Pengertian

Kebutuhan pokok air minum sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan masak, mandi, cuci, peturasan dan ibadah.

3) Mekanisme Pelayanan

- Penetapan penerima pemenuhan pelayanan dasar Air Minum sehari – hari yaitu Rumah Tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum.

- Mutu Pelayanan Dasar

Target pencapaian SPM Sub Bidang Air Minum yang aman adalah melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi yang secara kuantitas dan kualitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan kebutuhan pokok minimal 60 lt/orang/hari dengan menyesuaikan pada penggunaan air di kawasan tersebut.

4) Target Capaian Kinerja SPM

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dalam memberikan pelayanan dasar air minum sehari – hari dengan menyesuaikan dengan kebutuhan penggunaan air di kawasan tersebut. Adapun formulasi perhitungan capaian layanan air bersih/minum adalah sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Rumah Tangga Terlayani}}{\sum \text{Rumah Tangga di Kabupaten/ Kota}} \times 100 \%$$

**c. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik**

Standar Pelayanan Minimal untuk Sub Urusan Air Limbah Domestik dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan akses pengolahan air limbah domestik bagi warga negara. Pelayanan pengolahan air limbah domestik dapat dilaksanakan oleh pemerintah

provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangannya.

Jenis pelayanan dasar air limbah domestik yang diberikan kepada warga negara dapat diberikan melalui dua cara yang terdiri dari :

- 1) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S); dan
- 2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).

Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar adalah sebagai berikut :

1) Pernyataan Standar

Nilai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum Sub Urusan Air Limbah Domestik dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan akses pengolahan air limbah domestik bagi warga negara. jumlah penduduk yang terlayani sistem pengelolaan air limbah baik Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) maupun Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).

2) Pengertian

Pelayanan pengolahan air limbah domestik adalah rangkaian layanan pengolahan air limbah domestik yang diberikan Pemerintah Daerah, mulai dari sumber sampai aman untuk dilepaskan ke lingkungan

3) Mekanisme Pelayanan

a) Penetapan penerima pemenuhan pelayanan dasar Air Limbah Domestik yaitu setiap rumah tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan air limbah domestik kabupaten/kota dengan memprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu yang berdomisili pada daerah rawan sanitasi dan dekat badan air; dan

b) Mutu Pelayanan Dasar.

4) Mutu pelayanan dasar pengolahan air limbah domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan pengolahan air limbah domestic.

a) Kuantitas Setiap rumah memiliki minimal satu akses

pengolahan air limbah domestik; dan

b) Kualitas Pelayanan Air Limbah Domestik Kualitas Pelayanan Air Limbah Domestik berdasarkan bentuk pelayanan pengolahan air limbah domestik terdiri dari :

- Kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui pelayanan akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih kecil dari 25 jiwa/Ha; dan
- Kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih besar dari 25 jiwa/Ha dan seluruh wilayah perkotaan.

#### 5) Target Capaian Kinerja SPM

Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan dasar Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik 76,78% untuk target capaian Pemerintah Daerah Kota Cimahi dan 100% untuk target capaian Pusat pada Tahun 2021.

Adapun formulasi perhitungan capaian layanan Air Limbah Domestik adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\text{Jumlah rumah di Kota}} \times 100 \%$$

#### d. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 29/PRT/M/2018 Tentang Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota, meliputi Sub

Bidang Air Minum pelayanan dasar Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari dan Sub Bidang Air Limbah dengan jenis pelayanan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah di Domestik pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi berusaha memenuhi target SPM tersebut.

**Tabel 2.127.**  
**Target SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2021**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	TAHUN 2021
		TARGET
1	Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	69,66%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah di Domestik	76,78%

**e. Realisasi**

**1) Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari**

SPM Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 29/PRT/M/2018. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi berusaha memenuhi target SPM tersebut. Realisasi sampai dengan Semester II Tahun 2021 Sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM direncanakan menghasilkan output pekerjaan berupa 9 dokumen jasa konsultasi perencanaan/ jasa konsultansi lainnya.

Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan pelaksanaannya direncanakan menghasilkan output pekerjaan Jumlah Kegiatan Optimalisasi/ Revitalisasi Sumur Artesis sebanyak 4 paket pada akhir tahun anggaran. Realisasi pada semester II menghasilkan 4 paket pekerjaan Optimalisasi/ revitalisasi sumur artesis dimana jumlah sumur yang teroptimalisasi adalah sebanyak 5 Sumur Artesis.

Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan direncanakan menghasilkan output Panjang Jaringan Pipa Distribusi sepanjang 3580 meter dan Jumlah SR yang terpasang sebanyak 277 SR. Saat ini realisasi terhadap target capaian tersebut belum tercapai dikarenakan adanya pemutusan kontrak pada pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi ke Rusunawa Melong dengan progres pekerjaan sebesar 84,99%, sedangkan untuk pemasangan SR sebanyak 277 sudah tercapai 100%.

Sub Kegiatan Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM telah 100% selesai dilaksanakan. Output yang harus dihasilkan yaitu Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelola SPAM sebanyak 1 Kegiatan. Saat ini realisasi terhadap target capaian tersebut sudah tercapai, telah dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis kepada 62 KP2A Kota Cimahi.

*Output* yang harus dihasilkan pada Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan perkotaan yaitu terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebanyak 4.260 SR dan terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebanyak 1 SPAM. Saat ini realisasi terhadap target capaian tersebut sudah tercapai.

## **2) Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah di Domestik**

SPM Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Limbah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 29/PRT/M/2018. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi berusaha memenuhi target SPM tersebut. Realisasi sampai dengan Semester II Tahun 2021 Sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota direncanakan menghasilkan output pekerjaan berupa 8 dokumen jasa konsultasi perencanaan/ jasa konsultasi



lainnya pada akhir tahun anggaran namun pelaksanaan pada Semester II Tahun 2021 ada dua buah dokumen perencanaan/ dokumen kajian yang tidak direalisasikan.

Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman pelaksanaannya direncanakan menghasilkan output pekerjaan 7 SPALD-T skala permukiman dengan jumlah SR yang dipasang sebanyak 490 SR pada akhir tahun anggaran. Realisasi pada semester II menghasilkan 7 Buah SPALD-T yang dibangun dan 539 SR Terpasang

Sub Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman direncanakan menghasilkan output 6 unit MCK yang direhabilitasi dan 4 unit SPALD-T yang direhabilitasi. Saat ini realisasi terhadap target capaian tersebut adalah 5 Lokasi MCK dengan total 10 Ruang MCK terbangun dan 4 SPALD-T SAIIG yang dioptimalisasi /rehabilitasi dengan penambahan 4 Buah Rumah beserta instalasinya. Untuk sub kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik telah 100% selesai dilaksanakan oleh Program SANIMAS DAK dan SANIMAS Citarum, untuk Sub Kegiatan Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik tidak dilaksanakan karena tingginya kondisi Pandemi COVID-19 dan pemberlakuan PPKM darurat oleh pemerintah pusat sehingga pendanaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak dilanjutkan Ke KPPN. Kemudian untuk Sub kegiatan terakhir yang berda pada Seksi Air Limbah yaitu Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman selesai dilaksanakan 100% sesuai dengan pekerjaan fisik yang dilaksanakan pada akhir semester II. Namun sub kegiatan supervisi juga didalamnya dilakukan pekerjaan uji efluen IPAL yang telah dibangun, dengan realisasi dilaksanakan terhadap 40 sampel efluen IPAL.

Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Air Limbah Domestik dilakukan kepada 15 Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kawasan yang sudah terbangun sampai dengan 2019 sebanyak 3 sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kawasan yang dipelihara sejak pertengahan dari kolektor pelaksana sudah habis.

Selain Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah domestik Terpusat Skala Kawasan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman juga melaksanakan Penyedotan Kakus untuk septik tank individual dan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kawasan lainnya yang dibangun oleh pemerintah maupun oleh masyarakat dengan bantuan dana pemerintah serta dibangun oleh swasta.

Selain melayani penyedotan kakus individual di rumah-rumah sejak tahun 2019 juga sudah ada beberapa perusahaan, sekolah dan kantor yang dilakukan penyedotan kakusnya oleh UPTD SPALD.

Pelaksanaan Pemeliharaan dilakukan pada 15 titik SPALD terpusat yang dibangun dengan bantuan anggaran dari SAIIG, *continue* setiap bulan meskipun dengan corona virus yang membatasi gerak semua warga. Hanya saja dilokasi yang ada warga yang positif terjangkit virus, pemeliharaan ditunda beberapa hari sampai dirasa aman. Karena meskipun tidak ada laporan yang menyatakan bahwa ada warga yang terjangkit virus ini karena bersentuhan dengan air limbah domestik dari penderita, namun kekhawatiran secara psikologis dari petugas menjadi perhatian yang serius agar tidak mengganggu kinerja UPTD SPALD.

Hal yang tidak bisa dilakukan 100% adalah pengambilan sampel air limbah yang seharusnya setiap bulan namun karena adanya keterbatasan gerak saat PSBB, maka beberapa bulan pengambilan sampel dilaksanakan yaitu bulan Juni dan Juli 2021, sampai petugas pengambil sampel menyatakan mereka bisa kembali bekerja dengan aman. Dan pengambilan sampel inlet pada 3 bulan pertama

tahun 2021 tidak dilakukan karena Laboratorium Lingkungan hidup Kota Cimahi tidak sanggup melaksanakan sehubungan dengan assemen yang sedang dilakukan pasda laboratorium tersebut oleh karena pada triwual II mulai dilaksanakan pengambilan di inlet hanya saja dari 15 titik setiap bulan hanya diambil 5 titiik yang bgerbeda sehingg keseluruhan inlet rencananya diambil sampelnya . Namun karena petugas khawatir karena paparan virus corona maka pada bulan Juni Dan Juli tidak dilakukan pengambilan sampel sama sekali. Mulai bulan Agustus baru pengambilan dibagi menjadi 2 hari namun seluruh sampel inlet dan *outlet* diambil setiap bulan, Untuk layanan penyedotan karena sangat tergantung pada anggaran pembayaran IPLT ke PDAM Kota Bandung, maka jika anggaran untuk pembayaran ke PDAM habis maka dengan terpaksa UPTD SPALD tidak bisa melayani penyedotan kakus. Dan pada awal Desember 2021, sisa anggaran untuk pembayaran ke IPLT Kota Bandung hanya cukup untuk membayar 21 kali penyedotan. Dan UPTD SPALD sudah memiliki pelanggan tetap yaitu PT.Sanbe terelenih dahulu jika pada akhir bulan Desember masih ada sisa anggaran untuk pembayaran ke IPLT Kota Bandung, maka penyedotan bisa dilakukan sebanyak sisa anggaran pembuangannya.

**Tabel 2.128.**  
**Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2021**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	TAHUN 2021	
		TARGET	CAPAIAN
1	Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	69,66%	89,79%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah di Domestik	76,78%	80,55%

**f. Alokasi Anggaran**

**1) Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari**

Dalam pelaksanaan penerapan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum yang meliputi Sub Bidang Air Minum dengan Pelayanan Dasar Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari yang dilakukan setiap tahun dikelola Seksi Air Bersih beserta BLUD Air Minum pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi di Tahun 2021 mengelola Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum dengan Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 6 (Enam) Sub Kegiatan, perlu dukungan sumber daya keuangan khususnya anggaran yang berkaitan langsung dengan pencapaian setiap indikator SPM.

Anggaran yang digunakan sebagian besar bersumber dari APBD Kota Cimahi, DAK dan Sisa DAK. Jumlah anggaran yang telah dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian SPM tersebut sebesar Rp.10.052.368.319,00 (Sepuluh Milyar Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah) Berikut tabel mengenai anggaran untuk program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan upaya pencapaian SPM Sub Bidang Air Minum, dapat dilihat pada Tabel dibawah :

**Tabel 2.129.**

**Anggaran untuk Urusan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum 2021**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum	Penyusunan Rencana, Kebijakan Strategi dan Teknis SPAM	1.370.476.971
2	Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sisem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/ Perbaikan SPAM	270.000.000
3		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	760.000.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
4		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	3.546.800.348
5		Pengembangan Kelembagaan SPAM SDM dan Pengelolaan	139.900.000
6		Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	3.965.191.000
<b>Jumlah</b>			<b>10.052.368.319,00</b>

## 2) Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah di Domestik

Dalam pelaksanaan penerapan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum yang meliputi Sub Bidang Air Limbah dengan Pelayanan Dasar Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah di Domestik yang dilakukan setiap tahun dikelola Seksi Air Limbah beserta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi di Tahun 2021 mengelola Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah dengan Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 7 (Tujuh) Sub Kegiatan, perlu dukungan sumber daya keuangan khususnya anggaran yang berkaitan langsung dengan pencapaian setiap indikator SPM.

Anggaran yang digunakan sebagian besar bersumber dari APBD Kota Cimahi, DAK dan Sisa DAK. Jumlah anggaran yang telah dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian SPM tersebut sebesar Rp. 8.870.515.792,00 (Delapan Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Sembulan Puluh Dua Rupiah). Berikut tabel mengenai anggaran untuk program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan upaya pencapaian SPM Sub Bidang Air Limbah, dapat dilihat pada Tabel 2.13 sebagai berikut :

**Tabel 2.130.**  
**Anggaran untuk Urusan Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Limbah Domestik pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum 2021**

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.592.235.300,00	APBD
2			Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	764.604.754,00	APBD
3			Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	0,00	
4			Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	35.000.000,00	APBD
5			Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	157.880.000,00	APBD
6			Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	4.530.940.338,00	APBD & DAK
7			Operasi Dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (UPT ALD)	1.789.855.400,00	APBD
<b>Jumlah</b>				<b>8.870.515.792,00</b>	

**Tabel 2.131.**  
**Realisasi Anggaran untuk Urusan Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Limbah Domestik pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum 2021**

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	Fisik %
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.592.235.300	732.102.150	75
2			Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	764.604.754	474.305.736	100

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	Fisik %
3		Air Limbah Domestik	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	0	-	-
4			Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	35.000.000	35.000.000	100
5			Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	157.880.000	102.113.000	100
6			Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	4.530.940.338	3.719.969.100	100
7			Operasi Dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (UPT ALD)	1.789.855.400	1.586.707.881	96,12
<b>Jumlah</b>				<b>8.870.515.792</b>	<b>6.650.197.867</b>	<b>95,19</b>

#### **g. Dukungan Personil**

##### **1) Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari**

Dalam melaksanakan SPM Bidang Pekerjaan Umum yang meliputi Sub Bidang Air Minum dengan Pelayanan Dasar Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari di Kota Cimahi baik secara langsung maupun tidak langsung akan melibatkan berbagai pihak, antara lain ASN di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, lintas SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, dan pihak lainnya.

Bila dibandingkan dengan standar jumlah pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang seharusnya, masih ada beberapa kesenjangan, baik itu yang di BLUD Air Minum maupun di seksi Air Bersih Bidang Sarana Prasarana. Masih terjadi pengerjaan beban kerja rangkap, dimana petugas tetap harus mengerjakan tugas fungsional sebagai petugas operasional maupun pelaksanaan tugas administrasi lainnya. Jumlah tenaga

berdasarkan kualifikasi Pendidikan dan posisi pada Seksi Air Bersih dan BLUD Air Minum Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.132.**  
**Tenaga untuk Urusan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari**

NO	JENIS TENAGA	TAHUN
		2021
<b>I</b>	<b>Strata II</b>	
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1
2	Tenaga Ahli	-
3	Tenaga Harian Lepas	1
<b>II</b>	<b>Strata I</b>	
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	10
2	Tenaga Ahli	-
3	Tenaga Harian Lepas	2
<b>III</b>	<b>Diploma III</b>	
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1
2	Tenaga Ahli	-
3	Tenaga Harian Lepas	1
<b>IV</b>	<b>SLTA</b>	
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	2
2	Tenaga Ahli	-
3	Tenaga Harian Lepas	16
	Jumlah	34

## 2) Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah di Domestik

Dalam melaksanakan SPM Bidang Pekerjaan Umum yang meliputi Sub Bidang Air Limbah dengan Pelayanan Dasar Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah di Domestik di Kota Cimahi baik secara langsung maupun tidak langsung akan melibatkan berbagai pihak, antara lain ASN di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, lintas SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, dan pihak lainnya.

Bila dibandingkan dengan standar jumlah pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi yang seharusnya, masih ada beberapa kesenjangan, baik itu yang di UPTD SPAL maupun di Seksi Air Bersih Bidang Sarana Prasarana.



Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi masih terjadi pengerjaan beban kerja rangkap, dimana petugas tetap harus mengerjakan tugas fungsional sebagai petugas operasional maupun pelaksanaan tugas administrasi lainnya. Jumlah tenaga berdasarkan kualifikasi Pendidikan dan posisi pada Seksi Air Limbah dan UPTD SPALD Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.133.**  
**Tenaga untuk Urusan Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Limbah Domestik**

No	Jenis Tenaga	Tahun
		2021
<b>I</b>	<b>Strata II</b>	
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1
2	Tenaga Ahli	-
3	Tenaga Harian Lepas	-
<b>II</b>	<b>Strata I</b>	
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	4
2	Tenaga Ahli	-
3	Tenaga Harian Lepas	8
<b>III</b>	<b>Diploma III</b>	
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	-
2	Tenaga Ahli	-
3	Tenaga Harian Lepas	1
<b>IV</b>	<b>SLTA</b>	
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	-
2	Tenaga Ahli	-
3	Tenaga Harian Lepas	12
	Jumlah	26

#### 4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

##### a) Jenis Pelayanan Dasar

Setiap Standar Pelayanan Minimal memiliki standar teknis masing-masing yang sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Sosial dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Standar teknis tersebut

ditetapkan oleh Kementerian terkait dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri dan kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian terkait.

Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut :

**1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota**

Standar Pelayanan Minimal untuk Sub Urusan Perumahan Rakyat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi ketersediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana. Pelayanan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dapat dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangannya. Adapun Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar adalah sebagai berikut :

a) Pernyataan Standar

Nilai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Perumahan Rakyat di tetapkan berdasarkan Jumlah unit rumah yang rusak akibat bencana yang akan direhabilitasi terhadap Rencana total unit rumah yang akan direhabilitasi yang rusak akibat bencana pada tahun di seluruh kabupaten/kota.

b) Pengertian

Penyediaan rumah merupakan kegiatan menyediakan unit rumah yang memenuhi kriteria layak huni dilaksanakan melalui rehabilitasi rumah yang terkena dampak bencana, Rehabilitasi rumah korban bencana merupakan kegiatan

perbaikan terhadap rumah yang mengalami rusak ringan dan sedang.

c) Mekanisme Pelayanan

- Penetapan penerima pemenuhan Pelayanan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana yaitu Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan dan sedang, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni; dan

- Mutu Pelayanan Dasar

Target pencapaian SPM Sub Perumahan rakyat adalah Mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, baik bencana provinsi maupun kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.

d) Target Capaian Kinerja SPM

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan Pelayanan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana terealisasi sebesar 14 rumah dari target 32 rumah yang rusak akibat bencana yang akan direhabilitasi pada tahun 2021.

Adapun formulasi perhitungan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n}}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n}} \times 100 \%$$

**2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.**

**a) Target Pencapaian SPM oleh Daerah**

Target pencapaian SPM bidang perumahan rakyat adalah melalui penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Dalam kurun waktu sampai dengan Semester II Tahun 2021 pencapaian target SPM belum terpenuhi secara maksimal, dikarenakan tidak semua rumah yang roboh/terkena bencana masuk kedalam kategori bencana alam yang mendapat rekomendasi dari BPBD untuk diperbaiki oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi melalui Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana.

Akan tetapi sampai dengan Semester II Tahun 2021, untuk pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat dilakukan oleh Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi melakukan rehabilitasi perbaikan rumah tidak layak huni untuk masyarakat yang rumahnya terkena bencana alam yang tidak mendapatkan rekomendasi BPBD untuk rumah yang terkena bencana. Dilakukan melalui Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang sifatnya hanya fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu dan berpenghasilan rendah.

Target SPM Bidang Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2021, sebagaimana tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.134.****Target SPM Urusan Perumahan Rakyat Kota Cimahi Tahun 2021**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana	Jumlah Warga Kota Cimahi korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap Tahun
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi	Jumlah Warga Kota Cimahi yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap Tahun

**b) Realisasi**

Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota

SPM Perumahan Rakyat yang jadi kewenangan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota. Untuk capaian SPM rehabilitasi rumah bagi korban bencana, tidak semuanya rumah yang terkena bencana mendapatkan rekomendasi dari BPBD sehingga mempengaruhi sasaran serta *outcome* dari sub kegiatan rehabilitasi rumah bagi korban bencana sehingga tidak sesuai dengan capaian yang ada di kota Cimahi. Dari yang di targetkan 32 rumah yang terealisasi pada tahun 2021 sebesar 14 rumah dengan persentasi 43%.

Sedangkan untuk SPM relokasi rumah bagi korban bencana tidak dapat memenuhi sasaran dan *outcome*-nya,

dikarenakan tidak ada program serta sub kegiatan yang mendukung untuk pencapaian SPM relokasi rumah bagi korban bencana.

Berikut adalah tabel yang menunjukkan Realisasi SPM Bidang Perumahan Rakyat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi sampai dengan Semester II Tahun 2021 :

**Tabel 2.135.**  
**Capaian SPM Bidang Perumahan dan Permukiman**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Tahun 2021		
		Target	Capaian	Persentase
1	Jumlah Warga Negara berkorban bencana yang memperoleh rumah layak huni	32 Rumah	14 Rumah	43 %
2	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	-	-	-

### 3) Alokasi Anggaran

Dalam pelaksanaan penerapan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat yang meliputi Sub Bidang Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota dan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan setiap tahun dikelola Seksi Pengendalian Dan Penataan Perumahan dan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi di Tahun 2021 mengelola Program Pengembangan Perumahan Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.

Anggaran yang digunakan sebagian besar bersumber dari APBD Kota Cimahi. Jumlah anggaran yang telah dialokasikan

untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam upaya pencapaian SPM tersebut sebesar Rp. 598.508.500,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah). Berikut tabel mengenai anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang berkaitan langsung dengan upaya pencapaian SPM. Bidang Perumahan Rakyat Sub Bidang Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

**Tabel 2.136.**  
**Anggaran untuk pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat untuk Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni**

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber anggaran
1	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	547.802.500,00	APBD
2			Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	50.706.000,00	APBD
<b>Jumlah</b>				<b>598.508.500,00</b>	

**Tabel 2.137.**  
**Realisasi Anggaran untuk pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat untuk Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni**

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)
1	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	547.802.500	250.623.950	46,12
2			Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	50.706.000	15.216.300	30,01
<b>Jumlah</b>				<b>598.508.500</b>	<b>265.840.250</b>	<b>44,75</b>

#### 4) Personil

Dalam melaksanakan SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di kota Cimahi baik secara langsung maupun tidak langsung akan melibatkan berbagai pihak, antara lain ASN di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, lintas SKPD di lingkungan pemerintah Kota Cimahi, kelurahan, kecamatan dan pihak lainnya.

Bila dibandingkan dengan standar jumlah pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang seharusnya, masih ada beberapa kesenjangan, antara lain terjadi pengerjaan beban kerja rangkap, dimana petugas tetap harus mengerjakan tugas fungsional sebagai petugas operasional maupun pelaksanaan tugas administrasi lainnya.

**Tabel 2.138.**  
**Personil untuk Urusan Perumahan Rakyat**

No	Jenis Tenaga	Tahun 2021
<b>I</b>	<b>Strata II</b>	
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1
2	Tenaga Ahli	-
3	Tenaga Harian Lepas	-
<b>II</b>	<b>Strata I</b>	
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	-
2	Tenaga Ahli	-
3	Tenaga Harian Lepas	4
<b>III</b>	<b>Diploma III</b>	
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	-
2	Tenaga Ahli	-
3	Tenaga Harian Lepas	-
<b>IV</b>	<b>SLTA</b>	
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	-
2	Tenaga Ahli	-
3	Tenaga Harian Lepas	3
	<b>Jumlah</b>	<b>8</b>



## **5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Implementasi kebijakan penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat. Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah guna memastikan program dan anggaran daerah diprioritaskan untuk menjamin terpenuhinya hak konstitusional setiap Warga Negara.

### **a. Jenis Pelayanan Dasar**

#### **1) Sub Urusan Bencana**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018, pemerintah daerah kabupaten/kota wajib menyediakan tiga jenis pelayanan dasar dalam penanggulangan bencana kepada setiap warga negara secara minimal, sebagai berikut :

- a) Pelayanan Informasi Rawan Bencana, yaitu pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana secara terperinci berbasis kajian risiko bencana kepada warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Salah satu layanan yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana yaitu untuk lebih memahami berbagai ancaman bencana yang ada di wilayahnya, bagaimana cara mengurangi ancaman (*hazards*) dan kerentanan (*vulnerability*) yang dimiliki, serta meningkatkan kemampuan (*capacity*) dalam menghadapi ancaman/dampak bencana;
- b) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, yaitu serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan warga negara dalam menghadapi bencana. Salah satu layanan yang dilakukan adalah pelaksanaan gladi kesiapsiagaan bencana bagi warga negara dalam bentuk simulasi dan gladi lapang sesuai

dengan Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontinjensi yang telah disusun; dan

- c) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana. Salah satu layanan yang dilakukan adalah memberikan layanan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.

## **2) Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kebakaran**

Pelaksanaan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten /Kota yang diampuh oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemdam Kebakaran terdapat 2 jenis pelayanan dasar, yaitu :

- a) Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum; dan
- b) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

## **b. Target Pencapaian SPM Urusan Trantibumlinmas**

### **1) Sub Urusan Bencana**

Target SPM Sub Bidang Kebencanaan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut :

**Tabel 2.139.**  
**Target Capaian SPM Urusan Trantibumlinmas**  
**Bidang Kebencanaan**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%
2.	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
3.	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%

**2) Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kebakaran**

**Tabel 2.140.**  
**Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman,**  
**Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%
2.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran oleh Pemadam Kebakaran I + Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran oleh kelompok relawan (Balakar, dan atau lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan II	100%

**c. Realisasi**

**1) Sub Urusan Bencana.**

Berikut Perbandingan capaian target SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 :

**Tabel 2.141.**  
**Realisasi SPM Sub Bidang Kebencanaan Tahun 2021**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	TAHUN 2021		
		SASARAN	CAPAIAN	%
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	505.601	505.601	100%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	TAHUN 2021		
		SASARAN	CAPAIAN	%
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%

## 2) Pelayanan informasi rawan bencana

Penetapan sasaran/target pada jenis pelayanan informasi rawan bencana hal tersebut berdasarkan Data Penduduk Semester II dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi Tahun 2021 adalah sebesar 505.601 Jiwa, dari total Jumlah Penduduk Kota Cimahi sebanyak 560.746 Jiwa, karena sebanyak 55.145 Jiwa merupakan penduduk dengan rentang usia 0 s.d 5 tahun dimana pada usia tersebut belum dapat menerima informasi secara optimal. Berdasarkan Dokumen Rencana Penggulangan Bencana Kota Cimahi sebagai berikut :

- a) Indeks Risiko Bencana Banjir Kota Cimahi, Masyarakat yang tinggal di Wilayah Rawan Bencana Banjir sejumlah 313.305 Jiwa, tersebar di 8 Kelurahan, 5 kelurahan (Kel. Padasuka, Kel. Cimahi, Ke. Cipageran, Kel. Setiamanah, Kel. Baros) termasuk kategori risiko sedang dan 3 kelurahan (Kel. Cibabat, Kel. Melong, Kel. Cigugur Tengah) termasuk kategori risiko tinggi.
- b) Indeks Risiko Bencana Tanah Longsor Kota Cimahi 245.629 Jiwa. Tersebar di 6 Kelurahan, 3 kelurahan (Kel. Cibabat, Kel. Melong, Kel. Setiamanah) termasuk kategori risiko sedang, 3 kelurahan (Kel. Cipageran, Kel.Padasuka, Kel.Cimahi) termasuk kategori risiko tinggi.
- c) Indeks Risiko Bencana Gempa bumi Kota Cimahi 463.376 Jiwa, Tersebar di 13 Kelurahan, 10 kelurahan (Kel. Pasirkaliki, Kel. Cibeber, Kel. Cibeureum, Kel. Cipageran, Kel. Leuwigajah, Kel. Utama, Kel. Baros, Kel. Cigugur Tengah, Kel. Karang Mekar, Kel. Melong) termasuk kategori risiko sedang, 3 kelurahan (Kel. Padasuka, Kel.Setiamanah, Kel.Cimahi) termasuk kategori risiko tinggi.

Capaian SPM untuk indikator Pelayanan informasi rawan bencana sampai dengan tahun 2021 adalah 100% atau diasumsikan sebanyak 505,601 Jiwa telah mendapatkan Pelayanan informasi rawan bencana. Untuk mencapai target Pelayanan informasi rawan bencana tersebut kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 adalah :

- a) Kegiatan Pembentukan Katana Tahun 2021, sudah dilaksanakan di 4 kelurahan terdiri dari Kelurahan Padasuka, Setiamanah, Karang mekar, Cimahi dan Baros;
- b) Sosialisasi Potensi Bencana Kekeringan, 85 Org terdiri dari (Relawan, LPM, Lembaga Masyarakat, Komunitas), tgl.9 Juni *Technopark*;
- c) Pelaksanaan Hari Kesiapsiagaan Bencana Tingkat Kota Cimahi, dengan melaksanakan himbauan partisipasi pelaksanaan simulasi sederhana melalui surat edaran ke seluruh stakeholders Cimahi (Instansi Vertikal, SKPD/Kecamatan/Kelurahan, TNI/POLRI, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Rumah Sakit/Puskesmas, Perbankan/Media Cetak/Elektronik), Pemasangan Baligho di 6 lokasi strategis (Pemkot Cimahi, Halaman Parkir BPBD, Alun-Alun Kota Cimahi, Perempatan Leuwigajah, Perempatan Citeureup, Akses Tol Baros) serta himbauan partisipasi pelaksanaan simulasi sederhana kepada seluruh masyarakat Kota Cimahi melalui media sosial (Instagram);
- d) Kegiatan Sekolah/Madarasah Aman Bencana (SMAB) / Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Pelaksanaan Kegiatan Sekolah/Madarasah Aman Bencana (SMAB) / Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di Kota Cimahi Tahun 2021 dilaksanakan di 3 lokasi sekolah terdiri dari SMPN. 6 Cimahi, SMAN. 5 Cimahi dan SMKN.1 Cimahi pada kegiatan SMAB/SPAB ini terdiri dari kegiatan pemasangan rambu jalur evakuasi bencana dan pelaksanaan simulasi bencana

melibatkan guru, siswa, aparat BPBD dan tenaga pendukung lainnya;

- e) Pelaksanaan Pembentukan Relawan Bencana Kota Cimahi merupakan upaya Pemerintah Kota Cimahi dalam Maksud Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota, Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana), Pekerjaan Pembentukan Relawan Bencana Kota Cimahi ini adalah meningkatkan keterlibatan dan peran serta relawan dalam kegiatan penanggulangan bencana. Peserta adalah Relawan yang sebelumnya telah lolos pada tahap validasi dalam pendaftaran relawan bencana kota cimahi berjumlah 552 orang terdiri dari perwakilan dari RW seluruh Kelurahan di Kota Cimahi;
- f) Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi Dan Koordinasi Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana sebagai bentuk Implementasi dari Pengoordinasian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh sebagaimana diatur dalam peraturan maupun Perundang-Undangan. Peserta kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kota Cimahi Tahun 2021 terdiri dari unsur : Instansi/Lembaga, TNI/Polri/Kejati, Rumah Sakit, Dunia Usaha, Organisasi dan Komunitas dengan jumlah peserta sebanyak 70 (Tujuh Puluh) Orang;
- g) Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Potensi Bencana Kekeringan Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan di Cimahi *Techno Park Convention Hall* pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021. Kegiatan ini dihadiri oleh 85 orang Peserta dari organisasi dan komunitas masyarakat serta dihadiri juga oleh undangan dari perwakilan OPD; dan
- h) Pemasangan rambu jalur evakuasi bencana di beberapa lokasi yaitu, Kantor Kelurahan Baros, Kantor Kelurahan Padasuka,

Kantor Kecamatan Cimahi Tengah, SMPN. 6 Cimahi, SMAN. 5 Cimahi dan SMKN.1 Cimahi.

**3) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.**

Capaian SPM untuk indikator Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sampai dengan tahun 2021 adalah 100%. Untuk mencapai target Pelayanan informasi rawan bencana tersebut kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 adalah :

- a) Telah disusunnya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kota Cimahi Tahun 2018-2023;
- b) Telah disusunnya Dokumen Rencana Kontijensi Gempa;
- c) Telah disusunnya Dokumen Mitigasi Bencana Banjir;
- d) Telah disusunnya Dokumen Mitigasi Longsor;
- e) Telah dibuat Peta Rawan Bencana di Kota Cimahi;
- f) Terlaksananya Gladi kesiapsiagaan dengan melaksanakan simulasi bencana baik indoor maupun *outdoor*;
- g) Terlaksananya Kegiatan Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
- h) Terlaksananya Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota di muat bahwa sub kegiatan pada Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana terdiri dari 6 sub kegiatan yang wajib dilaksanakan yaitu terdiri dari :

- a) Penyusunan rencana penanggulangan bencana;
- b) Pembuatan rencana kontinjensi (renkon);
- c) Pelatihan pencegahan dan mitigasi;
- d) Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;
- e) Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana; dan

- f) Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

Dari 6 komponen sub kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana tersebut, BPBD Kota Cimahi sampai dengan Tahun 2021 telah melaksanakan seluruh komponen sub kegiatan walaupun dalam pelaksanaannya belum berjalan secara optimal karena keterbatasan alokasi anggaran yang tersedia pada APBD Kota Cimahi dan kondisi pandemi Covid-19 terutama pada masa PPKM dan PPKM Darurat yang tidak memungkinkan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan masyarakat secara tatap muka dalam jumlah banyak dan penerapan protokol kesehatan.

**4) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.**

Capaian SPM untuk indikator Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sampai dengan tahun 2021 adalah 100% atau sebanyak 536 KK terdiri dari 1983 Jiwa terdampak yang terlayani. Untuk mencapai target Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana tersebut kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 adalah pelaksanaan penanggulangan bencana, assesment lapangan dan pendistribusian bantuan logistik di lokasi kejadian bencana. Dari 78 kejadian bencana yang terjadi dari bulan januari s.d Desember 2021 terdapat korban jiwa sebanyak 1983 Jiwa yang terdampak bencana di Kota Cimahi dan seluruhnya mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi.

**5) Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kebakaran.**

**Tabel 2.142.**

**Realisasi SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN TAHUN 2021		
		SASARAN	CAPAIAN	%
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	15 Pengaduan	15 Pengaduan	100
2	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	60 Kejadian	54 Kejadian yang respon time	90



Capaian SPM semester II tahun 2021 untuk indikator pelayanan ketentraman dan ketertiban umum adalah 100% atau sebanyak 10 (Sepuluh) pengaduan yang dapat diselesaikan dari 10 (Sepuluh) pengaduan yang masuk. Berikut Grafik capaian SPM Pelayanan Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat tahun 2019-2021.

Capaian indikator pelayanan ketentraman dan ketertiban umum pada semester II tahun 2021 sebesar 100% dari target 100%, hal ini terjadi karena capaian pada semester I di tahun 2021 terdapat 1 data pengaduan yang tidak terselesaikan dari 9 data pengaduan yang masuk.

Capaian indikator pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran tahun 2020 sebesar 90,24 % atau sebanyak 37 Kejadian Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan evakuasi Korban dan terdampak kebakaran di Kota Cimahi Tahun 2020 dalam tingkat waktu tanggap (Respon Time) yaitu selama 15 menit dihitung dari penerimaan laporan Kejadian yang dilakukan oleh Petugas Pemadam Kebakaran dari 41 Kejadian kebakaran di Kota Cimahi Tahun 2020, sedangkan capaian indikator pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sampai dengan semester II tahun 2021 sebesar 90% atau sebanyak 60 kejadian layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kota Cimahi diantaranya 56 kejadian dalam Kota dan 6 Kejadian diluar Kota Cimahi.sampai dengan semester II Tahun 2021 dalam tingkat waktu tanggap (Respon Time) yaitu selama 15 menit dihitung dari penerimaan laporan Kejadian yang dilakukan oleh Petugas Pemadam Kebakaran dari 54 Kejadian kebakaran di Kota Cimahi Tahun 2021.

Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban Kebakaran pada semester II Tahun 2021 sebesar 90,07 % dari target 100%, hal ini karena terpenuhinya 54 kejadian kebakaran pada waktu tanggap atau kurang dari sama dengan 15 menit dari total 60 kejadian

kebakaran di kota cimahi. Dan 6 Kejadian perbantuan Luar Kota Cimahi.

**d. Anggaran**

**1) Sub Urusan Bencana**

Total Pagu anggaran total BPBD Kota Cimahi Tahun 2021 adalah Rp. 7.468.557.860 (Tujuh Milyar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) sedangkan alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana pada BPBD Kota Cimahi adalah bersumber dari APBD *Kota Cimahi sebesar Rp.2.759.794.200* (Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah). Program dan kegiatan yang menunjang pada penerapan SPM adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.143.  
Anggaran Penerapan SPM usrusan**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>2.759.794.200</b>
<b>1.</b>	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>776.119.000</b>
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	776.119.000
<b>2.</b>	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>1.006.756.300</b>
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	233.576.000
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	41.030.000
	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	118.532.500
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	421.441.000
	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	192.176.800
<b>3.</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>976.918.900</b>
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	976.918.900

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa belum semua sub kegiatan yang terdapat pada SPM bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan belum optimalnya anggaran yang tersedia karena keterbatasan

anggaran APBD dan tidak ada sumber anggaran dari bantuan Provinsi maupun DAK.

**2) Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kebakaran**

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung yang ditetapkan pada APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM urusan Bidang bidang ketentraman umum dan perlindungan masyarakat oleh Pemerintah Kota Cimahi. Adapun besaran anggaran dalam rangka penerapan SPM bidang ketentraman umum dan perlindungan masyarakat tahun 2021 sebagai berikut :

**Tabel 2.144.**  
**Besaran Anggaran Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**

No	Kegiatan	Volume Kegiatan	Jumlah Anggaran
1	Penertiban Pedagang Kaki Lima	10 Kegiatan	22.000.000
2	Penanganan Unjuk Rasa	12 Kegiatan	15.000.000
3	Penertiban bangunan liar	2 kegiatan	54.560.000
4	Layanan kerugian Materiil	1 paket	30.000.000
5	Layanan pengobatan akibat cedera fisik	1 paket	30.000.000
6	Penyuluhan ketentraman dan ketertiban	2 kegiatan	14.250.000
7	Sidang Tindak Pidana Ringan	10 kegiatan	127.900.000
8	Bintek Peningkatan kapasitas PPNS dan Penegak Perda	60 orang	10.770.000
9	Patroli siaga kebakaran dan penyelamatan korban	2 kali/hari	920.640.000
10	Pengendalian kebakaran	1 tahun	251.308.600
11	Pemeliharaan sarpras penyelamatan dan evakuasi lainnya	2 set	23.600.000
12	Sosialisasi dan edukasi masyarakat siaga kebakaran	5 kegiatan	73.202.000
<b>TOTAL ANGGARAN SPM</b>			<b>1.573.230.600</b>

Secara umum alokasi anggaran dalam rangka pencapaian SPM urusan bidang ketentraman umum dan perlindungan masyarakat Pemerintah Kota Cimahi di tahun 2021 sangat terbatas di bandingkan dengan kebutuhan operasional di lapangan. Namun pelayanan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat terus diupayakan secara optimal dengan memperhatikan tingkat keseriusan gangguan yang terjadi. Alokasi dalam rangkaian pencapaian SPM akan terus ditingkatnya di tahun tahun berikutnya.

## **e. Dukungan Personil**

### **1) Sub Urusan Bencana**

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi didukung oleh sumber daya manusia yang berstatus sebagai pegawai berjumlah 36 orang terdiri dari 15 orang ASN dan 21 orang Non ASN yang bertugas menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jabatan dan tanggung jawab masing-masing.

Dalam melaksanakan penanggulangan bencana di Kota Cimahi, Pemerintah Kota Cimahi bersinergi dengan berbagai *stakeholders* dan relawan yang membantu melaksanakan penanggulangan bencana manakala terjadi bencana. Relawan tersebut di antaranya terdiri dari Relawan Bencana Kota Cimahi, FPRB Kota Cimahi, ACT, Tagana, PMI, KSB, KIC, KPSC, ORARI, Baraya Kodim, Jarambah dan KSR Unjani dan lain-lain.

### **2) Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kebakaran**

Adapun dukungan personil/ pegawai aktif pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi terhitung 31 Desember 2021 adalah 207 orang, terdiri dari 121 orang ASN dan 86 orang Tenaga Harian Lepas. Pejabat struktural 14 orang. Menurut jenjang Pendidikan dapat dibagi sebagai berikut :

- a) Pasca sarjana (S2) : 7 orang;
- b) Sarjana (S1) : 25 orang;
- c) D IV : 2 orang;
- d) Diploma (DIII): 9 orang;
- e) D1 : 1 orang;
- f) SLTA :158 orang;
- g) SMP : 4 orang; dan
- h) SD : 1 orang.

Jumlah Tenaga ASN menurut golongan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a) Pegawai Golongan IV : 6 orang;
- b) Pegawai Golongan III : 28 orang;

- c) Pegawai Golongan II : 85 orang; dan
- d) Pegawai golongan I : 2 orang.

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan personil/pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran didominasi oleh tingkat SLTA 75,98% kemudian Sarjana (S1) sebanyak 11,76% dan Pasca sarjana (S2) sebanyak 3,92%.

## **6. Bidang Urusan Sosial**

Penerapan SPM Bidang Urusan Sosial di Kota Cimahi dilaksanakan oleh DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi sebagai implementasi kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya.

### **a. Jenis Pelayanan Dasar**

SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

SPM Bidang Urusan Sosial di Daerah Kabupaten/Kota mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu :

- 1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti;
- 2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti;
- 3) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti;
- 4) Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti; dan
- 5) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial.

Adapun dasar hukum jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial diatur dalam :

- 1) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan

- 2) Lampiran II Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Teknis Pembiayaan Pemenuhan Pelayanan, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana SPM Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota.

**b. Target Pencapaian SPM oleh Daerah**

Target pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial di Kota Cimahi sesuai Renstra Perubahan DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi Tahun 2018-2022 menargetkan pencapaian SPM Bidang Sosial untuk tahun pencapaian 2020-2022 secara terperinci sebagai berikut :

**Tabel 2.145.  
Target Capaian SPM Urusan Sosial Tahun 2021**

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Target Tahun 2021
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100 %
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	100 %
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	100 %
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	100 %
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap darurat dan paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota	100 %

**c. Realisasi**

Realisasi pencapaian target SPM bidang sosial pada tahun 2021 dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.146.  
Realiasi Capaian SPM Urusan Sosial tahun 2021**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	100 %
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	100 %
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang	100 %	100 %

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi
	terlantar di luar panti	memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti		
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100 %	100 %
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap darurat dan paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100 %	100 %

Data rehabilitasi Untuk penyandang disabilitas terlantar yang dipenuhi kebutuhan dasarnya selama tahun 2021 sebanyak 325 yang terdiri dari 100 Dewasa dan 225 Anak dengan Disabilitas. Untuk Lanjut Usia Terlantar yang dipenuhi kebutuhan dasarnya selama tahun 2021 sebanyak 200 orang. Sedangkan jumlah Anak Terlantar yang dipenuhi kebutuhan dasarnya selama tahun 2021 sebanyak 125 orang. Tuna Sosial yang dipenuhi kebutuhan dasarnya selama tahun 2021 sebanyak 30 orang. Untuk Korban Bencana Alam/Sosial yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial sebanyak 45 orang. Capaian realisasi SPM 2021 ini dapat dinyatakan 100% karena semua pengajuan/permohonan dapat dilayani melalui penerapan program/kegiatan di DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi. Bahkan jumlah target SPM ini melebihi 100% di tahun 2021 karena banyaknya jenis bantuan yang disalurkan kepada KPM se-Kota Cimahi yang membutuhkan termasuk KPM yang didalamnya terdapat penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, tuna sosial maupun korban bencana alam/sosial, seperti yang kita ketahui bersama di tahun 2021 masih berlangsung pandemi covid-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana sosial nasional, sehingga pemenuhan kebutuhan dasar bagi keluarga rentan terdampak pandemi *Covid-19* ini pun dapat dikategorikan sebagai jenis layanan pemenuhan kebutuhan dasar. Untuk bantuan pemenuhan kebutuhan dasar selama masa

pandemi *Covid-19* ini, di kota Cimahi telah didistribusikan 2 (dua) kategori jenis bantuan yakni :

- 1) Bantuan Sosial Tunai yang bersumber dari Kemensos RI sebanyak Rp.600.000,- /KPM; dan
- 2) Bantuan Langsung Tunai Pemerintah Kota Cimahi senilai Rp.300.000,-.

**d. Anggaran**

Anggaran dan dan realisasi anggaran APBD Kota Cimahi Tahun 2021 dalam usaha pencapaian target SPM 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.147.  
Anggaran SPM Urusan Sosial**

<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>
Rehabilitasi Sosial	Penyediaan Permakanan	Rp. 46.150.000
Rehabilitasi Sosial	Penyediaan Sandang	Rp. 102.000.000
Rehabilitasi Sosial	Penyediaan Alat Bantu	Rp. 208.545.000
Rehabilitasi Sosial	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Rp. 7.750.000
Rehabilitasi Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Rp. 445.217.000
Rehabilitasi Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Rp. 175.000.000
Rehabilitasi Sosial	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Rp. 9.625.000
Rehabilitasi Sosial	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Rp. 67.347.900
Rehabilitasi Sosial	Pemberian Layanan Kedaruratan	Rp. 220.192.000
Rehabilitasi Sosial	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Rp. 8.000.000
Rehabilitasi Sosial	Pemberian Layanan Rujukan	Rp. 31.200.000
Penanganan Bencana	Penyediaan Makanan	Rp. 140.000.000
Penanganan Bencana	Penyediaan Sandang	Rp. 57.000.000
Penanganan Bencana	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Rp. 49.946.300
Penanganan Bencana	Pelayanan Dukungan Psikososial	Rp. 54.740.000
		<b>Rp. 1.622.713.200</b>

**e. Dukungan Personil**

Dalam melaksanakan penerapan SPM Bidang Sosial di Kota Cimahi, DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi yang mengampu urusan sosial di salah



satu bidangnya diperkuat oleh personil PNS Bidang Sosial sebanyak 10 orang PNS. Selain itu Personil Bidang Sosial pada DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi juga diperkuat oleh :

- 1) 15 THL Peksos (Pekerja Sosial) yang bertugas di seluruh kelurahan;
- 2) 3 THL Korcam (Koordinator Kecamatan);
- 3) 9 THL Tagana (Taruna Siaga Bencana) dan TRC (Tim Reaksi Cepat);
- 4) 2 THL Peterpankesos (Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Sosial); dan
- 5) 2 THL Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosia.

## **2.7.2. Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Ketercapaian Standar Pelayanan Minimal**

### **1. Bidang Urusan Pendidikan**

Alokasi Anggaran terdapat Program dan Kegiatan yang termuat dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Tahun 2021 yang sudah dipetakan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 terdapat 1 Program dengan 4 Kegiatan dan 18 Sub Kegiatan yang tertuang seperti di bawah ini :

**Tabel 2.148.**  
**Alokasi Anggaran Program dan Kegiatan Bidang Pendidikan**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>ALOKASI</b>	<b>REALISASI</b>	<b>SUMBER DANA</b>
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	8.194.784.896	6.722.064.620	APBN (DID) APBD Kota Cimahi
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	83.219.354	9.338.708	APBN (DAK Fisik) APBD Kota Cimahi
3	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	6.188.531.646	4.595.431.075	APBN (DAK Fisik) APBD Kota Cimahi
4	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU	130.000.000	126.123.079	APBN (DAK Fisik)
5	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Perpustakaan	496.000.000	490.221.996	APBN (DAK Fisik)
6	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Pengadaan Perlengkapan	661.894.900	282.274.400	APBD Kota Cimahi

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ALOKASI	REALISASI	SUMBER DANA
		Sekolah Dasar				
7	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	257.001.000	240.177.000	APBD Kota Cimahi
8	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	222.123.100	218.444.622	APBN (DAK Fisik)
9	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	505.970.600	385.863.022	APBN (DAK Fisik)
10	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Laboratorium	575.033.700	0	APBN (DAK Fisik)
11	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Perlengkapan	193.462.500	141.457.000	APBD Kota Cimahi
12	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	2.400.000.000	1.161.477.000	APBD Kota Cimahi
13	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	300.472.600	291.039.550	APBN (DAK Fisik)
14	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	284.416.000	196.762.500	APBD Kota Cimahi
15	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengelolaan Dana BOP PAUD	6.382.200.000	4.963.481.530	APBN (DAK Non Fisik)
16	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	138.758.400	123.561.000	APBD Kota Cimahi
17	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	1.658.560.000	611.364.138	APBD Kota Cimahi
18	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	3.201.700.000	2.842.440.244	APBN (DAK Fisik)

## 2. Bidang Urusan Kesehatan

Anggaran yang digunakan berasal dari beberapa sumber yaitu dari APBD Kota Cimahi, APBN melalui DAK Non Fisik (Bantuan Operasional Kesehatan). Total anggaran SPM Bidang Kesehatan yang sudah tertuang dalam dokumen perencanaan sebesar 5.012.355.500,- Rupiah. Uraian alokasi anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.149.**  
**Alokasi Anggaran Program dan Kegiatan Bidang Kesehatan**

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN SPM
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan kesehatan ibu hamil	537.882.700
		Pelayanan kesehatan ibu bersalin	1.771.143.700
		Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	111.321.200
		Pelayanan kesehatan balita	601.773.600
		Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	368.204.000
		Pelayanan kesehatan pada usia produktif	238.991.400
		Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	206.432.500
		Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	203.149.200
		Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	172.995.000
		Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	231.062.900
		Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	284.794.300
		Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	284.605.000
		<b>TOTAL</b>	<b>5.012.355.500</b>

Realisasi anggaran BOK Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.150.**  
**Alokasi Anggaran Program dan Kegiatan Bidang Kesehatan**

NO	INDIKATOR	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	537.882.700	312.036.300	58,01
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	1.771.143.700	964.099.704	54,43
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	111.321.200	11.989.800	10,77
4	Pelayanan kesehatan balita	601.773.600	191.202.000	31,77

NO	INDIKATOR	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	368.204.000	162.814.000	44,22
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	238.991.400	190.084.580	79,54
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	206.432.500	100.872.500	48,86
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	203.149.200	150.217.200	73,94
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	172.995.000	118.485.540	68,49
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	231.062.900	168.487.000	72,92
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	284.794.300	233.352.025	81,94
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> )	284.605.000	229.110.000	80,50
	<b>TOTAL</b>	<b>5.012.355.500</b>	<b>2.832.750.649</b>	<b>56,52</b>

Realisasi anggaran SPM terbesar pada indikator Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis sebesar 81,94% , sedangkan realisasi terendah untuk Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 10,77%. Total Realisasi Anggaran SPM Pada Dinas Kesehatan tahun 2021 sebesar 56,52%. Hal ini disebabkan karena beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan selama masa pandemi, terutama selama masa PPKM. Kendala yang lain adalah kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan belum dapat dilaksanakan karena keterlambatan penetapan Juknis kegiatan BOK tahun 2021.

### 3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

#### a. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari

Anggaran yang digunakan sebagian besar bersumber dari APBD Kota Cimahi, DAK dan Sisa DAK. Jumlah anggaran yang telah dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian SPM tersebut sebesar Rp.10.052.368.319,00 (Sepuluh Milyar Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah) Berikut tabel mengenai anggaran untuk program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan upaya pencapaian SPM Sub Bidang Air Minum, dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

**Tabel 2.151.**  
**Alokasi Anggaran Program dan Kegiatan Air Minum**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sisem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan Strategi dan Teknis SPAM	1.370.476.971
2		Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/ Perbaikan SPAM	270.000.000
3		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	760.000.000
4		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	3.546.800.348
5		Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	139.900.000
6		Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	3.965.191.000
Jumlah			10.052.368.319,00

b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah di Domestik

Anggaran yang digunakan sebagian besar bersumber dari APBD Kota Cimahi, DAK dan Sisa DAK. Jumlah anggaran yang telah dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian SPM tersebut sebesar Rp.8.870.515.792,00 (Delapan Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Sembulan Puluh Dua Rupiah). Berikut tabel mengenai anggaran untuk program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan upaya pencapaian SPM Sub Bidang Air Limbah, dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

**Tabel 2.152.**  
**Anggaran untuk Urusan Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Limbah Domestik Tahun 2021**

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota Pengelolaan Pelayanan Air Limbah Domestik	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.592.235.300,00	APBD

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
2			Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	764.604.754,00	APBD
3			Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	0,00	
4			Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	35.000.000,00	APBD
5			Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	157.880.000,00	APBD
6			Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	4.530.940.338,00	APBD & DAK
7			Operasi Dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (UPT ALD)	1.789.855.400,00	APBD
<b>Jumlah</b>				<b>8.870.515.792,00</b>	

**Tabel 2.153.**  
**Realisasi Anggaran untuk Urusan Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Limbah Domestik Tahun 2021**

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	Fisik %
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.592.235.300	732.102.150	75
2			Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	764.604.754	474.305.736	100
3			Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	0	-	-
4			Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	35.000.000	35.000.000	100

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	Fisik %
5			Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	157.880.000	102.113.000	100
6			Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	4.530.940.338	3.719.969.100	100
7			Operasi Dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (UPT ALD)	1.789.855.400	1.586.707.881	96,12
<b>Jumlah</b>				<b>8.870.515.792</b>	<b>6.650.197.867</b>	<b>95,19</b>

#### 4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Jumlah anggaran yang telah dialokasikan untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam upaya pencapaian SPM tersebut sebesar Rp. 598.508.500,00 (Lima Ratus Sembilang Puhul Delapan Juta Lima Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah). Berikut tabel mengenai anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang berkaitan langsung dengan upaya pencapaian SPM. Bidang Perumahan Rakyat Sub Bidang Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota dan Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.154.**

#### **Anggaran untuk pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat untuk Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni**

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber anggaran
1	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	547.802.500,00	APBD
2			Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi	50.706.000,00	APBD

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber anggaran
			Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
<b>Jumlah</b>				598.508.500,00	

**Tabel 2.155.**

**Realisasi Anggaran untuk pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat untuk Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni**

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)
1	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	547.802.500,00	250.623.950,00	46,12
2			Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	50.706.000,00	15.216.300,00	30,01
<b>Jumlah</b>				<b>598.508.500,00</b>	<b>265.840.250,00</b>	<b>44,75</b>

**5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

**a. Sub Urusan Bencana**

Kegiatan yang terdapat pada SPM bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan belum optimalnya anggaran yang tersedia karena keterbatasan anggaran APBD dan tidak ada sumber anggaran dari bantuan Provinsi maupun DAK, Program dan kegiatan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021 diantaranya :

**Tabel 2.156.**

**Realisasi Anggaran Sub Urusan Bencana**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	CAPAIAN KINERJA (%)
1	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	2.759.794.200	2.759.794.200	95,47
1.	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>776.119.000</b>	<b>693.072.000</b>	<b>89,30</b>
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	776.119.000	693.072.000	89,30
2.	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>1.006.756.300</b>	<b>876.450.380</b>	<b>97,57</b>
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	233.576.000	217.781.000	93,24



NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	CAPAIAN KINERJA (%)
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	41.030.000	38.920.000	94,86
	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	118.532.500	117.603.80	99,22
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	421.441.000	420.050.200	99,67
	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	192.176.800	187.938.800	97,79
<b>3.</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>976.918.900</b>	<b>959.342.000</b>	<b>98,20</b>
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	976.918.900	959.342.000	98,20

Realisasi anggaran penunjang SPM Sub Bidang Kebencanaan Kabupaten/Kota pada tahun 2021 mencapai 95,47% dari total penyerapan pagu anggaran dengan capaian target kinerja sebesar 100%.

**b. Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kebakaran.**

Program serta kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Tahun 2021 yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Urusan Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai Berikut :

**Tabel 2.157.**  
**Realisasi Anggaran Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kebakaran**

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
<b>1</b>	<b>Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>1.903.299.100</b>	<b>1.824.874.300</b>	<b>95,88%</b>
	a. Keg Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1(satu)daerah kabupaten/kota	1.172.695.000,-	1.108.927.000,-	94,56%
	1) Sub giat Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk rasa dan Kerusuhan Massa	1.112.695.000,-	1.108.927.000,-	99,66%
	2) Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	60.000.000,-	-	0%
	b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	719.834.100,-	707.927.300,-	98,35%
	1) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	134.774.100,-	125.367.300,-	93,02%
	2) Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	585.060.000,-	582.560.000	99,57%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
	c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	10.770.000,-	8.020.000,-	74,47%
	1) Pengembangan Kapasitas dan karier PPNS	10.770.000,-	8.020.000,-	74,47%
<b>2</b>	<b>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>	<b>1.632.482.000</b>	<b>1.604.348.600</b>	<b>98,28%</b>
	a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	1.586.280.000,-	1.558.213.600	98,23%
	1) Pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	980.580.000,-	969.675.000,-	98,89%
	2) Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	596.148.600,-	579.538.600,-	97,21%
	3) Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	9.552.000,-	9.000.000	94,52%
	b. Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	46.202.000,-	46.135.000,-	99,85%
	1) Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	46.202.000,-	46.135.000,-	99,85%
	<b>TOTAL</b>	<b>3.535.781.100</b>	<b>3.429.222.900</b>	<b>96,99%</b>

Satuan Polisi Pamong Praja di tahun 2021 memiliki 3 Program yang terbagi di sekretariat 1 Bidang dan di Bidang sebanyak 2 Program, dengan total kegiatan sebanyak 13 kegiatan, tersebar di bidang sebanyak 6 kegiatan dan di sekretariat sebanyak 7 kegiatan dan dengan jumlah sub kegiatan keseluruhan sebanyak 37 sub kegiatan. Adapun anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan penerapan SPM berasal dari APBD Kota Cimahi adalah sebesar Rp.3.535.78.100,- atau 15,76% dari keseluruhan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2021 sebesar Rp. 22.438.952.945,-

Program yang terkait langsung dengan pelaksanaan SPM antara lain program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum dan Program Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.

## 6. Bidang Urusan Sosial

Program, kegiatan dan Anggaran APBD Kota Cimahi Tahun 2021 untuk urusan Sosial dalam usaha pencapaian target SPM adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.158.**  
**Realisasi Anggaran Bidang Urusan Sosial**

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
Rehabilitasi Sosial	Penyediaan Perumahan	Rp.46.150.000	Rp.40.300.000
Rehabilitasi Sosial	Penyediaan Sandang	Rp.102.000.000	Rp.98.498.750
Rehabilitasi Sosial	Penyediaan Alat Bantu	Rp.208.545.000	Rp.189.675.000
Rehabilitasi Sosial	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Rp.7.750.000	Rp.6.400.000
Rehabilitasi Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Rp.445.217.000	Rp.417.412.864
Rehabilitasi Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Rp.175.000.000	Rp.170.625.000
Rehabilitasi Sosial	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Rp.9.625.000	Rp.2.975.000
Rehabilitasi Sosial	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Rp.67.347.900	Rp.66.252.700
Rehabilitasi Sosial	Pemberian Layanan Kedaruratan	Rp.220.192.000	Rp.179.517.000
Rehabilitasi Sosial	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Rp.8.000.000	Rp.8.000.000
Rehabilitasi Sosial	Pemberian Layanan Rujukan	Rp.31.200.000	Rp.31.200.000
Penanganan Bencana	Penyediaan Makanan	Rp.140.000.000	-
Penanganan Bencana	Penyediaan Sandang	Rp.57.000.000	Rp.56.600.000
Penanganan Bencana	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Rp.49.946.300	Rp.48.376.900
Penanganan Bencana	Pelayanan Dukungan Psikososial	Rp.54.740.000	-
		<b>Rp.1.622.713.200</b>	<b>Rp.1.315.833.214</b>

### 2.7.3. Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Kota Cimahi

#### 1. Bidang Urusan Pendidikan

Dalam pelaksanaan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Urusan Pendidikan ditemui beberapa permasalahan/kendala yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Pandemi *Covid-19* masih berlangsung sehingga masih berdampak terhadap proses belajar;

- b. Adanya keterbatasan anggaran yang dimiliki dalam pemenuhan SPM Bidang Pendidikan sehingga berdampak terhadap cakupan mutu dan layanan di Bidang Urusan Pendidikan;
- c. Masih kurangnya data yang dibutuhkan dalam penghitungan SPM Bidang Urusan Pendidikan, terutama yang terkait data kependudukan karena harus ada Kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; dan
- d. Diperlukan adanya pendataan khusus untuk siswa Baru.

Solusi dari permasalahan diantaranya adalah :

- a. *Online* dan memberikan perlengkapan untuk belajar;
- b. memaksimal sasaran SPM dengan memberikan prioritas pada setiap kegiatan;
- c. Melakukan Koordinasi dan Komunikasi dengan Perangkat Daerah terkait serta forum grup diskusi; dan
- d. Melakukan pendataan SPM dengan melibatkan setiap satuan pendidikan (DAPODIK).

## **2. Bidang Urusan Kesehatan**

Dalam pelaksanaan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk Bidang Urusan Kesehatan ditemui beberapa permasalahan/kendala sebagai berikut :

### **a. Dana**

Anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian SPM Tahun 2021 sebesar 5.012.355.500,- Rupiah, bersumber dari dana APBD dan APBN (Bantuan Operasional Kesehatan). Realisasi Anggaran SPM Pada Dinas Kesehatan 2021 sebesar 56,52%. Hal ini disebabkan karena beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan selama masa pandemi, terutama selama masa PPKM, dan adanya keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan BOK karena proses refocusing anggaran dan keterlambatan penetapan Juknis kegiatan tahun 2021. Perencanaan penganggaran SPM untuk pemenuhan standar Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa masing-masing indikator SPM bidang Kesehatan belum optimal;

b. Sarana

Sarana skrining dan deteksi (BMHP dan Alat KIT pemeriksaan), pedoman pelaksanaan kasus serta media KIE sebagai syarat pemenuhan standar Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa masing-masing indikator SPM belum maksimal;

c. Sumber Daya Manusia

Pemahaman Petugas penanggung jawab SPM terhadap definisi operasional masing-masing indikator SPM bidang Kesehatan masih menjadi masalah di beberapa Puskesmas, sehingga terjadi ketidaktepatan dalam perhitungan capaian.

Ketersediaan SDM di puskesmas masih menjadi kendala. Dari segi kuantitas SDM kurang memadai karena banyaknya program yang harus dilaksanakan Puskesmas. Terbatasnya jumlah SDM yang ada di Puskesmas, menyebabkan petugas puskesmas memegang rangkap program. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan program dan kegiatan kurang optimal. Pada masa pandemi Puskesmas juga melakukan kegiatan 3T (*Testing, Tracing, Treatment*) dan Vaksinasi untuk penanganan *Covid-19*, hal ini menambah beban kerja Puskesmas. Selain itu banyak petugas kesehatan yang terpapar *Covid-19* pada awal sampai dengan pertengahan tahun 2021;

d. Sistem pencatatan dan pelaporan

Dinas Kesehatan telah membangun Sistem Informasi Dokumen Laporan *Online* (SiIDOLA) untuk optimalisasi sistem pelaporan. SiIDOLA merupakan model pengiriman laporan Puskesmas dan Dinas Kesehatan secara daring untuk optimalisasi sistem pencatatan dan pelaporan serta Integrasi sistem pelaporan dokumen untuk mencapai manajemen arsip yang baik dan kemudahan dalam proses Monitoring semua jenis laporan, namun data yang disampaikan masih belum lengkap terutama laporan dari jejaring di dalam dan diluar wilayah kerja puskesmas; dan

e. Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian

Kegiatan Pengawasan Internal dari Kepala Puskesmas terhadap administratif sudah dilaksanakan disebagian besar Puskesmas, namun masih perlu ditingkatkan. Pengawasan selanjutnya dilakukan Dinas

Kesehatan mencakup aspek administratif, sumber daya, pencapaian kinerja program, dan teknis pelayanan. Kegiatan pengawasan terhadap capaian Kinerja Puskesmas masih belum optimal, pelaksanaan pelaporan satu pintu belum optimal.

Dalam pelaksanaan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Solusi dari permasalahan tersebut diantaranya :

- a. Perlu pengkajian Perhitungan rencana pembiayaan kegiatan pendukung SPM dan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen perencanaan Puskesmas termasuk mengoptimalkan penggunaan siscobikes dalam perencanaan penganggaran SPM Puskesmas. Perlu meningkatkan dukungan anggaran BLUD PKM untuk pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan di Puskesmas;
- b. Mendorong Puskesmas untuk mengganggu penyediaan sarana dan prasarana yang belum dianggarkan oleh Dinas Kesehatan untuk pemenuhan standar Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa masing-masing indikator SPM Bidang Kesehatan;
- c. Perlu sosialisasi tentang definisi operasional dan cara perhitungan cakupan masing-masing indicator SPM terhadap penanggung jawab SPM di Puskesmas;
- d. Perlu kajian ulang tentang pembagian tugas dan analisa beban kerja, agar tercapai pemerataan program. Program dengan beban berat tidak tertumpuk pada satu orang. Selain itu perlu meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan kegiatan 3T (*Testing, Tracing, Treatment*) pada masa pandemi;
- e. Menjalinkan kerjasama lintas sektor seperti rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta, fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) baik tingkat pertama maupun rujukan, dokter praktek swasta, bidan praktek mandiri (BPM), dan kader kesehatan, untuk pengumpulan data masyarakat yang dilayani diluar wilayah kerja; dan
- f. Meningkatkan kualitas pengawasan dari Dinas Kesehatan untuk perbaikan pelaksanaan pelayanan dan pencatatan pelaporan SPM Bidang Kesehatan, dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala tiap triwulan.

### **3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum**

Dalam pelaksanaan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi sampai dengan Semester I Tahun 2021 ditemui beberapa permasalahan/kendala sebagai berikut :

#### **a. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari**

Permasalahan yang dihadapi di Kota Cimahi dalam upaya pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum yang meliputi Sub Bidang Air Minum dengan Pelayanan Dasar Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari di Kota Cimahi adalah Peningkatan layanan air bersih perpipaan yang ada belum dapat mengimbangi laju pertumbuhan penduduk Kota Cimahi yang cukup tinggi. Permasalahan tersebut disebabkan karena hal-hal berikut :

- 1) Keterbatasan Sumber Air Baku, semenjak Kota Cimahi sumber air baku yang berasal dari mata air dan air tanah dalam/dangkal untuk meningkatkan cakupan layanan air bersih dengan membangun 60 unit Sumur Artesis, 4 unit Broncaptering dan bantuan 221 unit sumur dangkal (hidran umum). Sedangkan air baku berskala besar yang bersumber dari air permukaan baru memanfaatkan 1 sumber air yang berasal dari Sungai Cimahi untuk pengolahan unit IPA SPAM Cimahi Utara dengan kapasitas 50 lt/det;
- 2) Penurunan muka air tanah, akibat pengambilan air tanah yang berlebihan/ tidak seimbang dengan konservasinya (debit air menurun dan penurunan muka tanah) di wilayah di Kota Cimahi sehingga perlu dilakukan pembatasan terhadap penggunaan air tanah;
- 3) Keterbatasan/ sulit mendapatkan lahan, untuk pengembangan sarana air bersih yakni Instalasi Pengolahan Air (IPA) maupun sumur air tanah dalam/ dangkal tidak memenuhi kriteria/syarat administrasi maupun teknis;
- 4) Kualitas air tanah dangkal mulai tercemar/ tidak layak minum, terutama di wilayah rawan sanitasi dan dekat dengan industri;

- 5) Lambannya program penyediaan SPAM Regional, karena terbentur kepentingan pengelolaan, tingginya investasi biaya infrastruktur penyediaan air bersih, dll; dan
- 6) Pengelolaan SPAM oleh Kelompok Pengguna dan Pemanfaat Air (KP2A) sebagian belum berjalan optimal dan baik, akibatnya sarana yang sudah dibangun tidak dapat beroperasi dan dipelihara dengan baik karena persoalan pemanfaat enggan membayar iuran, pengurus tidak transparan dan amanah, konflik kepentingan kepengurusan maupun lahan dll, sehingga sarana air bersih menjadi tidak berkelanjutan dan akhirnya menjadi monumen cipta karya (MCK).

**b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah di Domestik**

Permasalahan yang dihadapi di Kota Cimahi dalam upaya pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum yang meliputi Sub Bidang Air Limbah dengan Pelayanan Dasar Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik. Dalam meningkatkan pelayanan air limbah domestik kepada masyarakat, baik secara kualitas maupun kuantitas beberapa kendala yang dihadapi antara lain :

- 1) Perlu ada lahan yang memenuhi kriteria teknis IPAL antara lain elevasi yang mencukupi untuk dapat mengalirkan air limbah secara gravitasi melalui sistem perpipaan, ada badan air penerima untuk menyalurkan efluen dengan ketinggian muka air yang memadai, selain itu juga bisa di akses oleh mobil tangki tinja untuk melaksanakan penyedotan lumpurnya. Kriteria non teknis seperti persetujuan warga yang terdekat dengan calon lokasi IPAL dan yang akan dilewati jaringan perpipaan induk;
- 2) Pada sistem SPALD-T yang telah terbangun hasil uji kualitas air limbah domestik belum memenuhi baku mutu Permen LHK No 68 Tahun 2016. *Treatment* lanjutan sulit diterapkan karena membutuhkan lahan;
- 3) Penyedotan lumpur tinja oleh UPTD SPALD terkendala lokasi IPAL komunal yang sulit dijangkau oleh mobil tangki sedot. Begitu juga dengan tangki septik individual yang dimiliki oleh warga yang



berada di dalam lokasi permukiman padat, sempit dan jauh dari akses jalan besar. Selain itu masih banyak warga yang memiliki tangki septik tetapi tidak menyiapkan lubang sedotnya, sehingga tidak bisa untuk dilakukan penyedotan;

- 4) Belum tersedianya IPLT di Kota Cimahi mengharuskan UPTD SPALD membuat MoU dengan PDPAM Kota Bandung untuk pembuangan lumpur tinja yang membutuhkan biaya tambahan;
- 5) Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan air limbah masih kurang, terutama pada masa operasional dan pemeliharaan;
- 6) Kemampuan anggaran APBD dalam pembangunan sarana air limbah domestik terbatas, terlebih pada saat pandemi terjadi refocusing anggaran sebagai dampak permasalahan Covid-19; dan
- 7) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengolah air limbah, sehingga mengandalkan bantuan dari pemerintah. Terbukti dengan banyaknya sampah padat yang ditemukan di dalam bak kontrol dan IPAL sehingga menyebabkan sistem pengolahan tidak maksimal. Selain itu di beberapa tempat masyarakat masih menyambungkan talang pembuangan air hujan ke jaringan air limbah yang bisa menyebabkan luapan air di jaringan pada saat hujan turun terutama jika hujannya cukup besar. Selain itu di beberapa tempat masyarakat masih menyambungkan talang pembuangan air hujan ke jaringan air limbah yang bisa menyebabkan luapan air di jaringan pada saat hujan turun terutama jika hujannya cukup besar.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka beberapa solusi yang mungkin bisa dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi.

#### **1) Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari**

Untuk mengatasi permasalahan dalam upaya pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum yang meliputi Sub Bidang Air Minum dengan Pelayanan Dasar Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari di Kota Cimahi, akan dilakukan berbagai solusi sebagai berikut :

- a) Menjalin pemanfaatan air baku dengan daerah lain, misalnya air baku di Kabupaten Bandung di Kabupaten Bandung Barat;
- b) Pengambilan air tanah sebagai sumber air baku sebaiknya dihentikan;
- c) Mengusahakan sistem pengolahan air bersih yang tidak memerlukan lahan luas;
- d) Membuat Sistem penyaringan air untuk sumur dangkal;
- e) Mendorong pihak provinsi untuk lebih aktif dalam menuntaskan program penyediaan SPAM Regional; dan
- f) Diadakan pelatihan untuk Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelola SPAM untuk KP2A.

## **2) Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah di Domestik**

Untuk mengatasi permasalahan dalam upaya pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum yang meliputi Sub Bidang Air Limbah dengan Pelayanan Dasar Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.

- a) Melakukan pembelian lahan khususnya untuk IPAL-IPAL skala kawasan Dan skala kota;
- b) Perlu sosialisasi program kepada masyarakat sehingga masyarakat mau menghibahkan lahan, menimbulkan minat menggunakan fasos, fasum, badan jalan, membangun sarana pengolahan air limbah di sekitar lokasi mereka;
- c) Perlu mencari teknologi pengolahan air limbah yang efektif dan efisien dalam pengoperasian dan pemeliharaan sehingga efluen yang memenuhi baku mutu dapat tercapai dan mudah dalam operasi pemeliharaan;
- d) Mencari sumber-sumber pendanaan selain APBD seperti dari APBN, Hibah Luar Negeri, APBD Provinsi, CSR;
- e) Pemerintah Kota Cimahi berencana membangun IPLT pada tahun 2023;
- f) Pendekatan yang terus menerus kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah;

- g) Meningkatkan kapasitas UPTD PALD dalam pelayanan air limbah;
- h) Pendataan seluruh septictank individual maupun komunal di Kota Cimahi dengan semua kendala yang ada di masyarakat agar bisa di rencanakan untuk penanganan terutama pada septictank individual dan komunal yang tidak terjangkau oleh tangka sedot tinja;
- i) Merencanakan pembangunan jaring-jaring septictank komunal maupun individual untuk menjangkau lokasi yang tidak terakses tangka tinja untuk di sedot; dan
- j) Melakukan pemagaran di sekeliling SPALD agar tidak digunakan untuk aktivitas yang membahayakan.

### **3) Bidang Urusan Perumahan Rakyat**

Dalam pelaksanaan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi sampai dengan Semester II Tahun 2021 ditemui beberapa permasalahan / kendala sebagai berikut :

- a) Belum semua urusan yang telah didelegasikan kepada daerah memiliki SPM yang dikeluarkan oleh kementerian;
- b) Belum samanya pemahaman tentang implementasi SPM;
- c) Indikator SPM masih banyak yang belum diinternalisasikan sebagai target kinerja (*output/outcome*) dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- d) Belum adanya pedoman operasional lanjutan pelaksanaan SPM.
- e) Keterbatasan Anggaran;
- f) Tidak semua rumah yang terkena bencana/robah mendapatkan rekomendasi dari BPBD, sehingga tidak bisa diperbaiki oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Cimahi melalui program Rehabilitasi Rumah Korban Bencana;

- g) Keterbatasan/sulitnya dokumen kepemilikan tanah atas nama penerima bantuan Rumah tidak layak huni berupa Sertifikat Hak Milik (SHM); dan
- h) Swadaya masyarakat yang masih minim, padahal kegiatan ini bersifat stimulan, dimana swadaya menjadi syarat utama untuk keberhasilan *output* kegiatan fisik di lapangan.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka beberapa solusi yang mungkin bisa dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi.

- a) Untuk menindaklanjuti permasalahan rumah yang terkena bencana tetapi tidak direkomendasikan oleh BPBD, dialihkan ke Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni supaya rumah yang terkena bencana bisa diperbaiki dan menjadi Rumah Layak Huni Kembali;
- b) Apabila tidak mempunyai dokumen kepemilikan tanah berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), minimal harus mempunyai bukti pembayaran yang dilegalkan oleh pihak Kelurahan; dan
- c) Akan dilakukan verifikasi pemilihan rumah calon penerima bantuan yang lebih prioritas, tetapi apabila masih tidak masuk ke dalam kuota akan diajukan Kembali untuk tahun berikutnya.

#### **4. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Permasalahan yang dihadapi di dalam pelaksanaan penerapan SPM di Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

##### **a. Sub Urusan Bencana**

Permasalahan dalam menjalankan fungsi penanggulangan bencana, antara lain :

- 1) Belum optimalnya dukungan anggaran yang dialokasikan untuk bidang kebencanaan, sehingga anggaran yang ada belum optimal dalam mengakomodir kebutuhan BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dimana berdasarkan hasil analisis BNPB yang tertuang dalam Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)

Tahun 2018, Kota Cimahi masuk dalam kategori sedang di beberapa indeks risiko bencana. Kelas risiko dengan sedang tersebut adalah indeks risiko bencana Banjir, Gempa bumi, Kebakaran, Kekeringan, Cuaca Ekstrem, Longsor, Gunung api, Gagal Teknologi, Konflik Sosial, Epidemik dan Wabah Penyakit;

- 2) Kondisi Pandemi *Covid-19* berdampak terhadap segala tatanan kehidupan dan perlu penanganan yang serius dari unsur pemerintah dan lembaga terkait lainnya sehingga alokasi anggaran Pemerintah Daerah lebih difokuskan untuk kegiatan penanganan *Covid-19* dan dengan aturan penerapan protokol kesehatan tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan yang menimbulkan kerumunan masa;
- 3) Ancaman Sasar lembang dan Gunung Tangkuban Perahu merupakan risiko bencana terdekat yang dimiliki oleh Kabupaten Bandung Barat yang berdampak besar kepada Kota Cimahi kedepannya baik secara korban jiwa maupun kerusakan yang diakibatkannya. Kejadian yang mungkin terjadi berupa gempa bumi dan letusan gunung Tangkuban Perahu;
- 4) Masih minimnya kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang memiliki disiplin ilmu atau pengetahuan teknis tentang kebencanaan;
- 5) Keterbatasan sarana prasarana seperti gedung perkantoran, gudang penyimpanan logistik dan peralatan, serta kendaraan operasional untuk dipergunakan pada setiap kondisi tahapan kebencanaan;
- 6) Belum optimalnya koordinasi dan komunikasi dengan SOPD dan pihak-pihak terkait penanggulangan bencana di lapangan;
- 7) Belum adanya sistem informasi kebencanaan yang terintegrasi dengan data/informasi yang dikelola unit kerja lainnya; dan
- 8) Belum optimalnya penyebaran informasi masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang kebencanaan dan cara-cara menghadapinya.

## **b. Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kebakaran**

Dalam pelaksanaan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini ditemui beberapa permasalahan/kendala sebagai berikut :

- 1) Belum adanya personil Satuan Polisi Pamong Praja dengan jabatan fungsional;
- 2) Kurangnya Sarana dan Prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi seperti :
  - a) Sarana dan Prasana seperti APD *Fire Rescue* dan APD Penyelamatan kondisi saat ini sudah tidak layak; dan
  - b) Tidak tersedianya ruangan pemeriksaan pelanggar dan Pos Jaga.
- 3) Peraturan Daerah yang ada saat ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat;
- 4) Belum adanya SOP dalam layanan ganti rugi pada warga yang terkena dampak dari Penegakan Perda; dan
- 5) Lemahnya fungsi koordinasi dan sinergi antar dinas/instansi terkait.

Solusi dari permasalahan yang dihadapi di dalam pelaksanaan penerapan SPM di Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Cimahi dapat dijabarkan sebagai berikut :

### **1) Sub Urusan Bencana**

Solusi dalam permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah sebagai berikut :

- a) Perlu peningkatan dukungan anggaran untuk pelaksanaan SPM Sub Bidang Kebencanaan dengan mengajukan usulan penambahan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan penanggulanga bencana Kota Cimahi;
- b) Pemanfaatan teknologi dalam mendeteksi setiap gejala-gejala serta perubahan alam yang mengidentifikasikannya kejadian suatu bencana akan terjadi, mutlak diperlukan untuk meningkat respon masyarakat dalam menyelamatkan diri sendiri, keluarga dan masyarakat serta harta benda yang

mungkin untuk diselamatkan. Tujuannya system ini adalah mengurangi korban jiwa dan kerugian harta benda;

- c) Membangun dan mengembangkan pusat data dan informasi (Pusdatin) kebencanaan, sehingga masyarakat Kota Cimahi dapat memperoleh informasi dan peringatan dini kejadian bencana pada saat terjadi bencana di wilayah Kota Cimahi;
- d) Perubahan paradigma dalam dari responsive menjadi *preventive* merupakan tolak ukur yang baru dalam upaya penanggulangan bencana, hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya bencana masih lebih baik dibandingkan menanggulangi bencana. Secara aspek ekonomis mencegah lebih ekonomis dibandingkan menanggulangi;
- e) Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (aparatur dan relawan) agar memiliki pengetahuan teknis tentang kebencanaan dan meningkatkan kualitas dalam penanggulangan bencana; dan
- f) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan SOPD dan pihak-pihak terkait.

## **2) Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kebakaran**

Solusi dalam permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kebakaran adalah sebagai berikut :

- a) Memberikan kesempatan kepada ASN Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengikuti diklat fungsional/ diklat teknis di bidang tugas Pol PP;
- b) Mengusulkan penambahan anggaran ke Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas operasional;
- c) Melakukan revisi atas produk peraturan daerah dan menyesuaikan dengan perkembangan ekonomu, sosial dan budaya masyarakat;

- d) Tahun ini akan diupayakan untuk pembuatan SOP layanan ganti rugi warga yang terkena dampak dari penegakan Perda dan Perkada; dan
- e) Meningkatkan Kerjasama yang intensif dengan berbagai pihak guna mengoptimalkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

## **5. Bidang Urusan Sosial**

Permasalahan mendasar yang harus menjadi perhatian serius setiap tahun dalam penerapan pelaksanaan SPM ini adalah dinamisnya data 5 kategori target SPM yakni penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar dan tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis serta korban bencana sosial/alam yang sifatnya akan selalu berubah. Solusinya adalah updating data berkala setiap tahun dan melaksanakan pendataan target SPM secara komprehensif serta membuka layanan informasi dan pengaduan seluas-luasnya dengan memanfaatkan jejaring SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu) di masing-masing kelurahan. Solusi lain dari dinamisnya data target capaian SPM Bidang Sosial ini adalah menambah slot anggaran cadangan pada anggaran SPM yang telah ditetapkan setiap tahun, sehingga sewaktu-waktu ada kondisi target SPM yang harus diselesaikan dapat dicover pemenuhan kebutuhan dasarnya.

Permasalahan berikutnya adalah terbatasnya sumber pendanaan APBD Kota Cimahi, solusinya harus dapat memaksimalkan potensi sumber pendanaan lainnya seperti APBN, APBD Provinsi Jawa Barat, Baznas maupun swadaya masyarakat. Sampai dengan pelaksanaan tahun 2021, berbagai potensi sumber pendanaan ini terbukti meningkatkan efisiensi dan efektifitas penerapan pemenuhan layanan dasar bidang sosial di Kota Cimahi.

Permasalahan lainnya yang tak kalah penting adalah terbatasnya SDM, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan penerapan SPM Bidang Sosial di Kota Cimahi. Solusinya adalah menguatkan dan mengembangkan jejaring PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) di



Kota Cimahi, termasuk sinergitas dengan mitra kerja terkait untuk mendukung pelaksanaan penerapan SPM Bidang Sosial di Kota Cimahi ini. Juga yang tak kalah penting dan sangat mendasar adalah advokasi pembentukan Dinas Sosial secara mandiri di Kota Cimahi agar penanganan SPM ini bisa ditangani secara terpadu minimal oleh 1 Bidang tidak seperti kondisi saat ini yang hanya ditangani oleh 1 Sub Bidang yakni Sub Bidang Rehabilitasi Sosial yang telah direalisasikan pada tanggal 23 Desember 2021 melalui Perwal Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi.

## **BAB III**

### **GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

#### **3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU**

Analisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan merupakan salah satu bab yang harus termuat dalam penentuan kerangka kebijakan menengah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Kinerja keuangan diukur dengan melakukan analisis terhadap komponen APBD yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah lima tahun terakhir. Analisis ini dilakukan untuk melihat sejauhmana kapasitas keuangan daerah, bagaimana penerimaan daerah dapat membiayai pembangunan daerah, sejauhmana ketergantungan pada dana transfer serta untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini. Oleh karena itu dalam penyusunan RPD 2023-2026 mengacu kepada kinerja pelaksanaan APBD Kota Cimahi dalam RPJMD Kota Cimahi 2017-2022 sebagai landasan (baseline) dan penetapan arah pengembangan (trend) pengelolaan keuangan daerah 5 (lima) tahun ke depan.

Gambaran kinerja keuangan masa lalu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Cimahi, dijabarkan sebagai berikut :

##### **3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD**

Kinerja pelaksanaan APBD dilakukan dengan menggunakan beberapa ukuran kinerja seperti indikator efektivitas yaitu melihat sejauhmana daerah dapat merealisasikan target yang sudah ditetapkan dan pertumbuhan (*growth*) dengan mengukur perubahan tingkat realisasi tahunan.

Analisis kinerja pelaksanaan APBD yang pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan

keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

Secara umum gambaran kinerja pelaksanaan APBD disajikan berikut ini :

#### **3.1.1.1. Pendapatan Daerah**

Komponen pendapatan daerah terdiri dari 3 kelompok besar yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah :

1. **Pendapatan Asli Daerah** yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
2. **Dana Perimbangan** yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; serta
3. **Lain-lain Pendapatan Daerah** yang sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian, dan Bantuan Keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah Lainnya.

Tabel berikut menyajikan data seri rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2017-2022 yang akan memberikan informasi kemampuan keuangan Pemerintah Kota Cimahi sebagai bahan kebijakan perencanaan keuangan daerah dalam RPD Kota Cimahi tahun 2023-2026 .

**Tabel 3.1.**  
**Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2021**

KETERANGAN	TAHUN									
	2017	2018	Growth 2018	2019	Growth 2019	2020	Growth 2020	2021	Growth 2021	Rata-rata pertumbuhan
<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>1.481.647.893.979,88</b>	<b>1.316.230.476.122,39</b>	<b>-11,16%</b>	<b>1.433.371.386.973,96</b>	<b>8,90%</b>	<b>1.457.996.459.899,91</b>	<b>1,72%</b>	<b>1.520.135.560.503,11</b>	<b>4,26%</b>	<b>0,93%</b>
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>383.911.991.301,88</b>	<b>335.016.530.127,39</b>	<b>-12,74%</b>	<b>360.955.331.172,96</b>	<b>7,74%</b>	<b>375.687.242.678,91</b>	<b>4,08%</b>	<b>405.104.991.553,11</b>	<b>7,83%</b>	<b>1,73%</b>
Hasil Pajak Daerah	165.391.683.082,00	134.770.330.583,00	<b>-18,51%</b>	163.136.977.065,00	<b>21,05%</b>	158.937.237.899,00	<b>-2,57%</b>	179.891.802.692,00	<b>13,18%</b>	<b>3,29%</b>
Hasil Retribusi Daerah	10.239.610.285,00	12.220.530.827,00	<b>19,35%</b>	15.832.320.921,00	<b>29,56%</b>	15.243.650.522,00	<b>-3,72%</b>	11.548.482.640,00	<b>-24,24%</b>	<b>5,24%</b>
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.256.000.000,00	9.391.200.000,00	<b>1,46%</b>	9.297.600.000,00	<b>-1,00%</b>	9.778.080.000,00	<b>5,17%</b>	9.956.960.000,00	<b>1,83%</b>	<b>1,87%</b>
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	199.024.697.934,88	178.634.468.717,39	<b>-10,25%</b>	172.688.433.186,96	<b>-3,33%</b>	191.728.274.257,91	<b>11,03%</b>	203.707.746.221,11	<b>6,25%</b>	<b>0,93%</b>
<b>Dana Perimbangan</b>	<b>820.783.188.232,00</b>	<b>788.025.064.842,00</b>	<b>-3,99%</b>	<b>801.160.744.727,00</b>	<b>1,67%</b>	<b>789.281.907.731,00</b>	<b>-1,48%</b>	<b>771.276.569.021,00</b>	<b>-2,28%</b>	<b>-1,52%</b>
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	77.600.947.922,00	66.808.176.054,00	<b>-13,91%</b>	60.483.901.742,00	<b>-9,47%</b>	89.106.849.828,00	<b>47,32%</b>	109.090.822.080,00	<b>22,43%</b>	<b>11,59%</b>
Dana Alokasi Umum	576.278.051.000,00	576.278.051.000,00	<b>0,00%</b>	598.700.744.000,00	<b>3,89%</b>	539.717.972.000,00	<b>-9,85%</b>	530.425.978.000,00	<b>-1,72%</b>	<b>-1,92%</b>
Dana Alokasi Khusus	166.904.189.310,00	144.938.837.788,00	<b>-13,16%</b>	141.976.098.985,00	<b>-2,04%</b>	160.457.085.903,00	<b>13,02%</b>	131.759.768.941,00	<b>-17,88%</b>	<b>-5,02%</b>
<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>276.952.714.446,00</b>	<b>193.188.881.153,00</b>	<b>-30,24%</b>	<b>271.255.311.074,00</b>	<b>40,41%</b>	<b>293.027.309.490,00</b>	<b>8,03%</b>	<b>343.753.999.929,00</b>	<b>17,31%</b>	<b>8,88%</b>
Pendapatan Hibah	2.488.000.000,00	50.477.436.943,00	<b>1928,84%</b>	1.792.065.471,00	<b>-96,45%</b>	140.839.566,00	<b>-92,14%</b>	6.772.277.231,00	<b>4708,50%</b>	<b>1612,19%</b>
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	117.325.163.171,00	128.044.295.494,00	<b>9,14%</b>	129.853.567.820,00	<b>1,41%</b>	118.963.390.897,00	<b>-8,39%</b>	123.865.281.737,00	<b>4,12%</b>	<b>1,57%</b>
Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus						52.270.900.000,00			<b>-100,00%</b>	<b>-100,00%</b>
Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	50.885.928.000,00	10.167.148.716,00	<b>-80,02%</b>	48.860.258.783,00	<b>380,57%</b>	23.922.151.027,00	<b>-51,04%</b>	105.707.342.961,00	<b>341,88%</b>	<b>147,85%</b>
Dana Bos	50.871.020.275,00		<b>-100,00%</b>	48.657.280.000,00			<b>100,00%</b>	55.161.824.000	<b>0,00%</b>	<b>-66,67%</b>
Dana Insentif Daerah	55.382.603.000,00	4.500.000.000,00	<b>-91,87%</b>	42.092.139.000,00	<b>835,38%</b>	97.730.028.000,00	<b>132,18%</b>	52.247.274.000,00	<b>-46,54%</b>	<b>207,29%</b>

(Sumber : LRA Kota cimahi 2017-2021)

Dari data di atas dapat dihitung, kontribusi masing-masing pos dalam Pendapatan Daerah Kota Cimahi tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2.**  
**Kontribusi Pos Pendapatan Daerah Kota Cimahi**  
**Tahun 2017-2021**

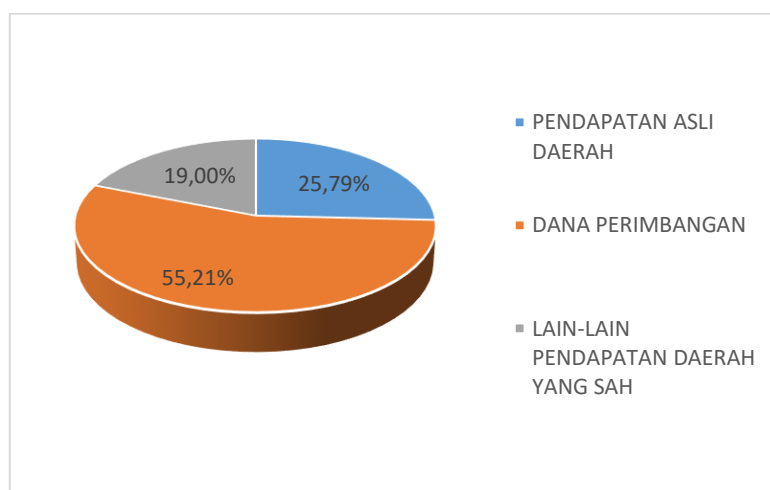
KETERANGAN	TAHUN					Rata-rata
	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Pendapatan Daerah</b>						
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>25,91%</b>	<b>25,45%</b>	<b>25,18%</b>	<b>25,77%</b>	<b>26,65%</b>	<b>25,79%</b>
Hasil Pajak Daerah	43,08%	40,23%	45,20%	42,31%	44,41%	43,04%
Hasil Retribusi Daerah	2,67%	3,65%	4,39%	4,06%	2,85%	3,52%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2,41%	2,80%	2,58%	2,60%	2,46%	2,57%
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	51,84%	53,32%	47,84%	51,03%	50,29%	50,86%
<b>Dana Perimbangan</b>	<b>55,40%</b>	<b>59,87%</b>	<b>55,89%</b>	<b>54,13%</b>	<b>50,74%</b>	<b>55,21%</b>
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	9,45%	8,48%	7,55%	11,29%	14,14%	10,18%
Dana Alokasi Umum	70,21%	73,13%	74,73%	68,38%	68,77%	71,04%
Dana Alokasi Khusus	20,33%	18,39%	17,72%	20,33%	17,08%	18,77%
<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>18,69%</b>	<b>14,68%</b>	<b>18,92%</b>	<b>20,10%</b>	<b>22,61%</b>	<b>19,00%</b>
Pendapatan Hibah	0,90%	26,13%	0,66%	0,05%	1,97%	5,94%
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	42,36%	66,28%	47,87%	40,60%	36,03%	46,63%
Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus				17,84%		17,84%
Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	18,37%	5,26%	18,01%	8,16%	30,75%	16,11%
DANA BOS	18,37%		17,94%		16,05%	17,45%
DANA INSENTIF DAERAH	20,00%	2,33%	15,52%	33,35%	15,20%	17,28%

Sumber : LRA Kota Cimahi 2017-2021 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas diperoleh gambaran bahwa realisasi pendapatan daerah Kota Cimahi pada tahun 2017-2021 cenderung meningkat rata-rata 0,93% per tahun. Kontribusi terbesar Pendapatan Daerah masih disumbang dari **Dana perimbangan** dengan rata rata kontribusi sebesar 55,21% dengan pertumbuhan nilai dengan kecenderungan menurun per tahun sebesar minus 1,52%. Posisi kedua tertinggi dalam membentuk pendapatan adalah **Komponen Pendapatan Asli Daerah** yang rata rata menyumbang 25,79% dengan nilai pertumbuhan 1,73% per tahun. Sedangkan Komponen **Lain lain pendapatan yang sah** menyumbang 19% dengan pertumbuhan per tahun sebesar 8,88 % per tahun.

Berikut akan disajikan grafik rata-rata proporsi realisasi pendapatan daerah tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

**Gambar 3.1.**  
**Rata-Rata Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah**  
**Tahun 2017-2021**



Sumber : LRA Kota Cimahi 2017-2021 (diolah)

Pada Grafik di atas dapat disimpulkan bahwa Kota Cimahi masih tergantung pada transfer pusat dan Provinsi, dengan perkembangan yang menurun. Penurunan tersebut harus diantisipasi dengan penggalan potensi pendapatan lain terutama melalui Pos **Pendapatan Asli Daerah**. Diharapkan ke depan terjadi peningkatan kemampuan fiskal daerah Kota Cimahi dengan memaksimalkan sektor riil yang ada di Kota Cimahi melalui optimalisasi pendapatan dan retribusi daerah.

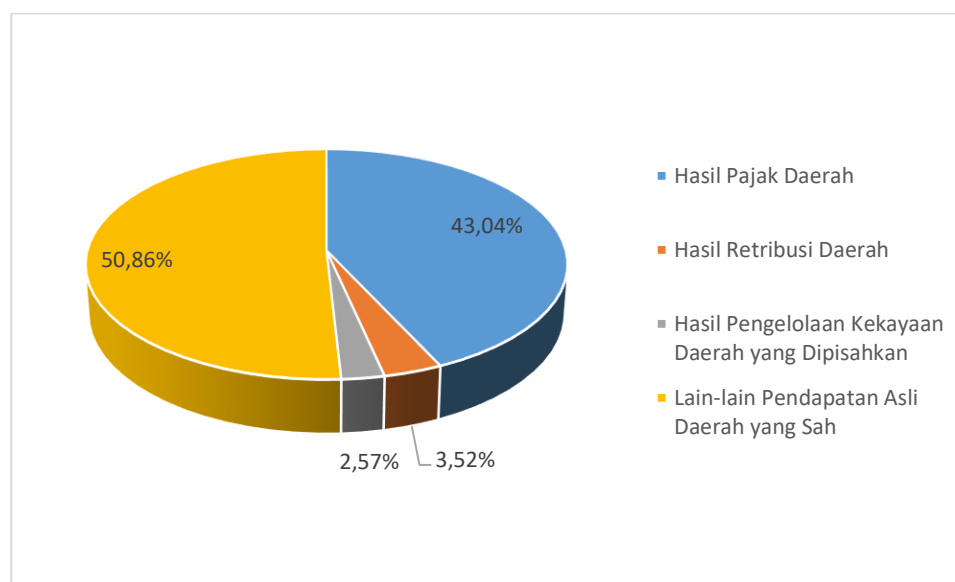
Rincian ketiga pos pembentuk komponen Pendapatan Daerah Kota Cimahi selama tahun 2017-2021 disajikan sebagai berikut :

### **1. Pendapatan Asli Daerah**

Pos dengan rata-rata kontribusi terbesar PAD Kota Cimahi tahun 2017-2021 adalah *pos lain-lain PAD yang sah* dengan 50,86% dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,93% per tahun, diikuti oleh hasil *pajak daerah* dengan 43,04% dengan rata-rata pertumbuhan 3,29% per tahun, Hasil retribusi daerah dengan 3,52% dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 5,24% per tahun serta pos hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan 2,57% dengan rata-rata

pertumbuhan 1,87% per tahun. Melihat tingginya pertumbuhan pos pajak dan retribusi daerah dibandingkan dengan komponen lainnya selama 5 (lima) tahun terakhir , menunjukkan masih banyaknya potensi di sektor riil yaitu pajak dan retribusi daerah yang masih dapat terus dioptimalkan.

**Gambar 3.2.**  
**Rata-Rata Kontribusi Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD)**  
**Kota Cimahi Tahun 2017-2021**

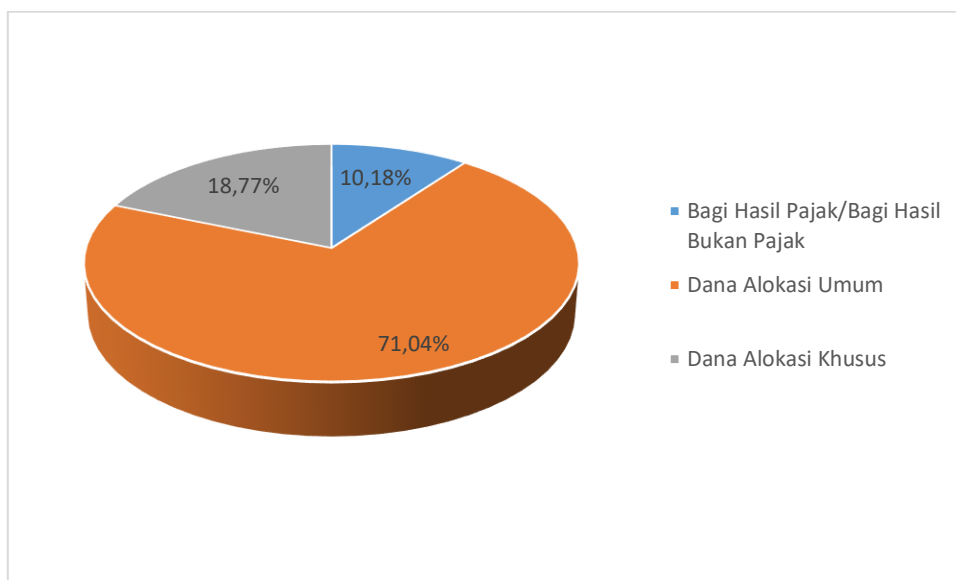


*Sumber : LRA Kota Cimahi 2017-2021 (diolah)*

## 2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan terbesar Kota Cimahi pada tahun 2017-2021, kontribusi terbesar dana perimbangan disumbangkan oleh pos Dana Alokasi Umum (DAU) dengan 71,04%, dengan rata-rata pertumbuhan per tahun yang cenderung mengalami penurunan rata-rata minus -1,92% diikuti oleh pos Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan 18,77% dengan rata-rata pertumbuhan minus -5,02% dan pos bagi hasil pajak/bukan pajak dengan rata-rata kontribusi sebesar 10,18% dengan rata-rata pertumbuhan per tahun 11,59 %.

**Gambar 3.3.**  
**Rata-Rata Kontribusi Pos Dana Perimbangan Kota Cimahi**  
**Tahun 2017-2021**



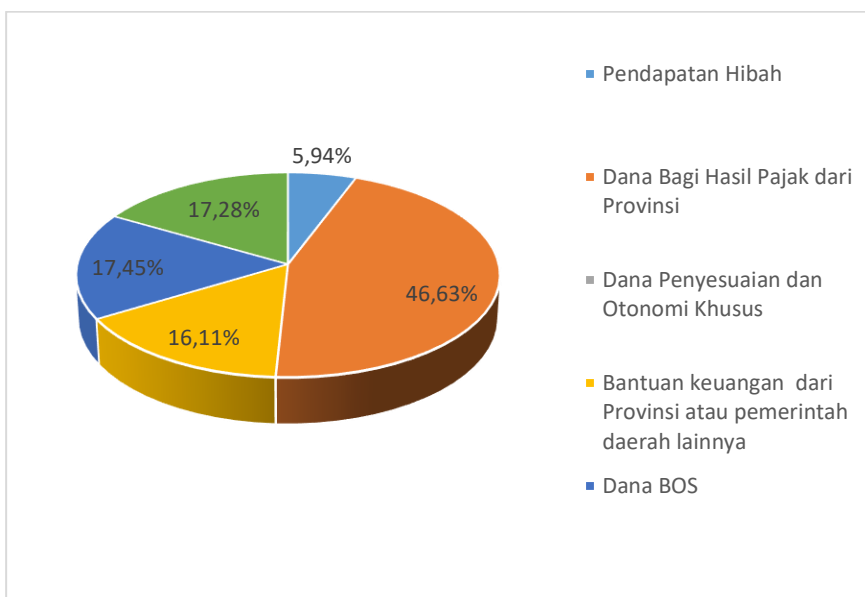
Sumber : LRA Kota Cimahi 2017-2021 (diolah)

### **3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Pada Pos *Lain-lain Pendapatan yang sah* selama 5 tahun terakhir (2017-2021) yang memberikan kontribusi rata-rata sebesar 19% dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,88% per tahun. Dalam komponen ini dengan rata-rata kontribusi terbesar adalah pos *Dana Bagi Hasil provinsi* dengan 46,63%, diikuti oleh pos dana insentif daerah sebesar 17,28% dan bankeu dari provinsi atau pemda lainnya dengan 16,11%, pos dana BOS dengan 17,45%, dan pos pendapatan hibah dengan 5,94%



**Gambar 3.4.**  
**Rata-Rata Kontribusi Pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**  
**Kota Cimahi Tahun 2017-2021**



Sumber : LRA Kota Cimahi 2017-2021 (diolah)

### 3.1.1.2. Belanja Daerah

Selain mengukur kinerja APBD dari sumber pendapatan, juga dilakukan pada sisi realisasi belanja pemerintah daerah. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Semakin besar realisasi belanja semakin bagus kinerja suatu daerah. Alokasi belanja daerah sebagian besar dialokasikan untuk pelayanan kepada masyarakat yang diharapkan akan menggerakkan perekonomian pada sektor riil yang berakibat pada peningkatan pendapatan masyarakat, realisasi belanja daerah Kota Cimahi tahun 2017-2021 disajikan dalam tabel berikut :

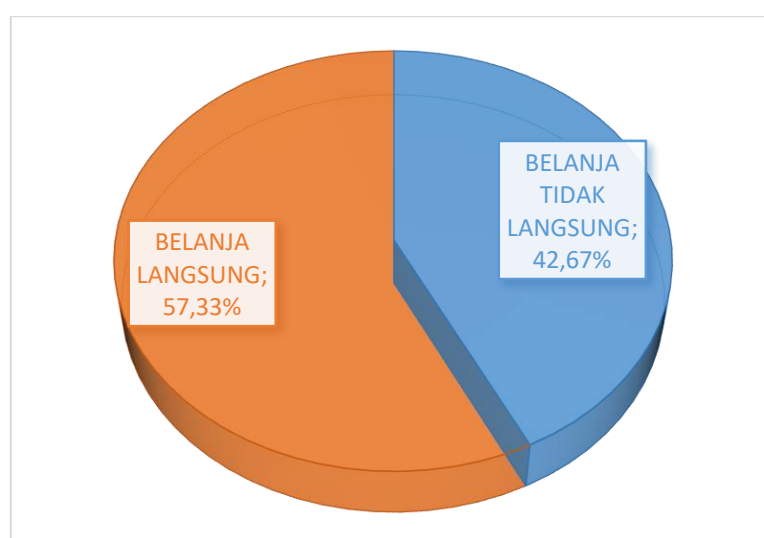
**Tabel 3.3.**  
**Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2021**

KETERANGAN	TAHUN									
	2017	2018	Growth 2018	2019	Growth 2019	2020	Growth 2020	2021	Growth 2021	Rata-rata pertumbuhan
<b>Belanja Daerah</b>	<b>1.339.382.098.733,00</b>	<b>1.489.072.968.877,00</b>	<b>11,18%</b>	<b>1.501.760.938.252,15</b>	<b>0,85%</b>	<b>1.282.319.835.502,11</b>	<b>-14,61%</b>	<b>1.481.512.704.849,00</b>	<b>15,53%</b>	<b>3,24%</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>501.702.378.675,00</b>	<b>592.738.168.300,00</b>	<b>18,15%</b>	<b>607.397.864.512,00</b>	<b>2,47%</b>	<b>638.355.882.017,09</b>	<b>5,10%</b>	<b>679.060.682.785,00</b>	<b>6,38%</b>	<b>8,02%</b>
Belanja Pegawai	483.803.464.386,00	570.330.482.845,00	<b>17,88%</b>	586.764.369.789,00	<b>2,88%</b>	546.501.795.434,00	<b>-6,86%</b>	643.977.236.028,00	<b>17,84%</b>	<b>7,94%</b>
Belanja Bunga	1.519.531.175,00	518.723.151,00	<b>-65,86%</b>	687.088.955,00	<b>32,46%</b>	781.441.813,09	<b>13,73%</b>	308.874.114,00	<b>-60,47%</b>	<b>-20,04%</b>
Belanja Hibah	13.947.887.750,00	16.159.150.000,00	<b>15,85%</b>	15.355.225.000,00	<b>-4,98%</b>	13.856.011.450,00	<b>-9,76%</b>	19.409.616.200,00	<b>40,08%</b>	<b>10,30%</b>
Belanja Bantuan Sosial		344.250.000,00		3.227.128.000,00	<b>837,44%</b>	2.864.475.000,00	<b>-11,24%</b>	2.571.530.000,00	<b>-10,23%</b>	<b>271,99%</b>
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota Dan Pemerintahan Desa				-		-				
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota Dan Pemerintah Desa	1.112.117.364,00	926.912.304,00	<b>-16,65%</b>	1.133.383.686,00	<b>22,28%</b>	-				<b>2,81%</b>
Belanja Tidak Terduga	1.319.378.000,00	4.458.650.000,00	<b>237,94%</b>	230.669.082,00	<b>-94,83%</b>	74.352.158.320,00	<b>32133,26%</b>	12.793.426.443,00	<b>-82,79%</b>	<b>8048,39%</b>
<b>Belanja Langsung</b>	<b>837.679.720.058,00</b>	<b>896.334.800.577,00</b>	<b>7,00%</b>	<b>894.363.073.740,15</b>	<b>-0,22%</b>	<b>643.963.953.485,02</b>	<b>-28,00%</b>	<b>802.452.022.064,00</b>	<b>24,61%</b>	<b>0,85%</b>
Belanja Pegawai	113.042.912.108,00	88.719.622.895,00	<b>-21,52%</b>	81.599.837.059,00	<b>-8,03%</b>	90.381.434.304,00	<b>10,76%</b>	147.881.085.049,00	<b>63,62%</b>	<b>11,21%</b>
Belanja Barang Dan Jasa	454.312.088.607,00	531.594.947.618,00	<b>17,01%</b>	552.425.239.111,15	<b>3,92%</b>	456.337.905.380,02	<b>-17,39%</b>	407.510.372.229,00	<b>-10,70%</b>	<b>-1,79%</b>
Belanja Modal	270.324.719.343,00	276.020.230.064,00	<b>2,11%</b>	260.337.997.570,00	<b>-5,68%</b>	97.244.613.801,00	<b>-62,65%</b>	247.060.564.786,00	<b>154,06%</b>	<b>21,96%</b>
<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>142.265.795.246,88</b>	<b>-172.842.492.754,61</b>	<b>-221,49%</b>	<b>-68.389.551.278,19</b>	<b>-60,43%</b>	<b>175.676.624.397,80</b>	<b>-356,88%</b>	<b>38.590.435.654,11</b>	<b>-78,03%</b>	<b>-179,21%</b>

Sumber : LRA Kota cimahi 2017-2021, diolah

Berdasarkan tabel di atas, dalam 5 (lima) tahun terakhir (2017-2021), rata-rata pertumbuhan belanja daerah Kota Cimahi adalah sebesar 3,24%, dimana terjadi penurunan realisasi belanja daerah sebesar -14,61% pada tahun 2020, yang diakibatkan karena terjadinya pandemi *Covid-19* yang mengakibatkan terjadinya pergeseran dan *refocusing* anggaran yang cukup besar pada tahun 2020 untuk penanggulangan dan penanganan *Covid* daerah. Pada tahun 2021, terjadi pertumbuhan realisasi belanja daerah sebesar 15,54% yang menandai mulai kembali pulihnya kondisi pasca *Covid*.

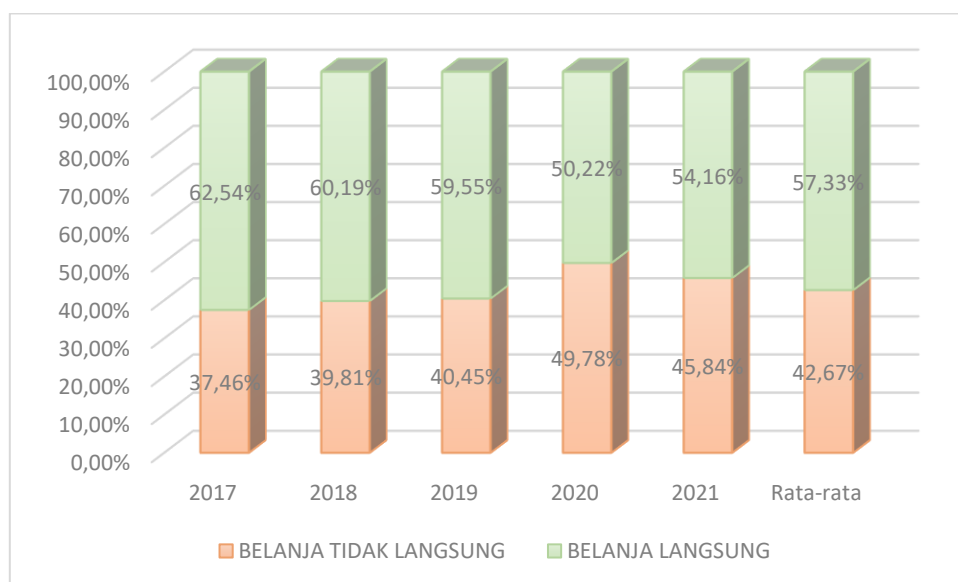
**Gambar 3.4.**  
**Kontribusi Pos Belanja Daerah Kota Cimahi**  
**Tahun 2017-2021**



Sumber : LRA Kota Cimahi 2017-2021 (diolah)

Porsi *belanja langsung* di Kota Cimahi lebih besar dibandingkan dengan pos *belanja tidak langsung*, rata-rata kontribusi belanja langsung terhadap belanja daerah adalah sebesar 57,33%. Meskipun demikian terlihat bahwa ada kecenderungan penurunan belanja langsung dalam 5 (lima) tahun terakhir.

**Gambar 3.5.**  
**Porsi Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2021**



Sumber : LRA Kota Cimahi Tahun 2017-2021

Pada tahun 2020 porsi belanja langsung sebesar 50,22% sedangkan yang tertinggi pada tahun 2017 dengan 62,54%. Pada tahun 2021 Belanja langsung kembali meningkat menjadi 57,33% diakibatkan adanya refocusing anggaran karena *Covid* yang menyebabkan meningkatnya anggaran pada belanja langsung terutama untuk barang dan jasa.

Rincian ketiga pos pembentuk komponen Belanja Daerah Kota Cimahi selama tahun 2017-2021 disajikan sebagai berikut :

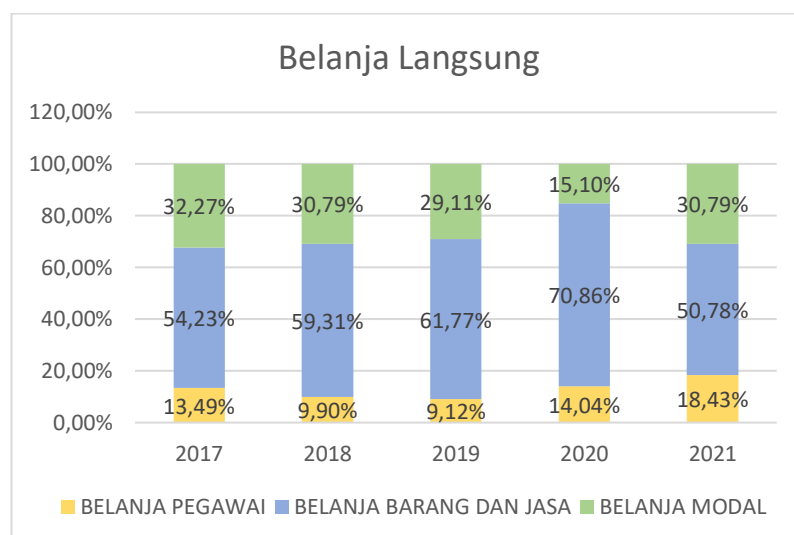
**1. Belanja Tidak Langsung**

Belanja tidak langsung paling banyak dihabiskan untuk belanja pegawai, rata-rata alokasi untuk belanja pegawai di Kota Cimahi pada tahun 2017-2021 sebesar 93,94% dan diikuti oleh Belanja Hibah dengan 2,61%, Belanja Tidak Terduga 2,92%, Belanja Bantuan Sosial 0,28%, Belanja Bunga 0,13%.

**2. Belanja Langsung**

Rata-rata alokasi belanja langsung di Kota Cimahi pada tahun 2017-2020 paling banyak dialokasikan untuk belanja barang dan jasa dengan rata-rata 59,39%, diikuti oleh belanja modal dengan 27,61% dan belanja pegawai dengan 13%.

**Gambar 3.6.**  
**Porsi Pos Belanja Langsung Kota Cimahi Tahun 2017-2021**



Sumber : LRA Kota Cimahi Tahun 2017-2021

Pada tahun 2020 terjadi peningkatan pos belanja barang dan jasa, hal ini salah satunya dipengaruhi oleh kondisi Pandemi Covid-19 yang sangat membutuhkan barang dan jasa tertentu yang mencapai 70,86%, dan mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 65,28%.

Kemampuan keuangan daerah Kota Cimahi selama kurun waktu 2017-2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.4.**  
**Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
<b>A</b>	<b>Pendapatan Umum Daerah</b>					
1	Pendapatan Asli Daerah	383.911.991.301,88	335.016.530.127,39	360.955.331.172,96	375.687.242.678,91	405.104.991.553,11
2	Dana bagi Hasil	77.600.947.922,00	66.808.176.054,00	60.483.901.742,00	89.106.849.828,00	109.090.822.080,00
3	Dana Alokasi Umum	576.278.051.000,00	576.278.051.000,00	598.700.744.000,00	539.717.972.000,00	530.425.978.000,00
	<b>Jumlah A</b>	<b>1.037.790.990.223,88</b>	<b>978.102.757.181,39</b>	<b>1.020.139.976.914,96</b>	<b>1.004.512.064.506,91</b>	<b>1.044.621.791.633,11</b>
<b>B</b>	<b>Belanja Pegawai</b>					
1	Belanja Gaji Dan Tunjangan	214.018.948.798,00	286.526.614.374,00	296.081.270.703,00	351.323.623.546,00	360.106.714.135,00
2	Tambahan Penghasilan PNS	168.540.915.100,00	170.954.429.097,00	175.510.319.000,00	199.435.233.064,00	204.421.113.891,00
3	<b>Jumlah B</b>	<b>382.559.863.898,00</b>	<b>457.481.043.471,00</b>	<b>471.591.589.703,00</b>	<b>550.758.856.610,00</b>	<b>564.527.828.026,00</b>
	<b>Kemampuan Keuangan Daerah</b>	<b>655.231.126.325,88</b>	<b>520.621.713.710,39</b>	<b>548.548.387.211,96</b>	<b>453.753.207.896,91</b>	<b>480.093.963.607,11</b>

Sumber : LRA Kota Cimahi Tahun 2017-2021 (diolah)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang pengelompokan kemampuan keuangan daerah beserta pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana operasional, Kemampuan keuangan daerah dihitung dari besaran pendapatan umum daerah dengan belanja pegawai aparatur sipil negara. Dari perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 Pemerintah Kota Cimahi memiliki kemampuan daerah sebesar Rp.655.231.126.325,88 dimana nilai tersebut berdasarkan Pasal 5 Permendagri 62 tahun 2017 dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi. Namun demikian pada tahun tahun 2021 Kemampuan keuangan daerah Kota Cimahi adalah sebesar Rp.480.093.963.607,11. Nilai tersebut dikelompokkan pada ***kemampuan keuangan daerah sedang***.

Seiring dengan semakin menurunnya Kemampuan Keuangan Daerah Kota Cimahi selama 5 (lima) tahun terakhir, maka perlu dilakukan upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah dari sisi pendapatan Umum Daerah terutama pada Pos Pendapatan Asli Daerah.

### **3.1.1.3. Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Komponen pembiayaan daerah terdiri atas :

1. Penerimaan pembiayaan daerah yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah;
2. Pengeluaran pembiayaan daerah yang terdiri dari pengeluaran pembiayaan daerah, penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Utang; dan
3. Sisa Lebih Pembiayaan daerah (SiLPA) tahun berjalan.

Gambaran realisasi pembiayaan daerah Kota Cimahi tahun 2017-2021 yang dapat menggambarkan informasi terkait rata-rata perkembangan/kenaikan realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah Kota Cimahi selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.5.**  
**Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2021**

KETERANGAN	TAHUN									Rata-rata pertumbuhan
	2017	2018	Growth 2018	2019	Growth 2019	2020	Growth 2020	2021	Growth 2021	
<b>Pembiayaan Daerah</b>										
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	206.225.060.012,65	340.040.123.838,53	<b>64,89%</b>	214.728.841.710,92	<b>-36,85%</b>	130.241.943.877,73	<b>-39,35%</b>	270.898.017.186,53	<b>108,00%</b>	<b>24,17%</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	206.225.060.012,65	340.040.123.838,53	<b>64,89%</b>	165.917.985.197,92	<b>-51,21%</b>	121.693.751.477,73	<b>-26,65%</b>	270.898.017.186,53	<b>122,61%</b>	<b>27,41%</b>
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-		48.810.856.513,00	-	8.548.192.400,00	<b>-82,49%</b>		<b>-100,00%</b>	<b>-91,24%</b>
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	9.174.947.220,00	855.508.220,00	<b>-90,68%</b>	24.645.538.955,00	<b>2780,81%</b>	34.746.347.598,00	<b>40,98%</b>	855.508.220,00	<b>-97,54%</b>	<b>658,39%</b>
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-		-	-	-	-	-	-	
Pembayaran Pokok Utang	9.174.947.220,00	855.508.220,00	<b>-90,68%</b>	24.645.538.955,00	<b>2780,81%</b>	34.746.347.598,00	<b>40,98%</b>	855.508.220,00	<b>-97,54%</b>	<b>658,39%</b>
<b>Pembiayaan Netto</b>	197.050.112.792,65	339.184.615.618,53	<b>72,13%</b>	190.083.302.755,92	<b>-43,96%</b>	95.495.596.279,73	<b>-49,76%</b>	270.042.508.966,53	<b>182,78%</b>	<b>40,30%</b>
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)</b>	339.315.908.039,53	166.342.122.863,92	<b>-50,98%</b>	121.693.751.477,73	<b>-26,84%</b>	271.172.220.677,53	<b>122,83%</b>	308.907.148.111,64	<b>13,92%</b>	<b>14,73%</b>

Sumber : LRA Kota Cimahi 2017-2021, diolah

Berdasarkan tabel di atas diperoleh realisasi pembiayaan netto dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami flukutasi dengan rata rata pertumbuhan per tahun sebesar 40,37%. Realisasi terendah pada tahun 2020 sebesar Rp.95.495.596.279,73 dengan pertumbuhan -49,76% dibanding tahun 2019. Realisasi pembiayaan netto kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp.270.316.712.457,53 atau meningkat sebesar 182,78%.

### **3.1.2. Neraca Daerah**

Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca daerah merupakan kondisi keuangan Kota Cimahi serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas. Neraca Periode Tahun 2017-2021 disajikan pada tabel dibawah ini :



**Tabel 3.6.**  
**Neraca Daerah Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2021**

AKUN	TAHUN					Rata rata Pertumbuhan
	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>ASET</b>	<b>2.308.589.353.234,45</b>	<b>2.389.225.778.954,00</b>	<b>2.698.443.733.746,94</b>	<b>2.760.193.578.137,58</b>	<b>2.892.453.350.351,23</b>	<b>5,41%</b>
<b>ASET LANCAR</b>						
Kas di Kas Daerah	323.039.973.451,92	156.824.594.239,31	89.982.099.299,46	252.983.054.384,92	261.726.825.185,51	-28,12%
Kas di RSUD	10.517.490.309,61	2.264.122.343,61	27.691.936.383,27	12.624.391.630,61	40.989.619.473,61	-80,71%
Kas di BLUD	0,00	0,00	0,00	195.990.640,00	4.035.919.449,00	95,14%
Kas di Bendahara Pengeluaran	705.465.394,00	3.114.574.380,00	166.503.870,00	0,00	115.801.921,00	-
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	24.075.000,00	60.000,00	0,00	659.044,00	-
Kas Di FKTP	4.014.511.353,00	1.931.226.909,00	2.611.580.947,00	2.573.771.153,00	0,00	-
Kas Dana Bos	1.762.683.330,00	1.759.392.326,00	1.241.571.048,00	2.490.895.654,00	1.763.418.438,00	-8,25%
Kas Lainnya	0,00	1.004.716.020,00	498.062.986,00	560.144.677,00	590.793.711,00	3,64%
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Piutang Pajak	152.592.322.098,00	163.389.632.956,00	178.070.506.652,00	198.458.610.887,00	129.029.189.293,00	-7,17%
Penyisihan Piutang Pajak	-109.631.678.803,99	-116.920.428.606,92	-125.315.843.778,79	-135.641.054.045,82	46.758.932.940,18	-42,39%
<b>Piutang Pajak Netto</b>	<b>42.960.643.294,01</b>	<b>46.469.204.349,08</b>	<b>52.754.662.873,21</b>	<b>62.817.556.841,18</b>	<b>82.270.256.352,83</b>	<b>14,78%</b>
Piutang Retribusi	172.933.280,00	389.983.627,00	616.821.908,00	3.264.415.784,00	2.271.651.667,00	32,46%
Penyisihan Piutang Retribusi	-129.861.981,55	-145.459.470,88	-208.113.735,86	-1.691.808.387,35	1.510.951.900,38	29,14%
<b>Piutang Retribusi Netto</b>	<b>43.071.298,45</b>	<b>244.524.156,12</b>	<b>408.708.172,14</b>	<b>1.572.607.396,65</b>	<b>760.699.766,62</b>	<b>22,46%</b>
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	863.328.718,00	0,00	36.491.875.399,00	27.370.729.034,00	0,00	-
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	7.104.474.136,00	5.319.687.947,00	6.048.715.475,00	6.877.800.265,00	0,00	-

AKUN	TAHUN					Rata rata Pertumbuhan
	2017	2018	2019	2020	2021	
Belanja Dibayar Dimuka	2.073.452.709,05	6.274.150.752,32	7.421.176.767,56	10.378.639.377,91	4.576.692.589,29	-3,97%
Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	242.401.668,00	237.401.668,00	1.975.438.776,44	217.551.668,00	217.551.668,00	-180,54%
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-242.401.668,00	-237.401.668,00	-228.451.668,00	-217.551.668,00	-	-2,76%
<b>Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746.987.108,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
Piutang Lainnya	13.846.442.457,00	21.820.568.975,00	33.451.925.819,00	5.426.999.986,32	9.543.420.660,47	-100,49%
Penyisihan Piutang Lainnya	-299.389.226,39	-1.422.037.239,93	-1.060.558.992,70	-942.440.653,32	-	23,80%
<b>Piutang Lainnya Netto</b>	<b>13.547.053.230,61</b>	<b>20.398.531.735,07</b>	<b>32.391.366.826,30</b>	<b>4.484.559.333,00</b>	<b>7.004.164.958,27</b>	<b>-128,93%</b>
Persediaan	20.363.114.426,01	17.476.559.450,63	21.458.162.499,34	38.927.924.338,32	31.389.146.573,95	5,72%
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>426.995.261.650,66</b>	<b>263.105.359.608,14</b>	<b>280.913.469.654,72</b>	<b>423.858.064.725,59</b>	<b>435.223.997.463,08</b>	<b>-4,90%</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>						-
<b>Investasi Nonpermanen</b>						-
Pinjaman Jangka Panjang	42.857.648,00	44.010.962,00	47.872.705,00	48.909.062,00	50.591.536,00	4,03%
Investasi dalam Surat Utang Negara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Investasi Nonpermanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

AKUN	TAHUN					Rata rata Pertumbuhan
	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Jumlah Investasi Nonpermanen</b>	<b>42.857.648,00</b>	<b>44.010.962,00</b>	<b>47.872.705,00</b>	<b>48.909.062,00</b>	<b>50.591.536,00</b>	<b>4,03%</b>
Investasi Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	69.456.146.546,00	68.871.596.154,00	68.826.696.009,50	68.660.344.186,50	68.493.992.363,50	<b>-0,35%</b>
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>Jumlah Investasi Permanen</b>	<b>69.456.146.546,00</b>	<b>68.871.596.154,00</b>	<b>68.826.696.009,50</b>	<b>68.660.344.186,50</b>	<b>68.493.992.363,50</b>	<b>-0,35%</b>
<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>69.499.004.194,00</b>	<b>68.915.607.116,00</b>	<b>68.874.568.714,50</b>	<b>68.709.253.248,50</b>	<b>68.544.583.899,50</b>	<b>-0,35%</b>
<b>ASET TETAP</b>						
Tanah	798.094.804.857,00	865.753.848.202,00	1.032.167.175.754,00	1.054.785.789.081,00	1.056.705.806.799,00	<b>6,57%</b>
Peralatan dan Mesin	468.769.142.080,94	525.332.197.651,75	625.551.698.239,32	653.697.490.905,54	694.191.726.346,98	<b>9,23%</b>
Gedung dan Bangunan	593.654.810.222,00	717.012.793.219,00	727.685.887.752,00	745.821.693.568,20	772.624.864.228,52	<b>6,14%</b>
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	653.971.796.668,00	721.185.375.765,00	771.017.808.875,00	788.273.686.779,63	826.964.855.561,52	<b>5,66%</b>
Aset Tetap Lainnya	58.528.018.739,47	67.001.544.801,47	71.598.063.912,47	67.891.291.041,47	70.405.620.977,47	<b>4,29%</b>
Konstruksi dalam Pengerjaan	3.506.622.000,00	8.537.078.500,00	50.707.420.418,36	51.926.798.918,36	211.996.377.038,36	<b>54,99%</b>
Akumulasi Penyusutan	-775.860.585.458,94	-859.722.400.863,40	-946.912.999.175,95	-1.119.661.893.807,38	1.266.211.592.103,12	<b>11,49%</b>
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>1.800.664.609.108,47</b>	<b>2.045.100.437.275,82</b>	<b>2.331.815.055.774,40</b>	<b>2.242.734.856.486,82</b>	<b>2.366.677.658.848,73</b>	<b>6,38%</b>
<b>DANA CADANGAN</b>	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>JUMLAH DANA CADANGAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
<b>ASET LAINNYA</b>						
Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	3.348.345.000,00	3.348.345.000,00	3.348.345.000,00	3.348.345.000,00	3.348.345.000,00	<b>0,00%</b>

AKUN	TAHUN					Rata rata Pertumbuhan
	2017	2018	2019	2020	2021	
Aset Tak Berwujud	3.318.415.805,00	6.445.576.184,90	7.805.223.634,90	8.733.693.634,90	9.932.562.034,90	22,16%
Akumulasi Amortisasi	-1.345.634.227,50	-3.798.897.934,68	-5.405.783.318,41	-6.900.246.239,16	8.229.263.872,40	33,03%
Aset Tak Berwujud Netto	1.972.781.577,50	2.646.678.250,22	2.399.440.316,50	1.833.447.395,75	1.703.298.162,51	-5,84%
Aset Lain-Lain	6.109.351.703,82	6.109.351.703,82	11.092.854.286,82	19.709.611.280,92	16.955.466.977,42	18,10%
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>11.430.478.281,32</b>	<b>12.104.374.954,04</b>	<b>16.840.639.603,32</b>	<b>24.891.403.676,67</b>	<b>22.007.110.139,93</b>	<b>13,23%</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>2.308.589.353.234,45</b>	<b>2.389.225.778.954,00</b>	<b>2.698.443.733.746,94</b>	<b>2.760.193.578.137,58</b>	<b>2.892.453.350.351,23</b>	<b>5,41%</b>
<b>KEWAJIBAN</b>						-
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>						-
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	724.917.563,00	907.590.853,00	378.156.853,00	40.349.191,00	48.276.595,00	-235,17%
Utang Bunga	153.712.612,25	127.256.847,71	484.497.286,80	161.298.946,00	129.039.156,47	-43,11%
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	855.508.219,86	855.508.219,86	855.508.219,86	855.508.220,00	855.508.220,00	0,00%
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Utang Belanja	1.276.974.854,00	9.097.680.634,00	1.195.308.098,60	19.004.747.924,00	4.141.620.812,00	-210,08%
Utang Jangka Pendek Lainnya	16.408.425.650,00	19.153.616.668,00	58.196.923.450,00	25.180.855.366,00	13.601.010.723,00	-33,71%
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>19.419.538.899,11</b>	<b>30.141.653.222,57</b>	<b>61.110.393.908,26</b>	<b>45.242.759.647,00</b>	<b>18.775.455.506,47</b>	<b>-22,45%</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>						
Utang Dalam Negeri	5.988.557.538,98	5.133.049.319,12	4.277.541.099,26	3.422.032.878,70	2.566.524.658,70	-23,75%
Utang Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>5.988.557.538,98</b>	<b>5.133.049.319,12</b>	<b>4.277.541.099,26</b>	<b>3.422.032.878,70</b>	<b>2.566.524.658,70</b>	<b>-23,75%</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>25.408.096.438,09</b>	<b>35.274.702.541,69</b>	<b>65.387.935.007,52</b>	<b>48.664.792.525,70</b>	<b>21.341.980.165,17</b>	<b>-22,09%</b>

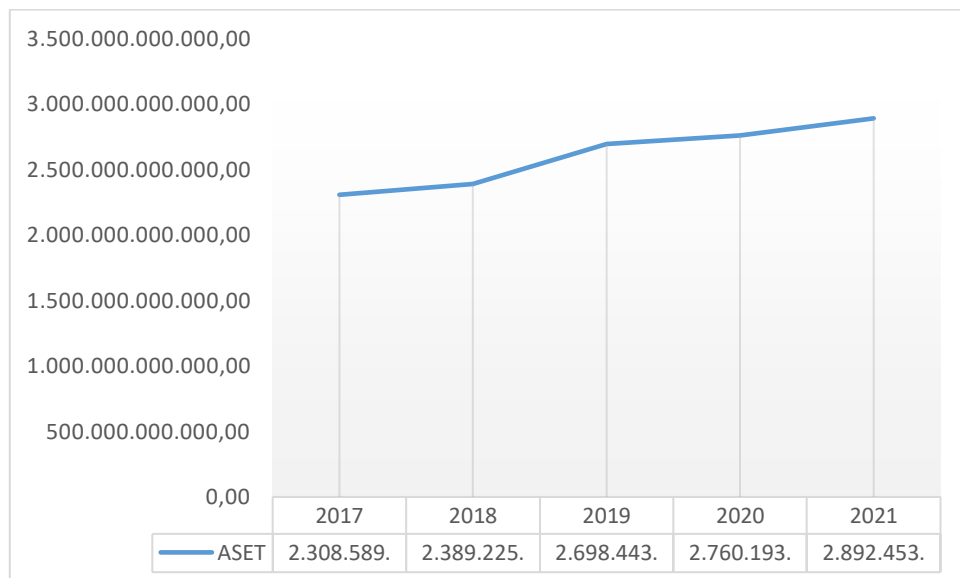
AKUN	TAHUN					Rata rata Pertumbuhan
	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>EKUITAS</b>						-
EKUITAS	2.283.181.256.796,35	2.353.951.076.412,31	2.633.055.798.669,41	2.711.528.785.611,89	2.871.111.370.186,06	5,51%
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>2.308.589.353.234,44</b>	<b>2.389.225.778.954,00</b>	<b>2.698.443.733.676,93</b>	<b>2.760.193.578.137,59</b>	<b>2.892.453.350.351,23</b>	<b>5,41%</b>

Sumber : BPKAD Kota Cimahi, Neraca Kota Cimahi 2017-2021

### 3.1.2.1. Asset

Jumlah Asset Pemerintah Kota Cimahi terus meningkat setiap tahunnya selama tahun 2017-2021 dengan rata rata pertumbuhan 5,41% per tahun, hal ini menandakan adanya peningkatan kepemilikan asset di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.

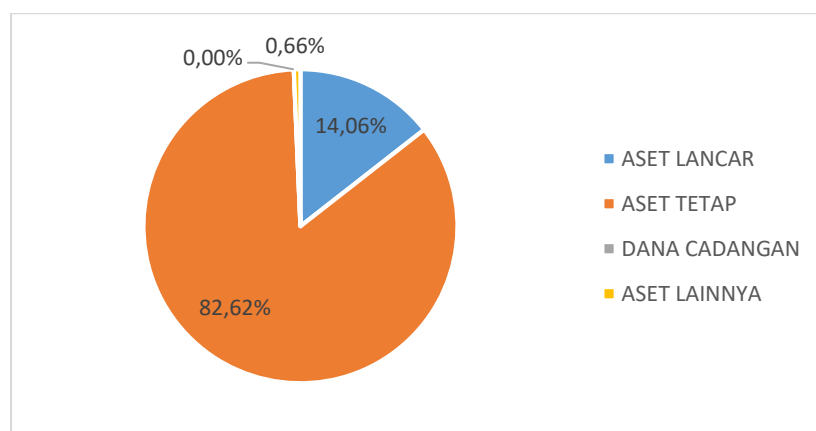
**Gambar 3.7.**  
**Perkembangan Total Asset Kota Cimahi Tahun 2017-2021 (Rupiah)**



Sumber : Neraca Kota Cimahi Tahun 2017-2021 (diolah)

Asset dengan porsi terbanyak ditempati oleh jenis asset tetap dengan rata-rata kontribusi tahun 2017-2021 sebesar 82,62%, diikuti oleh asset lancar dengan 14,06%, dan asset lainnya dengan 0,66%.

**Gambar 3.8.**  
**Perkembangan Total Asset Kota Cimahi Tahun 2017-2021 (Rupiah)**

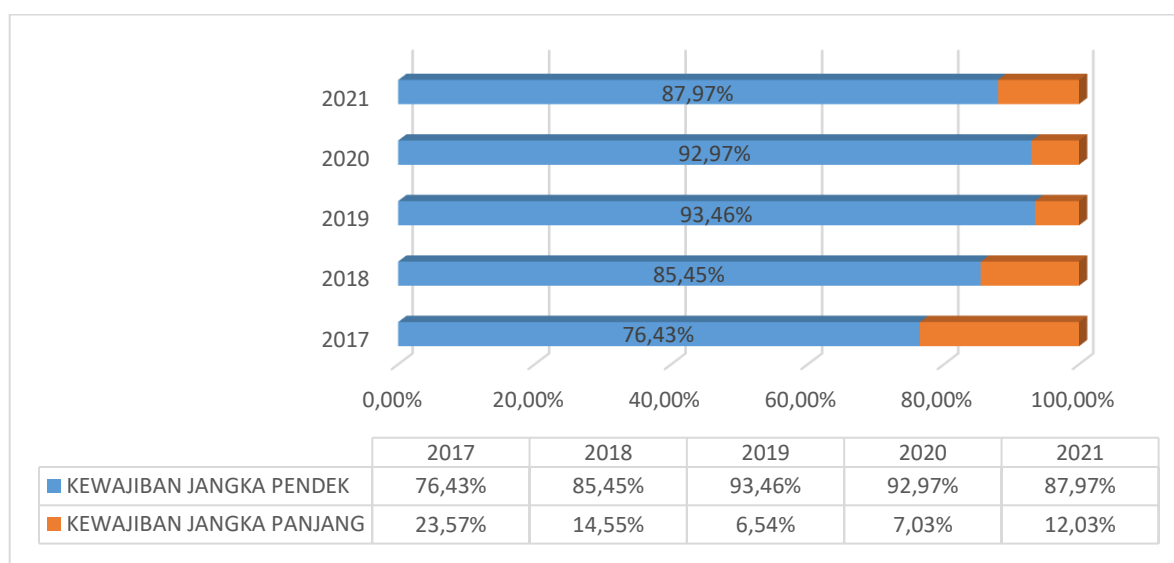


Sumber : Neraca Kota Cimahi Tahun 2017-2021 (diolah)

### 3.1.2.2. Liabilitas

Jumlah kewajiban atau liabilitas Kota Cimahi menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan meningkat, jumlah terbesar terjadi pada tahun 2019 karena ada penambahan pada pos Utang Jangka Pendek Lainnya yang signifikan.

**Gambar 3.9.**  
**Porsi Kewajiban/Liabilitas Kota Cimahi Tahun 2017-2021**



Sumber : LRA Kota Cimahi Tahun 2017-2021

Dari gambar di atas terlihat adanya kenaikan porsi kewajiban jangka pendek daerah pada tahun hal ini disebabkan adanya pembiayaan yang bersumber dari hutang jangka pendek yang harus diselesaikan kurang dari 1 (satu) tahun.

### 3.1.2.3. Ekuitas dana

Perkembangan ekuitas Kota Cimahi tahun 2017-2021 tumbuh rata-rata sebesar 5,51%. Tahun 2013-2017. Pada tahun 2017 tercatat jumlah ekuitas Kota Cimahi sebesar Rp.2,28 Trilyun kemudian terus meningkat hingga mencapai Rp.2,87 Trilyun pada tahun 2021. Berikut disajikan analisa rasio keuangan yang akan menggambarkan kemampuan keuangan Pemerintah kota Cimahi selama kurun waktu 2017-2021.

#### 3.1.2.4. Analisis Rasio Keuangan

Berdasarkan dari neraca Kota Cimahi tahun 2017-2021, maka hasil analisa rasio likuiditas dan rasio solvabilitas adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.7.**  
**Analisis Rasio Keuangan Kota Cimahi Tahun 2017-2021**

KETERANGAN	2017	2018	2019	2020	2021	Rasio Rata-Rata
Rasio Lancar ( <i>current ratio</i> )	21,99	8,73	4,60	9,37	23,18	13,57
Rasio Cepat ( <i>quick ratio</i> )	20,94	8,15	4,25	8,51	21,51	12,67
Rasio total hutang terhadap total Asset	1,10	1,48	2,42	1,76	0,74	1,50
Rasio hutang terhadap modal (ekuitas)	1,11	1,50	2,48	1,79	0,74	1,53

Sumber : neraca daerah Kota Cimahi 2017-2021, diolah

Hasil perhitungan rasio keuangan menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kota Cimahi dalam kondisi sehat sebagaimana ditunjukkan oleh rasio likuiditas dan solvabilitas yang positif. Analisis keduanya disajikan sebagai berikut :

##### 1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Ada dua rasio yang akan digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas yaitu rasio lancar dan rasio *quick*.

###### a. Rasio Lancar (*Current ratio*)

Rasio lancar menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar semakin tinggi kemampuan menutupi kewajiban jangka pendeknya.



**Tabel 3.8.**  
**Hasil Perhitungan Rasio Lancar Kota Cimahi Tahun 2017-2021**

KETERANGAN	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
A. Aktiva Lancar (dalam milyar)	426,99	263,11	280,91	423,86	435,22
B. Kewajiban Jangka Pendek (dalam milyar)	19,42	30,14	61,11	45,24	18,78
C. Rasio Lancar (A/B)	21,99	8,73	4,60	9,37	23,18

Sumber : Neraca Kota Cimahi Tahun 2017-2021 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, rasio lancar pada tahun 2017 adalah sebesar 21,99 dan tahun 2021 sebesar 23,18. Selama tahun 2017-2021 rata rata rasio lancar Kota Cimahi adalah sebesar 13,57, yang artinya setiap Rp.1 hutang lancar dijamin oleh Rp.13,57 harta lancar atau perbandingan antara aktiva lancar dan hutang lancar adalah 13,57:1.

b. Rasio Cepat (*Quick ratio*)

Rasio cepat merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid mampu menutupi hutang lancar. *Quick rasio* menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid.

**Tabel 3.9.**  
**Hasil Perhitungan Rasio Quick Kota Cimahi Tahun 2017-2021**

KETERANGAN	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
A. Aktiva Lancar (dalam milyar)	426,99	263,11	280,91	423,86	435,22
B. Persediaan (dalam milyar)	20,36	17,48	21,46	38,93	31,39
C. Kewajiban Jangka Pendek (dalam milyar)	19,42	30,14	61,11	45,24	18,78
D. Rasio Quick (A-B)/C	20,94	8,15	4,25	8,51	21,51

Sumber : Neraca Kota Cimahi Tahun 2017-2021 (diolah)

Selama tahun 2017-2022 rata rata ratio cepat pemerintah Kota Cimahi adalah sebesar 12,67 yang berarti setiap Rp.1 hutang lancar dijamin oleh Rp.12,67 harta lancar. Berdasarkan tabel di atas, *quick rasio* pada tahun 2017 adalah sebesar 20,94 dan pada tahun 2021 sebesar 21,51. Dengan nilai *Quick Ratio*

tersebut maka kemampuan Pemerintah Kota Cimahi dalam membayar kewajiban jangka pendeknya sangat baik walaupun sudah dikurangi persediaan.

Dari Hasil perhitungan dua rasio likuiditas di atas menunjukkan bahwa meskipun terjadi kenaikan utang jangka pendek pada 3 (tiga) tahun terakhir, namun rasio likuiditas masih baik, hal ini disebabkan karena jumlah aktiva lancar yang dimiliki Kota Cimahi masih cukup tinggi.

## 2. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Solvable berarti mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutangnya, jadi rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio solvabilitas terdiri atas :

### a. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset

Rasio total hutang terhadap total aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Cimahi.

**Tabel 3.10.**  
**Hasil Perhitungan Rasio Total Hutang terhadap Total Aset**  
**Kota Cimahi Tahun 2017-2021**

NAMA AKUN	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
A. Total Utang (dalam milyar)	25,41	35,27	65,39	48,66	21,345,17
B. Total Asset (dalam milyar)	2308,59	2389,23	2698,44	2760,19	2892,45523
C. Rasio Total Hutang terhadap Asset (A/B)	1,10	1,48	2,42	1,76	0,74

Sumber : Neraca Kota Cimahi Tahun 2017-2021 (diolah)

Besar rasio total hutang terhadap total aset pada tahun 2017 sebesar 1,10 dan pada tahun 2021 sebesar 0,74. Semakin

menurunnya ratio tersebut menunjukkan bahwa pengaruh hutang terhadap aktiva sangat kecil.

b. Rasio Hutang Terhadap Modal

Rasio hutang terhadap modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain.

**Tabel 3.11.**  
**Hasil Perhitungan Rasio Total Hutang terhadap Modal**  
**Kota Cimahi Tahun 2017-2021**

NAMA AKUN	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
A. Total Utang (dalam milyar)	25,41	35,27	65,39	48,66	21,34
B. Total Ekuitas (dalam milyar)	2.283,18	2.353,95	2.633,05	2.711,53	2.871,11
C. Rasio Utang terhadap Modal	1,11	1,50	2,48	1,79	0,74

Sumber : Neraca Kota Cimahi Tahun 2017-2021 (diolah)

Pada tahun 2017 rasio hutang terhadap modal Pemerintah Kota Cimahi adalah sebesar 1,11 serta periode tahun 2021 sebesar 0,74. Hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai total hutang masih jauh di bawah nilai modal yang dimiliki Pemerintah Kota Cimahi dan semakin mandiri serta tidak tergantung pada hutang.

### 3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Pada bagian ini disajikan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan. Pola kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu menjadi bahan pertimbangan bagi penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan pada Rencana Pembangunan Daerah periode 2023-2026.

### **3.2.1. Kebijakan Pendapatan**

Kebijakan pendapatan daerah Kota Cimahi merupakan perkiraan yang terukur secara Nasional, dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan pendapatan daerah tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan.

Upaya peningkatan pendapatan daerah antara lain dilakukan melalui :

1. Memaksimalkan Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber Pendapatan Daerah;
2. Peningkatan peran dan fungsi UPT dan unit lain penghasil PAD;
3. Melakukan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk pengalokasian sumber dana perimbangan dan non perimbangan;
4. Optimalisasi pengelolaan aset daerah;
5. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan pembayaran pajak dan retribusi;
6. Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan;
7. Optimalisasi kinerja organisasi pelayanan kepada wajib pajak; dan
8. Meningkatkan kinerja aparatur pelayanan publik untuk menciptakan kepuasan pelayanan prima dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.

### **3.2.2. Kebijakan Belanja**

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 belanja daerah dikelompokkan menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer, dengan kebijakan belanja daerah sebagai berikut :

1. Prioritas belanja untuk penyelenggaraan urusan pemerintah wajib dan pilihan;

2. Memprioritaskan pada pemenuhan SPM dan menuntaskan visi misi dalam RPJPD Kota Cimahi;
3. Sinkronisasi prioritas pembangunan nasional dan Provinsi;
4. Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDG's); dan
5. Pemenuhan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **3.2.3. Kebijakan Pembiayaan**

Kebijakan pembiayaan daerah akan sangat terkait dengan kondisi pendapatan dan belanja daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), transfer dari dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran.

### **3.2.4. Proporsi Penggunaan Anggaran**

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan Kota Cimahi pada periode tahun anggaran sebelumnya. Hasilnya digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah serta untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang.

#### **1. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja**

Analisis proporsi realisasi belanja daerah dibanding dengan anggaran selama tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.12.**  
**Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kota Cimahi Tahun 2017-2021**

kode Rekening	Uraian	2017			2018			2019		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
5.	<b>Belanja Daerah</b>	<b>1.637.050.871.413,09</b>	<b>1.339.382.098.733,00</b>	<b>81,8</b>	<b>1.691.773.488.737,46</b>	<b>1.489.072.968.877,00</b>	<b>88</b>	<b>1.675.364.781.120,20</b>	<b>1.501.760.938.252,15</b>	<b>89,64</b>
5.1.	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>657.066.306.096,09</b>	<b>501.702.378.675,00</b>	<b>76,4</b>	<b>647.220.697.443,00</b>	<b>592.738.168.300,00</b>	<b>91,6</b>	<b>654.981.383.526,42</b>	<b>607.397.864.512,00</b>	<b>92,74</b>
5.1.1.	Belanja Pegawai	610.820.981.433,97	483.803.464.386,00	79,2	611.745.216.959,00	570.330.482.845,00	93,2	631.842.996.313,59	586.764.369.789,00	92,87
5.1.2.	Belanja Bunga	6.212.161.375,00	1.519.531.175,00	24,5	750.000.000,00	518.723.151,00	69,2	575.862.334,00	687.088.955,00	119,3
5.1.4.	Belanja Hibah	14.431.924.700,00	13.947.887.750,00	96,7	17.290.350.000,00	16.159.150.000,00	93,5	16.362.800.000,00	15.355.225.000,00	93,84
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial				626.250.000,00	344.250.000,00	55	4.285.400.000,00	3.227.128.000,00	75,31
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa							-	-	-
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa	1.112.117.364,00	1.112.117.364,00	100	926.912.304,00	926.912.304,00	100	1.133.383.686,00	1.133.383.686,00	100
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	24.489.121.223,12	1.319.378.000,00	5,39	15.881.968.180,00	4.458.650.000,00	28,1	780.941.192,83	230.669.082,00	29,54
5.2.	<b>Belanja Langsung</b>	<b>979.984.565.317,00</b>	<b>837.679.720.058,00</b>	<b>85,5</b>	<b>1.044.552.791.294,46</b>	<b>896.334.800.577,00</b>	<b>85,8</b>	<b>1.020.383.397.593,78</b>	<b>894.363.073.740,15</b>	<b>87,65</b>
5.2.1.	Belanja Pegawai	123.210.615.086,00	113.042.912.108,00	91,8	97.027.373.600,00	88.719.622.895,00	91,4	87.098.793.602,00	81.599.837.059,00	93,69
5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	504.299.063.610,00	454.312.088.607,00	90,1	584.037.435.237,50	531.594.947.618,00	91	585.006.159.955,61	552.425.239.111,15	94,43
5.2.3.	Belanja Modal	352.474.886.621,00	270.324.719.343,00	76,7	363.487.982.456,96	276.020.230.064,00	75,9	348.278.444.036,17	260.337.997.570,00	74,75

kode	Uraian	2020			2021 (Unaudited)			Rata-rata Penyerapan	Rata-rata Pertumbuhan Penyerapan
		Rekening	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi		
<b>5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	1.576.350.590.820,19	1.282.319.835.502,11	81,4	1.856.578.149.343,00	1.481.512.704.849,00	79,80	84,13	-0,43%
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	787.674.516.193,71	638.355.882.017,09	81	773.244.095.136,00	679.060.682.785,00	87,82	85,91	4,24%
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	572.571.612.934,00	546.501.795.434,00	95,5	723.673.114.458,00	643.977.236.028,00	<b>88,99</b>	89,95	3,33%
5.1.2.	Belanja Bunga	1.000.000.000,00	781.441.813,09	78,1	600.000.000,00	308.874.114,00	<b>51,48</b>	68,51	46,66%
5.1.4.	Belanja Hibah	15.688.221.480,00	13.856.011.450,00	88,3	21.460.870.450,00	19.409.616.200,00	<b>90,44</b>	92,54	-1,59%
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	3.394.820.000,00	2.864.475.000,00	84,4	3.630.024.338,00	2.571.530.000,00	<b>70,84</b>	71,38	11,00%
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	195.019.861.779,71	74.352.158.320,00	38,1	23.880.085.890,00	12.793.426.443,00	<b>53,57</b>	30,94	123,90%
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>788.676.074.626,48</b>	<b>643.963.953.485,02</b>	<b>81,7</b>	<b>1.083.334.054.207,00</b>	<b>802.452.022.064,00</b>	<b>74,07</b>	<b>82,93</b>	<b>-3,40%</b>
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	98.022.822.976,00	90.381.434.304,00	92,2	171.409.865.673,00	147.881.085.049,00	<b>86,27</b>	91,07	-1,47%
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	520.004.318.232,48	456.337.905.380,02	87,8	486.171.912.024,00	407.510.372.229,00	<b>83,82</b>	89,42	-1,69%
5.2.3.	BELANJA MODAL	170.648.933.418,00	97.244.613.801,00	57	425.752.276.510,00	247.060.564.786,00	<b>58,03</b>	68,48	-6,12%

Sumber : LRA Kota Cimahi Tahun 2017-2021 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, Realisasi Penyerapan Belanja Daerah Kota Cimahi selama tahun 2017-2021 rata-rata sebesar 84,13%, dengan rata-rata pertumbuhan yang menurun sebesar minus 0,43%. Penyerapan belanja daerah tertinggi pada periode ini adalah pada Tahun 2019 sebesar 89,64% sedangkan penyerapan Belanja Daerah paling rendah adalah di tahun 2021 yakni sebesar 79,80%.

Penyerapan Belanja Tidak Langsung untuk periode 2017-2021 rata-rata adalah sebesar 85,91% dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,24% dimana penyerapan tertinggi pada komponen ini adalah pada pos belanja hibah yang rata rata sebesar 92,54%, diikuti oleh belanja pegawai sebesar 89,95%. Sedangkan pada pos Belanja Langsung terserap rata rata 82,93% dan rata-rata pertumbuhan yang menurun sebesar minus 3,40%, penyerapan terbesarnya ada pada pos Belanja pegawai sebesar 91,07% yang diikuti oleh belanja barang dan jasa sebesar 89,42%.

Tingkat penyerapan anggaran yang masih dibawah 90% tersebut menunjukkan belum optimalnya kemampuan pemerintah daerah kota dalam menyerap anggaran yang telah dialokasikan.

## 2. Analisis Pengeluaran Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Realisasi pengeluaran wajib dan mengikat tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.13.**  
**Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Cimahi**  
**Tahun 2017-2021**

No	Uraian	Realisasi				
		2017	2018	2019	2020	2021 (un audited)
A1	Belanja Operasi	703.883.578.082	750.999.223.675	759.115.949.194	807.048.803.319	824.081.735.193
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	214.018.948.798	286.526.614.374	296.081.270.703	351.323.623.546	360.106.714.135
2	Tambahan Penghasilan PNSD	168.540.915.100	170.954.429.097	175.510.319.000	199.435.233.064	204.421.113.891
3	Tunjangan Transportasi Pejabat ASN	-	-	-	9.400.440.000	9.500.000.000



No	Uraian	Realisasi				
		2017	2018	2019	2020	2021 (un audited)
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	5.459.184.307	765.675.745	868.712.259	1.200.000.000	1.200.000.000
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	414.667.129	-	-	-	-
6	Gaji dan Tunjangan DPRD	2.894.350.300	21.625.317.273	23.513.656.133	25.021.945.700	36.047.494.343
7	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD	8.358.220.000	7.284.375.000	6.860.700.000	10.315.620.000	
8	Gaji dan Tunjangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota	119.597.652	168.304.356	167.730.514	182.340.000	185.000.000
9	Belanja Penerimaan Lainnya Wali Kota dan Wakil Wali Kota	370.000.000	600.000.000	600.000.000	624.000.000	624.000.000
10	Belanja Bunga	1.519.531.175	518.723.151	463.851.804	1.000.000.000	1.000.000.000
11	Tunjangan dan Tambahan Penghasilan Guru	83.627.581.100	82.405.767.000	83.161.981.980	89.980.991.260	89.980.991.260
12	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	18.000.000	-	1.591.900.000	893.200.000	915.530.000
13	Belanja Pegawai BLUD	61.624.349.258	67.264.905.714	59.888.433.873	6.235.000.000	6.352.376.570
14	Belanja Barang dan Jasa BLUD	81.863.653.422	82.864.496.075	77.761.703.903	76.143.688.000	77.577.125.838
15	Belanja Modal BLUD	55.299.385.551	3.036.622.997	6.216.729.718	6.506.312.000	6.628.796.136
16	Belanja telepon	479.004.813	451.972.150	455.665.639	905.451.000	912.850.291
17	Belanja air	22.970.500	18.118.200	97.037.200	226.620.000	230.886.219
18	Belanja listrik	10.657.692.507	10.859.308.070	11.235.656.724	12.452.441.159	12.884.002.676
19	Belanja Premi Asuransi	8.301.926.470	15.493.544.473	14.455.599.744	14.995.763.590	15.278.065.321
20	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	293.600.000	161.050.000	185.000.000	206.134.000	236.788.513
<b>A2</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>1.112.117.364</b>	<b>926.912.304</b>	<b>1.133.383.686</b>	<b>1.546.326.450</b>	<b>1.546.326.450</b>
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah	-	-	-	-	-
2	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.112.117.364	926.912.304	1.133.383.686	1.546.326.450	1.546.326.450
<b>B</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>9.174.947.220</b>	<b>855.508.220</b>	<b>4.491.681.020</b>	<b>8.184.697.337</b>	<b>2.429.808.337</b>
1	Penyertaan Modal	-	-	3.500.000.000	5.754.889.000	-
2	Pembayaran Pokok Utang	9.174.947.220	855.508.220	991.681.020	2.429.808.337	2.429.808.337
	<b>JUMLAH (A1+A2+B)</b>	<b>714.170.642.666</b>	<b>752.781.644.199</b>	<b>764.741.013.900</b>	<b>816.779.827.106</b>	<b>828.057.869.980</b>

Sumber : LRA Kota Cimahi 2017-2021, diolah

### 3.2.5. Analisis Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Perencanaan penganggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Berikut ini disajikan penghitungan penutup defisit riil anggaran pada periode 2017 sampai 2021.

**Tabel 3.14.**  
**Realisasi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Cimahi Tahun 2017-2021**

No	Keterangan	Tahun					Rata-Rata
		2017	2018	2019	2020	2021 (Un Audited)	
1	Pendapatan Daerah	1.481.647.893.980,00	1.316.230.476.122,00	1.433.371.386.974,00	1.457.996.459.900,00	1.520.135.560.503,11	1.431.933.470.875
2	Belanja Daerah	1.339.382.098.733,00	1.489.072.968.877,00	1.501.760.938.252,15	1.282.319.835.502,11	1.481.545.124.849,00	1.438.674.716.870
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	9.174.947.220,00	855.508.220,00	24.645.538.955,00	34.746.347.598,00	855.508.220,00	15.275.725.748
<b>A</b>	<b>Defisit Riil</b>	<b>133.090.848.027</b>	<b>- 173.698.000.975</b>	<b>- 93.035.090.233</b>	<b>140.930.276.800</b>	<b>37.734.927.434</b>	<b>-22.016.971.744</b>
	<b>Pertumbuhan Defisit Riil</b>		<b>176,62%</b>	<b>-86,70%</b>	<b>166,01%</b>	<b>-273,47%</b>	<b>-4,38%</b>
	Ditutup oleh realisasi penerimaan pembiayaan						
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	206.225.060.012,65	340.040.123.838,53	165.917.985.197,92	121.693.751.477,73	271.172.220.677,53	224.706.020.298
2	Penerimaan Pinjaman Daerah			48.810.856.513,00	8.548.192.400,00		28.679.524.457
<b>B</b>	<b>Total Realisasi Penerimaan</b>	<b>206.225.060.013</b>	<b>340.040.123.839</b>	<b>214.728.841.711</b>	<b>130.241.943.878</b>	<b>271.172.220.678</b>	<b>239.045.782.526</b>
<b>C</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)</b>	<b>339.315.908.040</b>	<b>166.342.122.864</b>	<b>121.693.751.478</b>	<b>271.172.220.678</b>	<b>308.907.148.111,64</b>	<b>217.028.810.783</b>
	<b>Pertumbuhan SiLPA</b>		<b>-103,99%</b>	<b>-36,69%</b>	<b>55,12%</b>	<b>12,22%</b>	<b>-18,33%</b>

Sumber : LRA Kota Cimahi 2017-2021, diolah

Selama 5 (lima) tahun yaitu 2017-2021 terlihat bahwa nilai Defisit Rill APBD Kota Cimahi cenderung mengalami penurunan walaupun berfluktuatif, dengan rata-rata sebesar minus 4,38% per tahun. Data SiLPA menunjukkan nilai yang fluktuatif. Selama kurun waktu 2017 sampai 2021, nilai SiLPA tertinggi pada tahun 2017 yaitu Rp.339.315.908.040. Namun demikian adanya tren yang terus menurun dari dari realisasi SiLPA selama kurun waktu 2017-2021 yakni rata-rata sebesar minus 18,33%.

### **3.3. KERANGKA PENDANAAN**

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program yang akan diusung dalam Rencana pembangunan Daerah tahun 2023-2026 serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya. Kapasitas keuangan daerah merupakan total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

Seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah yang merupakan pengganti dari peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan menteri dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah, maka terdapat beberapa hal baru dalam pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2021 salah satunya adalah perubahan struktur belanja daerah, dimana pada tahun 2017-2020 yang berpedoman pada PP Nomor 58 Tahun 2005, sedangkan pada tahun 2021 dan selanjutnya akan mengacu pada PP Nomor 58 Tahun 2005. Perbedaan struktur anggaran belanja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.15.**  
**Perbandingan Antara Struktur Belanja Daerah pada PP Nomor 12**  
**Tahun 2019 dengan PP Nomor 58 Tahun 2005**

PP 12 Tahun 2019 & Permendagri No 77 Tahun 2020	PP 58 Tahun 2005 & Permendagri No 13 Tahun 2006
1. Belanja operasi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- belanja pegawai;</li> <li>- belanja barang dan jasa;</li> <li>- belanja bunga;</li> <li>- belanja subsidi;</li> <li>- belanja hibah;</li> <li>- belanja bantuan sosial.</li> </ul> 2. Belanja modal 3. Belanja Tidak Terduga 4. Belanja Transfer : <ul style="list-style-type: none"> <li>- belanja bagi hasil;</li> <li>- belanja bantuan keuangan.</li> </ul>	a. Belanja Langsung <ul style="list-style-type: none"> <li>- belanja pegawai;</li> <li>- belanja barang dan jasa;</li> <li>- belanja modal.</li> </ul> b. Belanja Tidak langsung <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Pegawai</li> <li>- Belanja bunga;</li> <li>- Belanja subsidi;</li> <li>- Belanja hibah</li> <li>- Belanja bantuan sosial;</li> <li>- Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan;</li> <li>- Belanja tidak terduga.</li> </ul>

Wabah pandemi Covid 19 yang terjadi di akhir tahun 2019 berdampak luas pada semua aspek kehidupan, hal ini berdampak pada banyak aspek diantaranya aspek sosial dan ekonomi. Dalam aspek ekonomi, ektor usaha kecil dan menengah, bahkan industri berskala besar juga terkena imbasnya. Kondisi ini berdampak dengan terkontraksinya pertumbuhan ekonomi daerah di tahun 2020, meskipun secara perlahan menunjukkan pemulihan di tahun 2021. Kondisi pemulihan diharapkan terus berlanjut hingga tahun 2026.

### **3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja**

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Proyeksi pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Adapun komponen dari pendapatan daerah, meliputi : Pendapatan Asli Daerah; Dana Perimbangan; dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Proyeksi Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022 dihitung berdasarkan angka APBD Tahun 2022. Sedangkan proyeksi Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 dihitung berdasarkan rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan dan belanja periode sebelumnya yakni 2017-2021 serta kebijakan pimpinan daerah.

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.16.**  
**Proyeksi Pendapatan dan Belanja**

Kode	Uraian	Realisasi (Un Audited)	APBD					Pertumbuhan 2022 - 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.520.135.560.503,11</b>	<b>1.279.315.955.320,00</b>	<b>1.388.676.608.541,96</b>	<b>1.397.530.475.716,92</b>	<b>1.406.614.465.005,50</b>	<b>1.415.934.770.193,08</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>405.104.991.553,11</b>	<b>355.046.836.583,00</b>	<b>363.676.608.541,96</b>	<b>372.530.475.716,92</b>	<b>381.614.465.005,50</b>	<b>390.934.770.193,08</b>	<b>2,44</b>
4.1.01	Pajak Daerah	179.891.802.692,00	158.885.001.230,00	163.651.551.266,90	168.561.097.804,91	173.617.930.739,05	178.826.468.661,23	3,00
4.1.02	Retribusi Daerah	11.548.482.640,00	12.780.921.500,00	13.164.349.145,00	13.559.279.619,35	13.966.058.007,93	14.385.039.748,17	3,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.956.960.000,00	9.391.200.000,00	9.391.200.000,00	9.391.200.000,00	9.391.200.000,00	9.391.200.000,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	203.707.746.221,11	173.989.713.853,00	177.469.508.130,06	181.018.898.292,66	184.639.276.258,51	188.332.061.783,69	2,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.053.096.467.719,00</b>	<b>924.269.118.737,00</b>	<b>1.025.000.000.000,00</b>	<b>1.025.000.000.000,00</b>	<b>1.025.000.000.000,00</b>	<b>1.025.000.000.000,00</b>	<b>2,72</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	823.523.843.021,00	793.508.589.000,00	875.000.000.000,00	875.000.000.000,00	875.000.000.000,00	875.000.000.000,00	<b>2,57</b>
4.2.01.01	DBH		63.968.336.000,00	75.000.000.000,00	75.000.000.000,00	75.000.000.000,00	75.000.000.000,00	<b>4,31</b>
4.2.01.01.03	DAK NON FISIK		165.760.000.000,00	175.000.000.000,00	175.000.000.000,00	175.000.000.000,00	175.000.000.000,00	<b>1,39</b>
4.2.01.01.04	DAK FISIK		27.826.107.000,00	-	-	-	-	
4.2.01.02	DAU		530.425.978.000,00	625.000.000.000,00	625.000.000.000,00	625.000.000.000,00	625.000.000.000,00	<b>4,46</b>
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	229.572.624.698,00	130.760.529.737,00	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00	<b>3,68</b>
4.2.05	DID		5.528.168.000,00	-	-	-	-	
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>61.934.101.231,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
4.3.01	Pendapatan Hibah	6.700.327.000,00						
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	55.233.774.231,00						

Kode	Uraian	Realisasi (Un Audited)	APBD		Proyeksi			Pertumbuhan 2022 - 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	1.520.135.560.503,11	1.279.315.955.320,00	1.388.676.608.541,96	1.397.530.475.716,92	1.406.614.465.005,50	1.415.934.770.193,08	2,62
5	<b>BELANJA</b>	1.481.545.124.849,00	1.480.824.900.153,00	1.506.971.257.568,00	1.571.808.862.000,00	1.554.149.981.000,00	1.553.295.112.000,00	
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	1.221.691.133.620,00	1.377.256.987.159,00	1.409.658.093.568,00	1.454.495.698.000,00	1.416.836.817.000,00	1.395.981.948.000,00	0,37
5.1.01	Belanja Pegawai (+Sertifikasi)	643.970.516.028,00	727.600.156.083,00	761.960.768.210,50	791.410.623.574,71	807.238.836.046,20	823.383.612.767,13	3,15
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	555.398.177.278,00	549.567.914.626,00	552.818.738.907,50	507.588.747.975,29	518.476.654.503,80	480.977.008.782,87	-3,17
5.1.03	Belanja Bunga	308.874.114,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
5.1.04	Belanja Subsidi	410.574.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah (+BOS)	19.031.462.200,00	96.603.586.450,00	91.178.586.450,00	151.796.326.450,00	87.421.326.450,00	87.921.326.450,00	4,76
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.571.530.000,00	2.785.330.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	1,93
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	247.060.564.786,00	78.567.912.994,00	72.313.164.000,00	92.313.164.000,00	112.313.164.000,00	132.313.164.000,00	14,79
5.2.01	Belanja Modal Tanah	23.880.085.890,00						
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi							
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya							
5.3	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	12.793.426.443,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga			25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	
	<b>Jumlah Belanja</b>	1.481.545.124.849,00	1.480.824.900.153,00	1.506.971.257.568,00	1.571.808.862.000,00	1.554.149.981.000,00	1.553.295.112.000,00	1,22
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	38.590.435.654,11	(201.508.944.833,00)	(118.294.649.026,04)	(174.278.386.283,08)	(147.535.515.994,50)	(137.360.341.806,92)	
6	<b>PEMBIAYAAN</b>		201.490.007.833,00	118.294.649.026,04	174.278.386.283,08	147.535.515.994,50	137.360.341.806,92	

Kode	Uraian	Realisasi (Un Audited)	APBD					Pertumbuhan 2022 - 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>		<b>213.919.816.170,00</b>	<b>150.724.458.026,04</b>	<b>176.708.195.283,08</b>	<b>149.965.324.994,50</b>	<b>139.790.150.806,92</b>	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	271.172.220.677,53	213.919.816.170,00	150.724.458.026,04	146.708.195.283,08	149.965.324.994,50	139.790.150.806,92	-9,19
	Pencairan Dana Cadangan				30.000.000.000,00			
	Penerimaan Pinjaman Daerah							
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>271.172.220.677,53</b>	<b>213.919.816.170,00</b>	<b>150.724.458.026,04</b>	<b>176.708.195.283,08</b>	<b>149.965.324.994,50</b>	<b>139.790.150.806,92</b>	<b>-8,56</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>		<b>12.429.808.337,00</b>	<b>32.429.809.000,00</b>	<b>2.429.809.000,00</b>	<b>2.429.809.000,00</b>	<b>2.429.809.000,00</b>	
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan		-	30.000.000.000,00				
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah		10.000.000.000,00					
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	855.508.220,00	2.429.808.337,00	2.429.809.000,00	2.429.809.000,00	2.429.809.000,00	2.429.809.000,00	0,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>855.508.220,00</b>	<b>12.429.808.337,00</b>	<b>32.429.809.000,00</b>	<b>2.429.809.000,00</b>	<b>2.429.809.000,00</b>	<b>2.429.809.000,00</b>	<b>17,10</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>270.316.712.457,53</b>	<b>201.490.007.833,00</b>	<b>118.294.649.026,04</b>	<b>174.278.386.283,08</b>	<b>147.535.515.994,50</b>	<b>137.360.341.806,92</b>	<b>-4,05</b>
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	308.907.148.111,64	-18.937.000,00	0	0,00	0	0	
	<b>Total APBD</b>	<b>1.791.307.781.180,64</b>	<b>1.493.235.771.490,00</b>	<b>1.506.971.257.568,00</b>	<b>1.571.808.862.000,00</b>	<b>1.554.149.981.000,00</b>	<b>1.553.295.112.000,00</b>	

Sumber : hasil proyeksi 2022

#### **a. Proyeksi Pendapatan 2023-2026**

Proyeksi pendapatan merupakan sekumpulan perkiraan yang dapat berubah atau bersifat indikatif sepanjang faktor-faktor penghitungannya tidak mengalami perubahan. Proyeksi pendapatan harus didapat dengan nilai perkiraan yang terukur secara rasional dan direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dengan mempertimbangkan angka rata-rata pertumbuhan setiap objek pendapatan daerah serta variabel-variabel yang mempengaruhinya, antara lain :

- a. Kebijakan keuangan Negara;
- b. Asumsi Indikator Makro Ekonomi;
- c. Kebijakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi; dan
- d. Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah di masa lalu.

Selain itu kebijakan pendapatan daerah Kota Cimahi tahun 2023-2026 diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan pada sektor pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan yang sah dan peningkatan dana perimbangan.

Pendapatan daerah Kota Cimahi untuk kurun waktu 2022-2026 diasumsikan meningkat rata-rata 2,44% per tahun dengan beberapa asumsi sebagai berikut :

- a. Pajak Daerah dan retribusi daerah ditargetkan meningkat 3% setiap tahun, diharapkan kenaikan target tersebut dapat mendorong optimalisasi pendapatan daerah dengan memaksimalkan potensi sektor riil terutama terkait pajak dan retribusi daerah yang diharapkan akan memperkuat kemampuan fiskal daerah di masa yang akan datang;
- b. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berdasarkan data tahun 2022 diproyeksikan tetap sampai dengan tahun 2026;
- c. Lain-lain PAD yang sah ditargetkan meningkat 2% per tahun dimana diharapkan adanya peningkatan pendapatan dari RSUD serta UPT/BLUD Air Minum;
- d. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat diasumsikan sama sampai tahun 2026;



- e. Dana Bagi Hasil diproyeksikan sama setiap tahunnya begitu pula dengan DAK non Fisik yakni dana BOS dan dimana didalamnya sudah termasuk dana BOP dan sertifikasi guru diasumsikan sama dengan anggaran pada tahun 2022;
- f. DAK Fisik dan Banprov belum dimasukkan dalam struktur anggaran;
- g. DAU diasumsikan tetap sampai tahun 2026 demikian juga dengan Pendapatan Transfer Antar Daerah; dan
- h. Penyusunan target Pendapatan Transfer yang bersifat flat dengan adalah berdasarkan baseline Tahun 2022, dengan mempertimbangkan tidak ada perubahan yang fundamental terkait perhitungan alokasi, nilai tahun tahun sebelumnya yang dianggap masih relevan sebagai perkiraan target serta mempertimbangkan kebijakan pimpinan daerah pada saat penyusunan.

**b. Proyeksi Belanja tahun 2023-2026**

Belanja daerah yang merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Cimahi yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 maka pengertian belanja tidak langsung dan belanja langsung tidak berlaku lagi dan diganti dengan a. belanja operasi; b. belanja modal; dan c. belanja tidak terduga.

Analisis belanja daerah didasarkan pada kondisi perekonomian yang digambarkan melalui serangkaian asumsi indikator makro ekonomi yang mengacu pada kebijakan pemerintah daerah serta mempertimbangkan kebijakan pembiayaan daerah, tingkat

pertumbuhan pengeluaran wajib mengikat serta prioritas utama sehingga dapat diperoleh angka-angka pertumbuhan pengeluaran wajib mengikat dan prioritas.

Proyeksi Belanja Daerah dalam APBD Kota Cimahi tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Belanja Operasi yang diproyeksikan tumbuh sebesar rata-rata 0,42% setiap tahun, dimana didalamnya terdapat Belanja Pegawai diasumsikan naik sebesar rata-rata 3,15% dimana didalamnya sudah termasuk Belanja gaji PNS menghitung 2% *acress* per tahun, perkiraan kebutuhan P3K sesuai dengan kebutuhan di tahun 2023, serta sertifikasi guru berdasarkan anggaran tahun 2022;
- b. Belanja Bunga Pembayaran hutang daerah yang menjadi kewajiban mengikat dianggarkan berdasarkan kebutuhan pada tahun 2021 dan tahun 2022;
- c. Belanja Bantuan Keuangan termasuk alokasi untuk bantuan keuangan kepada partai politik diproyeksikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- d. Belanja Hibah dan Bansos disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dengan besaran yang telah disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah;

- e. Belanja Modal diasumsikan bertambah dengan berpedoman pada peraturan UU No 1 tahun 2022 untuk mengejar 40% Belanja Infrastruktur selama 5 tahun setelah peraturan ditetapkan, dengan rata rata pertumbuhan tahun 2022-2026 sebesar 14,79%; dan
- f. Belanja Tidak terduga dialokasikan berdasarkan kebutuhan anggaran pada tahun 2022 dgn asumsi Pandemi berubah status menjadi Endemi COVID.

### 3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan

#### a. Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

Perencanaan penganggaran SiLPA sendiri berdasarkan pada perhitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya.

Proyeksi SiLPA tahun 2023-2026 direncanakan mengalami penurunan dari tahun ke tahun, dengan besaran % SiLPA terhadap tahun sebelumnya sebesar 9-10 %.

**Tabel 3.17.**  
**SILPA 2023-2026**

Uraian	Realisasi (Un Audited)	APBD	Proyeksi			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
SILPA	271.172.220.677,53	213.919.816.170,00	150.724.458.026,04	146.708.195.283,08	149.965.324.994,50	139.790.150.806,92

Sumber : hasil proyeksi 2022

#### b. Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat

Proyeksi pengeluaran wajib mengikat pada tahun 2023-2026 berpedoman pada peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dimana pada penjelasan pasal 106 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “*belanja yang bersifat mengikat*” adalah belanja yang dibutuhkan terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan seperti belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Sedangkan “*belanja yang*

bersifat wajib” adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proyeksi belanja pengeluaran wajib dan mengikat tahun 2023-2026 diasumsikan tetap dengan menggunakan data terakhir pada APBD 2022, kecuali untuk belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan PNSD yang memperhitungkan akses 2%.

Lebih rinci proyeksi tersebut ditunjukkan pada tabel berikut :

**Tabel 3.18.**  
**Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat 2023-2026**

No	Uraian	unaudited	APBD	Proyeksi			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>824.081.735.193</b>	<b>811.032.528.469</b>	<b>821.610.477.915</b>	<b>834.295.591.216</b>	<b>846.277.220.167</b>	<b>858.498.481.698</b>
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	360.106.714.135	367.308.848.418	374.655.025.386	382.148.125.894	389.791.088.412	397.586.910.180
2	Tambahan Penghasilan PNSD	204.421.113.891	208.509.536.169	212.679.726.892	216.933.321.430	221.271.987.859	225.697.427.616
3	Tunjangan Transportasi Pejabat ASN	9.500.000.000	-	-	-	-	-
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	-	-	-	-	-	-
6	Gaji dan Tunjangan DPRD serta Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD	36.047.494.343	35.706.013.488	35.706.013.489	35.706.013.490	35.706.013.491	35.706.013.492
8	Gaji dan Tunjangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota	185.000.000	246.036.456	246.036.457	246.036.458	246.036.459	246.036.460
9	Belanja Penerimaan Lainnya Wali Kota dan Wakil Wali Kota	624.000.000	1.066.831.296	1.066.831.297	1.066.831.298	1.066.831.299	1.066.831.300
10	Belanja Bunga	1.000.000.000	500.000.000	500.000.001	500.000.002	500.000.003	500.000.004
11	Tunjangan dan Tambahan Penghasilan Guru	89.980.991.260	72.970.000.000	72.970.000.001	72.970.000.002	72.970.000.003	72.970.000.004
12	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	915.530.000	938.418.250	938.418.250	938.418.250	938.418.250	938.418.250
13	Belanja Pegawai BLUD	6.352.376.570	6.471.962.804	6.471.962.804	6.471.962.804	6.471.962.804	6.471.962.804
14	Belanja Barang dan Jasa BLUD	77.577.125.838	79.037.548.762	79.037.548.762	79.037.548.762	79.037.548.762	79.037.548.762
15	Belanja Modal BLUD	6.628.796.136	6.753.586.088	6.753.586.088	6.753.586.088	6.753.586.088	6.753.586.088
16	Belanja telepon	912.850.291	920.310.048	920.310.048	920.310.048	920.310.048	920.310.048
17	Belanja air	230.886.219	235.232.752	235.232.752	235.232.752	235.232.752	235.232.752
18	Belanja listrik	12.884.002.676	13.330.520.727	13.330.520.727	13.330.520.727	13.330.520.727	13.330.520.727
19	Belanja Premi	15.278.065.321	15.565.681.504	15.565.681.504	15.565.681.504	15.565.681.504	15.565.681.504

No	Uraian	unaudited	APBD	Proyeksi			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Asuransi						
20	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	236.788.513	272.001.707	272.001.707	272.001.707	272.001.707	272.001.707
<b>A2</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>1.546.326.450</b>	<b>1.546.326.450</b>	<b>1.546.326.451</b>	<b>1.546.326.452</b>	<b>1.546.326.453</b>	<b>1.546.326.454</b>
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah	-	-	-	-	-	-
2	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.546.326.450	1.546.326.450	1.546.326.451	1.546.326.452	1.546.326.453	1.546.326.454
<b>B</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>855.508.220</b>	<b>12.429.808.337</b>	<b>32.429.809.000</b>	<b>2.429.809.000</b>	<b>2.429.809.000</b>	<b>2.429.809.000</b>
1	Pembentukan dana cadangan		-	30.000.000.000			
2	Penyertaan Modal		10.000.000.000				
2	Pembayaran Pokok Utang	855.508.220	2.429.808.337	2.429.809.000	2.429.809.000	2.429.809.000	2.429.809.000
	<b>JUMLAH (A1+A2+B)</b>	<b>826.483.569.863</b>	<b>825.008.663.256</b>	<b>855.586.613.366</b>	<b>838.271.726.668</b>	<b>850.253.355.620</b>	<b>862.474.617.152</b>

Sumber : hasil proyeksi 2022

### c. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah 2023-2026

Kapasitas riil keuangan daerah diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan. Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dilakukan berdasarkan penghitungan proyeksi pendapatan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, dan proyeksi belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat Kota Cimahi. Dengan demikian, kapasitas riil keuangan daerah adalah besaran anggaran yang dapat dibelanjakan di luar dari alokasi pengeluaran wajib dan mengikat.

Berdasarkan pola penghitungan tersebut, maka realisasi kapasitas riil keuangan daerah Kota Cimahi pada periode 2023 sampai dengan 2026 disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.19.**  
**Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah 2023-2026**

No	Uraian	Proyeksi			
		2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan	1.388.676.608.541,96	1.397.530.475.716,92	1.406.614.465.005,50	1.415.934.770.193,08
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)		30.000.000.000,00		
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	150.724.458.026,04	146.708.195.283,08	93.224.194.994,50	139.790.151.806,92
4	Penerimaan Pinjaman				
	<b>Total Penerimaan</b>	<b>1.539.401.066.568,00</b>	<b>1.574.238.671.000,00</b>	<b>1.499.838.660.000,00</b>	<b>1.555.724.922.000,00</b>
	<b>Dikurangi:</b>				
5	Belanja yang Wajib dan Mengikat	855.586.613.366,25	838.271.726.667,82	850.253.355.620,29	862.474.617.151,70
6	Pengeluaran Pembiayaan	32.429.809.000,00	2.429.809.000,00	2.429.809.000,00	2.429.809.000,00
7	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0	0	0	0
	<b>Kapasitas Riil Keuangan Daerah</b>	<b>651.384.644.201,75</b>	<b>733.537.135.332,19</b>	<b>647.155.495.379,71</b>	<b>690.820.495.848,30</b>

Sumber : hasil proyeksi 2022

### **3.4. KEBIJAKAN ALOKASI ANGGARAN**

Alokasi anggaran merupakan langkah berikutnya setelah mengetahui kapasitas keuangan daerah. Mengingat keterbatasan anggaran, maka alokasi anggaran dilakukan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Alokasi anggaran Kota Cimahi dalam rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 diprioritaskan untuk :

1. Pemenuhan pengeluaran wajib dan mengikat;
2. Prioritas pada penyelesaian pencapaian target SPM pelayanan dasar yang belum tuntas pada RPJMD Kota Cimahi 2017-2022;
3. Pencapaian Visi Misi Daerah dalam RPJPD Kota Cimahi;
4. Prioritas pada pemulihan ekonomi daerah pasca pandemi *Covid-19*;
5. Pembangunan Infrastruktur yang mendukung pada pemulihan ekonomi dan sosial pasca pandemi *Covid-19*;
6. Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kota Cimahi; dan
7. Mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembangunan Provinsi Jawa barat.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka alokasi kapasitas keuangan daerah Kota Cimahi untuk mendanai pembangunan tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Prioritas I , dialokasikan untuk membiayai belanja dan pengeluaran yang wajib dan mengikat;
2. Prioritas II, dialokasikan untuk pemenuhan penerapan pelayanan dasar dan prioritas pembangunan 2023-2026; dan
3. Prioritas III, dialokasikan untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintah lainnya.

Penyajian alokasi kapasitas keuangan untuk Prioritas I dan II digabungkan karena Prioritas II yang menggambarkan kebutuhan anggaran belanja untuk pemenuhan pelayanan dasar serta prioritas pembangunan 2023-2026 menjadi bagian dari prioritas I yang merupakan pengeluaran wajib dan mengikat, sehingga sisa kapasitas keuangan

dialokasikan untuk prioritas III. Adapun alokasi masing masing prioritas disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.20.**  
**Rencana Penggunaan Kapasitas Keuangan Daerah Kota Cimahi**  
**Tahun 2023-2026**

Uraian	Proyeksi			
	2023	2024	2025	2026
<b>Kapasitas Keuangan Daerah</b>	<b>1.506.971.257.568,00</b>	<b>1.571.808.862.000,00</b>	<b>1.554.149.981.000,00</b>	<b>1.553.295.112.000,00</b>
a. Prioritas I dan II	855.586.613.366,25	838.271.726.667,82	850.253.355.620,29	862.474.617.151,70
b. Prioritas III	651.384.644.201,75	733.537.135.332,19	647.155.495.379,71	690.820.495.848,30

*Sumber : hasil proyeksi 2022*

Selain itu dalam penyusunan APBD perlu pula untuk memperhatikan kewajiban pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal khusus ini antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa.

Sehubungan dengan amanat tersebut, maka pada proyeksi belanja wajib dan mengikat dialokasikan anggaran untuk :

1. Fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah;
2. Kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji;
3. Penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik, yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan (undang-undang tentang APBN);



4. Pengawasan paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah;
5. Pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah; dan
6. Anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018, paling sedikit 5% dari APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus, ditambah dana alokasi umum tambahan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas maka Proyeksi Alokasi Anggaran daerah kota Cimahi untuk tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.21.**  
**Rencana Alokasi Anggaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026**

URAIAN	2023	2024	2025	2026
Pendidikan 20% dari APBD	301.394.251.514	314.361.772.400	310.829.996.200	310.659.022.400
Kesehatan 10% dari APBD diluar Gaji	144.157.032.248	157.130.886.200	155.414.998.100	153.820.542.320
Infrastruktur 25% dari Dana Transfer Umum	256.250.000.000	256.250.000.000	256.250.000.000	256.250.000.000
Anggaran Peningkatan Kapasitas SDM Min 0,16% dari APBD	2.411.154.012	2.514.894.179	2.486.639.970	2.485.272.179
Anggaran Penguatan APIP 0,9% dari APBD	13.562.741.318	14.146.279.758	13.987.349.829	13.979.656.008
Pemberdayaan di Wilayah 5% dari APBD diluar DAK	66.598.562.878	69.840.443.100	68.957.499.050	68.914.755.600
Anggaran Keuangan Min 0,16% dari APBD	2.411.154.012	2.514.894.179	2.486.639.970	2.485.272.179
<b>TOTAL</b>	<b>1.506.971.257.568</b>	<b>1.571.808.862.000,00</b>	<b>1.554.149.981.000,00</b>	<b>1.553.295.112.000,00</b>

*Sumber : hasil proyeksi 2022*

## **BAB IV**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH**

Dalam usaha untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang sinergi antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup, pembangunan di daerah hendaknya benar-benar menjadi proses sistematis yang terencana, yang menysasar pada penyelesaian permasalahan melalui intervensi program kegiatan yang berdampak pada teratasinya isu strategis, sehingga dapat peningkatan nilai (*value*) kota bagi masyarakatnya.

Bab ini berisi uraian permasalahan utama kota yang merupakan ketimpangan (*gap*) dari target dan pencapaian indikator kinerja dimasa lalu yang, yang dinilai masih akan menjadi masalah dimasa yang akan datang. Selain itu isu-isu strategis juga dipetakan sebagai kekuatan, peluang, tantangan ataupun ancaman yang harus bisa diarahkan menjadi faktor positif pengungkit pembangunan. Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul sebagai akibat dari adanya kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

#### **4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN**

Permasalahan pembangunan daerah adalah suatu kondisi dimana kinerja pembangunan yang dicapai tidak sesuai dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan sendiri muncul akibat masih adanya kekuatan yang belum diberdayakan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi dengan baik, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi. Perumusan permasalahan pembangunan ditujukan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah pada masa lalu. Identifikasi tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja yang dilakukan terhadap perencanaan

jangka pendek dan jangka menengah tahun sebelumnya serta mempertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah.

Terjadinya pandemi *Covid-19* secara global di awal tahun 2020 telah mengubah arah kebijakan prioritas pembangunan daerah melalui refocusing anggaran belanja untuk lebih banyak mendukung penanganan dampak pandemi *Covid-19* baik dari aspek kesehatan, ekonomi ataupun social, sehingga mengakibatkan adanya beberapa target pembangunan yang tidak tercapai dan harus dilanjutkan kembali pada tahun berikutnya.

Berdasarkan gambaran umum pembangunan Kota Cimahi yang disajikan di Bab 2 dokumen ini, selama periode RPJMD tahun 2017-2022 tergambar bahwa permasalahan pokok pembangunan adalah :

1. Meningkatnya angka kemiskinan;
2. Sumber daya manusia yang kurang berdaya saing;
3. Belum optimalnya kualitas pembangunan ekonomi;
4. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan; dan
5. Belum terpenuhinya standar pelayanan perkotaan.

Selanjutnya pada sub bab ini akan diuraikan jenis, tingkat dan penyebab dari masing-masing permasalahan tersebut, sebagai berikut :

#### **4.1.1. Meningkatnya Angka Kemiskinan**

Kemiskinan masih merupakan persoalan yang menjadi beban berat, terutama dikaitkan dengan isu kesenjangan yang semakin melebar antara si kaya dan si miskin. Orientasi untuk menjadi maju dan mapan dari segi ekonomi tentu menganggap kemiskinan adalah masalah mutlak yang harus segera diselesaikan disamping masalah lain. Kemiskinan memberikan dampak yang beraneka ragam mulai dari tindak kriminal, pengangguran, kesehatan terganggu, dan lain sebagainya. Masalah yang paling penting adalah bagaimana caranya anak-anak yang sama sekali tidak mampu dapat bersekolah dengan baik seperti anak-anak lainnya, jika masalah itu tidak dapat dibereskan maka akan muncul masalah-masalah baru yang lebih banyak lagi.

Angka penduduk miskin Kota Cimahi terus mengalami peningkatan dalam dua tahun terakhir. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cimahi penduduk miskin Kota Cimahi yang pada tahun 2020 sebesar 31,64% atau 31.640 jiwa meningkat menjadi 32,48% pada tahun 2021 atau menjadi 32.480 jiwa. Pandemi *Covid-19* menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penduduk Kota Cimahi mengalami peningkatan.

Angka kemiskinan ini jauh lebih tinggi dari target RPJMD Perubahan Kota Cimahi Tahun 2017-2022, sehingga terkait angka kemiskinan menjadi *PR* besar yang harus diselesaikan pada tahap rencana pembangunan transisi dimana program program pengentasan kemiskinan harus menjadi prioritas utama sehingga penduduk miskin Kota Cimahi tidak bertambah.

**Tabel 4.1.**  
**Data Target Angka Kemiskinan RPJMD Perubahan Dengan Angka Kemiskinan BPS**

2019		2020		2021		2022
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
4,39 %	4,39 %	5,21 %	5,11 %	5,07 %	5,35 %	5,02

Sumber : BPS, 2021

Salah satu permasalahan program pengentasan kemiskinan di Kota Cimahi adalah masih belum optimalnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang disebabkan oleh :

1. Tingginya angka PPKS di Kota Cimahi yang pada tahun 2020 mencapai 17.210 jiwa, yang dikarenakan karena keterbatasan pemerintah dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial;
2. Kurangnya koordinasi penanganan PPKS untuk wilayah lintas batas. Dengan adanya PMKS yang datang dari kabupaten/kota sekitar; dan
3. Masih belum termanfaatkannya data PPKS sebagai *data base* sasaran program pengentasan kemiskinan di Kota Cimahi.

#### **4.1.2. SDM Kurang Berdaya Saing**

Kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan komponen penting dalam setiap gerak pembangunan. Kualitas SDM didefinisikan sebagai keadaan penduduk baik secara perorangan maupun kelompok berdasarkan tingkat kemajuan yang telah dicapai. Pengembangan SDM menjadi hal yang sangat penting untuk mendorong kemajuan. Hanya SDM yang berkualitas tinggilah yang dapat mempercepat pembangunan. Sebab peningkatan kualitas SDM mampu mendorong daya saing di era globalisasi. Daya saing sangat membutuhkan kualitas SDM karena SDM lah mampu menggerakkan sektor-sektor produktif, yang dapat mengungkit kualitas daya saing suatu wilayah.

##### **4.1.2.1. Sektor Pendidikan**

Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk, menunjukkan semakin tinggi kualitas sumber daya manusia di negara tersebut. Pendidikan akan meningkatkan kemampuan penduduk untuk mengolah sumber daya alam yang dimiliki sehingga akan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Persoalan sumber daya manusia semakin menjadi perhatian utama karena kualitas dan talenta yang dimiliki tiap individu kian dipandang sebagai kunci pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, dan inovasi. Negara mana saja yang telah mempersiapkan dan menetapkan langkah dalam meningkatkan daya saing, talenta, dan kualitas sumber daya manusia

Dalam mengukur daya saing manusia tersebut, *Global Talent Competitive Index* memberikan indikator penilaian indeks ini adalah pendapatan per kapita, pendidikan, infrastruktur teknologi komputer informatika, gender, lingkungan, tingkat toleransi hingga stabilitas politik.

Kualitas SDM Kota Cimahi sampai dengan tahun 2020 termasuk dalam kategori rendah. Hal ini terjadi disebabkan salah satunya oleh rendahnya kualitas pendidikan, yang ditandai dengan rata-rata lama sekolah penduduk Kota Cimahi yang hanya 10,98 tahun. Angka ini mengandung arti bahwa rata-rata penduduk Kota Cimahi hanya mencapai lulus SMP atau hanya mencapai kelas 2 SMA.

Pemerintah Kota Cimahi selama ini telah memberikan perhatian yang sangat besar dalam sektor pendidikan. Terbukti dari anggaran belanja yang sudah dialokasikan sebesar 20% dari APBD untuk sektor pendidikan yang didalamnya termasuk Program Indonesia Pintar, Bantuan Operasional Sekolah, pembangunan/rehabilitasi fasilitas pendidikan dan Beasiswa Bidik Misi. Namun demikian, kualitas SDM di bidang pendidikan masih dikategorikan rendah.

Berdasarkan kondisi tersebut, ditemukan beberapa permasalahan yaitu :

1. Belum optimalnya angka partisipasi murni di pendidikan dasar baik SD maupun SMP. Hal ini ditandai dengan belum mencapainya APM yang maksimal apalagi dibandingkan antara APM SD dan SMP;
2. Belum meratanya distribusi kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan masih perlunya peningkatan kualitas belajar mengajar. Hal ini ditandai dengan terkonsentrasinya guru satu bidang studi di satu sekolah;
3. Masih terdapat angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan SD, SMP. Pada Tahun 2019 meski angka putus sekolah mengalami penurunan signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya, namun jumlah angka putus sekolah masih ada untuk seluruh jenjang pendidikan;
4. Pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dapat meningkatkan kemampuan kewirausahaan lulusan dan kecakapan hidup. Pendidikan non formal yang berfungsi sebagai bentuk pendidikan sepanjang hayat dan diarahkan terutama untuk meningkatkan kecakapan hidup dan kompetensi kejuruan belum optimal diakses secara luas oleh masyarakat;
5. Belum optimalnya manajemen penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan; dan
6. Pola pendidikan setelah adanya pandemi *Covid-19* mengalami pergeseran, yang selama ini lekat dengan konsep belajar tatap muka dalam ruang kelas menjadi tatap muka secara *online*. Permasalahan yang dihadapi adalah belum adanya kesiapan metode pembelajaran

*online* yang standar, masih ditemui beberapa anak didik yang kesulitan dalam penyediaan infrastruktur *hardware* belajar *online* seperti HP atau komputer/laptop. Selain itu keterbatasan ekonomi menyebabkan beberapa orang tua murid sulit menyediakan biaya untuk koneksi internet secara kontinu setiap hari kerja.

#### **4.1.2.2. Sektor Kesehatan**

Kondisi kesehatan dari masyarakat Kota Cimahi juga menjadi faktor yang sangat mempengaruhi dalam menciptakan SDM Kota Cimahi yang berkualitas dan berdaya saing. Kondisi kesehatan individu dan masyarakat walaupun secara umum dapat dikatakan cukup baik namun tetap ada aspek-aspek tertentu yang masih menjadi masalah dan perlu terus dilakukan upaya-upaya perbaikan.

Salah satu yang perlu diperhatikan adalah terkait Angka Rasio Kematian Ibu (AKI) dan Angka Rasio Kematian Bayi (AKB). Pada tahun 2020 AKI berada di angka 115,82 yang berarti ada lebih dari 115 kasus kematian ibu melahirkan dari setiap 100.000 kelahiran hidup. Angka ini masih dirasakan cukup tinggi walaupun sudah turun dari tahun sebelumnya yang berada di angka 120,62. Sedangkan untuk AKB pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 6,67 kasus kematian per 1000 kelahiran hidup dari 5,83 pada tahun 2019, maka perlu terus dilakukan upaya untuk menurunkannya kembali.

Kemudian masalah lainnya adalah terkait dengan prevalensi *stunting* pada balita yang berada di angka 10,89% meningkat dari tahun sebelumnya yang berada di angka 9,07% walaupun angka ini masih dibawah target Nasional sejumlah 14% namun di tingkat kelurahan masih ada beberapa kelurahan dengan angka di atas target Nasional tersebut. Kondisi ini perlu diperbaiki melalui intervensi percepatan penurunan *stunting* dimana Kota Cimahi termasuk kedalam salah satu lokus penurunan *stunting* di Jawa Barat. Kasus balita kurang gizi juga perlu menjadi perhatian dimana pada tahun 2020 mengalami peningkatan kasus menjadi 7,7% dari 5,58% pada tahun sebelumnya.

Selanjutnya, pandemi *Covid-19* juga masih menjadi masalah yang perlu ditangani secara bersama di Kota Cimahi mengingat belum berakhirnya pandemi tersebut meskipun perkembangan kasusnya yang mulai melandai. Berdasarkan data terakhir sampai akhir Januari 2022 di Kota Cimahi telah terkonfirmasi 13.061 kasus positif *Covid-19* dengan 12.803 kasus sembuh, 238 orang meninggal dunia, dan 20 kasus aktif. Upaya vaksinasi *Covid-19* juga perlu terus dilakukan dengan meningkatkan kapasitas vaskinasi di Kota Cimahi, pada akhir Januari 2022 capaian vaksinasi dosis pertama untuk seluruh masyarakat Kota Cimahi telah mencapai 101,33% dari total sasaran. Sedangkan untuk dosis kedua telah mencapai 84,915 dari total sasaran. Untuk dosis ketiga atau dosis penguat (*booster*) baru mencapai 4,41% dari total sasaran karena memang untuk dosis ini baru dimulai awal tahun 2022 bagi masyarakat umum.

Masalah-masalah kesehatan ini perlu terus ditangani bersama untuk terus meminimalkan dampak-dampak negatifnya melalui berbagai upaya-upaya kesehatan sehingga kondisi kesehatan SDM Kota Cimahi dapat semakin berkualitas dan berdaya saing tinggi.

#### **4.1.2.3. Sektor Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat di Kota Cimahi masih terdapat kendala-kendala dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat termasuk dalam hal jumlah pemberdayaan lembaga yang tidak mengalami perkembangan; pelaksanaan pengarusutamaan gender yang belum optimal dan kepekaan perencanaan terkait isu gender masih rendah; strategi pemberdayaan belum sensitif pada isu-isu inklusif gender, *outcome* pemberdayaan belum dievaluasi secara optimal, kegiatan masih seremonial dan perempuan belum mampu memahami dan mengaspirasikan isu-isu sensitif gender.

Selain dari permasalahan pembangunan yang responsif gender dan pemberdayaan perempuan dalam pemberdayaan masyarakat perlu juga diperhatikan permasalahan urusan budaya, pariwisata, pemuda dan olahraga karena urusan tersebut kalau diperhatikan bisa memicu untuk meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan mengeliminir permasalahan sosial yang ada.



Permasalahan pemberdayaan perempuan pada dasarnya merupakan urusan yang cukup kompleks. Urusan perempuan erat kaitannya dengan urusan perlindungan anak, yang masih menyisakan beberapa permasalahan yang berpengaruh pada kualitas tumbuh kembang anak yaitu :

1. Pemahaman orang tua terhadap hak-hak anak masih rendah;
2. Peran orang tua dalam mengawasi tumbuh kembang anak masih belum optimal. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran orang tua dalam memperhatikan hak-hak anak; dan
3. Perkembangan teknologi mempengaruhi pola asuh orang tua yang menyebabkan orang tua cenderung membiarkan anak mereka sibuk dengan '*gadget*' daripada menghabiskan waktu dengan orang tua.

#### **4.1.2.4. Sektor Kepemudaan**

Sementara itu, dalam urusan pemuda dan olahraga muncul beberapa permasalahan diantaranya kurangnya sumberdaya dan sarana olahraga sebagai tempat aktivitas masyarakat untuk berolahraga, dan belum optimalnya peran serta pemuda dalam pembangunan di Kota Cimahi.

Perkembangan aktivitas kepemudaan dan olahraga di Kota Cimahi hingga saat ini cukup dinamis, namun jumlah pemuda/organisasi pemuda yang berperan serta dalam pembangunan masih kurang.

Sarana dan Prasarana olahraga pendukung kegiatan masyarakat yang ada di Kota Cimahi perlu mendapat perhatian dari kuantitas dan kualitasnya sehingga dapat digunakan oleh masyarakat secara optimal.

#### **4.1.3. Belum Optimalnya Kualitas Pembangunan Ekonomi**

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu wilayah dengan disertai pemerataan pendapatan bagi penduduknya. Pembangunan ekonomi tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan

ekonomi dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Pembangunan Ekonomi sendiri dikatakan berkualitas dan optimal apabila pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi kesenjangan.

Beberapa indikator yang menunjukkan kualitas pembangunan ekonomi adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Indeks Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka yang pada pada periode RPJMD Tahun 2017-2022 menunjukkan angka sebagai berikut :

**Tabel 4.2.**  
**Data Capaian LPE, Indeks Gini dan TPT**

Uraian	2019		2020		2021		Target 2022
	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5,66	6,84	-3,07	-2,26	3,69**	n/a	5,11
Indeks gini	0,4	0,363	0,39	0,38	0,39	0,415	0,38
TPT (%)	7,52	8,08	13,3	13,3	12,64	13,07	11,37
Angka kemiskinan (%)	5,61	4,39	5,45	5,11	5,07	5,35	5,02

*Sumber : BPS, 2021, diolah.*

#### **4.1.3.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi**

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Cimahi sampai dengan tahun 2019 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, bahkan lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat. Hal ini dapat dilihat dari data pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.3.**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Cimahi dan Jawa Barat**  
**Tahun 2016-2020**

Tahun	Cimahi	Jabar
2016	5,62	5,66
2017	5,43	5,35
2018	6,46	5,65
2019	7,85	5,07
2020	-2,26	-2,44

Sumber : BPS, 2021

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Cimahi pada tahun 2020 mengalami Kontraksi menjadi -2,26%. Kontraksi ini terjadi secara nasional, hal ini diperkirakan karena penurunan aktivitas ekonomi yang hampir menimpa seluruh sektor pada saat pandemi *Covid-19* yang diakibatkan oleh kebijakan pembatasan sosial berskala besar pada saat itu yang membuat kegiatan perekonomian tidak dapat berjalan dengan lancar. Penurunan aktivitas perekonomian tersebut juga mengakibatkan penurunan tingkat pendapatan sehingga mengakibatkan penurunan pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pada akhirnya mendorong kenaikan tingkat kemiskinan.

#### **4.1.3.2. Indeks Gini**

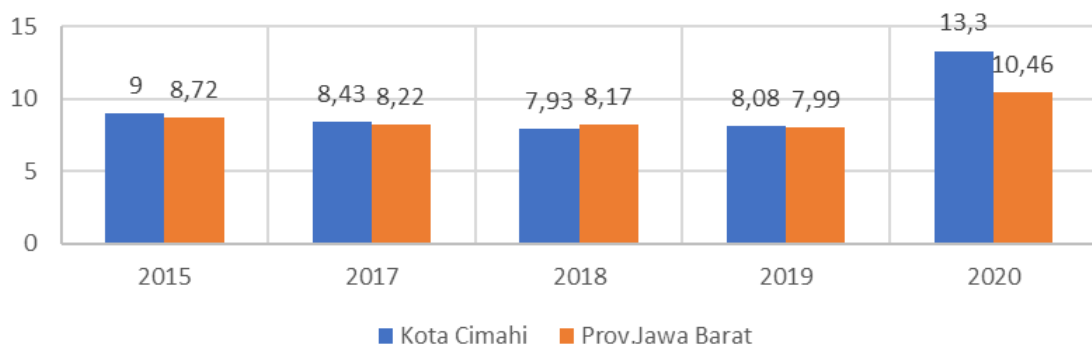
Indeks Gini Kota Cimahi masih tergolong ke dalam daerah dengan ketimpangan pendapatan menengah, dimana sampai dengan tahun 2019 angka indeks gini Kota Cimahi cenderung menurun mencapai angka 0,363 poin, yang dapat diartikan bahwa distribusi pendapatan penduduk Kota Cimahi semakin merata.

Terjadinya penurunan aktifitas perekonomian akibat pandemi *Covid-19* pada tahun 2020 diperkirakan memukul masyarakat kelas bawah lebih besar daripada kelas menengah dan atas sehingga ketimpangan meningkat, Hal ini terlihat dari meningkatnya capaian indeks gini pada tahun 2020 menjadi 0,38 dan pada tahun 2021 menjadi 0,415.

#### 4.1.3.3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Cimahi pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 menunjukkan tren menurun, dimana pada tahun 2015 angkanya sebesar 9% dan pada tahun 2018 angkanya menjadi 7,93%. Namun pada tahun 2019, sedikit mengalami peningkatan mencapai angka 8,08%.

**Gambar 4.1.**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Cimahi dan**  
**Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2020**



Sumber : BPS, 2021

Pada tahun 2020, berdasarkan data BPS pada bulan Agustus 2020, TPP di Kota Cimahi meningkat cukup signifikan menjadi 13,30%. Bahkan pada posisi ini Kota Cimahi menempati urutan kedua nilai TPT tertinggi se-Jawa Barat.

Permasalahan pengangguran diperkirakan akan bertambah seiring dengan berlanjutnya wabah pandemi *Covid-19* yang berdampak secara ekonomi kepada perusahaan-perusahaan. Banyak pekerja yang kehilangan pekerjaannya karena perusahaan banyak melakukan PHK. Berdasarkan laporan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi, sampai dengan bulan November tahun 2020 sudah ada 12 perusahaan yang melakukan PHK dan 17 perusahaan merumahkan pekerjanya. Akibatnya jumlah pengangguran di Kota Cimahi menjadi bertambah.

#### **4.1.3.4. Kurangnya Penyerapan Tenaga Kerja**

Pada tahun 2019 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Cimahi mengalami penurunan hingga menjadi 63,39%, sebelumnya pada tahun 2018 mencapai 64,49%. Penurunan angka TPAK tersebut juga dikarenakan kondisi kualitas tenaga kerja yang rendah sehingga belum terjadi peningkatan angka penyerapan tenaga kerja.

Kualitas tenaga kerja di Kota Cimahi salah satunya dapat terlihat dari latar belakang pendidikan pencari kerja. Menurut data pencari kerja dari Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi, angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan paling banyak memiliki latar belakang pendidikan setingkat SMA/SMK. Kurangnya sinergi antara para pelaku industri seperti perusahaan, APINDO, Badan Latihan Kerja (BLK) mengenai kesesuaian kompetensi dan penyerapan langsung tenaga kerja yang telah siap pakai juga menjadi salah satu penyebab kurangnya penyerapan tenaga kerja di Kota Cimahi. Pandemi *Covid-19* yang terjadi sepanjang tahun 2020 dan 2021 dan diperkirakan masih akan berlanjut telah berdampak sangat besar terhadap semua sektor ekonomi di Kota Cimahi terutama sektor industri pengolahan yang merupakan sektor terbesar dalam menyerap tenaga kerja. Berdasarkan laporan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi, dengan adanya pandemi ini kegiatan produksi hampir di semua perusahaan di Kota Cimahi perlahan-lahan berkurang dan akhirnya terhenti. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kondisi tenaga kerja dimana perusahaan tidak lagi menerima tenaga kerja baru.

Secara umum permasalahan sektor ketenagakerjaan di Cimahi adalah sebagai berikut :

1. Angka pengangguran yang terus bertambah;
2. Kompetensi pencari kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja;
3. Pencari kerja masih berorientasi pada pasar sektor formal; dan
4. Ketersediaan informasi pasar kerja belum optimal.

#### **4.1.3.5. Belum Optimalnya Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil (UMK)**

Hasil evaluasi kinerja Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Cimahi menunjukkan bahwa pengembangan Koperasi dan UMK di Kota Cimahi belum optimal disebabkan oleh 3 (tiga) faktor utama, yaitu :

1. Permasalahan manajerial, karena kurangnya kapasitas SDM dalam mengelola usaha;
2. Permasalahan permodalan, karena terbatasnya akses terhadap permodalan terutama perbankan; dan
3. Permasalahan pemasaran, karena terbatasnya jaringan pemasaran UMK terutama pemasaran keluar daerah. Teknologi informasi dan digitalisasi belum banyak dimanfaatkan dikalangan UMK.

Selain ketiga hal di atas, adanya pandemi *Covid-19* juga berdampak besar pada sektor UMK. Dari 4.901 Usaha ultra mikro dan usaha mikro ada sebanyak 20% mengalami dampak penurunan usaha dan 50 Koperasi yang sebagian besar adalah koperasi simpan pinjam mengalami kredit macet. Berdasarkan hasil survei Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Cimahi 90,9% UMK mengalami penurunan penjualan, 35,6% produksi terhambat, 51,2% mengalami masalah permodalan, 34% distribusi terhambat dan 35% sulit mendapatkan bahan baku.

#### **4.1.3.6. Menurunnya Realisasi Investasi**

Investasi merupakan salah satu komponen pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kota Cimahi. Nilai realisasi investasi dihitung berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan oleh perusahaan/pelaku usaha. Pandemi *Covid-19* menyebabkan nilai realisasi investasi di Kota Cimahi menurun sangat signifikan. Penurunan tersebut berkontribusi terhadap penurunan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kota Cimahi Tahun 2020 yang berkontraksi sebesar 2,26%, suatu kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya di Kota Cimahi. Penurunan ini dapat berdampak pada berbagai sektor, seperti meningkatnya pengangguran dan melemahnya daya beli masyarakat.

Bila dibandingkan dengan tahun 2020, pada tahun 2021 sudah mulai terjadi peningkatan realisasi investasi meskipun nilainya masih dibawah sebelum Pandemi *Covid-19*. Oleh karena itu, sangat perlu upaya perbaikan terhadap iklim investasi agar investasi di Kota Cimahi dapat segera pulih kembali.

#### **4.1.3.7. Sektor industri**

Pada sektor industri, para pelaku IKM di Kota Cimahi masih mengalami keterbatasan kualitas sumber daya manusia khususnya dalam upaya mewujudkan produk-produk khas dan unggulan Kota Cimahi yang inovatif dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia seperti digitalisasi dan pemanfaatan teknologi informasi serta kerjasama antar industri hulu dan hilir. Selain itu, para pelaku IKM belum sepenuhnya memenuhi amanat undang-undang khususnya yang terkait dengann Izin Usaha Industri dan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

#### **4.1.3.8. Sektor Perdagangan**

Pada Sektor perdagangan, permasalahan yang muncul diantaranya adalah masih rendahnya kualitas pasar tradisonal di Kota Cimahi. Meskipun pasar tradisional yang ada dapat berfungsi dan melayani masyarakat akan tetapi pasar-pasar tersebut masih banyak yang belum sesuai dengan standar nasional indonesia atau belum distandarisasi. Permasalahan tersebut ditandai dengan baru terdapat 12,5% atau baru 1 dari 8 pasar tradisional yang ada di Kota Cimahi sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Selain itu, masih terbatasnya para pelaku UMKM yang melakukan pemasaran/*trading online* dan kerjasama dengan toko ritel modern.

#### **4.1.3.9. Sektor Pariwisata**

Permasalahan dalam sektor pariwisata di Kota Cimahi diantaranya adalah masih kurangnya pengembangan destinasi wisata baik berupa sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia. Selain itu, promosi pariwisata yang dilakukan juga masih belum optimal.

#### **4.1.4. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan**

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

Pelaksanaan reformasi birokrasi ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek KKN. Perubahan *mindset* dan *culture set* harus terus didorong agar birokrasi mampu menunjukan performa/kinerjanya.

Salah satu wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel adalah dengan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini ini diterbitkan jika laporan keuangan dianggap telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik dan bebas dari salah saji material. Opini atas laporan keuangan disusun dengan mempertimbangkan 4 (empat) kriteria, yakni kesesuaian laporan keuangan dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan), kecukupan pengungkapan sesuai SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah).

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Nilai IRB Kota Cimahi pada tahun 2020 masuk pada kategori CC (CUKUP) dengan nilai 59,22 yang merupakan penurunan dari pencapaian tahun 2019 dimana Kota Cimahi mendapat kategori B (BAIK) dengan nilai 60.01.

Indikator penilaian Reformasi Birokrasi meliputi unsur manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja,



peningkatan kualitas pelayanan publik serta monitoring dan evaluasi. Kesembilan unsur tersebut harus menjadi perhatian khusus dari perangkat daerah pada perencanaan pembangunan tahun 2023-2026 dimana aspek Reformasi Birokrasi menjadi salah satu penilaian kinerja utama kepala perangkat daerah.

Sejauh mana tata kelola pemerintahan yang baik dilaksanakan pada Pemerintah Kota Cimahi dapat dilihat melalui pencapaian nilai SAKIP. Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2019 Kota Cimahi masuk pada kategori B dengan nilai 66,00 dan pada tahun 2020 masuk pada kategori yang sama dengan nilai 65,07. Meskipun pada kategori yang sama (B), penurunan pencapaian nilai di tahun 2020 menjadi bahan perhatian penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah 2023-2026. Komponen-komponen penilaian evaluasi yang meliputi aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja perlu mendapatkan perhatian seluruh perangkat daerah guna peningkatan kategori dan nilai SAKIP kota.

Terdapat beberapa hal dalam tata pemerintahan di Kota Cimahi yang mempengaruhi reformasi birokrasi dan menjadi indikator dalam pembangunan yaitu :

1. Sistem akuntansi berbasis akrual yang masih terbatas sehingga pelaporan pemerintah daerah tidak optimal;
2. masih perlunya peningkatan kompetensi dan pengelolaan penilaian kinerja aparatur daerah;
3. belum optimalnya pengawasan pemerintah daerah belum optimalnya layanan informasi daerah yang salah satunya berupa sosialisasi produk hukum daerah,
4. tingkat kepuasan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan dari kategori B (Baik) menjadi A (Sangat Baik) dengan mengacu kepada Permen PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
5. indeks kapasitas fiskal masih berkategori sedang dan belanja daerah belum optimal merupakan beberapa tingkat kinerja perencanaan daerah yang belum optimal; dan

6. Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

#### **4.1.5. Belum Terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan**

Sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) Tujuan ke-6 Memastikan Ketersediaan dan Manajemen Air Bersih yang Berkelanjutan dan Sanitasi bagi Semua dan Tujuan ke-11 Membangun Kota dan Pemukiman Inklusif, Aman, Tahan Lama dan Berkelanjutan serta amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan, Kota Cimahi berupaya untuk dapat memenuhi tujuan dan standar tersebut sebagai jawaban atas beberapa permasalahan perkotaan yang selama ini dihadapi. Berikut dipaparkan beberapa aspek standar pelayanan perkotaan khususnya yang menyangkut tata ruang, lingkungan hidup dan infrastruktur.

##### **4.1.5.1. Tata Ruang**

Dalam konteks pembangunan wilayah, rencana tata ruang menjadi dasar penting yang harus diacu sehingga pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan dan fungsi lahan yang ada. Kota Cimahi sejak tahun 2018 menghitung kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang sebagai indikator konsistensi pelaksanaan rencana tata ruang kota.

Pada tahun 2017 pemanfaatan ruang di Kota Cimahi dinilai sudah 52,63% sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cimahi Tahun 2012-2032. nilai ini dihitung berdasarkan luas wilayah yang pemanfaatan ruang eksistingnya sesuai dengan rencana tata ruang dikalikan 100%. Pada tahun 2018 pada RPJMD Kota Cimahi 2017-2022 ditargetkan 64,71% dan berhasil tercapai 64,71%. Sedangkan tahun 2019 ditargetkan 76,47% dan juga berhasil tercapai sesuai target. Namun pada tahun 2020 dari target yang ditetapkan sebesar 88,24%, hanya tercapai 62,00%.

#### 4.1.5.2. Ruang Terbuka Hijau

Dengan meningkatnya jumlah penduduk dan luasan kota yang terbatas maka akan menimbulkan beberapa dampak terhadap kebutuhan ruang terbuka hijau yang juga dapat dimanfaatkan sebagai ruang publik. Kebutuhan masyarakat untuk dapat hidup dengan lingkungan yang layak memerlukan ruang minimal 0,3 m<sup>2</sup> per orang.

Sampai dengan tahun 2021 ruang terbuka hijau yang dimiliki Kota Cimahi seluas 46,28 Ha atau sekitar 1,15 % dari luas Kota. Luas ini mengalami peningkatan dari tahun 2019 dan 2020 kurang lebih 1 Ha setiap tahunnya. Namun capaian ini merupakan koreksi yang dilakukan pada kurun waktu 2018-2019 seiring dengan penyusunan Revisi RTRW Kota Cimahi 2012-2032. Pada tahun 2017 teridentifikasi bahwa luasan RTH di Kota Cimahi mencapai 11,15% atau sekitar 448,79 Ha dan pada tahun 2018 mencapai 11,65% atau sekitar 468,91 Ha. Koreksi yang dilakukan didasarkan pada prinsip kepemilikan lahan yang sudah dikuasai oleh Pemerintah Kota Cimahi. Data luasan RTH dan persentase terhadap luas Kota Cimahi tersaji pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.4.**  
**Persentase Luas RTH terhadap Luas Kota Tahun 2017-2021**

INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021
Luas RTH (Ha)	448,79	468,91	44,26	45,49	46,28
Persentase luasan RTH terhadap luas kota (%)	11,15	11,65	1,10	1,13	1,15

Sumber : DLH Kota Cimahi, diolah

Yang menjadi permasalahan dalam kasus RTH ini adalah bahwa sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pemerintah daerah berkewajiban untuk menyediakan dan memanfaatkan ruang terbuka hijau (RTH) dengan proporsi 20% dari luas wilayah untuk RTH yang bersifat publik.

Melihat capaian persentase luasan RTH Kota Cimahi yang masih sangat kecil, patut kiranya RTH ini dijadikan isu strategis dan mendapat

perhatian khusus dari berbagai perangkat daerah terkait. Dimulai dari identifikasi masalah yang selama ini menjadi kendala pencapaian target luasan RTH sampai rencana keluar yang diperlukan untuk bisa melakukan percepatan pencapaian target luasan RTH sesuai dengan amanat Undang-undang Penataan Ruang dan RTRW Kota Cimahi Tahun 2012-2032.

#### 4.1.5.3. Transportasi

Berdasarkan hasil perhitungan arus lalu lintas (*traffic counting*) yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Cimahi pada tahun 2021, terhadap 15 (lima belas) ruas jalan kota yang selama ini dianggap sebagai titik kemacetan, dengan nilai tingkat pelayanan jalan atau *Level Of Service* (LOS) yaitu C dan *Volume Capacity Ratio* (VCR) 0,66. Walaupun diantaranya masih terdapat 2 (dua) ruas jalan kota dengan nilai LOS F yaitu pada ruas jalan Gandawijaya (VCR 0,81) dan ruas jalan Kebon Kopi (VCR 0,76).

Capaian tersebut dinilai sebagai capaian yang baik karena mengalami peningkatan dari capaian pada tahun-tahun sebelumnya. Dalam kurun waktu tahun rencana RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 tercatat capaian LOS pada nilai C, diatas target yang ditetapkan pada nilai D. Adapun nilai VCR yang dicapai tiap tahunnya disajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.5.**  
**Capaian Nilai VCR dan LOS Kota Cimahi Tahun 2017-2021**

INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021
VCR	0,79	0,59	0,64	0,72	0,66
LOS	C	C	C	C	C

*Sumber : Dinas Perhubungan Kota Cimahi, diolah*

Dari data tabel tersebut terlihat bahwa pada tahun 2018 terjadi penurunan nilai VCR yang menggambarkan kinerja lalu lintas jalan di Kota Cimahi menjadi lebih baik. Namun 2 (dua) tahun berturut-turut setelah itu yaitu pada tahun 2019 dan 2020 nilai VCR mengalami

peningkatan yang menggambarkan kinerja lalu lintas pada tahun tersebut menjadi lebih buruk dibandingkan dengan tahun 2018. Namun demikian di tahun 2021 nilai VCR kembali mengecil dari 0,72 menjadi 0,66. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan kinerja lalu lintas jalan-jalan yang ada di Kota Cimahi.

Permasalahan penurunan nilai VCR yang biasanya dicirikan dengan adanya antrian sampai dengan macet pada jalan-jalan di Kota Cimahi ini, secara umum diakibatkan oleh karena minimnya sarana dan prasarana transportasi pengurai kemacetan, sehingga menyebabkan arus lalu lintas menjadi tidak optimal. Penyebab lainnya adalah kapasitas jalan yang ada di Kota Cimahi belum memadai/ memenuhi standar fungsi jalan, untuk menampung jumlah kendaraan dari luar daerah yang melintas Kota Cimahi (*through traffic*) sehingga menambah tingkat kepadatan lalu lintas.

#### **4.1.5.4. Perumahan**

Sejak awal Kota Cimahi berdiri sebagai kota otonom, salah satu masalah yang dimiliki adalah rendahnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas kawasan perumahan dan kawasan permukiman, salah satunya adalah dengan pembangunan Rumah Susun Sewa (rusunawa) dan penataan kawasan kumuh.

Sejalan dengan program Pemerintah Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), pada tahun 2015 Wali Kota Cimahi mengeluarkan SK yang berisi pemetaan kawasan kumuh beserta luasannya. Berdasarkan SK tersebut kawasan kumuh di kota cimahi seluas 176,77 Ha, dan sudah di tuntaskan tahun 2021 seluas 176,52 Ha sehingga masih ada sisa kawasan kumuh yang harus di tangani seluas 0,18 Ha. Berdasarkan hasil survei dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh pada tahun 2020, terindikasi bahwa di 10 kelurahan dibutuhkan penanganan kekumuhan yaitu Cibabat, Padasuka, Cigugur Tengah, Karangmekar, Setiamanah, Cibeureum, Leuwigajah, Melong, Utama dan Cimahi sedangkan di 5 kelurahan lain dibutuhkan pencegahan kekumuhan yaitu Pasirkaliki, Citeureup, Cipageran, Baros, dan Cibeber.

#### 4.1.5.5. Air Minum

Cakupan pelayanan air minum di Kota Cimahi dari tahun 2016 sampai 2019 terus mengalami peningkatan sampai mencapai 70,35%. Hal ini seiring dengan terpenuhinya seluruh kapasitas SPAM Citeureup yang dikelola oleh UPTD Air Minum Kota Cimahi. Namun pada tahun 2020 cakupan pelayanan air minum di Kota Cimahi mengalami penurunan menjadi 69,82%. Penurunan cakupan layanan ini terjadi karena sampai tahun 2019 kapasitas SPAM Citeureup dengan sumber air baku dari Sungai Cimahi, yang menjadi SPAM utama sudah termanfaatkan seluruhnya.

Di sisi lain, jumlah penduduk Kota Cimahi bertambah dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,07 pada tahun 2019, sehingga dengan kapasitas yang tetap, sedangkan jumlah penduduk yang harus dilayani bertambah, maka cakupan layanannya menjadi menurun. Kondisi ini juga disebabkan oleh tidak terlaksananya rencana pembangunan SPAM regional Gambung di Kabupaten Bandung, sehingga perhitungan cakupan layanan yang direncanakan tidak dapat tercapai.

#### 4.1.5.6. Drainase

Kinerja pengelolaan drainase kota diindikasikan dengan luasan genangan yang ada di wilayah Kota Cimahi. Selama dari tahun 2017, masalah genangan masih terjadi di 0,38% luas wilayah Kota Cimahi, atau sekitar 1.529,5 Ha. Namun demikian di tahun 2018 sampai 2020 luasan genangan semakin berkurang, sampai pada tahun 2020 hanya tersisa genangan seluas 3,004 Ha. Data tabulasi disajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.6.**  
**Persentase Luasan Genangan Terhadap Luas Kota Cimahi**  
**Tahun 2017-2019**

INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase luasan genangan terhadap luas kota	0,38	0,14	0,07	0,07	0,069

Sumber : DPKP Kota Cimahi, 2020, diolah

Melihat pengurangan luas genangan di Kota Cimahi yang semakin kecil, menunjukkan pencapaian kinerja yang baik. Tapi disisi lain ada juga masalah yang terjadi di hampir seluruh wilayah Kota Cimahi yaitu bertemunya jaringan drainase permukiman dengan drainase jalan. Hal ini sering menimbulkan masalah karena pada saat hujan volume air yang mengalir pada saluran akan bertambah besar, bahkan sampai melebihi kapasitas saluran sehingga meluap dan terjadilah genangan sampai aliran di jalan yang terjadi terutama sesaat setelah hujan dengan intensitas tinggi.

#### 4.1.5.7. Persampahan

Pengelolaan sampah di Kota Cimahi secara umum sudah dapat dikategorikan baik. Dari tahun 2017 cakupan layanan pengelolaan sampah Kota Cimahi sudah mencapai 87%. Selanjutnya pada tahun 2018 sampai 2020 cakupan layanan pengelolaan sampah yang konsentrasikan pada pengurangan dan pengolahan sampah juga masih mengalami peningkatan walaupun tidak memenuhi target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022, seperti tersaji pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.7.**  
**Persentase Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah**  
**di Kota Cimahi Tahun 2017-2020**

INDIKATOR	2017	2018		2019		2020	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Persentase Pengelolaan Sampah	87	98	95	100	96,06	100	97,61

*Sumber : RPJMD Kota Cimahi 2017-2022 dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi 2020, diolah.*

Hal ini terjadi karena adanya perhitungan target yang terlalu optimis pada saat penyusunan dokumen RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022. Penghitungan ulang target dan capaian pengelolaan sampah kemudian dilakukan pada tahun 2019, yaitu pada saat disusunnya revisi dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengelolaan Sampah Kota Cimahi, sehingga target yang ditetapkan lebih logis untuk dicapai. Target ini juga menjadi koreksi pada dokumen Perubahan RPJMD Kota Cimahi 2017-2022. Berikut ini tabel target dan capaian pengelolaan sampah berdasarkan dokumen Jakstrada Pengelolaan Sampah

Kota Cimahi dan hasil monitoring dan evaluasi capaian RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022.

**Tabel 4.8.**  
**Persentase Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi Tahun 2017-2021**

INDIKATOR	2017	2018		2019		2020		2021	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Persentase Pengelolaan Sampah	87	98	95	100	96,06	95,10	97,61	98	94,7%

*Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2020, diolah*

Pada tahun 2021 kinerja pengelolaan sampah tidak mencapai target, yaitu hanya mencapai 94,7% dari target 98% pengelolaan. Capaian ini juga mengalami penurunan dari capaian tahun 2020. Yang menjadi konsentrasi saat ini adalah rencana pemanfaatan TPA Regional Legok Nangka oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang akan menggantikan TPA Regional Sarimukti. Jarak yang lebih jauh dari Kota Cimahi dan ketersediaan armada pengangkut sampah yang dimiliki Pemerintah Kota Cimahi menjadi tantangan tersendiri, karena diperhitungkan pada saat TPA Regional Legok Nangka ini dioperasikan, maka biaya pengangkutan sampah Kota Cimahi akan bertambah secara signifikan. Hal ini membutuhkan strategi yang matang untuk mencari solusi yang efektif efisien.

#### **4.1.5.8. Air Limbah Domestik**

Cakupan layanan air limbah domestik di Kota Cimahi dihitung dengan memperhatikan kondisi infrastruktur dan pengelolaannya. Infrastruktur yang dimaksud adalah bangunan septik tank yang dinilai aman dari kebocoran ke tanah, sedangkan penegelolaan adalah pelayanan penyedotan terjadwal yang di Kota Cimahi dilayani oleh UPTD Air Limbah Domestik dengan bekerja sama dengan Pemerintah Kota Canggung untuk membuang residu ke IPLT di Kota Bandung.

Persentase cakupan layanan air limbah domestik di Kota Cimahi pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 meningkat cukup tinggi, dari 76,50% pada tahun 2017 menjadi 94,73% pada tahun 2018. Namun pada



tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 (sampai dengan semester I) capaian cakupan layanan mengalami penurunan karena adanya kesulitan dalam penyediaan lahan untuk pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik, sementara jumlah penduduk Kota Cimahi meningkat setiap tahunnya. Demikian juga dengan rencana pembangunan IPLT Kota Cimahi yang sampai dengan akhir tahun 2021 masih belum terlaksana. Berikut ini data persentasi cakupan layanan air limbah domestik Kota Cimahi.

**Tabel 4.9.**  
**Persentase Cakupan Layanan Air Limbah Domestik**  
**Tahun 2017-2021**

INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021 (semester I)
Persentase Cakupan Layanan Air Limbah Domestik	76,50	94,73	91,09	84,2	84,05

*Sumber : DPKP Kota Cimahi, 2021*

## 4.2 ISU STRATEGIS

Isu strategis dipahami sebagai kondisi yang harus diperhatikan untuk ditangani karena manjadi masalah yang muncul sebagai hasil monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan, dan diprediksikan masih akan menjadi masalah yang signifikan dimasa yang akan datang. Dalam konteks penyusunan RPD Kota Cimahi 2023-2026 ini, permasalahan yang didapat dari hasil monitoring dan evaluasi kinerja tahunan RPJMD Kota Cimahi 2017-2022 yang disajikan pada sub bab 4.1 menjadi salah satu pertimbangan identifikasi isu strategis untuk tahun 2023-2026.

Hal lain yang dipertimbangkan dalam penentuan isu strategis Kota Cimahi Tahun 2023-2026 adalah perkembangan capaian pembangunan dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tujuan pembangunan nasional terutama SPM, isu global dan dinamika internasional terutama menyangkut pencapaian SDG's.

#### **4.2.1. Pertimbangan Kebijakan Pemerintah Provinsi, Kebijakan Nasional dan Isu Global.**

Provinsi Jawa Barat dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 memunculkan isu pembangunan Provinsi Jawa Barat sebagai berikut : a. Kualitas Nilai Kehidupan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia; b. Kemiskinan, Pengangguran dan Masalah Sosial; c. Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan; d. Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi yang Berkelanjutan; dan e. Reformasi Birokrasi.

Untuk mencapai visi dan misi pembangunannya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menetapkan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 yang meliputi: a. Akses pendidikan untuk semua; b. Desentralisasi pelayanan kesehatan; c. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi; d. Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata; e. Pendidikan agama dan tempat ibadah juara; f. Infrastruktur konektivitas wilayah; g. Gerakan membangun desa (Gerbang desa); h. Subsidi gratis golongan ekonomi lemah (golekmah); dan i. Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah.

Sementara itu kebijakan nasional yang termuat dalam RPJMN 2020-2024 dijadikan sebagai titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. RPJPN 2005- 2025, Visi Indonesia 2045, dan visi misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, yang terdiri dari :

- a. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui :

- 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
  - 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
- b. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui :
- 1) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
  - 2) Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
  - 3) Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah;
  - 4) Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
  - 5) Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.
- c. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui :
- 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
  - 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
  - 3) Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
  - 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
  - 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
  - 6) Pengentasan kemiskinan; dan

- 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.
- d. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui :
    - 1) Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
    - 2) Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
    - 3) Moderasi beragama; dan
    - 4) Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.
  - e. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional, melalui:
    - 1) Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
    - 2) Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
    - 3) Pembangunan infrastruktur perkotaan;
    - 4) Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan
    - 5) Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.
  - f. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui :
    - 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
    - 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
    - 3) Pembangunan Rendah Karbon.

- g. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara, melalui:
- 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
  - 2) Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
  - 3) Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
  - 4) Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
  - 5) Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
  - 6) Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.

Hal lain yang menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhinya adalah standar pelayanan minimal (SPM) dengan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintah Wajib dan Urusan Pemerintah Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas : a. Pendidikan; b. Kesehatan; c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; e. Ketenteraman, Ketertiban Umum; f. Pelindungan Masyarakat; dan g. Sosial. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (2) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM diterapkan pada urusan wajib daerah

terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota. Berikut diuraikan Jenis dan mutu pelayanan dasar di Kabupaten/Kota sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

**Tabel 4.10.**  
**Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar di Kabupaten/Kota**

Jenis SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar
<b>SPM Pendidikan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pendidikan anak usia dini;</li> <li>b. pendidikan dasar; dan</li> <li>c. pendidikan kesetaraan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;</li> <li>b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan</li> <li>c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.</li> </ul>	<p>Warga Negara dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan anak usia dini;</li> <li>b. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan dasar; dan</li> <li>c. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan kesetaraan.</li> </ul>
<b>SPM Kesehatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pelayanan kesehatan ibu hamil;</li> <li>b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;</li> <li>c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;</li> <li>d. pelayanan kesehatan balita;</li> <li>e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;</li> <li>f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;</li> <li>g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;</li> <li>h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;</li> <li>i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;</li> <li>b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan</li> <li>c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.</li> </ul>	<p>Warga Negara dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. ibu hamil untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan ibu hamil;</li> <li>b. ibu bersalin untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan ibu bersalin;</li> <li>c. bayi baru lahir untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan bayi baru lahir;</li> <li>d. balita untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan balita;</li> </ul>

Jenis SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar
	<p>j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;</p> <p>k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan</p> <p>l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.</p>		<p>e. usia pendidikan dasar untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;</p> <p>f. usia produktif untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia produktif;</p> <p>g. usia lanjut untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia lanjut;</p> <p>h. penderita hipertensi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan penderita hipertensi;</p> <p>i. penderita diabetes melitus untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;</p> <p>j. orang dengan gangguan jiwa berat untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;</p> <p>k. orang terduga tuberkulosis untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan</p> <p>l. orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang</p>

Jenis SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar
			melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> ).
<b>SPM Pekerjaan Umum</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan</li> <li>b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan</li> <li>b. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.</li> </ul>	setiap Warga Negara
<b>SPM Perumahan Rakyat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan</li> <li>b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program</li> <li>c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan</li> <li>d. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. korban bencana kabupaten/kota yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan</li> <li>b. masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkenarelokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.</li> </ul>
<b>SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;</li> <li>b. pelayanan informasi rawan bencana;</li> <li>c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;</li> <li>d. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;</li> <li>b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia; dan</li> <li>c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.</li> </ul>	Warga Negara dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah kabupaten/kota dan peraturan</li> </ul>



Jenis SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar
	<p>e. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.</p>		<p>kepala Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;</p> <p>b. yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan</p> <p>c. yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.</p>
<p><b>SPM Sosial</b></p>	<p>a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;</p> <p>b. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;</p> <p>c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;</p> <p>d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan</p> <p>e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban kabupaten/kota.</p>	<p>a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;</p> <p>b. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan</p> <p>c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.</p>	<p>Warga Negara dengan ketentuan:</p> <p>a. penyandang disabilitas telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam dan di luar panti;</p> <p>b. anak telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam dan di luar panti;</p> <p>c. lanjut usia telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar didalam dan di luar panti;</p>

Jenis SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar
			<p>d. gelandangan dan pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam dan di luar panti;</p> <p>e. korban bencana provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi; dan</p> <p>f. korban bencana kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.</p>

Sumber : Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

#### 4.2.2. Isu Strategis Kota Cimahi tahun 2023-2026

Berdasarkan tinjauan terhadap hal-hal tersebut, maka ditetapkan 5 (lima) isu strategis Kota Cimahi tahun 2023-2026, yaitu :

##### 1. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dihadapi oleh hampir semua daerah di Indonesia. Kondisi ini umumnya ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan, gizi serta kesejahteraan penduduk, yang disebabkan oleh terbatasnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki dan yang dimanfaatkan terutama dari tingkat pendidikan baik formal maupun non formal.

Kondisi Pandemi *Covid-19* pada tahun 2020 yang terus berlanjut hingga tahun ini, mengakibatkan adanya pencapaian di tahap ke 4 yang

melambat khususnya terkait kondisi ekonomi dan sosial, terlihat dari menurunnya LPE Kota Cimahi pada tahun 2020 yang mencapai -2,26%, serta meningkatnya jumlah angka kemiskinan menjadi 5,11% (diperkirakan meningkat menjadi 5,35% pada tahun 2021) dan indeks gini 0,380 point menjadi 0,415 point pada tahun 2021, serta Tingkat pengangguran terbuka Kota Cimahi yang mencapai 13,30% pada tahun 2020 (2021 menjadi 13,07%).

Meningkatnya angka kemiskinan tersebut, mengakibatkan munculnya berbagai masalah sosial di Kota Cimahi. Keterbatasan kemampuan pemerintah daerah dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial menyebabkan peningkatan jumlah PPKS. Data tahun 2020 menunjukkan bahwa jumlah PPKS di Kota Cimahi mencapai 17.210 jiwa. Isu lain yang perlu diperhatikan terkait masalah kemiskinan adalah koordinasi antar wilayah yang berbatasan dalam hal penanganan PPKS secara sinergi. Selain itu perlu diperhatikan juga pemanfaatan data PPKS sebagai data base sasaran program pengentasan kemiskinan di Kota Cimahi yang dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait.

Pembangunan sumber daya manusia menuju manusia unggul memiliki korelasi yang erat dengan peningkatan produktivitas kerja, dalam memenangkan persaingan ditengah perubahan-perubahan yang berlangsung cepat. Urgensi pembangunan sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam memenangkan persaingan global, yang membawa konsekuensi semakin ketatnya persaingan ditengah ketidakpastian, langkah strategis ini sudah selayaknya mendapatkan dukung penuh dari seluruh pemangku kepentingan.

Pembangunan manusia menjadi satu yang perlu diperhatikan karena sejatinya pembangunan tidak hanya dilihat dari capaian fisik saja tetapi juga dari sudut manusianya, dimana pembangunan seharusnya tidak hanya dianalisis dari pertumbuhan ekonomi saja, tapi juga harus dipahami dari sudut manusianya. Untuk itu, Pembangunan Manusia (IPM) diciptakan untuk menegaskan bahwa manusia dan segenap

kemampuannya harus menjadi kriteria utama untuk menilai keberhasilan pembangunan.

Peningkatan kualitas SDM terletak pada kualitas hulunya yaitu pendidikan, kurangnya daya saing sumber daya manusia karena kurang jelasnya pengelolaan pendidikan. Maka, perbaikan sistem pendidikan, utamanya revitalisasi sistem pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi seyogyanya terus menjadi pengarusutamaan, penataan kompetensi melalui pelatihan dan sertifikasi tenaga pengajar, perancangan program dan disain kurikulum, standar pelatihan hingga penyelenggaraan pelatihan kerja, sehingga kebijakan *link and match* dapat benar-benar berjalan.

Kondisi kesehatan SDM juga menjadi salah satu isu penting dalam menciptakan SDM yang berkualitas dan berdaya saing mengingat SDM yang memiliki kondisi kesehatan yang baik tentunya akan memiliki kualitas hidup yang lebih baik pula sehingga mampu memaksimalkan seluruh potensi dirinya dalam berkreasi dan turut serta dalam melaksanakan pembangunan demi kemajuan bersama di Kota Cimahi. Untuk itu maka isu terkait kualitas kesehatan ini perlu terus ditindaklanjuti melalui berbagai upaya yang bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan individu dan masyarakat Kota Cimahi baik yang sifatnya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif.

## **2. Kualitas Pembangunan Ekonomi**

Kualitas pembangunan ekonomi Kota Cimahi masih memerlukan beberapa perbaikan, terutama terkait peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, peningkatan upaya pemerataan pendapatan serta penyerapan tenaga kerja. Penjelasan lebih lanjut mengenai poin-poin perbaikan tersebut diuraikan sebagai berikut :

### **a. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi**

Pandemi *Covid-19* memberikan dampak yang sangat besar tidak hanya bagi kesehatan masyarakat namun juga bagi perekonomian baik secara mikro/rumah tangga maupun secara makro regional dan nasional. Hal ini juga memberikan pukulan yang sangat berat bagi sektor-sektor

ekonomi di Kota Cimahi. Semua sector ekonomi mulai dari Industri Pengolahan, Pariwisata, Perdagangan dan Jasa, Pertanian, sampai sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdampak. Masyarakat banyak kehilangan kehilangan pekerjaannya, kehilangan sumber pendapatannya juga banyak yang mengalami penurunan usaha bahkan sampai kehilangan usahanya. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pemulihan ekonomi melalui peningkatan iklim investasi dan berusaha yang kondusif agar para pelaku usaha dapat menciptakan bangkitan ekonomi baru maupun mengembangkan usahanya dan memunculkan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi.

Selain itu upaya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan dilakukan melalui optimalisasi Peran Koperasi dan Usaha Mikro Kecil serta Sektor Industri, Perdagangan dan Pariwisata dalam Perekonomian Daerah yang dilakukan dengan memanfaatkan potensi daerah yang ada. Upaya-upaya yang perlu dilakukan antara lain melalui peningkatan manajemen kelembagaan dan sumber daya manusia, kualitas serta kuantitas sarana dan prasarana, daya saing dan pemberdayaan masyarakat.

b. Peningkatan upaya pemerataan pendapatan melalui penanggulangan kemiskinan

Dengan adanya peningkatan angka kemiskinan pada tahun 2020 maka penanggulangan kemiskinan yang komprehensif masih diperlukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swasta) dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap penanggulangan kemiskinan. Partisipasi dan koordinasi menjadi kata kunci dari penanganan penanggulangan kemiskinan. Fakta di berbagai negara menunjukkan bahwa kemiskinan hanya dapat berkurang dalam suatu perekonomian yang tumbuh secara dinamis. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang stagnan hampir bisa dipastikan berujung pada peningkatan angka kemiskinan. Pertumbuhan harus mampu menciptakan lapangan kerja produktif dalam jumlah besar. Selanjutnya, diharapkan terdapat multiplier effect pada peningkatan pendapatan

mayoritas penduduk, peningkatan taraf hidup, dan pengurangan angka kemiskinan.

Adanya disparitas antara yang kaya dan yang miskin karena pertumbuhan ekonomi di Kota Cimahi tidak langsung diikuti oleh meningkatnya perekonomian keluarga berpendapatan rendah, sehingga perlu peningkatan upaya pemerataan pendapatan. Ketimpangan pendapatan di Cimahi yang mengalami peningkatan pada tahun 2020-2021 akibat Pandemi *Covid-19* perlu diantisipasi dengan upaya upaya pemerataan pendapatan melalui peningkatan aktivitas ekonomi yang memberikan akses ekonomi yang lebih luas kepada masyarakat berpendapatan rendah.

c. Peningkatan upaya penyerapan tenaga kerja

Adanya permasalahan dalam kesempatan kerja di Kota Cimahi disebabkan karena adanya ketidakseimbangan antara jumlah Angkatan Kerja dengan Pasar Kerja. Kota Cimahi termasuk daerah dengan angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TAPK) yang cukup besar, seharusnya dapat menjadi modal atau potensi untuk menciptakan pertumbuhan yang tinggi.

Kondisi yang diharapkan ternyata belum bisa terwujud karena kemungkinan adanya ketidaksesuaian (*mismatching*) antara karakteristik angkatan kerja dengan karakteristik jenis pekerjaan yang ada. Selain itu, iklim investasi dan penanaman modal di Indonesia selama 2 (dua) tahun terakhir tidak terlalu menggairahkan, sehingga menyebabkan beberapa perusahaan menutup usahanya di Kota Cimahi.

### **3. Tata Kelola Pemerintahan**

Tata kelola pemerintahan di Kota Cimahi, dilihat dari sisi akuntabilitas, masih memerlukan berbagai perbaikan, terutama dalam capaian penilaian kinerja pemerintahan. Diharapkan isu ini dapat diperbaiki melalui berbagai upaya untuk menciptakan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*); sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*; regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif; SDM aparatur yang

berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera; peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme; peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik; pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat; birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi yang didukung dengan keberhasilan reformasi birokrasi sebagai kunci utama menuju masyarakat Kota Cimahi yang lebih maju.

Upaya optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dapat dilakukan melalui penciptaan iklim inovasi yang baik dan penyelenggaraan kompetisi inovasi antar Perangkat Daerah, umum dan perguruan tinggi.

Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2020 memperoleh nilai 65,07 atau predikat B. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya sudah baik. Hal ini disebabkan oleh pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kota Cimahi sudah berjalan dan menunjukkan hasil yang sangat baik.

Pelaksanaan evaluasi SAKIP bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Komponen yang dinilai pada Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah meliputi aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja. Komponen-komponen tersebut dijadikan fokus untuk perencanaan pembangunan tahun 2023-2026 dengan target nilai SAKIP Kota Cimahi mendapatkan predikat BB.

Tata kelola pemerintahan berkaitan erat dengan sistem perencanaan kinerja. Pemerintah Daerah Kota Cimahi pada tingkat Kota (Pemda) dan Perangkat Daerah (PD) menyusun dokumen perencanaan kinerja jangka menengah (RPD) dan Renstra PD sebagai acuan pencapaian kinerja.

Dokumen perencanaan kinerja tahunan yaitu Renja, RKPD, RKA dan Perjanjian Kinerja secara berjenjang dari tingkat Kepala Daerah sampai pada penanggungjawab kegiatan di tingkat PD. Tujuan dan sasaran strategis dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan harus berorientasi pada hasil (*outcome*) dan dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja yang terukur. Untuk tujuan tersebut, Pemerintah Kota Cimahi membangun dan mengimplementasikan sistem perencanaan kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Aspek berikutnya setelah perencanaan kinerja adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja pada Pemerintah Kota Cimahi dilakukan secara berjenjang dari tingkat Kepala Daerah ke pimpinan PD serta dari pimpinan PD ke penanggungjawab program hingga kegiatan. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencapaian kinerja organisasi yang terdistribusikan hingga jenjang terbawah dalam organisasi.

Pendistribusian pencapaian kinerja secara berjenjang dilakukan sebagai upaya pencapaian kinerja organisasi serta kejelasan pelaporan kinerja. Laporan kinerja menyajikan analisis pencapaian kinerja yang berorientasi pada hasil. Pelaporan kinerja dapat dimanfaatkan sebagai *feedback* dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.

Kinerja aspek pengelolaan keuangan dan barang milik daerah baik dalam penyusunan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang berlaku harus terus dipertahankan. Fokus yang perlu mendapat perhatian selanjutnya adalah meningkatkan kinerja pengelolaan barang milik daerah melalui peningkatan pemanfaatan aset pemerintah daerah.

Tata kelola pemerintahan yang baik mensyaratkan evaluasi internal atas akuntabilitas kinerja terhadap seluruh PD. Inspektorat Kota Cimahi dalam hal ini melakukan evaluasi serta pengawasan untuk memberikan rekomendasi dalam rangka perbaikan sebagai upaya mewujudkan budaya tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Cimahi.



#### **4. Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan**

Pertumbuhan penduduk dan perkembangan aktivitas Kota Cimahi secara konstan akan mempengaruhi daya dukung lahan, dan pada akhirnya akan terlampaui. Daya dukung merupakan sebuah konsep yang dikembangkan untuk kegiatan pengelolaan potensi sumberdaya alam dan lingkungan dengan berorientasi pada keberlanjutan. Pengertian dan ruang lingkup daya dukung dan daya tampung lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya, sedangkan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Dengan demikian, konsep daya dukung secara umum dapat dilihat dari dua sisi yaitu :

- a. Dari sisi ketersediaan, dengan melihat karakteristik wilayah, potensi sumber daya alam yang ada di suatu wilayah; dan
- b. Dari sisi kebutuhan, yaitu dengan melihat kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya dan arahan kebijakan prioritas suatu wilayah.

Penghitungan daya dukung lingkungan Kota Cimahi yang dilakukan pada tahun 2020 terhadap aspek penyedia pangan dan penyedia air. Ambang batas dan status Daya Dukung Lingkungan Hidup (DDLH) penyedia pangan dimodelkan secara kuantitatif melalui beberapa tahapan, yaitu perhitungan kebutuhan bahan pangan, ketersediaan bahan pangan, dan selisih ketersediaan. Kebutuhan bahan pangan dihitung berdasarkan jumlah penduduk yang dikalikan dengan besarnya kebutuhan energi bahan pangan individu untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas harian, yang direpresentasikan dengan nilai Angka Kecukupan Energi (AKE). Hasil akhir penghitungan DDLH aspek penyedia pangan disajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.11.**  
**Hasil Penghitungan Luas Wilayah yang Mendukung Penyediaan Bahan Pangan di Kota Cimahi**

Wilayah	Luas Kecamatan (Ha)	Luas Mendukung	
		Ha	%
Kecamatan Cimahi Selatan	1.739,95	268,57	15,43%
Kecamatan Cimahi Selatan	1.099,48	81,01	7,36%
Kecamatan Cimahi Selatan	1.404,69	105,31	7,49%
<b>KOTA CIMAHI</b>	<b>4.244,11</b>	<b>454,89</b>	<b>10,71%</b>

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi 2017-2022

Dari tabel hasil penghitungan DDLH aspek penyedia pangan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa hanya 10,71% luas wilayah Kota Cimahi yang masih bisa mendukung terhadap kebutuhan pangan masyarakat. Sedangkan ambang batas dan status DDLH jasa ekosistem penyedia air bersih dihitung menggunakan sumber daya air yang berasal dari air permukaan. Perhitungan didahului dengan menghitung ketersediaan dan kebutuhan jasa ekosistem air bersih yang hasil analisisnya menunjukkan tingkat kebutuhan dan ketersediaan air bersih. Kebutuhan air bersih yang dihitung terdiri atas kebutuhan air domestik dan kebutuhan air lahan. Hasil akhir penghitungan DDLH aspek penyedia air disajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.12.**  
**Hasil Penghitungan Luas Wilayah yang Mendukung Penyediaan Air di Kota Cimahi**

Wilayah	Luas Kecamatan (Ha)	Luas yang Belum Melampaui	
		Ha	%
Kecamatan Cimahi Selatan	1.739,95	405,50	23,31%
Kecamatan Cimahi Selatan	1.099,48	240,18	21,84%
Kecamatan Cimahi Selatan	1.404,69	217,64	15,49%
<b>KOTA CIMAHI</b>	<b>4.244,11</b>	<b>863,32</b>	<b>20,34%</b>

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi 2017-2022

## **BAB V**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah yang Berakhir Pada Tahun 2022, maka penentuan Tujuan dan Sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 didasarkan pada Visi Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025. Adapun Visi Misi RPJPD Kota Cimahi dijelaskan sebagai berikut :

#### **5.1. VISI DAN MISI RPJPD KOTA CIMAH**

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026 merupakan pembangunan tahap ke-5 (lima) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi Tahun 2005-2025, yang mana dalam kurun waktu tersebut akan dilakukan **Pemeliharaan kondisi dinamis masyarakat Madani Cimahi dengan mempertahankan semua keunggulan yang telah dicapai serta terus meningkatkan dan memanfaatkan semua potensi yang dimiliki.**

Pada tahap ini pemerintah daerah berupaya untuk memelihara kondisi masyarakat Cimahi yang sejahtera dengan mempertahankan keunggulan dan potensi daerah yang telah dimiliki masyarakat Kota Cimahi dalam segala bidang terus ditingkatkan. Pencapaian keunggulan tersebut berarti masyarakat Kota Cimahi diharapkan memiliki daya saing yang relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah lain. Dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing antara lain ditandai oleh semakin tingginya solidaritas dan kepedulian sosial masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat, semakin tingginya pendapatan dan kemandirian masyarakat, mantapnya sumber daya manusia yang

berkualitas dan berdaya saing serta makin membaiknya kinerja pengelolaan SDM yang handal. Visi RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005-2025 yaitu :

### **“ CIMAHI KOTA CERDAS “**

Dalam Visi RPJPD Kota Cimahi tahun 2005-2025: Cimahi dengan segala potensi dan keterbatasannya dituntut untuk menjadi kota yang CERDAS agar dapat bersaing dengan daerah-daerah lainnya. CERDAS dapat diartikan sebagai singkatan dari Creative yang berarti dapat berkreasi dalam bentuk aslinya serta produktif; Egalitarian yang berarti memandang kesamaan derajat manusia atau menjadi sifat dari demokratis yang saat ini sedang berkembang di negara kita; Religious adalah sifat kota yang agamis mengamalkan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa secara konsekuen; Developable diartikan sebagai kota yang berkemampuan kompetitif untuk dibangun, Accretive diartikan sebagai kota memiliki nilai tambah untuk terus maju dan berkembang; serta Sustainable adalah tercapainya kota yang dapat mencukupi kebutuhan warganya secara berkelanjutan menjangkau lintas generasi.

Dengan demikian visi **“CIMAHI KOTA CERDAS”** adalah mewujudkan kota yang mampu mengatasi rintangan dan ancaman yang timbul, serta dapat mengambil kesempatan menjadi kota yang unggul, berbekal pada pengembangan kreativitas dalam produksi, egaliter dalam kehidupan yang demokratis, serta didukung masyarakat yang religius akan berdaya saing untuk dapat membangun kota yang terus maju dan berkembang menuju kemandirian pelayanan kota bagi kehidupan yang lebih baik.

Indikasi terwujudnya pencapaian Visi Pembangunan Kota Cimahi dalam RPJPD ditandai dengan :

#### **1. Aspek Sumberdaya manusia**

Ditunjukkan dengan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta

mampu bersaing dan memainkan peran dan fungsi sebagai subyek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

## **2. Aspek Ekonomi**

Ditunjukkan dengan penciptaan struktur ekonomi yang tangguh, pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi, kemitraan yang saling menguntungkan baik dalam lingkup regional, nasional dan internasional, serta kontribusi sektor industri, jasa dan perdagangan yang semakin meningkat baik dilihat dari segi sumbangannya dalam penciptaan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) maupun dalam penyerapan tenaga kerja.

## **3. Aspek Pemerintahan**

Ditunjukkan dengan kondisi demokrasi yang berkualitas, yaitu penerimaan seluruh masyarakat terhadap demokrasi dalam berbangsa dan bernegara, didukung oleh tertib sosial, penegakan hukum yang konsisten dan peraturan daerah yang mendorong peningkatan kinerja pemerintahan, profesionalisme aparatur, pelayanan publik, akuntabilitas dan transparansi sehingga terwujud pemerintahan yang telah mampu menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

## **4. Aspek Sosial Budaya**

Ditunjukkan dengan kestabilan politik, meningkatnya derajat kehidupan sosial masyarakat, terjaminnya keamanan dan ketertiban, pengamalan ajaran agama secara konsisten, terwujudnya kerukunan hidup antar umat beragama serta pelestarian dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya daerah yang mampu menjawab tantangan masa depan yang sangat dinamis.

## **5. Aspek lingkungan hidup**

Ditunjukkan dengan diterapkannya pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang ditandai oleh tingginya daya dukung lingkungan, rendahnya tingkat kerusakan dan pencemaran lingkungan, lestarinya pemanfaatan sumberdaya alam yang terbarukan maupun tak terbarukan serta tingginya peran serta

masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup sehingga terjadi keadilan inter dan antar generasi.

Upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang Kota Cimahi tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) misi pembangunan jangka panjang Kota Cimahi tahun 2005-2025 sebagai berikut :

**Misi Satu : Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul.**

Yakni memperkuat jati diri dan karakter masyarakat kota yang melalui pendidikan membentuk manusia bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi disiplin untuk taat aturan dan bermoral, memelihara kerukunan antar warga kota, dan antar budaya, mengembangkan modal sosial dan mengembangkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang menguasai dan memanfaatkan iptek, membangun keterkaitan produksi, distribusi, dan pelayanan dalam rangka meraih keunggulan kompetitif sehingga memiliki kebanggaan sebagai warga kota untuk meraih kehidupan yang lebih baik.

**Misi Dua : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**

Yakni meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, kemitraan yang serasi antarlegislatif dengan eksekutif, dan penciptaan stabilitas politik yang lebih demokratis dan konsistensi dalam penegakan hukum. Selain itu hal mendasar yang menjadi kewajiban adalah pengarusutamaan paradigma sebagai pelayan publik, peningkatan efektivitas dan akuntabilitas kegiatan pemerintahan daerah sehingga tercapai pelaksanaan fungsi-fungsi pelayanan birokrasi dan penanggulangan korupsi. Cakupan perbaikan tata kelola pemerintahan tidak hanya terbatas sektor pemerintahan, tetapi juga meliputi sektor

swasta untuk memperbaiki tata kelolanya. Upaya mendorong lebih banyak perusahaan untuk mengubah statusnya menjadi perusahaan publik akan mendorong keterbukaan dan akuntabilitas publik pula. Hal ini juga penting untuk mencegah kolusi, nepotisme, serta konflik kepentingan yang dapat mengganggu roda perekonomian.

**Misi Tiga : Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah**

Persaingan global yang kita hadapi bukan lagi antar bangsa tetapi sudah menohok ke persaingan antar kota, hal ini sejalan dengan penduduk perkotaan yang semakin banyak serta peran kota sebagai pusat produksi, distribusi dan pemasaran. Daya saing ekonomi kota dibangun oleh penguasaan akan keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan yang unggul dan inovatif memperhatikan keterkaitan antar pelaku dan sumberdaya lokal/daerah sehingga masyarakat lebih banyak berperan di dalamnya dan ikut menikmati hasil pertumbuhan ekonomi sekaligus nilai tambah yang terjadi. Untuk menjangkau keunggulan komparatif, kompetitif dan kooperatif harus didukung para pekerja yang dilengkapi dengan keahlian, kompetensi, dan kemampuan untuk bekerja. Demikian juga usaha mikro, kecil, dan menengah diharapkan dapat tumbuh dan berkembang menjadi andalan ekonomi lokal yang kompetitif yang dapat meningkatkan produktifitas dan daya saing yang lebih baik.

**Misi Empat : Mewujudkan Keserasian Pembangunan yang Berkeadilan**

Yaitu dalam mencapai pembangunan kota yang inklusif diperlukan percepatan pertumbuhan ekonomi kota yang lebih tinggi lagi agar dapat mengikutsertakan sebanyak mungkin warga kota yang merasakan manfaat ekonomi yang terjadi. Hal ini untuk mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin serta memperkuat kapasitas keluarga dalam

menghadapi berbagai guncangan. Pengurangan kemiskinan tidak sepenuhnya mengandalkan pertumbuhan ekonomi saja, tetapi memerlukan intervensi pemerintah kota yang tepat dan afirmatif terhadap kelompok yang terpinggirkan untuk memastikan semua kelompok memiliki akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi yang muncul. Selain itu mengurangi kesenjangan antar ekonomi lokal dan ekonomi formal serta kesenjangan pelayanan sarana dan prasarana dasar, kualitas manusia dari diskriminasi menurut status, golongan, tingkat pendapatan dan gender.

### **Misi Lima : Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan**

Yaitu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan, menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan, mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan ruang terbuka hijau, konservasi, permukiman dan kegiatan sosial ekonomi. Kerusakan lingkungan hidup mengakibatkan biaya hidup meningkat yang pada gilirannya menurunkan kualitas hidup. Lingkungan hidup yang rusak juga diduga menyebabkan munculnya penyakit epidemik maupun endemik. Upaya mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan diarahkan pada : *pertama*, pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan, yang dicerminkan oleh (1) tetap terjaganya fungsi dan daya dukung lingkungan dan (2) kemampuan pemulihan tanah, air dan udara dalam mendukung kualitas kehidupan secara serasi, seimbang dan lestari; *kedua*, memelihara kekayaan keragaman jenis flora dan fauna dicerminkan oleh : nilai tambah, daya saing kota dan modal pembangunan kota, serta *ketiga*, meningkatnya kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup menuju kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Kota.



## **5.2. TUJUAN DAN SASARAN KOTA CIMAHI**

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi dan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4(empat) tahun. Pernyataan tujuan memuat hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah.

RPD Tahun 2023-2026 Kota Cimahi memuat 7 (Tujuh) Tujuan Kota dan 28 (Dua puluh Delapan) Sasaran. Setiap tujuan dan sasaran dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang menggambarkan secara langsung tolok ukur keberhasilan pembangunan Kota Cimahi dengan tingkatan kinerja paling tinggi yaitu dampak (*impact*).

Penentuan target kinerja tujuan dan sasaran pada dokumen RPD Kota Cimahi mempertimbangkan keselarasan pencapaian target kinerja tujuan Perencanaan Pembangunan di tingkat Provinsi maupun nasional, yakni dengan mempertimbangkan permasalahan-permasalahan teknis yang terjadi.

Tujuan Kota yang terdapat dalam dokumen RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026 ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Kota yakni terdiri dari :

1. Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan;
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
4. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi;
5. Menurunnya Angka Kemiskinan
6. Terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan;
7. Meningkatkan Ketahanan Bencana;

Penetapan ketujuh indikator Kinerja Utama (IKU) Kota dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan pembangunan

yang tertuang dalam pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Penetapan IKU kota juga dilakukan untuk menuntaskan permasalahan-permasalahan kota yang selanjutnya menjadi Isu Strategis Kota. Indikator Sasaran yang disusun dalam Tabel 5.1. selanjutnya akan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kepala Perangkat Daerah yang akan muncul dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), sehingga keselarasan Dokumen RPD dan Renstra Perangkat Daerah di Kota Cimahi diharapkan akan tercapai.

Untuk menyelesaikan isu strategis Kota diperlukan penetapan target indikator makro kota yang akan dicapai dalam dokumen RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026. Penetapan target Indikator Makro Kota Cimahi dilakukan berdasarkan *trend* data yang dipublikasikan BPS tentang capaian pembangunan Kota Cimahi dan hasil perhitungan proyeksi Bapelitbangda Cimahi dengan mempertimbangkan target pencapaian Indikator Makro Provinsi Jawa Barat.

**Tabel 5.1.**  
**Proyeksi Indikator Makro Kota Cimahi Tahun 2023-2026**

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Rencana Pembangunan Daerah				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	78,11	78,22	78,32	78,42	78,50	78,50
2	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0,75	0,63	0,57	0,51	0,45	0,45
3	Persentase Penduduk Miskin	Persen	5,35	5,35	5,30	5,25	5,20	5,20
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	13,07	12,61	12,38	12,15	11,92	11,92
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,19	5,45	5,15-5,95	5,2-6,1	5,25-6,25	5,25-6,25
6	Indeks Gini	Poin	0,415	0,409	0,406	0,403	0,400	0,400
7	Pendapatan per Kapita	Juta Rupiah	12.019	12.194	12.282	12.370	12.458	12.458

Sumber : Bapelitbangda Cimahi , diolah (2022)

Adapun penyesuaian Tujuan, dan Sasaran RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026 berdasarkan arahan dalam visi misi RPJPD Kota Cimahi, disajikan pada tabel di bawah ini :

**Tabel 5.2.**  
**Tujuan, dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026**

VISI/ MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DAN INDIKATOR KINERJANYA	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD
		2023	2024	2025	2026	
[ VISI ] CIMAHI KOTA CERDAS						
[ MISI 1]Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul						
[ TUJUAN ] Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia						
Indeks Kesehatan	83,40 indeks	83,42 indeks	83,43 indeks	83,45 indeks	83,46 indeks	83,46 indeks
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	77,21 indeks	77,25 indeks	77,30 indeks	77,35 indeks	77,40 indeks	77,40 indeks
Indeks Pengetahuan	75,29 indeks	75,29 indeks	75,29 indeks	75,36 indeks	75,42 indeks	75,42 indeks
[ SASARAN ] Meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan kualitas pendidikan						
Harapan lama sekolah	13,81 tahun	13,82 tahun	13,83 tahun	13,84 tahun	13,85 tahun	13,85 tahun
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	0 indeks	1 indeks	1,5 indeks	1,5 indeks	2 indeks	2 indeks
Rata-rata Kemampuan Literasi dan Numerasi Pendidikan Dasar (SD dan SMP) Berdasarkan asesmen Nasional	1,85 nilai	2,05 nilai	2,06 nilai	2,08 nilai	2,10 nilai	2,10 nilai
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	11,08 tahun	11,09 tahun	11,10 tahun	11,11 tahun	11,12 tahun	11,12 tahun
[ SASARAN ] Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat						
Akreditasi Rumah Sakit	Utama Tingkat	Paripurna Tingkat	Paripurna Tingkat	Paripurna Tingkat	Paripurna Tingkat	Paripurna Tingkat
Indeks Keluarga sehat	0,28 indeks	0,28 indeks	0,32 indeks	0,36 indeks	0,40 indeks	0,40 indeks
[ SASARAN ] Meningkatnya pengarusutamaan gender						
Persentase paarticipasi perempuan dalam pengambilan keputusan	37,19 persen	37,50 persen	38 persen	38,50 persen	39 persen	39 persen

VISI/ MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DAN INDIKATOR KINERJANYA	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD
		2023	2024	2025	2026	
Persentase partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi	30,65 persen	31,65 persen	32,65 persen	33,65 persen	34,65 persen	34,65 persen
Persentase partisipasi perempuan dalam kegiatan politik	26,67 persen	26,67 persen	26,67 persen	26,67 persen	26,67 persen	26,67 persen
<b>[ SASARAN ] Meningkatnya Perlindungan Terhadap Anak</b>						
Persentase Capaian Kota Layak Anak	50 persen	51 persen	52 persen	53 persen	54 persen	54 persen
<b>[ SASARAN ] Pengendalian penduduk yang sesuai dengan daya tampung kota</b>						
Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	64,31 persen	65 persen	66 persen	67 persen	68 persen	68 persen
<b>[ TUJUAN ] Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan</b>						
Tingkat Partisipasi Masyarakat	N/A persen	50 persen	55 persen	60 persen	65 persen	65 persen
<b>[ SASARAN ] Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan</b>						
Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	N/A persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
<b>[ SASARAN ] Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan</b>						
Persentase Partisipasi Pemuda terhadap Pembangunan	11,2 persen	11,2 persen	11,3 persen	11,4 persen	11,5 persen	11,5 persen
<b>[ SASARAN ] Meningkatnya Pemberdayaan Pelaku kebudayaan</b>						
Persentase Pelaku kebudayaan yang diberdayakan	N/A persen	50 persen	60 persen	85 persen	100 persen	100 persen
<b>[ SASARAN ] Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga</b>						
Prosentasi masyarakat yang aktif berolahraga	45,5 persen	46 persen	46,2 persen	46,5 persen	46,7 persen	46,7 persen
<b>[ MISI 2 ] Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik</b>						
<b>[ TUJUAN ] Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan</b>						
Indeks Reformasi Birokrasi	59,22 (CC) indeks	60,73 (B) indeks	60,75 (B) indeks	60,78 (B) indeks	60,80 (B) indeks	60,80 (B) indeks
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

VISI/ MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DAN INDIKATOR KINERJANYA	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD
		2023	2024	2025	2026	
<b>[ SASARAN ] Meningkatnya keswadayaan Masyarakat</b>						
Persentase Jumlah partisipasi swadaya masyarakat di Kecamatan Cimahi Tengah	85 persen	85 persen	85 persen	85 persen	85 persen	85 persen
Persentase Jumlah partisipasi swadaya masyarakat di Kecamatan Cimahi Utara	85 persen	85 persen	85 persen	85 persen	85 persen	85 persen
Persentase Jumlah partisipasi swadaya masyarakat di Kecamatan Cimahi Selatan	85 persen	85 persen	85 persen	85 persen	85 persen	85 persen
<b>[ SASARAN ] Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat</b>						
Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
Persentase Pembinaan Politik Dalam Negeri	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
Persentase Organisasi Kemasyarakatan/Kelompok Masyarakat yang Terbina/Terfasilitasi	N/A persen	45 persen	50 persen	55 persen	60 persen	60 persen
Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Cimahi Selatan	75 persen	75 persen	75 persen	75 persen	75 persen	75 persen
Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Cimahi Tengah	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen
Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Cimahi Utara	75 persen	75 persen	75 persen	75 persen	75 persen	75 persen
Penurunan Angka Gangguan Katentraman dan Ketertiban Masyarakat	850 angka	800 angka	750 angka	700 angka	650 angka	650 angka
Persentase Potensi Konflik terkait Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Trantibmas yang dapat dicegah dan ditangani	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
Waktu respon tanggap kebakaran	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit
<b>[ SASARAN ] Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik</b>						
Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	N/A Indeks	351 Indeks	370 Indeks	390 Indeks	400 Indeks	400 Indeks
Indeks Keterbukaan Infromasi Publik	74,91 persen	80 persen	84 persen	88 persen	92 persen	92 persen
Indeks Pembangunan Statistik	2 Level/Tingkat Kematangan	2 Level/Tingkat Kematangan	3 Level/Tingkat Kematangan	3 Level/Tingkat Kematangan	4 Level/Tingkat Kematangan	4 Level/Tingkat Kematangan

VISI/ MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DAN INDIKATOR KINERJANYA	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD
		2023	2024	2025	2026	
Indeks Profesionalisme ASN	50,00 Indeks	50,00 Indeks	50,50 Indeks	51,00 Indeks	51,50 Indeks	51,50 Indeks
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,75 Indeks	3,00 Indeks	3,20 Indeks	3,40 Indeks	3,60 Indeks	3,60 Indeks
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	N/A Nilai	35 Nilai	35 Nilai	40 Nilai	45 Nilai	45 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah	N/A Nilai	30 Nilai	30 Nilai	35 Nilai	35 Nilai	35 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Bakesbangpol	N/A Nilai	50 Nilai	50,50 Nilai	51 Nilai	60 Nilai	60 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi BAPPELITBANGDA	63,97 Nilai	64,50 Nilai	65,00 Nilai	65,50 Nilai	66,00 Nilai	66,00 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi BKPSDMD	N/A Nilai	60,00 Nilai	60,50 Nilai	61,00 Nilai	61,50 Nilai	62,00 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi BPKAD	N/A Nilai	60,0 Nilai	60,5 Nilai	61,0 Nilai	61,5 Nilai	61,5 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Arsip Daerah	50 Nilai	51 Nilai	51,5 Nilai	51,7 Nilai	52 Nilai	52 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	N/A Nilai	50 Nilai	50,4 Nilai	50,5 Nilai	50,6 Nilai	50,6 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan	24,88 Nilai	24,90 Nilai	24,93 Nilai	24,95 Nilai	24,98 Nilai	24,98 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	N/A Nilai	50 Nilai	50,5 Nilai	51 Nilai	51,5 Nilai	51,5 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pangan dan Pertanian	N/A Nilai	30 Nilai	30 Nilai	35 Nilai	40 Nilai	40 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	N/A Nilai	30 Nilai	35 Nilai	35 Nilai	40 Nilai	40 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pendidikan	N/A Nilai	35 Nilai	35 Nilai	35 Nilai	35 Nilai	35 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan	N/A Nilai	50,1 Nilai	50,50 Nilai	51 Nilai	51,50 Nilai	51,50 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Sosial	N/A Nilai	35 Nilai	35 Nilai	40 Nilai	40 Nilai	40 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Disdagkoperin	N/A Nilai	30 Nilai	30 Nilai	35 Nilai	35 Nilai	35 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Disdukcapil	28,88 Nilai	38 Nilai	42 Nilai	47 Nilai	51 Nilai	51 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Diskominfo	N/A Nilai	55 Nilai	55,5 Nilai	56 Nilai	56,5 Nilai	56,5 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Disnaker	N/A Nilai	60 Nilai	60 Nilai	60 Nilai	60 Nilai	60 Nilai

VISI/ MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DAN INDIKATOR KINERJANYA	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD
		2023	2024	2025	2026	
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi DPKP	N/A Nilai	55 Nilai	56 Nilai	57 Nilai	58 Nilai	58 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi DPMPTSP	35,67 Nilai	35,7 Nilai	35,8 Nilai	35,9 Nilai	36 Nilai	36 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi DPUPR	N/A Nilai	55 Nilai	56 Nilai	57 Nilai	58 Nilai	58 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Inspektorat	N/A Nilai	63 Nilai	64 Nilai	65 Nilai	66 Nilai	66 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kecamatan Cimahi Selatan	N/A Nilai	60,00 Nilai	60,50 Nilai	61,00 Nilai	61,50 Nilai	62,00 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kecamatan Cimahi Tengah	N/A Nilai	60,00 Nilai	60,50 Nilai	61,00 Nilai	61,50 Nilai	62,00 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kecamatan Cimahi Utara	N/A Nilai	60,00 Nilai	60,50 Nilai	61,00 Nilai	61,50 Nilai	62,00 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi RSUD Cibabat	25,5 Nilai	25,55 Nilai	25,57 Nilai	25,60 Nilai	25,62 Nilai	25,62 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi SATPOLPP-DAMKAR	N/A Nilai	60,73 Nilai	60,75 Nilai	60,78 Nilai	60,80 Nilai	60,80 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Sekertariat DPRD	N/A Nilai	60,73 Nilai	60,75 Nilai	60,78 Nilai	60,80 Nilai	60,80 Nilai
Nilai IKM Administrasi Kependudukan	79,01 Nilai	81 Nilai	82 Nilai	82,5 Nilai	83 Nilai	83 Nilai
Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	N/A persen	75 persen	75 persen	75 persen	75 persen	75 persen
Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el, KIA, Akte kelahiran 0-18 tahun)	94,88 persen	96,25 persen	96,88 persen	97,50 persen	98,13 persen	98,13 persen
Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Data Kependudukan berupa hak akses data dan atau tabulasi data	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
Persentase Penerbitan Dokumen Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu Cimahi Selatan	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen
Persentase Penerbitan Dokumen Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu Cimahi Tengah	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen
Persentase Penerbitan Dokumen Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu Cimahi Utara	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen
Indeks LAKE	64,17 indeks	41 indeks	57 indeks	67 indeks	73 indeks	73 indeks
Tingkat Kepuasan Masyarakat Kota Cimahi terhadap Kinerja DPRD	N/A Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai
<b>[ SASARAN ] Meningkatkan Kualitas Pengawasan</b>						



VISI/ MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DAN INDIKATOR KINERJANYA	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD
		2023	2024	2025	2026	
Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi	N/A Nilai	3 Nilai	3 Nilai	3 Nilai	3 Nilai	3 Nilai
Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	N/A persen	5 persen	5 persen	5 persen	5 persen	20 persen
<b>[ SASARAN ] Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah</b>						
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	59,22 Nilai	60,73 Nilai	60,75 Nilai	60,78 Nilai	60,80 Nilai	60,80 Nilai
Nilai LPPD	Tinggi Nilai	Tinggi Nilai	Tinggi Nilai	Tinggi Nilai	Tinggi Nilai	Tinggi Nilai
Nilai Rata-rata IKM Kota	82,37 Nilai	82,37 Nilai	82,37 Nilai	82,37 Nilai	82,37 Nilai	82,37 Nilai
Nilai SAKIP Kota	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai
<b>[ SASARAN ] Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah</b>						
Persentase keselarasan kinerja antar dokumen perencanaan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
Persentase capaian Indikator Kinerja Kunci	N/A persen	80 persen	85 persen	90 persen	95 persen	95 persen
<b>[ SASARAN ] Optimalisasi Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah</b>						
Rasio Utilisasi Aset Daerah	64,40 persen	72,0 persen	73,5 persen	75,0 persen	76,5 persen	76,5 persen
Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah dengan Standar Akuntansi Pemerintahan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
Persentase Penetapan APBD tepat waktu	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
<b>[ MISI 3 ] Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah</b>						
<b>[ TUJUAN ] Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi</b>						
Indeks Gini	0,412 indeks	0,409 indeks	0,406 indeks	0,403 indeks	0,400 indeks	0,400 indeks
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5,11 persen	5,45 persen	5,15 - 5,95 persen	5,20 - 6,10 persen	5,25 - 6,25 persen	5,25 - 6,25 persen
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	13,07 persen	12,61 persen	12,38 persen	12,15 persen	11,92 persen	11,92 persen

VISI/ MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DAN INDIKATOR KINERJANYA	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD
		2023	2024	2025	2026	
<b>[ SASARAN ] Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi melalui Optimalisasi Potensi Daerah</b>						
Persentase IKM yang berdaya saing	N/A persen	8 persen	8 persen	8 persen	8 persen	8 persen
Persentase Ketersediaan Bahan Pokok Masyarakat di Pasar	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
Persentase Pelaku Usaha yang Berpotensi Ekspor	5 persen	6 persen	7 persen	7 persen	7 persen	32 persen
Persentase Sarana dan Prasarana Perdagangan Layak Fungsi	25 persen	30 persen	40 persen	45 persen	50 persen	50 persen
Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	28,24 persen	28,73 persen	29,22 persen	29,72 persen	29,72 persen	29,72 persen
Realisasi Investasi (dalam milyar rupiah)	N/A milyar rupiah	6,781 milyar rupiah	7,081 milyar rupiah	7,381 milyar rupiah	7,681 milyar rupiah	7,681 milyar rupiah
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara	5.685 orang	41.030 orang	43.085 orang	45.25 orang	47.522 orang	176.889 orang
Lama Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari
<b>[ SASARAN ] Mempercepat peningkatan pemerataan pendapatan</b>						
Nilai PPH Ketersedian	2318 nilai	2350 nilai	2350 nilai	2380 nilai	2380 nilai	2380 nilai
Skor PPH Ketersedian	67,8 nilai	67,9 nilai	68 nilai	68 nilai	68 nilai	68 nilai
Persentase Koperasi Sehat	48,75 persen	48,75 persen	51,25 persen	53,75 persen	56,25 persen	56,25 persen
Persentase UKM Naik Kelas	21 persen	21 persen	26 persen	31 persen	36 persen	36 persen
Persentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Pertanian	1,32 persen	1,32 persen	1,32 persen	1,32 persen	1,33 persen	1,33 persen
<b>[ SASARAN ] Meningkatkan kesempatan kerja</b>						
Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	77,6 persen	78 persen	79 persen	80 persen	80 persen	80 persen
<b>[ MISI 4 ] Mewujudkan Keserasian Pembangunan yang Berkeadilan</b>						
<b>[ TUJUAN ] Menurunnya Angka Kemiskinan</b>						

VISI/ MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DAN INDIKATOR KINERJANYA	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD
		2023	2024	2025	2026	
Tingkat Kemiskinan	5,35 persen	5,35 persen	5,30 persen	5,25 persen	5,20 persen	5,20 persen
<b>[ SASARAN ] Meningkatkan akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi Masyarakat berpenghasilan rendah</b>						
Cakupan PPKS yang mendapatkan bantuan kerawanan pangan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
Cakupan PPKS yang mendapatkan fasilitasi dasar untuk memulai usaha	N/A persen	5 persen	5 persen	5 persen	5 persen	20 persen
Cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan infrastruktur Dasar	11 persen	34 persen	56 persen	78 persen	100 persen	100 persen
Cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan Dasar Sosial	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
<b>[ MISI 5 ] Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan yang Sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan</b>						
<b>[ TUJUAN ] Terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan</b>						
Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur	N/A indeks	Sedang indeks	Sedang indeks	Sedang indeks	Tinggi indeks	Tinggi indeks
<b>[ SASARAN ] Berkurangnya luasan banjir</b>						
Persentase luasan banjir	0,22 persen	0,219 persen	0,217 persen	0,216 persen	0,216 persen	0,216 persen
<b>[ SASARAN ] Meningkatnya Kualitas Lingkungan</b>						
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	41,718 indeks	42,18 indeks	42,37 indeks	42,56 indeks	42,75 indeks	42,75 indeks
<b>[ SASARAN ] Meningkatnya Kualitas Permukiman</b>						
Rasio luas kawasan kumuh	0,005 rasio	0,004 rasio	0,003 rasio	0,001 rasio	0,000 rasio	0,000 rasio
<b>[ SASARAN ] Meningkatnya pelayanan transportasi yang terpadu dan berkualitas</b>						
Persentase Tingkat Kemantapan Jalan	94,87 persen	95,12 persen	95,37 persen	95,62 persen	96 persen	96 persen
Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Services)	C predikat	C predikat	C predikat	C predikat	C predikat	C predikat
<b>[ SASARAN ] Meningkatnya Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati</b>						

VISI/ MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DAN INDIKATOR KINERJANYA	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD
		2023	2024	2025	2026	
Persentase luasan kehati Kota Cimahi yang dikelola	1,13 persen	1,14 persen	1,15 persen	1,16 persen	1,17 persen	1,17 persen
<b>[ SASARAN ] Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Perencanaan Tata Ruang di Kota Cimahi</b>						
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	62 persen	62,2 persen	62,4 persen	62,6 persen	62,8 persen	62,8 persen
Persentase Penyelesaian Administrasi Pertanahan	N/A persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
<b>[ SASARAN ] Terwujudnya Kualitas Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik</b>						
Persentase Bangunan Gedung Negara dengan Kondisi Baik	72,5 persen	73 persen	73,5 persen	74 persen	74,5 persen	74,5 persen
<b>[ TUJUAN ] Meningkatkan Ketahanan Bencana</b>						
Indeks Resiko Bencana	105 (kelas resiko sedang) indeks	105 (kelas resiko sedang) indeks	105 (kelas resiko sedang) indeks	105 (kelas resiko sedang) indeks	105 (kelas resiko sedang) indeks	105 (kelas resiko sedang) indeks
<b>[ SASARAN ] Meningkatkan Ketahanan Bencana</b>						
Indeks Ketahanan Daerah	0,76 (Level II I/ sedang) indeks	0,77 (Level III / sedang) indeks	0,77 (Level III / sedang) indeks	0,78 (Level III / sedang) indeks	0,79 (Level III / sedang) indeks	0,79 (Level III / sedang) indeks

## **BAB VI**

### **STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS**

Dalam bab ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program prioritas daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

#### **6.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Rumusan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Sementara itu, arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan daerah dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan sasaran pembangunan.

Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pencapaian tujuan serta sasaran pembangunan jangka menengah selama periode pembangunan dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2026, maka ditetapkan serangkaian strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Cimahi. Strategi dan arah kebijakan pembangunan tersebut disajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 6.1.**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Kota Cimahi Tahun 2023-2026**

TUJUAN KOTA	SASARAN KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<b>[VISI] CIMAHI KOTA CERDAS</b>			
<b>[MISI 1] Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul</b>			
<b>Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia</b>	Meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan kualitas pendidikan	Meningkatkan pengelolaan pendidikan yang sesuai standar dan merata	Meningkatkan kemudahan memperoleh pendidikan untuk semua golongan masyarakat Meningkatkan Mutu Pendidikan
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Meningkatkan pengelolaan kesehatan yang sesuai standar dan menjangkau seluruh wilayah	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan
			Mengembangkan upaya-upaya kesehatan masyarakat dan perorangan
			Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kesehatan
			Meningkatkan kualitas sumber daya manusia kesehatan
			Meningkatkan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
			Meningkatkan cakupan pembiayaan kesehatan
			Meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19
	Meningkatnya pengarusutamaan gender	Meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Meningkatkan kelembagaan pengarusutamaan gender
Meningkatnya Perlindungan Terhadap Anak	Meningkatkan perlindungan anak	Meningkatkan perlindungan dan tumbuhkembang anak	
Pengendalian penduduk yang sesuai dengan daya tampung kota	Penguatan dan pemaduan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas	Mengembangkan Inovasi Promosi Keluarga Berencana	
<b>Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan</b>	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan Keswadayaan Masyarakat	Meningkatkan Keswadayaan Masyarakat
		Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui partisipasi masyarakat	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui partisipasi masyarakat
	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	Meningkatkan kapasitas dan daya saing pemuda	Meningkatkan kapasitas dan daya saing pemuda
	Meningkatnya Pemberdayaan Pelaku kebudayaan	Meningkatkan Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan	Melestarikan, memajukan dan mempromosikan kebudayaan

TUJUAN KOTA	SASARAN KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga	Meningkatkan Sumber Daya Olahraga	Meningkatkan Sumber Daya Olahraga
<b>[MISI 2] Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik</b>			
<b>Meningkatkan tata kelola pemerintahan</b>	Meningkatnya keswadayaan Masyarakat	Meningkatkan Keswadayaan Masyarakat di Kecamatan Cimahi Selatan	Fasilitasi Pembinaan Kelembagaan di Kecamatan Cimahi Selatan
			Fasilitasi Kegiatan PPM Tingkat RW di Kecamatan Cimahi Selatan
			Fasilitasi Stakeholder dalam Musrenbang di Kecamatan Cimahi Selatan
		Meningkatkan Keswadayaan Masyarakat di Kecamatan Cimahi Tengah	Fasilitasi Pembinaan Kelembagaan di Kecamatan Cimahi Tengah
			Fasilitasi Kegiatan PPM Tingkat RW di Kecamatan Cimahi Tengah
			Fasilitasi Stakeholder dalam Musrenbang di Kecamatan Cimahi Tengah
		Meningkatkan Keswadayaan Masyarakat di Kecamatan Cimahi Utara	Fasilitasi Pembinaan Kelembagaan di Kecamatan Cimahi Utara
			Fasilitasi Kegiatan PPM Tingkat RW di Kecamatan Cimahi Utara
			Fasilitasi Stakeholder dalam Musrenbang di Kecamatan Cimahi Utara
	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
			Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota
			Peningkatan upaya-upaya pencegahan dan penanganan bahaya kebakaran dan non kebakaran
		Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan Cimahi Selatan	Fasilitasi Upaya Penciptaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan Cimahi Selatan
			Fasilitasi Pemilu di Tingkat Wilayah Kecamatan Cimahi Selatan
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan Cimahi Tengah		Fasilitasi Upaya Penciptaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan Cimahi Tengah	
		Fasilitasi Pemilu di Tingkat Wilayah Kecamatan Cimahi Tengah	
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan Cimahi Utara	Fasilitasi Upaya Penciptaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan Cimahi Utara		

TUJUAN KOTA	SASARAN KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Fasilitasi Pemilu di Tingkat Wilayah Kecamatan Cimahi Utara
		Meningkatkan kualitas penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Peningkatan Sinergitas Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
		Meningkatkan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Peningkatan Sinergitas Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
		Meningkatkan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Peningkatan Sinergitas Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
		Meningkatkan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
		Meningkatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Peningkatan Sinergitas Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Peningkatan kualitas layanan administrasi pemerintahan daerah
			Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah
		Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan
			Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pencatatan sipil
			Meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan basis data kependudukan
		Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan Cimahi Selatan	Fasilitasi Pelayanan Administasi Pemerintahan Umum Bagi Masyarakat di Kecamatan Cimahi Selatan
		Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan Cimahi Tengah	Fasilitasi Pelayanan Administasi Pemerintahan Umum Bagi Masyarakat di Kecamatan Cimahi Tengah
		Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan Cimahi Utara	Fasilitasi Pelayanan Administasi Pemerintahan Umum Bagi Masyarakat di Kecamatan Cimahi Utara
		Meningkatkan Kualitas Penelitian, Pengembangan Inovasi dan Teknologi Daerah	Peningkatan Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Peningkatan Kualitas Inovasi dan Teknologi Daerah



TUJUAN KOTA	SASARAN KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
		Meningkatkan pelayanan informasi publik dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Meningkatkan pelayanan informasi publik dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	
		Meningkatkan kualitas data statistik sektoral yang terintegrasi	Meningkatkan kualitas data statistik sektoral yang terintegrasi	
		Meningkatkan keamanan sistem informasi pemerintah daerah	Meningkatkan keamanan sistem informasi pemerintah daerah	
		Meningkatkan kelembagaan dan pelayanan kedinasan DPRD	Meningkatkan kapasitas SDM DPRD, Meningkatkan pembuatan produk hukum DPRD, Meningkatkan kualitas penyusunan anggaran dan pengawasan	
	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Meningkatkan Kualitas Hasil Pengawasan		Peningkatan kendali mutu pengawasan
				Peningkatan pengawalan reformasi birokrasi, penegakan integritas dan peningkatan kapabilitas APIP
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Penataan Manajemen ASN	Fasilitasi Penataan Manajemen ASN	
		Meningkatkan Kompetensi ASN	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi ASN	
		Meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintah daerah	Peningkatan pelayanan penunjang pemerintahan daerah	
			Peningkatan koordinasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	
	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah	Meningkatkan keselarasan perencanaan kinerja pembangunan daerah	Peningkatan kesesuaian antar dokumen perencanaan dan capaian indikator kinerja pembangunan daerah	
			Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	
	Optimalisasi Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah	Meningkatkan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	
		Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan kualitas Rencana Anggaran Daerah	
			Peningkatan kualitas Perbendaharaan Daerah	
			Peningkatan kualitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
			Peningkatan Dukungan Pengelolaan Keuangan Daerah	
		Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah		
	<b>[MISI 3] Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah</b>			

TUJUAN KOTA	SASARAN KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi	Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi melalui Optimalisasi Potensi Daerah	Peningkatan kualitas Perencanaan dan Pembangunan Industri	Peningkatan aksesibilitas kebijakan bidang perindustrian
			Peningkatan standar dan daya saing produk IKM
		Optimalisasi Pelayanan Perizinan bidang Perdagangan	Peningkatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan serta tanda daftar gudang
		Optimalisasi standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Peningkatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
		Optimalisasi pengendalian dan pengawasan IKM	Peningkatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
		Peningkatan pemanfaatan teknologi perindustrian	Meningkatkan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
		Peningkatan sarana dan prasarana distribusi dan perdagangan	Meningkatkan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
			Meningkatkan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya
		Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Terjaminnya Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
			Meningkatkan Upaya Pengendalian Harga, dan Stok Barang
			Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
		Peningkatan ekspor produk Kota Cimahi	Meningkatkan upaya Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Peningkatan penggunaan dan pemasaran Produk Dalam Negeri	Meningkatkan Upaya Pemanfaatan Teknologi Digital sektor Perdagangan
		Peningkatan pelayanan Penanaman Modal	Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan
		Optimalisasi iklim, promosi Potensi investasi daerah	Pemberian fasilitas / insentif di bidang penanaman modal
			Pemetaan potensi investasi kota cimahi
Peningkatan promosi potensi investasi daerah	Peningkatan promosi investasi daerah		
Optimalisasi pengendalian dan pengawasan di Bidang Penanaman modal	Peningkatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal		

TUJUAN KOTA	SASARAN KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Optimalisasi pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Peningkatan Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan
		Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Meningkatkan pengelolaan daya tarik wisata
			Meningkatkan pengelolaan kawaan strategis pariwisata
			Meningkatkan pengelolaan destinasi pariwisata daerah
			Peningkatan upaya penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah
		Optimalisasi Pemasaran Pariwisata	Meningkatkan Promosi dan Kerjasama Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
		Pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi daerah	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
			Meningkatkan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif
		Peningkatan Kompetensi SDM bidang pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatkan penyediaan prasarana ruang kreatif daerah
			Meningkatkan upaya pengembangan ekosistem ekonomi kreatif
		Peningkatan intensifikasi dan / atau extensifikasi penerimaan daerah	Peningkatan intensifikasi dan / atau extensifikasi penerimaan daerah
		Meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah	Meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah
	Mempercepat peningkatan pemerataan pendapatan	Peningkatan Skala Usaha	Meningkatkan pemanfaatan teknologi, akses permodalan, kemudahan bahan baku dan digitalisasi KUM
			Meningkatkan standar dan daya saing produk KUM
		Meningkatkan tata kelola dan kelembagaan Koperasi	Peningkatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
			Peningkatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

TUJUAN KOTA	SASARAN KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Peningkatan kualitas SDM Koperasi	Meningkatnya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Peningkatan ketersediaan pangan	peningkatan stabilitasi pasokan dan harga pangan daerah & Peningkatan Pengelolaan cadangan pangan kabupaten/kota
			Peningkatan Pengelolaan cadangan pangan kabupaten/kota
		Peningkatan akses konsumsi pangan yang beranekaragam berbasis sumber daya lokal	Peningkatan upaya pencapaian target konsumsi pangan
		Penguatan Penanganan kerawanan pangan	Peningkatan upaya penanganan kerawanan pangan
			pembuatan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan
		Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan segar
		Pemanfaatan inovasi dan teknologi dalam bidang pertanian	Peningkatan penyuluhan pertanian
		Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan pengawasan penggunaan sarana pertanian
		Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	peningkatan prasarana pertanian
			Peningkatan dan Pengawasan sumber bibit ternak
		Optimalisasi Perizinan Usaha Pertanian	Peningkatan pelayanan perizinan usaha pertanian
		Meningkatkan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Peningkatan penjamin kesehatan hewan dan pengendalian wabah penyakit hewan menular
			Peningkatan upaya pengawasan migrasi hewan dan arus produk hewan
			Peningkatan pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner
		Optimalisasi Pengelolaan Perikanan Budidaya	optimalisasi pengelolaan budidaya perikanan
			optimalisasi SDM pengelola perikanan
		Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

TUJUAN KOTA	SASARAN KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Meningkatnya kesempatan kerja	Meningkatakan kesempatan kerja melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar	Meningkatkan upaya Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota
			Peningkatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Meningkatnya Upaya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
			Meningkatnya Upaya Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
			Peningkatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Evaluasi pelaksanaan pengiriman Transmigran	Peningkatan pelaksanaan koordinasi mengenai pengiriman transmigran
		Meningkatnya kompetensi pencari kerja	Meningkatnya kualitas perencanaan Tenaga Kerja
			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
		Meningkatnya keharmonisan hubungan industrial	Fasilitasi Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerjasama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam satu daerah kabupaten kota
			Fasilitasi Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan
<b>[MISI 4] Mewujudkan Keserasian Pembangunan yang Berkeadilan</b>			
<b>Menurunnya angka kemiskinan</b>	Meningkatkan akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi Masyarakat berpenghasilan rendah	Meningkatkan Perlindungan dan Pelayanan Sosial	Peningkatan perlindungan sosial dan akses pelayanan sosial dasar bagi kelompok rentan
			Peningkatan Pemberdayaan lembaga dan SDM kesejahteraan Sosial
			peningkatan pelayanan dan bantuan sosial dasar korban bencana
		Peningkatan penanganan kerawanan pangan bagi masyarakat miskin	Meningkatkan upaya penanganan kerawanan pangan bagi masyarakat miskin
		Peningkatan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) bagi masyarakat miskin	Meningkatkan upaya pemberdayaan usaha mikro bagi masyarakat miskin
		Meningkatkan fasilitasi rutilahu bagi masyarakat miskin	Peningkatan kuantitas dan kualitas rumah layak huni bagi masyarakat miskin

TUJUAN KOTA	SASARAN KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<b>[MISI 5] Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan yang Sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan</b>			
<b>Terpenuhinya standar pelayanan perkotaan</b>	Berkurangnya luasan banjir	Terkelolanya Sumber Daya Air	Meningkatnya pengelolaan Sumber daya Air
	Meningkatnya kualitas lingkungan	Meningkatnya kualitas udara dan air	Terkelolanya pencemaran air, udara dan tanah
		Terkelolanya sampah perkotaan	Peningkatan Infrastruktur Persampahan
			Meningkatkan sarana dan prasarana Persampahan
	Meningkatnya Kualitas Permukiman	Meningkatnya utilitas sarana prasarana permukiman	Meningkatkan utilitas sarana prasarana permukiman
		Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar perumahan	Meningkatkan dukungan layanan infrastruktur dasar perumahan
			Pengentasan permukiman kumuh perkotaan
		Meningkatnya akses air minum layak dan aman	Meningkatkan akses air minum yang layak dan aman
			Peningkatan kelembagaan pengelolaan air minum dengan pendirian PERUMDA
		Berkurangnya luas genangan di kawasan rawan genangan dan di luar rawan genangan	Menurunkan luas genangan di kawasan rawan genangan dan di luar rawan genangan
		Tersedianya Akses pengelolaan air limbah layak dan aman	Meningkatnya Akses pengelolaan air limbah layak dan aman
	Meningkatnya pelayanan transportasi yang terpadu dan berkualitas	Meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan kota dengan prinsip jalan yang berkeselamatan	Optimalisasi kemantapan jalan
		Meningkatkan manajemen dan pengendalian lalulintas serta angkutan jalan	Optimalisasi manajemen dan pengendalian lalulintas serta angkutan jalan
	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Terkelolanya keanekaragaman hayati	Peningkatan pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
	Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Perencanaan Tata Ruang di Kota Cimahi	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang
		Pelaksanaan penatagunaan tanah	Penyelenggaraan penatagunaan tanah sesuai tata ruang
Terwujudnya Kualitas Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	Meningkatkan kualitas bangunan gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung	
		Peningkatan kapasitas tenaga terampil konstruksi	

TUJUAN KOTA	SASARAN KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Ketahanan Bencana	Meningkatnya ketahanan bencana	Meningkatkan manajemen dan koordinasi bencana pada tahap pra bencana darurat bencana dan pasca bencana	Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Bencana melalui kemitraan multi pihak dan penataan kelembagaan penanggulangan bencana.
			Peningkatan kapasitas SDM baik aparatur maupun relawan/masyarakat serta kelembagaan pemerintah dan non pemerintah terkait penanggulangan bencana.
			Penyelenggaraan Pemulihan Dampak Bencana secara lintas sektor sesuai dengan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Sumber : Bappelitbangda, 2022

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Fokus atau tema setiap tahun selama periode RPD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Fokus atau tema Kota Cimahi per tahun menjadi tema atau fokus pembangunan pada RKPD Kota Cimahi.

Adapun tema pembangunan Kota Cimahi setiap tahun selama 4 (empat) tahun periode RPD 2023-2026 disajikan sebagai berikut :

**Gambar 6.1.**  
**Fokus/Tema Pembangunan Kota Cimahi Tahun 2023-2026**



Sumber : Bappelitbangda, 2022

## **6.2. PROGRAM PRIORITAS DAERAH KOTA CIMAHI**

Dalam rangka mencapai target sasaran pembangunan telah ditetapkan sejumlah strategi dan arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan yang merupakan cara untuk mewujudkan setiap sasaran sebagaimana telah diuraikan pada sub bab sebelumnya, membutuhkan program yang tepat. Program tersebut akan mengimplementasikan setiap sasaran sesuai dengan strategi dan arah kebijakan. Program-program tersebut disebut sebagai program prioritas daerah.

Program prioritas daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPD. Program prioritas daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih. Mengingat strategis dan pentingnya program prioritas daerah, maka dalam pelaksanaannya perlu diprioritaskan dan mendapatkan dukungan penganggaran yang seimbang dengan target yang akan dicapai.

Program-program prioritas pembangunan daerah Kota Cimahi tersebut disusun dengan memperhatikan pula prioritas-prioritas dari kebijakan perencanaan pembangunan tingkat pemerintahan di atasnya yang tertuang di dalam dokumen perencanaannya masing-masing yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Republik Indonesia 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

### **6.2.1. Prioritas Nasional pada RPJMN 2020-2024**

RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yang terdiri dari :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;



3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Berangkat dari visi dan misi tersebut Presiden kemudian menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Berdasarkan 5 Arahan Presiden tersebut kemudian ditetapkan 7 Agenda Pembangunan yang menjadi Prioritas Nasional pada RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Tujuh Agenda Pembangunan atau Prioritas Nasional tersebut menjadi perhatian dalam penyusunan Prioritas Pembangunan Kota Cimahi dalam RPD 2023-2026 bersama-sama dengan Prioritas Provinsi Jawa Barat yang terkait dengan kepentingan pembangunan daerah Kota Cimahi.

### **6.2.2. Prioritas Provinsi Jawa Barat pada RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023**

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat merupakan janji-janji kampanye Gubernur dan strategis untuk dilaksanakan pada Tahun 2018–2023 dan merupakan dukungan terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat. Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 adalah: **“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”**. Visi tersebut kemudian berusaha diwujudkan dengan menetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu :

1. Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban;
2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif;
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah;
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera dan Adil melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan; dan
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jawa Barat tersebut maka telah ditetapkan 11 (sebelas) Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 yang terdiri dari :

1. Reformasi Sistem Kesehatan Daerah;
2. Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi;
3. Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan;
4. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial;
5. Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan;
6. Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Resiko Bencana;
7. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah;
8. Gerakan Membangun Desa;
9. Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara;
10. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
11. Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata.

11 (Sebelas) Prioritas Pembangunan Daerah Jawa Barat Tahun 2018-2023 ini kemudian juga menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 bersama-sama dengan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait.

### **6.2.3. Prioritas Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026**

Berasarkan kebijakan-kebijakan dan prioritas-prioritas yang telah dikemukakan sebelumnya pada RPJMN 2020-2024, RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023, RPJPD Kota Cimahi 2005-2025 serta permasalahan dan isu-isu strategis Kota Cimahi selama periode RPD 2023-2026, maka ditetapkanlah 9 (sembilan) Prioritas Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 sebagai berikut :

1. Pengembangan dan peningkatan aksesibilitas kawasan strategis kota;
2. Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar perumahan dan kawasan pemukiman;
3. Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi;
4. Peningkatan pelayanan perizinan dan kemudahan investasi;
5. Optimalisasi potensi pendapatan daerah;
6. Peningkatan kualitas kesehatan dan Pendidikan;
7. Peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan sosial;
8. Peningkatan kapasitas dalam penanggulangan bencana; dan

9. Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan publik.

Keterkaitan antara Prioritas Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 dengan Prioritas Nasional pada RPJMN 2020-2024 dan Prioritas Provinsi Jawa Barat pada RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada matriks sandingan berikut ini :

**Tabel 6.2**  
**Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Cimahi Tahun 2023-2026 dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Jawa Barat**

9 PRIORITAS KOTA CIMAHI RPD 2023-2026	7 PRIORITAS NASIONAL RPJMN 2020-2024	11 PRIORITAS PROVINSI JAWA BARAT RPJMD 2018-2023
1. Pengembangan dan peningkatan aksesibilitas kawasan strategis kota	2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	10. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 11. Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata.
2. Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar perumahan dan kawasan pemukiman	5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	10. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi	3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	2. Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi 3. Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan
4. Peningkatan pelayanan perizinan dan kemudahan investasi	1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi

<b>9 PRIORITAS KOTA CIMAHI RPD 2023-2026</b>	<b>7 PRIORITAS NASIONAL RPJMN 2020-2024</b>	<b>11 PRIORITAS PROVINSI JAWA BARAT RPJMD 2018-2023</b>
5. Optimalisasi potensi pendapatan daerah	1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi
6. Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan	3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Reformasi Sistem Kesehatan Daerah 5. Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan 9. Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara
7. Peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan sosial	3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	4. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial
8. Peningkatan kapasitas dalam penanggulangan bencana	6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	6. Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Resiko Bencana
9. Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan publik	7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 9. Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara

Sumber : Analisis Bappelitbangda Kota Cimahi, 2022

#### **6.2.4. Program Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Cimahi Tahun 2023-2026**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, setiap pemerintah daerah wajib menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di dalam pelaksanaan urusan pelayanan dasar yang telah ditetapkan. Penerapan SPM ini diterjemahkan ke dalam program-program yang telah ditentukan selama 4 (empat) tahun periode RPD 2023-2026 untuk setiap bidang dan jenis pelayanan dasar yang telah ditetapkan. Program-program terkait SPM tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 6.3.**  
**Program Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Kota Cimahi Tahun 2023-2026**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET				KONDISI AKHIR	PAGU INDIKATIF				PERANGKAT DAERAH
					2023	2024	2025	2026		2023	2024	2025	2026	
<b>BIDANG PENDIDIKAN</b>														
1 2	Pendidikan Dasar Pendidikan Kesetaraan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	83,26 persen	83,36 persen	83,46 persen	83,56 persen	83,66 persen	83,66 persen	107.927.871.600,00	110.737.990.320,00	114.019.926.870,00	110.192.108.785,00	Dinas Pendidikan
		Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan asesmen nasional	1,88 nilai	2,08 nilai	2,28 nilai	2,38 nilai	2,48 nilai	2,48 nilai	2,48 nilai					
		Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	1,87 nilai	2,07 nilai	2,27 nilai	2,37 nilai	2,47 nilai	2,47 nilai	2,47 nilai					
		Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan asesmen nasional	1,88 nilai	2,08 nilai	2,28 nilai	2,38 nilai	2,48 nilai	2,48 nilai	2,48 nilai					
		Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional	1,75 nilai	1,95 nilai	2,05 nilai	2,25 nilai	2,35 nilai	2,35 nilai	2,35 nilai					
3	Pendidikan Anak Usia Dini		Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	67,64 persen	67,74 persen	67,84 persen	67,94 persen	68,04 persen	68,04 persen					
			Pertumbuhan Proporsi guru PAUD formal dengan kualifikasi S1/DIV	72,51 persen	73 persen	73,5 persen	74 persen	74,5 persen	74,5 persen					

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET				KONDISI AKHIR	PAGU INDIKATIF				PERANGKAT DAERAH
					2023	2024	2025	2026		2023	2024	2025	2026	
			Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	85,48 persen	86 persen	86,5 persen	87 persen	87,5 persen	87,5 persen					
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Pengawas dan Penilik PAUD	1,03 persen	3,20 persen	3,20 persen	3,20 persen	3,20 persen	3,20 persen	50.000.000,00	75.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
<b>BIDANG KESEHATAN</b>														
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	98,37 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	39.237.167.775,00	43.223.141.100,00	43.609.299.100,00	43.645.583.100,00	Dinas Kesehatan
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin													
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir													
4	Pelayanan kesehatan balita													
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar													
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif													
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut													
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi													
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus													
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat													
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis													
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)													
<b>BIDANG PEKERJAAN UMUM</b>														
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari hari	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum	69,82 persen	68,59 persen	69,20 persen	71,02 persen	73,58 persen	73,58 persen	18.365.990.640,00	9.039.989.566,00	14.348.445.231,00	8.992.189.878,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET				KONDISI AKHIR	PAGU INDIKATIF				PERANGKAT DAERAH
					2023	2024	2025	2026		2023	2024	2025	2026	
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	80,55 persen	81,28 persen	81,81 persen	82,34 persen	83,02 persen	83,02 persen	15.684.739.250,00	11.982.482.764,00	13.630.260.899,00	12.895.000.000,00	
<b>BIDANG PERUMAHAN RAKYAT</b>														
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Tingkat Hunian	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	4.347.896.960,00	4.347.896.960,00	4.347.896.960,00	4.347.896.960,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota		Persentase Rumah Korban Bencana Yang dibangun/ Direhabilitasi	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen					
<b>BIDANG TRANTIBUMLINMAS</b>														
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	2.616.486.200,00	6.623.079.341,00	2.649.079.341,00	2.764.079.341,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
			Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada (SPM)	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen					
2	Pelayanan informasi rawan bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	2.980.000.000,00	3.030.000.000,00	2.980.000.000,00	3.031.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Persentase Pelayanan informasi kebencanaan di kawasan rawan bencana	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen					



NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET				KONDISI AKHIR	PAGU INDIKATIF				PERANGKAT DAERAH
					2023	2024	2025	2026		2023	2024	2025	2026	
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen						
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		Persentase penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen						
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	1.860.188.200,00	1.866.188.200,00	1.890.188.200,00	1.905.188.200,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
			Persentase korban yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen						
<b>BIDANG SOSIAL</b>														
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	1.528.411.900,00	1.528.411.900,00	1.591.200.000,00	1.883.342.100,00	Dinas Sosial	
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	0 persen					
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti		Persentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen					

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET				KONDISI AKHIR	PAGU INDIKATIF				PERANGKAT DAERAH
					2023	2024	2025	2026		2023	2024	2025	2026	
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti		Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi hak dasarnya.	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen						
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota													

#### **6.2.5. Program Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026**

Program pembangunan daerah Kota Cimahi selama 4 (empat) tahun periode RPD 2023-2026 merupakan program teknis yang akan dilaksanakan sebagai pengejawantahan dari visi, misi, tujuan, dan sasaran serta Prioritas pembangunan daerah Kota Cimahi tahun 2023-2026 yang telah dirumuskan sebelumnya, dan telah memperhatikan pula prioritas pembangunan nasional maupun Provinsi Jawa Barat sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya. Program-program tersebut secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 6.3.**  
**Program Prioritas Daerah yang disertai Pagu Indikatif**  
**Kota Cimahi Tahun 2023-2026**

VISI/ MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DAN INDIKATOR KINERJANYA	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD	PAGU INDIKATIF				TOTAL JUMLAH PAGU INDIKATIF RPD 2023-2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	2024	2025	2026		Pagu 2023	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026		
<b>[ VISI ] CIMAHI KOTA CERDAS</b>												
[ MISI 1]Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul												
<b>[ TUJUAN ] Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia</b>												
Indeks Kesehatan	83,40 indeks	83,42 indeks	83,43 indeks	83,45 indeks	83,46 indeks	83,46 indeks						
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	77,21 indeks	77,25 indeks	77,30 indeks	77,35 indeks	77,40 indeks	77,40 indeks						
Indeks Pengetahuan	75,29 indeks	75,29 indeks	75,29 indeks	75,36 indeks	75,42 indeks	75,42 indeks						
[ SASARAN ] Meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan kualitas pendidikan												
Harapan lama sekolah	13,81 tahun	13,82 tahun	13,83 tahun	13,84 tahun	13,85 tahun	13,85 tahun						
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	0 indeks	1 indeks	1,5 indeks	1,5 indeks	2 indeks	2 indeks						
Rata-rata Kemampuan Literasi dan Numerasi Pendidikan Dasar (SD dan SMP) Berdasarkan asesmen Nasional	1,85 nilai	2,05 nilai	2,06 nilai	2,08 nilai	2,10 nilai	2,10 nilai						
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	11,08 tahun	11,09 tahun	11,10 tahun	11,11 tahun	11,12 tahun	11,12 tahun						
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>												
Persentase Peningkatan pemustaka aktif	1,81 persen	4 persen	5 persen	5 persen	10 persen	10 persen	940.000.000	990.000.000	765.000.000	1.140.000.000	3.835.000.000	Dinas Arsip Daerah
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>												
Rasio Guru terhadap Murid Jenjang PAUD	1 : 7 rasio	1 : 7 rasio	1 : 7 rasio	1 : 7 rasio	1 : 7 rasio	1 : 7 rasio	50.000.000	75.000.000	100.000.000	100.000.000	325.000.000	Dinas Pendidikan
Rasio Guru terhadap Murid Jenjang SD	1 : 27 rasio	1 : 27 rasio	1 : 27 rasio	1 : 27 rasio	1 : 27 rasio	1 : 27 rasio						
Rasio Guru terhadap Murid Jenjang SMP	1 : 29 rasio	1 : 29 rasio	1 : 29 rasio	1 : 29 rasio	1 : 29 rasio	1 : 29 rasio						
Rasio Guru terhadap Warga Belajar Jenjang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 : 7 rasio	1 : 7 rasio	1 : 7 rasio	1 : 7 rasio	1 : 7 rasio	1 : 7 rasio						
Rasio pengawas dan penilik PAUD	1,03 persen	3,20 persen	3,20 persen	3,20 persen	3,20 persen	3,20 persen						
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>												
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan TK/RA	67,64 persen	67,74 persen	67,84 persen	67,94 persen	68,04 persen	68,04 persen	107.927.871.600	110.737.990.320	114.019.926.870	110.192.108.785	442.877.897.575	Dinas Pendidikan

VISI/ MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DAN INDIKATOR KINERJANYA	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD	PAGU INDIKATIF				TOTAL JUMLAH PAGU INDIKATIF RPD 2023-2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	2024	2025	2026		Pagu 2023	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026		
Angka Kesiapan sekolah	3,39 persen	4 persen	4,5 persen	5 persen	5,5 persen	5,5 persen						
Angka Partisipasi Murni (5 - 6 tahun)	33,87 persen	34 persen	35 persen	36 persen	37 persen	37 persen						
Angka Partisipasi Kasar (APK) SDSD/MI/PaketA/SDLB	95,57 persen	95,65 persen	95,75 persen	95,85 persen	95,95 persen	95,95 persen						
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B/SMPLB	91,27 persen	91,37 persen	91,47 persen	91,57 persen	91,67 persen	91,67 persen						
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/PaketA/SDLB	90,83 persen	90,93 persen	91,03 persen	91,13 persen	91,23 persen	91,23 persen						
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B/SMPLB	83,03 persen	83,13 persen	83,23 persen	83,33 persen	83,43 persen	83,43 persen						
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/PaketA/SDLB	93,25 persen	93,35 persen	93,45 persen	93,55 persen	93,65 persen	93,65 persen						
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SM/MTs/Paket B/SMPLBP	87,53 persen	87,63 persen	87,73 persen	87,83 persen	87,93 persen	87,93 persen						
Angka Putus Sekolah SD	0,08 persen	0,07 persen	0,06 persen	0,05 persen	0,04 persen	0,04 persen						
Angka Putus Sekolah SMP	0,05 persen	0,05 persen	0,04 persen	0,03 persen	0,02 persen	0,02 persen						
Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	67,64 persen	67,74 persen	67,84 persen	67,94 persen	68,04 persen	68,04 persen						
Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	83,26 persen	83,36 persen	83,46 persen	83,56 persen	83,66 persen	83,66 persen						
Proporsi PTK bersertifikat dari PPG	43,69 persen	44 persen	45 persen	46 persen	47 persen	47 persen						
Pertumbuhan Proporsi guru PAUD formal dengan kualifikasi S1/DIV	72,51 persen	73 persen	73,5 persen	74 persen	74,5 persen	74,5 persen						
Proporsi pendidik berijazah minimal S1/DIV	39,95 persen	40 persen	41 persen	42 persen	43 persen	44 persen						
Proporsi GTK bersertifikat (Jenjang SD)	49,85 persen	50 persen	51 persen	52 persen	53 persen	53 persen						
Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Jenjang SD dengan Kualifikasi Minimal DIV/S1	93,85 persen	93,89 persen	93,94 persen	93,99 persen	94,04 persen	94,04 persen						
Proporsi GTK bersertifikat (Jenjang SMP)	71,98 persen	72,32 persen	72,80 persen	73,32 persen	73,63 persen	73,63 persen						
Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMP dengan Kualifikasi Minimal DIV/S1	95,86 persen	95,86 persen	95,86 persen	95,86 persen	95,86 persen	95,86 persen						
Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	85,48 persen	86 persen	86,5 persen	87 persen	87,5 persen	87,5 persen						

VISI/ MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DAN INDIKATOR KINERJANYA	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD	PAGU INDIKATIF				TOTAL JUMLAH PAGU INDIKATIF RPD 2023-2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	2024	2025	2026		Pagu 2023	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026		
Persentase PKBM yang Terakreditasi	30,40 persen	34,78 persen	34,78 persen	39,13 persen	39,13 persen	39,13 persen						
Persentase SD yang Terakreditasi A	47 persen	50 persen	55 persen	60 persen	65 persen	65 persen						
Persentase SMP yang Terakreditasi A	64,50 persen	65 persen	67,50 persen	70 persen	70 persen	70 persen						
Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan asesmen nasional	1,88 nilai	2,08 nilai	2,28 nilai	2,38 nilai	2,48 nilai	2,48 nilai						
Rata-rata kemampuan numerasiSD berdasarkan asesmen nasional	1,87 nilai	2,07 nilai	2,27 nilai	2,37 nilai	2,47 nilai	2,47 nilai						
Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan asesmen nasional	1,88 nilai	2,08 nilai	2,28 nilai	2,38 nilai	2,48 nilai	2,48 nilai						
Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional	1,75 nilai	1,95 nilai	2,05 nilai	2,25 nilai	2,35 nilai	2,35 nilai						
Standar kompetensi pendidikan PAUD	54,11 persen	55 persen	55,5 persen	56 persen	56,5 persen	56,5 persen						
Proporsi kepala satuan PAUD berijazah minimal S1/DIV	68,75 persen	69 persen	70 persen	71 persen	72 persen	72 persen						
Proporsi PTK dalam Diklat Teknis PAUD	31 persen	33 persen	35 persen	37 persen	39 persen	39 persen						
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM												
Persentase Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang diterapkan sesuai standar	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	92.924.000	100.000.000	110.000.000	120.000.000	422.924.000	Dinas Pendidikan
Persentase Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang diterapkan sesuai standar	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen						
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN												
Persentase lembaga pendidikan yang mendapatkan izin	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	20.000.000	30.000.000	40.000.000	50.000.000	140.000.000	Dinas Pendidikan
Persentase lembaga pendidikan yang terbina dan terkendali	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen						
[ SASARAN ] Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat												
Akreditasi Rumah Sakit	Utama Tingkat	Paripurna Tingkat	Paripurna Tingkat	Paripurna Tingkat	Paripurna Tingkat	Paripurna Tingkat						
Indeks Keluarga sehat	0,28 indeks	0,28 indeks	0,32 indeks	0,36 indeks	0,40 indeks	0,40 indeks						

VISI/ MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DAN INDIKATOR KINERJANYA	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD	PAGU INDIKATIF				TOTAL JUMLAH PAGU INDIKATIF RPD 2023-2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	2024	2025	2026		Pagu 2023	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026		
[ PROGRAM ] PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Cibabat	77,83 indeks	80,00 indeks	80,25 indeks	80,50 indeks	81,00 indeks	81,00 indeks	145.000.000.000	145.000.000.000	145.000.000.000	145.000.000.000	580.000.000.000	RSUD CIBABAT
Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	196,08 angka	115,1 angka	115,0 angka	114,9 angka	114,8 angka	114,8 angka	39.237.167.775	43.223.141.100	43.609.299.100	43.645.583.100	169.715.191.075	Dinas Kesehatan
Rasio Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	7,06 angka	6,3 angka	6,2 angka	6,1 angka	6,0 angka	6,0 angka						
Cakupan Imunisasi Booster (12-23 bulan)	N/A persen	66,1 persen	70,8 persen	75,5 persen	80,2 persen	80,2 persen						
Cakupan Imunisasi Dasar lengkap (IDL)	91,89 persen	92,5 persen	93,5 persen	94,0 persen	95,0 persen	95,0 persen						
Cakupan Jamaah Haji yang mendapat pemantauan kesehatan haji	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen						
Cakupan Puskesmas dengan capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) di atas 0,28	N/A persen	8 persen	9 persen	10 persen	11 persen	11 persen						
Cakupan Rumah Tangga yang ber- Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	56 persen	56 persen	58 persen	59 persen	60 persen	60 persen						
Cakupan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Pengembangan di puskesmas	13 angka	13 angka	13 angka	13 angka	13 angka	13 angka						
Capaian Universal Health Coverage (UHC)	98,64 persen	98,64 persen	98,65 persen	98,70 persen	99,00 persen	99,00 persen						
Case Fatality Rate (CFR) Demam Berdarah Dengue (DBD)	3,6 angka	1 angka	1 angka	1 angka	1 angka	1 angka						
Insidensi HIV per 1000 Penduduk	N/A kasus	0,07 kasus	0,06 kasus	0,05 kasus	0,04 kasus	0,04 kasus						
Insidensi TB per 100.000 Penduduk	N/A kasus	302 kasus	302 kasus	296 kasus	294 kasus	294 kasus						
Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen						
Persentase Kelurahan Open Defecation Free (ODF)	26,6 persen	80 persen	86,6 persen	93,3 persen	100 persen	100 persen						
Persentase pelayanan puskesmas terhadap penyakit yang diduga akibat kerja	35 persen	35 persen	40 persen	45 persen	50 persen	50 persen						
Persentase peserta pemeriksaan kebugaran yang mendapat konseling PNS	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen						
Persentase puskesmas terakreditasi minimal Utama	53,85 persen	61,54 persen	61,54 persen	61,54 persen	69,23 persen	69,23 persen						
Persentasi Pengadaan Obat sesuai Formularium Nasional (FORNAS)	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen						
Prevalensi Stunting pada Balita	10,18 persen	10,10 persen	10,00 persen	9,90 persen	9,80 persen	9,80 persen						

VISI/ MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DAN INDIKATOR KINERJANYA	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD	PAGU INDIKATIF				TOTAL JUMLAH PAGU INDIKATIF RPD 2023-2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	2024	2025	2026		Pagu 2023	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026		
Rata-rata Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	98,37 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen						
[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN												
Cakupan strata RW Siaga aktif minimal Purnama	68,91 persen	73,40 persen	78,20 persen	83,10 persen	87,80 persen	87,80 persen	57.178.000	57.178.000	57.178.000	57.178.000	228.712.000	Dinas Kesehatan
[ PROGRAM ] PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN												
Persentase puskesmas dengan jenis tenaga sesuai standar	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	901.132.400	901.132.400	666.327.100	666.327.100	3.134.919.000	Dinas Kesehatan
[ PROGRAM ] PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN												
Persentase sarana kefarmasian dan penyediaan makanan dan minuman sesuai standar	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	101.179.000	101.179.000	101.179.000	101.179.000	404.716.000	Dinas Kesehatan
Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang mendapat pengawasan eksternal	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen						
[ SASARAN ] Meningkatkan pengarusutamaan gender												
Persentase paartisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan	37,19 persen	37,50 persen	38 persen	38,50 persen	39 persen	39 persen						
Persentase partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi	30,65 persen	31,65 persen	32,65 persen	33,65 persen	34,65 persen	34,65 persen						
Persentase partisipasi perempuan dalam kegiatan politik	26,67 persen	26,67 persen	26,67 persen	26,67 persen	26,67 persen	26,67 persen						
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN												
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	66,82 persen	69 persen	69 persen	69 persen	69 persen	69 persen	899.121.000	899.121.000	1.199.121.000	899.121.000	3.896.484.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
[ PROGRAM ] PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA												
Cakupan Keluarga yang mendapat program peningkatan kualitas keluarga	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	443.600.000	443.600.000	543.600.000	443.600.000	1.874.400.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan



VISI/ MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DAN INDIKATOR KINERJANYA	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD	PAGU INDIKATIF				TOTAL JUMLAH PAGU INDIKATIF RPD 2023-2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	2024	2025	2026		Pagu 2023	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026		
												Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
[ PROGRAM ] PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN												
Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapat penanganan terpadu	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	301.700.000	301.700.000	825.550.000	301.700.000	1.730.650.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
[ SASARAN ] Meningkatnya Perlindungan Terhadap Anak												
Persentase Capaian Kota Layak Anak	50 persen	51 persen	52 persen	53 persen	54 persen	54 persen						
[ PROGRAM ] PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)												
Persentase anak yang terlayani kebutuhan dasar	85 persen	87 persen	89 persen	91 persen	93 persen	93 persen	307.686.700	307.686.700	407.686.700	307.686.700	1.330.746.800	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK												
Persentase perangkat daerah yang memiliki data terpilah gender	70 persen	70 persen	75 persen	80 persen	85 persen	85 persen	75.000.000	75.000.000	100.000.000	75.000.000	325.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
[ PROGRAM ] PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK												
Persentase anak korban kekerasan yang mendapat penanganan terpadu	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	125.875.800	125.875.800	150.875.800	125.875.800	528.503.200	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
[ SASARAN ] Pengendalian penduduk yang sesuai dengan daya tampung kota												
Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	64,31 persen	65 persen	66 persen	67 persen	68 persen	68 persen						
[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)												

VISI/ MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DAN INDIKATOR KINERJANYA	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD	PAGU INDIKATIF				TOTAL JUMLAH PAGU INDIKATIF RPD 2023-2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	2024	2025	2026		Pagu 2023	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026		
persentase kepesertaan keluarga dalam BKB	46,49 persen	47 persen	47,5 persen	48 persen	48,5 persen	0 persen	460.000.000	460.000.000	560.000.000	460.000.000	1.940.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKL	29,72 persen	29,72 persen	29,72 persen	30 persen	30 persen	30 persen						
Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKR	26,95 persen	26,95 persen	27,5 persen	28 persen	28,5 persen	29 persen						
Cakupan kepesertaan keluarga dalam PIK R	9,12 persen	9,12 persen	9,16 persen	9,2 persen	9,24 persen	9,28 persen						
Cakupan kepesertaan keluarga dalam UPPKA	0,87 persen	0,87 persen	0,9 persen	0,93 persen	0,96 persen	1 persen						
Cakupan PUS (Pasangan Usia Subur) < 20 tahun	0,36 persen	0,36 persen	0,35 persen	0,34 persen	0,33 persen	0,32 persen						
[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)												
Rasio Akseptor KB MKJP (Memakai Kontrasepsi Jangka Panjang)	34,92 persen	34,92 persen	35,92 persen	36,92 persen	37,92 persen	38,92 persen	1.752.064.000	1.752.064.000	1.952.064.000	1.752.064.000	7.208.256.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK												
Rata-rata Jumlah anak/keluarga	2,3 jiwa	2,3 jiwa	2,3 jiwa	2,3 jiwa	2,3 jiwa	0 jiwa	596.354.200	596.354.200	696.354.200	596.354.200	2.485.416.800	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Unmeet need (Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi)	13 persen	13 persen	12,5 persen	12 persen	11,5 persen	11 persen						
[ TUJUAN ] Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan												
Tingkat Partisipasi Masyarakat	N/A persen	50 persen	55 persen	60 persen	65 persen	65 persen						
[ SASARAN ] Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan												
Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	N/A persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen						
[ PROGRAM ] PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA												
Persentase kelurahan yang terbina	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	188.788.000	188.788.000	288.788.000	188.788.000	855.152.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

VISI/ MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DAN INDIKATOR KINERJANYA	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD	PAGU INDIKATIF				TOTAL JUMLAH PAGU INDIKATIF RPD 2023-2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	2024	2025	2026		Pagu 2023	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026		
(PROGRAM) PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT												
Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Diberdayakan Aktif	N/A persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	2.008.595.000	2.008.595.000	2.108.595.000	2.008.595.000	8.134.380.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
[ PROGRAM ] PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH												
Persentase unsur masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbang kota	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	450.000.000	600.000.000	575.000.000	410.000.000	2.035.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
[ SASARAN ] Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan												
Persentase Partisipasi Pemuda terhadap Pembangunan	11,2 persen	11,2 persen	11,3 persen	11,4 persen	11,5 persen	11,5 persen						
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN												
Persentase organisasi pemuda yg aktif	70 persen	71 persen	72 persen	73 persen	74 persen	74 persen	1.200.000.000	2.000.000.000	2.200.000.000	2.500.000.000	7.900.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN												
Persentase anggota pramuka yang dibina (anggota kwarcab)	0 persen	13 persen	14 persen	15 persen	16 persen	16 persen	400.000.000	400.000.000	300.000.000	400.000.000	1.500.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
[ SASARAN ] Meningkatnya Pemberdayaan Pelaku kebudayaan												
Persentase Pelaku kebudayaan yang diberdayakan	N/A persen	50 persen	60 persen	85 persen	100 persen	100 persen						
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN												
Persentase kebudayaan yang dikembangkan	0 persen	25 persen	50 persen	75 persen	100 persen	100 persen	1.550.000.000	1.800.000.000	2.015.000.000	1.890.000.000	7.255.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

VISI/ MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DAN INDIKATOR KINERJANYA	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD	PAGU INDIKATIF				TOTAL JUMLAH PAGU INDIKATIF RPD 2023-2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	2024	2025	2026		Pagu 2023	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026		
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL												
Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	N/A persen	25 persen	50 persen	75 persen	100 persen	100 persen	150.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	900.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH												
Persentase SDM Sejarah Lokasi yang dibina	0 persen	0 persen	25 persen	50 persen	75 persen	75 persen	-	50.000.000	50.000.000	50.000.000	150.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
[ PROGRAM ] PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA												
Persentase Cagar budaya yang dilestarikan	0 persen	36 persen	56 persen	76 persen	100 persen	100 persen	400.000.000	595.000.000	734.901.991	690.000.000	2.419.901.991	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
[ SASARAN ] Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga												
Prosentasi masyarakat yang aktif berolahraga	45,5 persen	46 persen	46,2 persen	46,5 persen	46,7 persen	46,7 persen						
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN												
Persentase sumber daya olahraga yang terbina	0 persen	53 persen	55 persen	57 persen	59 persen	59 persen	15.415.676.235	12.552.360.703	8.551.930.776	10.980.168.514	47.500.136.228	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Persentase sarana dan prasarana olahraga yang baik yang dimiliki pemerintah daerah Kota Cimahi	0 persen	50 persen	75 persen	75 persen	75 persen	75 persen					-	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
[ MISI 2] Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik												
<b>[ TUJUAN ] Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan</b>												
Indeks Reformasi Birokrasi	59,22 (CC) indeks	60,73 (B) indeks	60,75 (B) indeks	60,78 (B) indeks	60,80 (B) indeks	60,80 (B) indeks						
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						
[ SASARAN ] Meningkatnya keswadayaan Masyarakat												

VISI/ MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DAN INDIKATOR KINERJANYA	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD	PAGU INDIKATIF				TOTAL JUMLAH PAGU INDIKATIF RPD 2023-2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	2024	2025	2026		Pagu 2023	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026		
Persentase Jumlah partisipasi swadaya masyarakat di Kecamatan Cimahi Tengah	85 persen	85 persen	85 persen	85 persen	85 persen	85 persen						
Persentase Jumlah partisipasi swadaya masyarakat di Kecamatan Cimahi Utara	85 persen	85 persen	85 persen	85 persen	85 persen	85 persen						
Persentase Jumlah partisipasi swadaya masyarakat di Kecamatan Cimahi Selatan	85 persen	85 persen	85 persen	85 persen	85 persen	85 persen						
[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												
Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilaksanakan di Kecamatan Cimahi Selatan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	3.129.744.041	3.286.231.285	3.450.542.849	3.623.069.992	13.489.588.167	Kecamatan Cimahi Selatan
Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilaksanakan di Kecamatan Cimahi Tengah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	4.573.693.000	4.802.377.755	5.042.496.642	5.294.621.474	19.713.188.871	Kecamatan Cimahi Tengah
Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilaksanakan di Kecamatan Cimahi Utara	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	2.538.763.600	2.751.174.800	2.618.533.100	2.509.533.100	10.418.004.600	Kecamatan Cimahi Utara
Persentase RW yang terfasilitasi dalam Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Cimahi Selatan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	9.778.250.000	9.522.162.500	7.261.038.065	5.642.847.118	32.204.297.683	Kecamatan Cimahi Selatan
Persentase RW yang terfasilitasi dalam Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Cimahi Tengah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	9.753.060.300	9.470.485.548	6.929.621.058	5.117.816.661	31.270.983.567	Kecamatan Cimahi Tengah
Persentase RW yang terfasilitasi dalam Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Cimahi Utara	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	7.448.572.450	7.448.572.450	7.563.134.950	7.563.041.950	30.023.321.800	Kecamatan Cimahi Utara
Persentase stakeholder yang terlibat dalam Perencanaan Partisipatif di Kecamatan Cimahi Selatan	85 persen	85 persen	85 persen	85 persen	85 persen	85 persen	399.640.320	419.622.336	440.603.453	462.633.625	1.722.499.734	Kecamatan Cimahi Selatan
Persentase stakeholder yang terlibat dalam Perencanaan Partisipatif di Kecamatan Cimahi Tengah	85 persen	85 persen	85 persen	85 persen	85 persen	85 persen	536.785.700	563.624.985	591.806.234	621.396.546	2.313.613.465	Kecamatan Cimahi Tengah
Persentase stakeholder yang terlibat dalam Perencanaan Partisipatif di Kecamatan Cimahi Utara	85 persen	85 persen	85 persen	85 persen	85 persen	85 persen	239.625.650	252.500.000	239.625.650	239.625.650	971.376.950	Kecamatan Cimahi Utara
[ SASARAN ] Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat												

VISI/ MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DAN INDIKATOR KINERJANYA	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD	PAGU INDIKATIF				TOTAL JUMLAH PAGU INDIKATIF RPD 2023-2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	2024	2025	2026		Pagu 2023	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026		
Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen						
Persentase Pembinaan Politik Dalam Negeri	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen						
Persentase Organisasi Kemasyarakatan/Kelompok Masyarakat yang Terbina/Terfasilitasi	N/A persen	45 persen	50 persen	55 persen	60 persen	60 persen						
Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Cimahi Selatan	75 persen	75 persen	75 persen	75 persen	75 persen	75 persen						
Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Cimahi Tengah	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen						
Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Cimahi Utara	75 persen	75 persen	75 persen	75 persen	75 persen	75 persen						
Penurunan Angka Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	850 angka	800 angka	750 angka	700 angka	650 angka	650 angka						
Persentase Potensi Konflik terkait Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Trantibmas yang dapat dicegah dan ditangani	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen						
Waktu respon tanggap kebakaran	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit						
[ PROGRAM ] PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM												
Persentase Kegiatan Monitoring Penanganan Trantib yang dilaksanakan di Cimahi selatan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	5.973.742.900	6.272.430.045	6.586.051.547	6.915.354.125	25.747.578.617	Kecamatan Cimahi Selatan
Persentase Kegiatan Monitoring Penanganan trantib di Kecamatan Cimahi Tengah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	5.519.979.900	5.795.978.895	6.085.777.840	6.390.066.732	23.791.803.367	Kecamatan Cimahi Tengah
Persentase Kegiatan Monitoring Penanganan Trantib yang dilaksanakan di Cimahi Utara	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	4.771.139.250	4.890.500.000	4.771.139.250	4.771.139.250	19.203.917.750	Kecamatan Cimahi Utara
[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN												

VISI/ MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DAN INDIKATOR KINERJANYA	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD	PAGU INDIKATIF				TOTAL JUMLAH PAGU INDIKATIF RPD 2023-2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	2024	2025	2026		Pagu 2023	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026		
Persentase pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan	- persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	510.000.000	456.853.750	535.000.000	530.000.000	2.031.853.750	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA												
Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	N/A persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	672.704.500	682.704.500	672.704.500	685.000.000	2.713.113.500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
[ PROGRAM ] PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN												
Tingkat kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	1.860.188.200	1.866.188.200	1.890.188.200	1.905.188.200	7.521.752.800	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Persentase korban yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen						
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN												
Persentase ketahanan ideologi dan karakter kebangsaan	N/A persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	875.938.550	884.549.450	875.938.550	910.746.581	3.547.173.131	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
[ PROGRAM ] PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM												
Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	2.616.486.200	6.623.079.341	2.649.079.341	2.764.079.341	14.652.724.223	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara (SPM)	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen						
[ PROGRAM ] PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL												
Persentase wilayah terpantau	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	2.160.000.000	2.095.000.000	2.210.000.000	2.255.000.000	8.720.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
[ PROGRAM ] PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI												

VISI/ MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DAN INDIKATOR KINERJANYA	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD	PAGU INDIKATIF				TOTAL JUMLAH PAGU INDIKATIF RPD 2023-2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	2024	2025	2026		Pagu 2023	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026		
POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK												
Persentase kaderasi partai politik	N/A persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	2.180.000.000	58.550.000.000	2.281.247.389	2.230.000.000	65.241.247.389	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu dan Pemilukada	N/A persen	-	77,5 persen	-	-	-						
[ PROGRAM ] PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM												
Persentase Jumlah RW yang terfasilitasi dalam PEMILU di Kecamatan Cimahi Selatan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	-	442.200.800	5.000.000	-	447.200.800	Kecamatan Cimahi Selatan
Persentase Jumlah RW yang terfasilitasi dalam PEMILU di Kecamatan Cimahi Tengah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	-	442.275.412	-	-	442.275.412	Kecamatan Cimahi Tengah
Persentase Jumlah RW yang terfasilitasi dalam PEMILU di Kecamatan Cimahi Utara	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	-	131.700.000	-	-	131.700.000	Kecamatan Cimahi Utara
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan Kepala Daerah di Kecamatan Cimahi Selatan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	379.071.620	398.025.201	417.926.461	438.822.784	1.633.846.066	Kecamatan Cimahi Selatan
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan Kepala Daerah di Kecamatan Cimahi Tengah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	656.448.800	689.271.240	723.734.802	759.921.542	2.829.376.384	Kecamatan Cimahi Tengah
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan Kepala Daerah di Kecamatan Cimahi Utara	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	251.494.400	264.775.000	251.494.400	251.494.400	1.019.258.200	Kecamatan Cimahi Utara
[ SASARAN ] Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik												
Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	N/A Indeks	351 Indeks	370 Indeks	390 Indeks	400 Indeks	400 Indeks						
Indeks Keterbukaan Informasi Publik	74,91 persen	80 persen	84 persen	88 persen	92 persen	92 persen						
Indeks Pembangunan Statistik	2 Level/Tingkat Kematangan	2 Level/Tingkat Kematangan	3 Level/Tingkat Kematangan	3 Level/Tingkat Kematangan	4 Level/Tingkat Kematangan	4 Level/Tingkat Kematangan						
Indeks Profesionalisme ASN	50,00 Indeks	50,00 Indeks	50,50 Indeks	51,00 Indeks	51,50 Indeks	51,50 Indeks						
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,75 Indeks	3,00 Indeks	3,20 Indeks	3,40 Indeks	3,60 Indeks	3,60 Indeks						



VISI/ MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DAN INDIKATOR KINERJANYA	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD	PAGU INDIKATIF				TOTAL JUMLAH PAGU INDIKATIF RPD 2023-2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	2024	2025	2026		Pagu 2023	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026		
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	N/A Nilai	35 Nilai	35 Nilai	40 Nilai	45 Nilai	45 Nilai						
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah	N/A Nilai	30 Nilai	30 Nilai	35 Nilai	35 Nilai	35 Nilai						
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Bakesbangpol	N/A Nilai	50 Nilai	50,50 Nilai	51 Nilai	60 Nilai	60 Nilai						
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi BAPPELITBANGDA	63,97 Nilai	64,50 Nilai	65,00 Nilai	65,50 Nilai	66,00 Nilai	66,00 Nilai						
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi BKPSDMD	N/A Nilai	60,00 Nilai	60,50 Nilai	61,00 Nilai	61,50 Nilai	62,00 Nilai						
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi BPKAD	N/A Nilai	60,0 Nilai	60,5 Nilai	61,0 Nilai	61,5 Nilai	61,5 Nilai						
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Arsip Daerah	50 Nilai	51 Nilai	51,5 Nilai	51,7 Nilai	52 Nilai	52 Nilai						
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	N/A Nilai	50 Nilai	50,4 Nilai	50,5 Nilai	50,6 Nilai	50,6 Nilai						
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan	24,88 Nilai	24,90 Nilai	24,93 Nilai	24,95 Nilai	24,98 Nilai	24,98 Nilai						
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	N/A Nilai	50 Nilai	50,5 Nilai	51 Nilai	51,5 Nilai	51,5 Nilai						
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pangan dan Pertanian	N/A Nilai	30 Nilai	30 Nilai	35 Nilai	40 Nilai	40 Nilai						
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	N/A Nilai	30 Nilai	35 Nilai	35 Nilai	40 Nilai	40 Nilai						
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pendidikan	N/A Nilai	35 Nilai	35 Nilai	35 Nilai	35 Nilai	35 Nilai						
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan	N/A Nilai	50,1 Nilai	50,50 Nilai	51 Nilai	51,50 Nilai	51,50 Nilai						
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Sosial	N/A Nilai	35 Nilai	35 Nilai	40 Nilai	40 Nilai	40 Nilai						
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Disdagkoperin	N/A Nilai	30 Nilai	30 Nilai	35 Nilai	35 Nilai	35 Nilai						
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Disdukcapil	28,88 Nilai	38 Nilai	42 Nilai	47 Nilai	51 Nilai	51 Nilai						
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Diskominfo	N/A Nilai	55 Nilai	55,5 Nilai	56 Nilai	56,5 Nilai	56,5 Nilai						
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Disnaker	N/A Nilai	60 Nilai	60 Nilai	60 Nilai	60 Nilai	60 Nilai						

VISI/ MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DAN INDIKATOR KINERJANYA	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD	PAGU INDIKATIF				TOTAL JUMLAH PAGU INDIKATIF RPD 2023-2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	2024	2025	2026		Pagu 2023	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026		
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi DPKP	N/A Nilai	55 Nilai	56 Nilai	57 Nilai	58 Nilai	58 Nilai						
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi DPMPTSP	35,67 Nilai	35,7 Nilai	35,8 Nilai	35,9 Nilai	36 Nilai	36 Nilai						
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi DPUPR	N/A Nilai	55 Nilai	56 Nilai	57 Nilai	58 Nilai	58 Nilai						
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Inspektorat	N/A Nilai	63 Nilai	64 Nilai	65 Nilai	66 Nilai	66 Nilai						
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kecamatan Cimahi Selatan	N/A Nilai	60,00 Nilai	60,50 Nilai	61,00 Nilai	61,50 Nilai	62,00 Nilai						
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kecamatan Cimahi Tengah	N/A Nilai	60,00 Nilai	60,50 Nilai	61,00 Nilai	61,50 Nilai	62,00 Nilai						
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kecamatan Cimahi Utara	N/A Nilai	60,00 Nilai	60,50 Nilai	61,00 Nilai	61,50 Nilai	62,00 Nilai						
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi RSUD Cibabat	25,5 Nilai	25,55 Nilai	25,57 Nilai	25,60 Nilai	25,62 Nilai	25,62 Nilai						
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi SATPOLPP-DAMKAR	N/A Nilai	60,73 Nilai	60,75 Nilai	60,78 Nilai	60,80 Nilai	60,80 Nilai						
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Sekertariat DPRD	N/A Nilai	60,73 Nilai	60,75 Nilai	60,78 Nilai	60,80 Nilai	60,80 Nilai						
Nilai IKM Administrasi Kependudukan	79,01 Nilai	81 Nilai	82 Nilai	82,5 Nilai	83 Nilai	83 Nilai						
Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	N/A persen	75 persen	75 persen	75 persen	75 persen	75 persen						
Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el, KIA, Akte kelahiran 0-18 tahun)	94,88 persen	96,25 persen	96,88 persen	97,50 persen	98,13 persen	98,13 persen						
Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Data Kependudukan berupa hak akses data dan atau tabulasi data	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen						
Persentase Penerbitan Dokumen Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu Cimahi Selatan	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen						
Persentase Penerbitan Dokumen Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu Cimahi Tengah	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen						
Persentase Penerbitan Dokumen Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu Cimahi Utara	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen						
Indeks LAKE	64,17 indeks	41 indeks	57 indeks	67 indeks	73 indeks	73 indeks						

VISI/ MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DAN INDIKATOR KINERJANYA	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD	PAGU INDIKATIF				TOTAL JUMLAH PAGU INDIKATIF RPD 2023-2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	2024	2025	2026		Pagu 2023	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026		
Tingkat Kepuasan Masyarakat Kota Cimahi terhadap Kinerja DPRD	N/A Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai						
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA												
Tingkat Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,5 Nilai Indeks	2,5 Nilai Indeks	2,75 Nilai Indeks	3,00 Nilai Indeks	3,25 Nilai Indeks	3,25 Nilai Indeks	3.430.088.800	3.375.088.800	3.240.085.248	3.202.951.360	13.248.214.208	Dinas Komunikasi dan Informatika
[ PROGRAM ] PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD												
Persentase anggota DPRD yang mengikuti bimtek	N/A persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	35.432.162.500	35.462.350.900	36.262.350.900	36.462.350.900	143.619.215.200	Sekretariat DPRD
Persentase penetapan anggaran tepat waktu	N/A persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen						
Persentase produk hukum daerah yang disahkan	N/A persen	60 persen	60 persen	60 persen	60 persen	60 persen						
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK												
Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	N/A persen	60 persen	65 persen	70 persen	74 persen	74 persen	2.107.129.800	2.087.129.800	2.003.644.608	1.980.817.104	8.178.721.312	Dinas Komunikasi dan Informatika
[ PROGRAM ] PROGRAM PENCATATAN SIPIL												
Cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun	95,23 persen	96 persen	96,5 persen	97 persen	97,5 persen	97,5 persen	614.000.000	619.000.000	645.000.000	654.000.000	2.532.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen						
Cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen						
Cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan non muslim pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen						
[ PROGRAM ] PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK												
Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk	98,29 persen	99 persen	99 persen	99 persen	99 persen	99 persen	519.000.000	531.000.000	564.000.000	580.000.000	2.194.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

VISI/ MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DAN INDIKATOR KINERJANYA	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD	PAGU INDIKATIF				TOTAL JUMLAH PAGU INDIKATIF RPD 2023-2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	2024	2025	2026		Pagu 2023	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026		
Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak	86 persen	90 persen	92 persen	94 persen	96 persen	96 persen						
[ PROGRAM ] PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH												
Persentase pengembangan inovasi	N/A persen	50 persen	60 persen	70 persen	80 persen	80 persen	565.000.000	586.000.000	674.545.000	750.492.500	2.576.037.500	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
[ PROGRAM ] PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH												
Persentase penelitian dan pengembangan yang dihasilkan dan didiseminasikan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	505.680.000	405.680.000	510.680.000	410.680.000	1.832.720.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP												
Indeks LAKI	35 Indeks	37 Indeks	50 Indeks	55 Indeks	60 Indeks	60 Indeks	618.826.247	950.000.000	622.328.271	998.524.696	3.189.679.214	Dinas Arsip Daerah
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN												
Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data kependudukan melalui hak akses data	N/A persen	30 persen	45 persen	60 persen	75 persen	75 persen	118.000.000	122.000.000	126.000.000	132.000.000	498.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
SLA berjalannya SIAK dan KTP-el	N/A persen	90 persen	91 persen	93 persen	95 persen	95 persen	570.000.000	587.500.000	685.000.000	725.000.000	2.567.500.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN												
Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan profil kependudukan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	30.000.000	32.000.000	34.000.000	35.000.000	131.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
[ PROGRAM ] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N/A Nilai	70 (BB) Nilai	71 (BB) Nilai	72 (BB) Nilai	73 (BB) Nilai	74 (BB) Nilai	6.843.396.000	8.058.943.000	9.091.746.000	8.404.313.320	32.398.398.320	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Indeks	50,00 Indeks	50,50 Indeks	51,00 Indeks	51,50 Indeks	52,00 Indeks						
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N/A Nilai	B Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	5.850.170.950	5.980.888.300	6.187.722.561	6.089.610.419	24.108.392.230	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Nilai IKM Perangkat Daerah	90,69 Nilai	80 Nilai	81 Nilai	82 Nilai	83 Nilai	83 Nilai						
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50,00 Nilai	50,50 Nilai	51,00 Nilai	51,50 Nilai	51,50 Nilai	4.555.140.000	4.560.843.000	4.754.660.000	4.674.613.000	18.545.256.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai						
Nilai IKM Perangkat Daerah	N/A Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai						

VISI/ MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DAN INDIKATOR KINERJANYA	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD	PAGU INDIKATIF				TOTAL JUMLAH PAGU INDIKATIF RPD 2023-2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	2024	2025	2026		Pagu 2023	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026		
Indeks Profesionalitas ASN	N?A Nilai	50 Nilai	50,5 Nilai	51 Nilai	51,5 Nilai	0 Nilai						
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	19.452.984.900	19.478.906.900	19.952.747.900	20.149.271.000	79.033.910.700	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Nilai IKM Perangkat Daerah	80.45 nilai	80.75 nilai	81.05 nilai	81.35 nilai	81.65 nilai	81.65 nilai						
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50.0 Nilai	50.2 Nilai	50.4 Nilai	50.6 Nilai	50.6 Nilai						
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N/A Nilai	71 Nilai	73 Nilai	75 Nilai	77 Nilai	79 Nilai	9.581.240.906	9.820.793.000	10.204.667.000	10.120.138.000	39.726.838.906	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Nilai IKM Perangkat daerah	N/A Nilai	75 Nilai	76 Nilai	77 Nilai	78 Nilai	79 Nilai						
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	57,50 Nilai	64,10 Nilai	76,92 Nilai	89,74 Nilai	89,74 Nilai						
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	334.885.700	300.000.000	350.000.000	350.000.000	1.334.885.700	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Nilai IKM Perangkat Daerah	80,82 Nilai	81 Nilai	81,5 Nilai	82 Nilai	82,5 Nilai	82,5 Nilai	10.779.987.300	11.224.979.000	11.441.905.000	11.678.695.500	45.125.566.800	
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	65,00 Nilai	68,00 Nilai	70,00 Nilai	72,00 Nilai	72,00 Nilai	320.000.000	325.000.000	325.000.000	325.000.000	1.295.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Nilai Sakip Perangkat Daerah	B Nilai	B Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	6.259.151.753	6.584.304.000	13.793.028.729	6.479.899.304	33.116.383.786	
Nilai IKM Perangkat Daerah	75 Nilai	76 Nilai	77 Nilai	78 Nilai	79 Nilai	79 Nilai						
Indeks Profesionalitas ASN	50 Nilai	51 Nilai	52 Nilai	53 Nilai	54 Nilai	54 Nilai						
Nilai Sakip Perangkat Daerah	0 Nilai	67 Nilai	68 Nilai	69 Nilai	70 Nilai	70 Nilai	6.298.771.765	6.494.716.297	6.692.611.233	6.892.462.486	26.378.561.781	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Nilai IKM Perangkat Daerah	0 Nilai	87 Nilai	87,5 Nilai	87,7 Nilai	88 Nilai	88 Nilai						
Indeks Profesionalitas ASN	0 Nilai	50 Nilai	51 Nilai	52 Nilai	53 Nilai	53 Nilai						
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	9.519.058.000	9.729.559.000	10.056.925.000	10.346.182.000	39.651.724.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Indeks Profesionalitas ASN	46,33 Nilai	50,00 Nilai	50,50 Nilai	51,00 Nilai	51,50 Nilai	51,50 Nilai						
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	75.313.358.203	77.968.058.500	78.896.713.800	82.326.532.800	314.504.663.303	Dinas Kesehatan
Nilai IKM Perangkat Daerah	80,50 Nilai	83,00 Nilai	83,82 Nilai	83,82 Nilai	83,82 Nilai	83,82 Nilai						
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50,00 Nilai	50,50 Nilai	51,00 Nilai	51,50 Nilai	51,50 Nilai						
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N/A Nilai	71 Nilai	74,5 Nilai	78 Nilai	81 Nilai	81 Nilai	6.964.092.800	7.102.911.800	7.443.403.088	7.398.823.736	28.909.231.424	Dinas Komunikasi dan Informatika
Nilai IKM Perangkat Daerah	N/A Nilai	76,61 Nilai	80,61 Nilai	84,61 Nilai	88,31 Nilai	88,31 Nilai						
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50 Nilai	50,50 Nilai	51 Nilai	51,50 Nilai	51,50 Nilai						
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	21.627.282.000	21.917.098.000	21.939.095.000	21.953.755.000	87.437.230.000	Dinas Lingkungan Hidup
Nilai IKM Perangkat Daerah	N/A Nilai	76,65 Nilai	77,15 Nilai	77,65 Nilai	78,15 Nilai	78,15 Nilai						
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	43 Nilai	45 Nilai	48 Nilai	50 Nilai	50 Nilai						
Nilai SAKIP Perangkat daerah	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	10.030.590.499	10.144.548.499	10.669.630.499	10.656.114.799	41.500.884.296	Dinas Pangan dan Pertanian
Nilai IKM Perangkat Daerah	80,4 Nilai	80,5 Nilai	80,5 Nilai	81 Nilai	81 Nilai	81 Nilai						
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	45 Nilai	46 Nilai	48 Nilai	50 Nilai	50 Nilai						

VISI/ MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DAN INDIKATOR KINERJANYA	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD	PAGU INDIKATIF				TOTAL JUMLAH PAGU INDIKATIF RPD 2023-2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	2024	2025	2026		Pagu 2023	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026		
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	8.743.764.292	8.743.764.300	8.994.280.292	8.758.132.300	35.239.941.184	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Nilai IKM Perangkat Daerah	N/A Nilai	70 Nilai	72,5 Nilai	75 Nilai	77,5 Nilai	77,5 Nilai	1.217.432.700	1.221.932.700	1.221.932.700	1.221.932.700	4.883.230.800	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50 Nilai	50,50 Nilai	51 Nilai	51,50 Nilai	51,50 Nilai	17.500.000	17.500.000	34.818.208	37.500.000	107.318.208	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N/A Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	8.441.768.300	8.447.242.300	8.729.098.300	8.812.869.300	34.430.978.200	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Nilai IKM Perangkat Daerah	N/A Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai							
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50 Nilai	50,5 Nilai	51 Nilai	51,5 Nilai							
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	31.013.439.000	16.003.172.000	16.380.674.000	15.971.228.000	79.368.513.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Nilai IKM Perangkat Daerah	N/A Nilai	80 Nilai	81 Nilai	82 Nilai	83 Nilai	83 Nilai						
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50,0 Nilai	50,2 Nilai	50,4 Nilai	50,6 Nilai	50,6 Nilai						
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	295.930.110.400	310.411.572.680	316.619.804.130	322.952.200.215	1.245.913.687.425	Dinas Pendidikan
Nilai IKM Perangkat Daerah	N/A Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai						
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50 Nilai	50,5 Nilai	51 Nilai	51,5 Nilai	51,5 Nilai						
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N/A Nilai	60,73 (B) Nilai	60,75 (B) Nilai	60,78 (B) Nilai	60,8 (B) Nilai	60,8 (B) Nilai	10.538.413.480	10.797.565.618	10.916.231.210	11.096.865.834	43.349.076.142	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Nilai IKM Perangkat daerah	N/A Nilai	78 Nilai	78,25 Nilai	78,5 Nilai	78,75 Nilai	78,75 Nilai						
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50 Nilai	50,25 Nilai	50,5 Nilai	50,75 Nilai	50,75 Nilai						
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	21.684.378.500	22.555.378.500	23.117.232.500	22.978.328.000	90.335.317.500	Dinas Perhubungan
Nilai IKM Perangkat daerah	77,19 Nilai	77,25 Nilai	77,50 Nilai	77,75 Nilai	78 Nilai	78 Nilai						
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50 Nilai	50,50 Nilai	51 Nilai	51,50 Nilai	51,50 Nilai						
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	A Nilai	A Nilai	13.029.661.587	13.207.487.232	13.403.814.590	13.573.879.191	53.214.842.600	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Nilai IKM Perangkat Daerah	N/A Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai						
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50 Nilai	50 Nilai	50 Nilai	50 Nilai	50 Nilai						
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N/A Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	6.536.003.900	6.640.232.900	6.746.550.800	6.951.778.700	26.874.566.300	Dinas Sosial
Nilai IKM Perangkat Daerah	N/A Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai						
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50 Nilai	50,5 Nilai	51 Nilai	51,5 Nilai	51,5 Nilai						
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	6.413.949.709	6.517.363.579	6.675.718.311	6.730.439.790	26.337.471.389	Dinas Tenaga Kerja
Nilai IKM Perangkat daerah	86 nilai	86 nilai	86 nilai	86 nilai	86 nilai	86 nilai						
Indeks Profesionalitas ASN	N/A nilai	50,00 nilai	50,50 nilai	51,00 nilai	51,50 nilai	51,50 nilai						
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	43.500.000	37.422.000	37.422.000	37.422.000	155.766.000	Inspektorat
Nilai IKM Perangkat Daerah	94,81 Nilai	95 Nilai	95,5 Nilai	96 Nilai	96,5 Nilai	96,5 Nilai	9.293.528.377	9.379.291.128	9.466.582.390	9.639.082.678	37.778.484.573	Inspektorat
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50,00 Nilai	50,50 Nilai	51,00 Nilai	51,50 Nilai	51,50 Nilai	323.000.000	251.006.300	238.906.038	232.706.750	1.045.619.088	Inspektorat
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N/A Nilai	70 (BB) Nilai	71 (BB) Nilai	72 (BB) Nilai	73 (BB) Nilai	74 (BB) Nilai	16.318.891.170	17.051.707.128	17.904.292.485	18.799.507.109	70.074.397.892	Kecamatan Cimahi Selatan
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50,00 Nilai	50,50 Nilai	51,00 Nilai	51,50 Nilai	52,00 Nilai	17.460.102.300	18.333.107.415	19.249.762.786	20.212.250.925	75.255.223.426	Kecamatan Cimahi Tengah
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N/A Nilai	70 (BB) Nilai	71 (BB) Nilai	72 (BB) Nilai	73 (BB) Nilai	74 (BB) Nilai						
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50,00 Nilai	50,50 Nilai	51,00 Nilai	51,50 Nilai	52,00 Nilai						

VISI/ MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DAN INDIKATOR KINERJANYA	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD	PAGU INDIKATIF				TOTAL JUMLAH PAGU INDIKATIF RPD 2023-2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	2024	2025	2026		Pagu 2023	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026		
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N/A Nilai	70 (BB) Nilai	71 (BB) Nilai	72 (BB) Nilai	73 (BB) Nilai	74 (BB) Nilai	13.127.185.650	13.787.517.750	13.127.185.650	13.127.185.650	53.169.074.700	Kecamatan Cimahi Utara
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50,00 Nilai	50,50 Nilai	51,00 Nilai	51,50 Nilai	52,00 Nilai						
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	52.506.519.145	56.416.129.000	58.627.613.000	60.886.436.000	228.436.697.145	RSUD CIBABAT
Indeks Profesionalitas ASN	43,54 Nilai	50,00 Nilai	50,50 Nilai	51,00 Nilai	51,50 Nilai	51,50 Nilai						
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	19.694.457.600	19.708.457.459	20.801.679.459	20.501.369.459	80.705.963.977	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Nilai IKM Perangkat Daerah	N/A Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai						
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50,00 Nilai	50,50 Nilai	51,00 Nilai	51,50 Nilai	51,50 Nilai						
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	52.013.400.500	52.835.384.100	52.391.817.100	53.591.200.100	210.831.801.800	Sekretariat DPRD
Nilai IKM Perangkat Daerah	N/A Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai						
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50,00 Nilai	50,50 Nilai	51,00 Nilai	51,50 Nilai	51,50 Nilai						
Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	N/A Ha	0,68 Ha	0,68 Ha	0,68 Ha	0,68 Ha	0,68 Ha	1.020.000.000	1.020.000.000	1.020.000.000	1.020.000.000	4.080.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
[ PROGRAM ] PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK												
Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Cimahi Selatan	88 persen	88 persen	89 persen	90 persen	91 persen	91 persen	826.156.350	867.464.168	910.837.376	956.379.245	3.560.837.139	Kecamatan Cimahi Selatan
Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Cimahi Tengah	91 persen	91 persen	91 persen	91 persen	91 persen	91 persen	1.215.088.600	1.275.843.030	1.339.635.182	1.406.616.941	5.237.183.753	Kecamatan Cimahi Tengah
Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Cimahi Utara	91 persen	91 persen	91 persen	91 persen	91 persen	91 persen	1.143.124.100	1.200.300.000	1.143.124.100	1.143.124.100	4.629.672.300	Kecamatan Cimahi Utara
Persentase non perizinan yang dilimpahkan ke kecamatan yang dilayani di Kecamatan Cimahi Selatan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	62.099.599	65.204.537	68.464.764	71.888.002	267.656.902	Kecamatan Cimahi Selatan
Persentase non perizinan yang dilimpahkan ke kecamatan yang dilayani di Kecamatan Cimahi Tengah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	316.566.400	332.394.720	349.014.456	366.465.179	1.364.440.755	Kecamatan Cimahi Tengah
Persentase non perizinan yang dilimpahkan ke kecamatan yang dilayani di Kecamatan Cimahi Utara	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	20.147.900	22.214.000	20.147.900	20.147.900	82.657.700	Kecamatan Cimahi Utara
[ PROGRAM ] PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI												
Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	30,00 persen	33,33 persen	50 persen	80 persen	100 persen	100 persen	481.964.000	446.500.000	428.640.000	424.353.600	1.781.457.600	Dinas Komunikasi dan Informatika
[ PROGRAM ] PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL												

VISI/ MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DAN INDIKATOR KINERJANYA	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD	PAGU INDIKATIF				TOTAL JUMLAH PAGU INDIKATIF RPD 2023-2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	2024	2025	2026		Pagu 2023	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026		
Persentase Perangkat Daerah yang memiliki ketersediaan data statistik sesuai dengan prinsip satu data	27 persen	37 persen	47 persen	67 persen	87 persen	87 persen	263.938.600	263.938.600	253.381.056	250.847.200	1.032.105.456	Dinas Komunikasi dan Informatika
[ SASARAN ] Meningkatnya Kualitas Pengawasan												
Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi	N/A Nilai	3 Nilai	3 Nilai	3 Nilai	3 Nilai	3 Nilai						
Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	N/A persen	5 persen	5 persen	5 persen	5 persen	20 persen						
[ PROGRAM ] PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN												
Persentase hasil pengawasan	71 persen	82 persen	85 persen	88 persen	90 persen	90 persen	839.335.623	642.750.000	742.750.000	642.750.000	2.867.585.623	Inspektorat
[ PROGRAM ] PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI												
Level Kapabilitas APIP	2 level	3 level	3 level	3 level	3 level	3 level	666.800.000	369.698.572	503.903.572	344.698.572	1.885.100.716	Inspektorat
[ SASARAN ] Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah												
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	59,22 Nilai	60,73 Nilai	60,75 Nilai	60,78 Nilai	60,80 Nilai	60,80 Nilai						
Nilai LPPD	Tinggi Nilai	Tinggi Nilai	Tinggi Nilai	Tinggi Nilai	Tinggi Nilai	Tinggi Nilai						
Nilai Rata-rata IKM Kota	82,37 Nilai	82,37 Nilai	82,37 Nilai	82,37 Nilai	82,37 Nilai	82,37 Nilai						
Nilai SAKIP Kota	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai						
[ PROGRAM ] PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH												
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Kepegawaian)	79,00 Nilai	79,25 Nilai	79,50 Nilai	79,75 Nilai	80,00 Nilai	80,00 Nilai	1.254.000.000	1.517.000.000	1.935.000.000	1.760.000.000	6.466.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Persentase ASN yang dijatuhi hukuman disiplin	0,20 persen	0,20 persen	0,19 persen	0,18 persen	0,18 persen	0,18 persen	220.000.000	375.000.000	620.000.000	598.000.000	1.813.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Persentase ASN yang melaporkan SKP	78,30 persen	82,22 persen	83,23 persen	86,33 persen	90,64 persen	90,64 persen	1.020.000.000	1.110.000.000	1.270.000.000	1.200.000.000	4.600.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Persentase ASN yang mengikuti peningkatan kualifikasi pendidikan	2,08 persen	2,12 persen	2,16 persen	2,20 persen	2,25 persen	2,25 persen	200.000.000	265.000.000	310.000.000	260.000.000	1.035.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
[ PROGRAM ] PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT												



VISI/ MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DAN INDIKATOR KINERJANYA	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD	PAGU INDIKATIF				TOTAL JUMLAH PAGU INDIKATIF RPD 2023-2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	2024	2025	2026		Pagu 2023	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026		
Indeks Kepuasan Masyarakat pada Bagian Admnistrasi Kesejahteraan Rakyat	84 Nilai	84 Nilai	84 Nilai	84 Nilai	84 Nilai	84 Nilai	4.171.178.200	4.998.062.246	4.996.344.343	6.272.518.732	20.438.103.521	Sekretariat Daerah
Persentase Kasus Hukum yang terfasilitasi	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen						
Persentase Kegiatan Agama dan Pendidikan yang Terlaksana	97 persen	97 persen	97 persen	97 persen	97 persen	97 persen						
Persentase Kegiatan bidang kesehatan P2KBP3A, Sosial, Kepemudaan dan Olahraga	71 persen	71 persen	71 persen	71 persen	71 persen	71 persen						
Persentase Pertanggungjawaban Dokumen Pemerintah Daerah yang Bermilai Baik	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen						
Persentase Produk Hukum Daerah yang terpublikasi	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen						
Persentase Produk Hukum yang Sesuai dengan Mekanisme Pembentukan Produk Hukum Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen						
Indeks Kepuasan Masyarakat Bagian Hukum	77 Nilai	77 Nilai	77 Nilai	77 Nilai	77 Nilai	77 Nilai						
Persentase terfasilitasinya bantuan hukum , penyusunan produk hukum sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah dan pendokumentasian produk hukum serta pengelolaan informasi hukum	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen						
Indeks Kepuasan Masyarakat Bagian Pemerintahan	77 Nilai	77 Nilai	77 Nilai	77 Nilai	77 Nilai	77 Nilai						
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA												
Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	10,11 persen	8,25 persen	9,08 persen	9,98 persen	10,98 persen	10,98 persen	2.000.000.000	2.205.000.000	2.600.000.000	1.975.000.000	8.780.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
[ PROGRAM ] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH												
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	55.629.890.510	57.383.614.653	57.047.197.888	56.138.329.561	226.199.032.612	Sekretariat Daerah
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50,00 Nilai	50,50 Nilai	51,00 Nilai	51,50 Nilai	51,50 Nilai						
Nilai IKM bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	78 Nilai	78 Nilai	78 Nilai	78 Nilai	78 Nilai	78 Nilai						
Nilai IKM pada Bagian Umum	80 Nilai	80 Nilai	80 Nilai	80 Nilai	80 Nilai	80 Nilai						

VISI/ MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DAN INDIKATOR KINERJANYA	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD	PAGU INDIKATIF				TOTAL JUMLAH PAGU INDIKATIF RPD 2023-2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	2024	2025	2026		Pagu 2023	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026		
Persentase Kegiatan KDH dan WAKDH yang Terfasilitas dengan Baik	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen						
Persentase koordinasi dan Konsultasi yang difasilitasi	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen						
Persentase Penguatan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik dan Akuntabilitas	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen						
Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen						
Persentase Penguatan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik dan Akuntabilitas	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen						
Persentase Penguatan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik dan Akuntabilitas	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen						
[ PROGRAM ] PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN												
Nilai IKM bagian Administarsi Perekonomian	77 Nilai	77 Nilai	77 Nilai	77 Nilai	77 Nilai	77 Nilai	2.376.883.290	2.645.016.101	2.847.700.769	2.937.960.387	10.807.560.547	Sekretariat Daerah
Nilai IKM bagian Perekonomian dan SDA	77 Nilai	80 Nilai	81 Nilai	82 Nilai	83 Nilai	83 Nilai						
Nilai IKM pada Bagian Administrasi Pembangunan	77 Nilai	77 Nilai	77 Nilai	77 Nilai	77 Nilai	77 Nilai						
Nilai IKM pada bagian pengadaan barang dan jasa	79,05 Nilai	79,05 Nilai	79,05 Nilai	79,05 Nilai	79,05 Nilai	79,05 Nilai						
Persentase rancangan kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan yang diimplementasikan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen						
Persentase rancangan kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan yang diimplementasikan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen						
Persentase Rekomendasi terhadap Perusahaan Daerah yang ditindaklanjuti	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen						
[ SASARAN ] Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah												
Persentase keselarasan kinerja antar dokumen perencanaan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen						
Persentase capaian Indikator Kinerja Kunci	N/A persen	80 persen	85 persen	90 persen	95 persen	95 persen						

VISI/ MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DAN INDIKATOR KINERJANYA	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD	PAGU INDIKATIF				TOTAL JUMLAH PAGU INDIKATIF RPD 2023-2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	2024	2025	2026		Pagu 2023	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026		
[ PROGRAM ] PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH												
Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	1.740.000.000	2.195.000.000	2.030.097.000	1.885.550.000	7.850.647.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	N/A persen	80 persen	85 persen	90 persen	95 persen	95 persen						
Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen						
Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	N/A persen	80 persen	85 persen	90 persen	95 persen	95 persen						
Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen						
Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	N/A persen	80 persen	85 persen	90 persen	95 persen	95 persen						
[ PROGRAM ] PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH												
Persentase kesesuaian program RKPd dengan RPJMD	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	1.175.000.000	1.294.500.000	1.190.200.000	1.164.720.000	4.824.420.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Persentase capaian indikator program	N/A persen	80 persen	85 persen	90 persen	95 persen	95 persen						
[ SASARAN ] Optimalisasi Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah												
Rasio Utilisasi Aset Daerah	64,40 persen	72,0 persen	73,5 persen	75,0 persen	76,5 persen	76,5 persen						
Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah dengan Standar Akuntansi Pemerintahan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen						
Persentase Penetapan APBD tepat waktu	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen						

VISI/ MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DAN INDIKATOR KINERJANYA	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD	PAGU INDIKATIF				TOTAL JUMLAH PAGU INDIKATIF RPD 2023-2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	2024	2025	2026		Pagu 2023	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026		
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH												
Persentase laporan Barang Milik Daerah (BMD) yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	1.800.000.000	1.600.000.000	1.815.231.000	1.400.000.000	6.615.231.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH												
Persentase dokumen rencana anggaran yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	1.291.637.100	1.291.637.100	1.349.637.100	1.275.000.000	5.207.911.300	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Persentase laporan keuangan yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	27.050.000.000	27.050.000.000	26.825.000.000	26.875.000.000	107.800.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
[ MISI 3] Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah												
[ TUJUAN ] Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi												
Indeks Gini	0,412 indeks	0,409 indeks	0,406 indeks	0,403 indeks	0,400 indeks	0,400 indeks						
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5,11 persen	5,45 persen	5,15 - 5,95 persen	5,20 - 6,10 persen	5,25 - 6,25 persen	5,25 - 6,25 persen						
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	13,07 persen	12,61 persen	12,38 persen	12,15 persen	11,92 persen	11,92 persen						
[ SASARAN ] Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi melalui Optimalisasi Potensi Daerah												
Persentase IKM yang berdaya saing	N/A persen	8 persen	8 persen	8 persen	8 persen	8 persen						
Persentase Ketersediaan Bahan Pokok Masyarakat di Pasar	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen						
Persentase Pelaku Usaha yang Berpotensi Ekspor	5 persen	6 persen	7 persen	7 persen	7 persen	32 persen						
Persentase Sarana dan Prasarana Perdagangan Layak Fungsi	25 persen	30 persen	40 persen	45 persen	50 persen	50 persen						
Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	28,24 persen	28,73 persen	29,22 persen	29,72 persen	29,72 persen	29,72 persen						
Realisasi Investasi (dalam milyar rupiah)	N/A milyar rupiah	6,781 milyar rupiah	7,081 milyar rupiah	7,381 milyar rupiah	7,681 milyar rupiah	7,681 milyar rupiah						
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara	5.685 orang	41.030 orang	43.085 orang	45.25 orang	47.522 orang	176.889 orang						

VISI/ MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DAN INDIKATOR KINERJANYA	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD	PAGU INDIKATIF				TOTAL JUMLAH PAGU INDIKATIF RPD 2023-2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	2024	2025	2026		Pagu 2023	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026		
Lama Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari						
[ PROGRAM ] PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL												
Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A Nilai	84,5 Nilai	85 Nilai	85,5 Nilai	86 Nilai	86 Nilai	1.250.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000	5.000.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
[ PROGRAM ] PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA												
Jumlah destinasi yang terpromosikan	N/A lokasi	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	2 lokasi	11 lokasi	100.000.000	251.000.000	251.000.000	251.000.000	853.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL												
Jumlah Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola dengan sistem informasi penanaman modal	21 jenis	22 jenis	23 jenis	24 jenis	25 jenis	25 jenis	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	2.800.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH												
Persentase Peningkatan Target Pajak Daerah	13,18 persen	3 persen	3 persen	3 persen	3 persen	3 persen	2.895.000.000	4.071.747.000	3.852.536.000	3.831.507.000	14.650.790.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Persentase Realisasi Pajak Daerah	117,74 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen						
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					0 jenis							
Persentase IKM yang dikelola di dalam SIINAS	N/A persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	172.000.000	185.000.000	172.000.000	160.000.000	689.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL												
Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	N/A jenis	3 jenis	0 Jenis	0 Jenis	0 Jenis	3 jenis	300.000.000	-	-	-	300.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Jumlah Sub Sektor Ekraf yang difasilitasi HAKI	N/A jenis	3 jenis	0 Jenis	0 Jenis	0 Jenis	3 jenis						

VISI/ MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DAN INDIKATOR KINERJANYA	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD	PAGU INDIKATIF				TOTAL JUMLAH PAGU INDIKATIF RPD 2023-2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	2024	2025	2026		Pagu 2023	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026		
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR												
Persentase kenaikan omset UKM IKM selama mengikuti pameran promosi	30 persen	30 persen	30 persen	30 persen	30 persen	30 persen	632.000.000	550.000.000	550.000.000	550.000.000	2.282.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL												
Jumlah dokumen pengembangan iklim penanaman modal	N/A dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	32 dokumen	1.050.000.000	1.050.000.000	850.000.000	850.000.000	3.800.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF												
Jumlah SDM sub sektor ekraf yang dibina	N/A orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	200 orang	-	787.204.000	797.066.000	787.204.000	2.371.474.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Jumlah SDM Kepariwisataaan yang dibina	N/A orang	80 orang	80 orang	80 orang	90 orang	330 Orang						
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA												
Persentase permohonan rekomendasi IUI kecil dan menengah yang dilayani	N/A persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	60.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	150.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL												
Jumlah Perusahaan yang Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	509 perusahaan	530 perusahaan	540 perusahaan	550 perusahaan	560 perusahaan	560 perusahaan	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	1.200.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI												
Persentase kenaikan omset UKM IKM selama mengikuti P3DN	30 persen	30 persen	30 persen	30 persen	30 persen	30 persen	370.000.000	457.000.000	365.000.000	365.000.000	1.557.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
[ PROGRAM ] PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA												

VISI/ MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DAN INDIKATOR KINERJANYA	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD	PAGU INDIKATIF				TOTAL JUMLAH PAGU INDIKATIF RPD 2023-2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	2024	2025	2026		Pagu 2023	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026		
Jumlah daya tarik wisata yang dikelola dengan baik	N/A lokasi	3 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	9 lokasi	2.209.293.000	2.796.000.000	1.796.000.000	296.000.000	7.097.293.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
[ PROGRAM ] PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN												
Jumlah pasar rakyat/tradisional yang dikelola pemerintah sesuai dengan SNI	1 pasar	1 pasar	1 pasar	1 pasar	1 pasar	2 pasar	5.634.663.900	4.352.566.882	4.371.824.582	4.082.256.582	18.441.311.946	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
[ PROGRAM ] PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI												
Jumlah IKM yang Berdaya Saing	N/A IKM	100 IKM	120 IKM	140 IKM	160 IKM	160 IKM	4.779.999.820	4.899.933.500	4.698.091.208	4.672.947.584	19.050.972.112	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Jumlah Sentra Industri Pengolahan	2 Sentra	3 Sentra	3 Sentra	3 Sentra	4 Sentra	4 Sentra	250.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	400.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
[ PROGRAM ] PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN												
Persentase permohonan rekomendasi tanda daftar gudang yang dilayani	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	45.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	135.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
[ PROGRAM ] PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL												
Persentase Potensi Investasi Daerah yang dipromosikan	N/A	2,43 persen	2,43 persen	2,43 persen	2,43 persen	9,72 persen	700.000.000	700.000.000	850.000.000	1.200.000.000	750.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
[ PROGRAM ] PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING												
Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	425.883.600	365.000.000	365.000.000	365.000.000	1.520.883.600	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian

VISI/ MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DAN INDIKATOR KINERJANYA	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD	PAGU INDIKATIF				TOTAL JUMLAH PAGU INDIKATIF RPD 2023-2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	2024	2025	2026		Pagu 2023	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026		
[ PROGRAM ] PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN												
Persentase UTP yang ditera/tera ulang	55 persen	57 persen	59 persen	61 persen	65 persen	65 persen	606.631.900	655.000.000	627.000.000	625.000.000	2.513.631.900	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
[ SASARAN ] Mempercepat peningkatan pemerataan pendapatan												
Nilai PPH Ketersediaan	2318 nilai	2350 nilai	2350 nilai	2380 nilai	2380 nilai	2380 nilai						
Skor PPH Ketersediaan	67,8 nilai	67,9 nilai	68 nilai	68 nilai	68 nilai	68 nilai						
Persentase Koperasi Sehat	48,75 persen	48,75 persen	51,25 persen	53,75 persen	56,25 persen	56,25 persen						
Persentase UKM Naik Kelas	21 persen	21 persen	26 persen	31 persen	36 persen	36 persen						
Persentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Pertanian	1,32 persen	1,32 persen	1,32 persen	1,32 persen	1,33 persen	1,33 persen						
[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI												
Persentase Koperasi Aktif	29,74 persen	31 persen	33 persen	35 persen	37 persen	37 persen	392.608.700	399.000.000	371.000.000	401.000.000	1.563.608.700	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		jh										
Persentase kenaikan omset dan aset UMKM	16 persen	21 persen	26 persen	31 persen	36 persen	29 persen	1.475.000.000	1.525.000.000	1.480.000.000	1.485.000.000	5.965.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		jh										
Persentase kenaikan omset dan aset UMKM	16 persen	21 persen	26 persen	31 persen	36 persen	29 persen	1.000.000.000	850.000.000	850.000.000	850.000.000	3.550.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
[ PROGRAM ] PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN												
Persentase Koperasi yang mendapatkan fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan	11,15 persen	31,14 persen	40,13 persen	48,54 persen	56,42 persen	56,42 persen	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	800.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan



VISI/ MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DAN INDIKATOR KINERJANYA	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD	PAGU INDIKATIF				TOTAL JUMLAH PAGU INDIKATIF RPD 2023-2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	2024	2025	2026		Pagu 2023	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026		
												Menengah, dan Perindustrian
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI												
Jumlah koperasi yang diawasi/diperiksa	150 Koperasi	25 Koperasi	25 Koperasi	25 Koperasi	25 Koperasi	250 Koperasi	85.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	325.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN												
Persentase Pangan segar yang aman dikonsumsi (%)	70 persen	70 persen	70 persen	70 persen	70 persen	70 persen	100.000.000	100.000.000	97.300.000	100.000.000	397.300.000	Dinas Pangan dan Pertanian
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA												
Jumlah produksi ikan konsumsi (ton)	278,9 ton	280 ton	290 ton	300 ton	310 ton	310 ton	653.864.100	591.000.000	621.000.000	629.158.200	2.495.022.300	Dinas Pangan dan Pertanian
Jumlah produksi ikan hias (dalam juta ekor)	2,312 juta ekor	2,35 juta ekor	2,375 juta ekor	2,38 juta ekor	2,4 juta ekor	2,4 juta ekor						
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER												
Persentase Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	N/A persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	813.428.600	733.370.500	733.370.500	747.720.000	3.027.889.600	Dinas Pangan dan Pertanian
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN												
Persentase peningkatan jumlah ikan yang diolah menjadi produk hasil	1 persen	1 persen	2 persen	3 persen	4 persen	4 persen	94.524.600	94.524.600	94.524.600	94.524.600	378.098.400	Dinas Pangan dan Pertanian
[ PROGRAM ] PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI												
Persentase Koperasi Sehat	41,25 persen	30 persen	31 persen	32 persen	33 persen	33 persen	411.235.600	255.000.000	255.000.000	255.000.000	1.176.235.600	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
[ PROGRAM ] PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT												

VISI/ MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DAN INDIKATOR KINERJANYA	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD	PAGU INDIKATIF				TOTAL JUMLAH PAGU INDIKATIF RPD 2023-2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	2024	2025	2026		Pagu 2023	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026		
Rata-rata ketersediaan Energi di kota Cimahi	2318 kkal/kap/hari & gr/kap/hari	2350 kkal/kap/hari & gr/kap/hari	2350 kkal/kap/hari & gr/kap/hari	2350 kkal/kap/hari & gr/kap/hari	2380 kkal/kap/hari & gr/kap/hari	'2380 kkal/kap/hari & gr/kap/hari	850.892.801	710.892.801	850.892.801	750.892.801	3.163.571.204	Dinas Pangan dan Pertanian
Rata-rata ketersediaan Protein di kota Cimahi	67,8 kkal/kap/hari & gr/kap/hari	67,9 kkal/kap/hari & gr/kap/hari	67,9 kkal/kap/hari & gr/kap/hari	67,9 kkal/kap/hari & gr/kap/hari	68 kkal/kap/hari & gr/kap/hari	68 kkal/kap/hari & gr/kap/hari						
Rata-rata Konsumsi Energi di Kota Cimahi	2093,9 kkal/kap/hari & gr/kap/hari	2100 kkal/kap/hari & gr/kap/hari	2100 kkal/kap/hari & gr/kap/hari	2100 kkal/kap/hari & gr/kap/hari	2100 kkal/kap/hari & gr/kap/hari	2100 kkal/kap/hari & gr/kap/hari						
Rata-rata Konsumsi Protein di Kota Cimahi	2093,9 kkal/kap/hari & gr/kap/hari	57 kkal/kap/hari & gr/kap/hari	57 kkal/kap/hari & gr/kap/hari	57 kkal/kap/hari & gr/kap/hari	57 kkal/kap/hari & gr/kap/hari	57 kkal/kap/hari & gr/kap/hari						
[ PROGRAM ] PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN												
Persentase prasarana pertanian yang disediakan dan dikembangkan	25 persen	30 persen	30 persen	30 persen	30 persen	30 persen	98.000.000	25.000.000	4.095.000.000	4.095.000.000	8.313.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
[ PROGRAM ] PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN												
Persentase koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana pendukung pertanian	N/A persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	20.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
[ PROGRAM ] PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN												
Persentase jumlah kelompok tani yang naik kelas	10 persen	6 persen	6 persen	6 persen	6 persen	34 persen	372.028.400	270.887.600	230.887.600	230.887.600	1.104.691.200	Dinas Pangan dan Pertanian
[ PROGRAM ] PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN												
Persentase izin usaha pertanian yang dilayani	N/A persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	20.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
[ SASARAN ] Meningkatnya kesempatan kerja												
Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	77,6 persen	78 persen	79 persen	80 persen	80 persen	80 persen						
[ PROGRAM ] PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL												
Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	34,19 persen	35 persen	37 persen	39 persen	41 persen	41 persen	1.397.262.200	1.417.262.200	1.264.264.200	1.264.264.200	5.343.052.800	Dinas Tenaga Kerja

VISI/ MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DAN INDIKATOR KINERJANYA	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD	PAGU INDIKATIF				TOTAL JUMLAH PAGU INDIKATIF RPD 2023-2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	2024	2025	2026		Pagu 2023	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026		
[ PROGRAM ] PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA												
Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	14,08 persen	15 persen	15 persen	15 persen	15 persen	15 persen	1.959.204.000	1.959.204.000	1.329.520.823	1.197.865.542	6.445.794.365	Dinas Tenaga Kerja
[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI												
Persentase koordinasi pelaksanaan penempatan transmigrasi	N/A persen	100 persen	100 persen	-	-	-	30.000.000	21.144.178	-	-	51.144.178	Dinas Tenaga Kerja
[ PROGRAM ] PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA												
jumlah tenaga kerja siap pakai yang disalurkan dan ditempatkan	1037 orang	1000 orang	1000 orang	1000 orang	1000 orang	1000 orang	809.533.800	766.119.043	721.261.666	732.294.468	3.029.208.977	Dinas Tenaga Kerja
[ PROGRAM ] PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA												
Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	N/A persen	90 persen	90 persen	90 persen	90 persen	90 persen	54.000.000	54.000.000	35.000.000	35.000.000	178.000.000	Dinas Tenaga Kerja
[ MISI 4] Mewujudkan Kesenjangan Pembangunan yang Berkeadilan												
<b>[ TUJUAN ] Menurunnya Angka Kemiskinan</b>												
Tingkat Kemiskinan	5,35 persen	5,35 persen	5,30 persen	5,25 persen	5,20 persen	5,20 persen						
[ SASARAN ] Meningkatkan akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi Masyarakat berpenghasilan rendah												
Cakupan PPKS yang mendapatkan bantuan kerawanan pangan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen						
Cakupan PPKS yang mendapatkan fasilitasi dasar untuk memulai usaha	N/A persen	5 persen	5 persen	5 persen	5 persen	20 persen						
Cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan infrastruktur Dasar	11 persen	34 persen	56 persen	78 persen	100 persen	100 persen						
Cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan Dasar Sosial	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen						
[ PROGRAM ] PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN												
Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan dasar rutilahu	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	3.683.667.500	5.604.721.430	5.423.339.272	4.108.041.923	18.819.770.125	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL												

VISI/ MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DAN INDIKATOR KINERJANYA	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD	PAGU INDIKATIF				TOTAL JUMLAH PAGU INDIKATIF RPD 2023-2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	2024	2025	2026		Pagu 2023	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026		
Persentase LKS yang mendapatkan penguatan kelembagaan	65,38 persen	69,23 persen	76,92 persen	92,31 persen	100 persen	100 persen	2.018.899.000	2.018.899.000	2.018.899.000	2.100.001.800	8.156.698.800	Dinas Sosial
Persentase PPKS dan PSKS yang dididik, yang mendapatkan pelatihan dan bimbingan teknis	20 persen	20 persen	20 persen	20 persen	20 persen	20 persen						
[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)												
Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan fasilitasi dasar untuk memulai usaha	N/A persen	5 persen	5 persen	5 persen	5 persen	20 persen	500.000.000	560.000.000	500.000.000	500.000.000	2.060.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
[ PROGRAM ] PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN												
Persentase kasus kerawanan pangan yang tertangani bagi masyarakat miskin	N/A persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	178.000.000	140.000.000	178.000.000	178.000.000	674.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
[ PROGRAM ] PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL												
Persentase Pemutakhiran data DTKS, PPKS dan Bansos	20 persen	20 persen	20 persen	20 persen	20 persen	20 persen	4.309.430.000	4.309.430.000	4.309.430.000	4.650.553.000	17.578.843.000	Dinas Sosial
Persentase Anak terlantar yang tertangani	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen						
Persentase KPM dalam DTKS yang masuk program PBI JK APBN dan APBD	30 persen	32 persen	34 persen	36 persen	38 persen	38 persen						
Persentase KPM PKH yang graduasi	3,75 persen	4 persen	4,25 persen	4,5 persen	4,75 persen	4,75 persen						
Persentase PPKS dengan kategori terlantar yang mendapat jaminan sosial daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen						
[ PROGRAM ] PROGRAM REHABILITASI SOSIAL												
Persentase gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	1.528.411.900	1.528.411.900	1.591.200.000	1.883.342.100	6.531.365.900	Dinas Sosial
Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	0 persen						
Persentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen						

VISI/ MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DAN INDIKATOR KINERJANYA	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD	PAGU INDIKATIF				TOTAL JUMLAH PAGU INDIKATIF RPD 2023-2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	2024	2025	2026		Pagu 2023	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026		
Persentase penyandang disabilitas terlanjar yang terpenuhi hak dasarnya.	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen						
[ MISI 5] Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan yang Sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan												
<b>[ TUJUAN ] Terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan</b>												
Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur	N/A indeks	Sedang indeks	Sedang indeks	Sedang indeks	Tinggi indeks	Tinggi indeks						
[ SASARAN ] Berkurangnya luasan banjir												
Persentase luasan banjir	0,22 persen	0,219 persen	0,217 persen	0,216 persen	0,216 persen	0,216 persen						
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)												
Persentase kapasitas sungai dan bangunan penampung air	96,90 persen	97,06 persen	97,06 persen	97,31 persen	97,31 persen	97,31 persen	4.681.735.088	4.781.735.088	4.731.735.088	4.781.735.088	18.976.940.352	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	653.488.325	653.488.325	653.488.325	653.488.325	2.613.953.300	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
[ SASARAN ] Meningkatnya Kualitas Lingkungan												
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	41,718 indeks	42,18 indeks	42,37 indeks	42,56 indeks	42,75 indeks	42,75 indeks						
[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)												
Persentase penanggung jawab dan/atau kegiatan yang memenuhi ketaatannya terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Cimahi	50 persen	50 persen	50 persen	50 persen	50 persen	50 persen	1.180.000.000	1.180.000.000	1.180.000.000	1.180.000.000	4.720.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
[ PROGRAM ] PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP												
Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	185.000.000	185.000.000	185.000.000	185.000.000	740.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN												
Persentase pengelolaan sampah	94 persen	99 persen	99 persen	100 persen	100 persen	100 persen	27.613.566.000	35.233.120.000	32.474.420.000	36.641.165.000	131.962.271.000	Dinas Lingkungan Hidup

VISI/ MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DAN INDIKATOR KINERJANYA	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD	PAGU INDIKATIF				TOTAL JUMLAH PAGU INDIKATIF RPD 2023-2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	2024	2025	2026		Pagu 2023	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026		
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL												
Persentase penanganan timbulan sampah	73 persen	72 persen	71 persen	70 persen	70 persen	70 persen	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	1.000.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)												
Persentase pelaku usaha yang memenuhi ketentuan teknis penyimpanan limbah B3	75 persen	55 persen	58 persen	60 persen	63 persen	63 persen	110.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000	440.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP												
Persentase dokumen analisa kualitas lingkungan yang dijadikan acuan	N/A persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	3.242.000.000	3.042.000.000	2.742.000.000	2.742.000.000	11.768.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
[ PROGRAM ] PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP												
Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang dipedomani	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	550.000.000	900.000.000	200.000.000	500.000.000	2.150.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
[ SASARAN ] Meningkatnya Kualitas Permukiman												
Rasio luas kawasan kumuh	0,005 rasio	0,004 rasio	0,003 rasio	0,001 rasio	0,000 rasio	0,000 rasio						
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH												
Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	80,55 persen	81,28 persen	81,81 persen	82,34 persen	83,02 persen	83,02 persen	15.684.739.250	11.982.482.764	13.630.260.899	12.895.000.000	54.192.482.913	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE												
Persentase luas genangan di daerah rawan genangan dan di daerah tidak rawan genangan	0,6 persen	0,57 persen	0,56 persen	0,56 persen	0,55 persen	0,55 persen	2.314.776.588	2.314.776.588	2.314.776.588	2.314.776.588	9.259.106.352	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM												

VISI/ MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DAN INDIKATOR KINERJANYA	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD	PAGU INDIKATIF				TOTAL JUMLAH PAGU INDIKATIF RPD 2023-2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	2024	2025	2026		Pagu 2023	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026		
Persentase penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum	69,82 persen	68,59 persen	69,20 persen	71,02 persen	73,58 persen	73,58 persen	18.365.990.640	9.039.989.566	14.348.445.231	8.992.189.878	50.746.615.315	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN												
Persentase Tingkat Hunian	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	4.347.896.960	4.347.896.960	4.347.896.960	4.347.896.960	17.391.587.840	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Persentase Rumah Korban Bencana Yang dibangun/ Direhabilitasi	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen						
[ PROGRAM ] PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)												
Persentase sarana permukiman yang tersedia PSU penunjang fungsi hunian	N/A persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	11.000.000.000	11.216.590.547	11.344.715.547	11.476.044.547	45.037.350.641	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
[ PROGRAM ] PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH												
Persentase rumah layak huni di luar kawasan kumuh	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	893.342.500	893.342.500	893.342.500	893.342.500	3.573.370.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
[ SASARAN ] Meningkatnya pelayanan transportasi yang terpadu dan berkualitas												
Persentase Tingkat Kemantapan Jalan	94,87 persen	95,12 persen	95,37 persen	95,62 persen	96 persen	96 persen						
Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Services)	C predikat	C predikat	C predikat	C predikat	C predikat	C predikat						
[ PROGRAM ] PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN												
Persentase tingkat kemantapan jalan	94,87 persen	95,12 persen	95,37 persen	95,62 persen	96 persen	97 persen	26.099.000.000	15.700.000.000	18.150.000.000	16.800.000.000	76.749.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
[ PROGRAM ] PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)												
Persentase Titik Kemacetan Ruas Jalan Arteri Sekunder yang tertangani	50 persen	50 persen	64 persen	64 persen	64 persen	64 persen	9.386.733.500	9.946.733.500	9.312.060.500	9.307.395.000	37.952.922.500	Dinas Perhubungan
Persentase fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang	N/A persen	50 persen	55 persen	60 persen	65 persen	65 persen						
Persentase Kendaraan Wajib Uji yang Layak	83 persen	83 persen	86 persen	89 persen	92 persen	92 persen						
Rasio Konektivitas Kota	0,64 rasio	0,64 rasio	0,64 rasio	0,64 rasio	0,64 rasio	0,64 rasio						
[ SASARAN ] Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati												

VISI/ MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DAN INDIKATOR KINERJANYA	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD	PAGU INDIKATIF				TOTAL JUMLAH PAGU INDIKATIF RPD 2023-2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	2024	2025	2026		Pagu 2023	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026		
Persentase luasan kehati Kota Cimahi yang dikelola	1,13 persen	1,14 persen	1,15 persen	1,16 persen	1,17 persen	1,17 persen						
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)												
Persentase luasan kehati Kota Cimahi yang dikelola	1,13 persen	1,14 persen	1,15 persen	1,16 persen	1,17 persen	1,17 persen	1.450.000.000	1.605.000.000	1.770.875.000	1.948.246.000	6.774.121.000	Dinas Lingkungan Hidup
[ SASARAN ] Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Perencanaan Tata Ruang di Kota Cimahi												
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	62 persen	62,2 persen	62,4 persen	62,6 persen	62,8 persen	62,8 persen						
Persentase Penyelesaian Administrasi Pertanahan	N/A persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen						
[ PROGRAM ] PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH												
Persentase Penatagunaan tanah Aset Pemkot	N/A persen	25 persen	50 persen	75 persen	100 persen	100 persen	40.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	640.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG												
Persentase termanfaatnya tanah kosong sesuai dengan fungsinya	N/A persen	25 persen	50 persen	75 persen	100 persen	100 persen	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	300.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
[ PROGRAM ] PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG												
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	62 persen	62,2 persen	62,4 persen	62,6 persen	62,8 persen	62,8 persen	2.150.000.000	1.375.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	5.525.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
[ PROGRAM ] PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN												
Persentase Peyelesaian ganti rugi dan santunan tanah yang di fasilitasi	N/A persen	25 persen	50 persen	75 persen	100 persen	100 persen	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	300.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
[ PROGRAM ] PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN												
Persentase Penyelesaian Sengketa Yang difasilitasi	N/A persen	25 persen	50 persen	75 persen	100 persen	100 persen	30.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	330.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



VISI/ MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DAN INDIKATOR KINERJANYA	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD	PAGU INDIKATIF				TOTAL JUMLAH PAGU INDIKATIF RPD 2023-2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	2024	2025	2026		Pagu 2023	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026		
[ SASARAN ] Terwujudnya Kualitas Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik												
Persentase Bangunan Gedung Negara dengan Kondisi Baik	72,5 persen	73 persen	73,5 persen	74 persen	74,5 persen	74,5 persen						
[ PROGRAM ] PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG												
Persentase Bangunan Gedung Negara dengan Kondisi Baik	72,5 persen	73 persen	73,5 persen	74 persen	74,5 persen	74,5 persen	9.329.800.000	1.265.000.000	14.465.614.800	16.265.000.000	41.325.414.800	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI												
Persentase jasa konstruksi tenaga terampil yang bersertifikasi	13,44 persen	14,86 persen	17,62 persen	19,16 persen	20,69 persen	20,69 persen	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	4.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
[ TUJUAN ] Meningkatkan Ketahanan Bencana												
Indeks Resiko Bencana	105 (kelas resiko sedang) indeks	105 (kelas resiko sedang) indeks	105 (kelas resiko sedang) indeks	105 (kelas resiko sedang) indeks	105 (kelas resiko sedang) indeks	105 (kelas resiko sedang) indeks						
[ SASARAN ] Meningkatnya Ketahanan Bencana												
Indeks Ketahanan Daerah	0,76 (Level II / sedang) indeks	0,77 (Level III / sedang) indeks	0,77 (Level III / sedang) indeks	0,78 (Level III / sedang) indeks	0,79 (Level III / sedang) indeks	0,79 (Level III / sedang) indeks						
[ PROGRAM ] PROGRAM PENANGANAN BENCANA												
Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	679.667.200	679.667.200	779.667.200	944.750.400	3.083.752.000	Dinas Sosial
Persentase SDM relawan kebencanaan yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen						

VISI/ MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DAN INDIKATOR KINERJANYA	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD	PAGU INDIKATIF				TOTAL JUMLAH PAGU INDIKATIF RPD 2023-2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	2024	2025	2026		Pagu 2023	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026		
[ PROGRAM ] PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA												
Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	2.980.000.000	3.030.000.000	2.980.000.000	3.031.000.000	12.021.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Persentase Pelayanan informasi kebencanaan di kawasan rawan bencana	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen							
Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen							
Persentase penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen							

**BAB VII**

**KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN  
PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat kerangka pendanaan dan program perangkat daerah, baik dalam rangka pencapaian visi dan misi RPD, juga dalam rangka penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Cimahi. Program perangkat daerah merupakan penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kerangka pendanaan menggambarkan belanja daerah untuk melaksanakan program pembangunan. Adapun Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi yang memuat belanja selama 4 (empat) tahun disajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 7.1.**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi**  
**Tahun 2023-2026**

Kode Akun	Uraian Akun	Proyeksi			
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
5	BELANJA	1.506.971.257.568,00	1.571.808.862.000,00	1.554.149.981.000,00	1.553.295.112.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.409.658.093.568,00	1.454.495.698.000,00	1.416.836.817.000,00	1.395.981.948.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai (+Sertifikasi)	761.960.768.210,50	791.410.623.574,71	807.238.836.046,20	823.383.612.767,13
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	552.818.738.907,50	507.588.747.975,29	518.476.654.503,80	480.977.008.782,87
5.1.03	Belanja Bunga	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
5.1.04	Belanja Subsidi	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah (+BOS)	91.178.586.450,00	151.796.326.450,00	87.421.326.450,00	87.921.326.450,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	72.313.164.000,00	92.313.164.000,00	112.313.164.000,00	132.313.164.000,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah				

## Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Kode Akun	Uraian Akun	Proyeksi			
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi				
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>25.000.000.000,00</b>	<b>25.000.000.000,00</b>	<b>25.000.000.000,00</b>	<b>25.000.000.000,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.506.971.257.568,00</b>	<b>1.571.808.862.000,00</b>	<b>1.554.149.981.000,00</b>	<b>1.553.295.112.000,00</b>

Sumber : hasil analisis, 2022

Program perangkat daerah yang memuat judul program selama 4 (empat) tahun periode pembangunan Kota Cimahi, dilengkapi dengan indikator kinerja, target dan pagu indikatif setiap tahun, dan Perangkat Daerah penanggung jawab. Program tersebut disajikan selengkapnya pada Tabel 7.2. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Cimahi Tahun 2023-2026.

Tabel 7.2.

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan TK/RA	67,64 persen	67,74 persen	107.927.871.600	67,84 persen	110.737.990.320	67,94 persen	114.019.926.870	68,04 persen	110.192.108.785	68,04 persen	442.877.897.575	Dinas Pendidikan
1.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Kesiapan sekolah	3,39 persen	4 persen		4,5 persen		5 persen		5,5 persen		5,5 persen		Dinas Pendidikan
1.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (5 - 6 tahun)	33,87 persen	34 persen		35 persen		36 persen		37 persen		37 persen		Dinas Pendidikan
1.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) SDSD/MI/PaketA/SDLB	95,57 persen	95,65 persen		95,75 persen		95,85 persen		95,95 persen		95,95 persen		Dinas Pendidikan

## Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B/SMPLB	91,27 persen	91,37 persen		91,47 persen		91,57 persen		91,67 persen		91,67 persen		Dinas Pendidikan
1.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A/SDLB	90,83 persen	90,93 persen		91,03 persen		91,13 persen		91,23 persen		91,23 persen		Dinas Pendidikan
1.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B/SMPLB	83,03 persen	83,13 persen		83,23 persen		83,33 persen		83,43 persen		83,43 persen		Dinas Pendidikan
1.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A/SDLB	93,25 persen	93,35 persen		93,45 persen		93,55 persen		93,65 persen		93,65 persen		Dinas Pendidikan
1.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SM/MTs/Paket B/SMPLBP	87,53 persen	87,63 persen		87,73 persen		87,83 persen		87,93 persen		87,93 persen		Dinas Pendidikan

## Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah SD	0,08 persen	0,07 persen		0,06 persen		0,05 persen		0,04 persen		0,04 persen		Dinas Pendidikan
1.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah SMP	0,05 persen	0,05 persen		0,04 persen		0,03 persen		0,02 persen		0,02 persen		Dinas Pendidikan
1.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	67,64 persen	67,74 persen		67,84 persen		67,94 persen		68,04 persen		68,04 persen		Dinas Pendidikan
1.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	83,26 persen	83,36 persen		83,46 persen		83,56 persen		83,66 persen		83,66 persen		Dinas Pendidikan
1.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Proporsi PTK bersertifikat dari PPG		44 persen		45 persen		46 persen		47 persen		47 persen		Dinas Pendidikan
					43,69 persen											

## Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pertumbuhan Proporsi guru PAUD formal dengan kualifikasi S1/DIV	72,51 persen	73 persen		73,5 persen		74 persen		74,5 persen		74,5 persen		Dinas Pendidikan
1.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Proporsi pendidik berijazah minimal S1/DIV	39,95 persen	40 persen		41 persen		42 persen		43 persen		44 persen		Dinas Pendidikan
1.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Proporsi GTK bersertifikat (Jenjang SD)	49,85 persen	50 persen		51 persen		52 persen		53 persen		53 persen		Dinas Pendidikan
1.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Jenjang SD dengan Kualifikasi Minimal DIV/S1	93,85 persen	93,89 persen		93,94 persen		93,99 persen		94,04 persen		94,04 persen		Dinas Pendidikan
1.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Proporsi GTK bersertifikat (Jenjang SMP)	71,98 persen	72,32 persen		72,80 persen		73,32 persen		73,63 persen		73,63 persen		Dinas Pendidikan



## Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMP dengan Kualifikasi Minimal DIV/S1	95,86 persen	95,86 persen		95,86 persen		95,86 persen		95,86 persen		95,86 persen		Dinas Pendidikan
1.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	85,48 persen	86 persen		86,5 persen		87 persen		87,5 persen		87,5 persen		Dinas Pendidikan
1.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase PKBM yang Terakreditasi	30,40 persen	34,78 persen		34,78 persen		39,13 persen		39,13 persen		39,13 persen		Dinas Pendidikan
1.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase SD yang Terakreditasi A	47 persen	50 persen		55 persen		60 persen		65 persen		65 persen		Dinas Pendidikan
1.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase SMP yang Terakreditasi A	64,50 persen	65 persen		67,50 persen		70 persen		70 persen		70 persen		Dinas Pendidikan

## Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan asesmen nasional	1,88 nilai	2,08 nilai		2,28 nilai		2,38 nilai		2,48 nilai		2,48 nilai		Dinas Pendidikan
1.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	1,87 nilai	2,07 nilai		2,27 nilai		2,37 nilai		2,47 nilai		2,47 nilai		Dinas Pendidikan
1.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan asesmen nasional	1,88 nilai	2,08 nilai		2,28 nilai		2,38 nilai		2,48 nilai		2,48 nilai		Dinas Pendidikan
1.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional	1,75 nilai	1,95 nilai		2,05 nilai		2,25 nilai		2,35 nilai		2,35 nilai		Dinas Pendidikan
1.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Standar kompetensi pendidikan PAUD	54,11 persen	55 persen		55,5 persen		56 persen		56,5 persen		56,5 persen		Dinas Pendidikan

## Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Proporsi kepala satuan PAUD berijazah minimal S1/DIV	68,75 persen	69 persen		70 persen		71 persen		72 persen		72 persen		Dinas Pendidikan
1.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Proporsi PTK dalam Diklat Teknis PAUD	31 persen	33 persen		35 persen		37 persen		39 persen		39 persen		Dinas Pendidikan
1.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang diterapkan sesuai standar	100 persen	100 persen	92.924.000	100 persen	100.000.000	100 persen	110.000.000	100 persen	120.000.000	100 persen	422.924.000	Dinas Pendidikan
1.01.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang diterapkan sesuai standar	100 persen	100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		Dinas Pendidikan
1.01.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru terhadap Murid Jenjang PAUD	1 : 7 rasio	1 : 7 rasio	50.000.000	1 : 7 rasio	75.000.000	1 : 7 rasio	100.000.000	1 : 7 rasio	100.000.000	1 : 7 rasio	325.000.000	Dinas Pendidikan

## Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	DENGAN PELAYANAN DASAR															
1.01.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru terhadap Murid Jenjang SD	1 : 27 rasio	1 : 27 rasio		1 : 27 rasio		1 : 27 rasio		1 : 27 rasio		1 : 27 rasio		Dinas Pendidikan
1.01.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru terhadap Murid Jenjang SMP	1 : 29 rasio	1 : 29 rasio		1 : 29 rasio		1 : 29 rasio		1 : 29 rasio		1 : 29 rasio		Dinas Pendidikan
1.01.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru terhadap Warga Belajar Jenjang Pendidikan Nonformal/Ke setaraan	1 : 7 rasio	1 : 7 rasio		1 : 7 rasio		1 : 7 rasio		1 : 7 rasio		1 : 7 rasio		Dinas Pendidikan
1.01.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio pengawas dan penilik PAUD	1,03 persen	3,20 persen		3,20 persen		3,20 persen		3,20 persen		3,20 persen		Dinas Pendidikan
1.01.05	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase lembaga pendidikan yang mendapatkan	100 persen	100 persen	20.000.000	100 persen	30.000.000	100 persen	40.000.000	100 persen	50.000.000	100 persen	140.000.000	Dinas Pendidikan

## Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	DENGAN PELAYANAN DASAR			izin												
1.01.05	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase lembaga pendidikan yang terbina dan terkendali	100 persen	100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		Dinas Pendidikan
1.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Cibabat	77,83 indeks	80,00 indeks	145.000.000.000	80,25 indeks	145.000.000.000	80,50 indeks	145.000.000.000	81,00 indeks	145.000.000.000	81,00 indeks	580.000.000.000	RSUD CIBABAT
1.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	196,08 angka	115,1 angka	39.237.167.775	115,0 angka	43.223.141.100	114,9 angka	43.609.299.100	114,8 angka	43.645.583.100	114,8 angka	169.715.191.075	Dinas Kesehatan
1.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	7,06 angka	6,3 angka		6,2 angka		6,1 angka		6,0 angka		6,0 angka		Dinas Kesehatan
1.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN	Cakupan Imunisasi Booster (12-23 bulan)	N/A persen	66,1 persen		70,8 persen		75,5 persen		80,2 persen		80,2 persen		Dinas Kesehatan

## Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	DENGAN PELAYANAN DASAR		DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													
1.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Imunisasi Dasar lengkap (IDL)	91,89 persen	92,5 persen		93,5 persen		94,0 persen		95,0 persen		95,0 persen		Dinas Kesehatan
1.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Jamaah Haji yang mendapat pemantauan kesehatan haji	100 persen	100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		Dinas Kesehatan
1.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Puskesmas dengan capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) di atas 0,28	N/A persen	8 persen		9 persen		10 persen		11 persen		11 persen		Dinas Kesehatan
1.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Rumah Tangga yang ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	56 persen	56 persen		58 persen		59 persen		60 persen		60 persen		Dinas Kesehatan
1.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN	Cakupan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	13 angka	13 angka		13 angka		13 angka		13 angka		13 angka		Dinas Kesehatan

## Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	DENGAN PELAYANAN DASAR		DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengembangan di puskesmas												
1.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Capaian Universal Health Coverage (UHC)	98,64 persen	98,64 persen		98,65 persen		98,70 persen		99,00 persen		99,00 persen		Dinas Kesehatan
1.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Case Fatality Rate (CFR) Demam Berdarah Dengue (DBD)	3,6 angka	1 angka		1 angka		1 angka		1 angka		1 angka		Dinas Kesehatan
1.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insidensi HIV per 1000 Penduduk	N/A kasus	0,07 kasus		0,06 kasus		0,05 kasus		0,04 kasus		0,04 kasus		Dinas Kesehatan
1.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insidensi TB per 100.000 Penduduk	N/A kasus	302 kasus		302 kasus		296 kasus		294 kasus		294 kasus		Dinas Kesehatan
1.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN	Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani	100 persen	100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		Dinas Kesehatan

## Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	DENGAN PELAYANAN DASAR		DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													
1.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kelurahan Open Defecation Free (ODF)	26,6 persen	80 persen		86,6 persen		93,3 persen		100 persen		100 persen		Dinas Kesehatan
1.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pelayanan puskesmas terhadap penyakit yang diduga akibat kerja	35 persen	35 persen		40 persen		45 persen		50 persen		50 persen		Dinas Kesehatan
1.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase peserta pemeriksaan kebugaran yang mendapat konseling PNS	100 persen	100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		Dinas Kesehatan
1.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase puskesmas terakreditasi minimal Utama	53,85 persen	61,54 persen		61,54 persen		61,54 persen		69,23 persen		69,23 persen		Dinas Kesehatan
1.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN	Persentasi Pengadaan Obat sesuai Formularium Nasional	100 persen	100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		Dinas Kesehatan



## Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	DENGAN PELAYANAN DASAR		DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	(FORNAS)												
1.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting pada Balita	10,18 persen	10,10 persen		10,00 persen		9,90 persen		9,80 persen		9,80 persen		Dinas Kesehatan
1.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	98,37 persen	100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		Dinas Kesehatan
1.02.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga sesuai standar	100 persen	100 persen	901.132.400	100 persen	901.132.400	100 persen	666.327.100	100 persen	666.327.100	100 persen	3.134.919.000	Dinas Kesehatan
1.02.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana kefarmasian dan penyediaan makanan dan minuman sesuai standar	100 persen	100 persen	101.179.000	100 persen	101.179.000	100 persen	101.179.000	100 persen	101.179.000	100 persen	404.716.000	Dinas Kesehatan
1.02.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan	100 persen	100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		Dinas Kesehatan

## Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		MAKANAN MINUMAN	(TPM) yang mendapat pengawasan eksternal												
1.02.05	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan strata RW Siaga aktif minimal Purnama	68,91 persen	73,40 persen	57.178.000	78,20 persen	57.178.000	83,10 persen	57.178.000	87,80 persen	57.178.000	87,80 persen	228.712.000	Dinas Kesehatan
1.03.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase kapasitas sungai dan bangunan penampung air	96,90 persen	97,06 persen	4.681.735.088	97,06 persen	4.781.735.088	97,31 persen	4.731.735.088	97,31 persen	4.781.735.088	97,31 persen	18.976.940.352	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat	80 persen	80 persen	653.488.325	80 persen	653.488.325	80 persen	653.488.325	80 persen	653.488.325	80 persen	2.613.953.300	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum	69,82 persen	68,59 persen	18.365.990.640	69,20 persen	9.039.989.566	71,02 persen	14.348.445.231	73,58 persen	8.992.189.878	73,58 persen	50.746.615.315	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase penanganan timbulan sampah	73 persen	72 persen	250.000.000	71 persen	250.000.000	70 persen	250.000.000	70 persen	250.000.000	70 persen	1.000.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

## Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	DENGAN PELAYANAN DASAR	PENATAAN RUANG	REGIONAL													
1.03.05	URUSAN PEMERINTAH AN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	80,55 persen	81,28 persen	15.684.739.250	81,81 persen	11.982.482.764	82,34 persen	13.240.843.099	83,02 persen	12.895.000.000	83,02 persen	53.803.065.113	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.06	URUSAN PEMERINTAH AN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase luas genangan di daerah rawan genangan dan di daerah tidak rawan genangan	0,6 persen	0,57 persen	2.314.776.588	0,56 persen	2.314.776.588	0,56 persen	2.314.776.588	0,55 persen	2.314.776.588	0,55 persen	9.259.106.352	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.08	URUSAN PEMERINTAH AN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung Negara dengan Kondisi Baik	72,5 persen	73 persen	9.329.800.000	73,5 persen	1.265.000.000	74 persen	14.465.614.800	74,5 persen	16.265.000.000	74,5 persen	41.325.414.800	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.10	URUSAN PEMERINTAH AN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN	Persentase tingkat kemantapan jalan	94,87 persen	95,12 persen	26.099.000.000	95,37 persen	15.700.000.000	95,62 persen	18.150.000.000	96 persen	16.800.000.000	97 persen	76.749.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.11	URUSAN PEMERINTAH AN WAJIB YANG BERKAITAN	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase jasa konstruksi tenaga terampil yang	13,44 persen	14,86 persen	1.000.000.000	17,62 persen	1.000.000.000	19,16 persen	1.000.000.000	20,69 persen	1.000.000.000	20,69 persen	4.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

## Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	DENGAN PELAYANAN DASAR	PENATAAN RUANG		bersertifikasi												
1.03.12	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	62 persen	62,2 persen	2.150.000.000	62,4 persen	1.375.000.000	62,6 persen	1.000.000.000	62,8 persen	1.000.000.000	62,8 persen	5.525.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.04.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Tingkat Hunian	100 persen	100 persen	4.347.896.960	100 persen	4.347.896.960	100 persen	4.347.896.960	100 persen	4.347.896.960	100 persen	17.391.587.840	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Korban Bencana Yang dibangun/ Direhabilitasi	100 persen	100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan dasar rutilahu	100 persen	100 persen	3.683.667.500	100 persen	5.604.721.430	100 persen	5.423.339.272	100 persen	4.108.041.923	100 persen	18.819.770.125	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah layak huni di luar kawasan kumuh	100 persen	100 persen	893.342.500	100 persen	893.342.500	100 persen	893.342.500	100 persen	893.342.500	100 persen	3.573.370.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

## Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	DENGAN PELAYANAN DASAR	KAWASAN PERMUKIMAN														
1.04.05	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase sarana permukiman yang tersedia PSU penunjang fungsi hunian	N/A persen	100 persen	11.000.000.000	100 persen	11.216.590.547	100 persen	11.344.715.547	100 persen	11.476.044.547	100 persen	45.037.350.641	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.05.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	100 persen	100 persen	2.616.486.200	100 persen	6.623.079.341	100 persen	2.649.079.341	100 persen	2.764.079.341	100 persen	14.652.724.223	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.05.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara (SPM)	100 persen	100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

## Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.05.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	100 persen	100 persen	2.980.000.000	100 persen	3.030.000.000	100 persen	2.980.000.000	100 persen	3.031.000.000	100 persen	12.021.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Pelayanan informasi kebencanaan di kawasan rawan bencana	100 persen	100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 persen	100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		Badan Penanggulangan Bencana Daerah

## Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.05.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal	100 persen	100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran	100 persen	100 persen	1.860.188.200	100 persen	1.866.188.200	100 persen	1.890.188.200	100 persen	1.905.188.200	100 persen	7.521.752.800	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.05.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase korban yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	100 persen	100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.06.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase LKS yang mendapatkan penguatan kelembagaan	65,38 persen	69,23 persen	2.018.899.000	76,92 persen	2.018.899.000	92,31 persen	2.018.899.000	100 persen	2.100.001.800	100 persen	8.156.698.800	Dinas Sosial

## Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	DENGAN PELAYANAN DASAR															
1.06.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PPKS dan PSKS yang dididik, yang mendapatkan pelatihan dan bimbingan teknis	20 persen	20 persen		20 persen		20 persen		20 persen		20 persen		Dinas Sosial
1.06.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100 persen	100 persen	1.528.411.900	100 persen	1.528.411.900	100 persen	1.591.200.000	100 persen	1.883.342.100	100 persen	6.531.365.900	Dinas Sosial
1.06.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100 persen	100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		0 persen		Dinas Sosial
1.06.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 persen	100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		Dinas Sosial
1.06.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang	100 persen	100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		Dinas Sosial



## Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			terpenuhi hak dasarnya.												
1.06.05	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Pemutakhiran data DTKS, PPKS dan Bansos	20 persen	20 persen	4.309.430.000	20 persen	4.309.430.000	20 persen	4.309.430.000	20 persen	4.650.553.000	20 persen	17.578.843.000	Dinas Sosial
1.06.05	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Anak terlantar yang tertangani	100 persen	100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		Dinas Sosial
1.06.05	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase KPM dalam DTKS yang masuk program PBI JK APBN dan APBD	30 persen	32 persen		34 persen		36 persen		38 persen		38 persen		Dinas Sosial
1.06.05	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase KPM PKH yang graduasi	3,75 persen	4 persen		4,25 persen		4,5 persen		4,75 persen		4,75 persen		Dinas Sosial
1.06.05	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS dengan kategori terlantar yang mendapat	100 persen	100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		Dinas Sosial

## Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	DENGAN PELAYANAN DASAR			jaminan sosial daerah												
1.06.06	URUSAN PEMERINTAH AN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	100 persen	100 persen	679.667.200	100 persen	679.667.200	100 persen	779.667.200	100 persen	944.750.400	100 persen	3.083.752.000	Dinas Sosial
1.06.06	URUSAN PEMERINTAH AN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase SDM relawan kebencanaan yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100 persen	100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		Dinas Sosial
2.07.02	URUSAN PEMERINTAH AN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	N/A persen	90 persen	54.000.000	90 persen	54.000.000	90 persen	35.000.000	90 persen	35.000.000	90 persen	178.000.000	Dinas Tenaga Kerja
2.07.03	URUSAN PEMERINTAH AN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	14,08 persen	15 persen	1.959.204.000	15 persen	1.959.204.000	15 persen	1.329.520.823	15 persen	1.197.865.542	15 persen	6.445.794.365	Dinas Tenaga Kerja

## Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.07.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	jumlah tenaga kerja siap pakai yang disalurkan dan ditempatkan	1037 orang	1000 orang	809.533.800	1000 orang	766.119.043	1000 orang	721.261.666	1000 orang	732.294.468	1000 orang	3.029.208.977	Dinas Tenaga Kerja
2.07.05	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	34,19 persen	35 persen	1.397.262.200	37 persen	1.417.262.200	39 persen	1.264.264.200	41 persen	1.264.264.200	41 persen	5.343.052.800	Dinas Tenaga Kerja
2.08.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	66,82 persen	69 persen	899.121.000	69 persen	899.121.000	69 persen	1.199.121.000	69 persen	899.121.000	69 persen	3.896.484.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapat penanganan terpadu	100 persen	100 persen	301.700.000	100 persen	301.700.000	100 persen	825.550.000	100 persen	301.700.000	100 persen	1.730.650.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Keluarga yang mendapat program peningkatan kualitas keluarga	100 persen	100 persen	443.600.000	100 persen	443.600.000	100 persen	543.600.000	100 persen	443.600.000	100 persen	1.874.400.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

## Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	DASAR	PERLINDUNGAN ANAK														Keluarga Berencana
2.08.05	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase perangkat daerah yang memiliki data terpilah gender	70 persen	70 persen	75.000.000	75 persen	75.000.000	80 persen	100.000.000	85 persen	75.000.000	85 persen	325.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.06	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase anak yang terlayani kebutuhan dasar	85 persen	87 persen	307.686.700	89 persen	307.686.700	91 persen	407.686.700	93 persen	307.686.700	93 persen	1.330.746.800	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.07	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat penanganan terpadu	100 persen	100 persen	125.875.800	100 persen	125.875.800	100 persen	150.875.800	100 persen	125.875.800	100 persen	528.503.200	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.09.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rata-rata ketersediaan Energi di kota Cimahi	2318 kkal/kap/hari & gr/kap/hari	2350 kkal/kap/hari & gr/kap/hari	850.892.801	2350 kkal/kap/hari & gr/kap/hari	710.892.801	2350 kkal/kap/hari & gr/kap/hari	850.892.801	2380 kkal/kap/hari & gr/kap/hari	750.892.801	2380 kkal/kap/hari & gr/kap/hari	3.163.571.204	Dinas Pangan dan Pertanian

## Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPD		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2.09.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rata-rata ketersediaanProtein di kota Cimahi	67,8 kkal/kap/hari & gr/kap/hari	67,9 kkal/kap/hari & gr/kap/hari		67,9 kkal/kap/hari & gr/kap/hari		67,9 kkal/kap/hari & gr/kap/hari		68 kkal/kap/hari & gr/kap/hari		68 kkal/kap/hari & gr/kap/hari		Dinas Pangan dan Pertanian	
2.09.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rata-rata Konsumsi Energi di Kota Cimahi	2093,9 kkal/kap/hari & gr/kap/hari	2100 kkal/kap/hari & gr/kap/hari		2100 kkal/kap/hari & gr/kap/hari		2100 kkal/kap/hari & gr/kap/hari		2100 kkal/kap/hari & gr/kap/hari		2100 kkal/kap/hari & gr/kap/hari		Dinas Pangan dan Pertanian	
2.09.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rata-rata Konsumsi Protein di Kota Cimahi	2093,9 kkal/kap/hari & gr/kap/hari	57 kkal/kap/hari & gr/kap/hari		57 kkal/kap/hari & gr/kap/hari		57 kkal/kap/hari & gr/kap/hari		57 kkal/kap/hari & gr/kap/hari		57 kkal/kap/hari & gr/kap/hari		Dinas Pangan dan Pertanian	
2.09.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase kasus kerawanan pangan yang tertangani bagi masyarakat miskin	N/A persen	100 persen	178.000.000	100 persen	140.000.000	100 persen	178.000.000	100 persen	178.000.000	100 persen	674.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian	
2.09.05	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan segar yang aman dikonsumsi (%)	70 persen	70 persen	100.000.000	70 persen	100.000.000	70 persen	97.300.000	70 persen	100.000.000	70 persen	397.300.000	Dinas Pangan dan Pertanian	

## Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.10.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Sengketa Yang difasilitasi	N/A persen	25 persen	30.000.000	50 persen	100.000.000	75 persen	100.000.000	100 persen	100.000.000	100 persen	330.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2.10.05	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Peyelesaian ganti rugi dan santunan tanah yang di fasilitasi	N/A persen	25 persen	-	50 persen	100.000.000	75 persen	100.000.000	100 persen	100.000.000	100 persen	300.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2.10.08	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase termanfaatnya tanah kosong sesuai dengan fungsinya	N/A persen	25 persen	-	50 persen	100.000.000	75 persen	100.000.000	100 persen	100.000.000	100 persen	300.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2.10.10	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Penatagunaan tanah Aset Pemkot	N/A persen	25 persen	40.000.000	50 persen	200.000.000	75 persen	200.000.000	100 persen	200.000.000	100 persen	640.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2.11.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang dipedomani	100 persen	100 persen	550.000.000	100 persen	900.000.000	100 persen	200.000.000	100 persen	500.000.000	100 persen	2.150.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

## Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.11.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen analisa kualitas lingkungan yang dijadikan acuan	N/A persen	100 persen	3.242.000.000	100 persen	3.042.000.000	100 persen	2.742.000.000	100 persen	2.742.000.000	100 persen	11.768.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luasan kehati Kota Cimahi yang dikelola	1,13 persen	1,14 persen	1.450.000.000	1,15 persen	1.605.000.000	1,16 persen	1.770.875.000	1,17 persen	1.948.246.000	1,17 persen	6.774.121.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pelaku usaha yang memenuhi ketentuan teknis penyimpanan limbah B3	75 persen	55 persen	110.000.000	58 persen	110.000.000	60 persen	110.000.000	63 persen	110.000.000	63 persen	440.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase penanggung jawab dan/atau kegiatan yang memenuhi ketaatannya terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah	50 persen	50 persen	1.180.000.000	50 persen	1.180.000.000	50 persen	1.180.000.000	50 persen	1.180.000.000	50 persen	4.720.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

## Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Cimahi												
2.11.10	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100 persen	100 persen	185.000.000	100 persen	185.000.000	100 persen	185.000.000	100 persen	185.000.000	100 persen	740.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	94 persen	99 persen	27.613.566.000	99 persen	35.233.120.000	100 persen	32.474.420.000	100 persen	36.641.165.000	100 persen	131.962.271.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.12.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk	98,29 persen	99 persen	519.000.000	99 persen	531.000.000	99 persen	564.000.000	99 persen	580.000.000	99 persen	2.194.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak	86 persen	90 persen		92 persen		94 persen		96 persen		96 persen		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



## Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.12.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun	95,23 persen	96 persen	614.000.000	96,5 persen	619.000.000	97 persen	645.000.000	97,5 persen	654.000.000	97,5 persen	2.532.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	100 persen	100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan	100 persen	100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan non muslim pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	100 persen	100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.12.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data kependudukan melalui hak akses data	N/A persen	30 persen	118.000.000	45 persen	122.000.000	60 persen	126.000.000	75 persen	132.000.000	75 persen	498.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	SLA berjalannya SIAK dan KTP-el	N/A persen	90 persen	570.000.000	91 persen	587.500.000	93 persen	685.000.000	95 persen	725.000.000	95 persen	2.567.500.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.05	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan profil kependudukan	100 persen	100 persen	30.000.000	100 persen	32.000.000	100 persen	34.000.000	100 persen	35.000.000	100 persen	131.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan yang terbina	100 persen	100 persen	188.788.000	100 persen	188.788.000	100 persen	288.788.000	100 persen	188.788.000	100 persen	855.152.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.13.05	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA	Persentase Lembaga Masyarakat yang Diberdayakan	N/A persen	100 persen	2.008.595.000	100 persen	2.008.595.000	100 persen	2.108.595.000	100 persen	2.008.595.000	100 persen	8.134.380.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

## Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	DENGAN PELAYANAN DASAR	MASYARAKAT DAN DESA	ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Aktif												Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rata-rata Jumlah anak/keluarga	2,3 jiwa	2,3 jiwa	596.354.200	2,3 jiwa	596.354.200	2,3 jiwa	696.354.200	2,3 jiwa	596.354.200	0 jiwa	2.485.416.800	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Unmeet need (Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi)	13 persen	13 persen		12,5 persen		12 persen		11,5 persen		11 persen		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rasio Akseptor KB MKJP (Memakai Kontrasepsi Jangka Panjang)	34,92 persen	34,92 persen	1.752.064.000	35,92 persen	1.752.064.000	36,92 persen	1.952.064.000	37,92 persen	1.752.064.000	38,92 persen	7.208.256.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	persentase kepesertaan keluarga dalam BKB	46,49 persen	47 persen	460.000.000	47,5 persen	460.000.000	48 persen	560.000.000	48,5 persen	460.000.000	0 persen	1.940.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

## Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.14.04	URUSAN PEMERINTAH AN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKL	29,72 persen	29,72 persen		29,72 persen		30 persen		30 persen		30 persen		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04	URUSAN PEMERINTAH AN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKR	26,95 persen	26,95 persen		27,5 persen		28 persen		28,5 persen		29 persen		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04	URUSAN PEMERINTAH AN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan kepesertaan keluarga dalam PIK R	9,12 persen	9,12 persen		9,16 persen		9,2 persen		9,24 persen		9,28 persen		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04	URUSAN PEMERINTAH AN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan kepesertaan keluarga dalam UPPKA	0,87 persen	0,87 persen		0,9 persen		0,93 persen		0,96 persen		1 persen		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04	URUSAN PEMERINTAH AN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENGENDALIAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA	Cakupan PUS (Pasangan Usia Subur) < 20 tahun	0,36 persen	0,36 persen		0,35 persen		0,34 persen		0,33 persen		0,32 persen		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

## Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	DENGAN PELAYANAN DASAR	PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	SEJAHTERA (KS)													Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.15.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Titik Kemacetan Ruas Jalan Arteri Sekunder yang tertangani	50 persen	50 persen	9.386.733.500	64 persen	9.946.733.500	64 persen	9.312.060.500	64 persen	9.307.395.000	64 persen	37.952.922.500	Dinas Perhubungan
2.15.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang	N/A persen	50 persen		55 persen		60 persen		65 persen		65 persen		Dinas Perhubungan
2.15.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kendaraan Wajib Uji yang Layak	83 persen	83 persen		86 persen		89 persen		92 persen		92 persen		Dinas Perhubungan
2.15.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Konektivitas Kota	0,64 rasio	0,64 rasio		0,64 rasio		0,64 rasio		0,64 rasio		0,64 rasio		Dinas Perhubungan
2.16.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran	N/A persen	60 persen	2.107.129.800	65 persen	2.087.129.800	70 persen	2.003.644.608	74 persen	1.980.817.104	74 persen	8.178.721.312	Dinas Komunikasi dan Informatika

## Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	DENGAN PELAYANAN DASAR	INFORMATIK A		Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota												
2.16.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIK A	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,5 Nilai Indeks	2,5 Nilai Indeks	3.430.088.800	2,75 Nilai Indeks	3.375.088.800	3,00 Nilai Indeks	3.240.085.248	3,25 Nilai Indeks	3.202.951.360	3,25 Nilai Indeks	13.248.214.208	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.17.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah koperasi yang diawasi/diperiksa	150 Koperasi	25 Koperasi	85.000.000	25 Koperasi	80.000.000	25 Koperasi	80.000.000	25 Koperasi	80.000.000	250 Koperasi	325.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
2.17.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	41,25 persen	30 persen	411.235.600	31 persen	255.000.000	32 persen	255.000.000	33 persen	255.000.000	33 persen	1.176.235.600	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
2.17.05	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mendapatkan fasilitasi Pendidikan	11,15 persen	31,14 persen	200.000.000	40,13 persen	200.000.000	48,54 persen	200.000.000	56,42 persen	200.000.000	56,42 persen	800.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan

## Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	DENGAN PELAYANAN DASAR	KECIL, DAN MENENGAH		dan Pelatihan												Perindustrian
2.17.06	URUSAN PEMERINTAH AN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	29,74 persen	31 persen	392.608.700	33 persen	399.000.000	35 persen	371.000.000	37 persen	401.000.000	37 persen	1.563.608.700	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
2.17.07	URUSAN PEMERINTAH AN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase kenaikan omset dan aset UMKM	16 persen	21 persen	1.475.000.000	26 persen	1.525.000.000	31 persen	1.480.000.000	36 persen	1.485.000.000	29 persen	5.965.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
2.17.07	URUSAN PEMERINTAH AN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan fasilitasi dasar untuk memulai usaha	N/A persen	5 persen	500.000.000	5 persen	560.000.000	5 persen	500.000.000	5 persen	500.000.000	20 persen	2.060.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
2.17.08	URUSAN PEMERINTAH AN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase kenaikan omset dan aset UMKM	16 persen	21 persen	1.000.000.000	26 persen	850.000.000	31 persen	850.000.000	36 persen	850.000.000	29 persen	3.550.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
2.18.02	URUSAN PEMERINTAH AN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah dokumen pengembangan iklim penanaman	N/A dokumen	8 dokumen	1.050.000.000	8 dokumen	1.050.000.000	8 dokumen	850.000.000	8 dokumen	850.000.000	32 dokumen	3.800.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

## Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	DENGAN PELAYANAN DASAR			modal												Pintu
2.18.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Potensi Investasi Daerah yang dipromosikan	N/A	2,43 persen	700.000.000	2,43 persen	700.000.000	2,43 persen	850.000.000	2,43 persen	1.200.000.000	9,72 persen	750.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A Nilai	84,5 Nilai	1.250.000.000	85 Nilai	1.250.000.000	85,5 Nilai	1.250.000.000	86 Nilai	1.250.000.000	86 Nilai	5.000.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Perusahaan yang Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	509 perusahaan	530 perusahaan	300.000.000	540 perusahaan	300.000.000	550 perusahaan	300.000.000	560 perusahaan	300.000.000	560 perusahaan	1.200.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola dengan sistem informasi penanaman modal	21 jenis	22 jenis	700.000.000	23 jenis	700.000.000	24 jenis	700.000.000	25 jenis	700.000.000	25 jenis	2.800.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.19.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING	Persentase organisasi pemuda yg aktif	70 persen	71 persen	1.200.000.000	72 persen	2.000.000.000	73 persen	2.200.000.000	74 persen	2.500.000.000	74 persen	7.900.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan



## Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	N DAN OLAHRAGA	KEPEMUDAAN													dan Olahraga
2.19.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase sumber daya olahraga yang terbina	0 persen	53 persen	15.415.676.235	55 persen	12.552.360.703	57 persen	8.551.930.776	59 persen	10.980.168.514	59 persen	47.500.136.228	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2.19.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase sarana dan prasarana olahraga yang baik yang dimiliki pemerintah daerah Kota Cimahi	0 persen	50 persen		75 persen		75 persen		75 persen		75 persen	-	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2.19.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase anggota pramuka yang dibina (anggota kwarcab)	0 persen	13 persen	400.000.000	14 persen	400.000.000	15 persen	300.000.000	16 persen	400.000.000	16 persen	1.500.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2.20.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki ketersediaan data statistik sesuai dengan prinsip satu data	27 persen	37 persen	263.938.600	47 persen	263.938.600	67 persen	253.381.056	87 persen	250.847.200	87 persen	1.032.105.456	Dinas Komunikasi dan Informatika

## Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.21.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	30,00 persen	33,33 persen	481.964.000	50 persen	446.500.000	80 persen	428.640.000	100 persen	424.353.600	100 persen	1.781.457.600	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.22.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase kebudayaan yang dikembangkan	0 persen	25 persen	1.550.000.000	50 persen	1.800.000.000	75 persen	2.015.000.000	100 persen	1.890.000.000	100 persen	7.255.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2.22.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	N/A persen	25 persen	150.000.000	50 persen	250.000.000	75 persen	250.000.000	100 persen	250.000.000	100 persen	900.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2.22.04	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase SDM Sejarah Lokasi yang dibina	0 persen	0 persen	-	25 persen	50.000.000	50 persen	50.000.000	75 persen	50.000.000	75 persen	150.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2.22.05	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar budaya yang dilestarikan	0 persen	36 persen	400.000.000	56 persen	595.000.000	76 persen	734.901.991	100 persen	690.000.000	100 persen	2.419.901.991	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

## Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	DASAR															
2.23.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Peningkatan pemustaka aktif	1,81 persen	4 persen	940.000.000	5 persen	990.000.000	5 persen	765.000.000	10 persen	1.140.000.000	10 persen	3.835.000.000	Dinas Arsip Daerah
2.24.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Indeks LAKI	35 Indeks	37 Indeks	618.826.247	50 Indeks	950.000.000	55 Indeks	622.328.271	60 Indeks	998.524.696	60 Indeks	3.189.679.214	Dinas Arsip Daerah
3.25.04	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi ikan konsumsi (ton)	278,9 ton	280 ton	653.864.100	290 ton	591.000.000	300 ton	621.000.000	310 ton	629.158.200	310 ton	2.495.022.300	Dinas Pangan dan Pertanian
3.25.04	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi ikan hias (dalam juta ekor)	2,312 juta ekor	2,35 juta ekor		2,375 juta ekor		2,38 juta ekor		2,4 juta ekor		2,4 juta ekor		Dinas Pangan dan Pertanian
3.25.06	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan jumlah ikan yang diolah menjadi produk hasil	1 persen	1 persen	94.524.600	2 persen	94.524.600	3 persen	94.524.600	4 persen	94.524.600	4 persen	378.098.400	Dinas Pangan dan Pertanian
3.26.02	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK	Jumlah daya tarik wisata yang terkelola	N/A lokasi	3 lokasi	2.209.293.000	2 lokasi	2.796.000.000	2 lokasi	1.796.000.000	2 lokasi	296.000.000	9 lokasi	7.097.293.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata,

## Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		PARIWISATA	DESTINASI PARIWISATA	dengan baik												Kepemudaan dan Olahraga
3.26.03	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah destinasi yang terpromosikan	N/A lokasi	3 lokasi	100.000.000	3 lokasi	251.000.000	3 lokasi	251.000.000	2 lokasi	251.000.000	11 lokasi	853.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.04	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	N/A jenis	3 jenis	300.000.000	0 Jenis	-	0 Jenis	-	0 Jenis	-	3 jenis	300.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.04	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah Sub Sektor Ekraf yang difasilitasi HAKI	N/A jenis	3 jenis		0 Jenis		0 Jenis		0 Jenis		3 jenis		Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.05	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah SDM sub sektor ekraf yang dibina	N/A orang	50 orang	-	50 orang	787.204.000	50 orang	797.066.000	50 orang	787.204.000	200 orang	2.371.474.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.05	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah SDM Kepariwisataan yang dibina	N/A orang	80 orang		80 orang		80 orang		90 orang		330 Orang		Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

## Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.27.02	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana pendukung pertanian	N/A persen	100 persen	5.000.000	100 persen	5.000.000	100 persen	5.000.000	100 persen	5.000.000	100 persen	20.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
3.27.03	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian yang disediakan dan dikembangkan	25 persen	30 persen	98.000.000	30 persen	25.000.000	30 persen	4.095.000.000	30 persen	4.095.000.000	30 persen	8.313.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
3.27.04	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	N/A persen	100 persen	813.428.600	100 persen	733.370.500	100 persen	733.370.500	100 persen	747.720.000	100 persen	3.027.889.600	Dinas Pangan dan Pertanian
3.27.06	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase izin usaha pertanian yang dilayani	N/A persen	100 persen	5.000.000	100 persen	5.000.000	100 persen	5.000.000	100 persen	5.000.000	100 persen	20.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
3.27.07	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase jumlah kelompok tani yang naik kelas	10 persen	6 persen	372.028.400	6 persen	270.887.600	6 persen	230.887.600	6 persen	230.887.600	34 persen	1.104.691.200	Dinas Pangan dan Pertanian
3.30.02	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase permohonan rekomendasi tanda daftar gudang yang dilayani	100 persen	100 persen	45.000.000	100 persen	30.000.000	100 persen	30.000.000	100 persen	30.000.000	100 persen	135.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
3.30.03	URUSAN PEMERINTAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM PENINGKATAN	Jumlah pasar rakyat/tradisi	1 pasar	1 pasar	5.634.663.900	1 pasar	4.352.566.882	1 pasar	4.371.824.582	1 pasar	4.082.256.582	2 pasar	18.441.311.946	Dinas Perdagangan,

## Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	AN PILIHAN	AN BIDANG PERDAGANGAN	SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	nal yang dikelola pemerintah sesuai dengan SNI												Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
3.30.04	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting	100 persen	100 persen	425.883.600	100 persen	365.000.000	100 persen	365.000.000	100 persen	365.000.000	100 persen	1.520.883.600	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
3.30.05	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase kenaikan omset UKM IKM selama mengikuti pameran promosi	30 persen	30 persen	632.000.000	30 persen	550.000.000	30 persen	550.000.000	30 persen	550.000.000	30 persen	2.282.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
3.30.06	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP yang ditera/tera ulang	55 persen	57 persen	606.631.900	59 persen	655.000.000	61 persen	627.000.000	65 persen	625.000.000	65 persen	2.513.631.900	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
3.30.07	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase kenaikan omset UKM IKM selama mengikuti P3DN	30 persen	30 persen	370.000.000	30 persen	457.000.000	30 persen	365.000.000	30 persen	365.000.000	30 persen	1.557.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
3.31.02	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah IKM yang Berdaya Saing	N/A IKM	100 IKM	4.779.999.820	120 IKM	4.899.933.500	140 IKM	4.698.091.208	160 IKM	4.672.947.584	160 IKM	19.050.972.112	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
3.31.02	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	PROGRAM PERENCANAAN DAN	Jumlah Sentra Industri Pengolahan	2 Sentra	3 Sentra	250.000.000	3 Sentra	50.000.000	3 Sentra	50.000.000	4 Sentra	50.000.000	4 Sentra	400.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha

## Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		PERINDUSTRIAN	PEMBANGUNAN INDUSTRI													Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
3.31.03	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase permohonan rekomendasi IUI kecil dan menengah yang dilayani	N/A persen	100 persen	60.000.000	100 persen	30.000.000	100 persen	30.000.000	100 persen	30.000.000	100 persen	150.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
3.31.04	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang dikelola di dalam SIINAS	N/A persen	100 persen	172.000.000	100 persen	185.000.000	100 persen	172.000.000	100 persen	160.000.000	100 persen	689.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
3.32.03	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase koordinasi pelaksanaan penempatan transmigrasi	N/A persen	100 persen	30.000.000	100 persen	21.144.178	-	-	-	-	-	51.144.178	Dinas Tenaga Kerja
4.01.01	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50,00 Nilai		50,50 Nilai		51,00 Nilai		51,50 Nilai		51,50 Nilai		Sekretariat Daerah
4.01.01	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai IKM bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	78 Nilai	78 Nilai		78 Nilai		78 Nilai		78 Nilai		78 Nilai		Sekretariat Daerah
4.01.01	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai IKM pada Bagian Umum	80 Nilai	80 Nilai		80 Nilai		80 Nilai		80 Nilai		80 Nilai		Sekretariat Daerah
4.01.01	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Kegiatan KDH dan WAKDH yang Terfasilitas	100 persen	100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		Sekretariat Daerah

## Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				dengan Baik												
4.01.01	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase koordinasi dan Konsultasi yang difasilitasi	100 persen	100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		Sekretariat Daerah
4.01.01	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Penguatan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik dan Akuntabilitas	100 persen	100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		Sekretariat Daerah
4.01.01	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100 persen	100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		Sekretariat Daerah
4.01.01	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Penguatan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik dan Akuntabilitas	100 persen	100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		Sekretariat Daerah
4.01.01	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	55.629.890.510	BB Nilai	57.383.614.653	BB Nilai	57.047.197.888	BB Nilai	56.138.329.561	BB Nilai		Sekretariat Daerah
4.01.02	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	84 Nilai	84 Nilai	4.171.178.200	84 Nilai	4.998.062.246	84 Nilai	4.996.344.343	84 Nilai	6.272.518.732	84 Nilai	20.438.103.521	Sekretariat Daerah



## Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.01.02	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kasus Hukum yang terfasilitasi	100 persen	100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		Sekretariat Daerah
4.01.02	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kegiatan Agama dan Pendidikan yang Terlaksana	97 persen	97 persen		97 persen		97 persen		97 persen		97 persen		Sekretariat Daerah
4.01.02	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kegiatan bidang kesehatan P2KBP3A, Sosial, Kepemudaan dan Olahraga	71 persen	71 persen		71 persen		71 persen		71 persen		71 persen		Sekretariat Daerah
4.01.02	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pertanggungjawaban Dokumen Pemerintah Daerah yang Bernilai Baik	100 persen	100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		Sekretariat Daerah
4.01.02	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Produk Hukum Daerah yang terpublikasi	100 persen	100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		Sekretariat Daerah
4.01.02	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Produk Hukum yang Sesuai dengan Mekanisme Pembentukan Produk Hukum Daerah	100 persen	100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		Sekretariat Daerah

## Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.01.02	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Kepuasan Masyarakat Bagian Hukum	77 Nilai	77 Nilai		77 Nilai		77 Nilai		77 Nilai		77 Nilai		Sekretariat Daerah
4.01.02	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase terfasilitasinya bantuan hukum, penyusunan produk hukum sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah dan pendokumentasian produk hukum serta pengelolaan informasi hukum	100 persen	100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		Sekretariat Daerah
4.01.02	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Kepuasan Masyarakat Bagian Pemerintahan	77 Nilai	77 Nilai		77 Nilai		77 Nilai		77 Nilai		77 Nilai		Sekretariat Daerah
4.01.03	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Nilai IKM bagian Administarsi Perekonomian	77 Nilai	77 Nilai	2.376.883.290	77 Nilai	2.645.016.101	77 Nilai	2.847.700.769	77 Nilai	2.937.960.387	77 Nilai	10.807.560.547	Sekretariat Daerah
4.01.03	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Nilai IKM bagian Perekonomian dan SDA	77 Nilai	80 Nilai		81 Nilai		82 Nilai		83 Nilai		83 Nilai		Sekretariat Daerah
4.01.03	UNSUR PENDUKUNG URUSAN	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN	Nilai IKM pada Bagian Administrasi	77 Nilai	77 Nilai		77 Nilai		77 Nilai		77 Nilai		77 Nilai		Sekretariat Daerah

## Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	PEMERINTAHAN		PEMBANGUNAN	Pembangunan												
4.01.03	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Nilai IKM pada bagian pengadaan barang dan jasa	79,05 Nilai	79,05 Nilai		79,05 Nilai		79,05 Nilai		79,05 Nilai		79,05 Nilai		Sekretariat Daerah
4.01.03	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rancangan kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan yang diimplementasikan	100 persen	100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		Sekretariat Daerah
4.01.03	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rancangan kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan yang diimplementasikan	100 persen	100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		Sekretariat Daerah
4.01.03	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Rekomendasi terhadap Perusahaan Daerah yang ditindaklanjuti	100 persen	100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		Sekretariat Daerah
4.02.02	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase anggota DPRD yang mengikuti bimtek	N/A persen	100 persen	35.432.162.500	100 persen	35.462.350.900	100 persen	36.262.350.900	100 persen	36.462.350.900	100 persen	143.619.215.200	Sekretariat DPRD
4.02.02	UNSUR PENDUKUNG	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN	Persentase penetapan	N/A persen	100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		Sekretariat DPRD

## Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	URUSAN PEMERINTAHAN		PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	anggaran tepat waktu												
4.02.02	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase produk hukum daerah yang disahkan	N/A persen	60 persen		60 persen		60 persen		60 persen		60 persen		Sekretariat DPRD
5.01.02	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase unsur masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbang kota	100 persen	100 persen	450.000.000	100 persen	600.000.000	100 persen	575.000.000	100 persen	410.000.000	100 persen	2.035.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.02	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD	100 persen	100 persen	1.175.000.000	100 persen	1.294.500.000	100 persen	1.190.200.000	100 persen	1.164.720.000	100 persen	4.824.420.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.02	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase capaian indikator program	N/A persen	80 persen		85 persen		90 persen		95 persen		95 persen		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.03	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Pemerintahan dan	100 persen	100 persen	1.740.000.000	100 persen	2.195.000.000	100 persen	2.030.097.000	100 persen	1.885.550.000	100 persen	7.850.647.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

## Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Pembangunan Manusia												
5.01.03	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	N/A persen	80 persen		85 persen		90 persen		95 persen		95 persen		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.03	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	100 persen	100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.03	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	N/A persen	80 persen		85 persen		90 persen		95 persen		95 persen		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.03	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan	100 persen	100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

## Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	AN		PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA												Pengembangan Daerah
5.01.03	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN	PERENCANAAN	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	N/A persen	80 persen		85 persen		90 persen		95 persen		95 persen		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.02.02	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase dokumen rencana anggaran yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	100 persen	100 persen	1.291.637.100	100 persen	1.291.637.100	100 persen	1.349.637.100	100 persen	1.275.000.000	100 persen	5.207.911.300	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase laporan keuangan yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	100 persen	100 persen	27.050.000.000	100 persen	27.050.000.000	100 persen	26.825.000.000	100 persen	26.875.000.000	100 persen	107.800.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase laporan Barang Milik Daerah (BMD) yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	100 persen	100 persen	1.800.000.000	100 persen	1.600.000.000	100 persen	1.815.231.000	100 persen	1.400.000.000	100 persen	6.615.231.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

## Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.02.04	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Target Pajak Daerah	13,18 persen	3 persen	2.895.000.000	3 persen	4.071.747.000	3 persen	3.852.536.000	3 persen	3.831.507.000	3 persen	14.650.790.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5.02.04	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi Pajak Daerah	117,74 persen	100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5.02.04	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH									0 jenis				
5.03.02	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN	KEPEGAWAI AN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Survey Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Kepegawaian)	79,00 Nilai	79,25 Nilai	1.254.000.000	79,50 Nilai	1.517.000.000	79,75 Nilai	1.935.000.000	80,00 Nilai	1.760.000.000	80,00 Nilai	6.466.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5.03.02	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN	KEPEGAWAI AN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang dijatuhi hukuman disiplin	0,20 persen	0,20 persen	220.000.000	0,19 persen	375.000.000	0,18 persen	620.000.000	0,18 persen	598.000.000	0,18 persen	1.813.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5.03.02	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN	KEPEGAWAI AN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang mengikuti peningkatan kualifikasi pendidikan	2,08 persen	2,12 persen	200.000.000	2,16 persen	265.000.000	2,20 persen	310.000.000	2,25 persen	260.000.000	2,25 persen	1.035.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5.03.02	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN	KEPEGAWAI AN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang melaporkan SKP	78,30 persen	82,22 persen	1.020.000.000	83,23 persen	1.110.000.000	86,33 persen	1.270.000.000	90,64 persen		90,64 persen	3.400.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

## Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.04.02	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	10,11 persen	8,25 persen	2.000.000.000	9,08 persen	2.205.000.000	9,98 persen	2.600.000.000	10,98 persen	1.975.000.000	10,98 persen	8.780.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5.05.02	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pengembangan inovasi	N/A persen	50 persen	565.000.000	60 persen	586.000.000	70 persen	674.545.000	80 persen	750.492.500	80 persen	2.576.037.500	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.05.02	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase penelitian dan pengembangan yang dihasilkan dan didiseminasikan	100 persen	100 persen	505.680.000	100 persen	405.680.000	100 persen	510.680.000	100 persen	410.680.000	100 persen	1.832.720.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
6.01.02	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase hasil pengawasan	71 persen	82 persen	839.335.623	85 persen	642.750.000	88 persen	742.750.000	90 persen	642.750.000	90 persen	2.867.585.623	Inspektorat
6.01.03	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level Kapabilitas APIP	2 level	3 level	666.800.000	3 level	369.698.572	3 level	503.903.572	3 level	344.698.572	3 level	1.885.100.716	Inspektorat
7.01.02	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Cimahi Selatan	88 persen	88 persen	826.156.350	89 persen	867.464.168	90 persen	910.837.376	91 persen	956.379.245	91 persen	3.560.837.139	Kecamatan Cimahi Selatan
7.01.02	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Cimahi	91 persen	91 persen	1.215.088.600	91 persen	1.275.843.030	91 persen	1.339.635.182	91 persen	1.406.616.941	91 persen	5.237.183.753	Kecamatan Cimahi Tengah



## Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			PUBLIK	Tengah												
7.01.02	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Cimahi Utara	91 persen	91 persen		91 persen		91 persen		91 persen		91 persen	-	Kecamatan Cimahi Utara
7.01.02	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase non perizinan yang dilimpahkan ke kecamatan yang dilayani di Kecamatan Cimahi Selatan	100 persen	100 persen	62.099.599	100 persen	65.204.537	100 persen	68.464.764	100 persen	71.888.002	100 persen	267.656.902	Kecamatan Cimahi Selatan
7.01.02	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase non perizinan yang dilimpahkan ke kecamatan yang dilayani di Kecamatan Cimahi Tengah	100 persen	100 persen	316.566.400	100 persen	332.394.720	100 persen	349.014.456	100 persen	366.465.179	100 persen	1.364.440.755	Kecamatan Cimahi Tengah
7.01.02	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase non perizinan yang dilimpahkan ke kecamatan yang dilayani di Kecamatan Cimahi Utara	100 persen	100 persen	20.147.900	100 persen	22.214.000	100 persen	20.147.900	100 persen	20.147.900	100 persen	82.657.700	Kecamatan Cimahi Utara
7.01.03	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang	100 persen	100 persen	3.129.744.081	100 persen	3.286.231.285	100 persen	3.450.542.849	100 persen	3.623.069.992	100 persen	13.489.588.207	Kecamatan Cimahi Selatan

## Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Dilaksanakan di Kecamatan Cimahi Selatan												
7.01.03	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilaksanakan di Kecamatan Cimahi Tengah	100 persen	100 persen	4.573.693.100	100 persen	4.802.377.755	100 persen	5.042.496.643	100 persen	5.294.621.475	100 persen	19.713.188.973	Kecamatan Cimahi Tengah
7.01.03	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilaksanakan di Kecamatan Cimahi Utara	100 persen	100 persen	2.538.763.600	100 persen	2.751.174.800	100 persen	2.618.533.100	100 persen	2.509.533.100	100 persen	10.418.004.600	Kecamatan Cimahi Utara
7.01.03	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase RW yang terfasilitasi dalam Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Cimahi Selatan	100 persen	100 persen	9.778.250.000	100 persen	9.522.162.500	100 persen	7.261.038.065	100 persen	5.642.847.118	100 persen	32.204.297.683	Kecamatan Cimahi Selatan
7.01.03	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase RW yang terfasilitasi dalam Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan	100 persen	100 persen	9.753.060.300	100 persen	9.470.485.548	100 persen	6.929.621.058	100 persen	5.117.816.661	100 persen	31.270.983.567	Kecamatan Cimahi Tengah

## Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				n Masyarakat di Kecamatan Cimahi Tengah												
7.01.03	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase RW yang terfasilitasi dalam Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Cimahi Utara	100 persen	100 persen	7.448.572.450	100 persen	7.488.572.450	100 persen	7.563.134.650	100 persen	7.563.041.950	100 persen	30.063.321.500	Kecamatan Cimahi Utara
7.01.03	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase stakeholder yang terlibat dalam Perencanaan Partisipatif di Kecamatan Cimahi Selatan	85 persen	85 persen	399.640.320	85 persen	419.622.336	85 persen	440.603.453	85 persen	462.633.625	85 persen	1.722.499.734	Kecamatan Cimahi Selatan
7.01.03	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase stakeholder yang terlibat dalam Perencanaan Partisipatif di Kecamatan Cimahi Tengah	85 persen	85 persen	536.785.700	85 persen	563.624.985	85 persen	591.806.234	85 persen	621.396.546	85 persen	2.313.613.465	Kecamatan Cimahi Tengah
7.01.03	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase stakeholder yang terlibat dalam Perencanaan Partisipatif di Kecamatan Cimahi Utara	85 persen	85 persen	239.625.650	85 persen	252.500.000	85 persen	239.625.650	85 persen	239.625.650	85 persen	971.376.950	Kecamatan Cimahi Utara

## Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.04	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kegiatan Monitoring Penanganan trantib di Kecamatan Cimahi Tengah	100 persen	100 persen	5.519.979.900	100 persen	5.795.978.895	100 persen	6.085.777.840	100 persen	6.390.066.732	100 persen	23.791.803.367	Kecamatan Cimahi Tengah
7.01.04	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kegiatan Monitoring Penanganan Trantib yang dilaksanakan di Cimahi selatan	100 persen	100 persen	5.973.742.900	100 persen	6.272.430.045	100 persen	5.586.051.547	100 persen	6.915.354.125	100 persen	24.747.578.617	Kecamatan Cimahi Selatan
7.01.04	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kegiatan Monitoring Penanganan Trantib yang dilaksanakan di Cimahi Utara	100 persen	100 persen	4.771.139.250	100 persen	4.890.500.000	100 persen	4.771.139.250	100 persen	4.771.139.250	100 persen	19.203.917.750	Kecamatan Cimahi Utara
7.01.05	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Jumlah RW yang terfasilitasi dalam PEMILU di Kecamatan Cimahi Selatan	100 persen	100 persen	-	100 persen	442.200.800	100 persen	5.000.000	100 persen	-	100 persen	447.200.800	Kecamatan Cimahi Selatan
7.01.05	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Jumlah RW yang terfasilitasi dalam PEMILU di Kecamatan Cimahi	100 persen	100 persen		100 persen	442.275.412	100 persen		100 persen		100 persen	442.275.412	Kecamatan Cimahi Tengah

## Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Tengah												
7.01.05	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Jumlah RW yang terfasilitasi dalam PEMILU di Kecamatan Cimahi Utara	100 persen	100 persen	-	100 persen	131.700.000	100 persen	-	100 persen	-	100 persen	131.700.000	Kecamatan Cimahi Utara
7.01.05	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan Kepala Daerah di Kecamatan Cimahi Selatan	100 persen	100 persen	379.071.620	100 persen	398.025.201	100 persen	417.926.461	100 persen	438.827.784	100 persen	1.633.851.066	Kecamatan Cimahi Selatan
7.01.05	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan Kepala Daerah di Kecamatan Cimahi Tengah	100 persen	100 persen	656.448.800	100 persen	689.271.240	100 persen	723.734.802	100 persen	759.921.542	100 persen	2.829.376.384	Kecamatan Cimahi Tengah
7.01.05	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	100 persen	100 persen	251.494.400	100 persen	264.775.000	100 persen	251.494.400	100 persen	251.494.400	100 persen	1.019.258.200	Kecamatan Cimahi Utara

## Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			UMUM	Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan Kepala Daerah di Kecamatan Cimahi Utara												
8.01.02	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase ketahanan ideologi dan karakter kebangsaan	N/A persen	100 persen	875.938.550	100 persen	884.549.450	100 persen	875.938.550	100 persen	910.746.581	100 persen	3.547.173.131	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase kaderasi partai politik	N/A persen	100 persen	2.180.000.000	100 persen	58.550.000.000	100 persen	2.281.247.389	100 persen	2.230.000.000	100 persen	65.241.247.389	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu dan Pemilukada	N/A persen	-		77,5 persen		-		-		-		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

## Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.01.04	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan	- persen	100 persen	510.000.000	100 persen	456.853.750	100 persen	535.000.000	100 persen	530.000.000	100 persen	2.031.853.750	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	N/A persen	100 persen	672.704.500	100 persen	682.704.500	100 persen	672.704.500	100 persen	685.000.000	100 persen	2.713.113.500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase wilayah terpantau	100 persen	100 persen	2.160.000.000	100 persen	2.095.000.000	100 persen	2.210.000.000	100 persen	2.255.000.000	100 persen	8.720.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N/A Nilai	70 (BB) Nilai	6.843.396.000	71 (BB) Nilai	8.058.943.000	72 (BB) Nilai	9.091.746.000	73 (BB) Nilai	8.404.313.320	74 (BB) Nilai	32.398.398.320	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN	N/A Indeks	50,00 Indeks		50,50 Indeks		51,00 Indeks		51,50 Indeks		52,00 Indeks		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

## Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N/A Nilai	B Nilai	5.850.170.950	BB Nilai	5.980.888.300	BB Nilai	6.187.722.561	BB Nilai	6.089.610.419	BB Nilai	24.108.392.230	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah	90,69 Nilai	80 Nilai		81 Nilai		82 Nilai		83 Nilai		83 Nilai		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50,00 Nilai		50,50 Nilai		51,00 Nilai		51,50 Nilai		51,50 Nilai		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B Nilai	B Nilai	4.555.140.000	B Nilai	4.560.843.000	B Nilai	4.754.660.000	B Nilai	4.674.613.000	B Nilai	18.545.256.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah	N/A Nilai	B Nilai		B Nilai		B Nilai		B Nilai		B Nilai		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50 Nilai		50,5 Nilai		51 Nilai		51,5 Nilai		0 Nilai		Badan Penanggulangan Bencana Daerah



## Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			A													
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai	19.452.984.900	A Nilai	19.478.906.900	A Nilai	19.952.747.900	A Nilai	20.149.271.000	A Nilai	79.033.910.700	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah	80.45 nilai	80.75 nilai		81.05 nilai		81.35 nilai		81.65 nilai		81.65 nilai		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50.0 Nilai		50.2 Nilai		50.4 Nilai		50.6 Nilai		50.6 Nilai		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N/A Nilai	71 Nilai	9.581.240.906	73 Nilai	9.820.793.000	75 Nilai	10.204.667.000	77 Nilai	10.120.138.000	79 Nilai	39.726.838.906	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat daerah	N/A Nilai	75 Nilai		76 Nilai		77 Nilai		78 Nilai		79 Nilai		Badan Pengelola Pendapatan Daerah

## Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	57,50 Nilai		64,10 Nilai		76,92 Nilai		89,74 Nilai		89,74 Nilai		Badan Pengelola Pendapatan Daerah
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	A Nilai	334.885.700	A Nilai	300.000.000	A Nilai	350.000.000	A Nilai	350.000.000	A Nilai	1.334.885.700	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah	80,82 Nilai	81 Nilai	10.779.987.300	81,5 Nilai	11.224.979.000	82 Nilai	11.441.905.000	82,5 Nilai	11.678.695.500	82,5 Nilai	45.125.566.800	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	65,00 Nilai	320.000.000	68,00 Nilai	325.000.000	70,00 Nilai	325.000.000	72,00 Nilai	325.000.000	72,00 Nilai	1.295.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	B Nilai	B Nilai	6.259.151.753	BB Nilai	6.584.304.000	BB Nilai	13.793.028.729	BB Nilai	6.479.899.304	BB Nilai	33.116.383.786	Dinas Arsip Daerah
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah	75 Nilai	76 Nilai		77 Nilai		78 Nilai		79 Nilai		79 Nilai		Dinas Arsip Daerah

## Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			A													
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN	50 Nilai	51 Nilai		52 Nilai		53 Nilai		54 Nilai		54 Nilai		Dinas Arsip Daerah
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	0 Nilai	67 Nilai	6.298.771.765	68 Nilai	6.494.716.297	69 Nilai	6.692.611.233	70 Nilai	6.892.462.486	70 Nilai	26.378.561.781	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah	0 Nilai	87 Nilai		87,5 Nilai		87,7 Nilai		88 Nilai		88 Nilai		Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN	0 Nilai	50 Nilai		51 Nilai		52 Nilai		53 Nilai		53 Nilai		Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	9.519.058.000	BB Nilai	9.729.559.000	BB Nilai	10.056.925.000	BB Nilai	10.346.182.000	BB Nilai	39.651.724.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN	46,33 Nilai	50,00 Nilai		50,50 Nilai		51,00 Nilai		51,50 Nilai		51,50 Nilai		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	75.313.358.203	BB Nilai	77.968.058.500	BB Nilai	78.896.713.800	BB Nilai	82.326.532.800	BB Nilai	314.504.663.303	Dinas Kesehatan
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah	80,50 Nilai	83,00 Nilai		83,82 Nilai		83,82 Nilai		83,82 Nilai		83,82 Nilai		Dinas Kesehatan
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50,00 Nilai		50,50 Nilai		51,00 Nilai		51,50 Nilai		51,50 Nilai		Dinas Kesehatan
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N/A Nilai	71 Nilai	6.964.092.800	74,5 Nilai	7.102.911.800	78 Nilai	7.443.403.088	81 Nilai	7.398.823.736	81 Nilai	28.909.231.424	Dinas Komunikasi dan Informatika
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah	N/A Nilai	76,61 Nilai		80,61 Nilai		84,61 Nilai		88,31 Nilai		88,31 Nilai		Dinas Komunikasi dan Informatika

## Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			A													
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50 Nilai		50,50 Nilai		51 Nilai		51,50 Nilai		51,50 Nilai		Dinas Komunikasi dan Informatika
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	21.627.282.000	BB Nilai	21.917.098.000	BB Nilai	21.939.095.000	BB Nilai	21.953.755.000	BB Nilai	87.437.230.000	Dinas Lingkungan Hidup
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah	N/A Nilai	76,65 Nilai		77,15 Nilai		77,65 Nilai		78,15 Nilai		78,15 Nilai		Dinas Lingkungan Hidup
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	43 Nilai		45 Nilai		48 Nilai		50 Nilai		50 Nilai		Dinas Lingkungan Hidup
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat daerah	BB Nilai	BB Nilai	10.030.590.499	BB Nilai	10.144.548.499	BB Nilai	10.669.630.499	BB Nilai	10.656.114.799	BB Nilai	41.500.884.296	Dinas Pangan dan Pertanian

## Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah	80,4 Nilai	80,5 Nilai		80,5 Nilai		81 Nilai		81 Nilai		81 Nilai		Dinas Pangan dan Pertanian
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	45 Nilai		46 Nilai		48 Nilai		50 Nilai		50 Nilai		Dinas Pangan dan Pertanian
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	8.743.764.292	BB Nilai	8.743.764.300	BB Nilai	8.994.280.292	BB Nilai	8.758.132.300	BB Nilai	35.239.941.184	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah	N/A Nilai	70 Nilai	1.217.432.700	72,5 Nilai	1.221.932.700	75 Nilai	1.221.932.700	77,5 Nilai	1.221.932.700	77,5 Nilai	4.883.230.800	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50 Nilai	17.500.000	50,50 Nilai	17.500.000	51 Nilai	34.818.208	51,50 Nilai	37.500.000	51,50 Nilai	107.318.208	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N/A Nilai	B Nilai	8.441.768.300	B Nilai	8.447.242.300	B Nilai	8.729.098.300	B Nilai	8.812.869.300	B Nilai	34.430.978.200	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian

## Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			A													Penduduk dan Keluarga Berencana
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah	N/A Nilai	B Nilai		B Nilai		B Nilai		B Nilai		B Nilai		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50 Nilai		50,5 Nilai		51 Nilai		51,5 Nilai		51,5 Nilai		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	31.013.439.000	BB Nilai	16.003.172.000	BB Nilai	16.380.674.000	BB Nilai	15.971.228.000	BB Nilai	79.368.513.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah	N/A Nilai	80 Nilai		81 Nilai		82 Nilai		83 Nilai		83 Nilai		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Profesionalitas ASN	N/A	50.0 Nilai		50.2 Nilai		50.4 Nilai		50.6 Nilai		50.6 Nilai		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

## Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			KABUPATEN/KOTA												Pintu
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai 295.930.110.400	BB Nilai 310.411.572.680	BB Nilai 316.619.804.130	BB Nilai 322.952.200.215	BB Nilai 1.245.913.687.425					Dinas Pendidikan
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah	N/A Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai					Dinas Pendidikan
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50 Nilai	50,5 Nilai	51 Nilai	51,5 Nilai	51,5 Nilai					Dinas Pendidikan
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N/A Nilai	60,73 (B) Nilai 10.538.413.480	60,75 (B) Nilai 10.797.565.618	60,78 (B) Nilai 10.916.231.210	60,8 (B) Nilai 11.096.865.834	60,8 (B) Nilai 43.349.076.142					Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat daerah	N/A Nilai	78 Nilai	78,25 Nilai	78,5 Nilai	78,75 Nilai	78,75 Nilai					Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian



## Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50 Nilai		50,25 Nilai		50,5 Nilai		50,75 Nilai		50,75 Nilai		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	21.684.378.500	BB Nilai	22.555.378.500	BB Nilai	23.117.232.500	BB Nilai	22.978.328.000	BB Nilai	90.335.317.500	Dinas Perhubungan
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat daerah	77,19 Nilai	77,25 Nilai		77,50 Nilai		77,75 Nilai		78 Nilai		78 Nilai		Dinas Perhubungan
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50 Nilai		50,50 Nilai		51 Nilai		51,50 Nilai		51,50 Nilai		Dinas Perhubungan
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	13.029.661.587	BB Nilai	13.207.487.232	BB Nilai	13.403.814.590	A Nilai	13.573.879.191	A Nilai	53.214.842.600	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah	N/A Nilai	BB Nilai		BB Nilai		BB Nilai		BB Nilai		BB Nilai		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

## Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			A													
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50 Nilai		50 Nilai		50 Nilai		50 Nilai		50 Nilai		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N/A Nilai	B Nilai	6.536.003.900	B Nilai	6.640.232.900	B Nilai	6.746.550.800	B Nilai	6.951.778.700	B Nilai	26.874.566.300	Dinas Sosial
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah	N/A Nilai	B Nilai		B Nilai		B Nilai		B Nilai		B Nilai		Dinas Sosial
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50 Nilai		50,5 Nilai		51 Nilai		51,5 Nilai		51,5 Nilai		Dinas Sosial
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	6.413.949.709	BB Nilai	6.517.363.579	BB Nilai	6.675.718.311	BB Nilai	6.730.439.790	BB Nilai	26.337.471.389	Dinas Tenaga Kerja

## Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat daerah	86 nilai	86 nilai		86 nilai		86 nilai		86 nilai		86 nilai		Dinas Tenaga Kerja
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN	N/A nilai	50,00 nilai		50,50 nilai		51,00 nilai		51,50 nilai		51,50 nilai		Dinas Tenaga Kerja
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai	43.500.000	A Nilai	37.422.000	A Nilai	37.422.000	A Nilai	37.422.000	A Nilai	155.766.000	Inspektorat
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah	94,81 Nilai	95 Nilai	9.293.528.377	95,5 Nilai	9.379.291.128	96 Nilai	9.466.582.390	96,5 Nilai	9.639.082.678	96,5 Nilai	37.778.484.573	Inspektorat
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50,00 Nilai	323.000.000	50,50 Nilai	251.006.300	51,00 Nilai	238.906.038	51,50 Nilai	232.706.750	51,50 Nilai	1.045.619.088	Inspektorat
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N/A Nilai	70 (BB) Nilai	16.318.891.170	71 (BB) Nilai	17.051.707.128	72 (BB) Nilai	17.904.292.485	73 (BB) Nilai	18.799.507.109	74 (BB) Nilai	70.074.397.892	Kecamatan Cimahi Selatan

## Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50,00 Nilai		50,50 Nilai		51,00 Nilai		51,50 Nilai		52,00 Nilai		Kecamatan Cimahi Selatan
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N/A Nilai	70 (BB) Nilai	17.460.102.300	71 (BB) Nilai		72 (BB) Nilai		73 (BB) Nilai		74 (BB) Nilai	75.255.223.426	Kecamatan Cimahi Tengah
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50,00 Nilai		50,50 Nilai	18.333.107.415	51,00 Nilai	19.249.762.786	51,50 Nilai	20.212.250.925	52,00 Nilai		Kecamatan Cimahi Tengah
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N/A Nilai	70 (BB) Nilai	13.127.185.650	71 (BB) Nilai	13.787.517.750	72 (BB) Nilai	13.127.185.650	73 (BB) Nilai	13.127.185.650	74 (BB) Nilai	53.169.074.700	Kecamatan Cimahi Utara
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50,00 Nilai		50,50 Nilai		51,00 Nilai		51,50 Nilai		52,00 Nilai		Kecamatan Cimahi Utara
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	52.506.519.145	BB Nilai	56.416.129.000	BB Nilai	58.627.613.000	BB Nilai	60.886.436.000	BB Nilai	228.436.697.145	RSUD CIBABAT

## Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			A													
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN	43,54 Nilai	50,00 Nilai		50,50 Nilai		51,00 Nilai		51,50 Nilai		51,50 Nilai		RSUD CIBABAT
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	19.694.457.600	BB Nilai	19.708.457.459	BB Nilai	20.801.679.459	BB Nilai	20.501.369.459	BB Nilai	80.705.963.977	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah	N/A Nilai	B Nilai		B Nilai		B Nilai		B Nilai		B Nilai		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50,00 Nilai		50,50 Nilai		51,00 Nilai		51,50 Nilai		51,50 Nilai		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	52.013.400.500	BB Nilai	52.835.384.100	BB Nilai	52.391.817.100	BB Nilai	53.591.200.100	BB Nilai	210.831.801.800	Sekretariat DPRD

## Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah	N/A Nilai	B Nilai		B Nilai		B Nilai		B Nilai		B Nilai		Sekretariat DPRD
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50,00 Nilai		50,50 Nilai		51,00 Nilai		51,50 Nilai		51,50 Nilai		Sekretariat DPRD
x.xx.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	N/A Ha	0,68 Ha	1.020.000.000	0,68 Ha	1.020.000.000	0,68 Ha	1.020.000.000	0,68 Ha	1.020.000.000	0,68 Ha	4.080.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
							1.506.971.257.568,00		1.571.808.862.000,00		1.497.408.837.000,00		1.553.295.112.000,00			

## **BAB VIII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Bab ini menguraikan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi indikator kinerja utama (IKU) daerah yang menggambarkan kinerja daerah, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah. Adapun IKU Pemerintah Daerah Kota Cimahi disajikan pada Tabel 8.1 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Cimahi Tahun 2023-2026. Sedangkan Indikator Kinerja Kunci memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kota. Indikator yang akan disajikan pertama kali adalah indikator makro Kota Cimahi yang diproyeksikan untuk 2023-2026 (Tabel 8.1). Indikator makro tersebut dirumuskan untuk menyelesaikan isu strategis kota mempertimbangkan target pencapaian Indikator Makro Provinsi Jawa Barat.

Berikutnya adalah penyajian IKK sesuai tingkatan kinerjanya, yaitu IKK tingkat kinerja dampak (*impact*) dan tingkat hasil (*outcome*). IKK tingkat kinerja dampak (*impact*) yang disajikan pada Tabel 8.2 yang memuat IKU Pemerintah Daerah Kota Cimahi dan IKU seluruh Perangkat Daerah. Indikator kinerja utama perangkat daerah (Tabel 8.3) merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Indikator ini berada pada level *intermediate outcome*, yang menghubungkan kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. IKU PD ini akan menjadi dasar penilaian kinerja organisasi setiap tahunnya.

Terdapat beberapa target indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang masih kosong pada tahun 2023 sebab indikator baru dirumuskan pertama kalinya pada Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026.

**Tabel 8.1.**  
**Proyeksi Indikator Makro Kota Cimahi Tahun 2023-2026**

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Rencana Pembangunan Daerah				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	78,11	78,22	78,32	78,42	78,50	78,50
2	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0,75	0,63	0,57	0,51	0,45	0,45
3	Persentase Penduduk Miskin	Persen	5,35	5,35	5,30	5,25	5,20	5,20
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	13,07	12,61	12,38	12,15	11,92	11,92
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,19	5,45	5,15-5,95	5,2-6,1	5,25-6,25	5,25-6,25
6	Indeks Gini	Poin	0,415	0,409	0,406	0,403	0,400	0,400
7	Pendapatan per Kapita	Juta Rupiah	12.019	12.194	12.282	12.370	12.458	12.458



**Tabel 8.2.**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Cimahi Tahun 2023-2026**

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi Awal RPD	Target Tahun				Kondisi Akhir
			2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Kesehatan	83.40 indeks	83.42 indeks	83.43 indeks	83.45 indeks	83.46 indeks	83.46 indeks
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	77.21 indeks	77.25 indeks	77.30 indeks	77.35 indeks	77.40 indeks	77.40 indeks
3	Indeks Pengetahuan	75.29 indeks	75.29 indeks	75.29 indeks	75.36 indeks	75.42 indeks	75.42 indeks
4	Tingkat Partisipasi Masyarakat	N/A persen	50 persen	55 persen	60 persen	65 persen	65 persen
5	Indeks Reformasi Birokrasi	59,22 (CC) Indeks	60,73 (B) Indeks	60,75 (B) Indeks	60,78 (B) Indeks	60,80 (B) Indeks	60,80 (B) Indeks
6	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7	Indeks Gini	0.412 Point	0.409 Point	0.406 Point	0.403 Point	0.400 Point	0.400 Point
8	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5.11 Persen	5.45 Persen	5.15 - 5.95 Persen	5.20 - 6.10 Persen	5.25 - 6.25 Persen	5.25 - 6.25 Persen
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	13.07 Persen	12.61 Persen	12.38 Persen	12.15 Persen	11.92 Persen	11.92 Persen
10	Tingkat Kemiskinan	5.35 Persen	5.35 Persen	5.30 Persen	5.25 Persen	5.20 Persen	5.20 Persen
11	Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur	N/A	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi
12	Indeks Resiko Bencana	105 (kelas resiko sedang) indeks	105 (kelas resiko sedang) indeks	105 (kelas resiko sedang) indeks	105 (kelas resiko sedang) indeks	105 (kelas resiko sedang) indeks	105 (kelas resiko sedang) indeks

**Tabel 8.3.**  
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Cimahi Tingkat Dampak (Impact) Tahun 2023 – 2026**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD
			2023	2024	2025	2026	
	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>						
1.	<b>[ SASARAN ] Meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan kualitas pendidikan</b>						
	Harapan lama sekolah	13,81 tahun	13,82 tahun	13,83 tahun	13,84 tahun	13,85 tahun	13,85 tahun
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	0 indeks	1 indeks	1,5 indeks	1,5 indeks	2 indeks	2 indeks
	Rata-rata Kemampuan Literasi dan Numerasi Pendidikan Dasar (SD dan SMP) Berdasarkan asesmen Nasional	1,85 nilai	2,05 nilai	2,06 nilai	2,08 nilai	2,10 nilai	2,10 nilai
2.	<b>[ SASARAN ] Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat</b>	<b>11,08 tahun</b>	<b>11,09 tahun</b>	<b>11,10 tahun</b>	<b>11,11 tahun</b>	<b>11,12 tahun</b>	<b>11,12 tahun</b>
	Akreditasi Rumah Sakit	Utama Tingkat	Paripurna Tingkat	Paripurna Tingkat	Paripurna Tingkat	Paripurna Tingkat	Paripurna Tingkat
	Indeks Keluarga sehat	0,28 indeks	0,28 indeks	0,32 indeks	0,36 indeks	0,40 indeks	0,40 indeks
3.	<b>[ SASARAN ] Meningkatnya pengarusutamaan gender</b>						
	Persentase paartisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan	37,19 persen	37,50 persen	38 persen	38,50 persen	39 persen	39 persen
	Persentase partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi	30,65 persen	31,65 persen	32,65 persen	33,65 persen	34,65 persen	34,65 persen
	Persentase partisipasi perempuan dalam kegiatan politik	26,67 persen	26,67 persen	26,67 persen	26,67 persen	26,67 persen	26,67 persen
4.	<b>[ SASARAN ] Meningkatnya Perlindungan Terhadap Anak</b>						
	Persentase Capaian Kota Layak Anak	50 persen	51 persen	52 persen	53 persen	54 persen	54 persen
5.	<b>[ SASARAN ] Pengendalian penduduk yang sesuai dengan daya tampung kota</b>						
	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	64,31 persen	65 persen	66 persen	67 persen	68 persen	68 persen
6.	<b>[ SASARAN ] Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan</b>						
	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	N/A persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
7.	<b>[ SASARAN ] Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan</b>						
	Persentase Partisipasi Pemuda terhadap Pembangunan	11,2 persen	11,2 persen	11,3 persen	11,4 persen	11,5 persen	11,5 persen
8.	<b>[ SASARAN ] Meningkatnya Pemberdayaan Pelaku kebudayaan</b>						
	Persentase Pelaku kebudayaan yang diberdayakan	N/A persen	50 persen	60 persen	85 persen	100 persen	100 persen
9.	<b>[ SASARAN ] Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga</b>						
	Presentasi masyarakat yang aktif berolahraga	45,5 persen	46 persen	46,2 persen	46,5 persen	46,7 persen	46,7 persen
10.	<b>[ SASARAN ] Meningkatnya keswadayaan Masyarakat</b>						
	Persentase Jumlah partisipasi swadaya masyarakat di Kecamatan Cimahi Tengah	85 persen	85 persen	85 persen	85 persen	85 persen	85 persen
	Persentase Jumlah partisipasi swadaya masyarakat di Kecamatan Cimahi Utara	85 persen	85 persen	85 persen	85 persen	85 persen	85 persen
	Presentase Jumlah partisipasi swadaya masyarakat di Kecamatan Cimahi Selatan	85 persen	85 persen	85 persen	85 persen	85 persen	85 persen

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD
			2023	2024	2025	2026	
11.	<b>[ SASARAN ] Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat</b>						
	Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
	Persentase Pembinaan Politik Dalam Negeri	N/A persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
	Persentase Organisasi Kemasyarakatan/Kelompok Masyarakat yang Terbina/Terfasilitasi	N/A persen	45 persen	50 persen	55 persen	60 persen	60 persen
	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Cimahi Selatan	75 persen	75 persen	75 persen	75 persen	75 persen	75 persen
	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Cimahi Tengah	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen
	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Cimahi Utara	75 persen	75 persen	75 persen	75 persen	75 persen	75 persen
	Penurunan Angka Gangguan Katentraman dan Ketertiban Masyarakat	850 angka	800 angka	750 angka	700 angka	650 angka	650 angka
12.	<b>[ SASARAN ] Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik</b>						
	Persentase Potensi Konflik terkait Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Trantibmas yang dapat dicegah dan ditangani	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
	Waktu respon tanggap kebakaran	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit
	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	N/A Indeks	351 Indeks	370 Indeks	390 Indeks	400 Indeks	400 Indeks
	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	74,91 persen	80 persen	84 persen	88 persen	92 persen	92 persen
	Indeks Pembangunan Statistik	2 Level/Tingkat	2 Level/Tingkat	3 Level/Tingkat	3 Level/Tingkat	4 Level/Tingkat	4 Level/Tingkat
	Indeks Profesionalisme ASN	Kematangan	Kematangan	Kematangan	Kematangan	Kematangan	Kematangan
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	50,00 Indeks	50,00 Indeks	50,50 Indeks	51,00 Indeks	51,50 Indeks	51,50 Indeks
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2,75 Indeks	3,00 Indeks	3,20 Indeks	3,40 Indeks	3,60 Indeks	3,60 Indeks
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah	N/A Nilai	35 Nilai	35 Nilai	40 Nilai	45 Nilai	45 Nilai
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Bakesbangpol	N/A Nilai	30 Nilai	30 Nilai	35 Nilai	35 Nilai	35 Nilai
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi BAPPELITBANGDA	N/A Nilai	50 Nilai	50,50 Nilai	51 Nilai	60 Nilai	60 Nilai
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi BKPSDMD	63,97 Nilai	64,50 Nilai	65,00 Nilai	65,50 Nilai	66,00 Nilai	66,00 Nilai
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi BPKAD	N/A Nilai	60,00 Nilai	60,50 Nilai	61,00 Nilai	61,50 Nilai	62,00 Nilai
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Arsip Daerah	N/A Nilai	60,0 Nilai	60,5 Nilai	61,0 Nilai	61,5 Nilai	61,5 Nilai
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	50 Nilai	51 Nilai	51,5 Nilai	51,7 Nilai	52 Nilai	52 Nilai
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan	N/A Nilai	50 Nilai	50,4 Nilai	50,5 Nilai	50,6 Nilai	50,6 Nilai
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	24,88 Nilai	24,90 Nilai	24,93 Nilai	24,95 Nilai	24,98 Nilai	24,98 Nilai
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pangan dan Pertanian	N/A Nilai	50 Nilai	50,5 Nilai	51 Nilai	51,5 Nilai	51,5 Nilai
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	N/A Nilai	30 Nilai	30 Nilai	35 Nilai	40 Nilai	40 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pendidikan	N/A Nilai	30 Nilai	35 Nilai	35 Nilai	40 Nilai	40 Nilai	
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan	N/A Nilai	35 Nilai	35 Nilai	35 Nilai	35 Nilai	35 Nilai	
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Sosial	N/A Nilai	50 Nilai	50,50 Nilai	51 Nilai	51,50 Nilai	51,50 Nilai	
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Disdagkoperin	N/A Nilai	35 Nilai	35 Nilai	40 Nilai	40 Nilai	40 Nilai	
		N/A Nilai	30 Nilai	30 Nilai	35 Nilai	35 Nilai	35 Nilai

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD
			2023	2024	2025	2026	
13.	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Disdukcapil	28,88 Nilai	38 Nilai	42 Nilai	47 Nilai	51 Nilai	51 Nilai
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Diskominfo	N/A Nilai	55 Nilai	55,5 Nilai	56 Nilai	56,5 Nilai	56,5 Nilai
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Disnaker	N/A Nilai	60 Nilai	60 Nilai	60 Nilai	60 Nilai	60 Nilai
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi DPKP	N/A Nilai	55 Nilai	56 Nilai	57 Nilai	58 Nilai	58 Nilai
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi DPMPTSP	35,67 Nilai	35,7 Nilai	35,8 Nilai	35,9 Nilai	36 Nilai	36 Nilai
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi DPUPR	N/A Nilai	55 Nilai	56 Nilai	57 Nilai	58 Nilai	58 Nilai
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Inspektorat	N/A Nilai	63 Nilai	64 Nilai	65 Nilai	66 Nilai	66 Nilai
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kecamatan Cimahi Selatan	N/A Nilai	60,00 Nilai	60,50 Nilai	61,00 Nilai	61,50 Nilai	62,00 Nilai
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kecamatan Cimahi Tengah	N/A Nilai	60,00 Nilai	60,50 Nilai	61,00 Nilai	61,50 Nilai	62,00 Nilai
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kecamatan Cimahi Utara	N/A Nilai	60,00 Nilai	60,50 Nilai	61,00 Nilai	61,50 Nilai	62,00 Nilai
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi RSUD Cibabat	25,5 Nilai	25,55 Nilai	25,57 Nilai	25,60 Nilai	25,62 Nilai	25,62 Nilai
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi SATPOLPP-DAMKAR	N/A Nilai	60,73 Nilai	60,75 Nilai	60,78 Nilai	60,80 Nilai	60,80 Nilai
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Sekertariat DPRD	N/A Nilai	60,73 Nilai	60,75 Nilai	60,78 Nilai	60,80 Nilai	60,80 Nilai
	Nilai IKM Administrasi Kependudukan	79,01 Nilai	81 Nilai	82 Nilai	82,5 Nilai	83 Nilai	83 Nilai
	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	N/A persen	75 persen	75 persen	75 persen	75 persen	75 persen
	Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el, KIA, Akte kelahiran 0-18 tahun)	94,88 persen	96,25 persen	96,88 persen	97,50 persen	98,13 persen	98,13 persen
	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Data Kependudukan berupa hak akses data dan atau tabulasi data	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
	Persentase Penerbitan Dokumen Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu Cimahi Selatan	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen
	Persentase Penerbitan Dokumen Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu Cimahi Tengah	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen
	Persentase Penerbitan Dokumen Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu Cimahi Utara	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen
	Indeks LAKE	64,17 indeks	41 indeks	57 indeks	67 indeks	73 indeks	73 indeks
Tingkat Kepuasan Masyarakat Kota Cimahi terhadap Kinerja DPRD	N/A Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	
<b>[ SASARAN ] Meningkatkan Kualitas Pengawasan</b>							
Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi	N/A Nilai	3 Nilai	3 Nilai	3 Nilai	3 Nilai	3 Nilai	
Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	N/A persen	5 persen	5 persen	5 persen	5 persen	20 persen	
<b>14. [ SASARAN ] Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah</b>							
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	59,22 Nilai	60,73 Nilai	60,75 Nilai	60,78 Nilai	60,80 Nilai	60,80 Nilai	
Nilai LPPD	Tinggi Nilai	Tinggi Nilai	Tinggi Nilai	Tinggi Nilai	Tinggi Nilai	Tinggi Nilai	
Nilai Rata-rata IKM Kota	82,37 Nilai	82,37 Nilai	82,37 Nilai	82,37 Nilai	82,37 Nilai	82,37 Nilai	
<b>15. [ SASARAN ] Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah</b>							
Persentase keselarasan kinerja antar dokumen perencanaan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
Persentase capaian Indikator Kinerja Kunci	N/A persen	80 persen	85 persen	90 persen	95 persen	95 persen	

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD
			2023	2024	2025	2026	
16.	<b>[ SASARAN ] Optimalisasi Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah</b> Rasio Utilisasi Aset Daerah	64,40 persen	72,0 persen	73,5 persen	75,0 persen	76,5 persen	76,5 persen
17.	<b>[ SASARAN ] Mengoptimalkan Pengelolaan Keuangan Daerah</b> Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah dengan Standar Akuntansi Pemerintahan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
	Persentase Penetapan APBD tepat waktu	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
18.	<b>[ SASARAN ] Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi melalui Optimalisasi Potensi Daerah</b> Persentase IKM yang berdaya saing	N/A persen	8 persen	8 persen	8 persen	8 persen	8 persen
	Persentase Ketersediaan Bahan Pokok Masyarakat di Pasar	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
	Persentase Pelaku Usaha yang Berpotensi Ekspor	5 persen	6 persen	7 persen	7 persen	7 persen	32 persen
	Persentase Sarana dan Prasarana Perdagangan Layak Fungsi	25 persen	30 persen	40 persen	45 persen	50 persen	50 persen
	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	28,24 persen	28,73 persen	29,22 persen	29,72 persen	29,72 persen	29,72 persen
	Realisasi Investasi (dalam milyar rupiah)	N/A milyar rupiah	6,781 milyar rupiah	7,081 milyar rupiah	7,381 milyar rupiah	7,681 milyar rupiah	7,681 milyar rupiah
	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara	5.685 orang	41.030 orang	43.085 orang	45.25 orang	47.522 orang	176.889 orang
19.	<b>[ SASARAN ] Mempercepat peningkatan pemerataan pendapatan</b> Lama Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari
	Nilai PPH Ketersediaan	2318 nilai	2350 nilai	2350 nilai	2380 nilai	2380 nilai	2380 nilai
	Skor PPH Ketersediaan	67,8 nilai	67,9 nilai	68 nilai	68 nilai	68 nilai	68 nilai
	Persentase Koperasi Sehat	48,75 persen	48,75 persen	51,25 persen	53,75 persen	56,25 persen	56,25 persen
	Persentase UKM Naik Kelas	21 persen	21 persen	26 persen	31 persen	36 persen	36 persen
	Persentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Pertanian	1,32 persen	1,32 persen	1,32 persen	1,32 persen	1,33 persen	1,33 persen
20.	<b>[ SASARAN ] Meningkatkan kesempatan kerja</b> Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	77,6 persen	78 persen	79 persen	80 persen	80 persen	80 persen
21.	<b>[ SASARAN ] Meningkatkan akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi Masyarakat berpenghasilan rendah</b> Cakupan PPKS yang mendapatkan bantuan kerawanan pangan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
	Cakupan PPKS yang mendapatkan fasilitasi dasar untuk memulai usaha	N/A persen	5 persen	5 persen	5 persen	5 persen	20 persen
	Cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan infrastruktur Dasar	11 persen	34 persen	56 persen	78 persen	100 persen	100 persen
	Cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan Dasar Sosial	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
22.	<b>[ SASARAN ] Berkurangnya luasan banjir</b> Persentase luasan banjir	0,22 persen	0,219 persen	0,217 persen	0,216 persen	0,216 persen	0,216 persen
23.	<b>[ SASARAN ] Meningkatkan Kualitas Lingkungan</b> Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	41,718 indeks	42,18 indeks	42,37 indeks	42,56 indeks	42,75 indeks	42,75 indeks
24.	<b>[ SASARAN ] Meningkatkan Kualitas Permukiman</b> Rasio luas kawasan kumuh	0,005 rasio	0,004 rasio	0,003 rasio	0,001 rasio	0,000 rasio	0,000 rasio
25.	<b>[ SASARAN ] Meningkatkan pelayanan transportasi yang terpadu dan berkualitas</b> Persentase Tingkat Kemantapan Jalan	94,87 persen	95,12 persen	95,37 persen	95,62 persen	96 persen	96 persen

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD
			2023	2024	2025	2026	
26.	Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Services) [ <b>SASARAN</b> ] Meningkatkan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	C predikat	C predikat	C predikat	C predikat	C predikat	C predikat
27.	Persentase luasan kehati Kota Cimahi yang dikelola [ <b>SASARAN</b> ] Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Perencanaan Tata Ruang di Kota Cimahi	1,13 persen	1,14 persen	1,15 persen	1,16 persen	1,17 persen	1,17 persen
28.	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Persentase Penyelesaian Administrasi Pertanahan [ <b>SASARAN</b> ] Terwujudnya Kualitas Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	62 persen N/A persen	62,2 persen 100 persen	62,4 persen 100 persen	62,6 persen 100 persen	62,8 persen 100 persen	62,8 persen 100 persen
29.	Persentase Bangunan Gedung Negara dengan Kondisi Baik [ <b>SASARAN</b> ] Meningkatkan Ketahanan Bencana Indeks Ketahanan Daerah	72,5 persen	73 persen	73,5 persen	74 persen	74,5 persen	74,5 persen
		0,76 (Level II / sedang) indeks	0,77 (Level III / sedang) indeks	0,77 (Level III / sedang) indeks	0,78 (Level III / sedang) indeks	0,79 (Level III / sedang) indeks	0,79 (Level III / sedang) indeks

**Tabel 8.3.**  
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**  
**Kota Cimahi Tingkat Hasil (*Outcome*) Tahun 2023-2026**

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	2024	2025	2026		
[ VISI ] CIMAH KOTA CERDAS							
[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN							
Persentase Peningkatan pemustaka aktif	1,81 persen	4 persen	5 persen	5 persen	10 persen	10 persen	Dinas Arsip Daerah
[ PROGRAM ] PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN							
Rasio Guru terhadap Murid Jenjang PAUD	1 : 7 rasio	1 : 7 rasio	1 : 7 rasio	1 : 7 rasio	1 : 7 rasio	1 : 7 rasio	Dinas Pendidikan
Rasio Guru terhadap Murid Jenjang SD	1 : 27 rasio	1 : 27 rasio	1 : 27 rasio	1 : 27 rasio	1 : 27 rasio	1 : 27 rasio	
Rasio Guru terhadap Murid Jenjang SMP	1 : 29 rasio	1 : 29 rasio	1 : 29 rasio	1 : 29 rasio	1 : 29 rasio	1 : 29 rasio	
Rasio Guru terhadap Warga Belajar Jenjang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 : 7 rasio	1 : 7 rasio	1 : 7 rasio	1 : 7 rasio	1 : 7 rasio	1 : 7 rasio	
Rasio pengawas dan penilik PAUD	1,03 persen	3,20 persen	3,20 persen	3,20 persen	3,20 persen	3,20 persen	
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan TK/RA	67,64 persen	67,74 persen	67,84 persen	67,94 persen	68,04 persen	68,04 persen	Dinas Pendidikan
Angka Kesiapan sekolah	3,39 persen	4 persen	4,5 persen	5 persen	5,5 persen	5,5 persen	
Angka Partisipasi Murni (5 - 6 tahun)	33,87 persen	34 persen	35 persen	36 persen	37 persen	37 persen	
Angka Partisipasi Kasar (APK) SDSD/MI/Paket A/SDLB	95,57 persen	95,65 persen	95,75 persen	95,85 persen	95,95 persen	95,95 persen	
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B/SMPLB	91,27 persen	91,37 persen	91,47 persen	91,57 persen	91,67 persen	91,67 persen	
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A/SDLB	90,83 persen	90,93 persen	91,03 persen	91,13 persen	91,23 persen	91,23 persen	
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B/SMPLB	83,03 persen	83,13 persen	83,23 persen	83,33 persen	83,43 persen	83,43 persen	
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A/SDLB	93,25 persen	93,35 persen	93,45 persen	93,55 persen	93,65 persen	93,65 persen	
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SM/MTs/Paket B/SMPLB	87,53 persen	87,63 persen	87,73 persen	87,83 persen	87,93 persen	87,93 persen	
Angka Putus Sekolah SD	0,08 persen	0,07 persen	0,06 persen	0,05 persen	0,04 persen	0,04 persen	
Angka Putus Sekolah SMP	0,05 persen	0,05 persen	0,04 persen	0,03 persen	0,02 persen	0,02 persen	
Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	67,64 persen	67,74 persen	67,84 persen	67,94 persen	68,04 persen	68,04 persen	

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	2024	2025	2026		
Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	83,26 persen	83,36 persen	83,46 persen	83,56 persen	83,66 persen	83,66 persen	
Proporsi PTK bersertifikat dari PPG	43,69 persen	44 persen	45 persen	46 persen	47 persen	47 persen	
Pertumbuhan Proporsi guru PAUD formal dengan kualifikasi S1/DIV	72,51 persen	73 persen	73,5 persen	74 persen	74,5 persen	74,5 persen	
Proporsi pendidik berijazah minimal S1/DIV	39,95 persen	40 persen	41 persen	42 persen	43 persen	44 persen	
Proporsi GTK bersertifikat (Jenjang SD)	49,85 persen	50 persen	51 persen	52 persen	53 persen	53 persen	
Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Jenjang SD dengan Kualifikasi Minimal DIV/S1	93,85 persen	93,89 persen	93,94 persen	93,99 persen	94,04 persen	94,04 persen	
Proporsi GTK bersertifikat (Jenjang SMP)	71,98 persen	72,32 persen	72,80 persen	73,32 persen	73,63 persen	73,63 persen	
Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMP dengan Kualifikasi Minimal DIV/S1	95,86 persen	95,86 persen	95,86 persen	95,86 persen	95,86 persen	95,86 persen	
Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	85,48 persen	86 persen	86,5 persen	87 persen	87,5 persen	87,5 persen	
Persentase PKBM yang Terakreditasi	30,40 persen	34,78 persen	34,78 persen	39,13 persen	39,13 persen	39,13 persen	
Persentase SD yang Terakreditasi A	47 persen	50 persen	55 persen	60 persen	65 persen	65 persen	
Persentase SMP yang Terakreditasi A	64,50 persen	65 persen	67,50 persen	70 persen	70 persen	70 persen	
Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan asesmen nasional	1,88 nilai	2,08 nilai	2,28 nilai	2,38 nilai	2,48 nilai	2,48 nilai	
Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	1,87 nilai	2,07 nilai	2,27 nilai	2,37 nilai	2,47 nilai	2,47 nilai	
Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan asesmen nasional	1,88 nilai	2,08 nilai	2,28 nilai	2,38 nilai	2,48 nilai	2,48 nilai	
Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional	1,75 nilai	1,95 nilai	2,05 nilai	2,25 nilai	2,35 nilai	2,35 nilai	
Standar kompetensi pendidikan PAUD	54,11 persen	55 persen	55,5 persen	56 persen	56,5 persen	56,5 persen	
Proporsi kepala satuan PAUD berijazah minimal S1/DIV	68,75 persen	69 persen	70 persen	71 persen	72 persen	72 persen	
Proporsi PTK dalam Diklat Teknis PAUD	31 persen	33 persen	35 persen	37 persen	39 persen	39 persen	
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>							
Persentase Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang diterapkan sesuai standar	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Dinas Pendidikan



Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	2024	2025	2026		
Persentase Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang diterapkan sesuai standar	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN							
Persentase lembaga pendidikan yang mendapatkan izin	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Dinas Pendidikan
Persentase lembaga pendidikan yang terbina dan terkendali	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
[ PROGRAM ] PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Cibabat	77,83 indeks	80,00 indeks	80,25 indeks	80,50 indeks	81,00 indeks	81,00 indeks	Dinas Kesehatan
Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	196,08 angka	115,1 angka	115,0 angka	114,9 angka	114,8 angka	114,8 angka	
Rasio Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	7,06 angka	6,3 angka	6,2 angka	6,1 angka	6,0 angka	6,0 angka	
Cakupan Imunisasi Booster (12-23 bulan)	N/A persen	66,1 persen	70,8 persen	75,5 persen	80,2 persen	80,2 persen	
Cakupan Imunisasi Dasar lengkap (IDL)	91,89 persen	92,5 persen	93,5 persen	94,0 persen	95,0 persen	95,0 persen	
Cakupan Jamaah Haji yang mendapat pemantauan kesehatan haji	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
Cakupan Puskesmas dengan capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) di atas 0,28	N/A persen	8 persen	9 persen	10 persen	11 persen	11 persen	
Cakupan Rumah Tangga yang ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	56 persen	56 persen	58 persen	59 persen	60 persen	60 persen	
Cakupan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Pengembangan di puskesmas	13 angka	13 angka	13 angka	13 angka	13 angka	13 angka	
Capaian Universal Health Coverage (UHC)	98,64 persen	98,64 persen	98,65 persen	98,70 persen	99,00 persen	99,00 persen	
Case Fatality Rate (CFR) Demam Berdarah Dengue (DBD)	3,6 angka	1 angka	1 angka	1 angka	1 angka	1 angka	
Insidensi HIV per 1000 Penduduk	N/A kasus	0,07 kasus	0,06 kasus	0,05 kasus	0,04 kasus	0,04 kasus	
Insidensi TB per 100.000 Penduduk	N/A kasus	302 kasus	302 kasus	296 kasus	294 kasus	294 kasus	
Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
Persentase Kelurahan Open Defecation Free (ODF)	26,6 persen	80 persen	86,6 persen	93,3 persen	100 persen	100 persen	
Persentase pelayanan puskesmas terhadap penyakit yang diduga akibat kerja	35 persen	35 persen	40 persen	45 persen	50 persen	50 persen	

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	2024	2025	2026		
Persentase peserta pemeriksaan kebugaran yang mendapat konseling PNS	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
Persentase puskesmas terakreditasi minimal Utama	53,85 persen	61,54 persen	61,54 persen	61,54 persen	69,23 persen	69,23 persen	
Persentasi Pengadaan Obat sesuai Formularium Nasional (FORNAS)	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
Prevalensi Stunting pada Balita	10,18 persen	10,10 persen	10,00 persen	9,90 persen	9,80 persen	9,80 persen	
Rata-rata Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	98,37 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>							
Cakupan strata RW Siaga aktif minimal Purnama	68,91 persen	73,40 persen	78,20 persen	83,10 persen	87,80 persen	87,80 persen	Dinas Kesehatan
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>							
Persentase puskesmas dengan jenis tenaga sesuai standar	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Dinas Kesehatan
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>							
Persentase sarana kefarmasian dan penyediaan makanan dan minuman sesuai standar	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Dinas Kesehatan
Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang mendapat pengawasan eksternal	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>							
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	66,82 persen	69 persen	69 persen	69 persen	69 persen	69 persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>							
Cakupan Keluarga yang mendapat program peningkatan kualitas keluarga	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	2024	2025	2026		
							Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>							
Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapat penanganan terpadu	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>							
Persentase anak yang terlayani kebutuhan dasar	85 persen	87 persen	89 persen	91 persen	93 persen	93 persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>							
Persentase perangkat daerah yang memiliki data terpilah gender	70 persen	70 persen	75 persen	80 persen	85 persen	85 persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>							
Persentase anak korban kekerasan yang mendapat penanganan terpadu	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>							
persentase kepesertaan keluarga dalam BKB	46,49 persen	47 persen	47,5 persen	48 persen	48,5 persen	0 persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKL	29,72 persen	29,72 persen	29,72 persen	30 persen	30 persen	30 persen	
Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKR	26,95 persen	26,95 persen	27,5 persen	28 persen	28,5 persen	29 persen	
Cakupan kepesertaan keluarga dalam PIK R	9,12 persen	9,12 persen	9,16 persen	9,2 persen	9,24 persen	9,28 persen	
Cakupan kepesertaan keluarga dalam UPPKA	0,87 persen	0,87 persen	0,9 persen	0,93 persen	0,96 persen	1 persen	

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	2024	2025	2026		
Cakupan PUS (Pasangan Usia Subur) < 20 tahun	0,36 persen	0,36 persen	0,35 persen	0,34 persen	0,33 persen	0,32 persen	
[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)							
Rasio Akseptor KB MKJP (Memakai Kontrasepsi Jangka Panjang)	34,92 persen	34,92 persen	35,92 persen	36,92 persen	37,92 persen	38,92 persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK							
Rata-rata Jumlah anak/keluarga	2,3 jiwa	2,3 jiwa	2,3 jiwa	2,3 jiwa	2,3 jiwa	0 jiwa	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Unmeet need (Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi)	13 persen	13 persen	12,5 persen	12 persen	11,5 persen	11 persen	
[ PROGRAM ] PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA							
Persentase kelurahan yang terbina	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
(PROGRAM) PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT							
Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Diberdayakan Aktif	N/A persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
[ PROGRAM ] PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH							
Persentase unsur masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbang kota	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN							
Persentase organisasi pemuda yg aktif	70 persen	71 persen	72 persen	73 persen	74 persen	74 persen	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	2024	2025	2026		
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>							
Persentase anggota pramuka yang dibina (anggota kwarcab)	0 persen	13 persen	14 persen	15 persen	16 persen	16 persen	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>							
Persentase kebudayaan yang dikembangkan	0 persen	25 persen	50 persen	75 persen	100 persen	100 persen	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>							
Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	N/A persen	25 persen	50 persen	75 persen	100 persen	100 persen	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>							
Persentase SDM Sejarah Lokasi yang dibina	0 persen	0 persen	25 persen	50 persen	75 persen	75 persen	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>							
Persentase Cagar budaya yang dilestarikan	0 persen	36 persen	56 persen	76 persen	100 persen	100 persen	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>							
Persentase sumber daya olahraga yang terbina	0 persen	53 persen	55 persen	57 persen	59 persen	59 persen	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Persentase sarana dan prasarana olahraga yang baik yang dimiliki pemerintah daerah Kota Cimahi	0 persen	50 persen	75 persen	75 persen	75 persen	75 persen	
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>							
Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilaksanakan di Kecamatan Cimahi Selatan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilaksanakan di Kecamatan Cimahi Tengah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	2024	2025	2026		
Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilaksanakan di Kecamatan Cimahi Utara	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
Persentase RW yang terfasilitasi dalam Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Cimahi Selatan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
Persentase RW yang terfasilitasi dalam Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Cimahi Tengah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
Persentase RW yang terfasilitasi dalam Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Cimahi Utara	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
Persentase stakeholder yang terlibat dalam Perencanaan Partisipatif di Kecamatan Cimahi Selatan	85 persen	85 persen	85 persen	85 persen	85 persen	85 persen	
Persentase stakeholder yang terlibat dalam Perencanaan Partisipatif di Kecamatan Cimahi Tengah	85 persen	85 persen	85 persen	85 persen	85 persen	85 persen	
Persentase stakeholder yang terlibat dalam Perencanaan Partisipatif di Kecamatan Cimahi Utara	85 persen	85 persen	85 persen	85 persen	85 persen	85 persen	
[ PROGRAM ] PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							
Persentase Kegiatan Monitoring Penanganan trantib di Kecamatan Cimahi Tengah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
Persentase Kegiatan Monitoring Penanganan Trantib yang dilaksanakan di Cimahi selatan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
Persentase Kegiatan Monitoring Penanganan Trantib yang dilaksanakan di Cimahi Utara	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN							

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	2024	2025	2026		
Persentase pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan	- persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA							
Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	N/A persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
[ PROGRAM ] PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN							
Tingkat kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Persentase korban yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN							
Persentase ketahanan ideologi dan karakter kebangsaan	N/A persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
[ PROGRAM ] PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							
Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada (SPM)	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
[ PROGRAM ] PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL							
Persentase wilayah terpantau	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
[ PROGRAM ] PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK							

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	2024	2025	2026		
Persentase kaderasi partai politik	N/A persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu dan Pemilukada	N/A persen	-	77,5 persen	-	-	-	
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>							
Persentase Jumlah RW yang terfasilitasi dalam PEMILU di Kecamatan Cimahi Selatan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
Persentase Jumlah RW yang terfasilitasi dalam PEMILU di Kecamatan Cimahi Tengah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
Persentase Jumlah RW yang terfasilitasi dalam PEMILU di Kecamatan Cimahi Utara	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan Kepala Daerah di Kecamatan Cimahi Selatan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan Kepala Daerah di Kecamatan Cimahi Tengah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan Kepala Daerah di Kecamatan Cimahi Utara	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>							
Tingkat Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,5 Nilai Indeks	2,5 Nilai Indeks	2,75 Nilai Indeks	3,00 Nilai Indeks	3,25 Nilai Indeks	3,25 Nilai Indeks	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>							
Persentase anggota DPRD yang mengikuti bimtek	N/A persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Sekretariat DPRD
Persentase penetapan anggaran tepat waktu	N/A persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
Persentase produk hukum daerah yang disahkan	N/A persen	60 persen	60 persen	60 persen	60 persen	60 persen	



Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	2024	2025	2026		
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>							
Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	N/A persen	60 persen	65 persen	70 persen	74 persen	74 persen	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>							
Cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun	95,23 persen	96 persen	96,5 persen	97 persen	97,5 persen	97,5 persen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
Cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraian nya dilaporkan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
Cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan non muslim pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>							
Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk	98,29 persen	99 persen	99 persen	99 persen	99 persen	99 persen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak	86 persen	90 persen	92 persen	94 persen	96 persen	96 persen	
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>							
Persentase pengembangan inovasi	N/A persen	50 persen	60 persen	70 persen	80 persen	80 persen	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>							
Persentase penelitian dan pengembangan yang dihasilkan dan didiseminasikan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>							
Indeks LAKI	35 Indeks	37 Indeks	50 Indeks	55 Indeks	60 Indeks	60 Indeks	
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>							

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	2024	2025	2026		
Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data kependudukan melalui hak akses data	N/A persen	30 persen	45 persen	60 persen	75 persen	75 persen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
SLA berjalannya SIAK dan KTP-el	N/A persen	90 persen	91 persen	93 persen	95 persen	95 persen	
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN							
Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan profil kependudukan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
[ PROGRAM ] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N/A Nilai	70 (BB) Nilai	71 (BB) Nilai	72 (BB) Nilai	73 (BB) Nilai	74 (BB) Nilai	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Indeks	50,00 Indeks	50,50 Indeks	51,00 Indeks	51,50 Indeks	52,00 Indeks	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N/A Nilai	B Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Nilai IKM Perangkat Daerah	90,69 Nilai	80 Nilai	81 Nilai	82 Nilai	83 Nilai	83 Nilai	
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50,00 Nilai	50,50 Nilai	51,00 Nilai	51,50 Nilai	51,50 Nilai	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Nilai IKM Perangkat Daerah	N/A Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	
Indeks Profesionalitas ASN	N?A Nilai	50 Nilai	50,5 Nilai	51 Nilai	51,5 Nilai	0 Nilai	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Nilai IKM Perangkat Daerah	80.45 nilai	80.75 nilai	81.05 nilai	81.35 nilai	81.65 nilai	81.65 nilai	
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50.0 Nilai	50.2 Nilai	50.4 Nilai	50.6 Nilai	50.6 Nilai	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N/A Nilai	71 Nilai	73 Nilai	75 Nilai	77 Nilai	79 Nilai	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Nilai IKM Perangkat daerah	N/A Nilai	75 Nilai	76 Nilai	77 Nilai	78 Nilai	79 Nilai	
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	57,50 Nilai	64,10 Nilai	76,92 Nilai	89,74 Nilai	89,74 Nilai	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Nilai IKM Perangkat Daerah	80,82 Nilai	81 Nilai	81,5 Nilai	82 Nilai	82,5 Nilai	82,5 Nilai	
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	65,00 Nilai	68,00 Nilai	70,00 Nilai	72,00 Nilai	72,00 Nilai	
Nilai Sakip Perangkat Daerah	B Nilai	B Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	Dinas Arsip Daerah
Nilai IKM Perangkat Daerah	75 Nilai	76 Nilai	77 Nilai	78 Nilai	79 Nilai	79 Nilai	
Indeks Profesionalitas ASN	50 Nilai	51 Nilai	52 Nilai	53 Nilai	54 Nilai	54 Nilai	
Nilai Sakip Perangkat Daerah	0 Nilai	67 Nilai	68 Nilai	69 Nilai	70 Nilai	70 Nilai	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Nilai IKM Perangkat Daerah	0 Nilai	87 Nilai	87,5 Nilai	87,7 Nilai	88 Nilai	88 Nilai	
Indeks Profesionalitas ASN	0 Nilai	50 Nilai	51 Nilai	52 Nilai	53 Nilai	53 Nilai	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Indeks Profesionalitas ASN	46,33 Nilai	50,00 Nilai	50,50 Nilai	51,00 Nilai	51,50 Nilai	51,50 Nilai	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	Dinas Kesehatan
Nilai IKM Perangkat Daerah	80,50 Nilai	83,00 Nilai	83,82 Nilai	83,82 Nilai	83,82 Nilai	83,82 Nilai	

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	2024	2025	2026		
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50,00 Nilai	50,50 Nilai	51,00 Nilai	51,50 Nilai	51,50 Nilai	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N/A Nilai	71 Nilai	74,5 Nilai	78 Nilai	81 Nilai	81 Nilai	Dinas Komunikasi dan Informatika
Nilai IKM Perangkat Daerah	N/A Nilai	76,61 Nilai	80,61 Nilai	84,61 Nilai	88,31 Nilai	88,31 Nilai	
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50 Nilai	50,50 Nilai	51 Nilai	51,50 Nilai	51,50 Nilai	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	Dinas Lingkungan Hidup
Nilai IKM Perangkat Daerah	N/A Nilai	76,65 Nilai	77,15 Nilai	77,65 Nilai	78,15 Nilai	78,15 Nilai	
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	43 Nilai	45 Nilai	48 Nilai	50 Nilai	50 Nilai	
Nilai SAKIP Perangkat daerah	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	Dinas Pangan dan Pertanian
Nilai IKM Perangkat Daerah	80,4 Nilai	80,5 Nilai	80,5 Nilai	81 Nilai	81 Nilai	81 Nilai	
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	45 Nilai	46 Nilai	48 Nilai	50 Nilai	50 Nilai	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Nilai IKM Perangkat Daerah	N/A Nilai	70 Nilai	72,5 Nilai	75 Nilai	77,5 Nilai	77,5 Nilai	
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50 Nilai	50,50 Nilai	51 Nilai	51,50 Nilai	51,50 Nilai	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N/A Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Nilai IKM Perangkat Daerah	N/A Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50 Nilai	50,5 Nilai	51 Nilai	51,5 Nilai	51,5 Nilai	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Nilai IKM Perangkat Daerah	N/A Nilai	80 Nilai	81 Nilai	82 Nilai	83 Nilai	83 Nilai	
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50,0 Nilai	50,2 Nilai	50,4 Nilai	50,6 Nilai	50,6 Nilai	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	Dinas Pendidikan
Nilai IKM Perangkat Daerah	N/A Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50 Nilai	50,5 Nilai	51 Nilai	51,5 Nilai	51,5 Nilai	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N/A Nilai	60,73 (B) Nilai	60,75 (B) Nilai	60,78 (B) Nilai	60,8 (B) Nilai	60,8 (B) Nilai	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Nilai IKM Perangkat daerah	N/A Nilai	78 Nilai	78,25 Nilai	78,5 Nilai	78,75 Nilai	78,75 Nilai	
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50 Nilai	50,25 Nilai	50,5 Nilai	50,75 Nilai	50,75 Nilai	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	Dinas Perhubungan
Nilai IKM Perangkat daerah	N/A Nilai	76 Nilai	76,5 Nilai	77 Nilai	77,5 Nilai	77,5 Nilai	
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50 Nilai	50,50 Nilai	51 Nilai	51,50 Nilai	51,50 Nilai	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	A Nilai	A Nilai	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Nilai IKM Perangkat Daerah	N/A Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50 Nilai	50 Nilai	50 Nilai	50 Nilai	50 Nilai	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N/A Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	Dinas Sosial
Nilai IKM Perangkat Daerah	N/A Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50 Nilai	50,5 Nilai	51 Nilai	51,5 Nilai	51,5 Nilai	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	Dinas Tenaga Kerja
Nilai IKM Perangkat daerah	86 nilai	86 nilai	86 nilai	86 nilai	86 nilai	86 nilai	
Indeks Profesionalitas ASN	N/A nilai	50,00 nilai	50,50 nilai	51,00 nilai	51,50 nilai	51,50 nilai	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Inspektorat

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	2024	2025	2026		
Nilai IKM Perangkat Daerah	94,81 Nilai	95 Nilai	95,5 Nilai	96 Nilai	96,5 Nilai	96,5 Nilai	
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50,00 Nilai	50,50 Nilai	51,00 Nilai	51,50 Nilai	51,50 Nilai	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N/A Nilai	70 (BB) Nilai	71 (BB) Nilai	72 (BB) Nilai	73 (BB) Nilai	74 (BB) Nilai	Kecamatan Cimahi Selatan
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50,00 Nilai	50,50 Nilai	51,00 Nilai	51,50 Nilai	52,00 Nilai	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N/A Nilai	70 (BB) Nilai	71 (BB) Nilai	72 (BB) Nilai	73 (BB) Nilai	74 (BB) Nilai	Kecamatan Cimahi Tengah
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50,00 Nilai	50,50 Nilai	51,00 Nilai	51,50 Nilai	52,00 Nilai	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N/A Nilai	70 (BB) Nilai	71 (BB) Nilai	72 (BB) Nilai	73 (BB) Nilai	74 (BB) Nilai	Kecamatan Cimahi Utara
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50,00 Nilai	50,50 Nilai	51,00 Nilai	51,50 Nilai	52,00 Nilai	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	RSUD CIBABAT
Indeks Profesionalitas ASN	43,54 Nilai	50,00 Nilai	50,50 Nilai	51,00 Nilai	51,50 Nilai	51,50 Nilai	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Nilai IKM Perangkat Daerah	N/A Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50,00 Nilai	50,50 Nilai	51,00 Nilai	51,50 Nilai	51,50 Nilai	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	Sekretariat DPRD
Nilai IKM Perangkat Daerah	N/A Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50,00 Nilai	50,50 Nilai	51,00 Nilai	51,50 Nilai	51,50 Nilai	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	N/A Ha	0,68 Ha	0,68 Ha	0,68 Ha	0,68 Ha	0,68 Ha	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>							
Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Cimahi Selatan	88 persen	88 persen	89 persen	90 persen	91 persen	91 persen	Cimahi Selatan
Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Cimahi Tengah	91 persen	91 persen	91 persen	91 persen	91 persen	91 persen	Cimahi Tengah
Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Cimahi Utara	91 persen	91 persen	91 persen	91 persen	91 persen	91 persen	Kecamatan Cimahi Utara
Persentase non perizinan yang dilimpahkan ke kecamatan yang dilayani di Kecamatan Cimahi Selatan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Cimahi Selatan
Persentase non perizinan yang dilimpahkan ke kecamatan yang dilayani di Kecamatan Cimahi Tengah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Cimahi Tengah
Persentase non perizinan yang dilimpahkan ke kecamatan yang dilayani di Kecamatan Cimahi Utara	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Kecamatan Cimahi Utara
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>							

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	2024	2025	2026		
Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	30,00 persen	33,33 persen	50 persen	80 persen	100 persen	100 persen	Dinas Komunikasi dan Informatika
[ PROGRAM ] PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL							
Persentase Perangkat Daerah yang memiliki ketersediaan data statistik sesuai dengan prinsip satu data	27 persen	37 persen	47 persen	67 persen	87 persen	87 persen	Dinas Komunikasi dan Informatika
[ PROGRAM ] PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN							
Persentase hasil pengawasan	71 persen	82 persen	85 persen	88 persen	90 persen	90 persen	Inspektorat
[ PROGRAM ] PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI							
Level Kapabilitas APIP	2 level	3 level	3 level	3 level	3 level	3 level	Inspektorat
[ PROGRAM ] PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH							
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Kepegawaian)	79,00 Nilai	79,25 Nilai	79,50 Nilai	79,75 Nilai	80,00 Nilai	80,00 Nilai	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Persentase ASN yang dijatuhi hukuman disiplin	0,20 persen	0,20 persen	0,19 persen	0,18 persen	0,18 persen	0,18 persen	
Persentase ASN yang melaporkan SKP	78,30 persen	82,22 persen	83,23 persen	86,33 persen	90,64 persen	92,45 persen	
Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	7,50 persen	8,25 persen	9,08 persen	9,98 persen	10,98 persen	10,98 persen	
Persentase ASN yang mengikuti peningkatan kualifikasi pendidikan	2,08 persen	2,12 persen	2,16 persen	2,20 persen	2,25 persen	2,25 persen	
[ PROGRAM ] PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							
Indeks Kepuasan Masyarakat pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	84 Nilai	84 Nilai	84 Nilai	84 Nilai	84 Nilai	84 Nilai	Sekretariat Daerah
Persentase Kasus Hukum yang terfasilitasi	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
Persentase Kegiatan Agama dan Pendidikan yang Terlaksana	97 persen	97 persen	97 persen	97 persen	97 persen	97 persen	
Persentase Kegiatan bidang kesehatan P2KBP3A, Sosial, Kepemudaan dan Olahraga	71 persen	71 persen	71 persen	71 persen	71 persen	71 persen	

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	2024	2025	2026		
Persentase Pertanggungjawaban Dokumen Pemerintah Daerah yang Bernilai Baik	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
Persentase Produk Hukum Daerah yang terpublikasi	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
Persentase Produk Hukum yang Sesuai dengan Mekanisme Pembentukan Produk Hukum Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
Indeks Kepuasan Masyarakat Bagian Hukum	77 Nilai	77 Nilai	77 Nilai	77 Nilai	77 Nilai	77 Nilai	
Persentase terfasilitasinya bantuan hukum , penyusunan produk hukum sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah dan pendokumentasian produk hukum serta pengelolaan informasi hukum	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
Indeks Kepuasan Masyarakat Bagian Pemerintahan	77 Nilai	77 Nilai	77 Nilai	77 Nilai	77 Nilai	77 Nilai	
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>							
Persentase ASN yang memenuhi syarat Kompetensi dalam pelaksanaan tugas jabatan	10,11 persen	10,00 persen	10,15 persen	10,25 persen	10,35 persen	10,35 persen	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>							
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	Sekretariat Daerah
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50,00 Nilai	50,50 Nilai	51,00 Nilai	51,50 Nilai	51,50 Nilai	
Nilai IKM bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	78 Nilai	78 Nilai	78 Nilai	78 Nilai	78 Nilai	78 Nilai	
Nilai IKM pada Bagian Umum	80 Nilai	80 Nilai	80 Nilai	80 Nilai	80 Nilai	80 Nilai	
Persentase Kegiatan KDH dan WAKDH yang Terfasilitas dengan Baik	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
Persentase koordinasi dan Konsultasi yang difasilitasi	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
Persentase Penguatan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik dan Akuntabilitas	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	2024	2025	2026		
Persentase Penguatan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik dan Akuntabilitas	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
Persentase Penguatan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik dan Akuntabilitas	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>							
Nilai IKM bagian Administarsi Perekonomian	77 Nilai	77 Nilai	77 Nilai	77 Nilai	77 Nilai	77 Nilai	Sekretariat Daerah
Nilai IKM bagian Perekonomian dan SDA	77 Nilai	80 Nilai	81 Nilai	82 Nilai	83 Nilai	83 Nilai	
Nilai IKM pada Bagian Administrasi Pembangunan	77 Nilai	77 Nilai	77 Nilai	77 Nilai	77 Nilai	77 Nilai	
Nilai IKM pada bagian pengadaan barang dan jasa	79,05 Nilai	79,05 Nilai	79,05 Nilai	79,05 Nilai	79,05 Nilai	79,05 Nilai	
Persentase rancangan kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan yang diimplementasikan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
Persentase rancangan kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan yang diimplementasikan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
Persentase Rekomendasi terhadap Perusahaan Daerah yang ditindaklanjuti	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>							
Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	N/A persen	80 persen	85 persen	90 persen	95 persen	95 persen	
Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	2024	2025	2026		
Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	N/A persen	80 persen	85 persen	90 persen	95 persen	95 persen	
Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Perekonomian dan SDA	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Perekonomi dan SDA	N/A persen	80 persen	85 persen	90 persen	95 persen	95 persen	
[ PROGRAM ] PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH							
Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
Persentase capaian indikator program [ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	N/A persen	80 persen	85 persen	90 persen	95 persen	95 persen	
Persentase laporan Barang Milik Daerah (BMD) yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							
Persentase dokumen rencana anggaran yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Persentase laporan keuangan yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
[ PROGRAM ] PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL							
Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A Nilai	84,5 Nilai	85 Nilai	85,5 Nilai	86 Nilai	86 Nilai	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
[ PROGRAM ] PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA							
Jumlah destinasi yang terpromosikan	N/A lokasi	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	2 lokasi	11 lokasi	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL							
Jumlah Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola dengan sistem informasi penanaman modal	21 jenis	22 jenis	23 jenis	24 jenis	25 jenis	25 jenis	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	2024	2025	2026		
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH							
Persentase Peningkatan Target Pajak Daerah	13,18 persen	3 persen	3 persen	3 persen	3 persen	3 persen	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Persentase Realisasi Pajak Daerah	117,74 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					0 jenis		
Persentase IKM yang dikelola di dalam SIINAS	N/A persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL							
Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	N/A jenis	3 jenis	0 Jenis	0 Jenis	0 Jenis	3 jenis	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Jumlah Sub Sektor Ekraf yang difasilitasi HAKI	N/A jenis	3 jenis	0 Jenis	0 Jenis	0 Jenis	3 jenis	
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR							
Persentase kenaikan omset UKM IKM selama mengikuti pameran promosi	30 persen	30 persen	30 persen	30 persen	30 persen	30 persen	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL							
Jumlah dokumen pengembangan iklim penanaman modal	N/A dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	32 dokumen	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							
Persentase ASN yang Memenuhi Syarat Kompetensi dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan	10,11 persen	11 persen	11,11 persen	11,22 persen	11,33 persen	11,33 persen	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF							

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	2024	2025	2026		
Jumlah SDM sub sektor ekraf yang dibina	N/A orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	200 orang	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Jumlah SDM Kepariwisataaan yang dibina	N/A orang	80 orang	80 orang	80 orang	90 orang	330 Orang	
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA							
Persentase permohonan rekomendasi IUI kecil dan menengah yang dilayani	N/A persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL							
Jumlah Perusahaan yang Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	509 perusahaan	530 perusahaan	540 perusahaan	550 perusahaan	560 perusahaan	560 perusahaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI							
Persentase kenaikan omset UKM IKM selama mengikuti P3DN	30 persen	30 persen	30 persen	30 persen	30 persen	30 persen	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
[ PROGRAM ] PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA							
Jumlah daya tarik wisata yang terkelola dengan baik	N/A lokasi	3 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	9 lokasi	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
[ PROGRAM ] PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN							
Jumlah pasar rakyat/tradisional yang dikelola pemerintah sesuai dengan SNI	1 pasar	1 pasar	1 pasar	1 pasar	1 pasar	2 pasar	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
[ PROGRAM ] PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI							
Jumlah IKM yang Berdaya Saing	N/A IKM	100 IKM	120 IKM	140 IKM	160 IKM	160 IKM	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Jumlah Sentra Industri Pengolahan	2 Sentra	3 Sentra	3 Sentra	3 Sentra	4 Sentra	4 Sentra	
[ PROGRAM ] PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN							

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	2024	2025	2026		
Persentase permohonan rekomendasi tanda daftar gudang yang dilayani	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
[ PROGRAM ] PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL							
Persentase Potensi Investasi Daerah yang dipromosikan	N/A	2,43 persen	2,43 persen	2,43 persen	2,43 persen	9,72 persen	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
[ PROGRAM ] PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING							
Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
[ PROGRAM ] PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN							
Persentase UTTP yang ditera/tera ulang	55 persen	57 persen	59 persen	61 persen	65 persen	65 persen	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI							
Persentase Koperasi Aktif	29,74 persen	31 persen	33 persen	35 persen	37 persen	37 persen	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		jh					
Persentase kenaikan omset dan aset UMKM	16 persen	21 persen	26 persen	31 persen	36 persen	29 persen	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
[ PROGRAM ] PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN							
Persentase Koperasi yang mendapatkan fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan	11,15 persen	31,14 persen	40,13 persen	48,54 persen	56,42 persen	56,42 persen	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI							

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	2024	2025	2026		
Jumlah koperasi yang diawasi/diperiksa	150 Koperasi	25 Koperasi	25 Koperasi	25 Koperasi	25 Koperasi	250 Koperasi	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN							
Persentase Pangan segar yang aman dikonsumsi (%)	70 persen	70 persen	70 persen	70 persen	70 persen	70 persen	Dinas Pangan dan Pertanian
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA							
Jumlah produksi ikan konsumsi (ton)	278,9 ton	280 ton	290 ton	300 ton	310 ton	310 ton	Dinas Pangan dan Pertanian
Jumlah produksi ikan hias (dalam juta ekor)	2,312 juta ekor	2,35 juta ekor	2,375 juta ekor	2,38 juta ekor	2,4 juta ekor	2,4 juta ekor	
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER							
Persentase Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	N/A persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Dinas Pangan dan Pertanian
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN							
Persentase peningkatan jumlah ikan yang diolah menjadi produk hasil	1 persen	1 persen	2 persen	3 persen	4 persen	4 persen	Dinas Pangan dan Pertanian
[ PROGRAM ] PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI							
Persentase Koperasi Sehat	41,25 persen	30 persen	31 persen	32 persen	33 persen	33 persen	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)							
Persentase kenaikan omset dan aset UMKM	16 persen	21 persen	26 persen	31 persen	36 persen	29 persen	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
[ PROGRAM ] PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT							
Rata-rata ketersediaan Energi di kota Cimahi	2318 kkal/kap/hari & gr/kap/hari	2350 kkal/kap/hari & gr/kap/hari	2350 kkal/kap/hari & gr/kap/hari	2350 kkal/kap/hari & gr/kap/hari	2380 kkal/kap/hari & gr/kap/hari	'2380 kkal/kap/hari & gr/kap/hari	Dinas Pangan dan Pertanian
Rata-rata ketersediaanProtein di kota Cimahi	67,8 kkal/kap/hari & gr/kap/hari	67,9 kkal/kap/hari & gr/kap/hari	67,9 kkal/kap/hari & gr/kap/hari	67,9 kkal/kap/hari & gr/kap/hari	68 kkal/kap/hari & gr/kap/hari	68 kkal/kap/hari & gr/kap/hari	

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	2024	2025	2026		
Rata-rata Konsumsi Energi di Kota Cimahi	2093,9 kkal/kap/hari & gr/kap/hari	2100 kkal/kap/hari & gr/kap/hari	2100 kkal/kap/hari & gr/kap/hari	2100 kkal/kap/hari & gr/kap/hari	2100 kkal/kap/hari & gr/kap/hari	2100 kkal/kap/hari & gr/kap/hari	
Rata-rata Konsumsi Protein di Kota Cimahi	2093,9 kkal/kap/hari & gr/kap/hari	57 kkal/kap/hari & gr/kap/hari	57 kkal/kap/hari & gr/kap/hari	57 kkal/kap/hari & gr/kap/hari	57 kkal/kap/hari & gr/kap/hari	57 kkal/kap/hari & gr/kap/hari	
[ PROGRAM ] PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN							
Persentase prasarana pertanian yang disediakan dan dikembangkan	25 persen	30 persen	30 persen	30 persen	30 persen	30 persen	Dinas Pangan dan Pertanian
[ PROGRAM ] PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN							
Persentase koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana pendukung pertanian	N/A persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Dinas Pangan dan Pertanian
[ PROGRAM ] PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN							
Persentase jumlah kelompok tani yang naik kelas	10 persen	6 persen	6 persen	6 persen	6 persen	34 persen	Dinas Pangan dan Pertanian
[ PROGRAM ] PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN							
Persentase izin usaha pertanian yang dilayani	N/A persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Dinas Pangan dan Pertanian
[ PROGRAM ] PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL							
Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	34,19 persen	35 persen	37 persen	39 persen	41 persen	41 persen	Dinas Tenaga Kerja
[ PROGRAM ] PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA							
Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	14,08 persen	15 persen	15 persen	15 persen	15 persen	15 persen	Dinas Tenaga Kerja
[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI							
Persentase koordinasi pelaksanaan penempatan transmigrasi	N/A persen	100 persen	100 persen	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja
[ PROGRAM ] PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA							

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	2024	2025	2026		
jumlah tenaga kerja siap pakai yang disalurkan dan ditempatkan	1037 orang	1000 orang	1000 orang	1000 orang	1000 orang	1000 orang	Dinas Tenaga Kerja
[ PROGRAM ] PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA							
Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	N/A persen	90 persen	90 persen	90 persen	90 persen	90 persen	Dinas Tenaga Kerja
[ PROGRAM ] PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN							
Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan dasar rutilahu	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL							
Persentase LKS yang mendapatkan penguatan kelembagaan	65,38 persen	69,23 persen	76,92 persen	92,31 persen	100 persen	100 persen	Dinas Sosial
Persentase PPKS dan PSKS yang dididik, yang mendapatkan pelatihan dan bimbingan teknis	20 persen	20 persen	20 persen	20 persen	20 persen	20 persen	
[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)							
Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan fasilitas dasar untuk memulai usaha	N/A persen	5 persen	5 persen	5 persen	5 persen	20 persen	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
[ PROGRAM ] PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN							
Persentase kasus kerawanan pangan yang tertangani bagi masyarakat miskin	N/A persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Dinas Pangan dan Pertanian
[ PROGRAM ] PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL							
Persentase Pemutakhiran data DTKS, PPKS dan Bansos	20 persen	20 persen	20 persen	20 persen	20 persen	20 persen	Dinas Sosial
Persentase Anak terlantar yang tertangani	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
Persentase KPM dalam DTKS yang masuk program PBI JK APBN dan APBD	30 persen	32 persen	34 persen	36 persen	38 persen	38 persen	
Persentase KPM PKH yang graduasi	3,75 persen	4 persen	4,25 persen	4,5 persen	4,75 persen	4,75 persen	
Persentase PPKS dengan kategori terlantar yang mendapat jaminan sosial daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
[ PROGRAM ] PROGRAM REHABILITASI SOSIAL							

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	2024	2025	2026		
Persentase gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Dinas Sosial
Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	0 persen	
Persentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi hak dasarnya.	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)							
Persentase kapasitas sungai dan bangunan penampung air	96,90 persen	97,06 persen	97,06 persen	97,31 persen	97,31 persen	97,31 persen	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	
[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)							
Persentase penanggung jawab dan/atau kegiatan yang memenuhi ketaatannya terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Cimahi	50 persen	50 persen	50 persen	50 persen	50 persen	50 persen	Dinas Lingkungan Hidup
[ PROGRAM ] PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP							
Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Dinas Lingkungan Hidup
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN							
Persentase pengelolaan sampah	94 persen	99 persen	99 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Dinas Lingkungan Hidup
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL							
Persentase penanganan timbulan sampah	73 persen	72 persen	71 persen	70 persen	70 persen	70 persen	Dinas Lingkungan Hidup
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA							

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	2024	2025	2026		
DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)							
Persentase pelaku usaha yang memenuhi ketentuan teknis penyimpanan limbah B3	75 persen	55 persen	58 persen	60 persen	63 persen	63 persen	Dinas Lingkungan Hidup
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP							
Persentase dokumen analisa kualitas lingkungan yang dijadikan acuan	N/A persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Dinas Lingkungan Hidup
[ PROGRAM ] PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP							
Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang dipedomani	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Dinas Lingkungan Hidup
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH							
Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	80,55 persen	81,28 persen	81,81 persen	82,34 persen	83,02 persen	83,02 persen	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE							
Persentase luas genangan di daerah rawan genangan dan di daerah tidak rawan genangan	0,6 persen	0,57 persen	0,56 persen	0,56 persen	0,55 persen	0,55 persen	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM							
Persentase penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum	69,82 persen	68,59 persen	69,20 persen	71,02 persen	73,58 persen	73,58 persen	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN							
Persentase Tingkat Hunian	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Persentase Rumah Korban Bencana Yang dibangun/ Direhabilitasi	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	



Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	2024	2025	2026		
[ PROGRAM ] PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)							
Persentase sarana permukiman yang tersedia PSU penunjang fungsi hunian	N/A persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
[ PROGRAM ] PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH							
Persentase rumah layak huni di luar kawasan kumuh	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
[ PROGRAM ] PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN							
Persentase tingkat kemantapan jalan	94,87 persen	95,12 persen	95,37 persen	95,62 persen	96 persen	97 persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
[ PROGRAM ] PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)							
Persentase Titik Kemacetan Ruas Jalan Arteri Sekunder yang tertangani	50 persen	50 persen	64 persen	64 persen	64 persen	64 persen	Dinas Perhubungan
Persentase fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang	N/A persen	50 persen	55 persen	60 persen	65 persen	65 persen	
Persentase Kendaraan Wajib Uji yang Layak	83 persen	83 persen	86 persen	89 persen	92 persen	92 persen	
Rasio Konektivitas Kota	0,64 rasio	0,64 rasio	0,64 rasio	0,64 rasio	0,64 rasio	0,64 rasio	
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)							
Persentase luasan kehati Kota Cimahi yang dikelola	1,13 persen	1,14 persen	1,15 persen	1,16 persen	1,17 persen	1,17 persen	Dinas Lingkungan Hidup
[ PROGRAM ] PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH							
Persentase Penatagunaan tanah Aset Pemkot	N/A persen	25 persen	50 persen	75 persen	100 persen	100 persen	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG							
Persentase termanfaatnya tanah kosong sesuai dengan fungsinya	N/A persen	25 persen	50 persen	75 persen	100 persen	100 persen	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
[ PROGRAM ] PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG							
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	62 persen	62,2 persen	62,4 persen	62,6 persen	62,8 persen	62,8 persen	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RPD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	2024	2025	2026		
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>							
Persentase Peyelesaian ganti rugi dan santunan tanah yang di fasilitasi	N/A persen	25 persen	50 persen	75 persen	100 persen	100 persen	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>							
Persentase Penyelesaian Sengketa Yang difasilitasi	N/A persen	25 persen	50 persen	75 persen	100 persen	100 persen	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>							
Persentase Bangunan Gedung Negara dengan Kondisi Baik	<b>72,5 persen</b>	<b>73 persen</b>	<b>73,5 persen</b>	<b>74 persen</b>	<b>74,5 persen</b>	<b>74,5 persen</b>	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>							
Persentase jasa konstruksi tenaga terampil yang bersertifikasi	13,44 persen	14,86 persen	17,62 persen	19,16 persen	20,69 persen	20,69 persen	
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>							
Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Dinas Sosial
Persentase SDM relawan kebencanaan yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>							
Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Persentase Pelayanan informasi kebencanaan di kawasan rawan bencana	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
Persentase penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	

## **BAB IX**

### **PENUTUP**

RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026 merupakan dokumen yang berisi kerangka kebijakan perencanaan pembangunan untuk periode 4 (empat) tahun yang sekaligus merupakan penjabaran dari visi dan misi serta prioritas pembangunan Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Penyusunan dokumen ini berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005-2025 untuk periode terakhir, yaitu Tahap Pencapaian serta RTRW Kota Cimahi Tahun 2012-2032. Selain itu, dokumen ini juga diselaraskan dengan target indikator makro dan prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024, hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022, Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional, serta regulasi yang berlaku.

Dalam rangka pelaksanaan RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026, perlu ditetapkan beberapa kaidah sebagai berikut :

1. RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026. Oleh karena itu, seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi berkewajiban untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah setiap tahun;
2. Penjabaran RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026 dilakukan melalui penyusunan RKPD Kota Cimahi setiap tahun sampai dengan RKPD Tahun 2026;
3. Evaluasi hasil pelaksanaan dari RPD Kota Cimahi 2023-2026 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun. Kinerja pembangunan daerah akan diukur berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan di dalam dokumen RPD ini;
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi melaksanakan pengendalian dan evaluasi

terhadap hasil pelaksanaan RPD dan RKPD Kota Cimahi secara periodik;

5. Plt. Wali Kota Cimahi wajib menyebarluaskan Peraturan Wali Kota tentang RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026 kepada masyarakat;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Wali Kota tentang RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026; dan
7. Apabila dalam periode pelaksanaan RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026 terjadi kondisi dan peristiwa yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah Kota Cimahi, maka konsepsi strategis yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya dikonsultasikan dengan DPRD Kota Cimahi untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

Keberhasilan implementasi RPD ini ditentukan oleh peran seluruh pilar *good governance*, yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Oleh karena itu, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan harus berkontribusi dalam menjaga konsistensi antara RPD Kota Cimahi dengan dokumen perencanaan lima tahunan dan tahunan Perangkat Daerah agar perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

**Plt. WALI KOTA CIMAHI,**



**NGATIYANA**

Diundangkan di Cimahi  
pada tanggal 01 Juli 2022

**SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,**

**DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN**

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2022 NOMOR 659